SEJARAH NASIONAL INDONESIA

Sartono Kartodirdjo
Marwati Djoened Poesponegoro
Nugroho Notosusanto

V

ektorat
ayaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1976

SEJARAH NASIONAL INDONESIA

SEJARAH NASIONAL INDONESIA

Sartono Kartodirdjo
Marwati Djoened Poesponegoro
Nugroho Notosusanto

V

Edisi ke-2

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1976

PERPUSTAKAAN
DIREKTORAT SEJARAH DAN PURBAKALA
NO. INDUK
TGL.

Sejarah Nasional Indonesia

Jilid I Jaman Prasejarah di Indonesia
Jilid II Jaman Kuno (Awal M. – 1600 M.).
Jilid III Jaman Pertumbuhan dan Perkembangan Kerajaan-Kerajaan Islam di Indonesia (± 1600 ± 1800)
Jilid IV Abad Kesembilanbelas (± 1800 – 1900)
Jilid V Jaman Kebangkitan Nasional dan Masa Akhir Hindia Belanda (± 1900 – 1942).
Jilid VI Jaman Jepang dan Jaman Republik Indonesia (1942 – sekarang

Perpustakaan
Direktorat Sejarah
dan
Purbakala

SEJARAH NASIONAL INDONESIA

V

JAMAN KEBANGKITAN NASIONAL DAN MASA AKHIR HINDIA BELANDA

Editor :

Yusmar Basri

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
1976

P R A K A T A.

Jilid V dari Buku Sejarah Nasional ini memuat satu periode dari Sejarah Nasional Indonesia yakni periode Pergerakan Nasional. Periode ini merupakan zaman yang amat penting dalam sejarah perjuangan bangsa, di mana kaum terpelajar Indonesia sebagai pemimpin-pemimpin Indonesia baik yang tergabung dalam partai politik maupun organisasi massa berjuang untuk meniadakan diskriminasi politik dan sosial-budaya serta membulatkan cita-cita kebangsaan dalam rangka mengantarkan Rakyat Indonesia ke gerbang Kemerdekaan. Adalah tidak mudah untuk menggambarkan semua kegiatan pergerakan rakyat Indonesia untuk melepaskan diri dari belenggu penjajahan kolonialis Belanda, bila diingat terbatasnya waktu dan riset yang diperlukan untuk menghasilkan buku ini.

Berdasarkan bahan yang diperoleh dari Prof.Dr.Sartono Kartodirdjo, Dr.Taufik Abdullah dan Drs.Abdurrachman Surjomihardjo di samping yang kami kumpulkan sendiri, diusahakan untuk menghasilkan buku Jilid V ini sesuai dengan pandangan Indonesia-centris. Disadari bahwa hasil yang dicapai belum sebagaimana yang diharapkan. Masih banyak hal-hal yang berhubungan dengan periode ini belum tercakup.

Akhirnya ke pada semua fihak yang membantu hingga terbitnya buku ini kami ucapkan terimakasih. Diharapkan agar buku ini dapat berfaedah bagi kita semuanya.

Jakarta, 1975 **Yusmar Basri.**

PRAKATA UNTUK CETAKAN KEDUA

Edisi kedua buku ini tidak mengalami perubahan isi, kecuali perbaikan salah cetak dan bibliografi.
Terimakasih.

Jakarta, 1976 **Yusmar Basri**

DAFTAR ISI

Halaman

BAB I

POLITIK KOLONIAL BELANDA DAN TRANSFORMASI POLITIK

A. DARI VOC KE PEMERINTAH BELANDA

1. Sistim Tanam-paksa 1
2. Politik Etis 14
3. Gagasan-gagasan Baru Mengenai Fungsi Jajahan 33

B. PERKEMBANGAN POLITIK KESEJAHTERAAN, 1900 – 1918

1. Kemerosotan Politik Etis Dan Politik Asosiasi 58
2. Politik Konservatif Dan Politik Progresif 68
3. Politik Sistim Barat – Timur Dan Politik Terhadap Islam 73
4. Kegagalan Politik Etis 78

C. POLITIK REAKSIONER, 1918 – 1930

1. Janji Van Limburg Stirum 80
2. Politik Penindasan 82

D. DASAWARSA TERAKHIR HINDIA BELANDA (1930 – 1942)

1. Dalam Bayang-bayang Depresi Ekonomi Dunia 86
2. Meningkatnya Politik Reaksioner 89
3. Frustrasi Pada Pihak Pergerakan Nasional 92
4. Politik Non-akulturatif 97

BAB II

STRUKTUR SOSIAL

A. STRUKTUR SOSIAL – EKONOMIS

1. Pertumbuhan Penduduk 99

2. Kepadatan penduduk dan gejala sosial-ekonomis 104
3. Pelebaran diferensiasi kerja 112
4. Migrasi intern dan extern 116

B. PENYEBARAN PENGAJARAN DAN MOBILITAS SOSIAL

1. Pendahuluan 124
2. Pertumbuhan Sekolah Pemerintah Dan Sekolah Yang Bersubsidi 128
3. Sekolah swasta yang tak bersubsidi 141
4. Latarbelakang sosial dari murid-murid sekolah pemerintah 145
5. Sekolah, kesempatan kerja dan mobilitas sosial 149

C. PERALIHAN STATUS SOSIAL

1. Pendahuluan 154
2. Pelebaran Birokrasi Dan Indonesianisasi Dalam Kepegawaian 158
3. Status Sosial : Lingkungan Supra-desa 163

BAB III

PERGERAKAN NASIONAL

A. AWAL PERKEMBANGAN

1. Boedi Oetomo 181
2. Sarekat Islam 187
3. Indische Partij 189
4. Gerakan Pemuda 194

B. MASA RADIKAL

1. Perhimpunan Indonesia 199
2. Partai Komunis Indonesia 202
3. Partai Nasional Indonesia 214

C. MASA BERTAHAN

1. Fraksi Nasional 222
2. Petisi Sutardjo 225
3. Gabungan Politik Indonesia 235

BAB IV

KOMUNIKASI SOSIAL DAN EDUKASI

A. MENDIDIK BANGSA SENDIRI

1. Pendidikan Wanita 241
2. Taman Siswa 248
3. Sekolah-sekolah Sarekat Islam 261
4. Ksatrian Instituut 267
5. Ruang Pendidik INS – Kayutanam 273
6. Perguruan Rakyat 278

B. INDONESIA DAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI IDENTITAS BANGSA

1. Perkembangan Bahasa Indonesia 283
2. Indonesia: Identitas Bangsa 288

C. PERKEMBANGAN PERS INDONESIA

1. Perkembangan Awal : Pers Daerah Dan Bahasa Melayu 294
2. Pers Pembawa Suara Organisasi Politik 305
3. Sebuah Pandangan Profesionil 312
4. Masa Akhir Hindia Belanda 314

BIBLIOGRAFI 319

BAB I

POLITIK KOLONIAL BELANDA DAN TRANSFORMASI POLITIK

A. DARI VOC KE PEMERINTAH BELANDA

1. Sistim Tanam-paksa

Pada pergantian abad secara resmi pemerintah Indonesia pindah dari tangan VOC ke tangan pemerintah Belanda. Setelah pada tahun 1795 ijin (oktroi)-nya ditiadakan pada tahun 1798 VOC dibubarkan dengan saldo kerugian sebesar 134,7 juta *gulden*.

Kemunduran serta kebangkrutan VOC yang telah berjalan sejak awal abad 18 disebabkan oleh pelbagai faktor, antara lain pembukuan yang curang, pegawai yang tidak cakap dan korup, hutang besar, lagi pula sistim monopolinya serta sistim paksanya dalam pengumpulan bahan-bahan/hasil tanaman penduduk menimbulkan kemerosotan moril baik para penguasa maupun dari penduduk yang sangat menderita dalam sistim paksaan itu. Perlu ditambahkan bahwa perang Belanda dengan Inggris untuk merebutkan hegemoni perdagangan mengakibatkan kerugian besar sekali sehingga mempercepat kebangkrutan VOC.

Kepindahan tampuk pemerintahan ke pemerintah Belanda tidak dapat diharapkan membawa perbaikan karena pemerintah Belanda menghadapi perang-perang yang dilancarkan oleh negara-negara besar tetangganya. Pada waktu negeri Belanda dikuasai oleh pemerintah boneka dari kekaisaran Perancis di bawah kaisar Napoleon, Inggris mendapat kesempatan meluaskan daerah jajahannya dengan merebut jajahan Belanda. Dalam masa antara 1800 dan 1816, waktu Indonesia dikembalikan kepada Belanda, tidak ada perubahan sistim pemerintahan yang berarti; sistim dagang tetap dipertahankan dengan penyerahan-paksa serta kontingen seperti yang telah dijalankan VOC selama beberapa abad dan ternyata cara eksploitasi yang membuat daerah jajahan produktif.

Sementara itu pergolakan di Eropa sebagai akibat dari Revolusi Perancis juga meluaskan pengaruhnya terutama dalam bentuk gagasan serta cita-cita liberal. Kaum liberal dikalangan

pemerintah Belanda, antara lain yang mempunyai pembicaranya Dirk van Hogendorp melancarkan gagasan baru dalam menjalankan politik kolonial, yaitu yang didasarkan atas kebebasan dan kesejahteraan umum dari penduduk. Mereka mengusulkan pemerintahan langsung serta sistim pajak. Pertentangan timbul antara kaum progresif yang menganjurkan politik liberal dengan dasar humanitarisme dengan kaum konservatif yang mempertahankan sistim dagang dari politik VOC . Dalam pertentangan itu akhirnya faktor yang menentukan yalah keadaan di negeri Belanda sendiri. Karena perang yang dialami secara berturut-turut telah membawa kemunduran perdagangannya karenanya, keadaan ekonomi negeri Belanda sangat menyedihkan. Tambahan lagi sebagai negeri pertanian dimana industri masih terbelakang, fungsi dari negeri jajahannya tidak lain darinya sebagai penghasil hasil tanaman yang dapat dijual dipasaran Eropa. Sementara itu Inggris merupakan saingan yang kuat karena dengan kemajuan industrinya dapat membanjiri daerah-daerah jajahannya dengan barang-barang industri itu.

Politik kolonial sejak 1800 sampai kira-kira 1870 terombang-ambing antara dua gagasan, sistim dagang dan sistim pajak. Kenyataan dari kondisi negeri induk pada satu pihak dan situasi negeri jajahan pada pihak lain mendorong penguasa kolonial kepada politik kolonial konservatif yang menguntungkan serta yang menurut keadaan mungkin dilaksanakan. Dalam perkembangan selanjutnya sejajar dengan kemajuan industri negeri Belanda serta bersamaan dengan kemenangan kaum liberal, secara lambat laun tokoh-tokoh seperti Daendels dan Raffles dapat diterangkan tidak lain karena idealisme mereka yang memperjuangkan kebebasan perseorangan, milik tanah, kebebasan bercocok-tanam, berdagang, bekerja menggunakan hasil tanamannya, kepastian hukum, dan peradilan yang baik, bertentangan dengan keadaan masyarakat yang sangat feodalistis. Daendels (1808 – 1811) sebagai seorang revolusioner dan sangat mendukung perubahan-perubahan liberal, bercita-cita untuk memperbaiki nasib rakyat dan memajukan pertanian dan perdagangan. Lain daripada itu Daendels juga bertindak untuk mempertahankan pulau Jawa dari serangan Inggris.

Sebagai langkah yang sangat luas pengaruhnya, Daendels melakukan perombakan sistim pemerintahan secara radikal. Diletakkan dasar-dasar pemerintahan menurut sistim Barat.

Pemerintahan dipusatkan, Jawa dibagi atas daerah-daerah – *prefectuur* – yang dikepalai oleh seorang prefek yang langsung ada dibawah perintah Wali negara. Pengadilan pribumi diperluas dan diperbaharui, para bupati diberi kedudukan sebagai pegawai pemerintah meskipun masih mempunyai kekuasaan feodal. Kesultanan Banten dan Kesultanan Cirebon dijadikan daerah gubernemen/pemerintah; pelbagai upacara di istana Surakarta dan Yogyakarta disederhanakan. Secara tegas Daendels memberantas kericuhan-kericuhan yang terjadi dalam soal pemungutan kontingen dan penyerahan-paksa dan soal kerja-paksa. Usaha Daendels dalam perombakan sistim feodal gagal oleh karena kepentingan pemerintahnya untuk mempertahankan pulau Jawa terpaksa mengadakan pengerahan tenaga secara besar-besaran dan menurut pola tradisionil yang ada pada awal pemerintahannya sangat ditentangnya.

Betapapun giatnya Daendels membangun sistim pertahanan di Jawa, namun tidak lama sesudah kepergiannya, Jawa jatuh ketangan Inggris dan menjadi bagian dari daerah jajahannya India.

Thomas Stamford Raffles (1811 – 1816) diangkat sebagai Letnan Gubernur Jendral untuk mewakili raja muda Lord Minto. Seperti Daendels, Raffles mempunyai keyakinan akan kebaikan sistim pemerintahan Barat. Hendak dihapuskannya penyerahan paksa dan jasa-jasa – perseorangan, dan diadakan kebebasan bercocoktanam dan berdagang. Berhubungan erat dengan ini juga diusahakannya untuk membatasi kekuasaan para bupati hanya sebagai pegawai dalam arti Barat dan sebagai pemungut pajak. Sebagai pembaharuan besar yang dilakukan yalah pemungutan pajak - tanah.Menurut peraturannya dari hasil semua penanaman sawah dipungut 1/5, 2/5 atau 1/3 dari hasil panen besar (bruto) dalam bentuk uang atau beras. Pemungutan dilakukan secara perseorangan. Dalam pelaksanaannya sistim ini mengalami bermacam-macam kesulitan, antara lain karena belum ada pengukuran tanah yang tepat, lagipula tidak diperhitungkan hak-milik atas tanah seperti yang berlaku menurut adat. Pemungutan terpaksa dilakukan lewat/melalui pegawai-pegawai yang korup dan bertindak secara sewenang-wenang. Sebab pokok yalah bahwa ekonomi desa belum memungkinkan petani memperoleh uang sebagai ganti dari hasilbuminya.. Menurut kenyataannya perkembangan sedemikian sehingga baru lebih kurang 100 tahun

kemudian sistim pajak-tanah itu dapat dilaksanakan. Pengembalian Jawa/Indonesia kepada Belanda pada tahun 1816 menghadapkan pemerintah Belanda kepada persoalan sistim yang dipergunakan agar daerah jajahan memberi keuntungan sebanyak-banyaknya kepada negeri induknya. Masa sampai 1830 diliputi oleh pertentangan-pertentangan antara kaum liberal dan konservatif,[1] yang pertama mempertahankan bahwa tujuan itu dapat dicapai dengan sistim perusahaan kapitalistis Barat sedang yang kedua condong untuk menjalankan sistim pemungutan hasil tanaman. Kaum liberal menolak sistim pemerintahan yang menerima hasil tanaman sebagai pajak atau pungutan paksa, karena hal itu dapat diserahkan kepada bidang perdagangan. Kekuatan politik kolonial Inggris dipakai sebagai contoh oleh mereka tanpa mengingat kenyataan bahwa negeri Belanda sangat lemah ekonominya. Kondisi ini yang menimbulkan keragu-raguan pada kaum konservatif terhadap prinsip liberal, *laissez-fair, laissez-passer.* Para Komisaris Jenderal (1818 – 1819), Gubernur Jenderal Van der Capellen (1819 – 1826) dan Du Bus de Gisignies yang berniat melakukan politik yang melindungi hak-hak anak pribumi serta memperbaiki nasibnya terpaksa meneruskan politik exploitasi untuk memberi keuntungan dari daerah jajahan untuk negeri induk, sokongan keuangan yang diharapkan.

Dengan tidak melepaskan tujuan pokok politik kolonial yalah exploitasi daerah jajahan bagi negeri induk, mereka mencari cara-cara bagaimana prinsip kebebasan masih dapat dilaksanakan. Komisaris Jendral dan van der Capellen menjalankan politik-perlindungan rakyat dan tidak semata-mata menjalankan politik (non intenvensi) yang akan merugikan masyarakat pribumi sebagai pihak yang lemah. Perusahaan-perusahaan swasta Barat tidak dihalang-halangi atau dibatasi usahanya selama tidak membahayakan/mengancam kehidupan penduduk. Hak-hak milik yang tidak terbatas bagi pengusaha Barat dan sistim pungutan paksa dari VOC ditolaknya. Politik Komisaris Jenderal terhadap pertanian penduduk pribumi ternyata dualistis. Pada satu pihak masih dipertahankan sistim pungutan hasil tanaman lewat para pengusaha pribumi dengan pengawasan yang lebih ketat, sehingga hasil untuk pasaran terjamin tanpa membiarkan penduduk ditekan oleh penguasa-penguasa. Pada pihak lain pengusaha Barat

1 Lihat D.W. Welderen-Rengers, *The Failure of a Liberal Colonial Policy, Netherlands East Indies, 1816-1830.* The Hague, 1974, hal.132-152.

diberi keleluasaan untuk membuka perkebunan dan perusahaan pertaniannya. Berbeda dengan Raffles, mereka masih mempertahankan kedudukan para bupati sebagai penguasa feodal dan tidak karena semata-mata sebagai pegawai pemerintah kolonial. Kegagalan Raffles dalam memasukkan sistim pajak-tanah terletak pada peranan yang hendak diberikan kepada perseorangan dalam sistim itu, Komisaris Jenderal mempertahankan desa sebagai kesatuan dan mengggunakan para penguasa sebagai pihak yang bertanggungjawab atas pemungutan hasil.

Masalah pembukuan perusahaan Barat menyangkut masalah kebebasan dan prinsip ekonomi liberal pada satu pihak dan masalah perlindungan hak-hak rakyat terhadap exploitasi dari pihak yang ekonomis kuat. Yang menjadi pokok persoalan dalam hal ini yalah :

(1) hak penduduk atas *tanah* yang termasuk hak dari desanya.
(2) pengerahan *tenaga* dari penduduk diluar kebiasaan tradisionil.

Oleh karena pembukaan (penyelenggaraan) perusahaan Barat kurang mengetahui atau tidak mengindahkan hukum adat yang berlaku, timbullah kegelisahan dan kerusuhan-kerusuhan antara lain di Cirebon pada tahun 1816, di mana cara-cara pengusaha dirasakan sangat menekan. Para Komisaris Jenderal, Elout dan Muntinghe melihat bahaya bagi penduduk desa serta tenaganya di daerah-daerah berpenduduk padat, dimana usahawan-usahawan Barat membuka perusahaannya, yang akan merusak hak-hak milik penduduk serta memeras tenaga rakyat itu.

Bagaimana prinsip-prinsip liberal dapat dijalankan tanpa melanggar hak-hak penduduk ? Pemecahan persoalan ini sebelum 1830 dan sesudahnya tidak terlepas dari kepentingan pokok dari pemerintah kolonial, yalah exploitasi daerah jajahan untuk memberikan hasil kepada negeri induk. Dalam hubungan ini gagasan liberal merupakan cita-cita yang dapat mengurangi kecenderungan untuk memakai sistim exploitasi cara VOC meskipun pelaksanaannya baru benar-benar terwujud pada tahun 1870. Proses yang amat lambat ini tidak lain disebabkan karena situasi ekonomis negeri induk dan kondisi masyarakat pribumi sendiri.

Politik van der Capellen berkisar sekitar masalah penggunaan tanah bagi pengusaha-pengusaha Barat. Apakah van der

Capellen menentang semua jenis perusahaan Barat atau hanya yang merugikan masyarakat pribumi? Untuk menjamin hak pribumi maka tindakan penting yang dilakukan yalah menghapuskan sewa tanah ditanah kerajaan pada 1823, sedangkan penghentian penyewaan telah dilakukan sejak 1821. Akibat dari peraturan ini tidak hanya menyangkut para pengusaha perkebunan, tetapi juga melibatkan para bangsawan istana yang telah menerima pembayaran lebih dahulu untuk jangka waktu yang cukup lama. Kegelisahan dikalangan bangsawan itu membuat suasana semakin buruk sehingga semakin kuat kecenderungan untuk memberontak. Tambahan pula, sistim penggadaian pelbagai *tol* kepada Cina sangat memeras rakyat dan mengeruhkan suasana pula. Kedua golongan menjadi pendukung kuat dari gerakan Pangeran Diponegoro yang mulai melancarkan serangannya terhadap Belanda pada tahun 1825. Du Bus de Gisignies dengan dibantu oleh van Hogendorp menempuh politik terhadap tanah dan tenaga yang berlawanan, dengan politik yang dilakukan oleh Komisaris Jenderal dan van der Capellen. Kecuali desa-desa yang telah berdiri pada waktu peraturan dijalankan (1816), soal penyewaan tanah bagi pengusaha Barat tidak boleh dibatasi. Oleh van Hogendorp disadari kenyataan bahwa tanah yang belum dibuka untuk pertanian hanya dapat digunakan untuk perkebunan apabila terletak dekat desa sehingga terjamin akan memperoleh tenaga kerjanya. Tenaga kerja sudah diperoleh selama penduduk desa ingin tetap menjadi petani yang bebas. Apabila tanah persediaan desa dipakai untuk pengusaha asing, penduduk desa yang semakin bertambah banyak terpaksa mencari pekerjaan pada perkebunan itu.

Politik van Hogendorp ini disangsikan apakah akan secara cepat dapat memberi hasil bagi negeri induk. Dipandang dari segi kepentingan rakyat, sistim ini mengabaikan samasekali hak-hak rakyat atas tanah dan tidak memberi perlindungan kepada mereka dalam mengadakan hubungan antara majikan-majikan Barat. Jadi sistim perusahaan kapitalistis Barat diharapkan akan memberi keuntungan tanpa memperhatikan atau memperhitungkan akibat-akibatnya bagi rakyat. Apakah akibat bagi rakyat, rupanya tidak dapat mempengaruhi politik kolonial pada waktu itu. Yang sangat menentukan yalah keadaan di negeri induk sendiri yang semakin memerlukan sumber-sumber kekayaan dari daerah jajahannya. Usul van den Bosch diajukan yang menyaran-

kan suatu sistim yang memberi keuntungan dengan jalan menggunakan jalan yang sesuai dengan adat-istiadat masyarakat pribumi. Selama periode antara 1816 dan 1830 penyusun politik kolonial Belanda mengalami kegagalan dalam mengeterapkan cita-cita liberal dalam hubungannya dengan daerah jajahan, tidak hanya karena kurang pengertiannya/perhatiannya terhadap masyarakat tradisionil di Jawa, tetapi juga karena tugas utamanya yalah menjalankan exploitasi daerah jajahan untuk memberi keuntungan bagi negeri induknya. Pelbagai jalan tengah mengecewakan hal terakhir ini, maka akhirnya apa yang disarankan sebagai sistim tanam-paksa oleh van den Bosch dapat dilaksanakan oleh karena memberi harapan yang paling baik untuk negeri induk.

Pada tahun 1830 keadaan, baik di Indonesia maupun di negeri Belanda, sangat memburuk. Hutang semakin besar untuk menutup biaya perang Belgia dan perang Diponegoro. Maka untuk menghindari kebangkrutan, Jawa diharapkan memberi hasil cukup untuk mengisi kekosongan kas itu. Van den Bosch hendak memusatkan politik kolonial pada produksi. Disadari bahwa negeri Belanda tidak mempunyai perdagangan, perkapalan dan pabrik pada waktu itu. Yang diperlukan yalah menggunakan tenaga rakyat untuk penanaman hasil2 yang dapat dijual di pasaran dunia tidak secara bebas tetapi dengan *sistim-paksa*, jadi bukan sistim penanaman bebas atau kolonisasi bagi bangsa Eropa.

Untuk keperluan mempertinggi produksi itu pribumi diharuskan membayar pajaknya dalam bentuk hasil yang dapat dijual sebagai export ke pasaran di negeri Belanda yang perlu dijadikan lagi pusat perdagangan dunia bagi hasil-hasil tropis. Kecuali itu industri di negeri Belanda perlu dihidupkan dan diperkembangkan sehingga hasilnya akan dilemparkan ke Indonesia: Pelayaran dan pengangkutan akan ada di tangan perkapalan Belanda sendiri. Sistim tanam-paksa yang diusulkan van den Bosch merupakan gabungan antara sistim Priyangan dan sistim pajak tanah. Setiap desa diharuskan menanam 1/5 dari tanahnya dengan jenis tanaman yang hasilnya dapat di-export dengan mendapat kebebasan bayar-pajak tanah.[2] Setiap kelebihan hasil tanaman dari

---

[2] Lihat Clive Day, *The policy and Administration of the Dutch in Java*, New York, 1904, hal. 249-250; dan periksa J.E. Stokvis, *Van Wingewest naar Zelfbestuur in Nederlandsch-Indie*, Amsterdam, 1912, hal. 88-95.

jumlah pajak yang harus dibayar dibayarkan kembali kepada desa. Kegagalan panen akan menjadi tanggungan pemerintah. Wajib tanaman-paksa dapat diganti dengan pencurahan tenaga untuk pengangkutan dan pekerjaan di pabrik.

Pada tahun 1831 van den Bosch memerintahkan penanaman nila, gula dan kopi. Sejak 1833 semua kopi wajib diserahkan kepada pemerintah, kelebihan hasil dan yang diwajibkan sebagai pajak harus dijual kepada pemerintah dengan harga yang ditentukan olehnya. Meskipun usaha-usaha swasta masih diijinkan berdiri, seperti Tanah Swasta, Konsesi, dan Hadiah-hadiah, namun Sistim Tanam-paksa berkembang sebagai usaha berskala besar sekali, dengan Pemerintah sebagai pengusaha dengan Nederlandsche Handels Maatschappij sebagai agen tunggal: Pulau Jawa menjadi suatu usaha negara yang besar !

Peraturan-peraturan Tanam-paksa dalam pelaksanaannya menimbulkan penyimpangan-penyimpangan yang memberatkan beban rakyat. Telah terjadi bahwa bagian yang ditanami untuk tanaman-paksa melebihi dari 1/5, umpamanya sampai 1/3 atau 1/2, kadang-kadang seluruh tanah desa itu. Pembayaran untuk setoran gula dibayar menurut apa yang dihasilkan pabrik dan tidak menurut jumlah tebu yang diserahkan. Banyak tenaga yang tidak dibayar. Kegagalan panen sering ditanggung oleh petani sendiri. Pekerjaan yang dilakukan di pabrik tiga kali lebih berat dari pekerjaan di sawah; jumlah pohon kopi diperbanyak secara sewenang-wenang, dari 250 sampai 1000, penanam kopi dikumpulkan dalam tempat konsentrasi; seringkali rakyat dipindahkan ke tempat-tempat yang jauh dari desanya; pekerjaan berat diperlukan untuk pengangkutan, mengolah hasil di pabrik, membuat jalan saluran air dan jembatan, kesemuanya tanpa upah.

Sementara itu hasilnya telah dapat mengisi kekurangan perbendaharaan negeri Belanda, memberi banyak keuntungan bagi usahawan, para pegawai menerima uang komisi banyak.

Karena tidak didasarkan atas pengetahuan serta pengalaman tentang penanaman kopi, telah terjadi bahwa selama lima tahun lebih kurang 2000 orang perlu menanam dan memelihara kebun-kebun kopi yang letaknya 28 mil dari tempat tinggalnya. Hasilnya ternyata hanya tiga pikul kopi seharga 36 gulden.

Di daerah Rembang pada suatu waktu 34.000 keluarga selama 8 bulan dalam satu tahun harus bekerja untuk tanam-

paksa dengan menerima upah hanya tiga duit sehari. Untuk keperluan penanaman tembakau, rakyat diharuskan menyerahkan balok, bambu, kayu untuk los-los tembakau.

1. Sistim yang dimaksudkan sebagai usaha persetujuan yang sukarela, pada kenyataannya menjadi suatu paksaan. Dengan pemberian prosenan kultur kepada para petugas, maka mereka berusaha keras mempertinggi produksi dengan menggunakan kekuasaannya. Dalam hubungan ini rakyat ditekan untuk menghasilkan sebanyak-banyaknya.
2. Jumlah orang yang dikerahkan untuk penanaman ini sangat besar, kira-kira meliputi 80.000 keluarga atau lebih kurang 4 juta orang; ini berarti bahwa kira-kira, terlepas dari penanaman kopi, 1/4 dari penduduk, dan 1/13 dari tanah bercocok-tanam terlibat dalam usaha itu.
3. Beberapa jenis tanaman seperti nila di daerah Priyangan. Di distrik Simpur semua orang lelaki dari beberapa desa dikerahkan selama 7 bulan untuk penanam nila, jauh dari rumahnya. Kecuali itu dari distrik itu dikerahkan 5000 orang laki-laki dengan 3000 kerbau selama 5 bulan untuk mengerjakan tanah bagi pabrik.
4. Dari penyelenggaraan tanam-paksa ternyata bahwa tanah yang dipakai untuk itu bebas dari pajak tanah akan tetapi orang-orangnya tetap kena pajak tanah, terbukti dari angka-angka jumlah pajak-tanah yang semakin meningkat sejak 1829.
5. Selisih antara pajak yang harus dibayar dengan nilai yang ditaksir dari hasil yang diserahkan, menurut peraturan harus dibayarkan kepada rakyat, akan tetapi dalam kenyataannya hanya sedikit sekali yang dibayarkan. Dari penanaman tebu, petani hanya mendapat upah menurut jumlah berat gula yang dihasilkan.

Beberapa kejadian seperti kelaparan di Demak (1848) dan Grobogan (1849) yang mengakibatkan kematian secara besar-besaran membuka mata pemerintah akan penderitaan rakyat yang diakibatkan oleh tanaman-paksa. Beberapa tokoh-tokoh yang mengenal keadaan di Indonesia mulai melancarkan gerakan untuk penghapusannya, antara lain Vitalis, Bosch dan van Hoevell. Penghapusan kebanyakan dari tanam-paksa dilakukan

sesudah tahun 1860; tanaman lada pada tahun 1862; nila, teh, kayu manis tahun 1865, tembakau tahun 1866.

Hasil dari sistim tanaman paksa ternyata membawa pelbagai keuntungan-keuntungan. Selama masa dari 1841 sampai 1863 diperoleh laba sebesar 461 juta, sehingga pelbagai hutang dapat dilunasi, kesulitan keuangan negeri Belanda dapat diatasi. Kecuali itu perkapalan dan perdagangan di Negeri Belanda dapat menempatkan Amsterdam sebagai pusat pasaran dunia untuk hasil-hasil tropis.

Industri tenun dapat dibangun secara lambat laun, antara lain untuk mengatasi aturan tarif yang memberi keuntungan kepada industri dan perdagangan Inggris. Dengan kerjasama dengan Nederlandsche Handels Maatschappij (NHM) export tenun Belanda meningkat dan pada tahun 1840 import di Indonesia sudah seharga 8.8 juta, lebih dari 10 kali dari impor pada tahun 1823.

Sesungguhnya penghapusan pelbagai jenis tanam-paksa agak terlambat kalau diingat bahwa kaum liberal mulai memegang tampuk pemerintahan sejak 1848. Hal ini dapat diterangkan bahwa kaum liberal sendiri enggan menghapuskan sistim yang ternyata banyak menghasilkan keuntungan.

Menurut UUD urusan jajahan dan termasuk pengawasan keuangannya masih ada di tangan mahkota sedang pemerintah setiap tahun wajib memberikan laporan kepadanya. Pada tahun 1854 dengan suatu Peraturan Pemerintah ditentukan bahwa pemerintahan dilakukan menurut Hukum dan dengan demikian secara resmi mengakhiri sistim menurut van den Bosch. Apabila secara resmi Tanam-Paksa telah dihapuskan, menurut kenyataannya politik exploitasi masih berjalan terus. Lazimnya politik itu disebut *Batig Slot politiek* yang dimaksud yalah surplus dari pajak yang dapat dibelanjakan/digunakan di Eropah.

Antara 1841 sampai 1863 ada keuntungan bersih 461 juta dan antara 1836 – 1866 ada 692 juta, antara 1867 dan 1877 ada 151 juta. Politik ekonomi yang dijalankan dari 1815 sampai 1870 yalah mengembangkan kekayaan Indonesia (Jawa) bagi keuntungan negeri Belanda. Politik yang dijalankan oleh Muntinghe, Du Bus (1826 – 1830) dan Van den Bosch (1830 – 1833) berpangkal pada gagasan bahwa pemerintah jajahan adalah suatu "perusahaan negara". Dengan menggunakan NHM, lalu produksi

kapitalis dan akhirnya sistim tanam-paksa. hendak dikuasai keadaan ekonomi di Indonesia. Kaum liberal menunjang politik *laissez-faire* karena berkeyakinan bahwa tanpa rencana dan pembatasan-pembatasan pada perusahaan dan perdagangan, maka perkembangan Jawa dan kepentingan Belanda akan mengalami kemajuan. Pertentangan politik tentang kebijaksanaan politik daerah jajahan sejak tanam-paksa secara resmi dihapuskan berkisar sekitar kebebasan berusaha. Sebagai akibat perkembangan perdagangan dan pelayaran, golongan liberal semakin tampil ke depan dalam gelanggang politik, kecuali penghapusan pelbagai tanam-paksa banyak perundang-undangan diputuskan. Peraturan Pemerintah 1854 menjadi perundang-undangan di Indonesia mulai dari Pengumuman Raja, tindakan mahkota, keputusan Gubernur Jenderal, juga peraturan mengatur jasa kerja paksa. tol. hutan dan tanah. (art. 57); *Comptabiliteits Wet* pada tahun 1864 yang mewajibkan agar anggaran belanja Indonesia disahkan oleh Parlemen.[3] Dengan demikian ada pengawasan dari/oleh Badan Legislatif di Nederland, suatu kemenangan besar bagi kaum liberal.

Masalah perkembangan perusahaan swasta sudah barang tentu menjadi pusat perhatian, terutama dalam menghadapi kondisi masyarakat Jawa dengan hukum adatnya dan hak-hak atas tanahnya. Menurut kaum liberal, baik kaum kapitalis maupun petani diberi kebebasan untuk menggunakan tanahnya dan mengubah tanah komunal menjadi tanah perseorangan. Maksudnya sudah jelas, bahwa undang-undang itu "menyediakan tanah dan tenaga bagi perusahaan kapitalis."

Sementara itu pemerintah masih menyelenggarakan beberapa tanaman paksa: kopi, gula dan lada. Di samping itu ada tanah-tanah partikelir, ada kurang dari 100 perkebunan swasta, kebanyakan kopi, ada pula perusahaan yang 'bebas' lebih kurang 150 jumlahnya; menghasillkan tembakau dan nila; di tanah kerajaan ada 150, untuk penanaman gula, tembakau, nila, ada juga kopi. Aksi terhadap Tanam-paksa mendapat perhatian umum secara luas antara lain setelah diketahui adanya *Indische millionen* (jutaan dari Indonesia) yang mengalir ke negeri Belanda selama sistim itu berjalan. Disadari bahwa sistim itu melukai kepentingan serta kebahagian pribumi. Politik perlindungan

3. Lihat C. Th. van Deventer, "Een Ereschuld", dalam *De Gid*, jilid 63, 1899.

menegaskan bahwa Gubernur-Jenderal perlu membela hak-hak pribumi dalam menggunakan *tanah* dan *tenaganya*. Kaum liberal menentang exploitasi oleh pemerintah dan ingin menggantikannya dengan inisiatif swasta. Untuk ini kondisi ekonomis perlu diciptakan, yalah dengan memberi kebebasan bekerja dan penggunaan tanahnya. Sistim yang dikehendaki oleh kaum liberal lain, tetapi tujuan tetap mengadakan exploitasi, jadi bukan *How to manage a colony'* but *'How to manage a colony for money'.*[4]

Untuk membuka Jawa (Indonesia) bagi perusahaan swasta dan modal swasta seluas-luasnya, pemerintah Belanda mengadakan peraturan yang pada satu pihak menjamin kepentingan kaum modal atau usahawan, dan pihak lain kepentingan serta hak-hak kaum pribumi. Perkembangan industri dan perdagangan di negeri Belanda telah mendorong kaum modal untuk menanam modalnya di Jawa. Tambahan pula hubungan antara Nederland dan Indonesia mulai lancar oleh karena Terusan Suez telah dibuka pada tahun 1869. Sebelum itu telah ada hubungan telegram (1856), pos (1862).

Undang-undang Agraria dari tahun 1870 menetapkan prinsip-prinsip dasar dari politik tanah. Pengusaha dapat menyewa tanah dari pemerintah untuk masa 75 tahun. Penduduk pribumi dijamin hak-hak miliknya atas tanah menurut hukum adat, lagi pula ada kemungkinan memperoleh hak-milik perseorangan atas tanah. Selanjutnya menurut peraturan agraris ditetapkan bahwa tanah yang bukan milik perorangan penduduk adalah tanah pemerintah (tanah *domein).* Tanah ini dibagi atas dua golongan:

(1) tanah domein yang bebas dari hak-hak pribumi;
(2) tanah domein yang meliputi tanah milik pribumi.

Tanah dapat disewakan oleh pemerintah kepada bangsa Belanda penduduk Indonesia atau Nederland atau perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indonesia.

Penyewaan tanah dari pribumi dapat dilakukan oleh kaum pengusaha dengan syarat-syarat tertentu:

(1) tanah yang dimiliki pribumi dapat disewa selama 5 tahun.
(2) tanah hak-milik pribumi dapat disewa untuk 30 tahun.
(3) semua kontrak harus didaftar.

---

[4] Periksa W.H.F. Mansvelt dalam "De Economische Geschiedenis van Indie in Vogelvlucht", dalam *Historische Opstellen*, 's-Gravenhage, hal. 14.

Konversi tanah yang dijalankan dalam politik kolonial yalah bermaksud untuk memberi hak-milik kepada penggarap tanah untuk dapat disewakan kepada pengusaha Eropa. Dengan demikian pengusaha itu terjamin akan memperoleh tanah, karena orang yang akan menyewa perlu mempunyai hak-milik yang jelas.

Sejak 1831 sampai 1877 *remise* atau keuntungan yang diperoleh dari Tanam-Paksa berjumlah 823 juta[5] Modal ini terutama digunakan di Nederland, antara lain untuk melunasi hutang sebesar 236 juta; untuk menurunkan pajak 115 juta, dan sebagian untuk membangun kereta api 153 juta, dan untuk memperbaiki bangunan pertahanan sebesar 146 juta.

Dengan berkobarnya Perang Aceh sejak 1874, Indonesia dibebani hutang sebesar 400 juta. Kemudian banyak dibangun bangunan dari pekerjaan-umum seperti jalan kereta-api (150 juta), irigasi (33 juta), pelabuhan (30 juta). Defisit ini menimbulkan persoalan budget bersama antara Belanda dan jajahan-jajahannya. Pinjaman untuk menutup defisit itu dibebankan pada anggaran belanja Indonesia meskipun pada masa sebelumnya sumbangan dari anggaran belanja ini kepada pengeluaran di negeri induk hanya dapat dibenarkan berdasarkan teori budget bersama.

Seperti diutarakan oleh seorang pembela kepentingan Indonesia, selama tahun-tahun makmur 1876 – 1877 dipertahankan kesatuan keuangan, yang berarti bahwa keuntungan dari Indonesia menjadi penghasilan negeri Belanda kemudian 'tahun-tahun kurus' sesudah perang Aceh diusulkan pemisahan keuangan dan pembayaran bunga pinjaman serta angsuran kembali porsekot-porsekot. Cara membenarkan politik *Batig Slot* ini didasarkan atas prinsip kesatuan politik yang dengan sendiri mengharuskan adanya kesatuan keuangan. Hanya para pengecam menegaskan bahwa kesatuan itu perlu/harus dibubarkan setelah masa baik berakhir. Diantara pengecam itu terdapat de Waal, van Dedem, van Kol, van den Berg, Schaepman, Bool, van Nunen, van Deventer. Van Dedem mengusulkan agar pemisahan baru dilakukan setelah ada perhitungan penghasilan dan pengluaran dari Indonesia. Kesatuan itu pada umumnya memang diakui sebagai tulang-punggung anggaran belanja kolonial. Politik mengelakkan beban itu dicap oleh van Kol sebagai politik immoril atau malahan dianggap sebagai perampokan yang tak mengenal malu.

[5] Lihat B.H.M. Vlekke, *Nusantara. A History of Indonesia.* The Hague, 1960, hal. 291; atau Clive Day, *op.cit.*, hal. 309.

De Waal memperhitungkan bahwa jumlah hutang 236 juta yang meliputi hutang VOC serta bunga-bunganya, dan pengeluaran pada masa sesudah 1800 yang dikeluarkan oleh Nederland untuk Indonesia. Sebaliknya hasil dari Indonesia antara 1815 – 1863 berjumlah 507½ juta. Menurut perhitungan van den Berg dari 236 juta paling banyak 96 juta menjadi beban Indonesia akan tetapi apa yang diambil oleh negeri Belanda sebegitu banyak sehingga pada tahun 1884 Indonesia masih berhak menerima 528 juta dari Nederland, atau apabila dihitung dengan bunga berganda menjadi 1585 juta.

Pada 1899 van Deventer dalam artikelnya dalam majalah *De Gids* menyebut jutaan yang dihasilkan oleh Indonesia sebagai *Een Eereschuld* suatu "Hutang Kehormatan".[6] Menurut van Deventer jumlah seluruhnya ada 823 juta, jumlah yang diperoleh sebelum 1867 masih dapat diperhitungkan sebagai bagian dari kesatuan finansiil. Tetapi setelah *Comptabiliteits wet* pada tahun 1867 ada pemisahan keuangan resmi sehingga yang perlu dikembalikan hasil yang dipungut sejak itu, sejumlah 187 juta.

Dengan timbulnya pemasalahan ini kita menginjak suatu fase baru dalam politik kolonial, yalah *politik Etis*.

2. *Politik Etis*

Disamping untung jutaan yang mengalir ke negeri Belanda, hasil apakah lainnya yang terwujudkan oleh perusahaan perkebunan swasta ?

Selama sistim Tanam-paksa dijalankan, tidak ada usaha untuk memperbaiki jalan-jalan kecuali dengan kerja-paksa. Pembangunan jalan kereta-api hendak diserahkan kepada pihak swasta. Baru pada tahun 1862 dibuat jalan kereta-api dari Semarang ke tanah kerajaan, kemudian pada tahun 1864 dari Jakarta ke Bogor, dan pada tahun 1875 dari Surabaya ke Malang oleh pemerintah sendiri.

Di Sumatra juga mulai dibuat jalan kereta api, pada tahun 1874 di Aceh; pada tahun 1883 di Sumatra Timur, dan pada tahun 1887 di Sumatra Barat. Pada akhir abad 19 di Jawa ada 1600 km dan di Sumatra ± 3500 km.

---

[6] Lihat C. Th. van Deventer, *loc.cit.*

Perpustakaan
Direktorat Sejarah
dan
Purbakala

Permulaan dinas pos disusun oleh Daendels yang berupa pos distrik dengan menggunakan kuda pos. Pada tahun 1862 didirikan dinas pos dalam negeri, 4 tahun kemudian pos keluar negeri. Pada tahun 1856 dibuka dinas telegram dalam negeri dan baru pada tahun 1850 dapat dibuat hubungan dengan Eropa. Pemerintah mengadakan dinas telegram mulai tahun 1898.

Selama bagian pertama abad 19 perkapalan Belanda sangat terbelakang. Penggunaan kapal-uap dimulai pada tahun 1859 oleh perusahaan De Vries dan 2 tahun kemudian sudah berjumlah 18 kapal yang berlayar di Indonesia. Dengan dibukanya terusan Suez, jumlah kapal-uap meningkat sehingga kapal-layar semakin terdesak. Pada tahun 1865 tidak ada (satu) sebuah kapal-uap sedang jumlah kapal-layar ada 3077. Pada tahun 1900 perbandingan menjadi 3445 dan 184. Perkapalan dikuasai Inggris yang memusatkan kegiatannya di Singapura sehingga bagi Belanda sukar menyainginya. Pada tahun 1891 pemerintah memberikan monopoli perkapalan kepada KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij). Pelabuhan Tanjung Priok mulai dibangun pada tahun 1872 dan selesai pada tahun 1893, pelabuhan Padang pada tahun itu juga mulai dibangun, sedang pelabuhan Belawan sejak tahun 1890. Pekerjaan untuk bangunan-bangunan umum, seperti jalan, jembatan, bangunan air, sebagian dilakukan dengan menggunakan kerja-paksa, dan sebagian dengan perongkosan dari keuangan pemerintah.

Dari tahun 1890 sampai 1893 dibangun bangunan air untuk daerah persawahan yang sangat luas dengan mengerahkan tenaga 300.000 kerja-harian oleh tenaga kerja-paksa. Biaya yang dipakai sebesar satu juta. Dalam masa Tanam-paksa telah dibuat bangunan irigasi di Panarukan, Cirebon, delta Brantas dan Demak. Pada tahun 1885 didirikan dinas irigasi untuk menyiapkan irigasi daerah persawahan di daerah gubernemen. Kemudian didirikan daerah-daerah irigasi, seperti Serayu pada tahun 1889. Daerah irigasi Demak meliputi 61.900 bau, Pekalongan 156.000 bau. Pengaruh irigasi pada hasil pertanian pada umumnya sangat baik.

Pada pemerintahan Komisaris-Jenderal, soal pendidikan diserahkan kepada para Bupati. Baru pada masa Tanam-paksa ada perhatian terhadap pendidikan para calon bagi dinas Pemerintah. Pada tahun 1848 disediakan anggaran belanja sebesar 25.000 gulden. Tanggungjawab untuk pendidikan pribumi secara tegas dijamin dalam Undang-undang tahun 1854. Sejak 1814 kaum

misionaris Katolik dan kemudian pada 1851 misionaris Protestan juga melakukan keaktifannya di Jawa terutama dalam bidang pengajaran. Pada tahun 1848 di setiap kabupaten didirikan sebuah sekolah setahun, kemudian menjadi dua dan pada tahun 1852 menjadi 15; sekolah guru dibuka pada tahun 1851 dan bersamaan dengan itu didirikan juga sebuah sekolah dokter Jawa.

Pada tahun 1864 sekolah Belanda juga dibuka untuk pribumi, lagipula diangkat seorang inspektur pendidikan pribumi. Kemudian pada tahun 1867 dengan adanya Departemen Pendidikan Agama dan Industri, pendidikan semakin maju, dan pada tahun 1882 di Jawa sudah terdapat kira-kira 300 sekolah pribumi dan 400 di daerah luar Jawa, dengan jumlah murid 40.000 orang. Kemunduran dialami ketika ada krisis ekonomi pada tahun 1884 sehingga jumlah turun menjadi hanya 654 sekolah.

Pada akhir abad 19 ada dua macam sekolah, yalah sekolah angka I yang memberi pendidikan selama 5 tahun, dan sekolah angka II hanya sekedar memberi pelajaran menulis membaca dan berhitung. Pelajaran sekolah angka I ternyata tidak cukup untuk menempuh ujian *kleinambtenaar* (KA = pegawai rendah); untuk keperluan ujian itu diperlukan pelajaran bahasa Belanda yang diberikan hanya pada sekolah Eropa. Pada hal hanya sejumlah kecil anak-anak pribumi diterima di sekolah ini. Mereka tidak hanya diharuskan membayar lebih tinggi tetapi juga harus tahu bahasa Belanda. Meskipun pembatasan-pembatasan ini jumlah mereka pada tahun 1900 ada 2000. Sekolah Belanda ternyata menarik karena memberi keuntungan materiil bagi lulusannya. Sejak penyerahan daerah jajahan Indonesia oleh VOC kepada pemerintah Belanda pada tahun 1799 sampai tahun 1816 waktu pemerintahan Indonesia diserahkan kembali kepada Belanda dari tangan Inggris, bentuk/susunan pemerintahan di Indonesia ternyata mengalami kekacauan. Pertentangan antara prinsip liberal dan konservatif, keadaan perang di negeri Belanda dengan ancaman dari pihak Inggris, pemerintah darurat yang silih-berganti, perubahan-perubahan sistim yang tidak mengindahkan keadaan masyarakat pribumi, kesemuanya itu merupakan sebab-sebab dari kekalutan itu.

Daendels mendapat kekuasaan mutlak untuk membuat perubahan dengan tujuan pokok yaitu mempertahankan Jawa terhadap serangan Inggris. Jawa dibagi atas 9 *prefectuur*, para bupati dijadikan pegawai sipil dibawah perintah *prefect*, dan

mendapat penghasilannya dari tanah dan tenaga didalam daerahnya sesuai dengan hukum adat. Mereka mendapat pangkat tertentu dalam hierarki umum pegawai. Dalam administrasi pengadilan Daendels membentuk pengadilan berkeliling dan *landgerecht*, yaitu pengadilan untuk pribumi di setiap prefectuur, dengan *prefect* sebagai ketua dan para bupati sebagai anggauta.

Pada masa pemerintahannya, Raffles merencanakan untuk membuat bupati sebagai pegawai yang digaji sepenuhnya. Dimaksudkannya agar penguasa Eropa dapat langsung berhubungan dengan rakyat dengan menyisihkan para kepala daerah seperti telah dijalankan. Dalam pemungutan pajak-tanah hal itu telah dijalankan. Para bupati akan diberi fungsi sebagai pengawas polisi distrik dan menjadi kepala dari pegawai di daerahnya tanpa mempunyai pengaruh politik lagi. Pada umumnya usaha Raffles gagal karena para bupati yang tetap memungut hasilnya dari tanah kedudukannya tetap memegang kekuasaannya atas rakyat yang menanaminya.

Dalam bidang pengadilan, Raffles mendirikan Pengadilan Tinggi di tiga kota pelabuhan besar yaitu di Batavia, Semarang, dan Surabaya, Pengadilan (Requests) dan Pengadilan polisi. Perkara besar diajukan kepada Residen sedang perkara kecil diselesaikan oleh bupati.

Para Komisaris Jenderal menjalankan politik yang semakin membatasi kekuasaan bupati menurut peraturan dari 5 Januari 1819 mereka dilarang melakukan perdagangan, tanah kedudukan bagi bupati dihapuskan dan sebagai gantinya diberi gaji uang. Akibatnya yalah bahwa para residen mengabaikan jasa-jasa mereka sehingga mereka tidak mengambil bagian dalam administrasi. Van der Capellen bermaksud menempatkan para bupati pada kedudukannya yang lama dengan berhak menerima jasa-jasa pancen. Mereka perlu membantu dengan pengaruhnya kepada rakyat. Gagasan yang menjadi dasar dari politik membatasi kekuasaan bupati dan menyusun pemerintahan langsung bertalian erat dengan prinsip-prinsip humanitarisme yang mengarah kepada pemerintahan yang melindungi rakyat terhadap pemerasan atau penindasan pembesar-pembesarnya.

Menurut konstitusi 1814 dan 1815 Raja mempunyai kekuasaan penuh untuk memerintah (mengatur pemerintahan) daerah jajahan. Majelis Perwakilan dalam hal ini tidak mempunyai hak mengawasi. Selanjutnya menurut Peraturan 1815 raja, pemerintah tinggi di tangan Gubernur Jenderal dan 4

Penasehat dibantu oleh Sekretariat Umum dibawah Sekretaris Kepala. Organisasi daerah luar Jawa merupakan daerah yang tidak terurus dalam administrasi. Di Jawa kerangka administrasi Raffles tetap dipertahankan yaitu terdiri atas Residensi, Kabupaten, distrik dan desa; jumlah residensi ada 19. Semua pegawai di atas kepala desa digaji. Untuk mengurus tanaman perusahaan perkebunan, pemerintah mengangkat pengawas (*opziener*).

Dengan adanya Undang-undang Dasar baru pada 1848 perlu disusun undang-undang pemerintah (Hindia Belanda), sistim keuangannya dan sistim audit yang harus diatur menurut undang-undang dari Majelis Perwakilan. Baru pada tahun 1854 undang-undang pemerintahan Hindia Belanda selesai disusun. Undang-undang mengenai keuangan pada tahun 1854 itu juga, sedang undang-undang audit baru pada tahun 1864. Baru pada tahun 1868 pengawasan Parlemen terhadap pemerintahan Hindia Belanda dilaksanakan. Tambahan pula, dengan UU audit tahun 1864 anggaran belanja Indonesia memerlukan persetujuan Parlemen, sehingga menteri jajahan perlu mempertanggungjawabkan administrasi jajahan. Berhubung dengan ini menteri jajahan perlu memberi pengarahan yang sangat terperinci kepada Gubernur Jenderal. Untuk melindungi dirinya, Gubernur Jendral terpaksa memusatkan administrasi di tangannya sendiri.

Pada umumnya mengingat hubungan antara kedua pejabat itu, maka sudah sewajarnya calon Gubernur Jenderal dipilih oleh menteri jajahan karena ia yang harus mempertahankan politiknya dihadapan Parlemen. Gubernur Jendral bertanggungjawab kepada raja. Menurut UU 1854 Gubernur Jenderal harus mendapat persetujuan Dewan Hindia untuk mengambil tindakan-tindakan administratif penting, meskipun ia tidak terikat oleh advis (saran) dari Dewan.

Langsung dibawah Gubernur Jendral adalah residen yang dibantu oleh beberapa asisten-residen. Residen penguasa administratif, legislatif, judikatif dan fiskal. Dengan adanya kedinasan-kedinasan teknis di Pusat, tugas Residen yalah sebagai pelaksana instruksi dari pemerintah pusat. Asisten residen mengepalai suatu bagian dari karesidenan, sejajar dengan kabupaten. Asisten residen menjalankan tugas-tugas residen, kecuali bagian peradilan. Para kontrolir bertugas mengumpulkan keterangan-keterangan dan melaksanakan perintah dari atas. Diluar Jawa, para kontrolir berdiri sendiri dan kabupaten tidak dikenal. Bupati dibantu oleh

patih, kabupaten dibagi atas kawedanan yang dikepalai oleh wedana, kawedanan dibagi atas kecamatan yang dikepalai oleh camat atau asisten-wedana.

Susunan tersebut diatas terwujud setelah diadakan reorganisasi oleh van de Putte pada tahun 1874. Bersama dengan perubahan-perubahan lainnya yang telah dilakukan sebelumnya meletakkan dasar bagi suatu dinas pamong praja, yang tidak merupakan lembaga yang didasarkan atas ikatan daerah atau atas hak waris, akan tetapi yang terdiri atas pegawai-pegawai pemerintah. Bupati yang pada masa van den Bosch masih mempunyai hak turun-temurun mulai dipandang sebagai pegawai.

Adapun tugas dan kewajiban para pamongpraja telah dirumuskan secara tegas dalam Surat Edaran dalam tahun 1867. Residen diharapkan menjalankan tugas melalui bupati, mengawasi dan meringankan pekerjaan-wajib, memperhatikan penanaman tanaman untuk bahan makanan, mendorong pendirian sekolah untuk pribumi, dan sebagainya.

Para bupati berkewajiban mengawasi penanaman-wajib; meneliti perjanjian antara penanam dan pengusaha Eropa; mencegah semua pembatasan otonomi desa, mengawasi sekolah pribumi, membuat daftar guru-guru agama, dan seterusnya. Dengan perumusan tugas-tugas yang tegas itu maka birokrasi kolonial semakin dipisahkan dari susunan politik tradisionil sehingga dapat dicegah kesewenang-wenangan para penguasa dan diperkokoh pemerintahan berdasarkan hukum.

Bersamaan dengan peraturan-peraturan itu dihapuskan juga prosenan kultur yang diberikan kepada pegawai-pegawai Eropa (1866); para bupati yang telah lebih dulu kehilangan prosenan kultur itu, pada tahun 1867 tanah *appanage*nya dicabut dan akhirnya pada tahun 1882 haknya atas pekerjaan pancen juga dihapuskan. Sisa-sisa dari hak-hak dari penguasa tradisionil dengan demikian telah ditiadakan.

Sejajar dengan perkembangan itu, birokrasi kolonial semakin diperkuat dengan penambahan jumlah pegawai-pegawai Belanda. Antara 1830 dan 1870 jumlah asisten-residen berlipat dua dari 30 menjadi 60. Disamping bupati diangkat seorang asisten-residen yang masih dibantu oleh seorang kontrolir. Tugas kontrolir pada masa Tanam-paksa menjadi agen dari pemerintah sehingga mempunyai kesempatan mengenal rakyat dari dekat. Sejak 1855 para kontrolir mendapat tugas khusus untuk meme-

lihara hubungan-hubungan erat dengan rakyat khususnya dengan penguasa pribumi. Menurut ketentuan pada tahun 1872 kontrolir menjadi pembantu asisten-residen dan bertindak atas perintah asisten-residen, ia tidak mempunyai kebebasan dan kekuasaan sendiri. Tugasnya selanjutnya harus mengadakan hubungan yang erat dengan penguasa-penguasa setempat dan keluarganya, mengikuti semua perkembangan di daerahnya, mencari saran-saran dan keterangan, pendeknya ia menjadi penghubung antara masyarakat Indonesia dengan pemerintah Hindia Belanda.

Politik kolonial liberal sejak 1860 semakin menekankan kesejahteraan rakyat dan makin meninggalkan prinsip exploitasi dengan akibat bahwa administrasi semakin intensif. Ini berarti bahwa kekuasaan bupati semakin diperlemah. Dengan kemajuan pesat dari perusahaan Barat dan pemerintahan yang komplex dituntut kecakapan-kecakapan yang besar dari pamongpraja. Pendidikan para bupati ternyata dianggap kurang untuk memenuhi tuntutan-tuntutan itu.

Pada jaman VOC bupati dipertahankan untuk dipakai sebagai alat guna mengawasi penduduk, kemudian pada masa Tanam-paksa bupati menjadi agen dari Belanda untuk mengawasi produksi dan penyetoran hasil tanaman itu.[7]

Menurut adat, kedudukan bupati turun-temurun. Prinsip ini pada mulanya dipakai oleh administrasi Belanda berdasarkan kenyataan bahwa bupati harus dipandang sebagai kepala/pemimpin aristokrasi yang wajar dari rakyat, mereka masih mempunyai hubungan-hubungan wajar dengan rakyat. Sebagai kesatuan administratif kabupaten telah sejak lama merupakan dasar dari struktur administratif yang menyeluruh. Kesatuan itu dapat dikembalikan asalnya kepada masyarakat Jawa sebelum bangsa Barat datang. Penguasa penjajah meletakkan suatu hierarki administratif diatas kedudukan bupati. Pada akhir abad 19 ada kecenderungan untuk melampuinya atau menggunakannya semata-mata sebagai alat, bahkan sering hanya sebagai hiasan belaka.

Kedudukan dan fungsi bupati yang menjadi merosot seperti itu adalah tidak lain merupakan akibat proses yang semakin maju kearah pemerintahan langsung dengan mempertahankan dualisme

---

[7] Lihat B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies*, jilid I, The Hague - Bandung, 1955, hal. 190.

didalamnya. Menghapuskan ini berarti: (1) menghilangkan diskriminasi dalam bidang birokrasi, (2) atau demokratisasi yang berarti menghilangkan kedua golongan itu untuk memberikan tempat kepada pemimpin yang wajar. Ini kesemuanya berarti meniadakan kolonialisme sendiri.

Perkembangan selama abad 19 di pelbagai lapangan membawa akibat yang menonjol, yalah proses urbanisasi. Sejak zaman kuna pemusatan penduduk di kota istana, bandar, pusat pemujaan, persimpangan jalan.

Dengan tumbuhnya perusahaan perkebunan beserta perdagangan dan pengangkutan hasilnya, menambah jumlah penduduk yang pindah ke kota-kota atau pusat-pusat perusahaan itu. Di mana pemerintah menempatkan kantor-kantor dan tempat kediaman pejabatnya sudah barang tentu menjadi kota yang banyak menarik penduduk dari desa untuk mencari pekerjaan. Kemajuan komunikasi terutama dengan terbukanya jalan-jalan raya dan jalan-jalan kereta api memudahkan pemindahan dari (suatu) daerah pedalaman ke kota.

Faktor-faktor di desa juga mendorong perpindahan ke kota: antara lain semakin kurangnya tanah pertanian dan bertambahnya jumlah proletar pedesaan; perbedaan yang menyolok antara desa dan kota mengenai tingkat kemajuan kehidupan. Perkembangan yang mendorong perubahan sistim pemerintahan tidak langsung kepada sistim yang langsung, berjalan sejajar dengan kemenangan kaum liberal yang berhasil menguasai politik kolonial. Sejak 1848 sistim tidak langsung yang dijalankan Van den Bosch tidak mampu memberikan pelayanan yang cukup bagi bangsa Eropah yang datang dalam jumlah semakin besar. Sejak jalan terbuka lebar bagi perusahaan Barat semakin terasa keperluan melakukan administrasi menurut sistim Barat. Dipandang dari sudut ini pemerintah menjadi *dualistis*. Pada satu pihak terjadi intensifikasi administrasi yang terwujud pada semakin besarnya jumlah pegawai pamongpraja Belanda serta tujuan usahanya meresap semakin jauh ke lapisan bawah dari masyarakat. Pada pihak lain pegawai pribumi perlu diubah dan disesuaikan dengan pokok-pokok/prinsip pemerintahan yang modern (legal-rasionil). Sistim dualistis dipertahankan agar dapat diteruskan politik exploitasi. Perubahan yang selalu dianggap/dipandang cukup besar pada 1870 sebenarnya hanya menyangkut jenis sistim yang dijalankan, pergantian dari perusahaan negara ke perusahaan

swasta. Dengan demikian dapat dijamin prinsip perdagangan bebas.

Sistim dualistis merupakan alat utama untuk mempertahankan kondisi kolonial dalam arti subordinasi kepentingan daerah jajahan karena kepentingan negara induk. Apa yang lazim dinamakan periode liberal (sejak 1870) tidak lain merupakan masa perdagangan bebas/perusahaan bebas yang membuka sumber-sumber alam yang kaya-raya di Indonesia bagi pengusaha-pengusaha Barat; modal asing juga dari negeri-negeri asing lainnya dapat ditanam di Indonesia. Politik pintu terbuka terpaksa secara konsekwen dijalankan oleh Belanda karena modal Belanda banyak ditanam untuk menghasilkan bahan-bahan export. Untuk menjamin export itu perlu dilakukan politik 'pintu terbuka' bagi negeri-negeri asing.[8]

Sistim dualistis dalam bidang politik berjalan sejajar dengan sistim ekonominya, khususnya bidang perusahaan perkebunan itu. Dalam proses produksi yang semakin maju itu, bangsa Indonesia tidak memegang peranan apa-apa, kecuali menyewakan tanah dan tenaganya secara murah. Maka dari itu dualisme dipertahankan dan untuk melindungi keuntungan-keuntungan pemisahan kedua masyarakat dipertahankan.

Keperluan di Indonesia untuk mengembangkan administrasi kolonial yang modern semakin terasa semakin banyak modal tertanam disitu. Kemudian terbukti bahwa kebutuhan-kebutuhan Indonesia melebihi apa yang sebelumnya lazimnya dikirim ke Nederland. Timbullah pelbagai permasalahan:

- Perlu ada restitusi dari Nederland kepada Indonesia. Berapa ?
- Dengan digantinya perusahaan pemerintah oleh perusahaan swasta, apakah *politik drainage* telah dihapuskan ?

Dengan dilancarkan kecaman terhadap *politik drainage* maka dari pelbagai segi timbul gagasan-gagasan baru untuk membuat perubahan yang akan lebih memperhatikan kaum pribumi. Pemikiran-pemikiran berdasarkan atas:

a) humanitarianisme.
b) agama
c) sosial - demokrasi
d) politik ethis.

[8] J.O.M. Broek, *The Economic Development of the Netherlands-Indies*, New York, 1942, hal. 106.

Siapa yang sesungguhnya mempunyai kepentingan untuk menghentikan politik drainage itu ? Meskipun dalam politik liberal ditekankan perlindungan terhadap kaum pribumi, namun dengan sistim ekonomi yang diperjuangkan ada kecenderungan untuk menghambat perkembangan masyarakat Indonesia. Perusahaan kapitalis semestinya terdorong dalam perkembangannya ke arah perekonomian keuangan yang membawa akibat juga perluasan kondisi hidup. Sistim produksi kolonial tidak menghendaki perkembangan hidup rakyat yang akan mengakibatkan tuntutan lebih banyak terhadap modal kolonial yang menyelenggarakan sistim produksi itu. Di sini faktor yang sangat menguntungkan, yalah tenaga yang murah; sudah jelas bahwa kepentingan modal, akumulasinya yang dipentingkan dengan mengadakan produksi yang semurah-murahnya. Akumulasi modal dalam perkebunan yang sangat besar dimungkinkan karena tenaga murah itu, bahkan dikatakan bahwa "keuntungan itu dari perbudakan yang terbuka". Meskipun secara resmi diwajibkan ada kontrak antara pengusaha dan petani, dalam prakteknya tidak ada jaminan bagi kepastian hukum petani pada waktu itu. Keuntungan mengalir ke Nederland dan juga bunga dari modal yang ditanam dalam perusahaan perkebunan dan pertambangan. Tidak ada pemakaian modal untuk mempertinggi taraf kehidupan serta perkembangan masyarakat Indonesia. Perkembangan proses produksi menciptakan keperluan untuk mengadakan modernisasi sistim pemerintahan dengan membentuk dinas teknis disamping bentuk/sistim organisatoris yang tradisionil.

Keperluan akan pengobatan dan perawatan orang sakit, pengajaran, keamanan, peradilan, kemajuan ternak dan pertanian, kesemuanya mengharuskan pemerintah kolonial menciptakan lembaga-lembaga kedinasan untuk dapat menyelenggarakan ini maka pemerintah perlu memungut pajak lebih tinggi, hal yang tidak dapat diharapkan dari petani sendiri, tetapi dari perusahaan Barat yang terang lebih mampu memberikan sumbangannya. Sebaliknya kehidupan perusahaan sangat tergantung dari persediaan tenaga yang murah. Disini timbul kontradiksi yang sulit dipecahkan dalam hubungan politik dan ekonomi kolonial. Perlindungan dan kemajuan masyarakat pribumi membawa konsekwensi bahwa pribumi tetap menjadi sumber tenaga yang murah. Hal ini berarti perluasan birokrasi kolonial yang semakin

memperkuat perkembangan kearah sistim langsung. Akan tetapi dalam hal ini dualisme yang pada hakekatnya berakar pada diskriminasi ras menonjol lagi. Dibanding dengan golongan pribumi, lebih banyak golongan Eropah mendapat kedudukan atas. Golongan pribumi lebih banyak menempati lapisan bawah dan hanya sedikit saja lapisan menengah.

Perusahaan Barat membawa akibat bahwa pemilik tanah terpaksa menyerahkan tanahnya dan menjadi kaum buruh di tanahnya sendiri. Dalam lingkungan perusahaan atau perkebunan itu pribumi tidak ada kemungkinan untuk mendapat kedudukan yang memerlukan pengetahuan dan ketrampilan teknik tertentu. Masalah penyewaan sawah dan penggunaan pengairan juga merugikan petani. Untuk menyiapkan tanah bagi penanaman tebu pada masa tertentu, tidak jarang tanaman yang belum masak di sawah perlu dicabut. Pengairan dengan giliran-giliran tertentu juga pada umumnya lebih menguntungkan pabrik gula. Kecaman-kecaman yang dilancarkan terhadap politik kolonial dalam dua puluhan tahun terakhir baik yang menentang apa yang disebut politik *Batig Slot* ataupun yang mencela politik drainage, tidak terlepas dari perkembangan baru dalam permasalahan politik kolonial.

Regime *laissez-faire* dalam mengejar kemampuan ekonomis mulai ditinggalkan dan timbul di kalangan luas gagasan untuk mengawinkan kemajuan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Apabila politik liberal yang lama berpendapat bahwa kebebasan ekonomi dengan sendiri akan mencapai kemajuan ekonomi dan juga kesejahteraan, kenyataan di daerah jajahan menunjukkan bahwa kedua hal itu tidak selalu bersamaan. Berkurangnya kepercayaan kepada sistim *laissez-faire* ditimbulkan oleh kesulit an-kesulitan keuangan di Indonesia dalam tahun delapanpuluhan. Kesadaran timbul dalam menghadapi (kekurangan-kekurangan) masalah pinjaman yang perlu dikembalikan oleh Indonesia. Pada tahap pertama kaum politik meninjau keadaan politik kolonial dalam masa lampau, maka diketemukan masalah *Batig Slot* dan kemudian jenis politik kolonial yang diterapkan, yaitu politik *drainage*. Perdebatan mengenai masalah *Batig Slot* menunjukkan bahwa banyak terdapat perbedaan pendapat dan konsepsi mengenai politik kolonial, hubungan antara negeri induk dan jajahannya. Akan tetapi mengenai pengarahan baru dalam politik kolonial sebagai politik yang konstruksif ternyata ada keseragam-

an pendapat diantara pelbagai pemuka golongan; kaum konservatif, liberal, agama dan sosial-demokrat. Kesemuanya menyetujui bahwa kehidupan rakyat di daerah jajahan – terutama kesejahteraan – menjadi tanggungjawab pemerintah kolonial dalam mengembangkan ekonomi daerah jajahan. Perhatian terhadap kekurangan-kekurangan atau keburukan politik kolonial liberal gaya lama dibangkitkan oleh keadaan yang serba terbelakang, penuh dengan kemiskinan dan kebodohan. Timbullah gagasan untuk mempertinggi taraf kehidupan rakyat, dengan politik kolonial yang kemudian dikenal sebagai *welvaarts politiek* (politik kesejahteraan).

1. Masalah kolonial mendapat pemecahan pada tahun 1877 dengan penghapusan kultur dari pemerintah secara tahap demi tahap. Kecuali itu masalah hubungan keuangan mulai dibahas. Kemudian juga ditegaskan bahwa di samping keuntungan yang dipungut dari Indonesia untuk Nederland, Indonesia sendiri tidak boleh menjadi beban Nederland. Kebijaksanaan politik kolonial menekankan kemajuan moril, ekonomis dan sosial. Langkah-langkah mulai dipikirkan untuk melepaskan keuntungan-keuntungan yang diperoleh dari daerah jajahan. Beberapa kejadian membuat Belanda sadar bahwa Indonesia mempunyai keperluan-keperluan sendiri. Dengan berjangkitnya penyakit daun kopi, berkobarnya perang Aceh dan perang Boer di Afrika Selatan, Nederland mengalami banyak kekurangan anggaran belanja, timbullah masalah pemusatan keuangan Nederland dengan keuangan Indonesia.
2. Penduduk pribumi masih tetap dalam kedudukan terbelakang, tidak berkembang kecakapan dan ketrampilannya, tidak ada modal, sehingga dalam proses produksi hanya menjadi buruh upah atau pekerjaan dengan pangkat rendahan. Ada pendapat bahwa mereka hanya mau berusaha untuk menghasilkan apabila dipaksa. Dalam lingkungan ekonomi tradisionil mereka hanya mengenal perusahaan rumah atau kerajinan tangan.
3. Van Kol menyatakan bahwa terus-menerus terjadi *drainage* karena segala uang yang diperoleh di Indonesia tidak dibelanjakan disitu, maka rakyat jadi semakin miskin. Rakyat telah dihisap darahnya dan diperas oleh bangsa asing.

Perkembangan dalam bidang politik yang mengubah haluannya dan dalam bidang ekonomis yang menunjukkan perubahan besar menjadi perusahaan raksasa, sebenarnya mendapat dorongan dari perkembangan dalam lapangan internasional, yaitu memuncaknya imperialisme modern serta neomerkantilisme yang terwujud sebagai expansionisme besar-besaran dari negara Barat. Negara itu terutama Inggris, Perancis, Jerman, berlomba-lomba menguasai mencari daerah yang belum masuk kekuasaan salah-satu dari mereka, terutama di Afrika dan Asia. Berhubung dengan perkembangan internasional itu Belanda terpaksa segera melakukan politik pasifikasi, yaitu mengirimkan expedisi militer untuk menguasai daerah-daerah yang belum masuk lingkungan kekuasaan pemerintah kolonial. Dengan demikian hendak dielakkan kemungkinan atau bahaya bahwa negara besar Barat menaruh perhatian terhadap daerah yang secara resmi (nominal) telah masuk lingkungan Hindia Belanda.

Untuk mengurangi tekanan-tekanan dari negara-negara besar maka azas-azas ekonomi liberal dilaksanakan, antara lain dengan penghapusan pajak-pajak import dan export yang diferensiil, sistim konsinyasi, pendeknya melakukan politik pintu terbuka. Politik ini secara kuat mendorong ke arah internasionalisasi perdagangan di Indonesia, suatu politik yang dapat turut mengurangi minat negara-negara yang mempunyai kepentingan ekonomis untuk memasukkan kekuasaan politik di Indonesia. Modal internasional berhasrat besar untuk beroperasi di Indonesia dengan kondisi bahwa terjamin keamanan serta ketertibannya.

Dalam kecamannya, Van Kol, seorang wakil partai sosial demokrat Belanda, menunjukkan bahwa pasifikasi terus disusul oleh suatu kontrak yang menentukan penyerahan hak-hak mengusahakan pertambangan serta konsesi-konsesi lain. Bahwasanya expedisi-expedisi militer merupakan gejala imperialistis juga dengan tegas diutarakan oleh Snouck Hurgronje yang menduga bahwa hal itu lebih terdorong oleh ketamakan untuk memperoleh laba dan bukan masalah politik murni. Tambahan pula pemerintah kolonial tidak menghendaki menyinggung adat-istiadat serta perasaan keagamaan.

Diantara mereka yang mempertahankan politik expansi itu ada yang membenarkan berdasarkan kenyataan bahwa pemerintah seburuk-buruknya dari Belanda masih lebih baik dari pemerintahan kaum pribumi yang terbaik. Selanjutnya diajukan

sebagai dalih bahwa pemerintahan itu melakukan kekejaman, perampokan serta pemerasan. Sementara itu biaya expedisi-expedisi militer menjadi semakin tinggi, selama 10 tahun membubung menjadi lebih kurang 450 juta gulden, berlipatganda dari biaya yang digunakan untuk irigasi, kesehatan dan pendidikan.

Metode imperialisme modern dari negara-negara besar tidak ditujukan untuk mendapatkan daerah pendudukan lagi melainkan untuk menjalankan exploitasi ekonomi dengan menanam modal, mencari daerah pemasaran produksi-produksi industri mereka dan mendapat jaminan bahan mentah. Banyak modal ditanam dalam perkebunan karet, umpamanya dari Inggris, Belgia, Amerika, Swis dan Jepang, selanjutnya teh oleh Inggris, gula dari Cina dan Jepang. Modal negeri Belanda sendiri berjumlah 2 ribu juta yalah 3/4 dari semua modal yang tertanam di Indonesia.

Sudah menjadi kenyataan bahwa penanaman modal di Indonesia dan di Jawa khususnya sangat intensif, terutama setelah ada invasi modal asing. Dalam pada itu politik Belanda berusaha agar sedapat mungkin modal Belanda yang mendapat kesempatan pertama. Pada umumnya sistim politik modal pertanian dipertahankan dan ternyata berhasil sekali.

Bagaimana nasib kaum pribumi ?

Politik kolonial yang dijalankan oleh Belanda secara jelas menunjukkan hubungannya dengan perkembangan ekonomi negerinya. Pada umumnya industri di Nederland berkembang sangat terlambat, sesungguhnya baru sesudah lebih-kurang tahun 1860. Sebelum itu kapitalisme industriil hanya dapat berkembang dengan mendirikan pabrik-pabrik textil terutama di daerah Twente di Noord Brabant. Kecuali itu perkembangan industri sebagian juga tergantung dari kapitalisme kolonial atau komersiil seperti industri yang mengolah bahan-bahan mentah seperti penggilingan kopi, pabrik minyak, coklat, tembakau, dan lain sebagainya.

Dengan dibukanya daerah jajahan sesudah 1870 untuk perusahaan swasta, maka semakin banyak modal yang ditanam disana sehingga timbul akumulasi modal dalam perkebunan dan pertambangan dalam puluhan-puluhan tahun terakhir abad XIX. Politik kolonial yang liberal memberi kebebasan seluas-luasnya kepada kaum modal, baik untuk berusaha maupun untuk berdagang. Sejak 1870 perdagangan kolonial serta modalnya

maju dengan pesat, dan Amsterdam sebagai pusatnya mengalami perkembangan cepat sekali.Kaum borjuis-liberal menjadi tulang-punggung kapitalisme kolonial, maka politik kolonialnya berpegangan teguh pada sistim *laissez-faire* serta politik *"hands-off"*-nya.

Sejak berlakunya Undang-undang Agraria pada tahun 1870 kaum kapitalis mendapat kesempatan secara bebas menanam modal. Banyak tanah kosong yang sejak itu disewakan kepada modal Eropah dalam duapuluh tahun berlipat sepuluh kali (1871 – 1892) dan lebih kurang pada tahun 1900 menjadi duapuluh kali. Setelah terasa kekurangan akan tanah, maka dijalankan politik expansi di daerah-daerah luar Jawa yang menyediakan daerah exploitasi baru bagi modal Belanda. Di samping modal untuk perkebunan juga ditanam modal industriil untuk pertambangan setelah gerakan pasifikasi dilaksanakan. Nyatalah disini bahwa perkembangan modal mempergunakan kekuasaan politik sebagai pendukungnya/alatnya. Expansi ekonomi mendapat dukungan kuat dari partai liberal yang menguasai sebagian dari modal yang ditanam. Menjelang akhir abad 19 kaum liberal mengalami kemunduran, antara lain karena sejak 1870 garis pemisah antara golongan-golongan politik ditarik menurut lapangan agama. Lagi pula dengan perkembangan industri timbul pengerahan kaum buruh dan paham sosial-demokrasi. Pertentangan politik juga menjadi komplex karena ada pengaruh dari pergolakan antara dua golongan kepentingan yaitu kaum kapitalis dan kolonial, yalah kaum liberal dan kaum Protestan di Noord dan Zuid – Holand pada satu pihak, pada pihak lain kaum kapitalis industriil, yaitu yang ada di Twente dan kaum politik di daerah Selatan. Adapun mengenai politik kolonial diantara golongan-golongan politik itu pada hakekatnya tidak ada perbedaan pendapat. Menjelang pergantian abad semakin kuat pendapat bahwa politik kolonial harus meninggalkan politik exploitasi atau yang lebih dikenal pada waktu itu politik *Batig Slot*. Semua partai memberi tekanan pada politik kolonial yang didasarkan pula suatu kewajiban moril dan yang diarahkan kepada perbaikan nasib penduduk pribumi.

Dari berjenis-jenis program partai-partai waktu itu tampak adanya kesamaan, yaitu bahwa daerah jajahan tidak lagi harus memberikan keuntungan bagi negeri induk. Ini tidak berarti bahwa negeri Belanda tidak lagi akan mengambil keuntungan dari

Indonesia atau politik exploitasi sudah dilepaskan sama sekali, tetapi masih dijalankan terus meskipun dalam bentuk lain. Dari pihak partai agama haluan baru tertuju pada kristenisasi sebagai suatu panggilan bagi rakyat Kristen, maka mulai dilancarkan politik *zending* atau *missie*.

Politik kolonial perlu melaksanakan kewajiban moril untuk mempertinggi kehidupan penduduk pribumi, untuk itu perlu dihapuskan larangan-larangan untuk memencarkan agama, perlu diselenggarakan pendidikan moril sehingga pada suatu waktu dapat menduduki tempat yang merdeka. Ditentangnya exploitasi ekonomis dan finansiil, terutama penggunaan uang-uang Hindia untuk kepentingan negeri Belanda, sedang lebih banyak perhatian diberikan kepada kepentingan penduduk. Demikian program kaum Kristen.

Kaum sosial-demokrat juga mempunyai program mengenai politik kolonial; prinsipnya yalah bahwa pemerintah kolonial perlu terarah kepada pemerintahan sendiri daerah jajahan. Perkembangan moril perlu menjadi tujuan pokoknya, sedang kesejahteraan penduduk dan perkembangan ekonominya perlu diajukan. Berdasarkan pokok-pokok pikiran itu banyak tuntutan yang diajukan, antara lain kebebasan dalam tulisan dan bicara, pengadilan yang tak membayar, perbaikan polisi, perlindungan terhadap lintah darat, dan sebagainya. Selanjutnya dituntut juga penghentian perang Aceh, penghapusan kerja-rodi, uang kapala, pemisahan keuangan antara Nederland dan Indonesia, meringankan pajak.

Dengan tegas dinyatakannya bahwa menjadi kewajiban negeri Belanda untuk mendidik bangsa pribumi kearah pemerintahan sendiri. Pemerintahan daerah jajahan bukan suatu hak tetapi kewajiban, yang perlu dilakukan secara adil dan jujur berdasarkan rasa kemanusiaan. Bangsa Belanda mempunyai suatu mission (panggilan) untuk melindungi dan memimpin bangsa Indonesia ke arah kehidupan yang sejahtera.[9]

Program kaum liberal juga didasarkan atas tujuan untuk mengembangkan budaya penduduk dan mempertinggi kesejahteraannya. Secara konkrit diperjuangkan pelaksanaan desentralisasi, pembentukan Dewan Kolonial dimana juga duduk kaum swasta, mempertinggi kwalitas pamong praja, tidak sebagai

[9] Periksa H. Colijn, *Vraagstukken van Heden en Morgen*, Den Haag, 1921, hal. 95, 124.

petugas yang serba tunduk tetapi yang dapat bertindak secara cerdas. Banyak lembaga-lembaga yang menimbulkan kesengsaraan penduduk perlu dihapus atau diatur secara lebih baik, seperti penyewaan tanah, penjualan candu, kredit kepada petani, tanah-tanah partikelir dan kerja-rodi. Kesemuanya itu mendorong untuk perubahan-perubahan dalam pelbagai lapangan. Tujuan pemerintahan jajahan seperti yang dirumuskan oleh Cremer yalah berpangkal pada dasar untuk memberi kepada rakyat hasil dari pekerjaannya, menjamin ketentraman dan keuangannya. Dalam kenyataannya, politik Cremer menguntungkan perusahaan-perusahaan besar, seperti KPM, dan memberi konsesi kepada kaum modal.

Perkembangan perdagangan, perkapalan dan perusahaan terutama memberi keuntungan bagi kaum borjuis untuk kepentingan segolongan dari mereka itu. Fock juga membentangkan rencana perubahan-perubahan, dengan menunjukkan kepada kewajiban Belanda untuk menciptakan kesejahteraan dan kemajuan bagi kaum pribumi. Ditonjolkannya keadaan ekonomis di Jawa yang sangat menyedihkan. Perlu diusahakan adanya keamanan, perlindungan miliknya, meringankan beban pajaknya memperbaiki pertanian dan peternakan, juga mulai didengungkan masalah irigasi, edukasi dan emigrasi, tidak untuk modal Barat tetapi untuk kaum pribumi sendiri.

Dari acara ini ternyata hanya sebagian kecil yang dapat dilaksanakan. Partai-partai agama mempunyai program yang mendorong pemencaran agama Kristen, memajukan pendidikan dan kepastian hukum kaum pribumi. Politik exploitasi perlu diganti dengan politik kewajiban 'etis' atau politik sosial. Pernyataan yang dilancarkan oleh semua golongan politik ini dipandang sebagai titik-tolak sejarah kolonial baru yang akan mengakhiri semua exploitasi di Indonesia baik oleh bangsa Belanda maupun oleh negeri Belanda. Menurut penilaian kaum sosial-demokrat perubahan-perubahan yang diidam-idamkan tidak banyak yang dapat dilaksanakan dan tetap merupakan janji-janji yang muluk-muluk. Dalam kecaman mereka dinyatakan bahwa baik golongan agama maupun golongan liberal mendukung politik kapitalistis dan imperialistis, yang bertujuan memperluas daerah dengan militerismenya tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat pribumi. Kaum kapitalis pertanian, pertambangan

dan perusahaan yang mempunyai kepentingan bertentangan dengan kepentingan kapitalis perdagangan dan perkapalan, menyokong politik kolonial agar pribumi mengenyam kemakmuran serta upah yang lebih tinggi sehingga lebih kuat daya-belinya.

Perhatian kepada daerah jajahan, terutama bagian yang belum langsung ada di bawah pemerintahan Belanda, menjadi sangat besar, oleh karena ada bahaya bahwa negara-negara besar yang sedang berlomba-lomba memperluas daerah jajahan di Afrika dan Asia, akan mencampuri urusan Hindia Belanda.

Kedaulatan atas seluruh kepulauan Nusantara secara berangsur-angsur mulai diakui setelah kerajaan-kerajaan pribumi ditaklukkan dengan perang kolonial atau "perang pasifikasi" menurut istilah Belanda yang dijalankan selama abad 19 dan puluhan tahun pertama abad ke 20. Dalih yang diutarakan untuk melakukan perang ini yalah bahwa perlu dilakukan pembrantasan terhadap keadaan yang buruk dan memulihkan keamanan dan ketentraman. Kontrak pendek yang disodorkan atas keunggulan militer Belanda mencegah hubungan-hubungan antara negara-negara besar serta menjamin bahwa pemerintahan menegakkan hukum. Expedisi-expedisi memakan biaya besar sekali yang menurut pengecam imperialisme ini dipungut/dibebankan pada rakyat Indonesia sendiri. Protes keras dilancarkan pihak sosial-demokrat yang mengutarakan bahwa imperialisme Belanda menimbulkan kesengsaraan serta kemiskinan orang Jawa. Dipujinya perlawanan yang gigih yang diperlihatkan orang Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan dan kebebasan.

Disamping alasan-alasan resmi untuk melakukan expansi/ expedisi itu sesungguhnya ada pula kepentingan kaum modal yang ingin mengambil keuntungan yang lebih besar dari daerah yang akan diolah. Terutama modal yang ditanam dalam pertanian dan pertambangan kolonial akan mendapat kesempatan mengembangkan usahanya, antara lain setelah Perang Aceh, perluasan perkebunan di Sumatra Utara dan Tamiang oleh Maskapai Deli.

Politik expansi yang dijalankan secara keras ditentang juga oleh kaum agama, yang menegaskan bahwa kaum Nasrani tidak diperbolehkan memiliki daerah jajahan, kewajibannya yalah mendatangkan peradaban dan agama Kristen. Dalam prakteknya perubahan politik kolonial hanya merupakan exploitasi untuk

perbendaharaan Nederland menjadi exploitasi untuk kepentingan modal, baik Belanda maupun asing.

Expansionisme Belanda menjelang akhir abad 19 tidak terlepas dari perkembangan pesat kapitalisme sejak 1894, daerah exploitasi semakin meluas dengan adanya gerakan pasifikasi tentara kolonial, modal akumulasi dalam perkebunan dan pertambangan meningkat (bank 103 juta, pertanian kurang lebih 123 juta, perdagangan 143 juta). Nyata sekali bahwa untuk modal perdagangan, perkapalan dan industri, Indonesia kurang berarti, sedang untuk kapitalisme keuangan sangat menarik karena merupakan daerah penanamannya. Sementara itu perdagangan dengan negara-negara lain jauh lebih besar/ramai, antara lain dengan Inggris.

Perkembangan kapitalisme dalam awal abad ke 20 sangat pesat, umpamanya produksi gula berlipat dua antara 1904 dan 1913; daerah luar Jawa dengan sumber kekayaan yang baru dibuka mengalami kenaikan produksi dari 74 sampai 305 juta. Disadari oleh umum bahwa penanaman kapital kolonial sangat menguntungkan, sehingga perlu memusatkan perhatian kepada pertahanan daerah jajahan antara lain dengan melakukan *militarisme* yang sangat kuat. Modal kolonial semakin berkembang karena banyak ditanam dalam penggalian bahan-bahan mineral sedangkan tenaga sangat murah sehingga tidak ada pertumbuhan kekuatan rakyat, dan daerah jajahan tetap tidak memiliki modal sendiri. Kehidupan rakyat tetap pada tingkat minimal serta tidak berdaya menghadapi exploitasi ekonomis yang dijalankan oleh kapitalisme modern itu. Pemerintah kolonial serta birokrasinya menjaga kepentingan-kepentingan modal. Apabila pada awal abad 20 perkebunan dan pertambangan mengalami masa gemilang, nasib rakyat tidak mengalami pengaruh yang menguntungkan mereka, bahkan sebaliknya mulai tampak kemerosotan kehidupan. Perusahaan pribumi mundur, kepentingannya baik materiil maupun rohani diabaikan. Keadaan yang buruk itu secara mendadak menjadi jelas dan membuka mata umum terhadap keadaan itu ketika secara mendadak timbul wabah penyakit hewan, panen yang rusak serta paceklik. Gagasan akan adanya 'kesejahteraan merosot' semakin meluas.

Perluasan perusahaan dan perkembangan perkebunan Barat membuat rakyat tidak berdaya samasekali karena memakai alat-alat yang sudah tua, upah yang ditekan sampai serendah-

rendahnya, kekurangan tanah untuk bercocok-tanam sehingga timbul golongan yang tidak bertanah lagi, semacam proletariat pedesaan sehingga memungkinkan apa yang dinamakan kaum sosialis-demokrat berkata bahwa modal asing luar negeri mengexploitasi tenaga yang murah. Hal ini mungkin terjadi sebab kepentingan modal disokong oleh kekuasaan politik kolonial yang terjerat dalam jaringan imperialisme. Birokrasi kolonial mempertahankan dan menjaga susunan modal kolonial. Tempat dari kaum pamongpraja pribumi yalah menunjukkan loyalitas dan melaksanakan perintah atasan mereka. Pemerintahan kolonial perlu menjamin agar ada kondisi yang stabil, terutama yang menyangkut tenaga kerja. Investasi di Indonesia perlu menghasilkan keuntungan, tidak hanya untuk Indonesia tetapi terutama untuk negeri asal modal itu. Pembuatan jalan-jalan kereta-api, saluran-saluran air, pembukaan sekolah-sekolah, hubungan pelayaran, pos, telepon dan telegram, kesemuanya dimaksudkan sebagai prasarana untuk menjamin kelancaran perusahaan itu.

3. *Gagasan-gagasan Baru Mengenai Fungsi Jajahan*

Bersamaan dengan pembangunan itu mulai didengung-dengungkan gagasan-gagasan baru tentang fungsi daerah jajahan serta persoalan yang dihadapi Belanda dalam membiayai ongkos pembangunan di Indonesia:

1. kecaman terhadap politik *Batig Slot*
2. pemisahan keuangan Nederland – Indonesia
3. politik moril terhadap Indonesia

Politik kolonial bertujuan untuk menguasai daerah-daerah produksi bahan-bahan mentah bagi kepentingan modal, baik dari Nederland maupun negara-negara besar lainnya yang tidak mungkin lagi ditolak dari Indonesia. Modal perdagangan mempunyai tujuan yang berbeda dengan modal perusahaan yaitu langsung mempunyai kepentingan untuk memperbaiki tingkat hidup rakyat dari daerah pemasarannya sehingga daya-beli mereka diperkuat. Politik pintu terbuka memberi kesempatan negara-negara besar seperti Inggris, Amerika, dan negara-negara Eropah lainnya menanam modalnya di Indonesia kecuali itu juga menjamin mendapat sekutu yang kuat. Modal Amerika merupakan saingan kuat dari modal Eropah, terutama kapitalisme perdagangan yang sangat mendukung/menaruh perhatian ter-

hadap negara-negara berkembang. Jepang kemudian juga muncul sebagai kekuatan kapitalisme yang juga menaruh perhatian besar terhadap Indonesia.

Kekuasaan modal perdagangan dan perusahaan ingin mempertahankan kedudukannya yang pertama untuk tetap membuka pasarannya sedang yang kedua untuk tetap memperoleh hasil perusahaannya, yalah bahan-bahan mentah. Gagasan-gagasan untuk memikirkan kemajuan serta kesejahteraan rakyat menimbulkan tanggapan yang baik, oleh karena emansipasi pribumi itu sementara waktu tidak membahayakan kedudukan kaum modal dan penguasa kolonial sendiri, bahkan bagi kapitalisme perdagangan diharapkan keuntungan-keuntungan tertentu. Politik etis dipandang dari sudut ini merupakan percobaan untuk mendamaikan gerakan emansipasi dengan kepentingan kaum modal.

Menjelang pergantian abad semakin bertambah besar kesadaran akan penting artinya Indonesia bagi Nederland, disebabkan antara lain oleh perebutan daerah kekuasaan negara besar imperialistis yang secara berlomba-lomba mencari daerah jajahan di Afrika dan Asia. Perhatian terhadap daerah luar Jawa yang belum terbuka mulai menimbulkan kekhawatiran kalau-kalau imperialisme itu juga akan menguasainya. Maka expedisi militer sangat digiatkan untuk memaksakan pemerintahan kolonial kepada rakyatnya, lagi pula untuk meluaskan daerah exploitasi bagi perusahaan pertambangan dan perkebunan. Sementara itu banyak kritik yang terdengar di beberapa kalangan sosial dan politik. Kecaman itu ada yang langsung menentang kolonialisme dan imperialisme ada yang mengecam politik kolonial yang senantiasa berpangkal pada gagasan bahwa jajahan diperuntukkan bagi negeri-induk, atau apa yang lazim disebut *drainage-politiek*/atau politik exploitasi. Kesadaran akan politik kolonial dengan demikian menimbulkan persoalan tentang fungsi daerah jajahan yang selaras dengan rasa tanggungjawab sebagai penguasa kolonial. Seperti diketahui di kalangan luas tumbuh kesadaran akan humanitarisme dalam hubungan kolonial, yaitu memperhatikan nasib rakyat pribumi. Program pelbagai golongan politik semua dan secara serentak menitikberatkan tanggungjawab moril dalam melaksanakan politik kolonial. Kesadaran akan tugas kolonial ini diperkuat oleh masalah-masalah yang timbul pada dasawarsa terakhir abad 19 yaitu masalah keuangan bersama

antara Indonesia dan Nederland, masalah kemelaratan rakyat yang berlawanan dengan kemajuan industri perkebunan atau kemunduran kemakmuran rakyat atau suatu *inzinking* (kemerosotan).

Sikap paternal dalam politik kolonial mulai tampak dalam pidato takhta ratu Belanda pada tahun 1901 yang menyatakan bahwa "negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran serta perkembangan sosial dan otonomi dari penduduk Indonesia". Perkembangan penduduk dan bukan pengolahan tanah yang menjadi tujuan pokok politik kolonial; ini berarti bahwa diakui hak penduduk untuk ditingkatkan peradabannya. Siapa saja yang berkepentingan dalam pelaksanaannya ?

a. Politik etis

Garis politik kolonial baru pertama-tama diucapkan secara resmi oleh van Dedem sebagai anggota Parlemen. Dalam pidatonya pada tahun 1891 diutarakannya keharusan untuk memisahkan keuangan Indonesia dari negeri Belanda. Diperjuangkannya (juga kemajuan rakyat, a.l. dengan membuat bangunan umum) disentralisasi; kesejahteraan rakyat dan expansi yang pada umumnya menuju kesuatu politik yang konstruktif.

Perjuangan untuk melancarkan politik kolonial yang progresif diteruskan oleh Van Kol, van Deventer dan Brooschooft. Van Kol menjadi jurubicara golongan sosialis dan dengan pengalamannya di Indonesia melancarkan kritik terhadap keadaan yang serba merosot di Indonesia. Dalam kecamannya, Brooshooft menyatakan bahwa selama satu abad lebih pemerintah mengambil keuntungan/bagian dari penghasilan rakyat dan tidak mengembalikan sepeserpun. Politik liberal mementingkan prinsip kebebasan terutama untuk memberi kesempatan bagi pengusaha memakai tanah rakyat dan segala peraturan dibuat untuk melindungi para pengusaha Belanda sendiri, a.l. dalam soal memiliki atau menyewa tanah, undang-undang perburuhan dan undang-undang pertambangan. Akibat dari perkembangan semacam itu mendorong orang-orang yang kehilangan tanah menyewakan tenaganya di pabrik, sehingga mereka mengalami demoralisasi dan karena itu timbul desorganisasi masyarakatnya. Politik yang diperjuangkan untuk mengadakan desentralisasi kesejahteraan rakyat serta efficiency, kemudian terkenal sebagai

politik etis – seperti judul karangan yang berbunyi "Kecenderungan etis dalam politik kolonial". Dari kalangan kaum liberal muncullah van Deventer sebagai pendukung ide politik kolonial baru. Program kolonial dari kaum liberal yang hanya atau terutama "memajukan perkembangan bebas perusahaan swasta" tidak dapat disetujuinya karena ia lebih mengutamakan kesejahteraan materiil dan moril kaum pribumi, desentralisasi pemerintahan serta penggunaan tenaga pribumi dalam administrasi. Van Deventer sebagai pemimpin liberal mempunyai pengaruh besar karena karangannya "Hutang Kehormatan" dalam tahun 1899. Dikecamnya politik keuangan Belanda yang tidak memisahkan keuangan negeri induk dari negeri jajahan. Pemisahan itu dapat dilakukan sejak 1867, dan dinyatakan bahwa selama periode antara 1867 sampai 1878 telah diambil 187 juta gulden dinamakannya politik ini politik *batig slot* – yang tidak menambah tetapi meng-exploitasinya. Uang sejak 1878 perlu dikembalikan sebab itu merupakan Hutang Kehormatan.

Perubahan haluan politik kolonial juga dipercepat oleh perkembangan ekonomis sekitar 1900. Perkebunan gula dan kopi mengalami kerugian besar karena terserang oleh penyakit-penyakit. Industri perkebunan yang mengalami kemajuan pesat sejak 1870 dan karena perbaikan teknis dapat mengatasi krisis dan wabah/penyakit tebu sehingga politik kolonial liberal mencapai hasil baik dengan keuntungan-keuntungan yang berjuta-juta. Dalam keadaan itu banyak modal asing ditanam secara besar-besaran. Bagaimana nasib rakyat di tengah-tengah kemajuan/perkembangan industri perkebunan itu ? Pada kenyataannya kemakmuran rakyat terancam, karena perusahaan-perusahaan pribumi mengalami kemunduran. Disamping itu juga kepentingan materiil dan moril rakyat, antara lain di bidang irigasi, pendidikan, kerja rodi dan perpajakan.

Kejadian-kejadian yang mendadak, antara lain panen yang gagal, penyakit ternak, bencana alam, mendesak agar segera ada pertolongan. Sementara itu keuangan negeri mundur sekali. Keadaan yang sangat memburuk itu diakui dalam Pidato Takhta pada tahun 1901, dimana ditegaskan usaha-usaha apakah yang dilakukan untuk menanggulangi keadaan ekonomis itu:

(1) Dibentuklah Panitia Kemunduran Kesejahteraan untuk menyelidiki sebab-sebab kemunduran itu. Hasilnya akan

dipergunakan sebagai landasan politik praktis. Laporan yang lengkap baru selesai diterbitkan pada tahun 1911.

(2) Untuk memajukan perusahaan pribumi perlu dihidupkan kembali baik usaha-usaha agraris maupun yang industriil.

(3) Diadakan peraturan-peraturan/usaha-usaha untuk mencegah kemunduran lebih lanjut, antara lain dengan mengadakan pinjaman tak berbunga sebesar 30 juta yang dikembalikan dalam jangka waktu 5 a 6 tahun; pemberian sebagian hadiah uang sebesar 40 juta gulden.

(4) Beberapa penyelidikan keadaan ekonomis seperti yang tercantum dalam karya Van Deventer, Kielstra dan D. Fock, kesemuanya memberi gambaran bahwa rakyat di pedesaan sangat miskin; hidup dari hari ke hari; hasil minimum dari tanah yang telah terpecah-pecah; upah kerjanya sangat rendah.

Kesimpulan Van Deventer yalah bahwa perkembangan penduduk lebih cepat dari sumber-sumber seperti makanan dan ternak. Pendapatan keluarga f 80, dan hanya f 39 berupa uang tunai, sisanya dalam bentuk hasil bumi, sedangkan pajak menjadi f 16 dan dari itu f 9 berupa uang tunai.

Menurut Kielstra dalam surveynya bahwa sejak 1816 sumbangan Indonesia sebesar 832 juta, dan apabila sebagian sejak 1867 dianggap sebagai hutang kehormatan maka sementara itu sumber-sumbernya sendiri tidak mencukupi untuk menutup pengeluarannya malahan ada kekurangan-kekurangan sebesar 151 juta dan 272 dalam periode 1872 – 1902.

Fock berpendapat bahwa pendidikan yang lebih baik akan memperkuat kaum pribumi dalam administrasi; ia juga menyarankan agar diusahakan irigasi, pembangunan jalan kereta-api, pembelian kembali tanah-tanah partikelir, untuk memajukan kesejahteraan rakyat disarankan agar diperbanyak bangunan irigasi, pemberian kredit untuk pertanian, mendorong industri. Dari laporan-laporan itu terbukti bahwa tidak lagi politik kolonial liberal dianut sepenuhnya, tetapi ada kecenderungan untuk memberi kesempatan kepada negara untuk campurtangan. Negeri Belanda diharapkan memberikan sumbangan, untuk memajukan keadaan di Indonesia. Yang diutamakan yalah perkembangan materiil, tanpa diperhitungkan apa yang sesungguhnya menjadi keperluan rakyat sendiri.

Dalam politik "kewajiban moril" yang telah didukung oleh semua golongan, dinyatakan bahwa negeri Belanda harus memperhatikan kepentingan pribumi dan membantu Indonesia dalam masa kesulitan. Politik Etis mulai dilaksanakan dengan pemberian bantuan sebesar f40 juta, suatu pemberian yang telah bertahun-tahun diperjuangkan oleh kaum Etisi yang semuanya menuntut pengembalian jutaan yang telah diambil oleh Nederland.

Politik Etis mengubah pandangan dalam politik kolonial yang beranggapan Indonesia tidak lagi sebagai "wingewest" (daerah yang menguntungkan) menjadi daerah yang perlu dikembangkan sehingga dapat dipenuhi keperluannya, dan ditingkatkan budaya rakyat pribumi.

Perhubungan kolonial antara negeri Belanda dan Indonesia perlu diselaraskan dengan perkembangan di luar Indonesia yang menuntut agar kolonialisme meninggalkan politik exploitasi yang materialistis. Kaum Etisi melancarkan kritik terhadap politik kolonial liberal yang telah memperjuangkan kebebasan kerja dan kebebasan exploitasi partikelir. Mereka berpendapat bahwa kebebasan kerja dan usaha menguntungkan selama 20 sampai 30 tahun tetapi kemudian ternyata ada exploitasi yang lemah oleh yang kuat dan kemakmuran yang kedua menimbulkan penderitaan yang pertama. Maka kebebasan itu bisa dihapuskan dan pemerintah harus memikul tugas memimpin yang lemah dan mengawasi yang kuat. Pengetrapan prinsip perdagangan liberal dalam hubungan kolonial merupakan suatu pengorbanan untuk suatu doktrin, hanya menguntungkan bagi yang kuat. Dengan mengalami (kesesuaian dan sebagainya) kunjungan di Eropa yang membawa kemunduran, usaha perdagangan Indonesia semakin maju. Ada dua kelompok kepentingan yang berhadapan yaitu golongan modal kolonial, yaitu terutama bersifat liberal, dan modal industri – yang terutama terdapat di Twente dan daerah selatan.

Masalah *etische politiek* harus dimulai dengan politik kesejahteraan bagi rakyat kebanyakan, justru adanya berita-berita tentang kemerosotan kehidupan rakyat. Seperti yang secara tegas dinyatakan oleh pemimpin party A.R. Dr. Kuyper, sistim exploitasi harus diganti dengan sistim perwalian, kemudian sistim politik juga sering disebut politik paternalistis, yaitu suatu urusan dari satu pihak – yaitu pihak Belanda – untuk keperluan rakyat

rakyat pribumi, sehingga berlaku pula di sini sebutan politik yang bersemboyan "chez vous, pour vous, sans vous".[10]

Kapitalisme kolonialis pada awal abad 20 mengalami perkembangan sangat pesat; aliran emas dari Indonesia semakin besar; produksi gula meningkat sekali, menjadi berlipat dua antara tahun 1904 dan 1913. Begitu juga hasil-hasil dari perkebunan teh, karet, tembakau, lada, beras, dan kapuk dan timah. Di daerah-daerah luar Jawa dengan kekayaan sumber alamnya, produksi naik, yaitu dari f 74 menjadi f 305 juta, terutama karena industri/perkebunan tembakau dan produksi minyak tanah. Beberapa perseroan besar memegang monopoli, seperti BPM, Shell Co, Standard Oil, dan menguasai daerah luas.

Peranan koloni sebagai tempat penanam modal semakin penting dan kemungkinan mempertahankannya hanya dengan memperkokoh perhubungan antara bangsa-bangsa serta memelihara perdamaian dunia. Politik pintu terbuka membawa akibat suatu denasionalisasi hubungan perdagangan dan lebih bergerak kearah internasionalisasi. Disini kolonialisme yang meluas sebagai imperialisme berusaha menguasai daerah produksi dan pasaran-pasarannya, disamping memerlukan bahan-bahan baku, juga hendak melemparkan hasil industrinya. Kepentingan dua jenis modal bertentangan.

Pada satu pihak hendak dipertahankan kedudukan menguasai baik produksi hasil perkebunan maupun pasaran untuk pelemparan produksi industrinya. Pada pihak lain tidak dapat dihindari tekanan-tekanan modal asing yang hendak berexpansi di Indonesia. Untuk menjaga kepentingan modal, ditempuh oleh Belanda suatu politik yang mengambil sikap berdamai dengan gerakan emansipasi yang hendak mewujudkan aspirasi nasional, suatu politik yang terkenal dengan nama politik *asosiasi* dan yang diharapkan oleh kaum Etisi dapat memperkuat sistim kolonial.

Banyak sifat-sifat imperialisme terdapat didalam kegiatan-kegiatan orang Belanda di Indonesia. Kita melihat suatu surplus modal yang tak dapat ditanam secara menguntungkan didalam-negerinya sendiri; maka modal ini ditanam dalam perusahaan-perusahaan pertanian, pertambangan dan pengangkutan, baik di Jawa yang tenaga kerjanya sebagai faktor produksi sangat murah harganya,maupun di propinsi-propinsi luar Jawa dimana tanah-

[10] Lihat J.E. Stokvis, "Goede woorden zonder Geld", di dalam *De Taak*, 1918, hal. 413.

nya masih melimpah. Kaum industri berdaya upaya memperluas pasaran untuk barang produksinya. Alat-alat kekuasaan nasional dipergunakan untuk menjamin modal yang telah ditanam. Meskipun demikian berbeda dengan kekuasaan kolonial lainnya Nederland menjalankan politik "pintu terbuka", yang mengijinkan masuknya modal dan barang produksi industri asing dengan syarat-syarat yang sama seperti modal dan produksi Belanda sendiri.

Dengan mudah dapat diperlihatkan, bahwa imperialisme itu senafas dengan usaha mencari kesempatan untuk memperoleh keuntungan uang, seperti pasaran atau kesempatan penanaman modal. Mengenai kolonialisme Belanda telah ditunjukkan, bahwa yang demikian itu baru terjadi pada tiga puluh tahunan terakhir dari abad 19. Selanjutnya masih perlu dipersoalkan seberapa jauh golongan yang memonopoli kepentingan ekonomi merampas kekuasaan dan suara rakyat, dan menggunakan sumber-sumber umum untuk memperoleh kepentingan sendiri. Jika dipikir dalam-dalam , masalah-masalah ini dengan mudah dapat dipahami. Lingkup karangan ini dan sumber-sumber yang tersedia tidaklah mengijinkan untuk membicarakannya berkepanjangan. Selanjutnya masih perlu dijelaskan akan peranan dari golongan-golongan kapitalis dalam kegiatan politik dan administratif.

Penjelasan di sini hanya terbatas untuk menunjukkan, bahwa kepentingan ekonomi agaknya memang menjadi faktor penentu yang terpenting dari imperialisme, tetapi perlu diingat juga, bahwa itu bukanlah satu-satunya yang menentukan. Bahkan konsepsi ekonomi tentang imperialisme ini harus dipandang dalam batas sifat dari situasi historis masing-masing negeri.
Sebagai negeri kecil dengan industri yang berkembang agak lebih kemudian, Belanda tak mampu menjamin negara-negara besar dalam ekspansi imperialismenya. Sebaliknya, politik ekonominya menyesuaikan diri terhadap tuntutan-tuntutan negara-negara besar. Banyak contoh-contoh di dalam sejarah kolonial Belanda memperlihatkan fakta-fakta, bahwa kepentingan-kepentingan ekonomi sering bersamaan dengan ideologi humaniter, sehingga dengan mudah dapat diperoleh suatu alasan untuk membenarkan kepentingan-kepentingan ekonomi itu.

Doktrin tentang missi pengadaban diberi perumusan yang tepat. Ada anggapan, bahwa perluasan kontrol politik atas suatu daerah akan mendatangkan keamanan dan ketertiban yang unggul mempunyai kewajiban untuk menyebarkan kekayaan

peradabannya kepada bangsa lain. Perkembangan dan tersebarnya kegiatan missi ada hubungan erat dengan doktrin peradaban itu. Akhirnya, kalau semua movitasi-motivasi dari para partisipasi itu diperhatikan, maka menurut hemat kita, opini lama yang berpendapat, bahwa conquistadores Spanyol datang ke Benua Baru demi Kejayaan, Kebesaran Tuhan dan Emas *(Glory, God and Gold)* itu memang benar-benar berlaku bagi imperialisme Belanda.

Selama periode antara 1900 – 1914 ditunjukkan pengertian terhadap cita-cita rakyat Indonesia yang hendak mulai bergerak kearah emansipasi dan kemerdekaan. Dicarinya bentuk pemerintahan kolonial yang merupakan suatu sistim dimana Barat dan Timur dapat hidup berdampingan dan yang memberi kemungkinan untuk mempersatukan kedua unsur dalam suatu kesatuan politik.

Selama periode 1900 - 1925 banyak kemajuan serta perubahan dan bangunan-bangunan besar telah dijalankan, kesemuanya merupakan keharusan dalam kemajuan yang tidak dapat dielakkan. Di antaranya yalah :

(1) desentralisasi
(2) perubahan-perubahan pemerintahan
(3) perbaikan kesehatan rakyat, emigrasi
(4) perbaikan pertanian dan peternakan
(5) pembangunan irigasi, lalulintas

Usaha-usaha pembangunan itu dijalankan untuk mengikuti perkembangan yang tidak dapat dielakkan lagi, antara lain sebagai akibat politik kolonial sebelumnya, yalah *komersialisasi* dan *birokratisasi*. Yang pada gilirannya memerlukan *komunikasi* yang lebih luas dan cepat, *edukasi* yang lebih terbuka dan mempertinggi kehidupan ekonomi rakyat pada umumnya. Biaya untuk melaksanakan pembangunan itu diperjuangkan di Parlemen agar dibebankan pada pemerintah Belanda meliputi jumlah sebesar 40 juta yang diberikan sebagai restitusi.

Sejak 1883 1898 telah dibuat bangunan-bangunan produktif, seperti jalan kereta-api sebesar 231 juta, pelabuhan 61 juta, pengairan 49 juta. Sebagian besar dari pembiayaannya dapat ditutup dengan pajak-pajak terutama dari perusahaan dan perkebunan dan dengan pinjaman-pinjaman baru. Sejak 1912 Hindia

Belanda sebagai badan hukum dapat mengadakan pinjaman sendiri.

Pada tahun 1903 di Jawa dan Madura ada dalam exploitasi 1788 km jalan kereta-api negara, 261 km swasta, 1838 km trem kesemuanya 3887 km. Dengan jaringan seluas itu ternyata mempunyai pengaruh besar pada pasaran hasil-hasil bumi, terutama beras. Kecuali mempermudah perdagangan, komunikasi antar daerah dan kota yang semakin mudah dan cepat, mempermudah mobilitas penduduk, mempercepat urbanisasi. Meringankan penjagaan keamanan dan pemerintahan umumnya. dan lain sebagainya.

Sangat vital bagi pertanian yalah pengairan. Dan oleh pihak pemerintah telah dibangun secara besar-besaran sejak 1885 bangunan-bangunan irigasi Brantas dan Demak, seluas 96.000 bau; pada tahun 1902 menjadi 173.000 bau. Menurut rencana tahun 1890 akan dibangun irigasi seluas 427.000 bau selama 10 tahun, akan tetapi pada tahun 1914 hanya terlaksana 93.000 bau. Untuk membebaskan rakyat dari cengkeraman lintah darat atau 'riba' maka didirikan bank-kredit pertanian, yang diketuai oleh pembesar pemerintah setempat, keanggotaan pengurus dipegang oleh pegawai-pegawai negeri. Modal hendak diusahakan dari deposito dan simpanan-simpanan.

Untuk menolong petani dalam memperoleh benih padi secara murah didirikan lumbung-lumbung desa yang akan mendistribusikan benih dengan maximum 5 pikul bagi setiap keluarga yang harus dikembalikan sebulan sesudah panen dengan ditambah 10% bagi penyusutannya. Di Cirebon pada tahun 1902 hanya ada 994 lumbung, beberapa tahun kemudian menjadi 1084.

Usaha-usaha lain untuk meningkatkan kehidupan rakyat yaitu pendirian bank simpanan, regie candu, rumah gadai negeri, pengawasan, pengerahan tenaga kerja ke daerah seberang, pembelian kembali tanah-tanah partikelir dan emigrasi.

Dari sisa-sisa Tanam-paksa, tanaman kopilah yang masih dipertahankan di beberapa daerah seperti Minahasa. Dalam penanaman tebu banyak terjadi tekanan-tekanan dari kepala daerah untuk penyewaan tanah, pengerahan tenaga kerja sedangkan dalam pembagian air kebun-kebun tebu didahulukan. Keadaan yang sangat menyedihkan yalah kekejaman yang dilakukan terhadap "kuli" yang dikerahkan untuk bekerja di perkebunan di

Deli, seperti dilukiskan dalam buku "De millioenen uit Deli". Sebagai usaha untuk melindungi rakyat, *herendiensten* mulai dikurangi dan pembelian kembali tanah-tanah partikelir. Sejak 1836 para tuan tanah diberi kekuasaan feodal terhadap penghuni tanahnya, hak mana makin lama menimbulkan keadaan yang makin buruk. Baru mulai tahun 1909 tersedia uang untuk melaksanakan pembelian itu.

b. Emigrasi

Penduduk di Jawa dan Madura pada tahun 1865 berjumlah 14 juta dan pada tahun 1900 telah berlipat dua. Daerah yang subur tanahnya menjadi yang padat penduduknya. Di daerah itu pada umumnya sudah tidak ada lagi tanah kosong, bahkan tanah persawahan juga digunakan untuk penanaman tanaman export, seperti tebu, tembakau. Dalam abad ke 19 terjadi migrasi dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, berhubung dengan perluasan tanaman tebu. Perusahaan gula ini memberi pencarian baru di daerah di mana perkembangan penduduk lebih cepat dari perluasan tanah pertanian. Dari tahun 1885 sampai tahun 1900 penduduk bertambah 30%, sawah pengairan hanya bertambah 5,7%, tanah pertanian 16%.

Emigrasi ke daerah luar Jawa disebabkan karena permintaan besar akan tenaga kerja di daerah-daerah perkebunan Sumatra Utara, khususnya di Deli, sedang emigrasi ke Lampung mempunyai tujuan untuk menetap.

c. Edukasi

Pengajaran diberikan di sekolah kelas I kepada anak-anak pegawai negeri dan orang-orang yang berkedudukan atau berharta di sekolah kelas II kepada anak-anak pribumi pada umumnya. Sekolah jenis pertama didirikan menurut stb. 1893 no. 128, di ibukota karesidenan, *afdeling, onderafdeling* atau kota pusat perdagangan dan kerajinan. Pada tahun 1903 terdapat 14 sekolah kelas I di ibukota karesidenan dan 29 di ibukota *afdeling* matapelajaran yang diberikan yalah membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, ilmu alam, sejarah, menggambar.

Pada tahun 1903 di Jawa dan Madura terdapat 245 sekolah kelas II negeri, 326 sekolah partikelir, diantaranya 63

dari zending. Jumlah murid pada tahun 1892 ada 50.000, diantaranya 35.000 di sekolah negeri dan 15.000 di sekolah swasta. Pada tahun 1902 ada 1623 orang anak pribumi yang belajar pada sekolah Eropah. Perbandingan di Jawa dan Madura antara jumlah anak yang bersekolah dengan jumlah penduduk adalah 1 : 523 dan biaya yang dikeluarkan untuk setiap anak hanya f 0.035

Untuk mendidik calon pamongpraja ada 3 sekolah OSVIA di Bandung, Magelang dan Probolinggo dengan 60 murid setiap sekolah. Ada 3 sekolah guru di Bandung, Yogyakarta dan Probolinggo, satu sekolah dokter pribumi di Jakarta yang mengeluarkan 18 dokter setiap tahun, sepertiganya diperuntukkan bagi luar Jawa. Untuk Jawa dan Madura ada 1 dokter untuk 100.000 penduduk. Pada tahun 1902 dibuka sekolah Pertanian di Bogor.

d. Politik kesejahteraan

Dengan perkembangan pesat perusahaan perkebunan timbullah keperluan/tuntutan untuk menciptakan prasarana-prasarana – baik jasa-jasa maupun lembaga-lembaga – yang sesuai dengan tingkat perkembangan ekonomi ini, yaitu masyarakat yang berlandasan pada ekonomi keuangan dan tatanegara modern. Yang menjadi persoalan besar yalah bahwa tuntutan itu diajukan oleh politik kolonial liberal dan penduduk golongan Eropah yang hidup dalam sektor ekonomi maju sedang pada umumnya rakyat masih hidup secara agraris pada taraf ekonomi sederhana. Perusahaan perkebunan Barat memerlukan komunikasi yang baik untuk pengangkutan hasilnya; pemerintahan yang baik untuk menjamin keamanan, tersedianya tanah dan tenaga; pendidikan untuk menyediakan tenaga pekerja/administratif. Perekonomian yang dualistis pada satu pihak memberi kesempatan bagi industri perkebunan untuk berexploitasi dengan tanah dan tenaga murah karena belum di kenal di kalangan rakyat kontrak dalam arti sebenarnya pada pihak lain tarap kehidupan rakyat masih rendah – ketrampilannya, pendidikan, organisasinya, – sehingga tidak dapat maju dalam menghadapi kesatuan ekonomi yang kuat, malahan merosot kedudukannya dari petani-pemilik tanah menjadi pekerja pada pabrik. Kondisi hidup rakyat pribumi – meskipun ada di tengah-tengah kemajuan pesat

industri perkebunan – mempunyai ciri sebagai berikut: makanan sangat sederhana, pakaian yang sederhana, perumahan tidak kokoh.

Di Jawa tidak mudah timbul kelas menengah yang kuat yang dapat menyaingi bangsa Arab, Cina dan Eropah. Di luar Jawa kondisi untuk pertumbuhan golongan itu lebih baik karena penduduk tidak besar dan mudah mengambil bagian dalam perkembangan ekonomi.

Penetrasi ekonomi-keuangan belum berhasil menghilangkan setiap tradisionil sehingga perubahan-perubahan dari (politik negara) yang dituntut oleh perkembangan industri dan modernisasi. Untuk menaikkan tingkat kehidupan rakyat diusulkan agar diadakan gerakan koperasi yang dimulai dari rakyat sendiri dengan bantuan dari pemerintah.

Beberapa permasalahan yang memerlukan pemecahan, yalah: masalah penduduk, irigasi, ke-riba-an, sistim kredit, masalah kesehatan rakyat, masalah candu, pemadatan, masalah perburuhan.

e. Sistim kredit

Permintaan akan kredit sangat besar di kalangan rakyat yang kebanyakan hidup dengan hutang. Kredit yang diberikan oleh Cina, Arab dan orang pribumi pada umumnya memberi bunga dengan riba yang mencapai 15% sebulan. Karena sangat kekurangan modal rakyat terpaksa mengambil kredit atau bayaran terlebih dahulu dari gajinya. Untuk membrantas sistim ini maka pemerintah mendirikan rumah-rumah pegadaian sejak 1900 yang memegang monopoli pegadaian itu. Penggadaian menjadi praktek yang sangat umum, pada tahun 1929 jumlah barang yang digadaikan ada 56 juta seharga 207 juta rupiah. Kredit ini produktif dalam arti bahwa digunakannya untuk membeli benih, barang jualan atau modal berjualan di warung-warung. Bunga yang diperoleh oleh pemerintah pada tahun 1926 sebesar 17 juta, maka ini dikritik karena hal itu semacam riba juga.

Pada tahun 1904 didirikan bank kredit rakyat yang memberi petunjuk kepada rakyat mengenai penggunaan kredit itu. Lumbung desa didirikan dengan sumbangan rakyat sendiri. Petani dapat meminjam padi dan dikembalikan waktu habis

panen dengan ditambah bunganya. Dengan demikian dapat dicegah kemerosotan harga beras sehabis panen.

Pada tahun 1917 jumlah bank padi ada 11.000 akan tetapi dengan perbaikan pengangkutan serta kemajuan ekonomi-keuangan, modal rata-rata setiap bank pada tahun 1917 yalah 243 pikul, jumlah peminjam rata-rata 125 sampai 182. Disamping bank padi juga didirikan bank desa yang memberikan pinjaman kecil untuk petani setempat. Bunganya mula-mula 10%, kemudian diturunkan menjadi 6 dan 8%.

Pada tingkat kabupaten didirikan bank kredit rakyat yang memberi kredit untuk memajukan industri dengan bunga 18% setahun pada tahun 1921, kemudian diturunkan menjadi 15 a 12% pada tahun 1929. Pinjaman diberikan selama 10 sampai 20 bulan; tahun itu ada 89 bank meliputi 960.000 peminjaman dan penabungan. Meskipun tidak berhasil mendorong produksi pribumi, tetapi telah mendidik rakyat tentang penggunaan uang. Kegagalan lain yalah bahwa tidak dapat diwujudkan koperasi dalam soal pinjam-meminjam.

Usaha melaksanakan koperasi pada umumnya mengalami kegagalan karena pelbagai faktor yang menghalang-halangi antara lain masyarakat desa belum sepenuhnya tercakup dalam ekonomi-keuangan; tidak ada kelas menengah pribumi yang menjadi penggeraknya, masih kuat rasa komunal di desa sehingga tidak ada dorongan mencari kemajuan. Perundang-undangan pada tahun 1915 dan kemudian tahun 1927 mengatur kemudahan-kemudahan bagi usaha koperatif. Akan tetapi pada tahun 1927 hanya terdaftar 90 badan koperasi kredit, sedang koperasi konsumsi lebih besar jumlahnya. Banyak koperasi yang menjadi bagian dari Pergerakan Nasional berdiri karena hasrat kaum pribumi menandingi/menghindari dominasi Cina.

Persoalan kesehatan rakyat sangat besar karena dalam daerah yang padat penduduknya, wabah penyakit mudah berjangkit. Dinas kesehatan pemerintah mempunyai klinik yang bersebar di seluruh Indonesia dan dengan penyuntikan dan pencacaran berhasil mengurangi epidemi, antara lain cacar, pelbagai penyakit perut. Dengan penerangan dan pelajaran dicoba untuk memberi kesadaran untuk hidup yang hygienis. Menurut catatan tahun 1930 angka kematian setiap tahun adalah antara 25 dan 40 perseribu.

Masalah pemadatan candu ditimbulkan oleh imigrasi Cina ke Hindia Belanda yang mempunyai kebiasaan minum candu. Pada tahun 1930 diantara 167.191 pemadat ada 80.762 orang dari golongan Cina. Untuk mengawasi dan membatasi pemadatan, pemerintah memegang monopoli sejak 1904 di Jawa dan pada tahun 1920 diperluas keluar Jawa, seluruhnya ada 1051 tempat penjualan, sedang daerah-daerah yang bebas dari pemadatan 1/20 dari jumlah penduduk. Dari monopoli itu pemerintah pada tahun 1930 mendapat 29 juta gulden atau 5% dari seluruh pajak yang masuk.

Masalah perburuhan sangat penting artinya bagi perusahaan Barat yang menanam modalnya di Hindia Belanda oleh karena dapat meng-exploitasikan daerah-daerah hanya apabila tersedia kaum buruh. Ada daerah-daerah yang sangat jarang penduduknya, sehingga persediaan tenaga sangat terbatas, atau tenaga kerja tidak teratur. Dengan dihapuskannya exploitasi negara pada tahun 1870 dan dengan pendirian perkebunan dari perusahaan swasta maka ada keperluan menentukan sangsi-sangsi untuk pelanggaran kontrak-kontrak kerja. Pada tahun 1877 peraturan polisi dihapuskan, yang menentukan bahwa pelanggaran itu dihukum dengan penjara atau denda.

Pada tahun 1880 *Ordonansi kuli* dijalankan untuk mengerahkan tenaga buruh ke daerah-daerah di mana penduduk sangat jarang, maka pengusaha diijinkan membuat kontrak dengan kaum buruh dengan sangsi hukuman. Ordonansi Sumatra Timur hendak melindungi buruh yang didatangkan dari Jawa dan Cina. Seluruhnya meliputi jumlah kira-kira 450.000 orang. Menurut kontrak itu majikan berkewajiban memberi upah/gaji secara teratur, perumahan, makanan, rumah sakit dan pengobatan yang bebas, pengangkutan kembali ke daerah asalnya secara bebas. Inspeksi perburuhan mengawasi pelaksanaan kontrak-kontrak tersebut. Dengan adanya kontrak buruh berdasarkan sangsi hukuman, pengusaha di Sumatra Utara mendapat tenaga cukup murah, meskipun masih jauh lebih mahal dari buruh di Jawa. Jumlah tenaga buruh yang dikerahkan terbatas untuk menjaga agar tidak timbul situasi dimana tanah untuk perkebunan berkurang oleh keperluan tanah pertanian bagi pendatang dari Jawa.

Karena aksi ILO yang mempersoalkan jenis buruh itu dan Undang-Undang Tarif di Amerika Serikat dari tahun 1930 yang

menolak hasil perkebunan yang menggunakan tenaga kontrak itu, maka perkebunan tembakau melepaskan hak-haknya atas dasar sangsi hukuman itu dengan menggunakan buruh bebas. Pada tahun 1931 dan 1936 berlaku Undang-undang yang menghapuskan kuli kontrak itu secara bertahap sehingga pada tahun 1946 akan terhapus seluruhnya.

f. Perubahan pemerintahan/administrasi

Lama sebelum 1900 telah terasa oleh umum bahwa pemerintahan sangat mengalami sentralisasi, seluruh jalannya pemerintahan ditentukan oleh menteri jajahan dan pusat pemerintahan ada di Nederland. Sejak 1854 berdasarkan Peraturan tahun itu Parlemen mempunyai hak mengawasi pemerintahan Hindia Belanda dan kepentingannya ada di bawah politik di negeri Belanda. Yang sangat menghambat yalah bahwa pusat pemerintahan sendiri tidak mempunyai ketegasan untuk mengambil keputusan, umpamanya tentang penghapusan Sistim Tanampaksa, kebebasan berusaha bagi kaum modal, masalah Aceh, masalah Cina, pemisahan keuangan negeri Belanda dan Hindia Belanda penyelesaiannya kesemuanya berlangsung bertahun-tahun.

Untuk penyelesaian dengan perkembangan perusahaan bebas sejak 1870, administrasi perlu diubah berdasarkan prinsip persamaan dan ekonomi. Reorganisasi bertujuan mempertinggi efficiency dan memperbesar otonomi, maka untuk keperluan itu diambil sebagai contoh lembaga-lembaga otonom yang telah didesentralisasikan di Nederland. Desentralisasi mencakup tiga hal, yaitu:

(1) delegasi kekuasaan dari pusat pemerintahan ke pemerintahan di Hindia Belanda, dari pemerintahan ini ke departemen, pejabat lokal, dan dari pejabat Belanda ke pejabat pribumi.

(2) menciptakan lembaga-lembaga otonom yang mengatur urusan sendiri

(3) pemisahan keuangan negeri dari keuangan pribadi.

Undang-undang Desentralisasi dari tahun 1903 menciptakan dewan-dewan lokal – baik dewan karesidenan maupun dewan

kota sebagai lembaga hukum yang mempunyai wewenang membuat peraturan-peraturan tentang pajak, urusan-urusan bangunan-bangunan umum – seperti jalan-jalan, taman-taman, jembatan-jembatan, makam-makam dan sebagainya. Pada tahun 1905 didirikan dewan kota di Batavia, Mr. Cornelis dan Buitenzorg, setahun kemudian di beberapa tempat di Jawa dan di luar Jawa. Golongan Eropah mempunyai mayoritas; diantaranya anggota-anggota ada yang diangkat Gubernur Jenderal, ada yang dipilih, ada yang berdasarkan jabatannya, seperti bupati dan patih dalam dewan daerah/karesidenan.

Usaha-usaha lebih lanjut dalam desentralisasi dijalankan terus, pada tahun 1914 diajukan suatu rencana perubahan pemerintahan tetapi ditolak; pada tahun 1918, diterima peraturan 'Ontvoogding' (pembebasan dari perwalian) dari pamong praja dan pada tahun 1922, sistim baru pemerintahan (Bestuurshervorming 1922).. Pada tahun 1918 telah dilantik suatu Panitia Perubahan pemerintahan yang bertugas menyiapkan perubahan dalam negara Hindia Belanda tahun 1925.

g. Pemerintahan daerah

Berdasarkan Undang-undang Perubahan (Bestuurshervormingswet) tahun 1922, Hindia Belanda dibagi atas *gouvernementen,* yaitu kesatuan-kesatuan daerah yang kemudian diberi nama provinsi. Yang mula-mula dibentuk yalah Jawa Barat pada tahun 1926, Jawa Timur pada tahun 1929, dan Jawa Tengah 1930, sedang kedua residen di Surakarta dan di Yogyakarta menjadi gubernur; pada tahun 1926 Maluku juga menjadi suatu *gouvernement.*

Selaras dengan perubahan-perubahan diatas, dewan-dewan karesidenan dihapus dan pada tahun 1925 dewan-dewan kabupaten dibentuk. Selain itu dibentuk pula dewan provinsi, dewan-dewan kota , dan di luar Jawa juga dewan-dewan lokal. Dewan propinsi dipimpin oleh gubernur, kedinasan atau para anggauta dari tiga golongan penduduk, yang sebagian dipilih oleh anggota dewan kabupaten dan dewan kota dan sebagian lain diangkat. Pekerjaan routine dilakukan oleh dewan utusan dibawah pimpinan gubernur.

Dewan kabupaten berjumlah 76 di Jawa dan diketuai oleh

Bupati. Seperti pada dewan provinsi, sebagian dari anggota ada yang dipilih, ada yang diangkat. Sebagian besar dari anggota pribumi, berasal dari golongan pegawai, sedang petani sangat sedikit diwakili. Dalam sidang umumnya ada pembagian atas komisi, antara lain yang mengurus pekerjaan umum, pasar, peraturan-peraturan, sedangkan pekerjaan routine ada di tangan dewan komisaris-komisaris. Jumlah dewan kota ada 32, pada tahun 1901 di Jawa dan 13 di luar Jawa; yang menjadi ketua yalah seorang walikota. Semua anggota dipilih, meskipun mayoritas masih dipegang oleh golongan Belanda. Ini disebabkan oleh batasan hak memilih, antara lain dengan pajak pendapatan yang sedikit-dikitnya f300. Anggota dewan kota harus paham bahasa Belanda. Yang melakukan pekerjaan sehari-hari adalah dewan harian. Dewan lokal jumlahnya di luar Jawa ada 10 buah, kecuali dewan di Sumatra Timur, kesemuanya mempunyai mayoritas pribumi.

Menjelang akhir abad 19 perkembangan administrasi sangat pesat karena banyak pelayanan yang perlu diselenggarakan oleh pemerintah: 1897 urusan hutan-hutan: 1899, urusan pertambangan; sekitar 1900 urusan bank kredit; kemudian secara berturut-turut diadakan dinas pertanian, perikanan, kerajinan, dinas kesehatan dan peternakan diperluas, sejak 1907 pengajaran juga diperluas. Sehubungan dengan expansi aktivitas negara maka didirikan departemen-departemen baru. Pada tahun 1904 Departemen Pertanian, 1907 Departemen Perusahaan-perusahaan Negara yang pada tahun 1911 bergabung menjadi Departemen Pertanian, Industri dan Perdagangan.

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, secara berangsur-angsur akan dibentuk provinsi dan kemudian kabupaten sebagai daerah otonom. Di mana provinsi belum terbentuk, tetap berlaku pelaksanaan undang-undang tahun 1903.

h. Undang-undang dasar

Perubahan pemerintahan mencakup juga rencana memperbesar kekuasaan kepada pejabat pribumi. Politik Etis bertujuan memajukan rakyat dan berhubung dengan bertambah besarnya biaya administrasi ada gagasan untuk menghapus dualisme dan mengganti pejabat Belanda dengan pejabat Indonesia. Pejabat

Indonesia tidak lagi berfungsi sebagai perhiasan tetapi sebagai alat administrasi yang telah dibebaskan dari bimbingan pejabat Belanda *(ontvoogding)*. Dengan demikian jumlah asisten-residen dan kontrolirnya dapat dikurangi. Pada umumnya *ontvoogding* tidak dapat berjalan lancar karena ada kekhawatiran bahwa pejabat Belanda akan kehilangan hubungan dengan rakyat samasekali.

Salahsatu bentuk pelaksanaan dan pemberian otonomi kepada Hindia Belanda adalah persiapan-persiapan mendirikan Dewan Rakyat. Pada tahun 1907 oleh Fock diusulkan perluasan Dewan Hindia. Kemudian penggantinya, de Waal Malefijt pada tahun 1913 mengusulkan pendirian suatu Dewan Kolonial, beranggota 29 orang, diantaranya anggota-anggota Dewan Hindia, 11 anggota yang dipilih oleh dewan lokal, sebagian mewakili kepentingan Belanda dan sebagian lain yang diangkat, untuk membela kepentingan pribumi.

Volksraad atau Dewan Rakyat menjadi badan perwakilan berkeanggotaan 39 orang, 19 diangkat. Badan ini tidak mempunyai kekuasaan legislatif hanya memberi advis antara lain mengenai keuangan. Pada tahun 1920 jumlah anggota menjadi 49 orang, diantaranya 24 dipilih dan 24 diangkat, termasuk 8 pribumi. Anggota Dewan Rakyat mempunyai kebebasan untuk mengecam aturan-aturan pemerintah. Dengan pecahnya Perang Dunia I timbullah suasana yang lebih demokratis. Bahasanya boleh digunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa debat. Pidato dalam sidang-sidang permulaan sangat bersemangat, bahkan sering revolusioner, mengandung banyak kecaman terhadap pemerintah dan banyak kekecewaan-kekecewaan, kesemuanya melahirkan perasaan anti-kolonialisme, anti-Belanda dan anti-kapitalisme.

Perasaan ini meluap waktu di negeri Belanda ada pergolakan pada akhir Perang Dunia I, sehingga Gubernur Jenderal mengumumkan janji untuk mengadakan perubahan-perubahan sosial. Janji itu segera disusul dengan pembentukan Panitia Perubahan. Panitia ini dibentuk pada tahun 1919 dan mencakup wakil-wakil dari pelbagai kepentingan politik. Laporan memuat juga pendapat-pendapat yang menyimpang dengan mengemukakan dua hal yang pokok: pusat kekuasaan perlu dipindah ke Indonesia dan pemerintah Hindia Belanda harus mencakup unsur-unsur pribumi. Selanjutnya hubungan antara negeri Belanda dan Hindia

Belanda perlu diatur kembali, berdasarkan landasan baru; Dewan Rakyat perlu diberi kekuasaan legislatif; dan masih banyak usul-usul yang sangat maju.

Undang-undang Dasar baru negeri Belanda dari tahun 1922 memuat gagasan-gagasan seperti yang disarankan oleh Panitia Perubahan. Hindia Belanda diakui sebagai bagian integral dari Kerajaan Belanda. Pemerintah Tertinggi Hindia Belanda ada pada Mahkota, sedang pemerintahan umum dijalankan oleh Gubernur Jenderal (seperti) yang diatur dalam undang-undang, kecuali untuk kekuasaan yang menjadi hak Mahkota (art. 60). Menurut artikel 61 konstitusi ditetapkan oleh badan undang-undang di Negeri Belanda; badan perwakilan lokal perlu didengar dahulu; kecuali hal-hal yang menjadi hak Mahkota peraturan-peraturan tentang urusan Hindia Belanda perlu ditetapkan oleh badan-badan lokal. Menurut artikel 62 semua peraturan oleh badan-badan lokal yang bertentangan dengan Mahkota dan kepentingan umum dapat ditiadakan dengan undang-undang.

i. Tatanegara 1925

Perubahan-perubahan dalam Undang-undang Dasar mengharuskan perubahan-perubahan besar dalam konstitusi Hindia Belanda. Regeerings Reglement 1854 diubah menurut usul Fock pada tahun 1922. Kemudian de Graaff mengusulkan perusahaan dari Regeerings Reglement 1854 itu yang diterima oleh Staten Generaal sebagai konstitusi (*Staatsinrichting*) pada tahun 1925.

Rencana perubahan yang diusulkan de Graaff menimbulkan banyak ketidak-puasan baik di kalangan kaum nasionalis maupun Belanda yang progressif. Mereka membentuk panitia untuk merumuskan suatu kenyataan tentang sistim politik di Hindia Belanda. Ketuanya Oppenheim dan anggota-anggotanya adalah Carpentier-Alting, Dr. Kleintjes ahli dalam Hukum Konstitusi, van Vollenhoven ahli hukum adat, Snouck Hurgronje ahli dalam Hukum Islam. Dalam kesimpulan laporan mereka dilancarkan kecaman terhadap usul resmi dari Panitia Perubahan yang hanya mementingkan perubahan undang-undang dan bukan penyerahan pemerintahan.

Pada tahun 1928 timbullah aliran pembaharuan dalam pemerintahan yang juga terkenal sebagai gerakan *ontvoogding*

(pendewasaan) pamong praja pribumi. Dasar politik ini yalah prinsip protektorat, yaitu yang hendak membiarkan penduduk pribumi ada di bawah pimpinan kepalanya sendiri baik yang diakui maupun yang diangkat oleh Pemerintah Hindia Belanda.

Pada tingkat perkembangan pemerintahan waktu itu bupati yang sebenarnya menurut hukum ada di bawah "saudara tua", yaitu residen, dalam prakteknya telah menjadi bawahan asisten-residen, dan melakukan tugasnya berdasarkan persetujuan serta kerjasama dengan kontrolir. Menurut kenyataannya kontrolir menjadi kepala daripara wedana. Dengan demikian bupati hanya secara resmi berkedudukan sebagai kepala pamong praja pribumi akan tetapi telah banyak kehilangan kekuasaannya. Sampai jatuhnya Hindia Belanda baru sepertiga dari tujuh puluh kabupaten mengalami *ontvoogding.*

Perkembangan masyarakat Indonesia yang pesat ke arah dunia modern sebagai akibat kemajuan perdagangan, perusahaan dan komunikasi memerlukan diferensiasi serta spesialisasi dalam pelbagai kedinasan sebagai unsur pemerintahan modern. Lapangan pekerjaan pamongpraja mulai bersilangan dengan cabang-cabang pemerintahan lain, seperti dinas pertanian, kehewanan, pekerjaan umum, perbankan, pengajaran, kesehatan dan sebagainya. Untuk mempertahankan ketentraman dan ketertiban diperlukan organisasi politis yang rapi sehingga pamongpraja tidak lagi memenuhi syarat.

Di samping itu kedinasan-kedinasan baru didirikan, seperti dinas pajak, dinas pajak tanah, dinas koperasi, dan kredit rakyat, dinas kesehatan, dan lain-lain. Banyak wewenang pamongpraja mulai diserahkan kepada kedinasan-kedinasan itu. Sebagai contoh yang menyolok yalah pemisahan pamongpraja dan pengadilan, dengan dihapuskan pengadilan polisi oleh pamongpraja dan diganti dengan ***landgerecht***, pengadilan negeri.

Untuk mencapai kemajuan dalam pelbagai bidang, seperti perdagangan dan kerajinan, diperlukan penyuluhan secara luas kepada rakyat. Selama dinas-dinas baru belum mempunyai hubungan erat dengan pamongpraja, penyuluhan itu tidak dapat mencapai rakyat. Terasa sekali bahwa soal penyuluhan itu sangat memerlukan perantara yang telah berabad-abad mendapat kepercayaan rakyat, yaitu pamongpraja. Dalam menyiapkan dan mengetrapkan peraturan perlu diikutsertakan dan diminta

nasehat mereka, bahkan kedinasan dilarang membuat peraturan-peraturan sendiri yang mencapai bidang pamongpraja. Telah menjadi kenyataan bahwa spesialisasi tidak mengurangi bahkan memperkuat peranan pamongpraja.

Tidak lama setelah dilaksanakan perubahan sejak tahun 1926 mengenai pembagian atas daerah-daerah sangat terasa kepincangan serta kesulitan-kesulitan yang timbul di kalangan pamongpraja sehingga pada tahun 1931 perlu diadakan perubahan lagi. Jumlah residensi dikurangi menjadi 17, di mana-mana bupati di dampingi oleh seorang asisten residen, sedang jabatan kontrolir diadakan lagi, bahkan kepadanya diperbantukan seorang atau dua calon kontrolir. Perubahan terakhir itu berhasil memperkuat kedudukan bupati, yang bukan lagi merupakan "saudara muda" dari residen, tetapi berkedudukan sejajar dengan dia.

Di samping kedudukannya dalam pemerintahan pusat baik gubernur maupun bupati juga memperoleh fungsi kepemimpinan, yaitu masing-masing sebagai ketua dewan provinsi dan dewan kabupaten, lagi pula masing-masing merangkap ketua dari dewan harian badan-badan perwakilan tersebut. Dalam susunan pamongpraja yang baru seorang residen bertugas mengawasi pemerintahan kabupaten serta mengkoordinasikan pelbagai dinas kesejahteraan dan pemimpin pelaksanaan perencanaan.

Bupati mempunyai kedudukan yang dualistis: ia menjadi kepala kabupaten baik sebagai kesatuan administrasi maupun sebagai daerah otonom. Tugasnya menjadi bertambah berat, bahkan menjadi lebih sulit karena banyak yang serba baru baginya, antara lain pimpinan umum dalam pekerjaan umum, pengawasan keuangan lagi pula tugas yang berseluk-beluk sebagai ketua dewan kabupaten. Pada umumnya para bupati mempunyai kecakapan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan-tuntutan baru itu.

Kedudukan asisten residen diturunkan, oleh karena ia bukan lagi atasan dari bupati, tetapi seorang "saudara mudanya", yang mendampinginya dalam pemerintahan sehari-hari. Disamping itu ia masih juga menjadi anggota dewan kabupaten dan dewan hariannya. Para kontrolir mempunyai lingkungan pekerjaan sama dengan kepalanya, yalah asisten-residen. Ia bertugas untuk lebih banyak membuat hubungan dengan anggota-anggota pamongpraja bawahan dan lebih mengalami kehidupan di desa-desa.

Pada akhirnya para Wedana dan Asisten Wedana sebagai unsur terbawah dari hierarki birokrasi ternyata menjadi dasar bagi pemerintahan. Pada merekalah terletak kewajiban yang berat untuk melaksanakan peraturan-peraturan di daerah pedesaan. Baik sebelum maupun sesudah perubahan pemerintahan tanggungjawab mereka semakin meningkat, maka semakin terasa tuntutan untuk mempertinggi tingkat pendidikannya. Di daerah-daerah luar Jawa perkembangan pemerintahan menunjukkan perbedaan. Karena jarang penduduknya, struktur masyarakatnya dan lembaga-lembaganya, lagi pula perbedaan badan pemerintah pribumi, maka susunan pemerintahan berlainan dari yang terdapat di Jawa.

Di luar Jawa terdapat masyarakat-masyarakat adat yang hidup dengan penuh kesengsaraan, tambahan lagi ada banyak sekali daerah-daerah dengan pemerintahan sendiri(*zelfbesturende landschappen*). Oleh karena intensitas pemerintah Belanda kurang daripada di Jawa, maka juga kurang terasa pengaruh dari proses desentralisasi, spesialisasi, dan *ontvoogding* seperti yang dilakukan di Jawa.

Setelah pendirian gubernemen Maluku pada tahun 1926 mengalami kegagalan, barulah pada tahun 1938 diadakan tiga provinsi atau *eilandgewest*, yalah Sumatra, Borneo (Kalimantan) dan Timur Besar, dengan berturut-turut ibukotanya Medan, Banjarmasin dan Makasar. Provinsi Sumatra dan Borneo masing-masing mempunyai satu "masyarakat kelompok", lengkap dengan dewan perwakilan dan dewan hariannya, di bawah pimpinan residen sebagai ketuanya. Di setiap keresidenan terdapat pelbagai dinas khusus, antara lain pekerjaan umum, kesehatan rakyat, kehewanan, pertanian, yang masing-masing dipimpin oleh inspektur daerah.

Rencana pemerintah Hindia Belanda untuk mengembangkan pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*) baru mulai dilaksanakan beberapa tahun sebelum Perang Dunia Kedua, yaitu dengan memulihkan pemerintahan sendiri di Sulawesi dan Bali. Dari perkembangan pemerintahan dalam abad ke 20 nyatalah bahwa pemerintahan tidak lagi bersifat patriarkhal amum belumlah dapat dikatakan bahwa demokratisasi telah berkembang dengan pesatnya. Di luar Jawa perubahan administrasi menunjukkan perbedaan menyolok dengan perkembangannya sejak 1900. Diciptakannya birokrasi yang ada di bawah hegemoni pamong praja Eropah.

Desentralisasi bertujuan untuk menghapus sisa-sisa dari masyarakat tradisionil yang menghalang-halangi perkembangan administrasi modern, seperti masyarakat-masyarakat adat. Kemudian diciptakan di Jawa bagian-bagian teritorial yang setengah otonom, sedang di luar Jawa pengurangan "daerah pemerintahan sendiri" sejak 1914. Dengan diciptakannya masyarakat kelompok (*groepgemeenschap*) pada tahun 1936 sebagai unit administratif dihidupkan kembali kesatuan-kesatuan kuno yang sepenuhnya ada di bawah kekuasaan pamong praja Belanda.

Dalam dasawarsa terakhir pemerintahan Hindia Belanda, semboyan modernisasi dalam administrasi dibungkam dengan menghidupkan kembali prinsip Belanda yang terkenal sebagai pemerintahan tidak langsung. Anakronisme feodal ini dibenarkan oleh pemerintah kolonial dengan menunjukkan kepada prinsip etnisitas (kesukuan)' sebagai dasar pemerintahan dan bukan prinsip teritorialitas. Pandangan Belanda ini tidak menghendaki kalau "unsur asing" disuntikkan ke dalam struktur administrasi di luar Jawa, maka dari itu kedudukan kepala adat dikembalikan lagi sebagai bentuk dari apa yang mereka sebut "bentuk bebas dari desentralisasi".

Pada waktu menjelang Perang Dunia Kedua kekuasaan kolonial sangat kuat, pimpinan pusat semakin ketat, maka menjadi semakin samar-samar gambaran masadepan Hindia Belanda. Hal ini dengan nyata sekali dapat dilihat dari pernyataan Gubernur Jenderal de Jonge pada tahun 1936, yang menggambarkan bahwa suatu otonomi baru dapat diberikan kira-kira tigaratus tahun kemudian!

Baik segi sistim pemerintahan tidak langsung maupun dari segi dualisme sebagai hakekat masyarakat kolonial, bidang hukum dan peradilan di Hindia Belanda juga terdiri atas dua bagian yang masing-masing mencakup lingkungan yang berbeda sekali. Pada satu pihak ada pengadilan gubernemen dan pada pihak lain pengadilan pribumi. Baik dalam Peraturan Pemerintah dari tahun 1854 kemudian dalam peraturan Hindia dari tahun 1925 pembagian atas dua bagian itu tetap berlaku.

Pengadilan gubernemen dimasukkan oleh pemerintah kolonial dan dijalankan oleh pegawai pemerintah menurut peraturan-peraturan hukum. Pengadilan pribumi dilakukan

menurut hukum adat yang pada umumnya tidak tertulis. Seluruh Jawa dan Madura ada dibawah pengadilan gubernemen terkecuali Surakarta dan Yogyakarta; sedangkan diluar Jawa, 3/4 dari Sumatra, 1/2 dari Kalimantan, Bali, Lombok, Nusatenggara seluruh, 7/8 dari Sulawesi, Seram dan Ternate seluruhnya.

Pada tahun 1819 didirikan Mahkamah Agung *(Hoog-Gerechtschof)* antara kekuasaan pemerintahan dan pengadilan. Pada tahun 1848 Mahkamah itu mendapat kekuasaan mengawasi pengadilan di Jawa dan baru pada tahun 1869 berdasarkan Keputusan Raja pada pegawai pamong praja dibebaskan dari pengadilan pribumi, meskipun karena kekurangan tenaga ahli hukum baru pada tahun 1891 semua pengadilan negeri diketuai oleh ahli hukum. Sesudah tahun itu masih ada pengadilan hukum pidana yang dilakukan pamong praja selaku hakim polisi. Pada tahun 1914 pengadilan ini pada prinsipnya ditugaskan kepada hakim negeri.

Secara resmi pada tahun 1918 berlakulah hukum pidana Hindia Belanda yang didasarkan atas satu kitab undang-undang baik bagi orang Eropah maupun orang pribumi.

Dari uraian di atas dapat dikatakan, bahwa menurut nyatanya politik kolonial dan tindakan Belanda berjalan di atas garis yang telah dibuat oleh Komisi Soal-soal Mandat. Sesuai dengan prinsip-prinsip sistim Mandat Rangkap, maka secara berturut-turut Belanda berusaha mengadakan perubahan-perubahan di bidang pemerintahan dalam negeri, memajukan kesehatan, pendidikan dan syarat-syarat kerja, dan memberi fasilitas-fasilitas yang diperlukan bagi pengembangan sumber-sumber alam. Menurut pernyataannya, Belanda ingin menganggap dirinya sebagai mandataris di Hindia Timur dan ingin melaksanakan tanggungjawab yang dualistis pada kekuasaan yang mengawasinya.

Pernyataan tersebut tidak sesuai dengan realitas-realitas kolonial. Telah kita lihat, bahwa jurang yang lebar memisahkan kata-kata pada rumus politik yang muluk-muluk atau ideologi kolonial dari tindakan kolonial sehari-hari. Pembentukan Dewan Rakyat seakan-akan memberi kesan, bahwa prinsip menentukan nasib sendiri dan pemerintahan sendiri telah dilaksanakan, tetapi karena komposisi dan fungsinya, Dewan Rakyat tidak dapat diharapkan untuk bertindak, baik sebagai perwakilan maupun

sebagai pemerintahan sendiri yang bertanggungjawab. Sementara itu Belanda mengadakan perlawanan terharap kaum nasionalis dengan anggapan, bahwa mereka itu tidaklah mewakili rakyat.

Cara Belanda memecahkan masalah sistim Mandat Rangkap yang tidak mungkin dipersatukan menunjukkan, bahwa kepentingan penduduk pribumi ditempatkan di bawah kepentingan dunia luar pada umumnya dan negeri induk pada khususnya. Di dalam politik kolonialnya Belanda tidak mau dengan senang hati memberi pertanggunganjawab kepada protektoratnya, karena kepentingan pribumi tidak pernah dipandang sebagai faktor yang penting. Sebaliknya, kepentingan kapitalis-kapitalis raksasa, yang menuntut jaminan bagi usaha Barat di Indonesia, lebih didahulukan daripada kepentingan umum penduduk pribumi.

Akhirnya dapat ditujukan, bahwa likwidasi kolonialisme Belanda disebabkan oleh dua kekuatan utama: setelah P.D. II masalah kolonial menjadi masalah dunia internasional: nasionalisme dapat menggerakkan kekuatannya untuk melawan kembalinya kolonialisme. Tindakan Belanda itu dapat kita utarakan sesuai dengan kata-kata Burke "A great empire and little minds go ill together".

B. PERKEMBANGAN POLITIK KESEJAHTERAAN, 1900 – 1918.

1. Kemerosotan Politik Etis Dan Politik Asosiasi

Periode sejak 1900 sampai akhir Perang Dunia I menyaksikan perkembangan yang pesat dalam bidang ekonomi, sosial dan politik. Meskipun negeri Belanda apabila dibanding dengan negara-negara lain dalam urusan daerah jajahannya agak terlambat, kegiatannya dalam masa itu cukup menghasilkan kemajuan, sehingga tepatlah apa yang dirumuskan oleh Mayer Ranneft bahwa zaman itu ditandai dengan *Ethiek, Economie en Orde.*

Gerakan pasifikasi daerah-daerah luar Jawa mempunyai pengaruh besar dalam keamanan, ketertiban serta kemakmuran daerah-daerah itu. Perusahaan-perusahaan besar, serta HVA, BPM, dan KPM, dimana-mana menggantikan perusahaan-perusahaan perseorangan yang kecil serta berhasil memperganda produksi secara besar-besaran. Meskipun politik pintu terbuka

tetap dipertahankan, akan tetapi mulai tampak di kalangan pengusaha Belanda suatu gerakan Neo-Merkantilisme, yang berusaha untuk memegang pimpinan perusahaan di tangan Belanda sendiri. Proteksionisme ini dijalankan untuk mengelakkan pengaruh yang semakin besar dari kapitalisme internasional yang hendak menanam modalnya di Indonesia. Kalau pada tahun 1909 dari investasi 1½ milyar gulden satu milyar adalah modal Belanda, pada tahun 1913, 50% dari dua ratus juta milyar adalah milik Belanda dan pada tahun 1929, 56% dari 640 milyar, sedang modal Inggris ada 19%, 11% milik Perancis, 8% milik Amerika dan 2% milik Jepang. Dalam menghadapi persaingan besar antara negara-negara besar dalam mencari daerah jajahan maka negeri Belanda terpaksa menjalankan politik "pintu terbuka" jadi tidak semata-mata karena dasar politik liberalnya. Meskipun ajaran liberalisme pada umumnya masih dianut, namun pemerintah Hindia Belanda secara aktif menjalankan exploitasi pelbagai usaha pertambangan, seperti timah, batubara, minyak tanah; pula dalam membangun komunikasi, yaitu pos, telegrap, telepon dan kereta-api.

Kalau di satu pihak alat komunikasi yang berkembang sangat cepat mendorong expansi ekonomis itu, pada pihak lain struktur pemerintah sangat menghambatnya, antara lain karena ada sentralisasi yang sangat kaku. Maka sejak akhir abad 19 sudah terdengar kritik keras terhadap pemerintah Hindia Belanda dan tuntutan untuk mengadakan desentralisasi. Kecuali itu otokrasi juga merajalela di kalangan pemerintah Hindia Belanda sehingga sangat terasa dominasi para pegawai pemerintah. Kekuasaan pegawai yang sangat besar itu menimbulkan julukan bagi Jawa sebagai *le paradis des fonctionnaires.*

Untuk melancarkan usaha-usaha yang menyangkut administrasi pemerintahan terutama pada tingkat daerah, sangat diperlukan desentralisasi sehingga kepentingan-kepentingan daerah dapat diperhatikan. Lagi pula sistim administrasi yang otokratis perlu didobrak dengan pembentukan badan-badan perwakilan yang dapat memberi suara dari pihak umum, seperti dewan kabupaten, dewan provinsi dan dewan rakyat.

Di samping itu di Negeri Belanda kebanyakan dari pejabat-pejabat tinggi yang mengurusi soal-soal Hindia Belanda tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang Hindia Belanda sehingga terpaksa menyandarkan diri pada saran-saran itu yang

tidak terlepas dari kepentingan golongan-golongan tertentu, seperti dari para pengusaha atau pemimpin tentara. Perhatian tokoh-tokoh politik dibangkitkan karena ada permasalahan-permasalahan kolonial yang diperdebatkan di Parlemen untuk menentukan anggaran belanja bagi daerah jajahan.

Bersamaan dengan gerakan politik kemunduran kemakmuran atau dengan politik etis, telah dilancarkan:

1). perobahan sistim pemerintahan;
2). politik desentralisasi;
3). otonomi Hindia Belanda terhadap negeri Belanda, terutama dalam statusnya sebagai badan hukum;
4). pemisahan anggaran belanja negeri Belanda dan Hindia Belanda.

Masa selama duapuluhan tahun ini menyaksikan: 1). expansi kolonialisme yang disertai merkantilisme baru; 2). produksi yang semakin meningkat; 3). perhatian pemerintah dalam bidang sosial.

Perkembangan yang pesat dalam bidang industri agraris, pertambangan dan pengangkutan telah dimungkinkan oleh keamanan yang dapat diciptakan karena pasifikasi daerah sangat berhasil. Tanah serta tenaga yang murah merupakan kondisi yang menguntungkan bagi modal Belanda dan modal internasional untuk membuka pelbagai perusahaannya. Hasil kemajuan ekonomis itu tidak menimbulkan pertumbuhan sosial, yaitu pada penduduk tidak ada pertumbuhan modal dan penabungan oleh karena tingkat kehidupannya tetap rendah. Diferensiasi sosial yang timbul karena perkembangan itu terutama terbatas pada lapisan atas, baik di bidang pemerintahan maupun di bidang produksi. Bahkan penduduk ternyata semakin tergantung dari pengusaha dan pemilik modal sebagai penyewa tanahnya dan pembeli tenaganya.

Akibat dari perkembangan itu yang sangat menyolok yalah perbedaan ekonomis yang sangat besar antara golongan Barat dan golongan pribumi. Hanya segolongan kecil kaum pribumi memperoleh keuntungan dan kedudukan yang baik dalam masyarakat kolonial itu, yaitu golongan pegawai negeri dari pelbagai kedinasan dan pamongpraja.

Dalam bidang pemerintahan, pamongpraja Eropah bertugas

mengawasi pamongpraja pribumi akan tetapi dalam prakteknya mempergunakan sebagai alatnya. Semakin lama semakin besar campurtangan mereka dalam soal-soal kecil, sedangkan kepemimpinan serta kekuasaan pamongpraja sebagai pegawai semakin dibatasi, maka tepatlah apabila dikatakan bahwa mereka dalam keluarga pamongpraja boleh dianggap termasuk katagori anak-anak dan pembantu-pembantu.

Pada umumnya jarak antara golongan Eropah dan masyarakat pribumi menjadi semakin besar. Dalam pelbagai bidang, ekonomis, sosial dan politik, diskriminasi berdasarkan warna kulit semakin kuat. Dengan demikian posisi kekuasaan serta hak-hak istimewanya hendak dipertahankan. Sendi-sendi masyarakat kolonial ini mulai terancam oleh gerakan emansipasi dan kemudian gerakan nasional kaum intelektuil golongan pribumi.

Pendapat-pendapat baru mengenai tanggungjawab pemerintah kolonial mendorong para penguasa kolonial untuk memperhatikan keadaan sosial dan economi yang serba terbelakang di Hindia Belanda. Pelbagai permasalahan dicarikan pemecahannya: soal pauperisasi, kesehatan rakyat, kerja rodi, exploitasi rakyat di tanah-tanah partikelir, pemencaran agama Kristen, pendidikan.

Dalam dasawarsa pertama pelbagai peraturan dan lembaga diadakan, seperti dinas pegadaian pada tahun 1903, lumbung desa pada tahun 1901, pada tahun itu juga didirikan bank kredit dan bank koperasi; penghapusan kerja rodi secara berangsur-angsur dan yang terakhir pada tahun 1918.

Dalam bidang pengajaran terjadi perkembangan yang pesat. Pada akhir abad 19 terdapat 721 sekolah rendah dengan 131.000 orang murid. Pada tahun 1907 sekolah kelas II diperluas dan didirikan sekolah kelas I dengan pelajaran bahasa Belanda. Sejak 1912 jenis sekolah ini diubah menjadi HIS *(Hollandsche Inlandsche School)*. Perluasan pengajaran tingkat atas terjadi secara berangsur-angsur, pada tahun 1902 STOVIA didirikan; pada tahun 1913 NIAS dan setahun kemudian sekolah dokter hewan, sedang pada tahun 1927 sekolah kedokteran diubah menjati GHS *(Geneeskundige Hoogeschool)*.

Proyek Kesejahteraan Rakyat juga meliputi kesehatan rakyat yang secara khusus akan diurus oleh suatu Dinas Kesehatan Umum sebagai suatu bagian dari Departemen Pendidikan. Dalam abad 19 pihak pamong praja telah menjalankan pencacaran dan penyuntikan dan sejak 1851 telah mempunyai tenaga inti

terdiri atas dokter-dokter Jawa. Karena timbulnya wabah pada tahun 1911 mulai banyak anggaran belanja yang digunakan untuk mendirikan rumah sakit, apotik, pencacaran, perbaikan perusahaan, dan sebagainya. Hasil dari usaha kesehatan rakyat tampak pada merosotnya angka kematian yang tidak lebih dari duapuluh per ribu.

Seperti dalam bidang pendidikan, dalam lapangan kesehatan rakyat pihak zending dan missie menjalankan kegiatannya untuk membantu mempertinggi kehidupan rakyat di samping usahanya memencarkan ajaran agamanya. Sejak 1909 kegiatan missie Kristen semakin luas terutama dalam bidang pendidikan dimana sekolah-sekolah missie mendapat pengakuan pemerintah dan sering pula mendapat bantuan.

Usaha untuk menjalankan prinsip-prinsip Kristen dalam pemerintahan seperti "Surat Edaran Mingguan" dan "Surat Edaran Pasar" yang melarang segala kegiatan resmi pada hari Minggu, menimbulkan kegelisahan penduduk yang tidak mengenal nilai atau prinsip itu dalam lingkungan budayanya. Sudah barang tentu politik kristenisasi ini mendapat oposisi dari ummat Islam yang dipelopori oleh organisasi Muhammadiyah. Seperti diketahui organisasi ini kemudian melancarkan kontra-aksi yang berupa pendirian lembaga-lembaga humaniter, seperti sekolah-sekolah, klinik, rumah yatim-piatu.

Perkembangan yang didasarkan atas politik kesejahteraan rakyat serta politik asosiasi menimbulkan golongan intelektuil yang penuh dengan kesadaran akan dirinya serta keadaan yang serba terbelakang dari masyarakatnya. Timbullah dari gerakan yang dilancarkan oleh kaum intelektuil itu suatu faktor yang merupakan kekuatan sosial baru.

Apabila selama masa 1900 – 1914 ada suasana baik terhadap haluan politik etis dan tidak banyak terdengar kritik terhadap politik itu, sejak 1914 masyarakat mulai bergolak dan banyak dilancarkan kecaman-kecaman bahwa politik etis gagal. Dalam kecaman itu juga diutarakan bahwa politik paternalistis yang bersemboyan *ches vous, pour vous, sans vous* tidak memperhitungkan hasrat pada pribumi sendiri setelah ada kesadaran pada mereka.

Politik asosiasi mencita-citakan suatu masyarakat Indonesia di mana dua golongan yaitu Eropah dan pribumi akan dapat

hidup berdampingan di dalam masyarakat itu. Golongan pribumi yang telah mendapat pendidikan Barat akan dapat bekerjasama dengan golongan Eropah, maka berdasarkan gagasan ini jumlah sekolah Barat perlu diperbanyak agar kerjasama itu dapat dibina sebaik-baiknya. Dengan munculnya pergerakan nasional itu maka politik asosiasi praktis kehilangan dasar existensinya. Perkembangan selanjutnya menunjukkan kecenderungan kearah radikalisasi, baik pada pihak pribumi maupun pada pihak Eropah.

Suatu politik "Berjalan bersama tetapi terpisah" (*Geeheiden samengaan*) seperti yang dianjurkan oleh politik etis ternyata tidak dapat dipertahankan. Gejala kolonial memang merupakan pertemuan (konvergensi) dua unsur yang pada hakekatnya terpisah, maka politik asosiasi merupakan pengelabuan diri-sendiri dan pada hakekatnya milik kolonial tidak dapat dipertahankan.

Politik etis timbul kecuali karena ada 'perasaan dosa' terhadap politik kolonial dalam masalampau juga karena ada kesadaran akan keadilan dan rasa tanggungjawab atas kesejahteraan rakyat. Di samping itu, politik ini perlu memberi kelonggaran kepada modal kolonial untuk bergerak.

Lahirnya pergerakan nasional juga memberi arah kepada politik kolonial terutama sebagai kekuatan yang sadar akan nilai dan kekuatan sendiri, serta yang mempunyai cita-cita untuk hidup yang bebas. Faktor yang membuat gerakan ini kemudian menjadi lebih radikal yalah karena oposisi yang dilakukan ditandai oleh perbedaan ras sedang kebebasan diberi nilai lebih tinggi dari kesejahteraan.

Dalam menghadapi masalah pergerakan nasional itu pemerintah kolonial terpaksa meninjau kembali politiknya. Perlu ditetapkan lagi pendirian baru, acara baru serta pemikiran baru mengenai hubungan antara negeri induk dan jajahannya. Pendukung suatu politik emansipasi menganjurkan untuk menggantikan politik *bevoogding* (melindungi selaku wali) menjadi politik *ontvoogding* (mendewasakan).

Selaras dengan itu tidak akan dilakukan kekuasaan saja tetapi lebih banyak menahan diri dalam menjalankan pemerintahan dengan mengurangi aktivitas, tidak terlalu menonjolkan diri dan menunjukkan sikap sabar. Golongan yang menyokong politik indianisasi memandang bahwa nasionalisme hendaknya dihadapi dengan meluaskan lembaga-lembaga pengajaran, alat-alat pe-

merintahan dalam bidang sosial dan mencegah penggunaan ukuran Barat. Dengan demikian secara langsung dikehendaki agar nasionalisme Indonesia diakui secara resmi.

Dalam kenyataannya pendirian para penguasa kolonial, khususnya para Gubernur Jenderal, menunjukkan keragu-raguan kalau bukan kekhawatiran. Golongan serta kepribadian mereka juga menjadi faktor penentu bagi sikap politiknya terhadap pergerakan nasional. Tanggapan-tanggapan serta tindakan-tindakan mereka mencerminkan dimana pendirian mereka dan seberapa jauh mereka bersikap progresif, moderat ataupun konservatif dan reaksioner.

Boedi Oetomo yang menjelmakan gagasan untuk mencapai kemajuan dan perkembangan yang harmonis di Hindia Belanda serta memusatkan perhatian kepada perluasan pengajaran, perkembangan teknik dan industri, serta revivalisme budaya pribumi, tidak merupakan ancaman politik terhadap pemerintahan kolonial, sehingga anggaran dasarnya segera disetujui oleh pemerintah pada tgl. 28 Desember 1909.

Lain halnya dengan Sarekat Islam yang dengan dasar keagamaannya mempunyai potensi luarbiasa untuk menghimpun pengikut di antara rakyat kebanyakan. Meskipun tujuannya mencakup kegiatan sosial-economis, menertibkan kehidupan keagamaan, mempertinggi taraf kehidupan rakyat pada umumnya, pula menganjurkan kepatuhan kepada pemerintah, penguasa kolonial menyadari sepenuhnya kekuatan organisasi massa itu sehingga berkeberatan untuk menyetujui pendirian Sarekat Islam selaku organisasi nasional. Disangsikan apakah pemimpin-pemimpinnya mampu mengendalikan penganut-penganutnya secara terpusatkan pada pengurus besarnya. Yang disetujui yalah Sarekat Islam selaku organisasi lokal yang berdiri sendiri-sendiri. Dengan menunjukkan kepada penyimpangan-penyimpangan dan ekses-ekses yang terjadi dimana-mana sekitar pergerakan Sarekat Islam itu, Pemerintah Belanda mencoba menyembunyikan ketakutannya terhadap perkembangan baru dalam masyarakat Indonesia dan menggunakan timbulnya gejala-gejala yang kurang baik dalam organisasi Sarekat Islam sebagai alasan untuk menolak permohonannya. Terutama dari pihak yang konservatif, seperti kebanyakan dari kaum pamongpraja Eropah dan kaum pengusaha swasta telah ditunjukkan kebingungan serta kegelisahan terhadap gerakan itu. Hanya tokoh-tokoh seperti Gonggrijp, residen

Rembang, Snouck Hurgronje selaku penasehat pemerintah, dan kemudian penggantinya Rinkes, menyarankan agar organisasi itu diakui saja, karena gerakan itu dapat dipandang sebagai cara-cara untuk melahirkan kesadaran serta harapan atau cita-citanya.

Tindakan pemerintah kolonial terhadap Indische Partij yang dipimpin oleh Douwes Dekker, Soewardi Soeryaningrat dan Tjipto Mangunkusumo lebih tegas lagi. Aksi politik radikal yang dilancarkan oleh Indische Partij terang-terangan menghendaki agar pemerintah kolonial harus diakhiri dan mengecapnya sebagai despotis. Para pemimpinnya dibuang dan organisasi dibubarkan.

Pecahnya Perang Dunia Pertama (1914 - 1918) membawa pengaruh besar pada situasi kolonial dan timbullah masalah-masalah tentang masadepan hubungan kolonial. Pada umumnya suasana di antara rakyat cukup baik, bahkan dari mana-mana disampaikan pernyataan setia kepada pemerintah Belanda. Disamping pernyataan loyalitas itu juga timbul persoalan sekitar cara-cara mempertahankan Hindia Belanda. Budi Oetomo dalam kongresnya di Bandung pada tahun 1915 menyarankan agar soal pengerahan milisi untuk pertahanan hendaknya dibicarakan oleh suatu lembaga perwakilan yang mempunyai hak legislatif. Perserikatan Bupati menyarankan pendirian lembaga yang mempunyai hak-hak menyarankan, hak interpelasi dan enquete.

Panitia yang kemudian didirikan dan dikenal sebagai Panitia *Indie Weerbaar* (India berketahanan) terdiri atas pelbagai perserikatan pribumi yang terkemuka. Kedudukan panitia menjadi sangat lemah oleh karena banyak perbedaan paham di antara para anggotanya.

Dari gerakan *Indie Weerbaar* itu tampak dengan jelasnya tuntutan serta tujuan Pergerakan Nasional dan bagaimana peranan yang dimainkan oleh pemuka-pemuka pribumi dalam masyarakat di masadepan. Ditambah oleh kegelisahan yang timbul karena keadaan ekonomi yang semakin memburuk selama perang itu maka mulai tampak sifat radikal dalam Pergerakan Nasional, yang akhirnya terwujud dalam Konsentrasi Radikal. Tuntutan gerakan ini tidak lain dan tidak bukan yalah pembentukan suatu parlemen yang lengkap hak-haknya.

Sejak pergantian abad telah timbul gagasan baru tentang penjajahan, antara lain paham yang berlawanan dengan tujuan VOC yang hanya hendak mengumpulkan devidend (keuntungan)

sebesar-besarnya dari daerah jajahan. Tidak disetujui juga pendapat bahwa daerah jajahan hendaknya dimanfaatkan bagi penjajah.

Pada satu pihak sistim kolonisasi jelas tidak sesuai dengan keadaan, baik di Indonesia maupun di Nederland, pada pihak lain sistim asimilasi yang mengharuskan adanya persamaan kedudukan belum dapat dijalankan. Jalan lain yang lebih sesuai yalah sistim asosisasi yang menghendaki hubungan antara pribumi dan golongan Eropah sebagai sahabat sekutu, yang saling membantu mencapai kemajuan. Diantara mereka tidak dikenal batasan-batasan perbedaan ras.

Oleh karena dipandang mustahil, pelaksanaan alternatif lain yang menuju ke suatu kesatuan terdiri atas pelbagai golongan-golongan itu, maka politik asosisasi dianggap paling tepat. Semua penduduk mempunyai tempatnya dalam masyarakat Hindia Belanda dengan hak-hak yang sama dan masing-masing mempunyai fungsinya sendiri serta nilai-nilainya sendiri. Semua golongan mempunyai tujuan sama, hanya dalam mencapai tujuan itu golongan-golongan itu bergerak secara terpisah-pisah.

Tujuan politik asosiasi hendak menyalurkan aliran-aliran paham dalam dunia pribumi dan menjebatani paham yang berlawanan, tiruan atau penyesuaian. Masyarakat Hindia Belanda perlu berlandaskan pada persamaan kedudukan dan saling hormat-menghormati. Alat yang sangat utama untuk mencapai sistim asosiasi itu yalah pengajaran.

Salahsatu tujuan dalam sistim asosiasi yalah pengembangan budaya Belanda, antara lain melalui pengajaran. Meskipun pengajaran adalah tugas pokok pemerintah tetapi inisiatif swasta hendaknya diberi kesempatan berkembang. Dengan menyebarluaskan pengajaran Bahasa Belanda, dapatlah pelajar dicakup dalam dunia pikiran Nederland.

Kesatuan seperti yang digambarkan oleh kaum asosiasionis tidak memperhatikan perbedaan-perbedaan besar dalam budaya pelbagai golongan. Kecuali itu terdapat pemisahan-pemisahan kuat dan sebaliknya ternyata tidak ada ikatan ekonomis maupun politis.

Mereka menunjukkan bahwa unsur yang menjadi ikatan yalah unsur Belanda pada umumnya, dan pendidikan Belanda khususnya. Dalam hal ini ada kemungkinan untuk menyusun suatu solidaritas yang memerlukan suatu milik budaya bersama.

Dalam hubungan ini dikatakan bahwa nasionalisme Indonesia tidak mempunyai isi dan kekuatan yang dapat mendorong kepada tindakan-tindakan yang berarti.

Seperti apa yang menjelma sebagai organisasi politik, *Politiek Ekonomische Bond (PEB)*,, tokoh-tokoh dari pelbagai agama, golongan etis dan ras serta pelbagai haluan -- orientasi politik kanan dan kiri, tergabung di dalamnya. Yang menjadi dasarnya yalah pimpinan Belanda yang kokoh dan yang perlu dipertahankan, di antara pelbagai golongan penduduk![11]

Kesatuan yang dikehendaki dalam sistim asosiasi selalu digambarkan suatu kesatuan dalam kerangka kolonial, yang sebagai ikatan politik lebih mampu mempersatukan dari ikatan kulturil. Gagasan bahwa ikatan politik ini dapat diwujudkan sebagai suatu struktur politik atas (bovenbouw) oleh pemerintah kolonial Belanda menjurus ke suatu konservatisme yang hendak mempertahankan sistim kolonial itu. Selanjutnya pelbagai kesatuan etis, kulturil dan politik dari masyarakat-masyarakat regional-tradisionil dapat dijadikan *onderbouwnya* atau struktur-bawahnya.

Pertanyaan yang timbul yalah apakah asosiasi antara Barat dan Timur dapat didasarkan atas landasan politik seperti itu ? Pihak yang lemah atau yang menjadi struktur-bawah hanya akan menjadi alat untuk mencapai tujuan golongan di atas. Di sini menjadi jelas bahwa sistim asosiasi sebagai alat tidak dapat dipakai untuk mencapai tujuan seperti yang digariskan oleh politik etis, yaitu kesejajaran kepentingan sesungguhnya dari kaum pribumi dan golongan Belanda.

Sistim kolonial pada hakekatnya mengandung kepentingan yang bertentangan, yaitu dari golongan yang memerintah dan yang diperintah. Politik kolonial ditentukan dari titik pendirian kepentingan dari penguasa, maka dengan sendirinya ideologi kolonial mencoba mempertahankan kekuasaan itu dan memperkekalkan hubungan atau ikatan kolonisator dan yang dijajah. Dipandang dari sudut ini maka jelaslah bahwa politik asosiasi tidak lain hanya merupakan ideologi yang dipakai untuk membenarkan hubungan kolonial antara Belanda dan pribumi Indonesia dan mempertahankan *status quo* itu.

---

11 *De Rijkseenheidd* 1922, hal. 122-125.

2. *Politik konservatif dan politik progresif*

Suatu bentuk politik kolonial konservatif yang didasarkan atas kewajiban moril terhadap daerah jajahan adalah ideologi kolonial yang dirumuskan oleh Colijn. Dengan kegiatan politik yang dilancarkan oleh organisasi-organisasi Pergerakan Nasional, pihak penguasa terpaksa merenungkan kembali soal hubungan daerah jajahan dan negeri induk.

Colijn, seorang tokoh politik terkemuka, dalam karangannya berjudul *Koloniale vraagstuklen van Heden en Morgen* menegaskan bahwa politik kolonial perlu digariskan menurut dua pokok: (1) menurut arah, irama, dan tempo; (2) menurut kewajiban dari prinsip-prinsip. Penguasa kolonial wajib mengusahakan agar muridnya (anak angkatnya) dibebaskan dari kedudukannya sebagai yang diperintah dan ditingkatkan untuk menduduki posisi yang lebih merdeka. Dalam mengusahakan kemajuan itu perlu dihormati kepribadian bangsa-bangsa di Indonesia dan pula budaya Asia perlu dipertahankan.

Pandangan Colijn yang menjadi titiktolak politik kolonialnya mencakup pokok-pokok sebagai berikut:

(1) Dunia Timur mempunyai perbedaan pokok dari dunia Barat, antara lain tentang paham hidup, tatamasyarakat, tenaganya, dan seterusnya.
(2) perubahan disebabkan oleh politik kolonial sendiri yang memasukkan pengajaran modern, dinas kesehatan, teknologi modern, dan sebagainya.
(3) tidak ada apa yang disebut nasion Indonesia sebagai kesatuan organisasi rakyat, melainkan yang ada kelompok-kelompok etnis.

Selanjutnya menurut Colijn 'Hindia' tidak mampu berdiri sendiri, lagi pula tidak dapat menentukan waktu kapan akan dapat berdiri sendiri. Negeri Belanda juga perlu memikirkan waktu bilamana tugas kolonialnya dapat diakhiri.

Menurut Colijn daerah-daerah perlu diberi otonomi dan perlu pula dibentuk pemerintahan-pulau *(eiland-gouvernement)*. Hindia Belanda hanya merupakan suatu kesatuan oleh karena hal itu dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kesadaran yang ada yalah kesadaran pulau *(eilandbesef)*.[12] Suatu lembaga perwakilan bagi

[12] Lihat H. Colijn dalam *Koloniale Vraagstukken van Heden en Morgen*, Amsterdam, 1928, hal. 60-64.

daerah pulau akan turut bertanggungjawab dalam pemerintahan daerah itu. Yang dengan jelas dinyatakan oleh Colijn yalah bahwa (1) tidak ada kesadaran bangsa Indonesia, (2) kesatuan Indonesia hanya merupakan suatu *fata morgana.* Kecaman-kecaman dari sementara tokoh Belanda dari kelompok *de Stuw* mengutarakan bahwa Colijn melupakan bahwa faktor kesadaran dan kemauan (nasional) adalah unsur pokok bagi penyusunan kesatuan nasional.

Pemikiran konservatif mengenai masalah pemerintahan daerah jajahan tampak jelas dalam uraian Treub, seorang tokoh dari kalangan pengusaha Belanda. Senada dengan pendapat Colijn, Treub terang-terangan mengingkari adanya nasion Indonesia, bahkan ketiga sukubangsa besar di Jawa tidak menganggap dirinya sebagai nasion. Suku-suku di luar Jawa tidak menganggap suku Jawa sebagai rekan setanahair. Satu-satunya ikatan antara mereka yalah supremasi Belanda.

Apabila masyarakat kolonial pada akhir tahun duapuluhan gelisah dan dikejutkan oleh pergolakan-pergolakan Pergerakan Nasional, Treub menegaskan bahwa ia tidak percaya pada kekuatan-kekuatan sosial, baik dari golongan nasionalisme, dan-komunis ataupun golongan Islam. Kegelisahan dipandangnya hanya bersifat sementara saja. Rakyat Indonesia dianggap jauh daripada masak untuk pemerintahan sendiri dan pula belum masak untuk parlementarisme. Dianjurkannya untuk keperluan stabilisasi keadaan di Hindia Belanda supaya ditempuh jalan kembali kepada hubungan pada awal abad 20. Hanya perkembangan yang lambat-laun akan sesuai dengan kenyataan. Perlu diusahakan agar sistim pemerintahan otokratis ditegaskan lagi dan jarak antara golongan Eropah dan pribumi dikembalikan. Dikecamnya bahwa pemerintah Hindia Belanda terlalu condong kepada renungan-renungan yang hyperethis. Disamping itu para bupati juga dikecam bahwa mereka lebih berbahaya dan tidak dapat dipercaya dari pada kaum extremis yang lebih terbuka sifatnya. Dalam korps pamongpraja pribumi terdapat unsur-unsur yang mentalitasnya tidak cocok untuk menciptakan hubungan yang baik dengan golongan pengusaha Eropah, karena diperlukan kepercayaan dan kerjasama yang baik. Hal ini sukar dilaksanakan sebab pada hakekatnya semangat para pamongpraja itu bertentangan dengan semangat para pengusaha perkebunan.

Masalah mengenai pemerintahan yang diketengahkan yalah

berkisar sekitar pemerintahan lewat aristokrasi dan perkembangan demokrasi melalui dewan-dewan perwakilan. Kecaman terhadap para pemongpraja sangat melemahkan otoritas mereka. Sementara itu jiwa demokratis tidak dikembangkan.

Dalam kecaman diatas sesungguhnya dicerminkan kepentingan golongan mana yang hendak dibela oleh Treub. Golongan itu tidak akan memperoleh keuntungan dari suatu emansipasi politik dan ekonomis dari kaum pribumi. Ditegaskan oleh jurubicara golongan itu bahwa untuk kepentingan negeri Belanda dan Hindia selalu harus diperhatikan agar perubahan-perubahan politik dilakukan tanpa mengabaikan baik kepentingan golongan pribumi maupun golongan pengusaha Eropah. Setiap warga Belanda harus menyadari hal ini dan pemerintah tertinggi atas Hindia Belanda jangan sekali-kali diletakkan apabila disana rakyat belum mampu mengambil-alih pemerintahan itu dalam segala bidang. Suatu kemerdekaan jangan sampai menekan tujuan yang lebih tinggi, yaitu mempertahankan kehidupan politik bersama dengan Negeri Belanda.

Sikap golongan pengusaha Belanda yang menentang gerakan "lepas dari Negeri Belanda" menunjukkan pandangan yang suram mengenai keadaan Hindia Belanda yang lepas dari pemerintah Belanda. Perusahaan dan perdagangan akan hancur dan kaum buruh akan kehilangan nafkahnya. Maka dari itu ditegaskan lagi agar pemerintah menggunakan kekuasaan otokratis yang menuntut ketaatan yang mutlak.

Dari permasalahan-permasalahan yang dikupas oleh beberapa tokoh nyatalah perhatian dipusatkan kepada persoalan inti, yaitu:

(1) hubungan politik antara Negeri Belanda dan Hindia Belanda, terutama soal status mana yang akan diberikan kepada Hindia Belanda;
(2) hubungan sosio-kulturil antara orang pribumi dengan bangsa Eropah khususnya, dan antara budaya Timur dan Barat pada umumnya. Kedua permasalahan terjalin erat satu-sama-lain sehingga dalam pelbagai uraian, faktor politik, sosio-kulturil dan ekonomis tercakup dalam susunan ideologi kolonial.

Dengan memuncaknya Pergerakan Nasional yang bersifat radikal, timbullah reaksi di antara golongan Eropa yang menyu-

sun organisasi politik dengan haluan yang bersifat extrim kanan atau konservatif. Golongan yang semata-mata terdiri atau unsur-unsur Eropa dan yang membela kepentingan kaum pengusaha, tergabung dalam partai *Vaderlandsche Club (VC)*. Tujuannya terutama memperjuangkan stabilisasi masyarakat Hindia Belanda dan dengan demikian menolak status dengan hak berdiri sendiri.[13] Selanjutnya VC menghendaki agar hubungan Indonesia dengan negeri Belanda semakin dipererat. Diakuinya bahwa pemberian hak-hak istimewa kepada golongan tertentu harus ditinjau kembali. Janganlah kepentingan khusus Belanda didahulukan dari kepentingan yang syah dari kaum pribumi.

Pendirian VC dapat dirumuskan sebagai berikut :

(1) menolak pergerakan nasional yang hendak menggulingkan pemerintah Belanda.

(2) di Hindia Belanda tidak ada kesatuan sejarah, budaya dan bahasa, maka tidak ada dasar untuk berdiri sendiri selaku kesatuan.

(3) kepentingan umum yang perlu dibela adalah kepentingan negeri Belanda.

(4) Hindia Belanda dan Negeri Belanda perlu dicakup dalam lingkungan besar yang disebut *Groot Nederland* (Nederland Raya).

Jelaslah bahwa VC bersikap sangat konservatif karena kepentingan para anggotanya selaku pengusaha hanya dapat didukung apabila *status quo* dapat dipertahankan. Ini berarti bahwa pimpinan dan kekuasaan Belanda perlu dipertahankan pula.

Suatu kelompok yang kemudian lebih terkenal dengan *Stuwgroep* (kelompok pendorong) mengemukakan pandangannya yang luas dan dalam jangka jauh mengenai politik kolonial. Kelompok ini hendak mencoba suatu kerjasama diantara bangsa Belanda di Negeri Belanda yang mempunyai keyakinan bahwa bangsa Belanda mempunyai kewajiban untuk membantu pelaksanaan tugas kolonial Negeri Belanda. Tugas itu akan selesai apabila masyarakat persemakmuran Hindia *(Indische Gemeenebest)* telah berdiri tegak sebagai negara merdeka di tengah-tengah negara lain. Negara itu mempunyai kewajiban-kewajiban

---

13 Periksa dalam *Algemeen Landbouw Weekblad*, 1928, hal. 1316-1317.

internasional, antara lain mengakui dan melindungi hak-hak dan kepentingan penduduknya yang bukan pribumi. Oleh kelompok ini juga dipandang sebagai hal yang pokok yalah ikatan yang kekal antara Negeri Belanda dan masyarakat persemakmuran Hindia.[14]

Politik kolonial merupakan suatu proses perkembangan dan penggeseran yang mengikuti emansipasi dari daerah jajahan yang berkembang menurut sifat dan pembawaan sendiri untuk mewujudkan kesejahteraan jasmani dan rokhani. Dalam perkembangan ini hak menentukannasib sendiri hanya merupakan sarana dan bukan tujuan. Politik emansipasi kelompok ini juga secara tepat disebut politik likwidasi. Oleh pengecam-pengecamnya politik ini dicap tidak realistis, karena dalam waktu yang dekat tidak ada tempat bagi masyarakat persemakmuran Hindia, maka tidak ada artinya untuk berbicara mengenai masadepan yang jauh. Dipandangnya gagasan itu ada di luar politik praktis dan terlalu visioner atau idealistis sifatnya.

Apabila kelompok *de Stuw* ini dibanding dengan golongan VC maka dengan jelas tampak sifatnya yang progresif dan pandangannya yang luas. Jelas sekali bukan politik emansipasi yang diperjuangkan golongan *de Stuw* langsung bertentangan dengan politik *status quo* dari VC, meskipun keduanya menginginkan ikatan yang permanen (tetap) antara negeri Belanda dengan Hindia Belanda. Perbedaan yang menyolok yalah bahwa golongan yang pertama tidak mengikuti paham asosiasi, sedangkan yang kedua menganutnya.

Golongan lain yang sangat dekat pandangannya dengan kelompok *de Stuw* yalah golongan Leiden *(Leidsche groep).* Golongan ini juga mendukung politik kolonial yang bertujuan memberi status otonomi kepada Hindia Belanda dan mendasarkan politiknya pada prinsip demokrasi yang luas. Berdasarkan pengetahuan keahlian kebanyakan tokoh-tokoh dalam golongan ini dalam bidang budaya Hindia Belanda khususnya dan dunia Timur pada umumnya, pengertian hubungan kolonial diberi landasan nilai-nilai Timur. Menurut golongan ini terlalu disodorkan bentuk-bentuk demokrasi Barat maka perlu dipertahankan keaslian budaya pribumi, antaralain peradilan menurut hukum tempat atau sedaerah, struktur dewan-dewan menurut gaya

[14] Periksa dalam *De Stuw*, 1932, hal. 245-248; periksa pula dalam *Koloniale Studien*, 1930, hal. 538-544.

ketimuran, pendeknya masyarakat Timur hendaknya dikembangkan. Sangat dicelanya politik kolonial yang mengabaikan prinsip-prinsip dan dasar-dasar ketimuran.

Sebaliknya VC mengecam kelompok ini sebagai golongan yang idealistis dan tidak mengenal kehidupan praktis. Gagasan mereka tidak realistis karena penduduk Hindia Belanda belum masak untuk kemerdekaan. Pergerakan Nasional adalah gerakan yang terlalu pagi dilancarkan, maka sangat membahayakan. Yang mereka dukung yalah perkembangan yang lambat-laun.

Menurut pandangan lawan mereka, yaitu golongan *Uthrecht*, yang mendapat dukungan golongan pengusaha, golongan Leiden buta terhadap realitas yang sebenarnya mengingkari idealisme etis mereka. Pelajaran di Leiden ada di luar kenyataan kehidupan di Hindia Belanda dan masih perlu mengadakan perbedaan antara teori-teori yang bagus dengan kemungkinan nyata dari praktek. Praktek ini hendaknya jangan dikorbankan untuk teori.

3. *Politik Sistim Barat Timur Dan Politik Terhadap Islam*

Apabila menjelang tahun tigapuluhan politik asosiasi telah ditinggalkan karena kegagalannya menghadapi pergolakan politik dalam masyarakat kolonial yang mendorong kearah diskriminasi pada satu pihak dan radikalisasi pertentangan politik, timbullah gagasan sintese sebagai ideologi kolonial yang mencoba menggambarkan masyarakat kolonial yang berkembabang menuju ke suatu sintese antara Barat dan Timur . Perumusan gagasan ini termuat dalam karangan raksasa de Kat Angelino.[15] Masalah kolonial hanya dapat dipecahkan dengan menempatkannya dalam rangka proses budaya besar, yaitu pertemuan antara dua budaya Barat dan Timur. Kontak yang digambarkan oleh politik asosiasi dipandangnya dangkal karena mengabaikan kontak akar-akar rohani dari budaya-budaya yang saling berhadapan. 'Bekerjasama secara terpisah' yang menjadi semboyan kaum asosiasionis dipandang tidak dapat menghasilkan kesatuan, karena budaya Barat hanya diterima secara dangkal dan tidak ada adaptasi antara budaya Barat dan Timur.

Menurut de Kat Angelino, Barat dan Timur harus saling "membuahi". Milik budaya Timur perlu diatur. Barat dengan

[15] Lihat A.D.A. de Kat Angelino, *Colonial Policy*, 2 jilid, 's-Gravenhage, 1931.

segala pengalaman serta kekayaannya perlu mengabdi Timur, antara lain dengan memasukkan jiwanya pada kesadaran hukumnya. Janganlah pengaruh hanya terbatas pada penggabungan dua kesatuan yang berada. Barat hendaknya memberi pengertian kepada Timur tentang disiplin sehingga dapat memikul tanggungjawab sendiri. Sintese yang nyata yalah perpaduan antara kekuatan-kekuatan hidup yang sehat. Hal ini sesuai dengan ideologi politik kolonial modern yang mempunyai tujuan di samping untuk mengembangkan kesejahteraan negeri induk juga secara sadar mendukung politik kolonial moril yang wajib memperhatikan kesejahteraan dan perkembangan penduduk pribumi. Dua fungsi pokok dari idee sintese yalah perlindungan dan membangkitkan ketahanan.Tetapi menjadi panggilan Barat untuk memberikan pimpinan dalam memodernisasikan Timur itu. Dalam mendorong ke suatu sintese di daerah jajahan ternyata perlu dipupuk kesadaran akan kesatuan maka pimpinan Barat masih tetap diperlukan.

Meskipun sifat patriarkhal masih tampak dengan jelasnya dalam idea sintese ini, namun ditolaknya konsepsi kolonialisasi dengan jalan menguasai atau manaklukkan. Dalam kenyataannya dunia kolonial masih merupakan "sebuah kamar kanak-kanak dimana harus ada babunya".[16] De Kat Angelino tidak setuju dengan Kipling dan berpendapat bahwa Timur dan Barat dapat kerjasama sebagai manifestasi solidaritas kemanusiaan atau panhumanisme.

Peranan Barat bukanlah untuk mendesak Timur, tetapi untuk mengembangkan serta memajukannya. Barat dapat memberi kekuatan moril dan spirituil untuk menjiwai evolusi Timur, jadi mewujudkan kerjasama Timur-Barat yang selaras, dengan jalan menghargai sifat masing-masing dalam segala bidang. Faktor yang merintangi idea sintese ini yalah perbedaan warna kulit. Politik kolonial wajib memajukan sintese ini dan memenuhi panggilan kepemimpinan Barat, melainkan juga untuk membangun suatu masjarakat harmonis dengan Timur dan Barat sebagai konponen-konponennya. Menurut De Kat Angelino politik kolonial Belanda harus meninggalkan prinsip politik tidak campur-tangan dalam hal-hal tradisionil. Secara keseluruhan, dan sebagai gantinya menerima politik sintese dengan ketiga prinsip-

16. Periksa A.D.A. de Kat Angelino dalam *Koloniale Studien*, 1931, hal.401.

nya, yaitu memberi perlindungan, mengadakan konsolidasi budaya Indonesia dan mengadakan penyesuaian dan perkembangan dunia modern.

Pemikiran ini ternyata tidak terlepas dari pandangan bahwa peradaban Barat lebih tinggi dari peradaban Timur. Lagi pula, didalam gagasan sintese itu tercakup suatu rasionalisasi dari politik kolonial yang menginginkan paternalisasi dan perlindungan-perlindungan kolonial di dalam hubungan kolonial.

Pemerintah kolonial Belanda, yang menghadapi rakyat Indonesia dengan mayoritasnya sebagai pemeluk agama Islam, perlu memusatkan perhatian kepada politik terhadap agama Islam. Sepanjang sejarah penjajahan, ideologi Islam ternyata merupakan kekuatan sosial yang besar sekali dalam mengadakan perlawanan terhadap kekuasaan asing. Baik perang besar seperti perang Padri dan Perang Aceh, maupun pemberontakan petani seperti peristiwa Cilegon dan Cimareme, kesemuanya dipimpin oleh pemuka Islam dan dijiwai oleh ideologi Islam. Karena pengetahuan penguasa kolonial mengenai Islam di Indonesia sangat kurang bahkan seringkali salah, politik yang mereka jalankan terlalu didasarkan atas perasaan takut dan curiga dengan akibat bahwa setiap gerakan kaum muslimin dicap sangat membahayakan pemerintah kolonial.

Sejak kedatangan Snouck Hurgronje di Indonesia pada tahun 1889 maka politik terhadap Islam atas nasehatnya mulai didasarkan atas fakta-fakta dan tidak atas rasa takut saja. Dikemukakannya bahwa para pemimpin agama tidak *a priori* bermusuhan dengan pemerintah kolonial dan orang yang kembali dari naik haji tidak dengan sendirinya menjadi orang fanatik dan suka memberontak. Sebaliknya Snouck Hurgronje memperingatkan agar Islam sebagai kekuatan politik dan religieus jangan dipandang rendah. Apabila ideologi Islam disebarkan sebagai doktrin politik yang digunakan untuk membuat agitasi terhadap pemerintahan asing sebagai pemerintahan kaum kafir sehingga orang meragukan atau mengingkari legalitas pemerintah Belanda, maka disini ada bahaya bahwa fanatisme agama akan menggerakkan rakyat untuk menghapuskan orde kolonial. Politik yang disarankan perlu membedakan antara (1) Islam sebagai ajaran agama dan (2) Islam sebagai ajaran politik. Selama ummat Islam menganutnya sebagai agama, maka mereka perlu diberi kebebasan melakukan kewajibannya. Sebaliknya apabila Islam disalahgunakan

sebagai alat agitasi politik maka pemerintah tidak boleh tanggung-tanggung memberantasnya. Politik itu selaras dengan netralitas agama yang dijalankan di negeri Belanda dengan sikap toleran terhadap paham lain, suatu pendirian yang langsung berakar pada liberalisme dan humanitarisme.

Politik yang dianjurkan oleh Snouck Hurgronje merupakan bagian dari pandangan mengenai perkembangan masadepan Indonesia. Menurut Snouck Hurgronje Islam hanya dapat menerima pemerintahan asing secara terpaksa beserta suatu koexistensi antara penguasa Kristen dan warga Muslimin. Dengan demikian tidak mungkin dikembangkan suatu hubungan kekal antara Indonesia dan negeri Belanda.

Dalam menghadapi Islam penguasa kolonial menurut tradisi dapat mengharapkan dukungan dari kaum adat meskipun golongan ini tidak dapat menahan pengaruh, baik dari perkembangan Islam maupun dari perubahan-perubahan ke arah modernisasi, maka dari itu tidak mungkin politik ini dijalankan untuk mencapai tujuan pemerintahan kolonial dalam jangka panjang.

Selanjutnya Snouck Hurgronje tidak menaruh kepercayaan pada Islam sebagai kekuatan yang dapat membawa kemajuan. Menurut Snouck Hurgronje, Indonesia harus mengalami perubahan untuk mewujudkan suatu masyarakat modern. Masyarakat ini akan terwujud sebagai masyarakat yang telah diwesternisasikan. Berdasarkan gagasan pokok ini penguasa kolonial mempunyai tanggung-jawab moril untuk memajukan budaya Barat. Dalam hubungan ini kaum aristokrat Indonesia perlu diajak ikut serta dalam kehidupan sosial dan budaya Barat. Golongan ini dengan kepemimpinannya akan dapat menjembatani jarak antara yang berkuasa dan yang dikuasai sehingga akhirnya akan ada budaya milik bersama.

Dalam usaha melapangkan jalan ke arah asosiasi, pengajaran Barat merupakan alat utama untuk melancarkan proses modernisasi dan menyisihkan hambatan dari kekuatan tradisionil. Perkembangan ini tidak dapat ditahan lagi maka lewat sistim asosiasi haluannya dapat diarahkan kepada kelanjutan Pemerintahan Belanda.

Gagasan Snouck Hurgronje tidak terlepas dari jiwa jaman, yang penuh dengan pemikiran tentang humanitarisme, kewajiban memperhatikan nasib rakyat pribumi, dan prinsip-prinsip etis dalam menjalankan politik kolonial. Seperti politik asosiasi pada

umumnya, gagasan ini bersifat paternalistis dan tidak melihat kenyataan bahwa politik ini akan mengalahkan diri sendiri, oleh karena kemajuan pengajaran akan menciptakan kekuataan sosial baru yang akan menghapuskan sistim kolonial.

Bagaimana praktek politik kolonial seperti yang digariskan oleh Snouck Hurgronje itu ?

Seperti diuraikan dalam bagian lain selama abad ke 19 terus-menerus terjadi pemberontakan di daerah pedesaan yang pada umumnya digerakkan oleh pemuka agama. Dalam menghadapi masalah ini Snouck Hurgronje memperingatkan agar tidak langsung menuduh atau mencurigai pemuka agama sebagai biang-keladi pergolakan-pergolakan itu. Haruslah dibedakan antara pemuka yang menjalankan tugasnya sebagai pengajar agama dan yang menggunakan kedudukannya selaku pemimpin untuk keperluan agitasi politik. Untuk dapat memberikan hal itu secara tegas maka perlu diperketat pengawasan atas kegiatan para pemuka agama itu. Mengajar agama, membaca al-Qur'an, ilmu agama kesemuanya adalah legal dan perlu diberi kebebasan. Hanya Pemerintah perlu bertindak tegas di mana kegiatan-kegiatan agama mulai digunakan untuk gerakan politik melawan pemerintah.

Pada umumnya pejabat-pejabat Belanda dihinggapi oleh suatu haji - fobi, dan segera mencap tindakan atau kegiatan sebagai usaha subversif untuk melakukan perlawanan terhadap pamongpraja. Upacara tarekat, pelajaran ngelmu, jual-beli jimat, dan lain-lain, karena seringkali diselubungi oleh tingkah laku yang serba rahasia, pula karena sering terjadi faktor penting dalam pemberontakan, lekas dicurigai dan dipakai sebagai alasan untuk menindak pelaku-pelakunya. Dengan bantuan Snouck Hurgronje banyak kegiatan-kegiatan dapat ditetapkan sifatnya sehingga tidak perlu diadakan tindakan yang menindas.

Kejadian-kejadian sekitar tahun 1912 – 1916 yang mengikuti pendirian Sarekat Islam menunjukkan betapa besar peranan ideologi Islam dalam menggerakkan rakyat, terutama di daerah pedesaan dimana kegelisahan sosial memberi suasana baik bagi pergolakan dan pemberontakan. Dalam keadaan penuh dengan kegelisahan itu segala perasaan dapat disalurkan melalui agama dan membangkitkan pergerakan total. Untuk masyarakat tradisionil perbedaan yang dibuat oleh Snouck Hurgronje ternyata tidak sesuai. Lagi pula, pergolakan yang dicetuskan oleh Sarekat

Islam membuktikan Snouck Hurgronje memandang rendah akan Islam sebagai kekuatan sosial.

Politik yang disarankan oleh beberapa pejabat seperti Snouck Hurgronje, Rinkes dan Gonggrijp, yalah agar Sarekat Islam diakui pendiriannya karena melihat bahwa Sarekat Islam merupakan kebangkitan suatu bangsa menjadi dewasa, baik dalam bidang politik maupun sosial.

Organisasi Islam yang kedua muncul sesudah Sarekat Islam yalah Muhammadiyah. Sifatnya reformis dan non-politik dan kegiatannya dipusatkan dalam bidang pengajaran, kesehatan rakyat dan kesosialan lainnya. Karena sikapnya terhadap sistim Barat tidak menolak, bahkan banyak mengambil-alih saja dalam sistim pengajaran dan perawatan orang sakit, sehingga pemerintah kolonial bersedia memberi bantuannya. Meskipun tidak menjalankan kegiatan politik, pengaruh reformismenya, terutama yang disalurkan lewat pengajaran modern diantara penduduk kota, sangat luas. Hal ini menimbulkan ketegangan, terutama dalam hubungannya dengan kaum orthodox yang merasa terancam oleh kemajuan itu. Reformisme juga mulai mendapat tantangan dari golongan adat dan priyayi. Kolonialisme Belanda setengah takut akan pengaruh reformisme mencoba mempertajam perpecahan dalam kalangan Islam itu. Perpecahan itu lebih tampak dengan jelas waktu kaum orthodox mendirikan organisasi sendiri, yaitu Nahdhatul 'Ulama, yang dengan cepat sekali meliputi daerah-daerah pedesaan di mana para kyai dan haji menjadi pendukungnya.

Pada waktu-waktu tertentu ada usaha untuk membentuk suatu persatuan antara aliran-aliran dalam Islam akan tetapi tidak cukup berhasil, seperti gerakan pan-Islamisme, usaha penyelenggarakan al-Islam Congress. Sampai akhir jaman penjajahan Belanda belumlah berhasil usaha menyatukan aliran-aliran itu.

4. *Kegagalan Politik Etis*

Politik etis yang mulai dilancarkan dengan semangat berkobar-kobar, antara lain karena terdorong oleh tanggungjawab moril terhadap kehidupan pribumi, pada awal puluhan tahun kedua mulai kabur dan pelaksanaannya sangat diragu-ragukan. Perkembangan sosial-politik sejak Kebangunan Nasional dan

pecahnya Perang Dunia pertama menimbulkan situasi politik yang sangat melemahkan tujuan seperti termaktub dalam politik etis itu. Pada tahun 1916 orang telah mengatakan bahwa politik itu mengalami kebangkrutan dan kemajuan yang dicapai bukanlah jasa haluan etis.

Etika Kristenlah yang meningkatkan kegiatan zending dan missie dalam bidang pengajaran, kesehatan dan bidang sosial lainnya. Dalam prakteknya perkembangan materiil dan spirituil penduduk terbatas pada tindakan-tindakan yang terpaksa dijalankan saja, antara lain perluasan pengajaran relatif sedikit. Untuk setiap kepala dibelanjakan 5 sen pada tahun 1905, kemudian pada tahun 1918 menjadi 20 sen, sedangkan untuk keperluan perang 125 sen per kepala. Keadaan sosial tidak banyak mengalami perbaikan, kemiskinan, butahuruf, kurangnya kesehatan, masih tampak jelas dalam kehidupan rakyat. Menurut kecaman Stokvis "etika hanya didengung-dengungkan akan tetapi orang takut akan konsekwensi keuangannya". Periode yang juga disebut 'jaman kemajuan' ditandai oleh perkembangan pengajaran. Permintaan akan sekolah sangat besar dan jumlahnya dapat dipakai sebagai ukuran tentang kemajuan masyarakatnya. Dualisme yang masih dipertahankan dalam sistim sekolah, menunjukkan suatu derajat diskriminasi dan elitisme. Hal ini sangat membatasi kemajuan pengajaran Barat yang sangat dipandang tinggi di mata rakyat. Di sini tujuan humanisasi hubungan Barat dan Timur seperti yang diajarkan oleh politik etis juga tidak terlaksana.

Dengan munculnya Pergerakan Nasional maka tidak hanya kesadaran rakyat memuncak akan tetapi kegiatan untuk mencapai kemajuan dilakukan oleh pihak rakyat pribumi sendiri. Dengan demikian tujuan politik etis, yang antara lain membangkitkan kesadaran rakyat menyelenggarakan perkembangan, telah diambil-alih oleh pihak kaum pribumi sendiri, maka paternalisme kaum etis sudah tidak diberikan lagi oleh pemerintah Hindia Belanda. Perannya hanya sebagai semacam wasit yang hanya mengawasi agar perkembangan pelbagai kekuatan sosial berjalan secara wajar dengan tidak menimbulkan pertentangan satu-sama lain

Dalam hubungan ini politik etis-humanistis seperti diperjuangkan oleh Snouck Hurgronje hendak mengalihkan budaya

Barat berdasarkan gagasan asosiasi. Hal ini dikecam oleh golongan Kristen yang beranggapan bahwa usaha untuk memindahkan buah budaya Barat tanpa menanamkan akarnya akan menemui kegagalan. Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik etis mendapat dukungan luas tidak lain karena cita-cita dan tujuan yang termuat di dalamnya berjalan sejajar dengan politik Kristen sehingga kaum etisi mendapat sokongan penuh dari partai-partai agama di negeri Belanda.

C. POLITIK REAKSIONER: 1918 – 1930

1. Janji Van Limburg Stirum

Kegagalan politik etis tampak jelas pada tahun-tahun akhir Perang Dunia I waktu dimana-mana timbul kelaparan dan kemiskinan. Perbedaan antara golongan Eropa dan golongan pribumi sangat menyolok. Perusahaan mengalami kemajuan pesat dan keuntungan berlipat-ganda. Hal itu disebabkan oleh permintaan besar akan produksi Hindia Belanda dalam pasaran dunia. Untuk dapat menghadapi saingan, pengusaha menuntut agar pemerintah tidak menghalang-halangi perusahaan mereka. Usaha untuk membantu rakyat hanya dijalankan oleh pengusaha didaerah-daerah dimana mereka mempunyai kebunnya, jadi semata-mata untuk memelihara kepentingannya.

Tidak mengherankan apabila kira-kira waktu itu kegelisahan sosial sangat meluas, pemberontakan-pemberontakan petani di Jambi (1916), Pasarrebo (1916), Tjimareme (1918), Toli-Toli (1920), merupakan perwujudan yang jelas dari kegelisah itu. Organisasi-organisasi nasional, seperti CSI dan PFB *(Personeel Fabriek-Bond)* menjadi penyalur rasa tidak puas dan mengalami radikalisasi dalam tujuannya. Aksi politiknya menjadi revolusioner dan mempergunakan gerakan buruh sebagai senjata. Modal asing dicap sebagai kapitalisme 'yang berdosa', bahkan terdengar pula semboyan sosialistis, seperti perjuangan kelas melawan kaum modal asing. Meletusnya pergolakan di Negeri Belanda memperhebat gerakan itu.

Dalam menghadapi suasana yang penuh kegelisahan itu Gubernur Jenderal van Limburg Stirum yang telah terkenal sebagai tokoh yang bersikap sangat toleran terhadap perkembang-

an di Indonesia, menjanjikan akan mengadakan Komisi Perubahan yang akan meninjau kekuasaan Dewan Rakyat dan struktur administrasi pemerintah Hindia Belanda. Tindakan ini menimbulkan reaksi hebat di negeri Belanda, dipandang sebagai konsesi yang tidak bertanggungjawab. Idenburg selaku Menteri jajahan, menyokong tindakan itu dan beranggapan bahwa perubahan yang tepat yalah perubahan hakekat Dewan Rakyat yang perlu dijadikan lembaga pemerintah yang bertanggungjawab.

Komisi yang dilantik memang kemudian hanya membatasi diri pada perubahan Dewan Rakyat dan perubahan sistim administrasi. Pemerintahan Van Limburg Stirum (1916 – 1921) dapat mengambil hati kaum terpelajar, karena pandangannya sangat progresip, utilitarianistis dan memberi kesempatan organisasi hidup dengan sehat dan terbuka. Pada masa itu ada hubungan yang cukup ramah antara pemerintah dengan pemimpin pribumi.

Sehabis perang, ekonomi sangat maju dan export meningkat, tugas utama pemerintah yalah menunjukkan kepada rakyat bahwa penduduk di daerah jajahan berkewajiban membuka tanahnya bagi ekonomi dunia. Hindia Belanda harus berdiri sendiri dan berusaha menambah produksi, baik dari perusahaan-perusahaan maupun dari penduduk sendiri. Hal ini selaras dengan anjuran Panitia Perubahan pemerintahan yang menyatakan bahwa sumber-sumber kekayaannya perlu digali dengan kekuatan sendiri. Penduduk hendaklah disiapkan untuk memperhatikan kepentingannya.

Selama pemerintahan Van Limburg Stirum perhatian dipusatkan pada aksi ekonomis dan aksi perburuhan, sedang aksi Pergerakan Nasional mengambil arah politik yang condong ke kiri. Proses radikalisasi bertambah kuat sejak 1921 antara lain disebabkan oleh :

(1) timbulnya krisis ekonomi pada tahun 1921 dan krisis perusahaan gula sejak 1918;

(2) pergantian tampuk pemerintahan ke tangan Gubernur Jenderal Fock yang sifatnya sangat reaksioner.

Pada tahun 1920 export mulai menurun sehingga mengakibatkan kerugian-kerugian besar bagi perusahaan-perusahaan Barat, diantaranya menjadi bangkrut. Penghematan, dan pengang-

guran menambah kegelisahan sosial serta membuat hubungan politik penuh ketegangan. Para pemimpin Indonesia condong agar ekonomi ada dibawah pengawasan pemerintah, sehingga keuntungan dapat memberi manfaat kepada rakyat. Sangat terasa pula bahwa kepentingan ekonomi golongan Barat semakin berkuasa sehingga masalah upah dan kontrak tanah tidak mudah diubah demi kepentingan pribumi. Dualisme dalam ekonomi disini dipertahankan untuk memungkinkan sistim exploitasi ekonomi sebagai salah satu *raison d'être* sistim kolonial. Akibatnya yalah semakin jauhnya jarak antara taraf kehidupan pribumi dan golongan Eropah.

2. *Politik Penindasan*

Pengaruh modal besar pada pemerintah Hindia Belanda makin besar pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Fock. Sebagai etikus gaya lama yang hendak memerintah sebagai wali, Fock memerintah secara otokratis dengan mengabaikan kekuatan rakyat yang sedang berkembang. Tambahan pula Fock mendapat tugas untuk menghemat pada satu pihak, dan menambah penghasilan pemerintah dengan menaikkan pajak.

Dalam hubungan ini perlu dikemukakan satu contoh yang menjelaskan bagaimana tindakan pemerintah tetap menguntungkan kaum pengusaha dan merugikan rakyat. Dibatalkannya pajak export untuk minyak tanah merugikan pemerintah lima puluh juta *gulden* setahunnya. Pajak industri gula telah mengurangi pembayaran pajak kira-kira jumlah yang sama karena perhitungan harga penjualan yang aneh. Sementara itu pajak rakyat dinaikkan, pada tahun 1919 sampai dengan 1921 kira-kira 24 juta *gulden* setahun menjadi 28 juta pada tahun 1922, 32 juta pada tahun 1923, 34 juta tahun 1925. Menurut laporan Mayer Ranneft-Huender selama pemerintahan Fock tekanan pajak pada penduduk Jawa dan Madura naik dengan 40%. Sementara itu politik penghematan dilaksanakan secara ketat sehingga mengakibatkan pengangguran pada semua lapisan dan banyak tenaga yang disia-siakan. Semua bidang dari kesejahteraan rakyat mengalami pengurangan anggaran belanja, kesehatan rakyat, pertanian, peternakan, perikanan dan perdagangan.

Peraturan-peraturan itu menimbulkan pula kekecewaan, bahkan kekesalan kaum terpelajar. Di bawah pimpinan tokoh-

tokoh pergerakan mulai dilancarkan pemogokan-pemogokan sebagai protes terhadap tindakan-tindakan pemerintah: pada bulan Januari 1922 pemogokan terjadi di pegadaian dan pada bulan Mei 1923 diantara pegawai kereta-api. Reaksi pemerintah sangat keras; hak berapat dicabut, kota Yogyakarta diduduki oleh angkatan kepolisian dan kira-kira seribu pekerja dipecat.

Politik dari Fock selalu didasarkan atas prinsip etis meskipun menurut kenyataannya ada kecurigaan terhadap organisasi-organisasi Indonesia dan menentang perluasan kekuasaan golongan pribumi. Akibat langsung dari politik Fock sejak 1922 tidak lain yalah radikalisasi pergerakan nasional. Dalam Dewan Rakyat muncul konsentrasi radikal, gerakan non-koperasi terhadap pemerintah kolonial mulai meluas di kalangan kaum terpelajar. Aliran terakhir ini sangat condong ke arah gerakan sosialistis yang sejak tahun belasan sangat berpengaruh dalam Pergerakan Nasional.

Sementara itu pemerintah berusaha keras untuk mencari keseimbangan keuangan, antara lain dengan penghematan secara besar-besaran untuk menutupi kenaikan pengeluaran dari Perang Dunia dan pengeluaran untuk pembuatan bangunan-bangunan umum, yang telah dilakukan sejak pemerintahan Van Limburg Stirum. Dalam perjuangan dalam bidang ekonomi peranan pemerintah dalam bidang perusahaan terdesak oleh pihak swasta. Pengaruh kaum pengusaha semakin kuat dan berhasil memaksa pemerintah untuk melindungi laba mereka. Aksi golongan itu juga ditujukan terhadap Pergerakan Nasional dan gerakan buruh. Dikatakan bahwa masaknya Pergerakan Nasional mundur satu abad ! Lagi pula dengan demikian evolusi dapat diselamatkan bahwa dualisme ekonomi menjadi nyata sekali, jelaslah dari ucapan Helfferich pada tahun 1928 yang menyatakan bahwa sementara perusahaan-perusahaan luar negeri banyak membuat laba, keadaan ekonomis pribumi dalam beberapa segi mundur !

Pergolakan memuncak pada akhir tahun 1926 dengan pecahnya pemberontakan di Banten, Sumatra Barat dan beberapa tempat lain di Jawa. De Graeff sebagai Gubernur Jenderal baru yang semula bersikap terbuka terhadap golongan nasionalis terpaksa bertindak secara keras; 4500 orang dipenjara, kira-kira 1300 dibuang ke Digul, 4 dihukum mati.

Perkembangan ini berjalan sejajar dengan proses perluasan industri Barat yang membawa akibat bahwa golongan Barat

hendak hidup berkelompok sendiri terpisah dan dibedakan dari golongan pribumi. Di kalangan terpelajar pribumi pada umumnya ada kecenderungan untuk menggabungkan diri kepada organisasi nasional. Dengan demikian gagasan asosiasi tidak bergema lagi di kalangan luas golongan pribumi. Ini berarti bahwa proses polarisasi telah berjalan dan antagonisme antara Barat dan pribumi mulai sangat tajam. Kenyataan yang ada yalah bahwa makin kuat radikalisasi Pergerakan Nasional makin reaksioner dan represif tindakan-tindakan yang diambil pemerintah Hindia Belanda.

Pada tahun 1931 De Graeff diganti oleh de Jonge yang datang di Indonesia pada waktu malaise masih merajalela. Sikapnya sangat reaksioner dan tidak bersedia mengakui Pergerakan Nasional; pers dengan mudah dibrangus, rapat-rapat partai diawasi oleh polisi rahasia secara ketat. Pemerintah yang picik dan keras dalam tindakannya mengakibatkan kelumpuhannya Pergerakan Nasional.

Depresi ekonomi pada tahun 1920 berulang pada akhir puluhan tahun ketiga dengan dahsjatnya. Selama periode itu jumlah export di pertahankan bahkan perusahaan berhasil berkembang lebih besar lagi, akan tetapi kesemuanya itu hanya dapat dilaksanakan dengan menekan biaya produksi, termasuk sewa tanah dan upah tenaga buruh. Dalam menghadapi krisis pada tahun 1929 politik kolonial bertindak dengan jiwa yang sama, yaitu hendak melindungi kepentingan pengusaha Belanda. Reaksi pemerintah Belanda terhadap devaluasi matauang di beberapa negara ditujukan terhadap upah buruh yang diturunkan agar biaya produksi menjadi lebih rendah. Buruh dan tani pribumi dipaksa menanggung akibat peraturan itu. Perkebunan rakyatpun juga terpaksa mengurangi produksinya. Rentetan akibat-akibat dari depresi memberatkan penderitaan rakyat : pengangguran, kemiskinan, kelaparan, beban pajak yang berat, pendeknya tingkat kesejahteraannya merosot. Hal ini tidak bertambah baik setelah diadakan devaluasi pada tahun 1936.

Apakah akibat krisis ekonomi itu pada Pergerakan Nasional ? Pada umumnya aktivitasnya tidak terlalu tampil ke depan, meskipun hal ini sebagian disebabkan juga oleh tindakan dan pengawasan yang semakin keras oleh pemerintah setelah ada pemberontakan pada tahun 1926 dan 1927. Pertentangan dipertajam terutama berdasarkan perbedaan kepentingan golongan,

pertentangan nasional dan ras. Pada satu pihak extrim kanan dan konservatif berdirilah VC sebagai penjelmaan chauvinisme Belanda yang mempertahankan kepentingan pengusaha, dan pada pihak lain extrim kiri, kita dapati PNI yang berjuang berdasarkan idee non-koperasi dari Indonesia Merdeka. Pemerintah de Jonge memakai politik menindas terhadap Pergerakan Nasional yang di matanya dipimpin oleh orang-orang yang dijiwai oleh teori-teori yang fantastis. Berkali-kali dipakainya hak *exorbitant* untuk menindak pemimpin-pemimpin itu, kebebasan berkumpul dan mencetak sangat dibatasi. Sebaliknya politik melindungi kepentingan para pengusaha dengan golongan mana ia selalu diidentifikasikan. Kedatangan Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer membawa perubahan, karena Pergerakan Nasional diakui dan politiknya lebih luwes terhadap aktivitas pergerakan itu.

Bagaimana sesungguhnya pendirian Pemerintah Belanda terhadap perkembangan ke arah *'ontvoogding'* atau otonomi dan akhirnya kemerdekaan wilayah Hindia Belanda ? Dasar-dasar sistim pemerintahan Hindia Belanda terletak pada perundang-undangan negeri induk, sehingga setiap perubahan tergantung dari pada lembaga-lembaga pemerintah Belanda. Perubahan-perubahan seperti yang diusulkan dalam laporan komisi perubahan (1918) diajukan ke Parlemen Belanda. Baru pada tahun 1922 diketahui perubahan-perubahan itu setelah perubahan Undang-undang Dasar Negeri Belanda disahkan. Pada tahun 1925 Undang Undang Tatanegara, kemudian terkenal sebagai Tatanegara India *(Indische Staatsregeling)* disahkan.

Pemerintah Hindia Belanda masih dikepalai oleh Gubernur Jendral dibantu oleh Dewan India. Gubernur Jenderal diangkat oleh Menteri Jajahan dan ditugaskan untuk melakukan administrasi umum. Dewan Perwakilan mempunyai suara dalam pemerintahan kecuali mengenai hal-hal yang ditentukan oleh undang-undang. Otonomi yang diberikan terbatas pada perbuatan aturan-aturan mengenai soal-soal dalam. Pemerintahan tertinggi ada di tangan Mahkota, sedang pemerintahan umum dijalankan oleh Gubernur Jenderal berdasarkan undang-undang.

Revisi yang diadakan sangat terbatas, bahkan kurang dari apa yang diusulkan oleh Komisi Perubahan. Jumlah anggota pribumi dalam Dewan Rakyat dikurangi, perbedaan pendapat antara Gubernur Jenderal dengan Dewan Rakyat diserahkan

kepada Mahkota, anggaran belanja tetap ditetapkan oleh Parlemen Belanda.

Perubahan-perubahan masih dikuasai oleh prinsip diskriminasi ras tulangpunggung dari sistim kolonialisme. Pembagian penduduk Hindia Belanda atas tiga golongan yalah golongan Eropa, pribumi dan Timur-Asing. Dasar pemikirannya yalah bahwa golongan pribumi yang belum maju perlu dilindungi dan tidak tercakup dalam sistim hukum yang dipersatukan. Pada hakekatnya dualisme atau pluralisme dari masyarakat kolonial tidak dihapus dan tidak ada kemajuan dalam memberikan otonomi kepada Hindia Belanda.

Sementara itu gerakan diantara kaum nasionalis untuk memperjuangkan otonomi telah memajukan usul-usulnya sebagai agitasi dan kontra-aksi terhadap usaha pihak pemerintah yang lambat-laun dan serta mengecewakan itu. Diselenggarakannya kongres *Al-Indie* dimana tokoh-tokoh menguraikan pandangan dan cita-citanya; dikirimkannya delegasi menghadap Gubernur Jenderal, dibentuknya organisasi *Radicale Consentratie* kesemuanya itu bertujuan untuk mengecam pemerintah dan menegaskan tuntutan mereka.

D. DASAWARSA TERAKHIR HINDIA BELANDA (1930 – 1942)

1. Dalam Bayang-bayang Depresi Ekonomi Dunia

Dasawarsa ketiga ditandai oleh suatu perkembangan yang pesat sekali dalam bidang perusahaan, khususnya perusahaan perkebunan. Hasilnya tidak ada taranya dalam Sejarah Indonesia, boleh dikata meningkat sekali sehingga mendorong export serta menarik modal dari pelbagai negara, antara lain Amerika dan Jepang. Tepatlah apabila dikatakan bahwa Indonesia terbuka lebar bagi lalulintas dunia. Perkembangan ini membawa berbagai akibat dalam bidang politik dan sosial.

Dalam lapangan sosial terasa ada keperluan mendesak untuk mengatur perburuhan dan melindungi hak-hak kaum buruh, serta menetapkan upah yang pantas. Perhatian internasional terhadap masalah perburuhan di Indonesia memaksa penguasa kolonial memenuhi dasar-dasar kemanusiaan dalam menciptakan peraturan peraturan bagi kaum buruh.

Pelbagai segi kehidupan yang masih terbelakang seperti soal pendidikan, kesehatan, dan ikatan hutang-piutang dari rakyat perlu ditingkatkan. Pelbagai kegiatan ini berjalan sejajar dengan kemajuan dalam perusahaan dan perdagangan yang menciptakan suatu derajat kemakmuran, meskipun terutama hanya dapat dinikmati oleh lapisan atas dari masyarakat kolonial. Hal ini pada satu pihak menimbulkan kepercayaan pada penguasa kolonial di Hindia Belanda bahwa negeri ini dapat melaksanakan sendiri pemerintahan serta pembangunannya, pada pihak lain ketegangan antara pihak majikan serta penguasa dengan pihak kaum buruh serta rakyat kecil pada umumnya. Semakin menyolok perbedaan serta jurang tingkat kehidupan antara kedua golongan itu. Kegelisahan sosial selama puluhan tahun itu mencerminkan ketegangan yang ada di belakang kesejahteraan serta kemakmuran itu. Pemogokan-pemogokan dan agitasi-agitasi yang memuncak pada pemberontakan dalam tahun 1926 dan 1927 merupakan tanda yang jelas bahwa perkembangan sosial-ekonomis Hindia Belanda membawa akibat meruncingnya perhubungan yang tidak seimbang atau selaras antara penguasa dan yang diperintah.

Perkembangan proses produksi yang sangat cepat dengan hasil yang bertambah besar serta upah yang sangat rendah, memerlukan penyesuaian tidak hanya terhadap evolusi dari dunia luar Hindia Belanda tetapi juga terhadap hak-hak azasi dari penduduk pribumi. Pemerintah kolonial terlalu didasarkan atas kekuasaan dan kurang memperhatikan kepamongannya. Kepentingan rakyat disini terlalu diabaikan, politik terlalu ditentukan oleh pihak sana serta terlalu terarah kepada kepentingan dan menurut ukuran Barat. Seharusnya Indonesia sendirilah yang menjadi pusat politik kolonial Belanda. Sebagai tanda perubahan haluan dapat diutarakan tiga hal, yalah :

(1). ada kesadaran bahwa pribumi sangat kurang daya ketahannya ekonomis;

(2). perlu ditekankan pada keperluan Indonesia sendiri;

(3). diusahakan agar ada kontak lebih besar dengan jiwa rakyat Indonesia.

Apakah pokok-pokok politik itu betul-betul dapat dihayati?

Dalam kenyataannya faktor-faktor lain juga turut memainkan peranan dalam politik itu yalah :

(1) pemisahan golongan Belanda dan asing semakin jauh dari pribumi;
(2) kesadaran kebangsaan kaum pribumi sendiri semakin besar dan meluas;
(3) kepentingan modal dan industri besar baik di Nederland maupun di Hindia Belanda sendiri.

Dalam keadaan ini kaum etisi dan kaum idealis menghadapi kekuatan yang extrim yang datang dari dua pihak, yalah pihak kaum nasionalis dan pihak kolonial yang konservatif dan reaksioner. Sudah menjadi kenyataan bahwa sampai runtuhnya pemerintah Hindia Belanda golongan kedua yang tetap unggul, dan tetap dipertahankan status koloni dari Hindia Belanda maka dari itu pelbagai cita-cita politik dari masa sebelumnya, yalah politik Etis dan Asosiasi dibuang jauh-jauh. Dipertahankan sampai titik terakhir suatu dualisme yang mencakup pada satu pihak dunia perusahaan Barat dan pada pihak lain dunia pribumi yang menjadi pekerja upahan. Jarak perkembangan antara kedua sektor semakin besar. Dengan perkembangan sangat pesat dari perusahaan-perusahaan, lebih banyak orang Belanda datang ke Indonesia. Yang menyolok yalah mereka lebih kuat memberikan ke-Belanda-annya serta lebih mengutamakan keuntungannya yang hendak dikumpulkan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Keadaan seperti digambarkan di atas secara mendadak berubah karena Hindia Belanda terseret ke dalam krisis ekonomi yang merajalela di seluruh dunia. Sebagai negeri yang banyak mengexport Hindia Belanda sangat terpukul, lebih-lebih karena selama beberapa tahun tidak mau melepaskan standard emasnya. Perusahaan-perusahaan besar terkena, dengan akibat bahwa penurunan upah dan pemecatan secara besar-besaran membawa penderitaan berat bagi rakyat. Pemerintah Hindia Belanda juga mengadakan penghematan, kesemuanya tindakan yang diselaraskan kepada tuntutan untuk mempertahankan standard emas dan dengan demikian sama sekali tidak mempertimbangkan kepentingan penduduk.

Kondisi itu semakin mempertajam garis pemisah menurut warna kulit, antara bangsa Belanda dan bangsa Indonesia. Kemewahan golongan yang pertama dan sikapnya yang semakin

tertutup semakin menjauhkan mereka dari rakyat. Dengan latar-belakang ini maka mulai dilontarkan permasalahan tentang hubungan-hubungan antara kedua bangsa itu, dalam susunan masyarakat yang bagaimana dapat hidup bersama, bagaimana kedudukan politik masing-masing, nilai-nilai budaya mana yang akan menjadi pegangan masyarakat itu. Dalam konkritnya golongan-golongan politik mulai memperjuangkan kehidupan bangsa Indonesia dalam suatu negara yang merdeka. Bagaimana mencapai tujuan ini ternyata masih banyak perbedaan sikap dan pendirian, maka terdapat partai yang non-kooperatif dan yang koperatif; ada yang memperjuangkan lewat pelbagai fase dengan tuntutan pembentukan secara berlarut-larut lembaga-lembaga, seperti parlemen, negara uni, dan akhirnya negara merdeka penuh.

Derajat progresivitas atau kalau dikehendaki sifat reaksioner politik kolonial dapat diukur dari reaksinya terhadap pelbagai tuntutan itu. Garis-garis warna kulit yang memisahkan kedua golongan bertambah tajam dan perasaan kaum pribumi yang dibedakan serta dibelakang kepentingannya menjadi dasar kokoh dari kehidupan kolonialisme. Meskipun sangat diperhambat oleh jaman *"melesed" (malaise)* dan tindakan menekan oleh pemerintah, nasionalisme tumbuh terus dengan tidak tertahan lagi serta lebih sadar akan tujuannya. Dialog antara kaum nasionalis dengan pemerintah kolonial mencerminkan politik kolonial yang sangat konservatif dan reaksioner.

2. *Meningkatnya Politik Reaksioner*

Hal ini jelas sekali dari kebijaksanaan yang diambil oleh Gubernur Jenderal de Jonge (1931 – 1936) yang membuka halaman baru dalam politik kolonial pada awal tahun tiga puluhan. Politiknya bersifat sangat reaksioner terhadap pergerakan nasional, yang ternyata sama sekali tidak dipahami arti dan hakekatnya dan tidak hendak diakui existensinya. Beberapa peraturan mengenai larangan berkumpul dan berapat, hukuman bagi pegawai yang menggabungkan diri pada kegiatan "extremistis", hak-hak membuang dan menginternir terhadap kaum nasionalis radikal, kesemuanya selaras dengan politik kekerasan yang menunjukkan kekurangan pengertiannya akan nasionalisme Indonesia, dan pada pihak lain terutama kepentingan kaum pengusaha

Perpustakaan
Direktorat Sejarah
dan
Purbakala

yang perlu dibela dan dipertahankan selama masa krisis itu. Peningkatan pergerakan nasional menjadi dasar politik menindas de Jonge: selama pemerintahannya banyak diterapkan hak-hak *exorbitant* dengan meng-internir Ir. Sukarno ke Flores dan kemudian ke Bengkulu, Drs. Moh. Hatta dan Sjahrir ke Digul Atas dan kemudian ke Banda. Belumlah lagi berpuluh-puluh yang terlibat dalam pemberontakan tahun 1926 dan 1927 serta aktivis radikal pada tahun-tahun berikutnya ke Digul Atas, atau terkenal juga sebagai Tanah Merah. Kecuali kaum komunis, juga anggota-anggota partai nasionalis radikal, seperti Partindo, PNI dan Permi dideportasikan ke sana.

Politik menindas juga diterapkan terhadap partai-partai yang bersikap non-koperatif, seperti PNI dan Partindo yang berturut-turut dibubarkan. Dengan demikian aksi politik praktis tidak mungkin dijalankan dan menjadi lumpuh sama sekali, meskipun tidak padam. Terutama golongan non-koperatif sangat menderita akibat politik penindasan dan mulai mencari taktik koperasi.

Politik de Jonge juga menciptakan peraturan *Toezicht ordonnantie* (Ordonansi Pengawasan) pada 1 Oktober 1932 yang dapat menolak ijin untuk menyelenggarakan pengajaran apabila dipandang membahayakan ketata-tertiban masyarakat. Peraturan itu sudah barang tentu mendapat pertentangan hebat, karena dirasakan bahwa Pemerintah Hindia Belanda sangat kurang memberi kesempatan bagi pribumi untuk menuntut pelajaran, bahkan usaha pribumi sendiri yang dipelopori oleh Ki Hadjar Dewantara dihalang-halangi. Meskipun pejabat sangat hati-hati dalam menjalankan peraturan itu, akan tetapi kebebasan pengajaran tetap terancam.

Pemberontakan pada kapal perang De Zeven Provincien pada 4 – 10 Februari 1933 sebagai protes terhadap gaji yang sangat kecil, mengubah haluan politik kolonial terhadap pergerakan nasional, meskipun pergerakan itu tidak ada sangkut pautnya dengan pemberontakan itu.

Dikhawatirkan bahwa keadaan ekonomis yang jelek akan membuat rakyat peka serta mudah dipengaruhi oleh para pemimpin pergerakan yang mungkin sekali akan mempergunakan kesempatan untuk menghasut. Untuk mencegah hal ini pemerintah mulai menindak partai-partai yang non-koperatif.

Pada awal 1933 banyak rapat-rapat dibubarkan karena ucapan-ucapan yang dipandang oleh polisi sebagai hasutan untuk

memberontak, antara lain di Surabaya, Purworejo, Probolinggo, Cilacap, Kebumen, dan sebagainya. Pembubaran rapat seperti itu mempunyai akibat yang menguntungkan partai radikal, seperti Partindo, karena mendapat propaganda yang baik. Kenyataannya yalah bahwa banyak yang menggabungkan diri kepada partai itu. Tidak mengherankan apabila pada 27 Juni 1933 keputusan Gubernemen menentukan larangan bagi pegawai negeri untuk menjadi anggota partai itu. Tindakan kemudian mempunyai sasarannya pemimpin-pemimpin, yang satu persatu ditangkap, Ir. Sukarno pada 1 Agustus 1930 kemudian pada 25 Februari 1934, Moh. Hatta, Sjahrir, Maskoen, Boerhanoeddin, dan lain-lainnya. Sementara itu terus-menerus dilakukan *gropyokan* (penyerbuan) terhadap pertemuan-pertemuan atau tokoh-tokoh pergerakan, penggledahan, kesemuanya sesuai dengan politik Colijn dan De Jonge yang hendak menghancurkan partai-partai radikal. Politik keras ini dapat dikatakan berhasil dalam arti bahwa partai kehilangan anggota dan kontaknya dengan rakyat. Untuk menghindari kebinasaan maka diperlukan reorientasi dalam strategi dan taktik perjuangan.

Reorientasi ini juga mendorong ke arah persatuan dan kerjasama yang erat antara organisasi-organisasi pergerakan nasional. Perubahan taktik dalam menghadapi politik pemerintah samasekali tidak mengubah tujuan perjuangan, yaitu kesatuan nasional, persatuan organisasi-organisasi dan kemerdekaan Indonesia.

Bagaimana sikap dan politik pemerintah kolonial terhadap perkembangan ini? Apabila sejak awal tahun duapuluhan tahun diproklamasikan cita-cita kemerdekaan Indonesia oleh Perhimpunan Indonesia, pada pertengahan tahun tigapuluhan cita-cita itu hendak diwujudkan dalam perjuangan politik di gelanggang Dewan Rakyat. Petisi Soetardjo mengusulkan suatu konferensi antara wakil-wakil Indonesia dan Nederland untuk merencanakan perubahan-perubahan yang dalam sepuluh tahun dapat memberi status merdeka kepada Indonesia. Sebagian besar dari partai-partai, golongan-golongan dan tokoh-tokoh pergerakan mendukung petisi itu dan melancarkan pelbagai aksi. Seluruh perhatian pergerakan dipusatkan pada petisi ini.

Meskipun petisi ini bunyinya tidak revolusioner, tetapi pihak Belanda membuat reaksi yang menunjukkan sikapnya yang konservatif. Dianggapnya usul ini terlalu pagi dan diajukan tidak

pada saat yang tepat; lagi pula waktu sepuluh tahun dianggap terlalu pendek. Reaksi dari penguasa kolonial menunjukkan kesangsian apakah suara para pengusul mencerminkan dan didukung oleh keinginan rakyat 65 juta. Otonomi hanya dapat direalisasikan secara lambat-laun dan dari lembaga-lembaga bawah ke yang atas.

Walaupun usul itu ditolak mentah-mentah, namun politik kolonial mulai melaksanakan perubahan pemerintahan pada tahun 1938, berdasarkan atas rencana tahun 1922 dan sebagai kelanjutan dari Undang-undang desentralisasi tahun 1903. Didirikan provinsi-provinsi di luar Jawa dengan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat sedang Dewan Provinsi yang mengatur rumah tangga daerah.

Di sini gagasan Colijn yang konservatif tampak dengan jelasnya, yaitu pendirian pemerintahan pulau-pulau dan dewan-dewan lokal perlu mengoper fungsi Dewan Rakyat. Dasar dari politik ini yalah pembentukan suatu federasi. Bagaimanapun juga bentuk pemerintahan yang disusunnya, kekuasaan Belanda dalam soal-soal kedaerahan masih tetap dipertahankan. Bagi pengusaha kolonial keinginan hidup dalam ikatan kolonial dengan Belanda dianggap suatu kenyataan yang tidak perlu diragukan. Suatu akibat yang tampak jelas yalah bahwa penolakan petisi semakin menjauhkan kedua golongan – penguasa dan yang diperintah. Dirasakan oleh umum bahwa suatu permintaan yang sederhanapun telah ditolak mentah-mentah, suatu bukti dari pandangan serta pendirian Belanda yang picik serta sempit. Tiada lain jalan bagi kaum pergerakan untuk memperkuat barisan dengan memperkuat organisasi dan persatuan bangsa. Usaha ke arah persatuan ini juga didorong oleh keadaan internasional yang sejak 1939 menjadi gawat dengan expansi Nasional Sosialisme Jerman.

3. Frustasi Pada Pihak Pergerakan Nasional

GAPI sebagai penjelmaan gerakan kesatuan itu didasarkan atas hak menentukan nasib sendiri, kesatuan nasional, demokrasi dan kesatuan aksi. Baiklah kita ikuti bagaimana reaksi Belanda terhadap perjuangan GAPI ini, sehingga dapat kita ketahui corak politik kolonial pada tahun-tahun terakhir dari existensi penguasa kolonial. Semboyan yang didengungkan yalah "Indonesia Berparlemen" suatu tujuan yang menghendaki kerjasama erat antara

Belanda dan Indonesia, terutama diperlukan atas desakan keadaan internasional yang mengancam kedua negeri itu. Seperti halnya dengan petisi-Soetardjo aksi ini mendapat dukungan luas di kalangan masyarakat. Tujuan yang jelas perumusannya serta yang mempersatukan, memperkuat barisan perjuangan nasional.

Uluran tangan dari pihak Indonesia ini terutama ditafsirkan oleh Belanda sebagai suatu *chantage*, yaitu menggunakan keadaan perang untuk memaksa konsesi. Keterangan Pemerintah Belanda baru keluar pada 10 Februari 1940 yang menyatakan bahwa perkembangan dalam bidang jasmani dan rohani akan memerlukan perubahan dalam bidang ketatanegaraan. Sudah barang tentu hak-hak ketata-negaraan memerlukan tanggungjawab dari para pemimpin. Tanggungjawab ini hanya dapat dipikul apabila rakyat telah memahami kebijaksanaan politik. Selama Pemerintah Belanda yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan politik di Hindia Belanda, tidak mungkin didirikan Parlemen Indonesia yang mengambil alih tanggung jawab itu.

Kesimpulan dari pihak dan pemimpin Indonesia tentang penolakan itu yalah bahwa Indonesia akan menjadi daerah jajahan untuk selama-lamanya. Jalan lain yang perlu ditempuh yalah melancarkan propaganda seluas-luasnya di kalangan rakyat untuk melaksanakan cita-cita negara kesatuan Indonesia yang didasarkan atas demokrasi dan sistim parlementer dengan pemilihan umumnya. Pendudukan negeri Belanda oleh Jerman tidak mempengaruhi pendirian pemerintahnya yang tidak mau mundur setapakpun jua. Yang sangat menarik perhatian yalah bahwa sikap konservatif itu tidak mengurangi loyalitas bangsa Indonesia terhadap negeri Belanda bahkan ada keinginan umum untuk kerja sama dalam menghadapi perang itu. Sebagai sikap yang mendukung usaha Belanda yalah bahwa pelbagai aksi politik dihentikan.

Sebagai imbalan dari kesetiaan bangsa Indonesia diutarakan oleh Gubernur Jenderal Tjarda bahwa masyarakat dalam pelbagai seginya mengalami perubahan, gagasan-gagasan mengenai perubahan sosial dan politik perlu disimpan dahulu sampai sesudah perang sehingga dapat dikaji lagi dan disesuaikan serta menjadi lebih jelas lagi. Keterangan yang tidak tegas ini hanya menimbulkan kekecewaan saja, serta membuat rakyat semakin skeptis dan ragu-ragu akan pelbagai usaha dari Belanda yang diajukan kemudian. Maksud Belanda terhadap pergerakan nasional se-

makin jelas dengan tindakannya seperti pembrangusan pers, pengawasan lebih keras terhadap rapat-rapat dan tepatlah apabila dikatakan bahwa pada akhir 1940 Hindia Belanda sudah menjadi negara polisi.

Sementara itu perjuangan di lingkungan Dewan Rakyat terus berlangsung. Tiga mosi diajukan, mosi Thamrin, mosi Soetardjo dan mosi Wiwoho. Mengenai mosi pertama Pemerintah meniadakan istilah "Inlander" dan menggantikannya dengan "Indonesiër" atau "Inheems", akan tetapi berkeberatan untuk menggantikan "Nederlands-Indië" dengan "Indonesië". Mosi kedua mengusulkan untuk meniadakan segala diskriminasi berdasarkan kriterium ras bagi penghuni Hindia Belanda dan membentuk satu kewarganegaraan bagi semua lapisan sosial. Tanggapan Pemerintah tidak lain daripada penundaan pemecahan persoalan sampai sesudah perang. Mosi Wiwoho mengungkap kembali soal perluasan struktur ketata-negaraan Hindia Belanda yang memerlukan pembentukan Dewan Negara, perluasan kekuasaan Dewan Rakyat dan tanggungjawab kepala Departemen terhadap Dewan itu.

Satu-satunya hasil yang nyata dari mosi-mosi itu yalah pembentukan suatu panitia pada bulan Maret 1941, terkenal sebagai Commissie-Visman, yang bertugas meneliti keinginan cita-cita serta pendapat yang ada pada pelbagai golongan dan bangsa, lapisan dalam lapangan perkembangan tata-negara serta kedudukan pelbagai kelompok penduduk di dalam susunan itu.

Panitia ini tidak dianggap "sungguh-sungguh" dan dipandang hanya sebagai cara mengelakkan perhatian rakyat. Hasilnya diumumkan pada bulan Desember 1941 dan karena kancah perang Pasifik sudah sangat dekat, tidak ada pengaruhnya terhadap perkembangan politik. Pendirian serta pandangan yang menjiwai laporan itu sangat subyektif dan dari titik pendirian bersifat kolonial yang menyatakan bahwa "penduduk sangat puas dengan pemerintahan Belanda".

Pemerintah sendiri menyatakan pada akhir 1940 bahwa setiap pembicaraan tentang kemerdekaan Indonesia perlu ditolak, karena ini membuat perkembangan ketata-negaraan yang demokratis berubah menjadi perjuangan kekuasaan. Soal inipun ditunda sampai perang selesai. Hal ini serasi dengan pendapat menteri jajahan, Welter, yang pada 1 April 1941 menyatakan

bahwa selama rakyat Belanda tidak dapat memberikan suaranya, perubahan-perubahan tidak bersifat demokratis.

Kesediaan untuk mempertimbangkan suatu penyesuaian ketatanegaraan Belanda terhadap keadaan yang berubah serta menentukan struktur dan kedudukan daerah seberang dalam kerajaan diucapkan secara resmi oleh Ratu Wilhelmina pada 10 Mei 1941 dalam suatu pidato radio. Dalam kenyataannya suatu konferensi untuk membicarakan masalah itu perlu ditunda juga sampai sesudah perang.

Sampai pada saat-saat terakhir dari pemerintahan kolonial Belanda semua usul pihak Indonesia baik untuk memberi status merdeka kepada Indonesia maupun ajakan kerja sama dalam menanggulangi bahaya perang tetap ditanggapi dengan menjalankan politik menunda, yaitu menunggau sampai perang selesai. Pendirian ini tetap dipertahankan juga dalam menghadapi Piagam Atlantik yang menjamin hak setiap bangsa untuk memilih bentuk pemerintahannya sendiri.

Usul tentang milisi pribumi yang berdasarkan kewajiban setiap warganegara mempertahankan negerinya, dielakkan dengan alasan bahwa suatu perang modern lebih memerlukan angkatan perang yang terdiri atas prajurit profesionil. Hanya karena suatu penghematan milisi sebesar lima atau enam ribu orang dapat dilakukan. Tidak dapat disangkal bahwa soal milisi ini dikhawatirkan oleh Belanda sebagai alasan bagi bangsa Indonesia untuk menuntut hak-hak politik yang lebih besar, seperti perubahan ketata-negaraan. Memang Belanda ternyata hanya menyetujui milisi pribumi secara terbatas dan tidak disertai oleh pemberian hak-hak ketata-negaraan kepada rakyat.

Suasana pada bulan-bulan terakhir jaman Hindia Belanda diliputi oleh perasaan apatis tercampur tidak percaya dan akhirnya menjadi anti Belanda. Politik menunda dan memberi janji-janji merusak kepercayaan terhadap maksud-maksud Belanda. Tujuan untuk bekerjasama dengan dasar hak yang sama ditolak sebagai *chantage* politik, setiap keinginan dianggap sepi dan semua usul-usul ditolak mentah-mentah.

Sampai saat terakhir sifat-sifat pokok kolonial yang konservatif dipertahankan, yaitu masyarakat yang diberi ciri dualistis, dimana kedudukan golongan penguasa kolonial tetap terjamin sedang golongan yang diperintah tetap dibatasi hak-hak dan diperlakukan sebagai bangsa yang belum masak untuk berdiri

sendiri. Ditinjau dari pandangan historis dewasa ini jelaslah bahwa perkembangan sesudah perang dunia benar-benar membuktikan bahwa politik itu tetap dipertahankan dan tidak banyak terlihat perubahan sikap ataupun pendirian sesudah perang. Hanya perjuangan bangsa Indonesia sendiri dalam revolusi sajalah yang akhirnya dapat mendatangkan kemerdekaan baginya.

Seluruh proses perkembangan expansi kolonial Belanda di Indonesia memberi gambaran bagaimana kekuasaan kolonial ditanam dalam masyarakat Indonesia serta terciptanya hubungan kolonial yang tidak hanya terbatas pada hubungan ekonomis dan politik. Telah ditonjolkan peranan ideologi yang dipakai untuk membenarkan kolonialisme, sistimnya administrasi yang menjamin ketenteraman dan ketertiban agar keuntungan ekonomis untuk negeri induk dapat mengalir terus. Politik kolonial yang dituangkan sebagai proses pasifikasi, organisasi dan perkembangan daerah-daerah sampai akhir jaman Hindia Belanda tetap dijiwai oleh kepentingan-kepentingan negeri induk sehingga hubungan antara negeri induk itu dengan daerah jajahan sering disamakan dengan hubungan antara modal dan tenaga kerja.

Keperluan untuk mempertahankan dominasi kolonial itu memaksa penguasa kolonial kecuali mempergunakan kekuatan, juga menyusun cara-cara membenarkan situasi itu dengan ideologi-ideologi sebagaimana dibentangkan di atas, seperti ide asosiasi, politik etis, politik sintese, atau negara Nederland-Raya. Situasi kolonial hendak dipertahankan dengan diskriminasi rasial dan politik non-akulturatif.

'Garis warna' terdapat dalam setiap masyarakat kolonial, yang memisahkan kaum kulit putih dari massa yang berwarna. Seluruh struktur ekonomi, sosial dan politik didasarkan atas prinsip itu, semua hubungan bersifat hubungan antara atasan dan bawahan, atau antara superioritas dan inferioritas. Dalam stratifikasi sosialnya kaum penjajah ada di lapisan atas dan yang dijajah di lapisan atas dan yang dijajah di lapisan bawah, dan garis pemisahnya sering sedemikian sehingga menyerupai sistim kasta. Hal ini didasarkan atas konsep superioritas ras dari kaum kulit putih.

Dibanding dengan regime kolonial Inggris, di Indonesia garis warna kurang keras, Belanda lebih liberal dalam sikapnya terhadap sistim kasta, meskipun hubungan sosial tetap tidak bebas dan pada tingkat yang sama. Pada umumnya ada toleransi

rasial, antara lain terbukti dari adanya perkawinan antar bangsa, keturunannya diasimilasikan dalam golongan kaum kulit putih.

Kontrol ekonomis dan politik dipegang erat-erat oleh Belanda; baru mulai ada perhatian terhadap kemakmuran rakyat pada awal abad XX, sebelumnya hanya mementingkan tenaga kerja yang murah, penyerahan hasil bumi yang wajib, sehingga status ekonomi dan politik bangsa Indonesia sangat rendah; perdagangan dan ekonomi menjadi monopoli Belanda. Dalam bidang politik dicapai sedikit kemajuan dengan adanya perwakilan-perwakilan, meskipun terbatas pada perundang-undangan dan masih dibatasi oleh hak veto pemerintah pusat. Lagipula ada jaminan bahwa suara terbanyak masih pro Belanda.

Diskriminasi ras terutama diterapkan dalam bidang ekonomi dan edukasi; dasar kesempatan untuk memperoleh edukasi sangat terbatas sehingga perkembangan elite intelektuil sangat terhambat karenanya. (Lihat selanjutnya di bawah pokok 'non-akuturasi'). Dilihat dari segi ini edukasi merupakan bahaya bagi kekuasaan kolonial karena meratakan jalan ke arah emansipasi dan akhirnya kemerdekaan.

Inherent dalam politik 'garis warna' ialah kebiasaan membuat pemisahan sosial antara golongan kulit putih dan bangsa Indonesia. Kontak sosial terbatas, golongan Belanda exklusif, hubungan hanya terbatas antara majikan dan anakbuah, tuan dan pembantu. Semua aktivitas sosial, seperti rekreasi, sport, seni, tempattinggal, pendidikan, dan lain-lainnya, kesemuanya terpisah.

4. *Politik Non-akulturatif*

Filsafat pokok dari politik kolonial Belanda yalah non-akulturasi. Belanda berusaha melindungi budaya asli terhadap pengaruh-pengaruh asing, hendak membangun struktur politik berdasarkan adat lama dan bentuk-bentuk lokal dari pemerintahan Belanda yang tidak langsung yang dipertahankan sampai akhir regime mereka. Tidak ada usaha kuat menyebarluaskan bahasa Belanda, *lingua franca* yang dianjurkan yalah bahasa Melayu, pada umumnya proses Westernisasi atau modernisasi hendak dibatasi sekecil-kecilnya. Berbeda dengan politik kolonial Perancis, Belanda tidak mempunyai *mission civilisatrice* sehingga tidak

ada usaha untuk mendidik elite yang menjadi pelopor dari akulturasi yang menyebarkan budaya Belanda (Barat) kepada rakyat Indonesia. Tidak ada pula usaha untuk mengadakan asimilasi politik di mana bangsa Indonesia dijadikan warganegara penuh dari Nederland dengan segala haknya; tidak ada maksud membuat Indonesia sebagai provinsi Belanda dengan ibukota politik di Nederland dan administrasi sentral di Nederland.

Akibat dari politik non-akulturatif itu yalah bahwa proses westernisasi sangat terhambat, pendidikan terbatas, proses emansipasi sangat lambat, sangat kurang latihan ketrampilan teknik, sangat perlahan-lahan perkembangan ke arah kemerdekaan politik. Keuntungannya yalah bahwa banyak lembaga tradisionil yang utuh dan erosi kulturil tidak sederas daerah-daerah yang mengalami asimilasi dengan kekuasaan kolonial.

BAB II

STRUKTUR SOSIAL

A. STRUKTUR SOSIAL – EKONOMIS

1. Pertumbuhan Penduduk.

Waktu Rafles memerintah sebagai Letnan Gubernur Jenderal Inggeris, ia memperhitungkan bahwa penduduk pulau Jawa sebanyak empat setengah juta jiwa. Dengan angka ini saja pulau Jawa sudah merupakan pulau yang terpadat di daerah apa yang dulu disebut Hindia Timur ini. Hal ini tak mengherankan. Sejak zaman kerajaan-kerajaan kuno pulau Jawa dan beberapa tempat di Sumatra memang telah diberitakan sebagai daerah-daerah yang berpenduduk ber-"laksa-laksa". Apalagi kalau dibanding dengan daerah-daerah yang hanya merupakan "kerajaan-kerajaan desa" yang saling terpencil. Walaupun demikian kenaikan jumlah dan kerapatan penduduk di Jawa merupakan salahsatu gejala sosial-ekonomis yang terjadi selama masa kolonial. Menurut sensus 1930, penduduk pulau Jawa telah berjumlah 40 juta jiwa. Jadi dalam waktu 130 – 140 tahun saja penduduk Jawa dan Madura telah naik sepuluh kali lipat.

Sebenarnya dari sudut kerapatan penduduk Indonesia dengan mudah dapat saja dibagi atas tiga golongan besar. Suatu pembagian yang kebetulan sejajar pula dengan perbedaan ekologis dari daerah-daerah tersebut, yaitu:

1. Kelompok berkepadatan penduduk yang tinggi, yaitu pulau Jawa, Bali Selatan, sebagian Sumatra Barat, dan Sulawesi Selatan. Kelompok ini terdiri dari kira-kira 75% dari seluruh penduduk Indonesia.
2. Kelompok berkepadatan sedang, yaitu daerah-daerah luar Jawa lainnya, hampir seluruh Sumatra, Kalimantan, Sulawesi Tengah dan Utara, Nusa Tenggara.
3. Kelompok berkepadatan rendah, yaitu daerah apa yang pernah disebut sebagai Timur Besar, seperti Maluku, Irian Jaya dan pulau kecil lainnya.

Disamping tantangan alam yang hebat – keterpencilan dari satu pulau dengan pulau lain, hutan-belantara tropis yang sulit

untuk diolah dan sebagainya, kebiasaan-kebiasaan tradisionil yang masih bercokol di kalangan penduduk asli, yang berakibatkan pembatasan kelahiran yang cukup penting, adalah faktor menyebabkan tak pentingnya daerah-daerah dari kelompok ketiga ini dalam masalah pertumbuhan penduduk. Sebab itu yang perlu diperhatikan yalah kelompok pertama dan kedua.

Begitulah daerah vulkanis dari kelompok pertama, dengan musim hujan dan kemarau yang agak teratur serta tanah yang relatif masih muda, merupakan tempat yang merangsang bagi pertumbuhan penduduk. Sedangkan daerah-daerah lain, dengan tanah yang telah tua dan hujan yang tak begitu teratur, tidaklah demikian halnya. Sementara daerah-daerah dari kelompok pertama dapat memperkembang teknologi pertanian pada ketinggian yang cukup, maka daerah lain umumnya terikat pada sistim perladangan yang berpindah-pindah. Lain daripada sistim persawahan yang umumnya berlaku pada daerah kelompok pertama, sistim perladangan yang berpindah-pindah tidaklah memerlukan perhatian yang khusus dan teknologi pertanian yang tinggi.

Pertambahan penduduk tidaklah semata-mata tergantung pada masalah ekologis dan alamiah serta perkembangan teknologi pertanianan saja. Terlibat pula dalamnya faktor-faktor sosial-ekonomis lainnya, seperti kesehatan, keamanan, extensifikasi dan intensifikasi pertanian, proses migrasi extern dan intern. Tentu saja semua ini terpusat pula pada masalah perbandingan antara kematian dan kelahiran.

Dalam hal inilah terdapatnya kesukaran untuk meneliti dengan jelas proses dan tahap dalam peristiwa kependudukan di tanah air kita. Agak sulit diketahui secara pasti hubungan antara gejala sosial-ekonomis dengan tahap serta tingkat kecepatan dan kenaikan jumlah penduduk. Sebabnya yalah karena sistim pencacahan yang agak baik dan bisa dipercaya barulah dimulai pada dasawarsa kedua dari abad ini. Dan yang lebih sempurna dijalankan pada dasawarsa ketiga. Sedangkan menurut perkiraan, peristiwa kependudukan yang terpenting justru terjadi sejak awal abad ke 19. Hal ini terutama, seperti telah diungkapkan oleh ahli-ahli Belanda, terjadi di pulau Jawa. Timbul kesan seolah-olah politik agraria Belanda baik cultuurstelsel ataupun politik liberal, mendatangkan berkah yang demikian baik hingga penduduk Jawa naik secara mengagumkan.

Masalah yang pertama yang harus diteliti, kata Prof. Widjojo, bukanlah perkiraan yang hebat tersebut, tetapi bagaimana perkiraan itu bisa didapatkan. Maka dalam hal ini akan kelihatanlah betapa tak sempurnanya cara pencacahan atau penghitungan. Sering pencacahan dilakukan oleh pamong desa yang tak begitu mengerti tentang arti pencacahan. Lagi pula pencacahan sering dihubungkan dengan pajak kepala. Timbullah kecenderungan untuk memperkecil jumlah anggota keluarga yang sesungguhnya. Maka angka yang didapatkan sebenarnya jauh lebih kecil dari jumlah yang sesungguhnya. Usaha lain yang dilakukan dengan memakai sistim kelompok, berdasarkan perkiraan kasar saja, juga samasekali tak bisa dipercaya. Kesulitan ini akan lebih jelas lagi jika masalah jumlah penduduk harus dihubungkan dengan perimbangan antara yang meninggal dan yang lahir. Pamong desa sering tidak mencatat sama sekali kelahiran dan kematian bayi. Bukankah – menurut pikiran mereka – bayi-bayi itu "belum sempat jadi orang"? Karena hal-hal tersebut diatas, besar sekali dugaan bahwa selama abad 19 dan awal abad 20 perkiraan jumlah penduduk Jawa sebenarnya jauh lebih rendah dari keadaan yang sesungguhnya. Jadi tahap kecepatan pertumbuhan penduduk, barangkali juga tak sehebat yang dibayangkan.

Bahwa pertumbuhan terjadi dengan cukup pesat adalah pasti. Faktor utama yang sering diajukan yalah terjaminnya keadaan dan diperkenalkannya cara penjagaan kesehatan rakyat yang modern. Dibawah kepala-kepala tradisionil mereka, anak negeri sering terlibat dalam segala macam perang, hingga angka kematian cukup tinggi adanya. Disamping itu karena ketiadaan sistim pengamanan keselamatan anak negeri yang merata luas, kejahatan pun sering terjadi.

Betapapun kecenderungan ahli-ahli Belanda untuk kadang-kadang melebih-lebihkan berkat yang dilimpahkan oleh sistim kolonial, faktor terjaminnya keamanan yang lebih merata adalah salahsatu gejala yang sehat bagi pertumbuhan penduduk. Dengan adanya sistim keamanan yang terpusat kemungkinan untuk berpindah ke daerah yang lebih memberikan prospek ekonomis yang lebih baikpun terbuka lebih lebar.

Sampai dimana penjagaan kesehatan modern yang diperkenalkan pemerintah Belanda mempercepat lajunya pertumbuhan penduduk masih harus dipersoalkan. Terutama jika peranan ini harus dilihat dalam kontex abad 19. Sebab selama abad ini-

tindakan preventif terhadap penyakit menular, yang sering dianggap sebagai jasa pemerintah yang terbesar, masih sangat terbatas daerah jangkauannya. Hanya kurang lebih dua setengah persen saja dari penduduk pulau Jawa yang sempat menikmati vaksinasi. Atau dengan kata lain, hanyalah penduduk yang sering berhubungan dengan golongan Eropa sajalah yang mendapat sekedar berkah dari sistim preventif ini. Sedangkan yang menerima pengobatan langsung secara modern, bisa diduga, hanyalah golongan Eropa saja.[1] Bahwa adanya segolongan kecil yang mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan fasilitas modern sedikit banyaknya dapat juga memberikan pantulan pada masyarakat sekeliling, atau, barangkali bisa dikatakan sebagai kebocoran rahmat, adalah jelas.[2] Namun, selama abad 19, peranan dari fasilitas pengobatan serta penjagaan kesehatan modern tidaklah merupakan faktor yang sangat menentukan.

Hal-hal yang disebut diatas memberikan kesan bahwa sebenarnya selama abad 19 pertumbuhan penduduk di Jawa tidaklah terlalu luarbiasa. Masalahnya bukankah terletak pada jumlah yang riil, tetapi sering pada perhitungan yang tidak teliti.

Pada abad-20 perbaikan dalam sistim pencacahan dilakukan. Dengan begitu tahap pertumbuhan serta hubungan antara peristiwa kependudukan dengan masalah sosial-ekonomis kelihatan dengan lebih jelas. Apalagi setelah tahun 1930, ketika sensus pertama yang paling bisa dipercaya dan yang dijalankan dengan cukup teliti dilakukan. Proyek pertumbuhan penduduk sering harus bertolak-pangkal dari tahun ini. Sejak 1905 sampai dengan 1920, ketika sensus yang agak lumayan diadakan diperkirakan pertambahan penduduk pulau Jawa yalah kira-kira 10 per seribu jiwa. Pada tahun 1905 jumlah penduduk ialah kira-kira 29 juta 300 ribu jiwa, ditahun 1920 telah meningkat sampai kira-kira – menurut perkiraan yang rendah – 34 setengah juta jiwa. Kecepatan pertumbuhan penduduk agak tersendat-sendat karena masih tingginya angka kematian, yaitu kira-kira 32,5 sampai 35 per seribu jiwa. Angka kematian yang tertinggi yalah di tahun 1918 ketika terjadi wabah penyakit yang membunuh puluhan ribu jiwa. Jadi kita bisa membayangkan bahwa tingkat pertumbuhan penduduk yang terendah dalam

---

1 Widjojo Nitisastro, *Population Trend*, Ithaca, N. Y., 1970, hal. 39 – 43.

2 Bruce Glassburner dalam *Indonesia*, 1969.

empat setengah dasawarsa pertama abad ini terjadi pada antara 1915 dengan 1920. Malah di beberapa daerah terjadi pengurangan. Walaupun pukul rata pertumbuhan dalam periode ini (terutama antara 1917 – 1920) tingkat pertumbuhan yalah kira-kira 8 permil.

Pertumbuhan penduduk yang cepat terjadi sesudah 1920. Wabah-wabah besar tidak terjadi lagi. Dilaporkan bahwa sejak tahun 1920 sebagian besar daerah Indonesia telah terbebas dari epidemi cacar dan sesudah 1928 terbebas pula dari wabah kolera.[3]

Antara 1920 dan 1930 pertumbuhan penduduk pulau Jawa yalah kira-kira 17,6 per seribu jiwa. Tetapi pertumbuhan ini tidaklah merata, daerah-daerah yang telah padat, yang merupakan daerah migrasi keluar, kenaikannya tidak menyolok. Hal ini disebabkan karena sebagian dari pertumbuhannya mulai disedot oleh daerah-daerah penerima. Demikian pula sebaliknya daerah penerima migrasi mengalami pertumbuhan yang sangat cepat. Daerah-daerah yang pertama yalah antara lain Kedu dan Rembang, yang kenaikannya masing-masing hanya 3,2 dan 9,5 per seribu jiwa. Sedangkan daerah-daerah yang termasuk kelompok kedua, yaitu penerima, yalah daerah Besuki, yang kenaikan tak kurang dari 32,9 per seribu jiwa. Di samping itu daerah-daerah sekitar kota-kota besar, sebagai akibat dari urbanisasi, juga tumbuh dengan cepat. Karesidenan Betawi (Jakarta) naik sampai 27,2 per seribu jiwa.

Ketika sensus 1930 diadakan maka penduduk Indonesia telah berjumlah 60,7 juta jiwa. Dari jumlah ini 41,7 persen berdiam di pulau Jawa. Seperti halnya dengan Jawa maka kecepatan pertumbuhan penduduk di pulau lain juga tidak seimbang. Walaupun sensus sementara dari tahun 1920, tidaklah mencakup daerah-daerah luar Jawa dengan memadai, tetapi dapat diperkirakan bahwa antara 1905 dan 1920 kenaikan jumlah penduduk tiap tahun kira-kira 42,8 per seribu jiwa. Daerah-daerah Sulawesi dan Nusatenggara (termasuk Bali) mengalami pertumbuhan yang cepat sekali. Masing-masing daerah tersebut naik tiap tahun kira-kira 86,8 dan 78,7 perseribu jiwa. Tetapi antara 1920 dan 1930 terjadilah peristiwa yang agak aneh juga. Nusatenggara menjadi daerah yang terlambat laju, kenaikan

[3] Breman, *op. cit.*, hal. 64.

penduduknya hanya 24,4 per seribu jiwa. Sedangkan Maluku tampil sebagai daerah yang tercepat. Sebagai keseluruhan daerah luar Jawa mengalami pertambahan kira-kira 28,0 per seribu jiwa. Kenyataan ini, disamping membayangkan betapa masih terkebelakangnya sistim perhitungan, juga memperlihatkan kecenderungan bahwa bila titik kejenuhan dari kemampuan daerah penerima penduduk baru telah tercapai, maka perpindahan dan pengurangan kelahiran bisa terjadi. Kasus di pulau Bali adalah contoh yang paling jelas dari kecenderungan ini.

Sensus 1930 adalah pencacahan jiwa yang pertama yang dilakukan secara baik. Direncanakan bahwa setiap sepuluh tahun sensus akan diadakan. Tetapi pada tahun 1940 perang dunia kedua telah berjangkit, perhatian pemerintah tentu saja lebih banyak terpusat pada masalah-masalah pertahanan. Jadi perkiraan jumlah penduduk pada tahun akhir pemerintahan Hindia Belanda lebih banyak berdasarkan proyeksi pertumbuhan saja. Dari kecenderungan-kecenderungan yang diduga telah terjadi, seperti kenaikan rata-rata tahunan diperkirakan saja jumlah penduduk. Berdasarkan perhitungan seperti ini diperkirakan pada tahun 1940 jumlah penduduk Indonesia yalah 70,4 juta jiwa. Di Jawa ada kira-kira 48,4 juta, sedangkan di daerah luar Jawa jumlah penduduk ialah 22 juta jiwa. Jadi sebenarnya semboyan kita di awal Revolusi pada tahun 1945 dari sudut demografis bisa dianggap sebagai pemikiran rendah. Seolah-olah saja antara 1942 dan 1945 tidak terjadi peristiwa-peristiwa dalam kependudukan.

2. *Kepadatan Penduduk Dan Gejala Sosial-ekonomis*

Apa artinya kenaikan jumlah penduduk ini dalam sejarah dan perkembangan masyarakat Indonesia ? Seperti telah diuraikan diatas, tingkat kepadatan dan kecepatan kenaikan penduduk tidaklah merata. Tabel 1 memperlihatkan ketimpangan dalam penyebaran penduduk ini. Walaupun rata-rata kepadatan penduduk Indonesia, menurut sensus 1930 ini, hanyalah 31,9 jiwa per kilometer persegi, di Jawa saja tingkat kepadatan adalah 316,1 sedangkan di luar Jawa hanyalah 10,7. Akan lebih menyolok lagi kalau kita bandingkan sebuah daerah tertentu dengan daerah yang lainnya. Jika Maluku hanyalah 1,8 jiwa per kilometer persegi, maka daerah Cirebon tak kurang dari 659,9, dan Bandung 671. Di luar Jawa yang terpadat adalah dataran tinggi

Agam (Sumatra Barat) yang kepadatannya perkilometer persegi yalah 117,1.

Seperti telah juga disinggung diatas, kepadatan penduduk juga sejajar dengan corak pertanian dan setingkat teknologi pertanian. Daerah-daerah persawahan yang telah mengenal sistim pengairan yang cukup tinggi merupakan tempat-tempat yang terpadat. Sedangkan daerah-daerah ladang dan peladangan yang berpindah-pindah dengan tingkat teknologi yang belum tinggi merupakan daerah yang jarang penduduknya.

Tabel 1
Kepadatan Penduduk (1930).

Daerah	Jumlah Penduduk	Luas daerah Km^2	Kepadatan rata-rata
Jawa Barat (termasuk Jakarta)	11.397.146	46.877	243,0
Jawa Tengah	15.295.504	37.375	408,2
Jawa Timur	15.055.714	47.922	492,0
Jumlah pulau Jawa	41.718.364	132.174	316,1
Sumatra	8.254.843	473.606	17,5
Kalimantan	2.168.661	539.460	4,0
Sulawesi	4.231.906	189.035	22,4
Maluku/Irian Jaya	893.400	496.456	1,8
Nusa Tenggara	3.460.056	73.614	47,0
Jumlah Indonesia	60.727.233	1.904.345	31,9

Sumber: Widjojo Nitisastro, *Population Trend*, hal. 75

Di samping itu kelihatan pula pengaruh geografis dan historis yang menyebabkan orang cenderung untuk mengelompok pada tanah-tanah yang telah diusahakan.Besuki adalah daerah yang relatif terkemudian berkembang, sebagai akibat mengalirnya para migran dari daerah lain. Karena itu kerapatan penduduknya tidaklah begitu tinggi, yaitu (berdasarkan sensus 1930) 206 jiwa per kilometer persegi. Tetapi gambarannya segera berobah setelah dilihat kerapatan di daerah persawahan, yaitu

1.341 jiwa per kilometer persegi. Demikian juga halnya dengan Karesidenan Bogor. Kerapatan penduduk rata-rata hanyalah 191 per kilometer persegi. Sedangkan di daerah persawahan tak kurang dari 1.205. Sebab itu bisa dimengerti bahwa daerah ini juga merupakan daerah pertanian yang berkembang dengan cepat. Tanah luas tetapi yang diolah belum seberapa. Tidak demikian keadaannya dengan Madura, yang secara keseluruhan mempunyai kerapatan penduduk yang rendah, hanya 359, dan di daerah tegalan 535, sedangkan di daerah persawahan 2.647. Jadi penumpukan yang besar, sehingga kepadatannya malah lebih padat dari daerah persawahan di Yogyakarta, yaitu 2.351. Keadaan ini terutama disebabkan oleh miskinnya tanah yang bisa diolah di pulau tersebut. Akibatnya yalah, migrasi ke luar secara besar-besaran.

Kenaikan kepadatan penduduk serta penetrasi ekonomi Eropa, terutama setelah 1870, ketika perkebunan-perkebunan besar mulai beroperasi, mengakibatkan hal-hal yang saling bertentangan. Di samping diperluasnya daerah tegalan, diperbaikinya sistim irigasi dan diadakannya intensifikasi pertanian, perkebunan-perkebunan besar juga berakibatkan diperkecilnya pemilikan tanah – dan diperbesarnya jumlah petani penyewa dan petani yang tak punya tanah. Hal ini merobah struktur penduduk desa dan mempengaruhi pula tingkat kemakmuran.

Pertumbuhan penduduk tentu saja memberi dorongan untuk memperluas daerah pertanian. Dalam hal ini adanya perkebunan, yang memerlukan sistim pengairan yang baik, serta politik etis, yang juga mementingkan irigasi bagi keperluan pertanian rakyat, ikut memberikan saham. Pada dasawarsa pertama abad ini banyak juga daerah persawahan baru yang bisa dibuka. Daerah Karawang, umpamanya, dalam periode ini berhasil dijadikan sebagai salahsatu pusat produksi beras yang paling penting. Tetapi pengluasan tanah pertanian bukan tak ada batasnya. Perluasan daerah persawahan yang tanpa memperhitungkan perbandingan ekologis bagi pentingnya peranan hutan yang prawan, bisa menimbulkan hal-hal yang justru memperkecil daerah yang telah sanggup berproduksi. Bahaya erosi menyebabkan perluasan itu bagaimanapun harus ada batasnya. Akibat dari keterbatasan ini mudah diduga bahwa perluasan atau extensifikasi pertanian tertinggal dibanding dengan laju pertambahan penduduk. Antara 1928 dan 1938 diperkirakan kenaikan areal tanah

pertanian di Jawa sebanyak 4 persen, sedangkan antara 1920 dan 1930 kenaikan penduduk kira-kira 17 persen. Begitu juga kira-kira yang terjadi pada dasawarsa berikutnya.

Akibat langsung dari kenaikan penduduk yalah terbagi-baginya pemilikan dan pemakaian tanah. Tanah-tanah yang telah kecil dipotong-potong lagi supaya anggota keluarga yang berhak memilikinya. Salahsatu ilustrasi pernah diberikan oleh Burgers dalam memperbandingkan keadaan sosial ekonomis desa Pekalongan pada pertengahan abad 19 dengan awal abad 20. Pada tahun 1868, berdasarkan Hukum Islam, ada enam orang penduduk yang diharuskan mengeluarkan zakatnya, tetapi pada tahun 1928 tak seorangpun lagi secara hukum diwajibkan bayar zakat (walaupun mereka umumnya masih membayar fitrah setelah bulan Puasa). Pemilik tanah di desa tersebut pada tahun 1868 masih mempunyai antara 0,7 sampai 1,1 ha, di tahun 1928 luas tanahnya telah menciut menjadi 0,5 ha.[4] Sebagai keseluruhan besar pemilikan tanah rata-rata di pulau Jawa merosot dengan cepat. Pada tahun 1922 tiap pembayar pajak tanah rata-rata mempunyai luas tanah seluas 1,15 ha, sedangkan pada tahun 1938 telah menjadi 0,86 ha.[5]

Namun angka rata-rata ini samasekali tidaklah membayangkan keadaan yang sesungguhnya, karena di beberapa daerah luas tanah rata-rata yang dimiliki jauh lebih kecil lagi. Di suatu desa, dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, luas tanah yang dimiliki perseorangan rata-rata hanyalah 0,3 ha. Banyak pula yang hanya memiliki kebon rumah saja, tanpa memiliki sawah atau tegalan.

Sebagai catatan perlulah diingat bahwa pemilikan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta (dulu disebut sebagai salahsatu *Vorstenlanden,* adalah gejala baru, yang bersumber dari perobahan hukum tanah yang dimulai berlaku sejak tahun 1918. Sebelum periode itu para petani hanyalah mempunyai kewajiban mengerjakan tanah yang dipercayakan padanya oleh pemegang hak apanage – yaitu yang diberi hak oleh raja mewakilinya sebagai pemilik tanah yang sesungguhnya. Sejak 1918 hak-hak apanage

4 D.H. Burger, *"Rapport over de desa Pekalongan in 1868 en 1928"*, Economische Beschrijvingen I, 1929.

5 Karl J. Pelzer, *Pioneer Settlement in the Asiatic Tropics; Studies in Land Utilization and Agricultural Colonization in Southeastern Asia*, New York, 1945, hal. 161.

dihapuskan. Dengan ini maka hak raja, sebagai pemilik tanah kerajaan yang tunggal dihapuskan pula. Akibatnya yalah ikatan petani dengan tanah tambah liat. Ia bisa mewariskan secara syah hak miliknya. Namun dengan begitu tanah terkena pada hukum tradisionil tentang warisan. Akibat selanjutnya tentu saja pengepingan tanah terus berlanjut sesuai dengan jumlah keturunan yang berhak. [6]

Di samping proses penciutan tanah yang dimiliki, pertumbuhan penduduk dan diperkenalkannya sistim pajak – yang serta-merta memperkuat pengaruh corak ekonomi uang – juga muncul golongan petani buruh, yang semasekali tidak memiliki tanah. Mereka hanyalah mencari kehidupan dengan mengupahkan tenaga mereka pada pemilik tanah ataupun pada perkebunan. Berdasarkan survey yang diadakan pada tahun 1926 kelihatan bahwa ada daerah-daerah yang memiliki jumlah prosentase buruh-tani yang sangat tinggi, seperti Priangan, Jakarta, Banyumas, dan Besuki; ada pula yang rendah, seperti Banten, Kedu, Cirebon, Surabaya, dan Madura, sedangkan daerah-daerah lain, seperti Pekalongan, Madiun, Kediri dan Pasuruan, jumlah buruh tani tak begitu tinggi. Tetapi dari tahun ke tahun ada kecenderungan untuk menaik pada setiap daerah. Pada tahun 1905 diperkirakan bahwa di seluruh Jawa ada kira-kira 5,3 persen atau 341.110 petani yang bisa termasuk kategori buruh-tani atau petani bukan pemilik tanah. Pada tahun 1926 diperkirakan bahwa tak kurang dari 27,8 persen yang bisa dimasukkan ke dalam kategori buruh-bukan-pemilik-tanah. Pada tahun 1926 diperkirakan bahwa tak kurang dari 37,8 persen yang bisa dimasukkan kedalam kategori buruh-tani, petani tanpa milik tanah dan kuli atau kerja kasar . [7]

Jadi apa yang sesungguhnya terjadi yalah semacam apa yang disebut Boeke "pengluasan yang statis", walaupun daerah pertanian bertambah luas dan intensifikasi dalam produksi hasil pertanian diadakan yang muncul bukanlah pemecahan masalah, tetapi hanyalah problim baru. Jalan keluar bagi kemacetan dari pengluasan pertanian hanyalah bersifat fragmentaris, terpecah-pecah, dan tanpa variasi – masalah agraris dicari jawab secara

6 Tentang masalah ekonomi agraris dan pemilikan tanah di Daerah Istimewa Yogyakarta, lihat selanjutnya Selo Soemardjan, *Social Change in Jogjakarta*, Ithaca, N. Y., Cornell University Press, 1962, hal. 215 – 230.

7 Dipetik oleh W. F. Wertheim dari study Mayer Ranneft, *Indonesian Society in Transition*, Brussel-'s-Gravenhage, 1959, hal. 111 – 113.

agraris pula, tanpa kesadaran adanya keterbatasan dalam hal ini. Apalagi tantangan yang dihadapi bukanlah hanya masalah bertambahnya mulut yang harus makan, tetapi juga, seperti telah disinggung di atas, penerobosan ekonomi uang dalam kehidupan desa. Hal ini membawa masalah-masalah yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya.

Undang-undang agraria 1870 bermaksud, antara lain, melindungi anak negeri dari cengkeraman bangsa-bangsa asing yang telah mulai sejak pertengahan abad 19 memiliki tanah. Dengan undang-undang asing ini ditentukan bahwa orang asing tidak dibenarkan secara hukum memiliki tanah. Tetapi, terlepas dari kegagalannya yang kadang-kadang kelihatan dalam usaha pengkontrolan ini, pemilikan tanah kadang-kadang dilakukan dengan memakai perantara anak negeri – undang-undang ini samasekali tidak mengadakan pembatasan pemilikan tanah bagi pribumi-pribumi yang berhasil mengadakan jawaban yang tepat bagi perubahan struktur ekonomi tersebut. Disamping itu undang-undang agraria, yang dianggap sebagai pemula dari politik liberal tersebut, mengundang perkebunan dengan modal besar atau pengusaha Belanda untuk mempercepat krisis agraria.

Perkebunan yang terpenting di pulau Jawa yalah perkebunan tebu dan industri gula, yang mengolah hasil tanaman, adalah salah satu cerita sukses dalam sejarah kolonial Hindia Belanda. Tetapi dari moril kehidupan rakyat dan perkembangan masyarakat, perkebunan besar tersebut tak ubahnya dengan pisau bermata dua. Adanya perkebunan-perkebunan yang diselenggarakan dengan modern tentu saja dapat membocorkan "berkah"nya kepada masyarakat sekitar, seperti perbaikan sistim pengairan dan kemungkinan untuk menjual tenaga untuk mendapatkan pencarian nafkah tambahan. Tetapi akibat sampingan malah mempunyai pengaruh lebih mendalam, yang memperkecil kesempatan petani untuk mencari jalan ke luar dari tekanan alamiah, seperti pertumbuhan penduduk yang mereka hadapi.

Perkebunan tebu berlandaskan pada sistim sewa untuk waktu yang tertentu. Biasanya tanah disewa untuk sekali musim panen. Selama masa itu petani pemilik tanah bisa juga bekerja sebagai buruh. Keharusan untuk menyewakan tanah pada musim panen tebu berarti bahwa si pepetani harus memilih bibit padi yang cepat, menghasilkan dengan mutu yang lebih rendah. Sebab bagaimanapun juga, berdasarkan perintah, pertimbangan

pertama haruslah diberikan bagi kepentingan perkebunan. Demi kepentingan perkebunan tanah persawahan harus segera dibersihkan. Dan si petani harus segera bisa menjadi buruh. Jadi adanya perkebunan, jangankan akan berfungsi sebagai contoh bagi suatu proses perkembangan masyarakat agraris, malah menyebabkan mereka harus lebih terpaku pada sistim yang lama.[8]

Bukankah upah sewa tanah dan ganti kerugian bagi penanaman padi yang bermutu rendah berarti tambahan kemakmuran bagi rakyat ? Tetapi inilah masalahnya. Perubahan yang mendadak tanpa penyediaan cara dan sarana bagi akibat dan kenyataan baru yang ditimbulkan perubahan tersebut malah menimbulkan akibat yang membalik. Belum terbiasa dengan pemilikan uang yang jauh melampui keperluan harian sering menimbulkan munculnya tindakan-tindakan yang secara ekonomis merugikan, seperti judi, penghamburan untuk slametan dan sebagainya. Maka yang diberikan hanyalah singgah sebentar di tangan petani, dan malah bukan tak jarang ikut membawa harta yang telah dipunyai. Dengan begini rakyat makin tergantung nasibnya pada perkebunan. Jika hutang yang terbuat tak bisa dipenuhi dengan penjualan tenaga pada perkebunan maka jalan singkat yang terbuka yalah menjual tanah. Pengepingan dan penciutan tanahpun terjadi pula. Dan selanjutnya jumlah buruh tanipun bertambah pula.

Begitulah di samping terjadinya penciutan luas tanah yang dimiliki serta makin besarnya jumlah buruh-tani, jumlah tani-tani kaya, yang juga berperanan sebagai tuan-tanah juga bertambah. Gejala ini, disamping disebabkan ketidak-mampuan petani-petani yang lemah untuk mempertahankan milik mereka guna mendapatkan uang tunai sebagai pembayar pajak dan sebagainya, juga didorong oleh keharusan bagi orang-orang asing untuk menjual kembali tanah yang telah dimiliki. Hal yang belakangan ini terutama terjadi di Priangan. Pada tahun 1903 diperkirakan kurang lebih 11,3 persen dari pemilik tanah di Priangan memiliki tanah lebih dari 2,84 ha. Pada tahun yang sama dari 150 orang anak negeri yang mempunyai tanah lebih dari 25 ha., 71 orang berdiam di Priangan.[9] Tidaklah begitu mengherankan pula

8. H. van der Kolff, "An Economic Case Study: Sugar and Welfare in Java", dalam Phillips Roupp, *Approaches to Community Development*. 's Gravenhage, W. van Hoeve, 1953, h. 188 – 196. Lihat juga W. F. Wertheim and The Siau Giap, "Social Change in Java, 1900 – 1930", *Pasific Affairs*, XXXV, 3, Pall, 1962, hal. 226 – 227.

9 Pelzer, *op. cit.*, hal. 168 – 169.

bahwa prosentase buruh-tani juga tinggi di Priangan. Pada tahun 1903, 10 persen dari petani Priangan adalah buruh-tani yang tak memiliki tanah. Sedangkan Surabaya yang tidak mempunyai banyak petani kaya, prosentase buruh-taninya hanyalah 0,9 persen.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh seorang sarjana Belanda kelihatan pula bahwa jumlah pemilik tanah besar juga bertambah dengan cepat, terutama di daerah keresidenan-keresidenan Jawa Barat dan keresidenan Besuki. Pada tahun 1905 jumlah pemilik tanah yang mempunyai tanah lebih dari 17,7 ha. di seluruh Jawa yalah sebanyak 1.209, orang, pada tahun 1925 jumlahnya telah naik menjadi 3.387 orang, jadi ada kenaikan sebanyak 2.178 orang. Di Priangan jumlah ini naik dari 556 orang pada tahun 1905 menjadi 1.226 orang pada tahun 1925. Pada tahun 1905 hanyalah 15 orang saja di keresidenan Besuki yang memiliki tanah lebih dari 17,7 ha. atau 25 bau. Duapuluh tahun kemudian jumlahnya telah meningkat menjadi 50. Di seluruh pulau Jawa hanyalah dua keresidenan saja, yaitu Pekalongan dan Surabaya yang mengalami penyusutan jumlah petani besar tersebut. Sedangkan di daerah-daerah lain kelihatan tendensi yang menaik. Bisa jadi hal ini disebabkan oleh suasana pesisir kedua daerah tersebut yang memungkinkan lebih banyak untuk mengadakan diversifikasi kerja, sehingga kelebihan uang dari para petani kaya bisa juga tersalur pada yang lain dan sebaliknya keperluan uang dari para petani biasa bisa diisi dengan mengambil kerja lain, yang tidak bersifat agraris. Sejak berakhirnya Perang Dunia I Surabaya memang menjadi salahsatu pusat perindustrian yang terpenting. [10]

Jadi sebagai keseluruhan dapat dikatakan bahwa pertumbuhan penduduk ditambah lagi dengan pengaruh terbukanya Jawa bagi perekonomian dunia, terutama melalui perkebunan-perkebunan besar, tidaklah merupakan faktor dinamis perkembangan masyarakat. Pembaruan-pembaruan atau inovasi, yang diharapkan untuk dapat menemukan jalan keluar, segera terlanda oleh problim-problim yang lebih besar tersebut. Dari sudut kesejahteraan berarti merosotnya kemakmuran, sedangkan dari sudut strukturil menyebabkan terjadinya pembagian golongan yang berdasarkan pemilikan tanah. Nilai pendapatan rata-rata,

---

10 Pelzer, *op.cit.*, Appendix C, Tabel XXVII, hal. 257.

sejak akhir abad 19, merosot dan kwalitas makanan juga berkurang. [11]

Penekanan kelas masyarakat berdasarkan pemilikan tanah juga membawa perobahan dalam corak pergaulan sosial. Di satu pihak terjadi jurang yang lebih dalam antara pemilik tanah, atau kadang-kadang tuan-tanah, dengan buruh-tani atau penyewa tanah – jadi yang muncul semacam "polarisasi ekonomi" didalam – dan di pihak lain timbul paksaan alamiah bagi perlunya "kemiskinan yang dipikul bersama" (shared poverty"). [12]

Tentu saja hal-hal tersebut diatas, terikat erat pula dengan seluruh politik dan sifat kolonialisme Belanda. Tetapi dengan pertumbuhan penduduk yang tidak menyolok serta dengan tradisi budaya yang kurang bersifat patrimonial dan birokratis beberapa daerah luar Jawa, dapat melepaskan diri dari jeratan ekonomi tradisionil dan lebih akrab terlibat dalam putaran ekonomi yang dibukakan oleh pemerintah kolonial.

3. *Pelebaran Deferensiasi Kerja*

Berkaitan dengan terjadinya peristiwa sosial-ekonomis yang telah diuraikan diatas terjadi pula pelebaran differensiasi kerja. Jumlah dan jenis kerja yang bisa dilakukan bertambah banyak. Orang tak lagi terpukau hanya pada satu atau dua kerja saja, tetapi beberapa pilihan telah terbuka, karena masyarakat juga telah mengenal keperluan baru dan memerlukan penambahan pelayanan. Begitulah amat menarik umpamanya data yang diungkapkan oleh Burger dalam membandingkan perkembangan yang terjadi di desa Ngaplak dan Pekalongan dalam waktu setengah abad (masing-masing dari tahun 1868 dan 1928 dan 1926). Pada dasawarna ketiga abad dua puluh ini desa Pekalongan ada 7 orang tukang jahit, 5 orang tukang mas, 36 pedagang dan 7 orang tukang gerobak. Di desa Ngablak terdapat juga 7 orang tukang jahit, 2 orang tukang mas, 2 orang tukang kayu, 29

---

11 Lihat H. Boeke, "Objective and Personnel Elements in Colonial Welfare Policies", *Indonesia Economics The Conseps of Dualism in Theory and Policy*, The Hague, W. van Hoeve, 1966, hal. 296 – 299.

12 Konsep ini dikembangkan oleh Clifford Geertz dalam tulisan-tulisannya tentang masyarakat dan perekonomian di Jawa. Lihat bukunya yang terpenting tentang hal ini *Agricultural Involution: The Processes of Ecological Change in Indonesia*, Berkeley: University of California Press, 1968.

pedagang dan 11 orang tukang gerobak. Pada abad yang lalu di dua desa tersebut golongan-golongan pekerja yang tersebut diatas samasekali tidak ada.[13] Jadi dalam waktu setengah abad beberapa jenis pekerjaan baru dan sistim pelayanan baru telah muncul. Dengan kata lain pengaruh upah dalam kehidupan pedesaan makin pula kelihatan. Tentu saja kejadian di desa tersebut tidak begitu saja diambil sebagai ukuran, tetapi gejala umum memang menuju kearah differensiasi yang lebih luas.

Pelebaran jenis kerja sedikit banyaknya mengurangi berat himpitan sosial sebagai akibat kemerosotan agraris di daerah pedesaan. Hal ini dibicarakan terutama penting artinya di Jawa. Karena lain daripada daerah-daerah Sumatra, terutama Sumatra Barat, dan Kalimantan Selatan, yang berhasil menyesuaikan sistim produksi pertanian mereka dengan tuntutan ekonomi export, petani-petani di desa-desa di pulau Jawa, umpamanya masih cenderung pada intensifikasi tanpa perobahan yang fundementil dari sistim produksi.

Perbedaan kedua pola jawaban terhadap masalah alamiah dan penetrasi ekonomi dunia ini juga mempengaruhi kecepatan mobilitas sosial dari masyarakat pedesaan. Desa-desa atau nagari -nagari di Sumatra Barat, lebih segera mengadakan skala penilaian baru terhadap kedudukan seseorang dalam masyarakat. Penetrasi ekonomi dunia yang diikuti oleh perobahan dalam kehidupan ekonomi desa – kecenderungan untuk bertani bagi keperluan export dan mulai kelihatan – menyebabkan kategori adat sebagai satu-satunya dasar nilai bagi stratifikasi atau pelapisan masyarakat harus ditinjau.[14]

Uang telah bisa dikumpul bagi siapa yang berusaha dan punya rezeki dan dengan uang beberapa simbol dari status sosial bisa pula didapat. Begitulah mobilitas yang gencar terjadi, walaupun dasar-dasar simbolik tradisionil cenderung untuk dipertahankan. Bahwa kedua proses ini – mobilitas sosial sebagai akibat perobahan ekonomi dan kecenderungan untuk mempertahankan simbolik dari penyambungan tradisi – menimbulkan konflik-konflik yang juga terpantul pada pengubahan politik akan kelihatan pada bagian-bagian yang lain dari buku ini. Tetapi pelebaran jenis kerja dan terbukanya kemungkinan-kemungkinan

13 D. H. Burger, *op.cit.*,

14 Lihat B. Schrieke, *Indonesian Sociological Studies. Selected writings.* Part. I. "Sumur Bandung", Bandung, 1960.

lebih luas untuk mencari rezeki merupakan salahsatu dinamisasi dalam masyarakat.

Tentu saja pelebaran diferensiasi kerja lebih meluas disebabkan oleh pengaruh kota serta terbukanya kesempatan-kesempatan baru di kota-kota. Karena itu tidaklah mengherankan pula bahwa pelebaran diferensiasi sering pula sejajar dengan urbanisasi. Jenis kerja dan jasa yang selama ini tak dikenal ataupun tak diperlukan dalam kehidupan tradisionil, seperti pertambangan, beberapa jenis pengangkutan tertentu, pegawai pada maskapai dagang dan sebagainya, kini telah terbuka, sehingga secara keseluruhan dapatlah dikatakan bahwa susunan masyarakat mengalami perubahan. Walaupun mayoritas terbesar adalah golongan tani, tetapi pengertian yang dikenakan kepada golongan tani telah pula lebih beraneka-ragam, dan jumlah pelapisan masyarakat bertambah pula.

Tabel 2
Kegiatan ekonomi dari tenaga kerja
di Indonesia, 1930

Kegiatan ekonomi	Tenaga kerja (dalam ribuan)			Prosentase
	Laki-laki	Wanita	Jumlah	
Pertanian (kehutanan, perikanan, peternakan)	10.518	3.502	14.020	67,7
Pertambangan	55	41	96	0,7
Kerajinan	1.477	628	2.105	10,6
Perdagangan	801	290	1.091	6.2
Pengangkutan	225	66	291	1,5
Jasa-jasa	661	317	1.025	4,9
Lain-lain dan yang tak diketahui	1.070	628	1.698	8,4
Jumlah semua	14.807	5.472	20.279	100.0

Sumber: Widjojo Nitisastro, *op.cit.*, hal. 84.

Berdasarkan Sensus 1930 kelihatan bahwa sebagian terbesar rakyat Indonesia bekerja dalam lapangaan pertanian (termasuk perikanan dan peternakan), yaitu kira-kira 67,7 persen.

Kerajinan atau manufaktur merupakan jenis kerja yang kedua yang banyak dilakukan sebagai mata pencaharian. Baru kemudian disusul oleh perdagangan. Tetapi sebenarnya dalam masa peralihan terjadi juga perangkapan jenis kerja. Petani bisa saja melakukan kerja dalam lapangan kerajinan ataupun perdagangan. Dan begitu pula seorang yang sebagian besar hidupnya berdagang, sering menganggap dirinya sebagai petani karena sumber kekayaannya berasal dari hasil pertanian yang dikerjakannya pada musimnya. Apalagi wanita yang sering bertani tetapi juga menambah penghasilan dengan mengerjakan kerajinan rumahtangga.

Sebagian besar dari pekerja yang termasuk kategori kerajinan bekerja dalam industri textil, yang umumnya lebih bersifat industri kecil atau rumahtangga.Peranan kota dalam pelebaran diferensiasi kerja ini akan lebih jelas, jika kita sadari pula bahwa kira-kira seperempat dari penduduk yang tinggal di kota-kota di Jawa terlibat dalam usaha kerajinan, terutama dalam industri batik. Sedangkann diluar Jawa hanya 17,6 persen dari tenaga kerja di kota-kota yang aktif dalam usaha kerajinan.

Perbandingan antara jumlah penduduk yang aktif dalam perdagangan memperlihatkan kenaikan dari yang belakangan. Jika pada tahun 1905 diperkirakan ada kira-kira 1,87 persen dari 30 juta penduduk Jawa yang terlibat dalam perdagangan, maka pada tahun 1930 diperkirakan perbandingan telah menaik, yaitu 2,27 persen dari 40 juta penduduk. [15]

Pelebaran diferensiasi kerja berarti terlepasnya ikatan terhadap kerja yang hanya terkait pada pertanian dan sejenisnya. Disamping memperkenalkan penyewaan jasa dan tenaga pada berjenis usaha dan lembaga, seperti pemerintahan, pengangkutan, pertambangan, serta badan-badan usaha asing, maka dalam proses ini makin bertambah pula jumlah pengusaha yang merdeka. Ada diantara mereka yang hanya sebagai pedagang kecil, pengusaha industri kecil dan sebagainya, tetapi telah pula muncul pengusaha pribumi yang sanggup mempekerjakan orang lain. Walaupun dalam perkembangan ini mereka harus berhadapan dengan pengusaha keturunan Cina, tetapi secara berangsur jumlah pengusaha yang terlepas dari agraria tetap bertambah menunjukkan kecenderungan yang bertambah. Sebab itu dalam sejarah politik

15 W.F. Wertheim, *op. cit.*, hal. 144.

kita tak terlalu mengherankan bahwa aspek-aspek tertentu dari pergerakan nasional juga berkaitan dengan mulai bangkitnya pengusaha merdeka ini.

4. *Migrasi Intern dan Extern*

Dalam pembicaraan terdahulu telah kelihatan bahwa distribusi penduduk antara daerah satu dengan daerah lain tidaklah selalu seimbang. Ada daerah yang sangat jarang penduduknya dan ada pula yang sangat rapat. Tekanan pada satu daerah yang padat sejak dari zaman dulu telah merangsang untuk berpindah tempat dan memperluas daerah jangkauan teknologi pertanian yang telah dimiliki. Sebab itu daerah penerima pendatang biasanya adalah daerah yang masih punya kemungkinan untuk diperkembang.

Tekanan ekonomis atau, barangkali lebih tepat, tekanan untuk mendapatkan produksi baru, bukanlah faktor satu-satunya yang menyebabkan orang berpindah atau menyebar ke daerah lain. Jika perpindahan perseorangan mungkin bisa disebabkan oleh berbagai motif yang kadang-kadang khusus sifatnya, maka perpindahan yang berkelompok bisa juga disebabkan oleh faktor non-ekonomis, seperti tradisi politik dan sosial. Tekanan politik yang ditimpakan penguasa dapat menyebabkan sekelompok masyarakat untuk mencari daerah baru. Hal ini umpamanya bisa dilihat pada daerah Bugis dan Makassar. Bila penguasa, yang secara teoretis adalah titisan darah dari yang suci, telah tak bisa diterima lagi maka terjadilah perpindahan. Demikian juga di Jawa, bila pemegang hak tanah, yang dipercayakan raja, tak bisa diterima lagi, rakyat meninggalkan desa mereka dan mencari daerah baru. Tradisi melalukan migrasi didapati di Sumatra Barat. Sejak dari abad ke 15 telah mulai masyarakat Minangkabau mengenal perpindahan ke daerah lain, walaupun selalu menjaga hubungan adat dengan daerah asal. Dari sudut tradisi ini dapat pula dilihat keinginan untuk mendirikan suatu daerah kekuasaan baru, yang terlepas dari yang telah ada. Begitulah umpamanya tradisi Tapanuli yang memungkinkan kepala kelompok untuk menjadi penguasa setempat, – atau dengan istilah mereka mendirikan *harajoan* – menjadi salahsatu pendorong bagi melebarnya daerah budaya Toba-Batak ke daerah Simalungun di Sumatra Timur.

Perang dan terancamnya keamanan merupakan faktor yang penting. Sejak zaman V O C umpamanya, akibat dominasi senjata Belanda, mulai kecenderungan perpindahan orang pesisir Utara ke daerah pedalaman Jawa. Tetapi perpindahan lebih banyak terjadi sejak awal abad 20 ini. Di samping terus berlakunya faktor-faktor yang sejak dulu telah ada, situasi baru ikut pula memainkan peranan. Sebagai akibat kenaikan kerapatan penduduk, pemerintah berusaha dan memberi fasilitas bagi dimungkinkannya perpindahan penduduk (migrasi). Dibukanya jalan kereta-api yang menghubungkan Kalisat dan Banyuwangi pada tahun 1901 merupakan salahsatu pendorong bagi migrasi dari Jawa Tengah ke ujung Jawa sebelah Timur yang masih kosong. Sejak awal abad ini maka daerah-daerah Kedu, Yogyakarta, Madura, Kediri dan Madiun di Jawa adalah merupakan daerah yang melepaskan migran-migran kedaerah lain. Sebaliknya Besuki adalah daerah-daerah penerima migran yang terpenting.

Antara 1920 dan 1930 penduduk Kediri naik rata-rata 32,9 perseribu jiwa. Pada tahun 1930 tersebut diperkirakan sepertiga dari penduduk dilahirkan di luar daerah. Mereka kebanyakan kelahiran Kediri, Yogyakarta, Kedu dan terutama Madura. Di daerah perkebunan kopi di Besuki banyak orang dari Madura yang mendapatkan tempat baru.

Demikian kencangnya proses migrasi orang Madura ke ujung Timur pulau Jawa, sehingga pada tahun 1930 diperkirakan hanyalah 45 persen saja dari pemeluk budaya dan bahasa Madura yang berdiam di pulau asal. Sedangkan 97,8 persen dari penduduk kabupaten Panarukan, dan 98,2 dari penduduk kabupaten Bondowoso, keduanya termasuk keresidenan Besuki, berasal dari Madura. Begitu pula di kabupaten Kraksaan, keresidenan Malang, 94,2 persen dari penduduk berasal dari Madura.

Perpindahan intern yang lain, terutama terjadi di Tapanuli dan Sumatra Barat. Baik karena dorongan untuk mendapatkan daerah baru, maupun atas ajakan pemerintah Belanda supaya dapat bekerja pada perkebunan, yang merupakan sumber export yang terpenting, perpindahan dari daerah Toba-Batak bertambah banyak ke daerah Simalungun, Sumatra Timur. Pada tahun 1915 hanyalah 9.000 jiwa yang menjadi penetap baru di Simalungun. Pada tahun 1926 jumlah ini telah naik menjadi 26.000, sedangkan pada tahun 1930 jumlahnya telah naik pula menjadi 42.000 orang. Kira-kira 60 persen dari penduduk yang meninggal-

kan Tapanuli menetap di Sumatra Timur. Perpindahan intern dari Toba-Batak juga mengalir ke daerah Dairi, sebelah utara danau Toba. Pada tahun 1930 jumlah pendatang dari Toba telah kira-kira sama dengan jumlah penetap asli.[16]

Toba-Batak yang pindah berkelompok dan kemudian menetap sebagai petani, maka orang Minangkabau lebih banyak mengadakan migrasi secara perseorangan dan bekerja sebagai pedagang atau tukang. Ikatan dengan tanah-asal tak mereka lepaskan. Sebab itu mereka menyebut merantau, yaitu bepergian tanpa melepaskan ikatan – pergi yang akan kembali. Sejak akhir abad 19 dan selama zaman kolonial daerah-rantau yalah kota-kota di Sumatra Barat sendiri. Di samping itu juga daerah rantau tradisionil, seperti Aceh Barat dan Riau daratan. Tetapi sejak awal abad ini makin banyak yang pergi ke Sumatra Timur serta daerah-daerah Sumatra lainnya yang sedang dibangun, seperti Lampung. Walaupun ide merantau tradisionil tetap berpengaruh, migrasi intern terutama terjadi di daerah-daerah padat dan kekurangan tanah persawahan. Kecamatan Maninjau, umpamanya, seperlima dari anak negeri berada di luar. Arti ini akan kelihatan lebih besar, jika diketahui pula bahwa 23,5 persen dari kepala keluarga adalah wanita. Nyatalah bahwa banyak sekali laki-laki dewasa yang meninggalkan kampung halaman merantau mencari rezeki. Kemampuan pemerintah kolonial untuk menciptakan sistim keamanan yang agak mantap merupakan pendorong untuk mengadakan migrasi intern di daerah-daerah lain. Semacam mobilitas geografis terjadi dengan kecepatan yang lebih deras. Tentu saja kecenderungan dari proses ini disebabkan pula oleh daya tarik terbukanya kesempatan-kesempatan dan kerja baru. Begitulah secara keseluruhan kira-kira 6,6 juta dari 60,7 juta penduduk kolonial, berdasarkan Sensus 1930, berada di luar daerah kelahiran semula.

Keterbukaan kesempatan ini pula terutama yang mendorong migrasi extern – perpindahan dari satu pulau ke pulau lainnya – baik secara berkelompok ataupun sendiri-sendiri. Dari Kalimantan Selatan banyak mengalir perantau-perantau ke Riau dan Jambi. Sebaliknya Kalimantan Selatan dimasuki oleh pendatang-pendatang dari Sulawesi Selatan. Tentu saja, pulau Jawa sebagai daerah yang terpadat dan sekaligus juga merupakan pusat

16 Lance Castles, *Tapanuli*, hal. 91 – 192.

kekuasaan politik dan ekonomi di zaman kolonial menjadi pusat terpenting dari mobilitas ini. Dari Jawa banyak mengalir para migran dan ke Jawa pendatang-pendatang dari pulau-pulau lain banyak mencari penghidupan baru. Aliran pendatang ke Jawa adalah salahsatu akibat dari daya-tarik Jawa sebagai pusat segala kesempatan yang bertautan dengan modernisasi yang diperkenalkan oleh pemerintah Belanda. Pendidikan menengah dan tinggi yang terutama terletak di kota-kota besar di pulau Jawa, seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya, menarik anak-anak dari golongan atasan penduduk pulau lain. Bila mereka telah menyelesaikan pelajaran banyak pula yang menetap, karena di Jawalah terutama tenaga dan keahlian mereka mendapatkan tempat yang sepadan. Migrasi kecil-kecilan dan tak terencana dari para kaum terdidik dari segala daerah merupakan salahsatu faktor terpenting dari berkembangnya nasionalisme "Indonesia Raya", dengan berjenis manifestasinya – penggalian budaya, penerbitan majalah dan buku bernada kebangsaan, pergerakan-pergerakan nasional, sekolah-sekolah swasta, dan sebagainya. Di perguruan-perguruan mereka yang datang dari segala pelosok tanah air saling bertemu dan memupuk saling pengertian dan diluar dinding sekolah mereka sama mengalami kenyataan dari masyarakat kolonial. Karena itu, meskipun secara kwantitatif jumlah pendatang jenis ini tidaklah begitu besar tetapi secara kwalitatif pengaruh mereka sangat penting dalam perkembangan sejarah tanah air.

Tentu saja kaum terpelajar tersebut bukanlah satu-satunya kelompok yang berpindah ke Jawa. Pedagang-pedagang, pegawai rendah, tukang, dan militer, juga terdapat diantara pendatang-pendatang baru ke Jawa. Walaupun prosentasenya kecil sekali dibanding dengan penduduk Jawa, namun di Jawa Barat, banyak terdapat pendatang-pendatang dari Sumatra Barat, Minahasa dan Maluku. Sedangkan di Jawa Tengah, pendatang dari luar Jawa yang terbanyak berasal dari Maluku, dan di Jawa Timur banyak pendatang yang berasal dari Minahasa dan Maluku.

Aliran migrasi antar-pulau yang terpenting yalah dari Jawa ke Sumatra. Berdasarkan Sensus 1930, dari 825.000 kelahiran Jawa yang berada di pulau-pulau lain, 767.000 orang atau 92,2 persen berada di Sumatra. Malah jumlah sukubangsa-sukubangsa dari Jawa (Jawa, Sunda, dan Madura) di seluruh Sumatra mencapai angka 1.046.000 atau 13,5 persen dari penduduk anak negeri Sumatra keseluruhan. Sukubangsa Jawa sebenarnya telah

merupakan sukubangsa ketiga di Sumatra. Jumlah mereka adalah 11,4 persen dari penduduk seluruhnya, dibawah sukubangsa Minangkabau (25,6 persen), dan Batak (15,8 persen). Sebagian besar, kira-kira 60 persen dari pendatang-pendatang Jawa berada di Sumatra Timur dan sisanya terutama di Lampung.[17]

Corak dan sifat aliran migrasi ke Lampung dan ke Sumatra Timur tidaklah sama. Sumatra Timur didatangi karena dibukanya perkebunan-perkebunan besar dan migrasi dilakukan berdasarkan ketentuan dan perjanjian perburuhan. Sebaliknya, dengan Lampung, pendatang-pendatang adalah mereka yang meninggalkan daerah mereka karena kurangnya tanah pertanian dan migrasi terjadi setelah diatur dan diberi keleluasaan yang wajar oleh pemerintah. Pada kasus Sumatra Timur, problim pokok yalah masalah perburuhan, sedangkan pada kasus Lampung, rencana dan pelaksanaan dari emigrasi – atau, menurut istilah sekarang transmigrasi – yang menjadi masalah. Padahal yang pertama terlibat dengan langsung soal keadilan dan harkat manusia, padahal yang kedua yalah usaha bagi hidup yang lebih baik. Emigrasi adalah salahsatu unsur dari formula Van Deventer untuk membayar "hutang kehormatan" disamping "edukasi" dan "irigasi". Emigrasi adalah bagian dari "politik etis", yang mulai dijalankan pada tahun 1901.

Pelaksanaan dari emigrasi dimulai, karena laporan yang diterima pemerintah tentang kemiskinan dari keresidenan Kedu. Pemerintah kemudian mengirim seorang asisten residen untuk mengadakan penelitian tentang kemungkinan pemindahan keluarga-keluarga yang melarat. Walaupun laporan telah selesai tahun 1903, barulah tahun 1905 pemerintah mengambil tindakan. Pada tahun tersebut kelompok transmigran pertama, yang terdiri dari 155 keluarga didatangkan dari Kedu ke Gedongtatan, Lampung. Sebuah desa didirikan. Pada tahun 1906 desa kedua yang didatangi oleh 555 keluarga didirikan pula. Tetapi selama dua tahun tak ada keluarga yang didatangkan. Tahun 1908 percobaan diluaskan ke Bengkulu dan juga ke Sumatra Timur. Pada fase ini kelihatan kegagalan yang menyolok. Ternyata pemerintah kurang mengadakan survey yang mendalam tentang daerah yang akan didatangi para transmigran. Para transmigran sendiri samasekali tidak diseleksi. Banyak diantara mereka sudah

17 Pelzer, *op. cit.*, hal. 188 – 189.

tak produktif lagi karena ketuaan. Disamping itu cara pelaksanaan urusan transmigrasi, yang maksudnya untuk membantu para transmigran, – seperti kredit dan sebagainya – tidaklah begitu baik. Yang lebih jelek lagi yalah kesehatan yang tak terjamin. Menjelang 1914, ketika dokter pertama kali diangkat untuk keperluan para transmigran, angka kematian diantara mereka lebih tinggi dari angka kelahiran.

Bolehlah dikatakan dasawarsa pertama dan kedua dari usaha transmigrasi berjalan dengan tersendat-sendat. Cerita yang dibawa dari transmigran ke daerahnya kembali bukanlah cerita yang mendatangkan kegairahan untuk berpindah. Apalagi sejak 1905 perkebunan-perkebunan dari Sumatra Timur mengirim calo-calo mereka untuk membujuk petani-petani miskin pergi ke tanah Deli yang digambarkan sebagai sumber uang yang berlimpah-limpah. Kabar angin dan management yang buruk menyebabkan usaha emigrasi tak berjalan dengan lancar. Namun begitu pada tahun 1930 di Lampung telah menetap 29.282 jiwa sebagai transmigran, sedangkan di Sumatra Timur dan Bengkulu, masing-masing berjumlah 4767 dan 1.924. Sedangkan luas tanah yang telah ditanami ialah 10.167 ha di Lampung, 1.906 ha di Sumatra Timur dan 481 ha di Bengkulu.[18]

Barulah pada dasawarsa ketiga usaha ini lebih digiatkan dan barulah sejak waktu ini transmigrasi yang besar-besaran diadakan. Tetapi sebelumnya suatu patokan, yang berisi "10 pantangan", antara lain "jangan memilih yang bukan petani", "jangan memilih orang tua". "jangan membawa serta orang bujangan", dan sebagainya, dan perbaikan dalam sistim administrasi serta kesehatan, diadakan. Pada tahun 1932 dipindahkan 7.000 jiwa, kemudian setelah mengalami kemunduran selama dua tahun, maka tahun 1934 jumlah tersebut bisa dilipat dua, tahun 1937 jumlah yang dipindahkan yalah 19.639, tahun berikutnya naik menjadi 32.000, dan selanjutnya kenaikan yalah sekitar sepuluh ribu jiwa tiap tahunnya. [19]

Migrasi ke Sumatra Timur terutama disebabkan oleh dibukanya perkebunan-perkebunan besar. Secara pelan-pelan hal ini telah dimulai dari akhir abad 19, ketika perkebunan memerlukan tenaga yang murah dan bisa di percaya. Buruh yang dipekerjakan

[18] J.S.Furnivall, *Netherlands Indie, A study of plural economy*. Cambridge, New York, 1944, hal. 352.

[19] Uraian yang baik mengenai transmigrasi, lihat Pelzer, *op. cit.*, hal. 185 – 231.

diikat oleh semacam kontrak, yang telah digariskan oleh Ordonansi kuli 1880 (kemudian diperbaharui pada 1889). Berdasarkan kontrak itu seorang buruh yang didatangkan haruslah bekerja menurut ketentuan perusahaan. Jika ia dianggap melanggar atau bekerja malas, maka si buruh terkena apa yang disebut *poenale sanctie*, ia dihukum tanpa proses peradilan yang biasa. Maka jadilah buruh perkebunan seluruhnya tergantung pada sikap pengusaha-pengusaha perkebunan. Hal ini dengan mudah menimbulkan ekses-ekses, dan masalah perburuhan segera menjadi problim etis dan kemanusiaan, tidak lagi soal ekonomis. Perlakuan tuan-tuan dan kakitangan perkebunan ini merangsang protes sosial di negeri Belanda. Pada tahun 1902 keluar pamflet yang terkenal, *Millioenen uit Deli* yang memaparkan dengan jelas segala macam kesewenangan yang meliwati batas. Akibatnya yalah usaha-usaha perbaikan mulai dirintis. Menjelang dasawarsa kedua abad ini beberapa perbaikan dalam peraturan perburuhan diperkenalkan. Peraturan-peraturan yang dimaksud untuk melindungi buruh ini terutama menyangkut tiga hal, yaitu: Pertama, uraian yang jelas tentang hak dan kewajiban buruh dan pengusaha; kedua, inspeksi dan pengawasan keadaan buruh; ketiga, menggantikan sistim kerja kontrak dengan kerja bebas. Jadi bekerja tidak lagi dibelenggu oleh aturan-aturan yang disokong oleh ancaman *poenale sanctie*. tetapi berdasarkan perjanjian bebas. Dan gaji minimum pun ditentukan, dan praktek warung-warung yang menjual keperluan buruh yang sering hanyalah merugikan, juga diperhatikan. [20]

Tetapi tak seluruhnya usaha ini berhasil. Kerja merdeka berarti keharusan membayar pajak bagi kesultanan di Sumatra Timur, di samping itu buruh yang terikat kerja kontrak juga cukup banyak. Apalagi perkebunan bukan tidak punya dukungan politik yang bisa memperkecil kemampuan berbuat dari pemerintah. Sementara itu tarikan Deli sebagai negeri dollar tetap berkumandang, migrasi dari Jawa, terutama dari Kedu makin lancar. Para pekerja dari Jawa tidak lagi datang sendirian tetapi juga membawa serta istri mereka. Dengan begini pula semacam kelompok sosial mereka bentuk pula. Kelompok sosial yang terikat oleh segala jenis perlakuan dari tuan perkebunan.

Begitulah jika pada akhir abad 19 sebagian besar dari

20 Lihat J. S. Furnivall, *op. cit.*, hal. 353 – 356; W.F.Wertheim, *op.cit.*, hal. 250 – 253.

pekerja perkebunan adalah orang-orang Tionghoa, maka sejak dasawarsa pertama mayoritas berasal dari Jawa. Dari jumlah buruh perkebunan sebanyak 359.633 jiwa yang tercatat pada tahun 1931, maka 306.029 berasal dari pulau Jawa. Dari jumlah ini, sebanyak 172.181 orang masih terikat dalam kerja kontrak. Sedangkan lainnya telah bekerja sebagai pekerja merdeka. Mereka umumnya terdiri dari pendatang-pendatang baru. Golongan Tionghoa merupakan kelompok pekerja kedua yang terbesar, jumlah mereka semua, baik yang terikat dalam kontrak atau tidak, yalah sebanyak 44.416. Sedangkan sisanya, 9.188 orang, terdiri sukubangsa lain.

Berjenis migrasi, intern dan extern, perseorangan atau kelompok, transmigrasi atau perburuhan, ataupun perdagangan dan pengajaran, membawa akibat-akibat sosial yang penting. Dengan terjadinya mobilitasi geografis terwujud pula hubungan yang lebih erat antara beberapa daerah di Indonesia dan sekedar penurunan dari tekanan kepadatan penduduk yang terlaksana, paling kurang sepanjang menyangkut lapangankerja. Perkenalan antar-sukubangsa, terutama yang dilakukan oleh para terpelajar, memberi kemungkinan terbukanya komunikasi yang akan menjurus pada kesadaran tentang kesatuan dari sukubangsa dari seluruh tanahair. Komunikasi yang dijalin meliwati mobilitas geografis ini adalah salahsatu benih bagi tumbuhnya nasionalisme Indonesia. Tetapi disamping itu masalah barupun muncul pula. Perpindahan yang dilakukan secara berkelompok, seperti suku bangsa Jawa ke Lampung atau orang Toba-Batak ke Simalungun, menimbulkan proses kulturil yang tak selamanya menuju pada terwujudnya integrasi. Dengan membawa pra-anggapan kulturil, dengan segala akibat sosial dan politisnya, dari daerah asal masing-masing para pendatang sebenarnya juga dirasakan sebagai tantangan oleh penduduk asli. Begitulah umpamanya tuntutan kulturil yang bersumber dari *harajoan*, yaitu daerah kekuasaan baru, dari sukubangsa Toba-Batak, yang menuntut membuka tanah bagi penguasa, menimbulkan reaksi dari orang Simalungun, yang mengharuskan siapa yang masuk haruslah ikut aturan orang yang menanti. Konflik ini hanya bisa diselesaikan dengan ketentuan pemerintah. Namun antara penyelesaian formil dengan kelanjutan konflik yang mengendap terdapat perbedaan. [21]

---

21 Lance Castles, *op. cit.*,

Secara ekonomis perpindahan mendatangkan hal yang positif. Politis dan sosial akibat yang ditimbulkan tidaklah selamanya sama. Kota, yang menjadi sumber mengalirnya semangat ke arah terwujudnya nasionalisme Indonesia, terutama dalam berhadapan dengan orang asing, juga merupakan salahsatu sumber yang menyebabkan meneguhnya ikatan kedaerahan. Hal yang belakangan ini terjadi bila terbukanya kesempatan yang mengharuskan adanya persaingan. Dalam hal ini Sumatra Timur adalah contoh dari masalah perpindahan yang menyebabkan terungkapnya secara jelas aspirasi dari yang bersumber dari solidaritas kesukuan.

Sikap serbadua dari akibat perpindahan ini tentu saja tak terlepas dari politik kolonial, yang dengan tegas mengadakan pembatasan sosial berdasarkan warna kulit atau ras, dan disamping itu mempersempit kemungkinan bagi bangsa Indonesia untuk memasuki kesempatan yang terbuka dalam sistim kolonial. Dengan kata lain suku-suku yang berjenis-jenis ini disuruh bersaingan untuk mendapatkan kesempatan yang terbatas.

B. PENYEBARAN PENGAJARAN DAN MOBILITAS SOSIAL

1. Pendahuluan

Ada satu peristiwa yang membanggakan Raffles, seorang pencinta sejarah tanah Jawa, yalah bahwa dalam penggalian ilmiahnya ia dibantu oleh bangsawan pesisir yang sangat terpelajar. Bangsawan inilah yang menolongnya menterjemahkan teks dari manuskrip Jawa kedalam bahasa Inggris. Kemudian, pada pertengahan abad 19, seorang pelukis bangsa "Hindia", telah sanggup memasuki masyarakat kelas tinggi di Eropa. Ia tak canggung-canggung untuk ikut serta dalam perdebatan-perdebatan di salon-salon para intelektuil dan bangsawan Eropa. Ia adalah Raden Saleh.

Kedua cerita bagus, tetapi keduanya hanyalah keistimewaan yang sangat langka terjadinya. Walaupun sekolah "dokter Jawa", yang maksudnya semula tak lebih dari untuk mendidik mantri cacar bagi anak negeri, telah didirikan pada tahun 1851 dan satu dua kweekschool, yang bermaksud melatih guru bantu – kadang-kadang juga untuk tenaga lain yang diperlukan – menje-

lang akhir abad ke 19 sekolah yang biasa disebut "modern" sangat terbatas sekali. Keluarga-keluarga terkemuka demi kemajuan karier anak mereka sering harus menyewa guru privat. Demikian keadaannya dengan keluarga Djajadiningrat yang terkenal, demikian pula keadaannya dengan banyak keluarga lainnya. Sementara itu di beberapa kalangan orang Belanda makin terasa betapa perlunya memperkembang pendidikan gaya Barat, bukan saja untuk keperluan perluasan birokrasi dan jaringan administrasi pemerintah kolonial, tetapi juga seperti dikatakan oleh van der Prijs – untuk membentengi Belanda dari "volkano Islam".

Sekolah yang mula-mula diperkenalkan yalah Sekolah Kelas Dua, yang akan mendidik calon-calon pegawai rendah dan Sekolah Kelas Satu, yang diperuntukkan bagi anak-anak dari golongan masyarakat atasan. Di samping itu ada pula sekolah rendah yang terutama disediakan bagi anak-anak Eropa. Sejak awal abad 20 diperkenalkanlah sistim sekolah desa atau *volksschool*, yang pendiriannya tergantung atas kemampuan masyarakat setempat dan subsidi serta bimbingan pemerintah. Setelah menyelesaikan sekolah yang bisa diselesaikan dalam waktu tiga tahun ini – yang diajarkan hanyalah sekedar kepandaian membaca, menulis dan berhitung – murid-murid yang terpilih dapat melanjutkan pendidikannya ke sekolah sambungan atau *vervolgschool* untuk masa dua tahun. Secara berangsur sistim ini menggantikan kedudukan Sekolah Kelas Dua, sebagai lembaga pendidikan yang terpenting bagi anak negeri.

Untuk keperluan anak-anak dari kelas atasan didirikan pula HIS (Hollandsch Inlandsche School). Dalam sekolah ini secara berangsur mulai dipakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar. Setelah menyelesaikan pelajaran selama tujuh tahun, murid yang pintar dan yang mempunyai orang tua yang cukup mampu dapat melanjutkan sekolahnya ke MULO (Meer Uitgebreid Lager Onderwijs), sekolah lanjutan pertama, dan dari sini kemudian bisa terus ke AMS (Algemeene Middelbare School). Jika nasib demikian baiknya maka bersyukurlah jika bisa melanjutkan pelajaran ke sekolah tinggi. Mula-mula tentu harus ke Eropa, tetapi sejak awal tahun 1920-an beberapa kemungkinan telah terbuka pula di tanah "Hindia" ini. Selain untaian MULO dan AMS, ada sekolah HBS (Hoogere Burgerschool), yang masa belajarnya lima tahun, atau sekolah-sekolah vak, seperti STOVIA

(sekolah "dokter Hindia") yang kemudian perlahan-perlahan menjadi perguruan tinggi, sekolah teknik, dan untaian Kweekschool dan *HIK* (Hogere Kweekschool). Keduanya yang belakangan diperlukan bagi yang ingin menjadi guru HIS atau guru kepala. Murid sekolah bumiputra, dari sekolah desa dan sambungan tersebut, juga dimungkinkan untuk melanjutkan pelajarannya. Beberapa murid-murid terpilih dari sekolah sambungan diberi kesempatan untuk mengikuti ujian seleksi masuk sekolah normal, sekolah guru untuk sekolah desa, atau sekolah tukang. Kemudian, pada tahun 1924, murid-murid ini diberi kemungkinan untuk menyeberang ke lingkungan sekolah "Belanda". Untuk keperluan ini didirikanlah sekolah *schakel*, dimana murid mulai belajar bahasa Belanda dan, tentu saja, mulai harus menyesuaikan diri dengan suasana yang lain, yang serba tertib sebagaimana layaknya seorang murid sekolah "gubernemen"

Jika saja kemungkinan institusionil ini betul-betul terbuka secara nyata dan riil, masalah pendidikan tidaklah akan begitu kalut. Tetapi inilah problimnya, sekolah yang didirikan pemerintah atau yang disponsori tersebut makin lama makin menarik perhatian. Sekolah tersebut dianggap sebagai alat untuk dapat-memasuki lingkungan hidup baru – hidup kepriyayian – bagi golongan bawah, dan penambah dasar legitimasi bagi golongan atasan. Begitulah seorang tuanku laras, kepala dari federasi nagari, dari Sumatra Barat, menulis bahwa baginya kelahiran bukanlah dasar yang terpenting untuk memangku jabatan tetapi yang terutama yalah pengetahuan. Demikian juga halnya pada waktu yang bersamaan pada akhir abad ke 19 – Sultan Hamengkubuwono VIII, mengharuskan adanya ijazah bagi seorang anak yang akan menggantikan kedudukan ayahnya sebagai pejabat pemerintah. Berita koran dari awal abad ini hampir tiap tahun melaporkan tentang kegagalan dari raturan anak-anak untuk memasuki sekolah yang tersedia. Tiap tahun jumlah yang gagal memasuki sekolah meningkat, walaupun jumlah dan jenis sekolah juga bertambah.

Tidaklah mengherankan betapa kecilnya jumlah anak-anak yang bisa memasuki sekolah. Juga tidaklah aneh betapa kerdilnya perbandingan antara anak yang bisa memasuki sekolah dengan kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun 1930 berdasarkan sensus yang diadakan ternyata bahwa prosentase yang bisa membaca dari rakyat Indonesia hanyalah 6,44 persen saja dan pada waktu

itu jumlah murid bumiputera di sekolah MULO – ketika jumlah penduduk telah mencapai angka lima puluh juta – hanyalah 7.768 orang saja, di akhir penjajahan Belanda; ketika jumlah penduduk telah mencapai angka kira-kira 70 juta, tercatat hanyalah dua juta lebih sedikit yang masih berada di bangku sekolah dari seluruh jenis dan tingkat perguruan yang dimiliki dan diberi subsidi oleh pemerintah.

Begitulah keadaannya secara kwantitatif. Namun sekolah-sekolah yang bercorak Barat, baik sekolah "bumiputera" maupun sekolah "Belanda", seperti lembaga pendidikan lainnya memberi pengaruh yang melebihi sasaran yang dimaksud. Diterimanya dan dijadikannya sekolah sebagai salahsatu syarat bagi mobilitas sosial adalah kelanjutan dari tradisi yang mengagumkan keunggulan ilmu, esoteris ataupun bukan. Dengan diperkenalkannya sekolah bercorak Barat, yang memberi kemungkinan bagi keunggulan dalam berbagai macam ilmu, maka proses pelebaran dari diferensiasi kerjapun dilanjutkan dengan lebih cepat. Sekolah-sekolah "Belanda", terutama dari tingkat menengah keatas, memperkenalkan pada murid-murid, macam-macam ilmu, maka proses pelebaran dari di ferensiasi kerjapun di lanjutkan dengan lebih cepat. Sekolah-sekolah "Belanda", terutama dari tingkat menengah keatas, memperkenalkan pada murid-murid, yang berasal dari berbagai latarbelakang budaya tradisionil dan beberapa golongan masyarakat, suatu pola berpikir yang sama. Melalui sistim dan corak pelajaran yang diberikan, mereka menjadi lebih dapat mengenal lingkungan masing-masing. Sekolah juga berfungsi sebagai jembatan komunikasi antara mereka. Tetapi sekolah-sekolah Barat juga menjadikan para terpelajar sebagai bagian, atau lebih tepat, "provinsi" saja, dari dunia intelektuil yang kosmopolit.

Proses tersebut diatas tidaklah mengherankan. Situasi kolonial, di samping itu juga bisa menciptakan faktor yang mengingkari kenyataan riil yang ditimbulkannya. Sekolah dimaksud untuk mengajarkan berbagai keahlian dan orientasi yang sangat bersifat kepegawaian, dalam arti bahwa ijazah dikaitkan dengan tingkat dalam hierarki birokrasi. Tetapi logika itu ditantang pula oleh kategori ras yang dipakaikan. Kerja dan kedudukan tidak semata-mata tergantung pada kemampuan tetapi sangat terkait erat dengan ras – orang kulit putih haruslah diutamakan – dan keturunan – anak orang berpangkat tentu harus didahulukan.

Hal ini menyebabkan bermunculannya tenaga terdidik dan terpelajar yang samasekali berada di luar sistim kolonial, walaupun mereka dilatih untuk menjadi tenaga inti dalam sistim itu. Hingga kemudian sistim itu sendiri menjadi sesuatu yang harus ditolak. Begitulah kaum terpelajar bukan saja berhenti mendambakan ikut serta dalam sistim kolonial dan mendapat hierarki yang sepadan dalamnya tetapi juga menolak untuk samasekali memperhitungkan kemungkinan dirinya berada dalam sistim tersebut. Sebagian dari mereka itu ikut dan memimpin pergerakan kemerdekaan, bukan karena kerja, tetapi karena panggilan.

Keinginan untuk mencari pilihan lain dalam dunia pengajaran dan pendidikan serta kebutuhan yang nyata terhadap sekolah yang "modern" dan sekuler memberi dorongan munculnya sekolah swasta. Di samping itu sekolah agama mulai pula memperbaharui sistim dan methode pengajaran mereka. Hal ini terutama dilakukan oleh golongan reformis Islam. Sekolah swasta jenis ini berkembang dengan pesat di beberapa daerah. Hampir tanpa kecuali sekolah swasta yang tidak bersubsidi, terakhir, baik Islam maupun "sekuler" bersikap nasionalis yang anti kolonial.

Munculnya beberapa alternatif dalam dunia pendidikan sebenarnya membayangkan pula aspek lain dari akibat yang ditimbulkan oleh pengajaran modern, yang mulai berkembangnya percaturan ideologis. Walaupun telah memiliki pola berpikir yang sama, kenyataan bahwa murid-murid berasal dari berbagai daerah dan lingkungan budaya dan dari berjenis tingkat sosial dan ekonomis, ikut mempengaruhi cara mereka dalam berdialog dengan lingkungan. Hal ini memberi warna dalam perumusan dasar anggapan serta cita-cita. Perbedaan ini lebih intensif lagi karena sebagian kaum terpelajar tidaklah merasa diri mereka sebagai bagian dari dunia intelektuil yang kosmopolit a la Barat, tetapi dengan dunia yang dibimbing oleh rasa kebangkitan Islam. Begitulah sekolah, sebagai lembaga pendidikan, bukan saja menjembatani berbagai sikap keasingan tetapi juga melemparkan beberapa alternatif dalam kehidupan, baik dari sudut profesi jabatan, maupun sudut ideologis dan kulturil.

2. *Pertumbuhan Sekolah Pemerintah Dan Sekolah Yang Bersubsidi*

Waktu negeri yang dulu bernama Hindia Belanda ini

memasuki gerbang abad 20 jumlah sekolah sangat terbatas. Sekolah rendah pemerintah seluruhnya hanya berjumlah 601, sedangkan jumlah penduduk diperkirakan sebanyak 37 juta. Tetapi di samping sekolah pemerintah ini ada pula sekolah swasta, yang umumnya diperuntukkan bagi penduduk non-pribumi, sebanyak 359 buah. Di beberapa daerah sekolah yang didirikan missie dan zending cukup banyak, yaitu berjumlah 451 buah. Jadi keseluruhan jumlah sekolah hanyalah 1.501. Dari peta penyebaran sekolah terlihat pula bahwa perkembangan daerah-daerah di Indonesia samasekali tidak seimbang. Peranan sekolah missie dan zending membuat ketidak seimbangan ini lebih menyolok lagi. Di seluruh daerah Minahasa yang berpenduduk-kira-kira 450 ribu, sekolah pemerintah saja berjumlah 115 buah, sekolah partikulir 14 dan sekolah dari gereja 237 buah. Sedangkan seluruh Sulawesi lainnya jumlah sekolah belumlah melebihi 20 buah (pada tahun 1895 jumlah yang tercatat 14 buah). Di seluruh Sumatra, kecuali daerah Tapanuli Utara, jumlah sekolah pemerintah, swasta dan missie hanyalah 98 buah. Sedangkan di Tapanuli Utara saja, daerah Batak-Kristen, jumlah ketiga jenis sekolah tersebut sebanyak 200 buah.[22] Memang benar bahwa jumlah sekolah tidak bisa diambil sebagai gambaran yang membayangkan suasana sesungguhnya – sekolah tersebut bisa saja muridnya tak lebih dari sepuluh orang – tetapi jumlah ini dapat memberi sekedar penunjuk tentang tingkat keterlibatan badan pemerintah dan partikulir lainnya dalam pengajaran gaya Barat.

Sekolah yang lebih baik, yang seluruhnya memakaikan sistim dan tingkat pelajaran yang tak kalah dari Negeri Belanda lebih kecil jumlahnya. Dari jumlah yang kecil ini hanyalah secuil saja tempat yang tersedia bagi anak-anak pribumi. Begitulah pada tahun 1900 tercatat sebanyak 169 ELS diseluruh Indonesia, dengan jumlah murid anak pribumi sebanyak 1.545. Sedangkan jumlah murid Eropa berjumlah 13.592. Dari sekolah ini murid-murid bisa melanjutkan pelajaran ke sekolah "dokter Jawa", di Betawi yang telah mengalami beberapa kali pembaharuan sejak didirikannya pada tahun 1851. Atau secara teori bisa saja terus ke HBS (Hoogere Burgerschool). Secara teoretis, sebab praktis hampir tak mungkin. Hanya kurang dari satu persen tamatan ELS

22 Bernard Dahm, *History of Indonesia in the Twentieth Century*, London, New York: Praeger, 1971, hal. 16.

yang bisa menikmati pendidikan lima tahun HBS tersebut. Jika begitu, lebih baik masuk sekolah pegawai, atau OSVIA *(Opleidingschool voor inlandsche ambtenaren)* yang jumlahnya ada kira-kira enam buah. Setelah belajar tujuh tahun dan bila selesai, mudah-mudahan kemudian bisa menduduki tempat yang tertinggi dalam kepegawaian – menjadi bupati. Sekolah yang lebih umum yalah Kweekschool, yang jumlahnya ada sebanyak lima buah, antaranya dua di luar Jawa, Menado dan Bukittinggi. Setelah mengalami beberapa kali perobahan kurikulum – pakai bahasa Belanda, kemudian tidak, kemudian pakai lagi, dan sebagainya, sekolah ini diharapkan menghasilkan guru-guru untuk sekolah pemerintah, (pada waktu itu tentu Sekolah Kelas Dua dan Sekolah Kelas Satu).

STOVIA di Jakarta dan Kweekschool, biasa disebut Sekolah Raja, di Bukittinggi mempunyai tempat yang unik juga dalam sejarah kebangsaan. Di STOVIA mulai bersemi semangat nasionalisme, mula-mula bersifat ke Jawa-an, kemudian juga bersemi yang berbau ke-Hindia-an. Sebagai satu-satunya sekolah dokter untuk pribumi maka STOVIA adalah sekolah yang pertama yang mengumpulkan murid-murid dari seluruh penjuru tanah air. Sekolah Raja di Bukittinggi tidak hanya mendidik calon guru, tetapi, sampai awal dasawarsa kedua abad ini, juga mendidik calon pegawai dan sebagainya. Bangsawan Aceh yang telah dikalahkan Belanda, dikirim kesana. Begitu juga anak dari golongan atas lainnya dari seluruh Sumatra. Peranan yang terpenting yalah dalam memperkembang bahasa Malayu. Van Ophuysen yang terkenal sebagai perumus ejaan Melayu pernah mengajar di sekolah ini.

Jika dilihat angka-angka diatas, nyatalah betapa sangat sempitnya lapangan pendidikan yang diperkenalkan pemerintah. Tetapi masalahnya tidak seluruhnya tergantung pada pemerintah. Kecurigaan bahwa sekolah pemerintah tersebut akan menasranikan anak negeri sudah cukup memberi alasan untuk menjauhinya. Pada akhir abad 19 pemerintah terpaksa menutup dua sekolah gadis di Sumatra Barat, karena ketiadaan murid. Membiarkan anak-anak gadis keluar rumah untuk sekolah bukanlah hal yang patut dipuji menurut tradisi dan agama.

Tetapi sejalan dengan makin meluasnya pengaruh pemerintah dalam kehidupan ekonomi dan administratif, mulailah keinginan untuk bersekolah bertambah di kalangan rakyat.

Suasana ini juga dibantu oleh mulai bertiupnya udara politik etis yang ingin membayar "hutang kehormatan" antara lain dengan memajukan edukasi. Hal ini diperlancar karena dimulainya sistim sekolah desa atau *volksschool*, yang didirikan oleh masyarakat setempat dan dengan subsidi dan bimbingan dari pemerintah. Sekolah tiga tahun ini sekaligus mempunyai sasaran untuk menghilangkan keasingan terhadap sekolah – anak negeri tak usah takut dinasranikan – dan juga mengurangi beban biaya pemerintah. Diperkenalkan oleh Gubernur Jenderal van Heutz, si Jenderal yang dianggap berjasa "mengamankan" Aceh, pada tahun 1908 sekolah ini cepat berkembang dan meluas. Pada tahun 1913 menurut gubernur Ballot dari Sumatra Barat, jumlah sekolah desa tercatat 111 buah, pada tahun 1915 jumlah telah naik menjadi 350 buah. Kenaikan yang pesat dari sekolah desa ini boleh dikatakan umum di seluruh daerah yang telah mengalami penetrasi yang lanjut dari pemerintah kolonial. Dalam sepuluh tahun saja, antara 1910 sampai dengan 1920 diseluruh "Hindia Belanda" jumlah murid yang memasuki sekolah desa naik dari 71.239 menjadi 423.314. Sampai dengan tahun 1930 kenaikan jumlah sekolah dan murid tetap fenomenal. Pada tahun ini jumlah murid telah naik sampai 1.229.666. Barulah sesudah 1930 kenaikan yang agak pelan terjadi – pelan dalam pengertian deret ukur, bukannya deret tambah. Begitulah tahun 1935 tercatat hanya 1.595.140 murid dan tahun 1940 jumlahnya hanya naik menjadi 2.186,374 orang.

Jika ditambah dengan murid-murid yang melanjutkan ke sekolah sambungan atau *vervolgschool* maka pada tahun 1930 jumlah murid keseluruhan ialah 1.482.402 (jadi murid-murid sekolah sambungan hanyalah 253.736 saja). Pada tahun 1940 jumlah murid sekolah sambungan naik menjadi 282.358 orang. Memang bukan kemajuan yang menyolok. Hal ini membayangkan betapa sedikitnya kemungkinan bagi anak-anak sekolah desa untuk melanjutkan pelajaran.

Kecenderungan seperti ini juga kelihatan pada sekolah-sekolah "Belanda" yang memakai bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, baik milik pemerintah maupun swasta bersubsidi. Pertumbuhan yang menyolok didapati pula pada dasawarsa ketiga, sedangkan pada dasawarsa keempat terlihat pula proses pengendoran perkembangan. Antara 1900 dan tahun 1910 murid-murid pribumi dari HIS dan ELS naik menjadi 5.108

kenaikan dua kali lipat. Pada tahun 1924 pemerintah memperkenalkan sekolah-sekolah *schakel*, yang menghubungkan sekolah "bumiputra" dengan sekolah "Belanda". Hal ini menolong sekedarnya bagi kenaikan dari jumlah sekolah-sekolah "Belanda". Antara 1910 dan 1930 kenaikan sampai delapan kali lipat atau dengan angka absolut menjadi 43.411. Tetapi pada dasawarsa keempat kenaikan hanyalah dua kali lipat saja. Pada tahun 1940 jumlah murid ketiga jenis sekolah tersebut tercatat 88.223 orang.

Laju kenaikan ini akan lebih kentara jika dilihat pula jumlah yang sanggup mendapatkan ijazah. Hal ini penting karena angka murid yang tak sanggup menyelesaikan sekolah cukup luarbiasa juga tingginya selama zaman kolonial. Sejak tahun puncak kemajuan pendidikan gaya Barat sampai akhir kolonial prosentase murid yang sanggup mendapatkan ijazah hanyalah kira-kira seperempat saja atau 25 persen. Dalam waktu tiga tahun (1900–1904) jumlah murid pribumi yang bisa menyelesaikan pelajaran dari sekolah Belanda, baik kepunyaan pemerintah atau swasta bersubsidi, yalah 143 orang, pada dasawarsa berikutnya (1910–1914) angka ini telah naik lima kali, yaitu 652. Tetapi dalam satu tahun saja, 1930, jumlah murid yang bisa menyelesaikan pelajaran dengan berijazah, yalah sebanyak 4.674. Jika pertambahan murid pada dasawarsa keempat, seperti dikatakan di atas tidaklah begitu deras, sebaliknya dengan kenaikan jumlah tamatan. Pada tahun 1940, ketika murid berjumlah 88.223, maka yang bisa menyelesaikan pelajaran yalah sebanyak 7.790 – suatu perbandingan yang lebih baik dari tahun 1930. Hal ini bukan saja karena lebih diperketatnya murid yang bisa masuk sekolah-sekolah tersebut, tetapi juga tampaknya disebabkan kemampuan ekonomis yang relatif lebih baik dari para orangtua yang memasukkan anaknya ke sekolah mahal tersebut. Dan, faktor perbaikan dalam disiplin serta sistim sekolah bukan tidak pula memainkan peranan.

Seperti sekolah rendah, perkembangan yang terpenting dari jaringan dan jumlah sekolah menengah juga terjadi antara tahun 1910 dan 1930. Setelah tahun 1930 terjadi pasang turun dan naik yang saling bergantian pada setiap tahunnya. Gejala lain yalah bahwa walaupun sekolah kejuruan, seperti Kweekschool dan "dokter Jawa", merupakan sekolah yang tertua, selama periode ini mulai pulalah kecenderungan yang akan terus

berlanjut sampai masa sesudah masa penjajahan, maka lebih populernya sekolah umum. Sekolah-sekolah kejuruan tetap memainkan peranan penting hanya dalam kelompok sekolah "Bumiputera". Pada tahun 1930 jumlah murid dari sekolah kejuruan dari kelompok "Bumiputera", yang terdiri dari sekolah-sekolah guru (normal), menteri kesehatan, pertukangan, perkebunan dan magang, yalah sebanyak 15.716. Pada kelompok "Belanda", jumlahnya hanyalah 5.233 orang. Dalam jumlah ini telah terhitung murid-murid MOSVIA, PHS (sekolah dagang), Ambacht, Kweekschool, HIK, dan sebagainya. Sedangkan jumlah murid pribumi sekolah MULO saja pada waktu yang bersamaan telah mencapai angka 6.906 orang. [23]

Jika diikuti pertumbuhan sekolah-sekolah menengah umum, seperti MULO, AMS, dan HBS, maka kelihatanlah bahwa antara tahun 1910 dan 1930 terjadi kenaikan yang luar biasa. Pada tahun 1910 jumlah murid pribumi dari ketiga jenis sekolah *elite* tersebut hanyalah 500 orang. Pada tahun 1930 jumlahnya telah menjadi 7.776 (tanpa MULO, jumlahnya yalah 870 orang saja). HBS bagaimanapun juga tetap tabu dan sangat berat, sedangkan AMS lebih terbuka.

Tabel 3
Pertumbuhan jumlah tahunan sekolah (pemerintah dan subsidi), guru, murid dan lulusan (golongan Indonesia asli).

Tahun	Sekolah segala jenis dan tingkat	Guru (segala jenis sekolah dan tingkat)	Murid (segala jenis sekolah dan tingkat)	Lulusan dan ijazah (segala jenis sekolah dan tingkat).
1933/34	20.591	41.118	1.902.935	378.113
1934/35	20.707	40.585	1.870.750	395.726
1935/36	20.844	41.407	1.903.091	412.360
1936/37	20.897	41.909	2.010.825	434.658
1937/38	20.983	43.222	2.095.278	453.081
1938/39	21.440	44.925	2.223.596	483.917
1939/40	22.136	46.510	2.310.533	510.095

Sumber : van der Wal, *Some Information on Education in Indonesia up to 1942*, Table I – IV.

Dalam Tabel 3 bisa dilihat perkembangan per tahun dari setiap jenis sekolah, dan tingkat sekolah. Hal-hal yang menarik

23 J. S. Furnivall, *op. cit.*, hal 377.

perhatian untuk dicatat yalah bahwa perbandingan jumlah guru dan sekolah hanyalah 2 : 1 barulah pada tahun ajaran 1939/1940 perbandingannya agak lebih menguntungkan guru. Tetapi sebaliknya perbandingan guru dan murud yalah kira-kira 1 : 50. Bisa pula dimengerti sekedarnya bahwa mengapa perbandingan antara jumlah murid dengan yang menerima ijazah berbanding 4 : 1. Disamping tingginya *"drop-out"* atau pelajar yang meninggalkan sekolah sebelum selesai, kesempatan guru untuk memperhatikan anak didiknya ternyata terbatas sekali. Tentu saja hal ini mengena pada sekolah desa dan sambungan.

Setelah tahun 1930, seperti telah dikatakan diatas, perkembangan sekolah pemerintah dan swasta bersubsidi, sangat pelan sekali. Hal ini disebabkan karena dimulainya politik penghematan, sebagai akibat malaise yang menimpa perekonomian dunia. Apalagi Gubernur Jenderal yang mulai memerintah tahun 1931 adalah seorang konservatif, yang datang ke tanah "Hindia Belanda" untuk membuktikan tekad mentor politiknya, Colijn, yang mengatakan bahwa pemerintah Belanda sangat kuat, "sekuat Mont Blanc di pegunungan Alpen". Ia datang untuk menjalankan "politik apa yang mungkin", bukan kebijaksanaan yang bersumber pada "apa yang di inginkan". Di samping itu kemacetan juga disebabkan oleh politik yang lebih memperhitungkan tenaga terdidik yang dihasilkan sekolah sudah tak sanggup lagi ditampung oleh lowongan kerja yang tersedia. Hal ini antara lain mendorong komisi penyelidik HIS, yang dipimpin oleh Prof. Schrieke untuk menasehatkan pemerintah pada tahun 1930 supaya tidak lagi menambah jumlah HIS. Masalah sekolah tidak saja menyangkut soal tersedianya tenaga yang diperlukan, tetapi juga permintaan yang muncul.

3. *Perguruan Tinggi : Dalam Dan Luar Negeri*

Sekolah tinggi bagi orang inlander ? Mana mungkin. Mereka tidak mempunyai kemampuan alamiah untuk bisa memasuki dunia ilmu dan ketrampilan yang demikian peliknya. Begitulah kira-kira ocehan beberapa orang Belanda konservatif ketika timbul gagasan dari beberapa golongan swasta untuk mendirikan sekolah tinggi. Maksud yang utama memang bukan untuk inlander, tetapi situasi politik etis dan suara yang nyaring tentang

desentralisasi dan otonomi, baik dari dalam pengertian antara Hindia Belanda dan metropolitan ataupun antara anak negeri dan pengusaha, tentu bukan merupakan kampanye yang baik jika pribumi dikesampingkan begitu saja. Demikianlah beberapa perguruan tinggi secara bertahap mulai didirikan.

Tahun 1924 sekolah teknik yang berada di Bandung, yang didirikan pada tahun 1920, dijadikan Technische Hogeschool. Pada tahun yang sama murid-murid yang pintar tamatan *Rechtschool* atau sekolah hakim di Betawi boleh menguji peruntungan untuk memasuki sekolah hakim tinggi atau Rechtskundige Hogeschool.

Pada tahun 1913 STOVIA di Jakarta mendapatkan teman dengan didirikannya NIAS (Nederlandsch Indische Artsen School). Pada tahun 1927 STOVIA secara berangsur mulai ditransformasikan menjadi sekolah tinggi kedokteran atau Geneeskundige Hogeschool. Sembilan tahun kemudian STOVIA dihapuskan dan tinggallah NIAS yang tetap menjalankan tugas sebagai sekolah kedokteran setengah akademis.

Satu-satunya peristiwa yang perlu dicatat dalam sejarah perguruan tinggi selama tahun 1930-an yalah dibukanya akademi pemerintahan atau *Bestuursakademie,* yang menerima murid tamatan AMS dan berprogram selama tiga tahun. Jika seorang murid belum akan terjun ke dalam lapangan pemerintahan, maka ia bisa melanjutkan ke sekolah hakim. Setelah kuliah satu tahun dipersilahkan pula untuk mengambil ujian untuk mendapat gelar *meester in de rechten.* Peristiwa yang hampir terlupakan karena terjadi di saat-saat terakhir sebelum penyerbuan tentara Jepang, yalah dibukanya fakultas sastra dan pertanian. Pada tanggal 1 Oktober 1940 *Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte* dan sebelas bulan kemudian didirikan pula di Bogor, *Landbouwkundige Faculteit.*

Demikianlah jika pendirian sekolah tinggi ini tampaknya sangat tersendat-sendat, tak pula obahnya dengan ikut sertanya anak-anak Indonesia asli didalamnya. Sejak dimulai proyek perguruan tinggi sampai dengan tahun ajaran 1929/1930, kecuali pada tahun 1926/1927, jumlah mahasiswa Eropa tetap lebih banyak dari jumlah mahasiswa pribumi. Mula-mula dibuka (1920/21) jumlah keseluruhan mahasiswa Indonesia tak lebih dari dua orang. Dari golongan Cina ada sebanyak empat orang, sedang dari golongan Eropa sebanyak 22 orang. Tahun berikut-

nya angka mahasiswa pribumi naik menjadi empat, tetapi jumlah mahasiswa Eropa yalah sebanyak 29 orang. Pertama kali jumlah keseluruhan mahasiswa pribumi lebih banyak yalah tahun 1926/27, yaitu 30 orang, sedangkan Eropa hanyalah 28 orang. Tetapi tahun berikutnya, ketika jumlah mahasiswa Eropa telah naik sampai dengan 52 orang, jumlah mahasiswa pribumi mencapai jumlah 44 orang saja. Barulah kemudian, jumlah mahasiswa pribumi melebihi jumlah mahasiswa dari golongan-golongan lain. Sampai dengan tahun ajaran 1939/40 jumlah mahasiswa sebagai keseluruhan, sejak mulai dibukanya perguruan tinggi, yalah sebanyak 3.242 orang, di antaranya 1.489 orang dari golongan pribumi, 1.012 dari golongan Eropa dan 741 orang dari golongan Cina, atau kira-kira 45 persen dari golongan pribumi, 32 persen dari golongan Eropa, dan 23 persen dari golongan Cina.

Perbandingan ini akan lebih menyolok lagi jika diperhatikan pula angka tamatan perguruan tinggi. Pertama sekali orang Indonesia yang menamatkan pelajaran di sekolah tinggi yalah pada tahun 1925. Jumlah hanya sebanyak empat orang, sedang mahasiswa Eropa sebanyak sembilan orang, dan mahasiswa Cina tiga orang. Pada tahun ajaran 1933/34 untuk pertama kali jumlah mahasiswa pribumi yang menamatkan pelajaran lebih dari sepuluh orang dan sekaligus juga melebihi jumlah dari golongan-golongan lain. Jumlah yang menyelesaikan pelajaran pada waktu itu yalah sebanyak 34 orang, antaranya 14 pribumi, 12 Cina, dan 8 Eropa. Sampai dengan tahun ajaran 1939/40 perguruan tinggi dalam negeri telah menghasilkan sebanyak 532 orang. Pribumi yang dengan bangga boleh pakai gelar akademis sampai dengan tahun tersebut berjumlah 230 orang, sedangkan orang Eropa sebanyak 195 dan Tionghoa 105. Atau dalam prosentase masing2 42 persen, 37 persen dan 20 persen – satu perbandingan yang tak jauh berbeda dengan angka yang memasuki perguruan tinggi.

Betapa kecilnya angka ini akan bisa terlihat dengan mengingat bahwa pada waktu itu jumlah penduduk Indonesia telah mencapai kira-kira 70 juta jiwa. Dan jumlah yang bisa menduduki sekolah-sekolah rendah "Bumiputera" telah mendekati angka dua juta.

Di samping kesempatan untuk belajar di dalam negeri, sebenarnya sejak awal abad ini telah pula mulai pintu terbuka bagi anak-anak Indonesia untuk belajar di luar negeri, terutama sekali negeri Belanda. Pada tahun 1900 ada lima orang mahasiswa

yang belajar di Negeri Belanda. Secara pelan-pelan jumlah ini makin lama makin naik. Bangsawan terkemuka dan kaya mulai mengirimkan anak-anak yang betul-betul dirasakan penuh harapan. Karena yang bisa dibiayai oleh pemerintah ini sangat sedikit jumlahnya maka hanyalah yang betul-betul mampu yang sanggup mengirim anak mereka ke Eropa. Sebab itu banyak di antara mahasiswa, yang dianggap sebagai "warga negara" Hindia Belanda berasal dari golongan Cina yang mempunyai kehidupan ekonomis lebih baik. Sejak tahun 1910-an mulai berkembang di beberapa tempat sistim *studiefonds* atau dana-dana siswa, yang anggotanya biasanya terdiri orang-orang sekerja dan sekampung. Studiefonds ini juga berusaha mengirimkan anak-anak yang berbakat ke Eropa. Tan Malaka yang akan memainkan peranan penting dalam sejarah pergerakan dan Revolusi pergi ke negeri Belanda dengan biaya studiefonds dari kecamatannya. Tahun 1911 sebuah desa, Kota Gedang, di Sumatra Barat, mengirimkan dua orang calon guru ke negeri Belanda. Usaha ini kemudian akan tambah sering lagi, terutama dari daerah-daerah yang mengenal perkauman yang besar. Cara lain untuk bisa belajar ke Eropa yalah dengan biaya sendiri. Hal ini tentu saja agak sukar, tetapi adanya STOVIA telah memberi kemungkinan bagi dokter yang tanggung itu untuk mencari uang kemudian melanjutkan studi kedokteran mereka ke Eropa. Inilah umpamanya yang dilakukan oleh Dr. Abdul Rivai, yang pernah menjadi anggota Volksraad dan terkenal sebagai pengeritik sistim kolonial yang cukup extrim. Cara ini pulalah yang dilakukan oleh dokter Sutomo, tokoh nasionalis kooperator yang sangat berwibawa. Bukan tak pula ada yang belajar sambil bekerja, seperti menjadi koresponden suratkabar dan sebagainya.

Waktu dokter Rivai melanjutkan studi di Negeri Belanda dan juga menjadi redaktur dari majalah yang terkenal *Bintang Hindia* di awal 1910-an jumlah mahasiswa Indonesia barulah antara 15 dan 20 orang. Merekalah yang mula-mula mendirikan perkumpulan mahasiswa, yang kemudian akan jadi sangat terkenal dan berpengaruh. Tetapi hal ini baru terjadi pada pertengahan tahun 1920-an, ketika pendatang dari tanah Indonesia mulai bertambah banyak. Banyak di antara mereka yang datang telah berpengalaman sekedarnya dalam organisasi kepemudaan. Kedatangan orang-orang baru ini merobah corak organisasi mahasiswa dari perkumpulan kekeluargaan saja menjadi motor yang terpenting dalam pergerakan kebangsaan.

Sejak tahun ajaran 1924/25 ketika jumlah mereka mulai dicatat dengan baik, sampai dengan 1939/40 rata-rata jumlah mahasiswa pribumi yang memasuki perguruan-perguruan tinggi di Negeri Belanda yalah sebanyak 21 – 22 orang setiap tahunnya. Sedangkan dari golongan Cina yalah antara 22 – 23 orang. Tahun 1925/26 tercatat sebagai tahun yang terendah dalam jumlah kedatangan mahasiswa – hanya 11 orang – sedangkan tahun 1931/32 merupakan tahun yang tertinggi – 33 orang. Selama periode limabelas tahun ini jumlah keseluruhan mahasiswa Indonesia yang mendapat kesempatan untuk belajar di Negeri Belanda yalah sebanyak 344 orang, sedangkan dari golongan Cina sebanyak 360 orang. Angka-angka ini memang bukanlah perbandingan yang seimbang jika diingat bahwa golongan Cina hanyalah merupakan minoritas yang kurang dari 2 persen dari seluruh penduduk di Indonesia.

Sebagian besar dari mahasiswa Indonesia yang berada di Negeri Belanda belajar di Universitas Leiden, yang bukan saja merupakan salahsatu pusat ilmu yang tertua di Eropa, tetapi juga pusat intelektuil dan politik kolonial yang etis. Jumlah mahasiswa yang belajar di universitas Leiden yalah sebanyak 199 orang. Mereka memasuki berbagai fakultas, seperti kedokteran, hukum dan sastra. Universitas Kotapraja Amsterdam menempati tempat kedua, jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di sana yalah sebanyak 50 orang. Di universitas Utrecht, yang juga merupakan sebuah universitas tua, tetapi lain daripada Leiden, adalah pusat perumus kebijaksanaan politik kolonial yang konservatif, jumlah mahasiswa Indonesia yang pernah belajar yalah sebanyak 34 orang. Baik di Amsterdam, yang sering mengeluarkan pikiran-pikiran yang radikal, maupun di Utrech, yang konservatif, yang di tahun 1930-an berada di bawah pengaruh Prof. Treub dan menjadi sandaran ideologis bagi tokoh-tokoh kolonial, seperti Colijn, mahasiswa mempelajari berbagai disiplin ilmiah.

Di samping itu sekolah tinggi teknik di Delft, sekolah tinggi pertanian di Wageningen dan sekolah tinggi ekonomi Rotterdam juga dikunjungi oleh mahasiswa. Ketiga tempat tersebut masing-masing menerima mahasiswa Indonesia sebanyak, 25, 23 dan 13 orang.

Tidak dapat diketahui dengan pasti berapa orang akhirnya yang bisa menyelesaikan pelajaran dari generasi sebelum perang ini. Pada waktu Perang Dunia kedua meletus dan Belanda

diduduki Jerman sebagian dari mahasiswa Indonesia juga ikut menjadi barisan bawahtanah. Yang menyebabkan studi mereka terkatung-katung. Namun peranan negeri Belanda akan lebih terasa jika diingat bahwa beberapa putra Indonesia juga berhasil mendapatkan titel kesarjanaan yang tertinggi di sana. Tahun 1913 seorang pemuda Banten dari keluarga terkemuka, Djajadiningrat, menghasilkan disertasi yang sampai sekarang dianggap sebagai salahsatu karya puncak dalam studi filologi Indonesia. Ia adalah Prof. Dr. Hoesein Djajadiningrat. Ia kemudian diikuti oleh beberapa ahli filologi lain. Dalam lapangan hukum muncul Dr. Soepomo, yang menjelang Perang Pasifik diangkat sebagai profesor Indonesia yang pertama dalam hukum adat. Ia juga kemudian diikuti oleh yang lain. Semua mereka adalah hasil-hasil dari Leiden. Rotterdam juga menghasilkan ahli-ahli ekonomi Indonesia yang terkemuka, seperti Dr. Samsi dan seorang yang tidak sampai menyelesaikan disertasi tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sejarah Indonesia modern – Mohammad Hatta.

Di samping mengikuti pendidikan formil di perguruan tinggi, pemuda-pemuda Indonesia ada juga memasuki akademi-akademi bebas ataupun mengikuti pelajaran privat. Ada diantara mereka yang pindah-pindah, hanya sekedar untuk mencari pedoman bagi pembulatan program yang ingin mereka terapkan di tanahair. Inilah yang dilakukan oleh tokoh pendidik Ki Hadjar Dewantara di akhir tahun 1910-an, ini pulalah yang dilakukan oleh Mohammad Sjafei, yang terkenal dengan sekolah INS-nya di Kayutanam, pada tahun 1920-an.

Selain Belanda, pemuda-pemuda Indonesia juga bersekolah dan berkelana di beberapa negara Eropa Barat, terutama Jerman dan Belgia. Ada juga yang sempat belajar di Amerika Serikat. Pada akhir 1930-an seorang dokter Indonesia berhasil mendapatkan gelar M. D. (Medical Doctor) dari Johns Hopkins University (Baltimore).

Perguruan tinggi, bukan saja menambah, betapapun sedikit jumlah yang mendapatkan kesempatan ini, jenis keahlian dalam masyarakat, juga memperhalus hierarki antara para terpelajar Indonesia. Hierarki antara terpelajar, yang lebih banyak diwujudkan dalam bentuk otoritas keilmuan daripada status sosial, akan merupakan faktor yang agak menentukan dalam sistim pemilihan pimpinan dalam pergerakan kebangsaan, dan, kemudian juga,

dalam kepemimpinan pemerintahan di zaman Perang Kemerdekaan. Di samping itu perguruan tinggi lebih membuka kemungkinan bagi para pemuda untuk mengadakan pencarian ide dan pemikiran sendiri. Dengan begini perguruan tinggi ikut serta memperluas jenis pilihan dalam menggariskan haridepan bangsa.

Keadaan yang terakhir ini lebih terasa dengan peranan yang dimainkan Kairo. Al-Azhar, pusat pengetahuan Islam yang tertua di dunia, Darul-Ulum, universitas modern yang pertama di Mesir, dan Universitas Fuad adalah lembaga-lembaga yang juga ikut menempa kaum terpelajar Indonesia. Jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Kairo tak diketahui dengan pasti. Sebab mahasiswa datang tak selamanya liwat konsulat Belanda, banyak juga mereka yang pergi sebagai warganegara koloni Inggeris. Jadi tak ada catatan yang lengkap bisa diperdapat. Yang pasti awal abad 20 telah mulai berangsur-angsur mahasiswa dan pelajar Indonesia yang mengalihkan perhatian dari Mekkah ke Kairo. Di tahun 1920-an dan awal tahun 1930-an diperkirakan ada kira-kira 350 orang mahasiswa "Jawah", berada di sana. "Jawah" berarti kelompok pendatang yang berasal dari Indonesia dan semenanjung Melayu. Seperti mahasiswa di Negeri Belanda, mahasiswa Indonesia di Kairo, terutama yang berasal dari Sumatra, terlibat dalam pergerakan kebangsaan. Mereka mulai terpengaruh oleh cita-cita nasionalisme yang disebarkan di Mesir pada waktu itu – pensejajaran cita-cita kebangsaan dengan Islam. Dengan ideologi ini keluaran dari Kairo berusaha memberi pemecahan baru dalam pertengkaran ideologis antara nasionalis "sekuler", yang semuanya dipelopori oleh terpelajar didikan Barat, dan Islam, yang dibenarkan oleh ulama-ulama.

Di beberapa daerah, terutama di Sumatra Barat, kaum terpelajar yang pernah bersekolah di Kairo berhasil mengalahkan keunggulan ulama dalam pergerakan massa dan memperkecil peranan yang bisa dimainkan oleh terpelajar didikan Barat. Mereka, baik sebagai tokoh politik pergerakan maupun sebagai pendidik, berhasil memperluas pengaruh di kalangan rakyat. Jalan yang terpenting bagi penyebaran pengaruh ini yalah jaringan sekolah, yang didirikan oleh perkumpulan-perkumpulan mereka. Sekolah swasta, yang menekankan pendidikan agama atau yang umum tetapi bernafaskan agama, bukan saja merupakan pemecahan bagi kekurangan dari jumlah yang tersedia, tetapi juga memberikan pilihan baru dalam dunia

pendidikan. Karena itu pertumbuhan sekolah swasta di tanahair kita adalah salahsatu proses sejarah yang tak bisa diabaikan begitu saja.

4. Sekolah Swasta Yang Tak Bersubsidi

Sekolah dalam pengertian yang umum sebenarnya tidaklah begitu asing dalam tradisi di tanahair kita. Pesantren, madrasah, surau dan berbagai jenis sekolah agama sudah lama dikenal. Tradisi sekolah ini tetap berlanjut, sekalipun telah ada pilihan-pilihan lain. Pesantren dan madrasah merupakan jenis sekolah yang coraknya bertolak belakang dengan sekolah yang diperkenalkan pemerintah, baik dari sudut isi pengajaran, cara pendidikan, maupun dari kemungkinan yang bisa diharapkan oleh seorang anak didik. Sejak 1920-an setapak demi setapak telah mulai perubahan dari beberapa pesantren dan madrasah yang umumnya digerakkan oleh kaum reformis Islam. Sekolah agama yang didirikan oleh golongan ini mulai memakai sistim baru dan memperkenalkan berbagai jenis-jenis pengajaran umum. Kedua macam sekolah agama ini di beberapa daerah merupakan sekolah swasta yang paling penting.

Sekolah umum swasta pada dasarnya bisa dibedakan antara yang mengikuti sejauh mungkin corak serta sifat dari sekolah pemerintah dan bersubsidi dan yang dengan sadar mencari sifat lain. Taman Siswa adalah usaha yang paling jelas dalam usaha untuk memberi dasar ideologis bagi sekolah. Demikian juga sekolah umum yang didirikan oleh perkumpulan-perkumpulan agama, seperti Muhammadiyah yang mengikut sertakan pengajaran dan pendidikan agama untuk anakdidik mereka. Di samping itu ada pula sekolah swasta yang tidak saja mencari dasar ideologis, tetapi juga memperkenalkan corak pendidikan baru. Inilah umpamanya yang dilakukan oleh INS *(Indonesisch Nederlandsche School)* Kayutanam yang terkenal. Hampir tanpa kecuali dapat dikatakan bahwa sekolah swasta umumnya bersifat nasionalistis yang anti kolonial. Sekolah didirikan oleh perkumpulan dan tokoh pergerakan yang mengutamakan jalan pendidikan dalam pergerakan mereka. Sebab itu banyak pula didirikan berbagai kursus bebas mulai dari kursus memberantas butahutuf, mengetik, sampai dengan kursus politik.

Karena coraknya yang berbeda dan didirikan berdasarkan

dorongan yang berbagai-bagai – dari keinginan mengisi kekurangan sekolah sampai dengan hasrat yang lebih idealistis – maka agak sukar mengikuti dengan seksama sekolah-sekolah swasta tak bersubsidi ini. Tidak mengherankan bahwa pemerintah Belanda menamakan mereka sebagai *wilde scholen* atau sekolah liar. "Liar" karena sifatnya sering bercorak anti kolonial dan juga karena sekolah-sekolah itu sering mengalami masa pasang naik dan pasang surut. Hal ini tidak saja terkena kepada sekolah yang tak terikat dalam organisasi besar tetapi juga pada sekolah yang termasuk matarantai dari organisasi pendidikan yang besar, seperti sekolah-sekolah Taman Siswa dan Muhammadiyah. Sekolah yang merupakan cabang tersebut umumnya didirikan oleh penduduk setempat dan baru kemudian mengikatkan diri dengan organisasi besar. Jadi dalam banyak hal, terutama yang menyangkut keuangan, tersedianya guru-guru, dan jumlah murid, sekolah-sekolah sangat tergantung pada keadaan setempat. Selagi organisasi atau perseorangan pengambil inisiatif dari pendirian sekolah-sekolah tersebut masih aktif dan dapat kepercayaan masyarakat, sekolah bisa diharapkan maju. Tetapi suasana lain akan muncul bisa penguasa setempat atau polisi mulai bertindak, semangat para pendukung mulai luntur, keadaan ekonomi mulai merosot, dan sebagainya, sekolah-sekolah tersebut terpaksa harus gulung tikar.

Keadaan yang selalu bergerak seperti dilukiskan di atas sangat menonjol selama periode akhir tahun 1920-an sampai dengan pertengahan tahun 1930-an, atau selama dasawarsa puncak dari pergerakan kebangsaan. Setelah periode tersebut – setelah politik *rust en orde* dipaksakan – keadaan lebih baik untuk dapat menghitung jumlah sekolah tersebut. Begitulah berdasarkan perhitungan dari Inspektur Pendidikan pada tahun 1937/1938 terdapat sekolah swasta yang tergolong "liar" sebanyak 1.691 (tidak termasuk sekolah-sekolah Taman Siswa).

Perinciannya adalah sebagai berikut :

Taman Kanak-kanak	101
ELS	58
HCS (untuk anak-anak Cina)	210
HIS	854
Schakel	266
MULO	63

Kweekschool	14
Lain-lain	395

Sumber: Vastenhouw, *Inleiding,*

Sebagian dari sekolah yang dicatat ini adalah dimiliki dan dikunjungi oleh golongan Eropa dan Cina. Walaupun jumlah sekolah dari golongan-golongan ini tak begitu besar tetapi mereka mempunyai murid yang cukup besar jumlahnya. Murid yang tercatat dari sekolah tersebut di atas yalah berjumlah 57.535. Dari jumlah ini hanya 19.255 dari golongan pribumi sedangkan dari golongan Cina berjumlah sebanyak 32.991 orang dan lainnya dari golongan Eropa (4.337) dan "Timur Asing".

Salahsatu aspek yang tak boleh diabaikan dalam menghitung sekolah swasta ini yalah bahwa mutunya jika dibanding dengan sekolah pemerintah atau bersubsidi umumnya sangat rendah. Kecuali beberapa yang betul-betul baik, seperti INS, yang memang sengaja menolak tawaran untuk mendapatkan subsidi pemerintah, sekolah-sekolah ini di pimpin dan di selenggarakan oleh guru-guru yang tak memenuhi syarat. Bahwa sekolah tersebut masih bisa bertahan dan malah sempat hilang dan tumbuh dalam waktu yang tak terlalu berjauhan membuktikan betapa besarnya hasrat belajar dan juga memperlihatkan bahwa tidak selamanya masadepan atau karier anak diletakkan orangtua pada keterikatan pada sistim kolonial.

Secara formil, sekolah-sekolah yang dipimpin Ki Hadjar Dewantara bisa tergolong "liar", dalam arti tidak dapat subsidi, tetapi cukup dapat penghargaan dari sudut mutu. Di sekitar tahun 1930-an jumlah sekolah yang tergabung dalam Taman Siswa yalah sebanyak 99 buah, dengan perincian sebagai berikut:

HIS	45
MULO	46
AMS	7
Kweekschool	1

Sumber: *Buku Peringatan Taman Siswa 30 tahun 1922 – 1952.*

Angka ini adalah angka yang konservatif, sebab dalam tabel yang diberikan ternyata ada beberapa sekolah yang berdiri dengan nama Taman Siswa. Mungkin sekolah-sekolah ini terpaksa gulung tikar sebelum sempat mendapat pengakuan dari Majelis Luhur di Yogyakarta.

Peranan dari sekolah swasta tidaklah sama di mana-mana. Di Tapanuli Utara dan daerah Minahasa sekolah swasta, yang kebanyakan didirikan oleh zending,dan umumnya dapat subsidi, sangat penting peranannya dalam perkembangan daerah. Kehadiran sekolah seperti ini menyebabkan kedua daerah Kristen tersebut merupakan daerah yang paling terpelajar – dalam arti prosentase yang pernah bersekolah menurut gaya Barat di seluruh tanahair. Di daerah lain halnya berbeda. Daerah yang tak mengenal pergerakan kebangsaan dengan intens umumnya sedikit sekali mempunyai sekolah swasta dan karenanya sangat menggantungkan diri kepada sekolah yang terkait langsung atau tidak, dengan pemerintah kolonial atau pada madrasah tradisionil. Tetapi di daerah, di mana terjadi pergerakan kebangsaan, terutama yang bernada Islam, sekolah-sekolah swasta merupakan pilihan yang cukup merangsang.

Tabel 4

Sekolah Pemerintah dan Subsidi dibanding dengan Sekolah-sekolah golongan Islam di Sumatra Barat (1933) (tidak termasuk Madrasah dan Sekolah Mengaji (Islam)*)

Pemerintah / Subsidi			I s l a m *)		
Tingkat Sekolah	Sekolah	Murid	Tingkat Sekolah	Sekolah	Murid
HIS	13	3.435	Sekolah agama "Murni"	589	9.285
Schakel	3	401	Agama dengan pengetahuan umum	452	25.292
Klas Dua (dan Vervolg school)	163	26.866	Sekolah umum disertai pendidikan agama (al. HIS, dan sebagainya).	132	44.577
ELS	6	1.061			
MULO	4	516			
J u m l a h	189	32.286		1.173*)	79.154*)

Catatan : *) *35 HIS partikulir, yang didirikan oleh organisasi lokal dengan murid 825, tidak dimasukkan.*

Sumber : Taufik Abdullah, *Schools and Politics*, hal. 210 – 213.

Hal yang terpenting yang perlu juga dicatat yalah bahwa sekolah swasta umumnya murah dan siapapun bisa memasukinya tanpa memperhitungkan kedudukan ataupun kekayaan, seperti yang terjadi dengan sekolah-sekolah pemerintah. Jadi, terlepas dari mutu yang kadang-kadang yang begitu baik, sekolah swasta

mempercepat proses demokratisasi pendidikan dan juga memberikan kemungkinan lain dalam sistim dan corak pendidikan. Tak dimungkinkan untuk memasuki sistim kolonial, karena ijazah yang bersifat "liar", anak-anak keluaran sekolah swasta ini menemukan diri mereka sebagai "orang luar" yang mutlak dari sistim. Sebab itu tidaklah terlalu jauh dari kenyataan ucapan yang mengatakan bahwa sekolah-sekolah swasta, yang didirikan dan diselenggarakan oleh pribumi, mendidik calon-calon nasionalis.

Demokratisasi dalam pendidikan, yang membuka pintu pada siapapun yang sanggup, bukanlah tujuan utama sekolah pemerintah. Pada sekolah yang bersifat "Belanda", ras, kelas, status dan pendidikan menjadi persoalan. Hanyalah pada sekolah yang termasuk kategori "Bumiputra" demokratisasi agak lancar. Tetapi, tujuan yang ingin dicapai oleh sekolah-sekolah ini juga sangat terbatas.

Pembicaraan tentang latar belakang murid-murid dari sekolah "Belanda" akan memperjelas persoalan sampai di mana sekolah-sekolah modern merupakan faktor dari mobilitas sosial dan peralihan struktur masyarakat.

5. *Latarbelakang Sosial Dari Murid-murid Sekolah Pemerintah*

Siapakah yang berhak memasuki sekolah pemerintah ? Apakah sekolah ini berfungsi pula sebagai alat bagi mobilitas sosial ? Untuk menjawab pertanyaan ini beberapa patokan umum haruslah lebih dulu diajukan. Walaupun sekolah desa atau *volksschool* dan lanjutannya sedikit banyaknya dapat dianggap sebagai sekolah pemerintah juga, tetapi sudah dapat dipastikan bahwa murid-murid yang memasuki sekolah tersebut umumnya adalah golongan penduduk biasa. Tak ada sedikit kemungkinan bagi murid-murid ini untuk menyeberang ke sistim sekolah "Belanda". Indikator atau pertanda yang terbaik yalah murid-murid HIS, karena sekolah ini adalah kunci pertama bagi sistim pendidikan "Belanda", yang memberi kemungkinan lebih besar bagi murid untuk melanjutkan pendidikan dan mempersiapkan diri memasuki sistim kolonial. Di samping itu HIS memang terutama dimaksudkan sebagai *standenschool*, sekolah yang berdasarkan status.

Untuk menentukan status seseorang dalam masyarakat kolonial pemerintah Belanda berpegangan pada penghasilan. Berdasarkan perhitungan tertentu maka yang berpenghasilan di atas Fl. 1.200 setahun dianggap sebagai golongan yang mempunyai status yang cukup tinggi. Dalam dunia kepegawaian ini artinya berlaku bagi pangkat asisten wedana ke atas.

Berdasarkan ketentuan pemerintah (Stbld. 1914 No. 359) ada empat dasar penilaian yang memungkinkan orangtua mengirimkan anak-anak mereka ke HIS, yaitu keturunan, jabatan, kekayaan atau pendidikan. Jadi seorang keturunan bangsawan tradisionil mempunyai hak untuk memasuki HIS demikian juga seorang yang punya jabatan dalam pemerintahan, seperti wedana, demang dan sebagainya. Di samping itu pendidikan Barat yang pernah diterima si orang tua – paling kurang MULO atau yang setingkat – dan penghasilan rata-rata Fl. 100,- sebulan memberi hak si anak untuk memasuki HIS. Demikian menurut ketentuannya.

Tetapi kenyataannya sangat berbeda. Berdasarkan penelitian yang diadakan oleh Komisi HIS ternyata sejak tahun 1912 – jadi sejak zaman Sekolah Kelas Satu, yang merupakan pendahulu dari HIS, yang resmi berdiri tahun 1914 – kelihatan bahwa prosentase dari yang sesuai dengan ketentuan tersebut rendah sekali dan mempunyai kecenderungan untuk bertambah rendah. Dari kalangan pegawai pemerintah kelihatan bahwa prosentase dari golongan pegawai tinggi, seperti regent, makin tak ada arti. Jika pada tahun 1912 kira-kira 1,58 persen atau, dengan angka absolut 257 orang dari orang tua murid adalah pegawai tinggi, maka pada tahun 1915 tinggal lagi 1,36 persen (walaupun angka absolutnya naik). Sejak tahun 1925 prosentasenya susah diperhitungkan lagi. Sementara itu dari golongan pegawai menengah – yang bergaji di atas Fl. 100,– sebulan atau paling rendah dengan pangkat asistenwedana – ada kecenderungan untuk menetap dalam jumlah prosentase. Dari tahun 1912 sampai dengan 1927 terjadi fluktuasi antara 10,31 persen, paling rendah, sampai 18,27 persen, paling tinggi. Tetapi dari kalangan pegawai rendah – yang bergaji di bawah Fl. 100,– sebulan – angka prosentase tetap tinggi yaitu sekitar 31 sampai 38 persen. Golongan ini merupakan golongan yang terbesar yang memasukkan anaknya ke HIS.

Angka selebihnya dari masa 1912 sampai 1927 tersebut beradal dari golongan swasta. Walaupun tidak begitu jelas pembatasan antara kelas menengah dengan kelas menengah bawahan, yang di buat oleh komisi, tetapi ada kecenderungan umum yalah makin besarnya prosentase dari golongan kelas menengah bawahan yang memasuki HIS. Pada tahun 1912 dari golongan kelas menengah tercatat sebanyak 4.259 atau 26,12 persen dari semua murid, sedangkan dari kelas menengah bawahan jumlahnya yalah sebanyak 4.005 atau 24,56 persen. Pada tahun 1927 walaupun angka absolut sudah jauh lebih tinggi, prosentase dari kelas menengah telah menurun, menjadi 15,59 (angka absolut sebanyak 9.657) sedangkan dari kelas menengah bawahan angka prosentase telah naik sampai 29,16 persen (dengan angka absolut 18.063).

Berdasarkan variabel lain, yang memakai status, bukannya jabatan, sebagai ukuran, komisi HIS memperlihatkan bahwa pada tahun 1926 sebagian terbesar dari murid HIS, baik kepunyaan pemerintah, maupun swasta yang bersubsidi, berasal dari apa yang disebut kategori C, yaitu masing-masing 63,57 persen pada sekolah pemerintah dan 75,30 pada sekolah swasta. Yang termasuk kategori C yalah: pegawai, pengusaha kecil, militer, petani, nelayan, dan orangtua yang pernah dapat pendidikan HIS.

Yang bisa dianggap kelas atasan yalah dari kategori A dan B. Dalam kategori A termasuk kaum bangsawan dan pejabat tinggi serta swasta kaya, yang berpenghasilan bersih lebih dari 75 gulden sebulan. Mereka merupakan orangtua dari 34,93 per sen dari jumlah murid HIS pemerintah dan 23,79 persen dari murid swasta. Sedangkan yang masuk kategori B yalah orangtua yang tamatan sekolah MULO, dan Kweekschool ke atas. Anak-anak dari golongan ini merupakan 1,50 persen dari murid HIS pemerintah dan 0,91 dari sekolah swasta.

Berdasarkan catatan ini nyatalah bahwa HIS, sejak semula telah membuka pintu bagi terjadinya semacam mobilitas sosial. Terlepas dari ketentuan pemerintah, HIS ternyata membuka kesempatan bagi golongan swasta dan bagi golongan yang berpenghasilan rendah. Kecenderungan ini lebih kentara pada perbandingan latarbelakang murid sekolah *Schakel*, sekolah yang merupakan perantara antara sistim Bumiputra dan sistim Belanda. Pada tabel 5 kelihatan bahwa lebih dari 92 persen dari murid-murid Schakel berasal dari orang tua yang tidak berpeng-

hasilan tinggi. Hal ini tentu saja bisa dimengerti, karena anak-anak dari golongan ini lebih banyak lagi yang memasuki lebih dulu sistim pendidikan Bumiputra yang bermula dengan volksschool. Demikian pula tidaklah mengherankan bahwa sebagian terbesar dari murid ELS, yang memang lebih diperuntukkan untuk golongan Eropa, berasal dari kalangan atasan.

Pada tingkat pengajaran menengah terjadi semacam pergeseran. Sifat yang agak demokrasi dari kesempatan belajar makin diperkecil. Seperti ELS demikian pula HBS, betul-betul sangat bersifat sekolah untuk kelas tinggi. Sedangkan MULO dan AMS memperlihatkan kecenderungan bahwa makin tinggi sekolah makin kecil kemungkinan bagi kalangan bawah untuk melanjutkan pelajaran. Suatu hal yang tentu saja bisa di mengerti.

Tabel 5
Status Ekonomi orang tua murid-murid dari
Sekolah "Belanda" (Pemerintah dan Subsidi)
dalam prosentase

Jenis Sekolah	Golongan pribumi			Seluruh golongan (ras *)		
	Penghasilan rata-rata					
	dibawah f. 1.200	diatas f. 1.200		dibawah f. 1.200	diatas f. 1.200	
ELS	10.1	89.9	100	11.5	88.5	100
HIS	62.6	37.4	100	62.3	37.7	100
HCS	70	30	100	48.9	51.1	100
Schakel School	92.8	7.2	100	92.6	7.4	100
Speciale School	89.	11	100	89.5	10.5	100
Technische-School	55.5	44.5	100	35.9	64.1	100
MULO	46.3	53.7	100	30.4	61.6	100
AMS	44.5	55.5	100	30.7	69.3	100
HBS	22.	78.	100	3.9	96.1	100

Sumber : van der Veur, *Education and Social Change in Colonial Indonesia (I)*, hal. 28.

* Pribumi, Eropa, Cina dan bangsa Asia lainnya.

Dari gambaran latar belakang sosial murid-murid yang berkesempatan memasuki sekolah sistim "Belanda" kelihatan bahwa bagi golongan yang tak begitu berada dan berpangkat juga terbuka kesempatan untuk memasuki sistim kolonial. Tetapi betapa besarnya kesempatan ini akan kelihatan jika dibandingkan antara jumlah yang bisa bersekolah dengan yang tidak. Karena kelangkaan dari kesempatan inilah sekolah merupakan daya tarik

yang kuat dan dianggap sebagai jalan terdekat untuk mendidik anak menjadi "orang berpangkat".

Tetapi apakah lulus sekolah merupakan jaminan untuk mendapatkan tempat dalam sistim kolonial ? Bahwa keunggulan ilmu dalam hierarki tradisionil mendapatkan penghargaan, yang mempengaruhi bagi status seseorang dalam masyarakat, adalah benar, tetapi apakah akibat bagi kedudukan formil seseorang ? Sampai di mana kebenaran dugaan sekolah sebagai jalan untuk mendapat pangkat dengan kenyataan ?

6. *Sekolah, Kesempatan Kerja, Dan Mobilitas Sosial*

Jasa pertama dari pengajaran sistim Barat yalah memperkuat dasar legitimasi atau kesyahan bagi penguasa bumiputra. Dengan pengajaran Barat mereka merasa lebih percaya diri sebab pada diri mereka telah terkumpul dua sumber kesyahan, yaitu keturunan yang mempunyai tarikan tradisionil, dan pengajaran Barat, yang memungkinkannya untuk menjadi perantara dengan penguasa asing. Karena itu tuntutan bagi pengajaran Barat sangat keras bergema di kalangan mereka. Tuntutan ini menjadi lebih keras karena dimulainya pelebaran kelas pegawai oleh pemerintah kolonial. Keluhan-keluhan tentang pelebaran kelas pegawai atau priyayi adalah gejala yang agak umum juga pada awal abad ini. Hal ini langsung mengancam kedudukan keluarga pegawai lama yang hanya harus bertopang pada kebanggaan keturunan. Demi mempertahankan harkat sesungguhnya dari kepegawaian, yang dulunya terlibat dalam hubungan yang khusus dengan raja, maka adaptasi budaya harus ada. Dan caranya yalah mendapatkan ketrampilan teknis menurut corak Barat. Tanpa ini kegoncangan dalam kepegawaian tak bisa dielakkan. Begitulah umpamanya, pada tahun 1905 bupati dari Tuban mengeluh bahwa dari 260 orang priyayi yang baru di angkat di karesidenan Rembang hanyalah sepuluh orang saja yang mendapat didikan Osvia. [24]

Keadaan makin lama makin berubah. Dengan makin banyak sekolah, maka makin keras pula keharusan adanya diploma bagi mendapatkan pekerjaan dan kenaikan pangkat. Pada tahun 1940 semua *regent*, yang jumlahnya 65 orang, dan sebagian besar patih di pulau Jawa adalah tamatan Osvia.

[24] Dikutip oleh Bernard Dahm,*op. cit.*, hal. 29.

Sebagian dari mereka malah telah menduduki perguruan tinggi. Dari jumlah 340 wedana, sepersepuluhnya adalah tamatan Osvia.

Di luar kepamongprajaan lembaga pengajaran Barat menghasilkan tenaga-tenaga yang terlatih yang bisa di pekerjakan pemerintah. Sebagai contoh dapat di sebutkan bahwa pada tahun 1941 tercatat 90 sarjana hukum pribumi bekerja pada badan-badan pemerintahan, antaranya 54 orang bekerja di bawah Departemen Kehakiman, 306 orang dokter bekerja pada Dinas Kesehatan. Pada tingkat lebih rendah bisa disebut bahwa pada tahun tersebut 58 dari jumlah 139 orang mantri hutan adalah orang Indonesia asli, sebanyak 139 orang pula bekerja sebagai mantri pertanian, dan sebanyak 63 orang bekerja sebagai mantri hewan. Semuanya adalah tenaga terlatih dan termasuk kelas atas dan menengah dalam struktur kepegawaian.

Dari pembicaraan tentang latarbelakang sosial murid-murid HIS, sekolah yang membuka pintu bagi kelanjutan pendidikan, dapat diduga bahwa banyak juga di antara pejabat yang mendapatkan kedudukan karena keahlian yang dimilikinya tersebut, berasal dari golongan bawah. Sekolah dalam hal ini telah memulai semacam pelebaran mobilitas sosial dan dengan pengaruh yang lebih terbatas, memulai gerak kearah transformasi sosial. Orang baru dimungkinkan untuk memasuki lapisan sosial yang lebih tinggi dasar kesahan dari lapisan atas mulai di persoalkan bila saja dasarnya tak di dukung pula oleh pengajaran baru. Kecenderungan bagi terbukanya jalan yang lebih lebar bagi mobilitas sosial

Tabel 6
Pekerjaan orangtua dari pegawai pemerintah
(golongan Indonesia)

Pekerjaan Orang tua	Gaji (Komis dan Klerk)		Gaji (Juru Tulis)	
	Jumlah	Prosentase	Jumlah	Prosentase
Wedana dan pegawai tinggi	483	25,91	372	15,2
Klerk dan guru	307	16,47	435	17,7
Juru tulis dan mantri	619	33,21	939	38,3
Mandur dan opas	105	5,63	337	13,8
Petani	271	14,54	295	12,–
Pedagang	79	4,24	73	3,–
J u m l a h	1.864	100,–	2.451	100,–

Sumber: dikutip oleh van der Veur, *op.cit.*, hal. 38.

terdapat pula dalam dunia kepegawaian. Anak-anak dari pegawai yang rendah, karena pendidikan yang mereka peroleh, mempunyai kesempatan untuk melampui tingkat yang pernah dicapai oleh orangtua mereka. Hal ini kelihatan dengan jelas dari hasil survey yang dilakukan oleh Komisi HIS. Walaupun ada beberapa kelemahan dalam metode serta cara pengumpulan data, namun kesimpulan umum tentang keterbukaan jalan bagi mobilitas ini tak dapat diabaikan.

Memang proses pembirokrasian dari kalangan atas masyarakat Indonesia adalah pengaruh yang terpenting dari jaringan sekolah-sekolah Barat. Birokrasi sebagai kelas atasan tidak saja terpantul pada kedudukan resmi tetapi juga pada status yang berdasarkan kekayaan. Diperkirakan bahwa kira-kira 53 persen dari 4.016 orang pribumi yang berpenghasilan dari Fl. 3000 sampai dengan Fl. 8000,– setahun adalah pegawai negeri.[25] Angka ini bukanlah angka yang pasti, tetapi diberi indikasi tentang betapa pentingnya peranan sekolah dalam proses pelebaran birokrasi. Hal ini juga menunjukkan bahwa arah sekolah lebih banyak ditujukan untuk membentuk tenaga-tenaga yang terikat pada sistim kolonial. Kecenderungan ini bukan saja merugikan pemerintah sendiri tetapi juga membatasi kemampuan sekolah sebagai faktor penggerak dalam perkembangan sosial. Ketidakmampuan menampung hasil sekolah bisa berakibatkan munculnya golongan terpelajar yang merasa dirinya dirugikan oleh pemerintah. Di samping itu keterbatasan yang terlekat pada sekolah menyebabkan para terpelajar lebih terpaku pada tindakan politik, bukannya strategi pengembangan masyarakat sebagai keseluruhan. Sekolah lebih banyak menyumbang bagi terciptanya kelas menengah yang terlepas dari kerja merdeka dan yang bersifat pengusaha ekonomi.

Pada tahun 1928/29 di kota-kota saja dari seluruh tenaga yang mendapat didikan Barat, maka 80½ persen adalah orang gajian – tidak dipersoalkan apakah pangkat atau gaji mereka sesuai dengan kemampuan atau tidak, dari pemerintah atau pengusaha asing (terutama dari golongan Cina). Hanya dua setengah persen yang bekerja sebagai bawahan dari majikan Indonesia. Kecilnya sumbangan sekolah Barat bagi pengembang-

25 G.Mc. Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, New York, 1952, hal. 29 – 30.

an tenaga yang terlepas kelihatan pada statistik bahwa hanya dua persen saja dari terpelajar Barat tersebut bekerja sendiri. Selebihnya, yaitu limabelas persen, tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Sekolah telah membuka pintu sistim kolonial bagi anak negeri dan dalam mengadakan sekedar tranformasi dalam tubuh birokrasi – membuka kesempatan bagi lapisan bawah untuk menebus lapisan atas – tidaklah selalu senada dengan kecenderungan lainnya. Sekolah memang merupakan kunci tetapi bukanlah merupakan jaminan untuk mendapatkan tempat yang sesuai dengan yang dijanjikan. Adanya ukuran-ukuran lain yang bersumber pada prasangka politik dan menghalangi dinamisasi yang mungkin bisa diperkenalkan oleh sekolah. Begitulah dalam sistim pengangkatan pegawai atau promosi, maka ras dari pemerintah yang berkuasa menjadi ukuran yang mutlak perlu. Sehingga terjadilah situasi di mana tenaga-tenaga terdidik Indonesia – dengan tak usah menyebutkan yang juga berpengalaman terpaksa tidak dapat mendapat tempat atau jika tempat tersebut, menemukan dirinya dinilai di bawah dari kemampuannya yang sesungguhnya. Pada tahun 1928/29 diperkirakan 25 persen dari tenaga terdidik Indonesia berada dalam keadaan demikian. Menyadari keadaan inilah maka Komisi HIS menasehatkan pemerintah untuk menghentikan proses perluasan jaringan pengajaran karena katanya "tempo dari pengluasan melebihi dari perkembangan sosial"[26] Maksudnya tentu saja perkembangan sosial dalam situasi kolonial.

Proses pengluasan memang terhenti atau sangat diperlambat, tetapi kemampuan pemerintah untuk menampung tenaga-tenaga terlatih tersebut, baik karena alasan ras, ekonomi, maupun politis, tetap sangat terbatas. Hal ini bukan saja ikut merupakan salahsatu faktor yang menyebabkan timbulnya golongan terpelajar yang merasa diperlakukan tidak adil oleh sistim kolonial, tetapi juga mendorong adanya keharusan mentransformasikan bekal yang diberikan oleh sekolah. Di saat makin memuncaknya gerakan kebangsaan pada tahun 1930-an, hal itu memperlihatkan dirinya dengan berkembangnya sekolah-sekolah swasta, usaha-usaha penerbitan, koperasi dan sebagainya. Peleburan dari sifat sekolah "Belanda" sekaligus memupuk semangat

26 *H.I.O.C.*, 6a, hal. 73.

kebangsaan dan merintis ke arah terbentuknya corak lain, yang bukan kolonial, dari masyarakat.

Jadi sekolah modern telah berfungsi sebagai katalisator bagi terwujudnya dua jenis elite, yaitu birokrat modern dan intelektuil. Keduanya berasal dari tradisi pendidikan yang sama, tetapi berada dalam lingkungan politik dan sosial yang berbeda. Keduanya mempunyai tempat atas susunan hierarki sosial, tetapi yang pertama lebih di dukung oleh legitimasi politik, sedangkan yang lain oleh keunggulan ilmu.

Sementara itu, seperti telah bisa di duga, tamatan sekolah swasta, yang biasa disebut "sekolah liar", baik yang bercorak sekuler dan terutama agama, makin menemukan diri mereka berhampiran dengan kaum terpelajar bebas ini. Walaupun tradisi pendidikan mereka berbeda-beda – terutama jika dibanding dengan keluaran sekolah agama – mereka menghadapi situasi dan kemungkinan sosial yang hampir sama. Keduanya mendapatkan tempat terlepas dari claim politik atau kekuasaan. Keunggulan, bukannya kekuasaan yang menjadi sandaran mereka. Yang satu, golongan terpelajar Barat, tersingkir atau menyingkirkan diri dari sistim kolonial, sedangkan yang lain, terutama terpelajar yang berazaskan agama, tak punya hak dan kesempatan untuk mengimpikan untuk menjadi bagian dari sistim.

Perbedaan antara kedua golongan ini – kedua jenis terpelajar merdeka tersebut – lebih menonjol dalam lapangan ideologis, bukannya dalam pengertian sosiologis. Tetapi perbedaan dalam tradisi ke-intelektuil-an menyebabkan mereka sanggup mengajukan dan menguji pilihan politis dan ideologis bagi masyarakat dan bangsa.

Persaingan, pergolakan, serta persekutuan, yang saling berganti antara kelompok-kelompok birokrat, terpelajar Barat dan terpelajar agama, merupakan salahsatu aspek yang penting dalam proses pembentukan bangsa.

Membicarakan pelebaran jaringan sekolah berarti melibatkan diri dalam persoalan situasi kolonial sebagai keseluruhan. Sekolah bukan saja harus di lihat sebagai alat ke arah pembaharuan masyarakat, peningkatan kecerdasan dan sebagai alat bagi terbukanya mobilitas sosial, tetapi juga tak kurang pentingnya sebagai penjelmaan yang subtif dari politik kolonial. Politik kolonial yang terkait erat dengan segala latarbelakang filosofis dan dasar etis yang bersifat rasionalisasi – "beban orang

kulitputih" – dan prasangka rasial. Karena itulah hasil yang bisa dicapai oleh sekolah, yang didirikan dan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial, serba terbatas dan serba bersifat dua.

Sekolah sebagai alat mobilitas sosial dan jalan bagi terwujudnya suatu transformasi sosial harus berhadapan dengan logika lain, yang bersifat kolonial. Pertimbangan kolonial ini menyebabkan terbatasnya jangkauan sekolah sebagai faktor dinamisasi masyarakat.

Sekolah yang di perkenalkan supaya mendapatkan tenaga bagi keperluan administrasi dan kemudian di perkembang supaya – menurut argumen pada penganut politik etis – terjalin hubungan kulturil yang erat dan abadi antara negeri Belanda dan "Hindia Belanda", juga mendorong munculnya musuh dari sistim yang melahirkannya. Sekolah bukan saja menghasilkan administrator yang baik dan setia tetapi juga nasionalis yang radikal dan anti kolonial.

Begitulah membicarakan sekolah berarti membicarakan salah satu dinamik terpenting dalam perkembangan masyarakat kolonial.

C. PERALIHAN STATUS SOSIAL

1. Pendahuluan.

Sejak akhir abad ke 19 beberapa jenis mobilitas dalam masyarakat, baik secara geografis maupun sosiologis, telah terjadi. Dalam pengertian geografis kelihatan bahwa perpindahan tempattinggal dan kerja makin lama makin sering dilakukan. Transmigrasi, migrasi intern dan urbanisasi menunjukkan adanya keinginan untuk keluar dari lingkungan hidup yang lama. Karena pengaruh penetrasi ekonomi asing dan kerapatan penduduk, mobilitas dalam kerjapun terjadi pula. Sebagian dari masyarakat tani telah menunjukkan perhatian kepada kerja dagang, walaupun masih secara kecil-kecilan. Jenis pekerjaan tukang dan pelayanan pun telah bertambah banyak pula.

Peralihan kerja ini dan juga perpindahan tempat mungkin saja tidak membawa pengaruh apa-apa bagi kedudukan seseorang dalam penilaian masyarakat yang melakukannya tetap dianggap sebagaimana ia dinilai dulunya. Dalam hal ini kita menemukan semacam mobilitas yang bersifat horizontal, yang mendatar saja. Tetapi ada kalanya peralihan tersebut membawa akibat bagi

kedudukan seseorang. Begitulah seorang yang pindah ke kota dan mendapat kerja yang baik akan naik harganya di mata masyarakat desanya. Demikian pula keadaannya jika seorang dalam kerjanya makin mendapat sukses. Dalam hal ini terjadilah semacam mobilitas sosial vertikal yang naik ke atas. Pengaruh penyebaran pengajaran dan pelebaran birokrasi telah memperlihatkan bahwa hal ini juga sering terjadi.

Berjenis mobilitas ini bisa terjadi dalam masa satu generasi saja. Urbanisasi dan transmigrasi umpamanya sering terjadi hanya dalam masa satu generasi saja. Sering pula mobilitas ke arah menaiknya kedudukan seseorang terjadi dalam dua generasi – kedudukan anak lebih tinggi dari kedudukan yang pernah dicapai ayah. Sekolah antara lain berfungsi sebagai alat untuk kemungkinan mobilitas yang naik ini dan lembaga birokrasi sering menjadi salurannya. Sukses dalam jabatan ini sering mempengaruhi nilai terhadap peranan dalam masyarakat. Bahkan juga pandangan masyarakat terhadap keluarganya ikut naik.

Begitulah perobahan sosial-ekonomis dengan segala aspeknya ikut mempengaruhi kedudukan dan status seseorang dan juga terhadap nilai-nilai yang mendukung stratifikasi sosial. Perobahan yang cepat, apalagi yang dipaksakan dari luar, bukan saja mempersoalkan dasar-dasar nilai tersebut tetapi juga mengajukan beberapa sistim penilaian. Di zaman kolonial masyarakat berdasarkan hukum dan politik yang dipaksakan dari luar, keharusan untuk mengadakan semacam penyesuaian kulturil, dan tak kurang pentingnya, pengabdian dari dasar-dasar yang lama. Dasar penilaian yang majemuk terjadi, ada yang berdasarkan kedudukan politik, administratif, agama, tradisi, dan keunggulan ilmu dan kerohanian. Semuanya saling berbeda tetapi juga tidak selamanya saling menutup. Seseorang bisa dinilai menurut beberapa jenis patokan nilai. Dalam keadaan yang seperti ini maka muncul pula sarana yang memperkecil antar penilaian subjectif kemungkinan terwujudnya kesesuaian dari pemangku peran dengan tanggapan objektif dari masyarakat yang mengitarinya. Semacam konflik tentang patokan nilai dari lapisan atau stratifikasi sosial terjadi.

Demikianlah jika ukuran hukum kolonial yang harus berkuasa maka dalam masyarakat kolonial yang pluralistis – pluralistis dalam pengertian antropologis – maka urutan lapisan masyarakat telah ditentukan dengan meletakkan orang Belanda dan Eropa lainnya di puncak atas. Kemudian diikuti oleh

golongan Indo dan Timur Asing. Dan barulah pada lapisan paling bawah adalah golongan bumiputra. Jadi tidaklah aneh, bahwa banyak pula orang-orang Indonesia yang telah dapat pendidikan Belanda dan ingin mencapai karier yang baik dalam pekerjaan berusaha untuk mendapat pengakuan resmi sebagai orang yang dipersamakan haknya dengan orang Eropah (*gelijkgesteld).*

Tetapi masalahnya tentu saja tidaklah semudah itu. Pemerintah Belanda bagaimanapun juga lebih ingin memerintah secara tak langsung. Yang terpenting yalah mencari mekanisme yang bisa menjamin kedudukan puncak Belanda diatas piramida sosial yang memungkinkannya mendapat legitimasi politik. Maka perbedaan dua jenis lingkungan dan jurisdiksi administrasi – Eropah dan bumiputera – haruslah jelas dan, kedua, semacam rumusan untuk mempertahankan masyarakat yang tetap organik, tanpa perobahan yang traumatis. Makin utuh masyarakat tradisionil makin baik. Dengan begini mobilisasi penduduk untuk keperluan exploitasi ekonomi akan lebih baik atau, menurut argumen lapangan penganut politik etis yang beraliran liberal, ikatan kulturil dan politik antara "Hindia Belanda" dengan "negeri induk" akan lebih terjamin. Di samping itu ada pula keperluan-keperluan praktis: biaya memerintah negeri yang demikian luas ini tidak terlalu banyak. Hal ini menimbulkan keadaan yang memaksa Belanda harus memperkuat penguasa tradisionil dalam berhadapan dengan rakyat mereka sendiri, tetapi memperlemah mereka dalam berhadapan dengan Belanda. Beberapa simbol dan penopang dasar legitimasi tradisionil – seperti hak penguasaan tanah dan hak mendapatkan pelayanan kerja dari rakyat – dihapuskan, namun kekuasaan penguasa tradisionil diperkuat dengan kekuatan yang bersumber dari luar sistim – kekuatan politik pemerintah. Karena itu antara kekuasaan dan penilaian berdasarkan prestige tidak selalu terjalin dengan baik. Seorang kapala yang kuat dan berkuasa belum tentu mendapat penilaian yang sesuai dari rakyat.

Hal ini memperkecil kemungkinan terjadinya suatu perubahan sosial dan peralihan dari pengertian lapisan sosial yang menyeluruh. Tetapi lebih memungkinkan timbulnya kecenderungan untuk menilai status seseorang berdasarkan peranan khusus yang dimainkan. Alternatif dalam penilaian terhadap peran makin bertambah banyak dan akibatnya konflik antara pendukung alternatif itupun bertambah keras pula. Inilah yang

bisa disebut sebagai konflik "antar-elite", pertarungan antar-kelompok dari lapisan-atas masyarakat. Antara lapisan yang mendasarkan keunggulannya pada keturunan, kedudukan administratif, tradisi, agama, pendidikan Barat, kekayaan, dan sebagainya. Walaupun dalam konflik berbagai penilaian tersebut bisa dijadikan sebagai dasar kekuatan penopang claim sekaligus, perbedaan antara kelompok yang terikat dengan sistim kolonial dengan yang berada di luarnya sangat penting.

Konflik "antar-elite" tersebut adalah pencarian bagi pengakuan dan penerimaan dari masyarakat terhadap harkat kehormatan yang ditimpakan oleh lapisan tersebut terhadap diri mereka. Pencarian ini membayangkan dengan jelas bahwa mereka juga menginginkan didapatkan ketetapan yang mantap tentang identitas diri dan atau, malahan perbaikan dari tempat mereka dalam hierarki sosial. Pencarian ini lebih intensif lagi karena pemerintah kolonial mempercepat secara bikinan, peralihan dalam kehidupan ekonomi dan administrasi, dan juga membuka kemungkinan untuk hal tersebut. Sekolah, pelebaran birokrasi dan penambahan jenis kerja adalah hal-hal yang selalu menggugah kemungkinan membekunya sistim status atau sistim penilaian terhadap peranan sosial.

Begitulah dengan mulai mencairnya tembok pembatas rasial dengan makin banyaknya orang Indonesia asli yang berhasil menduduki kedudukan yang lumayan dalam sistim birokrasi, bertambah banyaknya golongan menengah yang telah melepaskan diri dari kehidupan agraris, maka sistim status makin digoncang. Gerak mobilitas vertikal yang menaik mengharuskan terjadinya pelebaran lapisan atas, dan malah juga mengancam terjadinya semacam sirkulasi – orang yang menduduki lapisan tertentu haruslah diganti.

Situasi yang mulai agak mencair seperti ini – yang tentu saja belum merupakan kepastian bagi terjadinya perubahan yang fundamentil – bisa dilihat dalam kontex yang bersifat supra-desa, pada lingkungan yang umum dan pada tingkat desa. Keinginan pemerintah Hindia untuk mempertahankan masyarakat yang organik tetapi juga menjadikannya sebagai salahsatu mata rantai dari untaian administrasi mengharuskan terjadinya perobahan dalam struktur pemerintahan desa. Hal ini langsung menyangkut struktur masyarakat desa sebagai keseluruhan. Di-

tambah dengan peralihan sistim ekonomi dan proses urbanisasi, maka perubahan dalam masyarakat desa lebih mendalam lagi.

Perubahan sosial di zaman kolonial memang bersifat serba-dua dan tak selamanya menunjukkan arah konsisten. Di samping terjadinya proses pembaharuan strukturil juga tak kurang pentingnya proses pengabdian nilai-nilai. Di samping terjadinya usaha penyesuaian kulturil, antara aspirasi-aspirasi tradisionil dengan kenyataan politik, muncul pula gerakan penolakan terhadap situasi kolonial tersebut. Penolakan ini dilakukan, baik oleh yang ingin mempercepat proses timbulnya masyarakat yang baru, maupun oleh yang menginginkan kembalinya kemantapan lama. Tetapi dalam suasana begini pula unsur dinamisasi dalam masyarakat mulai menjalar dan gerak ke arah tercapainya integrasi yang lebih luas, yang tak terikat hanya kepada kesetiaan lama mulai lancar.

2. *Pelebaran Birokrasi Dan Indonesianisasi Dalam Kepegawaian*

Salahsatu akibat dari pengluasan dan pemantapan dari apa yang disebut *pax neerlandica* yalah perlunya tenaga-tenaga pribumi untuk mengerjakan beberapa keperluan administrasi pemerintahan. Pemimpin formil tradisionil, yang bertindak sebagai penguasa daerah saja sudah tak memadai lagi. Karena yang diperlukan pemerintah Belanda bukan hanya penyambung pemerintah, tetapi juga tenaga terlatih dalam berbagai jenis kegiatan, seperti kesehatan, kehutanan, dan malah juga kemiliteran dan kepolisian. Jadi diperlukan pula spesilisasi dalam pekerjaan.

Selama penetrasi politik dan ekonomi belum begitu jauh masalahnya tidaklah begitu sukar. Dengan memperkuat secara militer Korps Administrasi Eropah, suatu korps yang terikat erat dengan kategori ras, pemerintah yang berpusat di Batavia bisa memaksakan kehendaknya pada korps lain – penguasa tradisionil. Tetapi makin dalam penetrasi, maka makin diperlukan tenaga terlatih dalam pemerintahan modern, baik sebagai pelaksana dari pelayanan pemerintahan yang makin pelik, maupun sebagai perantara antara dua lingkungan penguasa tersebut. Untuk keperluan ini sekolah didirikan. Dengan sekolah kategori keahlian atau diploma diperkenalkan pula, disamping kelanjutannya kategori keturunan. Akibatnya yalah bahwa yang dijadikan pegawai tidaklah lagi semata-mata yang berasal dari kalangan bangsawan

atau keluarga dari penguasa tradisionil saja. Anak-anak orang kebanyakan mulai bisa memasuki lingkungan yang dulunya sangat jauh dari jangkauan orangtua mereka. Karena pekerjaan pegawai ini berarti terjadinya pendapatan yang lumayan dan terbebasnya dari kerja kasar maka tentu saja sangat menarik dan memikat. Tetapi makin memikatnya kerja jadi pegawai berarti makin keras persaingan yang harus dihadapi oleh anak-anak bangsawan untuk mendapatkan kedudukan yang mereka anggap sebagai hak istimewa mereka. Tidaklah aneh bahwa perasaan kegelisahan di kalangan bangsawan menjalar. "Anak-anak prijaji sadja soedah terlaloe banjak", kata patih Tulungagung dalam notanya pada tahun 1891,[27] "tambah beberapa anak orang ketjil, dimana-mana kantoor penoeh magang-magang jang tentoe harep djadi prijaji". Sebagian dari golongan atasan tradisionil ini malah mulai menjauhkan anaknya dari kemungkinan karier dalam kepegawaian pemerintahan.

Harapan dari magang-magang tersebut tentu saja beralasan. Bukan saja dengan kerja keras mereka bisa mendapatkan pengakuan sebagai pegawai penuh dan kenaikan pangkat, spesialisasi kerja juga memerlukan prestise yang cukup supaya bisa berfungsi dengan baik. Begitulah menjelang akhir abad 19 dan kemudian diuraikan lebih lanjut bahwa pada awal abad ini beberapa jenis kedudukan baru dianggap sebagai termasuk golongan priyayi.

Masalah kepriyayian akan dibicarakan kemudian, namun seperti telah disinggung pada bagian terdahulu, nyatalah bahwa pekerjaan dalam bidang kepegawaian memberi kesempatan untuk menjalani mobilitas vertikal. Kemungkinan ini tentu saja sangat dibatasi oleh adanya pembatasan rasial yang sangat mempersempit jalan bagi orang Indonesia asli untuk bisa menaiki tangga kepegawaian sampai tingkat Atas. Apalagi jika ingin menyeberang ke dalam lingkungan Eropa.

Begitulah umpamanya, menurut teori, siapa saja yang telah lulus dalam ujian untuk menjadi pegawai tinggi (grootambtenaars-examen) berhak mendapatkan pos dalam administrasi Eropa. Pada tahun 1904 R.A.A. Kusumo Judo, yang kemudian menjadi bupati Ponorogo dan salahseorang anggota *Volksraad* yang pertama, berhasil lulus dalam ujian tersebut. Ia segera mendapatkan kedudukan sebagai *aspirant controleur*. Tetapi

27 Partowidjojo, "Nota. Hal pengadjaran (Sekota) Djawa", *T.B.B.* V. (1891), *hal.* 366.

harapannya untuk melanjutkan karier dalam administrasi Eropa ini sia-sia belaka. Tak lama kemudian ia dipindahkan ke kantor kredit anak negeri – jadi dalam lingkungan administrasi bumiputra. Dan tak pernah lagi ia bisa mencicipi karier sebagai bagian dari administrasi Eropa. [28] Baginya, seperti juga bagi pegawai Indonesia lainnya, hanya tersedia tempat pada sektor bumiputera dari pemerintahan. Paling tinggi yang bisa mereka harapkan yalah menjadi bupati. Menjelang akhir pemerintahan Hindia Belanda beberapa perobahan terjadi. Pembentukan *raad* (dewan-dewan) daerah dan program apa yang disebut *ontvoogding*, betapapun pelan jalannya, adalah usaha ke arah terciptanya jembatan bagi dua lingkungan korps tersebut.

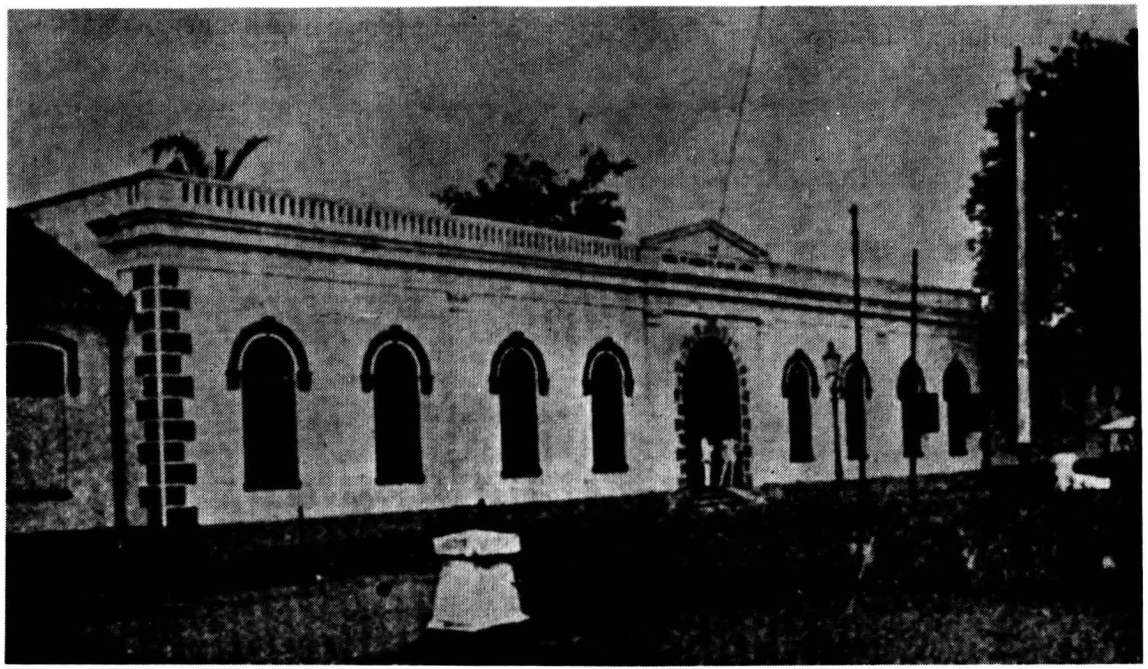
Sementara itu pelebaran birokrasipun terus berjalan. Proses pelebaran ini bertambah cepat, karena meluasnya tuntutan desentralisasi, baik dalam hubungan antara Hindia Belanda dengan negeri induk, maupun antara pemerintah Batavia dengan daerah dan antara Belanda dengan anak negeri. Desentralisasi dari negeri Belanda berarti kebebasan yang lebih banyak bagi penguasa kolonial, sedangkan desentralisasi daerah memberi kemungkinan untuk berbuat sesuai dengan situasi di daerah. Apapun politik yang mendasari tuntutan desentralisasi tersebut, tuntutan ini sejalan dengan keinginan kaum etis untuk mengadakan proses "Indianisasi" pengurusan Indonesia sejauh mungkin dilaksanakan oleh orang Indonesia sendiri. Pikiran ini makin tambah santer sejak berakhirnya Perang Dunia I secara politis pikiran ini melahirkan *Volksraad* dan kemudian disusul oleh *raad* daerah.

Secara administratif hal ini terpancar dengan lebih meningkatnya perbandingan jumlah antara pegawai orang Indonesia dengan orang Eropa lainnya. Dalam usaha penghematan maka menarik golongan Indonesia asli juga jauh lebih murah. Lebih murah dari golongan Eropa dan juga dari golongan Indo.[29] Proses "Indianisasi" ini lebih cepat jalannya setelah terjadinya zaman malaise di awal tahun 1930-an. Dengan tidak membedakan kedua kelompok pegawai, tabel 7 yang dipetik di bawah memperlihatkan kenaikan perbandingan dari tenaga Indonesia asli yang terjadi dalam waktu sepuluh tahun. Ternyata bahwa

---

28 Nagazumi, *The Dawn of Indonesian Nationalism*, hal. 22.

29 Robert van Niel, *The Emergence of Modern Indonesian Elite*, Brussell – 's Gravenhage, 1960, hal. 64.



Gedung Kebangkitan Nasional di Jakarta

Sumber : ***Gedenkboek der Stovia,***



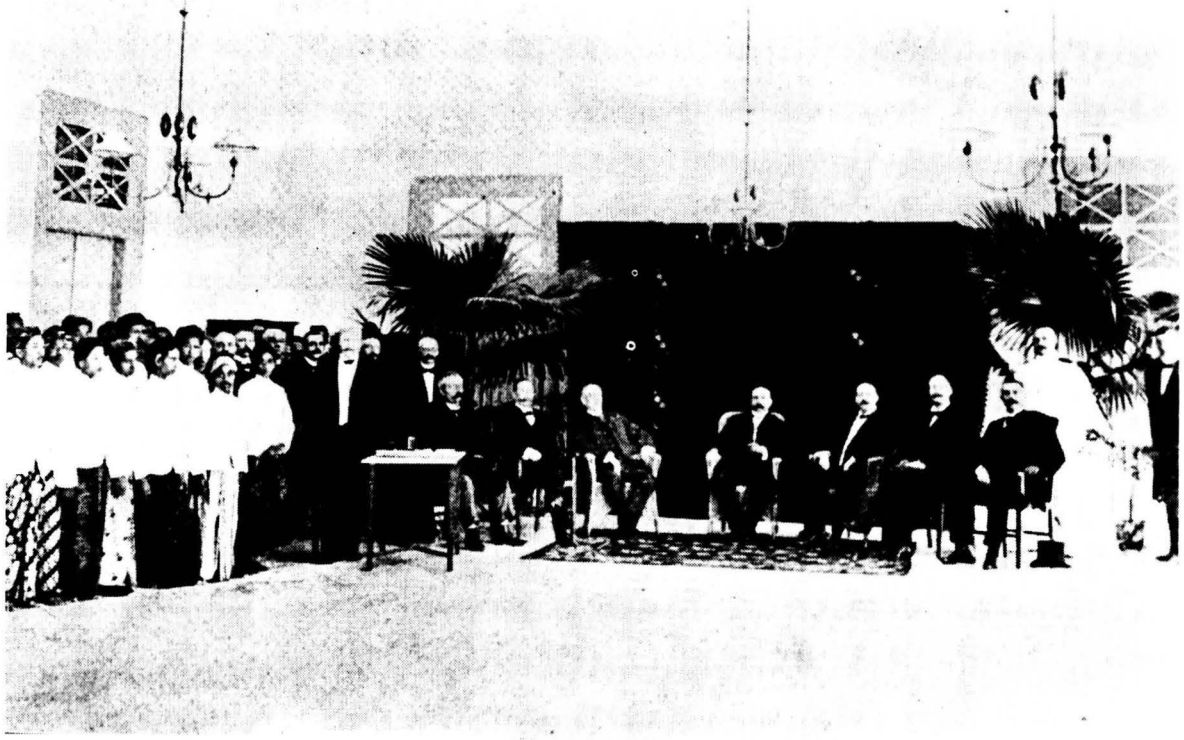
Soetomo dan teman-temannya para siswa Stovia tahun 1908 sedang praktikum anatomi

Sumber : Reproduksi "IDAYU".



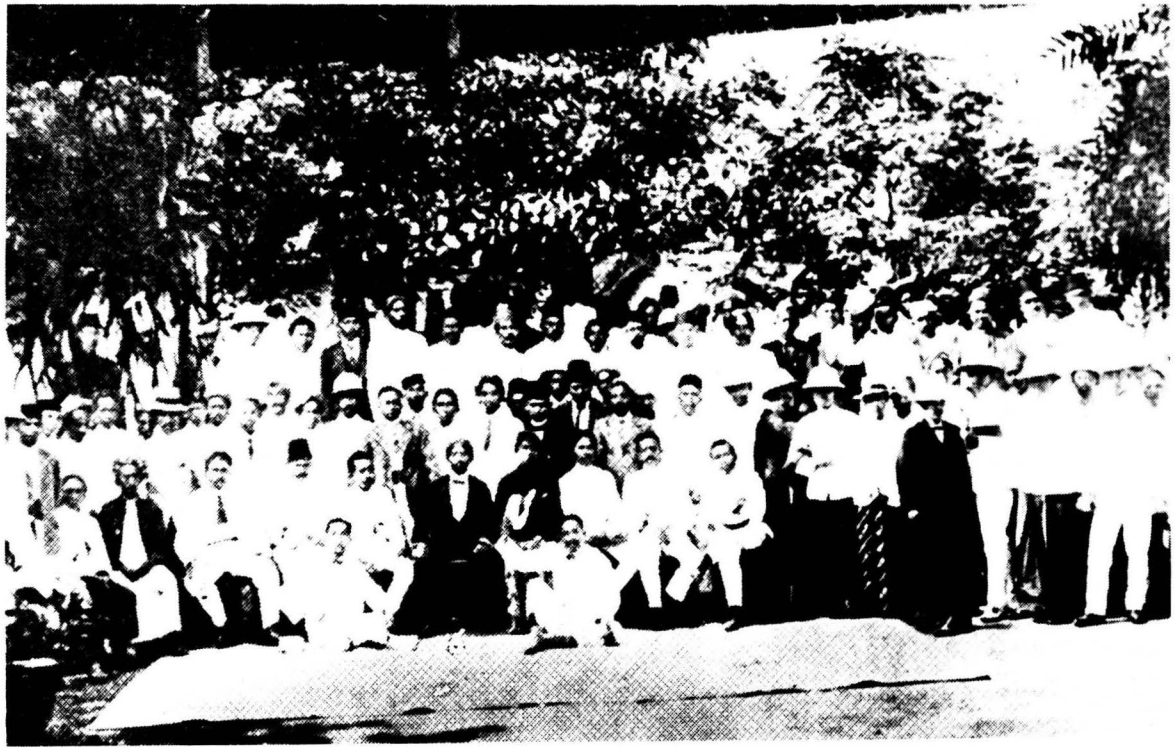
Pengurus Boedi Oetomo yang pertama (sebelum berhenti pada bulan November 1909). Duduk di depan dari kiri ke kanan : Soewarno II; Angka ; Soetomo, Ketua; Soewarno I; Goenawan.

Sumber : R. Soetomo, *Kenang-kenangan,*



Pembukaan Sekolah Hukum tahun 1909

Sumber : Gedenkboek Rechtsschool 1909 - 1928.



Beberapa pemimpin SI pada tahun 1911/1912, a.l. kelihatan HOS. Tjokroaminoto (no. 6.).

Sumber : *Lukisan Sedjarah.*



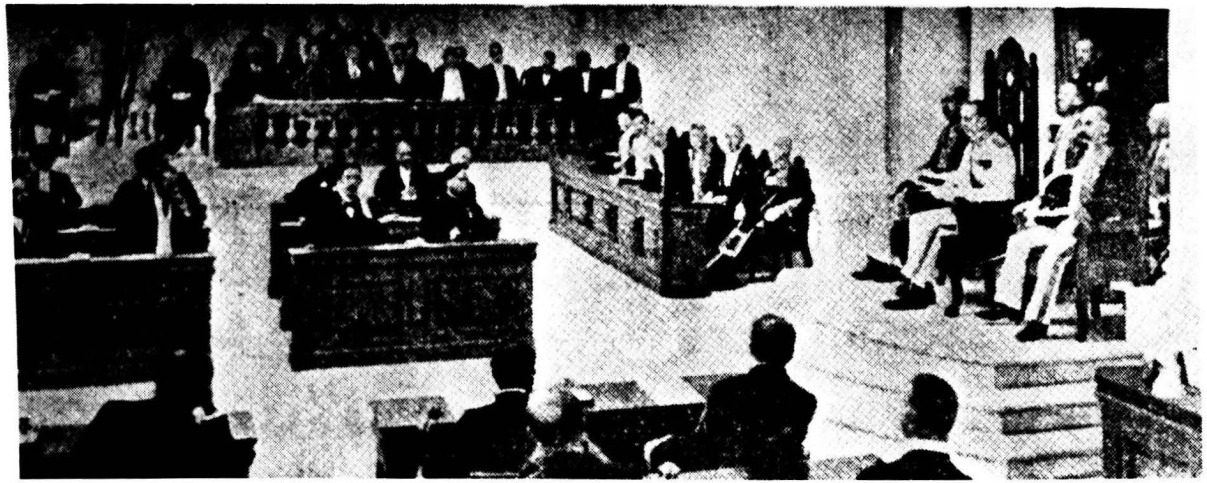
Tiga serangkai tokoh Indische Partij : Suwardi Surjaningrat, Douwes Dekker dan Dr Tjipto Mangunkusumo.

Sumber : *Lukisan Revolusi Rakyat Indonesia, 1945 1949.*



Salah satu demonstrasi Sarekat Islam dalam membela kepentingan rakyat. Gambar : Demonstrasi Sarekat Islam di Surabaya, 1916.

Sumber : *Lukisan Sedjarah.*



Suasana Pembukaan Volksraad tahun 1918 oleh Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum

Sumber : *Lukisan Sedjarah*



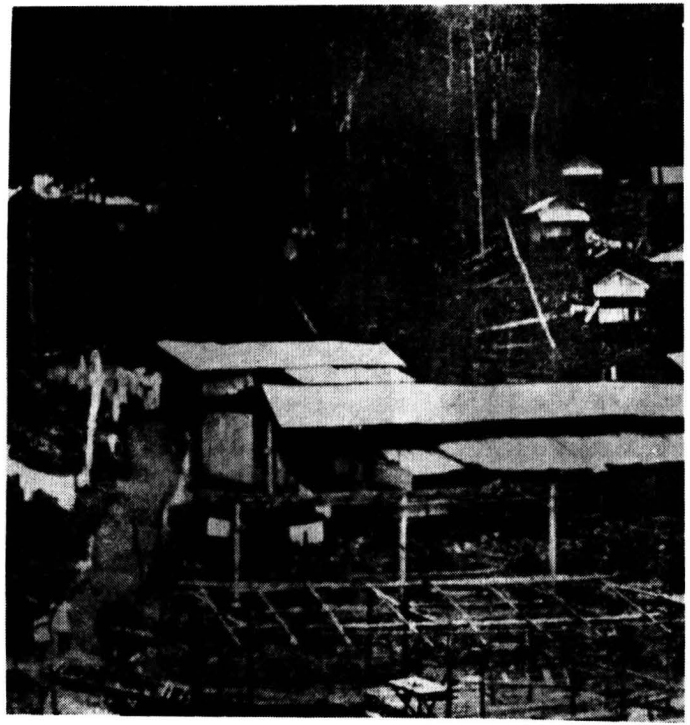
Bendera Taman Siswa Hijau dengan Merah-Putih di sudut sudah mulai berkibar, pendidikan Taman Siswa sudah mulai tertanam. Tetapi nama Taman Siswa belum dipakai (1921).

Sumber : *Buku Peringatan Taman-Siswa 30 Tahun*, 1922 – 1952.



Taman Siswa mula-mula berdiri dengan bagiannya Taman-Anak (Januari 1923). Tampak K.H. Dewantara memakai dasi, di tengah-tengah Nyi Hadjar Dewantara.

Sumber : *Buku Peringatan Taman Siswa 30 Tahun, 1922 – 1952.*



Tempat pembuangan Tanah Merah, Boven Digul, Irian
Sumber : *Asia Bergolak*



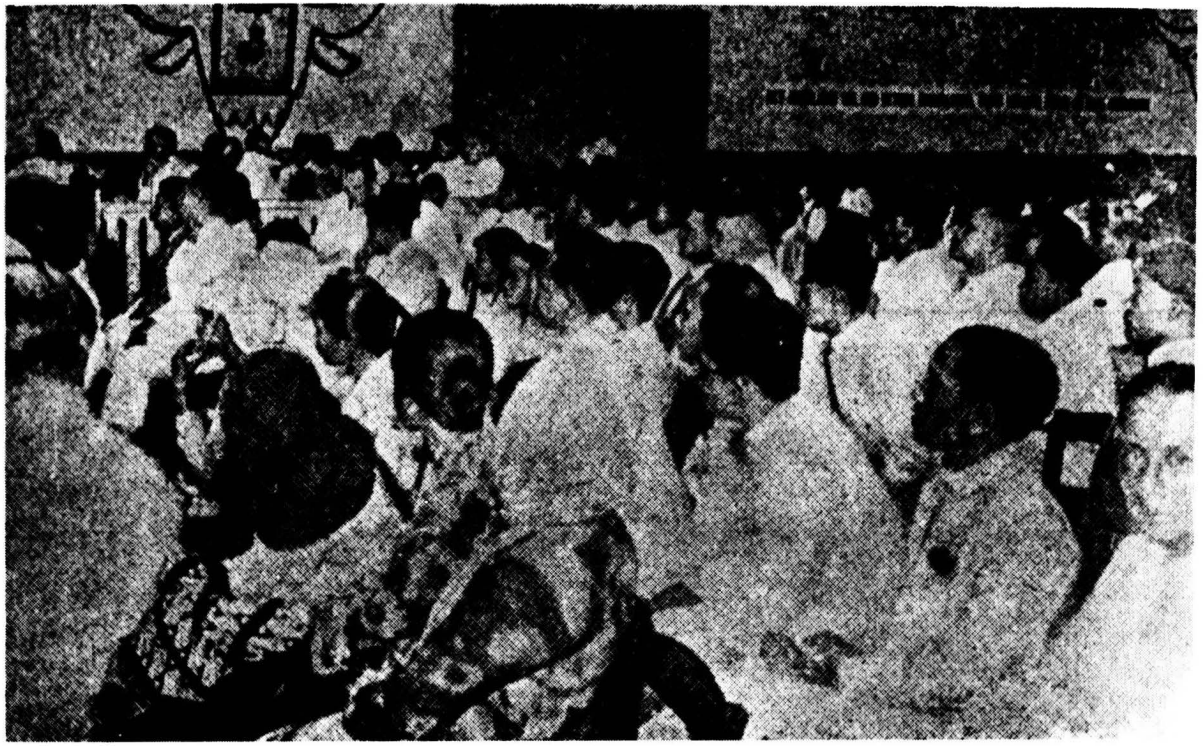
Para pemimpin Perhimpunan Indonesia. Dari kiri ke kanan : G. Mangunkusumo, Mohammad Hatta, I. Kusumah Sumantri, R. Sastromuljono dan R.M. Sartono.

Sumber : *Lukisan Revolusi Rakyat Indonesia*, 1945 – 1949.



Kongres Perempuan Pertama tahun 1928 di Yogyakarta.

Sumber : *Peringatan 30 tahun kesatuan pergerakan Wanita Indonesia (22 Desember 1928 – 22 Desember 1958).*



Salah satu rapat PNI tahun 1929. Pada dinding tampak gambar Pangeran Diponegoro.

Sumber : *Lukisan Sedjarah*



Ir. Sukarno cs. beserta pembela di depan pengadilan kolonial di Bandung sehubungan dengan peristiwa tuduhan PNI akan mengadakan pemberontakan.

Sumber : Koleksi Departemen Penerangan.



Beberapa pemimpin Indonesia yang berada di dalam tahanan tahun 1934 karena kegiatan mereka dalam mencapai Indonesia Merdeka. Tampak antara lain : Moh. Hatta.

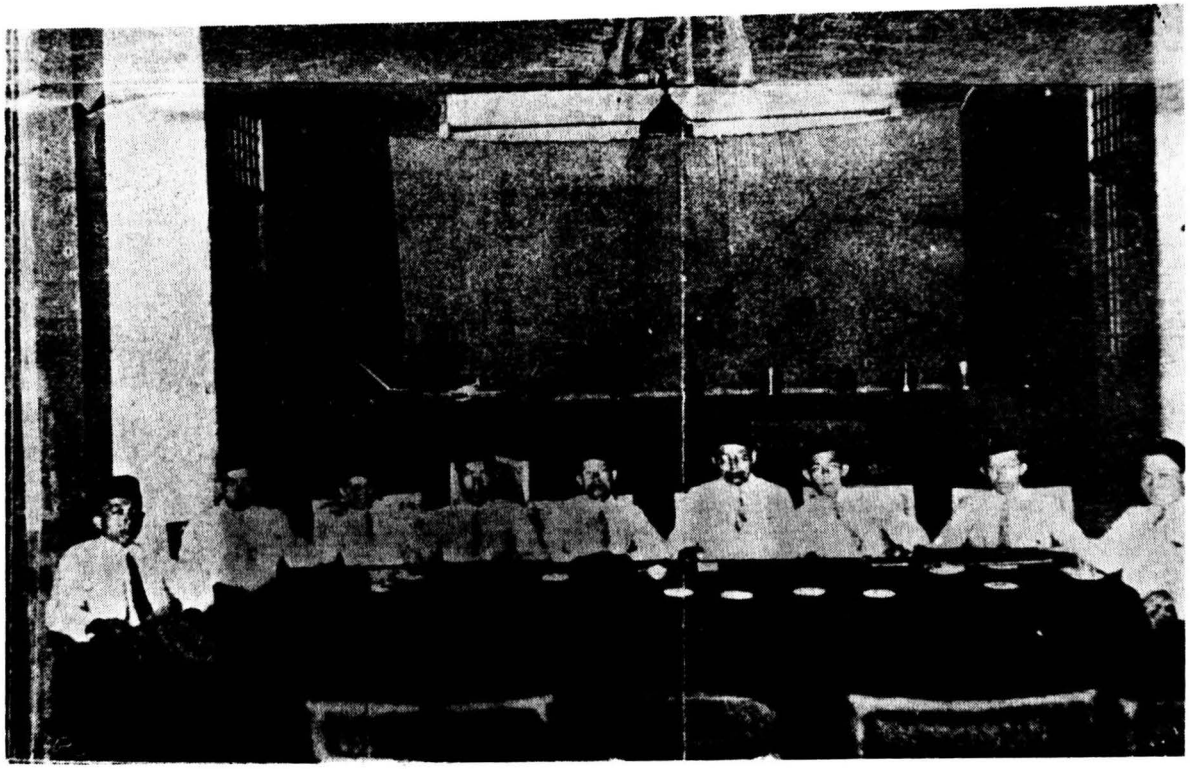
Sumber : Reproduksi "IDAYU"



Beberapa suratkabar abad 19 dan masa Pergerakan Nasional.

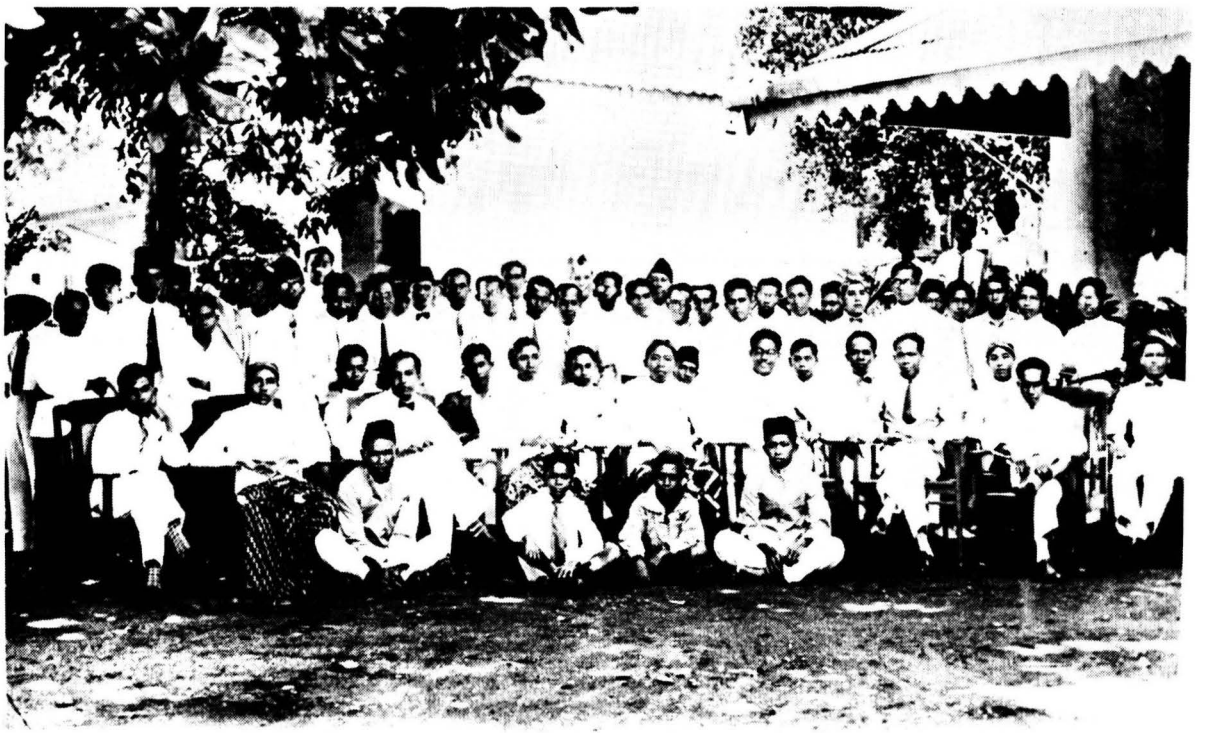


Beberapa suratkabar masa Pergerakan Nasional.



Panitia Kongres Pemuda Indonesia II pada bulan Oktober 1928 di Jakarta yang melahirkan Sumpah Pemuda

Sumber : Reproduksi "IDAYU"



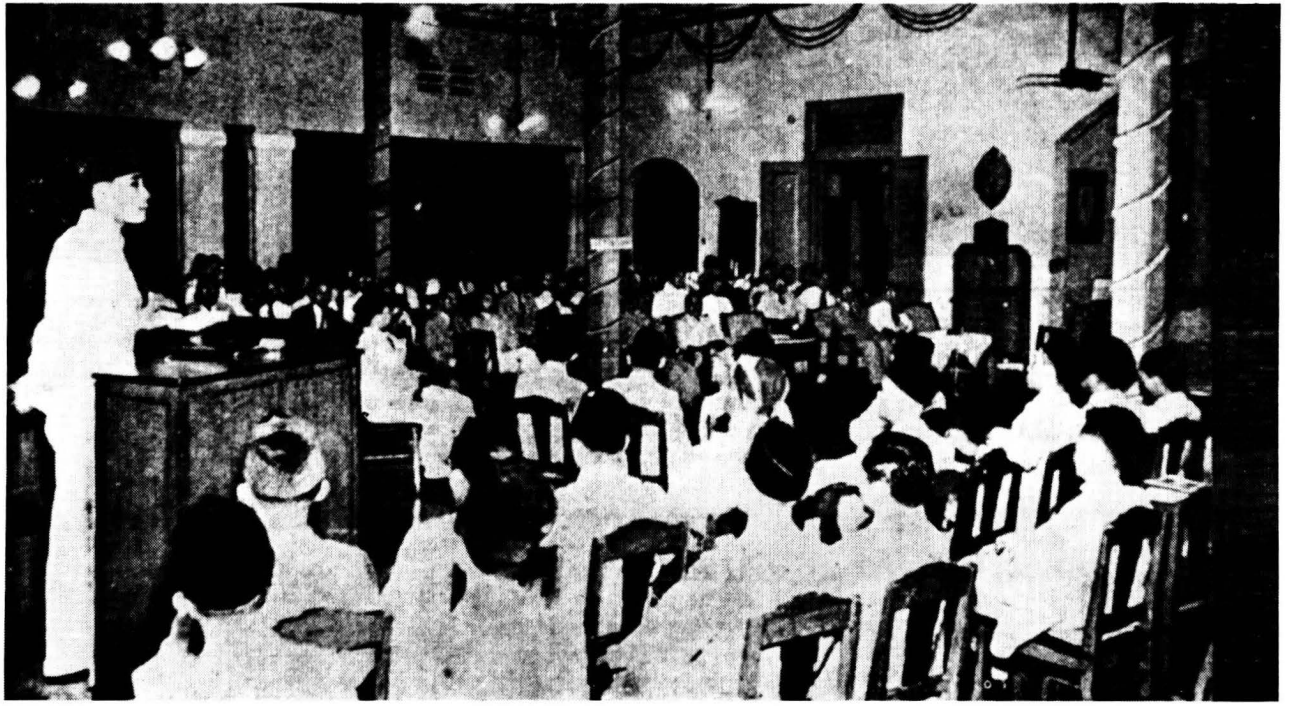
Peserta Kongres Pemuda Indonesia bulan Oktober 1928 di Jakarta

Sumber : Reproduksi "IDAYU".



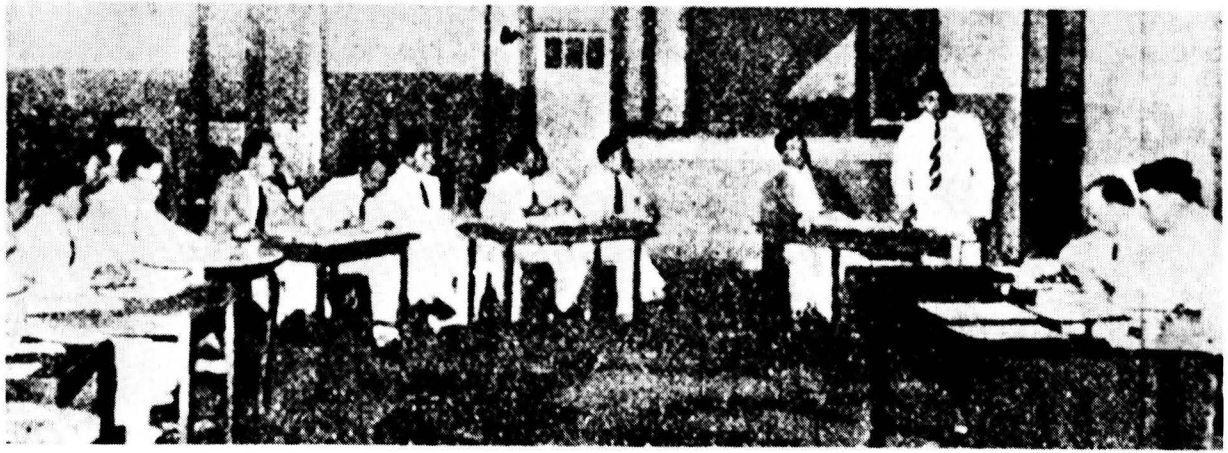
Salah satu rapat komite untuk memperjuangkan usul petisi Sutardjo. Gambar : Rapat di Palembang.

Sumber : *Lukisan Sedjarah.*



Kongres Bahasa pada tanggal 25 – 28 Juni 1938 di Surakarta yang membahas kemungkinan pemakaian bahasa Indonesia di segala bidang.

Sumber : *Lukisan Revolusi Rakyat Indonesia, 1945 – 1949*



Rapat pembentukan konsentrasi nasional tanggal 21 Mei 1939 di Jakarta, yang kemudian melahirkan Gabungan Politik Indonesia (Gapi).

Sumber :*Lukisan Revolusi Rakyat Indonesia 1945 – 1949*



Salah satu aksi GAPI untuk menuntut Indonesia ber-parlemen.

Sumber : *Lukisan Revolusi Rakyat Indonesia 1945 – 1949*

tenaga administratif secara prosentase mengalami kenaikan yang cepat. Kemudian disusul oleh administratif teknis.

Tabel 7
Perbandingan prosentase staf administratif menurut golongan penduduk, antara 1928 dan 1938.

Klasifikasi Kerja	1928			1938		
	Eropa	Indonesia	Timur Asing	Eropa	Indonesia	Timur Asing
Teknis	84,77	14,38	0,85	77,14	20,12	2,74
Administratif teknis	77,06	22,28	0,66	55,81	41,98	2,21
Keuangan	80,45	18,8	0,75	67,08	36,46	2,46
Administratif	93,66	5,1	1,24	65,18	32,16	2,66
Pengawasan	92,46	7,33	0,21	83,97	15,68	0,21

Sumber: Wertheim, *Indonesian Society*, hal.149.

Perbandingan prosentase ini memang tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya, namun bisa menjelaskan proses yang terjadi. Secara absolut hal ini belumlah begitu mengagumkan karena jumlah keseluruhan pegawai dibanding dengan jumlah penduduk sangat tidak berimbang. Kecilnya angka perbandingan ini menunjukkan pula betapa masih sangat terbatasnya pelayanan yang bisa diberikan oleh pemerintah kolonial. Apalagi kalau dihitung jumlah orang Indonesia yang bisa menempati skala gaji tertinggi. Pada tahun 1932 tercatat 85.708 orang pegawai bangsa Indonesia, yang berarti 85% dari seluruh korps pegawai. Tetapi dari jumlah ini hanyalah 277 orang saja yang termasuk skala gaji tinggi (A), sedangkan yang masuk skala gaji menengah (B) berjumlah 6054 orang. Ini berarti bahwa lebih dari 90 persen dari jumlah semua adalah pegawai rendah saja (79.377 orang). Sebaliknya dari jumlah 17.034 orang yang berkebangsaan Eropa, maka 7.951 orang atau lebih dari 40 persen adalah pegawai tinggi dan hanya 322 orang saja yang masuk kategori pegawai rendah. Sedang yang lainnya (8.761) adalah pegawai menengah.[30] Dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang telah berjumlah 50 juta lebih maka angka 277 orang yang termasuk pegawai tinggi cukup menunjukkan betapa langkanya kemungkinan yang

30 P.J. Gerke, "De Personeelsvoorziening" dalam H. Bandet dan I. J. Brugrams (eds), *Balans van Beleid*. Assen: Van Gorkum & Comp. N.V., 1961, hal. 183.

bisa dicapai dalam situasi kolonial bagi anak jajahan. Kesan lain dari angka tersebut di atas juga menunjukkan bahwa walaupun secara teoritis kesempatan tersedia, namun tembok pembatas rasial cukup kuat untuk bisa ditembus begitu saja. Karena angka-angka di atas berdasarkan besar-kecilnya gaji, maka kemungkinan seorang Belanda yang mempunyai tanggungjawab administratif yang lebih kecil mendapat gaji yang lebih besar dari pegawai bumiputra juga bisa diperhitungkan.

Tabel 8
Susunan kepegawaian berdasarkan golongan penduduk dalam prosentase (1938)

Golongan penduduk	Pegawai rendah	Pegawai menengah rendah	Pegawai menengah tinggi	Pegawai tinggi
	1	2	3	4
Eropa	0,6	33,3	57,6	92,2
Indonesia	98,9	60,6	38,0	6,4
Indonesia yang telah dipersamakan dengan Eropa	0,2	3,4	2,0	0,5
Timur Asing	0,3	2,7	2,3	0,8
Jumlah	100	100	100	100

Struktur kepegawaian akan lebih jelas lagi jika dilihat perimbangan kedudukan dari golongan-golongan penduduk. Pada tabel 8 kelihatan bahwa dalam kelompok pegawai tinggi golongan Eropa memegang dominasi mutlak, sedangkan pada kelompok pegawai rendah, golongan Indonesia adalah mayoritas sangat besar. Makin tinggi gaji maka makin kecil prosentase golongan anak negeri, dan makin rendah gaji dan kedudukan makin besar pula prosentase mereka. Golongan-golongan ini, baik secara jumlah dan prosentase maupun politis, memang tidak begitu memegang peranan penting.

Salahsatu hal yang menarik juga dalam tabel ini yalah bahwa walaupun angka pasti dari jumlah golongan Indonesia yang telah "diperBelanda" tak dinyatakan dengan jelas tetapi cukup memberi indikasi bahwa mereka yang berada dalam kolom dua dan

tiga lebih besar jumlahnya. Sebagai tamatan sekolah "Belanda" yang telah biasa berbicara dalam bahasa Belanda, mereka merasa dengan naturalisasi pintu karier mereka terbuka lebih baik. Ini adalah contoh yang cukup jelas dari akibat psikologis yang bisa ditimbulkan oleh situasi kolonial yang menimbulkan beberapa kemungkinan penilaian yang tak selamanya saling berhubungan.

Sebab itu perlulah pula ditanyakan apa artinya pelebaran birokrasi dan proses "Indianisasi", dalam kontex masyarakat sebagai keseluruhan ? Apakah akibatnya terhadap kelas aristokrat-birokrat lama ? Dan bagaimana pula dengan penguasa-penguasa tradisionil di daerah yang tidak mempunyai tradisi aristokrasi birokrat ? Karena salahsatu syarat terpenting untuk memasuki alam birokrasi baru tersebut adalah pendidikan dan pengajaran Barat, bagaimana pula dengan kelompok, yang tidak tergabung ke dalam sistim kolonial ?

3. *Status Sosial : Lingkungan Supra-desa*

Adalah hal yang lumrah bahwa seseorang yang sanggup menyebabkan orang lain untuk melakukan sesuatu yang semestinya tidak akan dikerjakannya maka orang yang pertama tersebut mempunyai kekuasaan terhadap orang yang kedua. Bisa pula diduga bahwa umumnya orang yang kedua tersebut melakukannya dengan harapan bahwa apa yang diinginkannya juga akan dipenuhi oleh yang pertama. Diakui bahwa yang pertama lebih berkuasa dan mempunyai kedudukan lebih tinggi – ia bisa memerintahkan sesuatu – namun yang kedua juga punya hak untuk mengharapkan, walaupun ia lebih rendah, lebih lemah. Situasi seperti ini memberi dasar kesahan dari pelaksanaan kekuasaan. Lukisan di atas adalah suatu model, tetapi juga merupakan suatu gambaran yang terpancar dari tradisi politik kita. Antara kekuasaan yang sah dan status terdapat kesejajaran, yang didukung oleh manifestasi kekuataan yang telah dilembagakan dan ikatan serta simbol yang selalu di pupuk.

Keadaannya tentu jadi lain jika masyarakat seperti ini harus menghadapi kekuatan dari luar yang memaksakan kehadiran dirinya serta keharusan berlakunya keinginannya. Begitulah yang dialami masyarakat kita di zaman kolonial. Perwujudan kekuasaan dan kelanjutan dasar dari status sosial menjadi sasaran dari politik

pemerintah kolonial yang tak selalu konsisten. Struktur kekuasaan tradisionil harus selalu menjadi sasaran dari pelaksanaan peralihan pemikiran politik dan filsafat kolonial. Bahwa koloni haruslah memberi hasil bagi negara induk adalah pasti, tetapi yang menjadi masalah ialah bagaimana caranya. Dan bahwa keterlibatan yang terbatas dalam urusan pemerintahan masyarakat koloni adalah penting – biaya akan terlalu besar jika terlalu melibatkan diri – tetapi menjadi soal yalah bagaimana bentuk dari keterlibatan tersebut ?

Mestikah penguasa tradisionil diperkuat supaya lebih mudah bagi mereka untuk melaksanakan keinginan-keinginan pemerintah, seperti yang dianjurkan oleh para konservatif ? Ataukah, seperti anjuran para liberal, kedudukan rakyat banyak dinaikkan dalam berhubungan dengan penguasa tradisionil mereka ? Keduanya dilakukan saling bergantian oleh pemerintah kolonial, sesuai dengan kekuatan pengaruh ideologis yang berkuasa dalam penentuan politik kolonial. Dan keduanya berakibatkan terjadinya krisis kekuasaan dan harkat atau prestige dari penguasa tradisionil. Politik pertama berarti mengingkari secara kasar konsensus yang telah berurat berakar tentang manifestasi dan kadar kekuasaan-kekuasaan dimunculkan sebagai hal yang bersifat memalukan, bukannya yang terhormat. Sedangkan yang kedua berarti menanggalkan sendi-sendi legitimasi dari penguasa tradisionil. Dan bila antara manifestasi kekuasaan dari pemerintah kolonial tidak sempurna dicernakan oleh penguasa tradisionil, terjadilah penambahan sumber kekuasaan. Sumber-sumber kekuasaan yang berbeda-beda – yang sah secara tradisi dan yang punya kekuatan mengikat secara riil – menimbulkan pula konflik dari kesetiaan. Hal ini berarti pula penambahan faktor yang melemahkan daya berlakunya kekuasaan penguasa tradisionil.

Begitulah selama abad ke 19 berjenis politik yang saling bergantian berakibatkan kemerosotan kedudukan dan kekuasaan golongan bupati di Jawa. Menjelang akhir abad 19 golongan ini bukan saja kehilangan banyak hak-hak istimewa mereka, seperti hak pancer dan penguasaan tanah, tetapi juga simbol kemegahan. Mereka makin terikat pada pemerintah, hingga terjadilah semacam transformasi kedudukan: dari penguasa tradisionil, yang bersifat aristokratis dan turun-temurun, menjadi pegawai, orang gajian saja. Jadilah mereka, menurut Furnivall, dengan agak

berlebih-lebihan, semacam "hiasan" [31] belaka dalam struktur kekuasaan kolonial.

Sebagai bagian dari sistim politik yang bersifat patrimonial maka para bupati atau penguasa lokal adalah wakil dan kelanjutan dari kekuasaan raja. Mereka adalah *manisteriales* (dengan memakai istilah yang diperkenalkan Schrieke) atau birokrat dalam arti bahwa kehadiran serta kesahan mereka seluruhnya tergantung pada raja-raja yang mempunyai kekuasaan charismatis. Walaupun dalam kenyataannya para bupati sering berasal dari keluarga penguasa lokal yang turun-temurun, namun bila raja mau, hak mereka bisa dicabut dan kedudukan mereka diganti dengan yang lain. Ikatan yang berlanjut antara kraton dengan aristokrasi daerah ini tak lain dari pada kesetiaan yang telah dilembagakan. Sebagai kelanjutan dari kekuasaan kraton di daerah maka para bupati mendapatkan hak-hak khusus serta simbol-simbol yang mengingatkan akan ikatannya dengan raja, yakni sumber segala kekuasaan. Selama terjadinya proses penetrasi yang lebih mendalam dari kekuatan politik Batavia maka terjadilah pelonggaran ikatan operasionil antara raja, pemegang legitimasi, dengan para bupatinya. Kemerosotan politik yang dialami oleh kraton diiringi oleh krisis dari kedudukan para bupati. Dengan meletakkan diri sebagai "kakak", kemudian "ayah", dari sumber kekuasaan, yaitu raja, maka Belanda bukan saja menggoyahkan dasar-dasar sakral dari struktur politik tradisionil, tetapi juga memungkinkannya untuk memakai para bupati sebagai pelaksana aspirasi politik dan ekonominya. Ditambah dengan pengungkaian hak-hak istimewa yang selama ini terlekat pada para bupati maka secara praktis mereka di ubah menjadi pegawai saja. Keadaannya makin bertambah parah dengan makin diperlakukannya efisiensi dalam pemerintahan yang memerlukan ketrampilan dan spesialisasi. Faktor keturunan kemudian harus pula dipermasalahkan dengan sungguh-sungguh. (Hal ini telah diuraikan dengan panjang-lebar dan baik oleh B. Schrieke, "The Native Rullers" dalam bukunya *Indonesian Sociological Studies*, Part One). Sebab sering yang berhak menurut ketentuan yang askriptif, yang turun-temurun, tidak memenuhi syarat bagi terlaksananya efisiensi. Dengan sekolah, seperti telah diuraikan di atas, terbuka kesempatan bagi masuknya darah baru.

---

31 J. S. Furnivall, *op. cit.*, hal. 299.

Suasana seperti inilah yang menjadi keluhan dari para bupati dan kaum bangsawan lokal lainnya. Menyusupnya darah baru ke dalam tubuh birokrasi aristokratis dianggap menyalahi adat dan sikap yang samasekali tak memperdulikan hak serta kehormatan tradisionil yang ditunjukkan oleh pejabat-pejabat Eropa dan juga oleh politik pemerintah, seperti umpamanya dengan ketentuan dari Hormat circulaire (1913) – menjadikan mereka terlepas dari rakyat dan dari evaluasi yang wajar dari rakyat. Instruksi rahasia pemerintah kepada pejabat Eropah supaya lebih memperlihatkan sikap yang wajar kepada para birokrat aristokratis lama tersebut samasekali tidak menolong krisis yang dialami.[32] Tetapi krisis ini, yang sepintas lalu bisa dianggap sebagai proses defeodalisasi masyarakat, menimbulkan kemungkinan baru bagi kelas pegawai bawahan – orang yang baru masuk ke dalam arena kebirokrasi-an. Mereka dan keturunan mereka melihat kemungkinan yang lebih besar untuk menaiki tangga sosial. Pada awal abad 20 gerak yang berlawanan seakan-akan terjadi; kalangan bupati lama mulai mendidik anaknya untuk karier di luar kepamongan, sedangkan priyayi rendah memperjuangkan anak mereka untuk menaiki tangga kepamongan.[33]

Orang baru ini segera menyesuaikan diri dengan cara kepriyayian yang berlandaskan nilai-nilai lama. Menyesuaikan diri bukan saja untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya kebosanan dari dalam tetapi, lebih penting lagi, untuk memberi arti sesungguhnya dari mobilitas yang telah diliwati. Pengabdian nilai-nilai yang mendukung kepriyayian lama merupakan taruhan bagi keampuhan dari kehadiran mereka yang baru. Keinginan untuk menggabungkan diri ke dalam kelas yang sedang mengalami krisis ini menunjukkan suatu gejala dari masyarakat yang sedang mengalami peralihan, ketika antara prestige dan keinginan untuk ikutserta tidak terjadi kesejajaran. Prestige yang sedang merosot seperti dialami oleh bupati dan bangsawan lama, malah menimbulkan kegairahan priyayi baru dan rendahan untuk belajar demi karier dalam kepriyayian, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kepriyayian. Pengabdian nilai dan keinginan untuk menggabungkan diri ini memberi kesan adanya jurang antara gaya dan substansi – gaya yang selalu diulas dan substansi

32 van Niel, *op. cit.*, hal. 45 – 46.
33 Nagazumi, *op. cit.*, hal. 22 – 26.

Perpustakaan
Direktorat Sejarah
dan
Purbakala

kekuasaan yang sedang meluncur. Begitulah sehingga orang tidak puas hanya dengan terbukanya satu jalan, yaitu sekolah dan pendidikan, tetapi juga memanfaatkan segala kemungkinan yang ada untuk mendapatkan simbol yang berupa gelar-gelar kebangsawanan. Suatu praktek yang demikian meluasnya hingga terpaksa diadakan pemberesan secara administratif. Dan sementara itu penghalusan tangga-tangga hierarki tetap berjalan. Dalam dunia kepegawaian yang aristokratis dan diper-aristokrasi-kan jenjang kedudukan, sebagai akibat dari kelanjutan spesialisasi, bertambah banyak.

Gejala sosial-politik yang menggoyahkan demarkasi stratifikasi dan struktur kekuasaan tidak hanya terjadi di pulau Jawa saja. Dengan jangkauan pengaruh yang berbeda-beda dan terjadi dalam jangka waktu yang lebih pendek dari pada di Jawa, ambivalensi yang ditimbulkan oleh politik Belanda juga kelihatan. Secara teoritis sebagian besar daerah luar Jawa diperintah secara tak langsung atau *indirect*.[34] Maksudnya yalah membiarkan sejauh mungkin berlanjutnya struktur kekuasaan, pelapisan sosial serta cara hidup tradisionil. Pemerintah kolonial, menurut teorinya, hanyalah menjadi penasehat dan pengawas. Tetapi kenyataannya daerah-daerah tersebut tidak terlepas dari cengkeraman politik kolonial. *Korte verklaring* atau plakat pendek, yang maksudnya hanyalah sekedar pengakuan atas kedaulatan Batavia, makin lama makin menjadi penyerahan diri mentah-mentah.

Begitulah umpamanya yang terjadi di Aceh dan Sumatera Timur. Aceh dengan resmi dibagi atas dua bagian: daerah *indirect* yang terdiri dari lebih kurang seratus *"zelfbestuur"* atau *landschap* dan daerah *direct*, yang terdiri atas beberapa puluh pula daerah adat dan administratif.[35] Sedangkan Sumatera Timur terdiri dari tiga puluh empat daerah-daerah -- yang terbesar yalah Deli, Serdang dan Langkat.[36]

Untuk menetapkan daerah jurisdiksi atau *zelfbestuur* diperintah oleh *zelfbestuurder*, yang dalam tradisi Aceh disebut

---

34 Tentang masalah ini, lihat buku klassik dari Rupert Emerson, *Malaysia: A study in Direct and Indirect Rule*, terbitan pertama 1937, University of Malaya Press, Kuala Lumpur, 1964.

35 Dr. A. J. Piekaar, *Atjeh en de Oorlog met Japan*, W. van Hoeve, Den Haag – Bandung, 1949, hal. 7.

36 Riddler, *De Invlued van westersche cultures of de autochtone bevolleing ter Oostlurst van Sumatra*, 1939.

Uleëbalang, tentu saja sifat mengalir dari kesetiaan gampong atau desa harus dihentikan. Uléebalang tidak lagi dimungkinkan untuk memperluas daerah pengaruhnya — seperti terjadi dulu — atau daerah jurisdiksinya. Sebaliknya ia juga dilindungi dari kemungkinan kehilangan daerah.

Kelihatannya bukanlah menjadi suatu halangan besar untuk menggabungkan gampong-gampong ke dalam satu unit teritorial yang dikuasai oleh seorang uleëbalang. kedudulan uleëbalang hanyalah kelanjutan saja dari tradisi. Tetapi uleëbalang secara tradisionil terpaut erat pula dengan lembaga kesultanan. Sementara sultan yang tak pernah merupakan raja mutlak, tergantung pada dukungan politik, militer, dan terutama, ekonomi dari para uleëbalang, uleëbalang juga memerlukan pengakuan dari Sultan. Sejak berakhirnya perang Aceh-Belanda, kesultanan praktis dihapuskan, sedangkan lembaga tersebut tetap dianggap sakral.[37] Dengan begini salahsatu hal yang fundamentil yaitu *sarakata* dari Sultan, telah terhapus. Sarakata yang mereka terima dari Sultan lebih bersifat kontrak dalam pengurusan perdagangan bukannya sumber legitimasi kekuasaan politik. Jika penguasaan ini berakibatkan politis dan militer, maka keduanya sebenarnya adalah perluasan dari penguasaan dagang. dan bukan sebaliknya.[38] Uleëbalang terutama berfungsi sebagai perantara dalam perdagangan yang diproduksi oleh rakyat di pedesaan atau gampong. Maka pengangkatan uleëbalang sebagai zelfbestuurder yang menguasai daerah, yang dulu hanyalah berupa wilayah pengaruh saja, dapatlah dianggap sebagai penumpukan kekuasaan yang berasal dari luar tradisi. Politik Belanda, yang mula-mula direncanakan oleh Snouck Hurgronje, merobah secara drastis sifat hubungan antara uleëbalang dengan gampong-gampong. Tuntutan politis uleëbalang bukan lagi sesuatu yang menjalar dari penguasaan ekonomis, tetapi bersumber dari kekuasaan itu sendiri. Jadi pernyataan bahwa pemerintahan seluruhnya berada ditangan *adatrechtelijkekastee*,[39] haruslah diterima dari sudut pengertian "kaste" dan bukannya corak atau dasar hukum adat yang mendasari kekuasaan tersebut.

Penumpukan kekuasaan ini tidak saja menyebabkan terjadi-

37 Dr. Alfian, *Islamic Modernism in Indonesian Polities : The Muhammadijah Movement during the Duth Colonial Period (1912 – 1942)*, Madison, Wisconsin, 1969.

38 James T. Siegel, *The Rope of God*, University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1969, hal. 36 - 47.

39 Dr. A. J. Piekaar, *op.cit.*, hal. 9.

nya perkembangan yang tidak sejalan antara *landschap-landschap* di Aceh – semuanya tergantung kepada vitalitas dan perhatian zelfbestuurder tetapi juga menimbulkan semacam ketidak-pastian dalam kehidupam gampong. yang bertolak dari anggapan adanya harmoni antara agama dan adat. *Keuthji' embah teungku ma'*, kepala gampong (keuthji) adalah ayah. sedangkan pemangku agama (teungku meunasah) adalah ibu. Ke-uleëbalang-an yang ditonjolkan Belanda bersumber pada suatu asumsi bahwa ulama dan pemegang kekuasaan duniawi ada persaingan yang fundamen-til. Sebab itu dapat diduga bahwa dalam menghadapi hubungan antara teungku meunasah dan keuthji yang harus sejajar dan saling berkonsultasi, para zelfbestuurder didorong untuk mero-bah sifat hubungan menjadi suatu hal yang bersifat *patron-client.* Salahsatu akibat dari hal ini yalah meruncingnya antithese antara ulama-uleëbalang, yang menduduki fungsi seperti penghulu di Jawa, dengan ulama-ulama yang independent yang menginginkan terjadinya kembali suatu keseimbangan. Selagi seorang uleëbalang setia kepada pemerintah, kedudukannya samasekali tidak ter-ganggu. Tetapi dasar legitimasinya makin hari makin goyah. Bukan saja makin menonjolnya diskrepansi antara tuntutan ke-Aceh-an yang selalu dikembangkan, yang samasekali telah dirobah coraknya, tetapi juga kemungkinan-kemungkinan yang didapat klas uleëbalang menimbulkan di kalangan mereka para inteligentsia. Dari kalangan ini pula proses demokratisasi ke-uleëbalang-an akan mulai menjalar.

Kedudukan raja-raja kecil di Sumatera Utara tentu saja bertambah kuat dengan adanya dukungan politik dan ekonomi – terutama dengan konsesi-konsesi yang mereka berikan dari pemerintah dan maskapai-maskapai perkebunan. Seperti hanya dengan landschap-landschap di Aceh, perkembangan daerah-daerah zelfbestuur tersebut sangat banyak pula tergantung dari penguasa-penguasa mereka. Anakronisme terjadi karena ke-engganan zelfbestuurder, seperti sultan-sultan di tanah se-menanjung, untuk membiarkan perubahan-perubahan yang ber-mula dari bawah yang mungkin dianggap akan menggoyahkan kekuasaan. Namun krisis terjadi juga, karena perkebunan besar tidak saja membawa janji-janji material tetapi juga melanjutkan penetrasi pengaruh ekonomi dan menarik orang-orang dari luar daerah. Maka jadilah daerah di sekitar pusat perkebunan merupa-kan daerah para migrant, yang jumlahnya makin mengalahkan

penduduk asli. Menjelang tahun 1930 penduduk asli di Langkat hanya 35. sedangkan di Deli-Serdang tak lebih dari 28, dari penduduk bumiputra. Jika saja para migrant tersebut datang secara spontan dan tanpa dibebani oleh tuntutan adat yang mereka bawa dari asal masalahnya tidak begitu sukar. Bagaimanapun juga mereka harus berada di bawah perlindungan penguasa pribumi dalam hidup sehari-hari, sedangkan di perkebunan mereka seluruhnya tunduk kepada ketentuan perkebunan.

Pada zelfbestuurder dan raja kecil bukanlah birokrat-aristokratis, yang memberi keuntungan bagi masuknya *homines-novi* (orang baru). Jika dulu para uleëbalang tak terikat dalam hubungan patrimonial dengan sultan – mereka menyangkutkan kesetiaan tertinggi hanyalah pada diri-sendiri, sedangkan ikatan dengan sultan lebih bersifat persekutuan berdasarkan kepentingan sakral dan ekonomis-politik – maka sekarang adalah penguasa daerah. yang askritif. yang disokong dan diawasi oleh kekuatan asing. Raja atau sultan di Sumatra Timur adalah penguasa lokal, yang dulunya sibuk berperang satu-sama-lain (lihat umpamanya lukisan dari John Anderson, yang mengunjungi Sumatra Timur pada dasawarsa kedua abad 19 dalam bukunya *East Coast of Sumatra*) dan pada daerah masing-masing terlihat pula dalam ketidak stabilan kerajaan. Baik uleëbalang atau zelfbestuurder maupun raja kecil tersebut secara institusionil tidak digugah oleh kemasukan darah baru. Mereka memerintah melulu berdasarkan keturunan. Karena itu yang terancam sebagai akibat diperlukannya efisiensi dan spesialisasi yalah pembantu yang mengitari mereka. Para penguasa lokal tersebut harus didampingi oleh yang mempunyai kesanggupan administratif. Namun dengan keharusan ini maka hak mereka untuk menunjuk pembantu dikurangi, dan bukan itu saja, para pembantu tersebut harus lebih banyak mendengarkan petunjuk dari penasehat dan pengawas, yaitu *controleur* dan *resident*.

Walaupun dalam bentuk yang berbeda dengan bupati di Jawa kemerosotan wibawa dan kemampuan untuk memanifestasikan anggapan dasar tentang kekuasaan juga terjadi pada penguasa lokal di luar Jawa. Dan seperti di Jawa pula maka kemerosotan prestige samasekali tidak mengurangi keinginan untuk ikutserta ke dalamnya. Demikianlah terjadi penjamuran pemakaian gelar-gelar kebangsawanan. Berkurangnya kemampuan untuk mewujudkan arti kekuasaan yang terletak pada lembaga tradisionil

yang mereka duduki, memberi kemungkinan untuk orang luar untuk mencicipi prestige yang bersifat simbolis. Kedudukan dalam tubuh birokrasi-kolonial, kekayaan, serta kehampiran pada lembaga aristokrasi asli memberi kemungkinan untuk hal ini. Apalagi timbul pula kecenderungan untuk membawa claim kebangsawanan dari suatu daerah ke daerah lainnya. Mobilitas geografis juga diboncengi oleh mobilitas status yang diselundupkan. Kontrol hal-hal seperti ini yang disinyalir oleh lembaga-lembaga kesultanan di Sumatra Timur dan Riau. Dan pada hal-hal seperti ini pula mereka menyatakan ketidak-berdayaan dalam mengatasinya.[40]

Pencairan batas stratifikasi sosial yang ketat, baik dalam bentuk riil ataupun simbolik, juga memberi pengaruh yang mendalam kepada penghuni hierarki-atas dalam masyarakat. Sementara sebagian dari mereka makin bertambah gigih mencoba mempertahankan kemurnian "darah" dan mengelus dasar lama serta mencari akomodasi kulturil, yang akan bisa melarutkan kepahitan traumatis yang ditimpakan oleh kekuasaan kolonial, maka sebagian lagi mulai kehilangan kepercayaan terhadap lingkungan yang lama, yang dirasakan sebagai dunia yang semu. Kecenderungan kedua ini dipercepat oleh kesempatan yang pertama yang diberikan oleh Belanda bagi golongan ini — untuk memasuki sekolah sistim "Belanda". Anak-anak dari lingkungan inilah yang pertama berkenalan dengan dunia intelektuil yang samasekali terbebas dari tradisi yang menjanjikan dunia yang lain. Penekanan pada pemikiran rasionil menimbulkan diantara mereka keengganan menerima dunia kebangsawanan atau kepriyayian yang dihidupkan pemerintah. Dari kalangan merekalah munculnya pertama kali golongan yang mencoba mencari alternatif lain dari corak masyarakat dan sistim status.

Maka inteligentsia baru tersebut mengalami masa sosialisasi lebih lanjut ketika berada di kota-kota, ketika mereka berada agak jauh secara fisik dan ide dari daerah lingkungan tradisi masing-masing. Di kota-kota besar yang bersifat *Indisch*, di mana umumnya sekolah-sekolah tingkat menengah keatas berada dan dihuni oleh berbagai bangsa, bertemu beberapa corak pemikiran dan jenis pekerjaan. Sebagian dari calon-calon inteligentsia sejak mulai dari sekolah telah berkenalan dengan berbagai perkumpul-

40 *Adatrecht bundel* x, 1951 dan L11, 1953.

an yang terbuka bagi segala bangsa dan yang mencoba membuat pulau persamaan sosial di tengah-tengah lautan masyarakat yang harus terikat pada struktur kolonial. Perkumpulan ini, baik yang resmi ataupun yang tidak dan hanya melingkar di sekitar seorang "bapa angkat" intelektuil saja, banyak yang dipimpin oleh kaum etikus dan penganut theosofi Belanda.[41] Tetapi di samping itu banyak pula di antara mereka yang mendapatkan dialog antara pengetahuan yang diserap di sekolah dengan lingkungan sosial yang dihadapi. Dialog intelektuil ini mendatangkan kepada mereka ketimpangan-ketimpangan yang tidak bisa diterima begitu saja.

Begitulah ketika masih di sekolah banyak juga diantara mereka menceburkan diri pada perkumpulan sekolah dan pemuda. Muncul di kalangan mereka beberapa perkumpulan seperti *Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon* dan sebagainya. Semua ini bermula hanyalah dari kepentingan untuk menghilangkan rasa keasingan dari suasana metropolitan yang bersifat *Indisch*, yang memungkinkan beberapa corak hubungan sosial muncul. Tetapi kemudian keinginan ini menaik menjadi hasrat yang lebih ideologis dan melihat ke depan. Perkumpulan-perkumpulan pemuda tersebut mulai membayangkan diri sebagai pembentuk bangsa, pemimpin bangsa, dan sebagai pewaris sesungguhnya dari masadepan. Tidak mengherankan pula bahwa sebagian dari mereka terlibat dalam konflik dengan generasi tua.[42]

Kesadaran generasi sebagai kekuatan intelektuil dan sosial mulai dari suasana seperti ini. Kesadaran ini kemudian akan mempengaruhi pandangan terhadap sejarah Indonesia modern.

Setelah keluar dari sekolah, beberapa kemungkinan karier terbuka bagi mereka. Sebagian dari mereka bergabung ke dalam sistim kolonial tetapi sebagian lain berdiri di luarnya.Bagi yang tetap berada di luar sistim ini maka jalan yang terbuka yalah melakukan kegiatan yang sesuai dengan keahlian yang mereka tuntut dan mencoba melanjutkan cita-cita yang telah terpupuk

41 Lihat Robert van Niel, *op. cit.*, Lihat juga kata pengantar dalam Solihin Salam, *Hadji Agus Salim. Hidup dan Perdjuangannja.* Penerbit Djaja Murni, Djakarta, 1961.

42 Lihat umpamanya Dr. Taufik Abdullah, "Modernization in the Minangkabau World", dalam Claire Holt et-al (eds) *Culture and Politic in Indonesia.*. Cornell University Press. Ithaca, London, 1972.

selama sekolah. Mereka mendirikan sekolah-sekolah swasta, menerbitkan majalah-majalah dan suratkabar yang beraliran nasionalistis, dan, yang tak kurang pentingnya, mendirikan partai-partai dan perkumpulan-perkumpulan kebangsaan. Kemajuan pendidikan dan penyebaran kepandaian membaca berakibatkan bertambah luasnya daerah jangkauan mereka. Kekuatan golongan intelligentsia ini bertambah pula karena bergabungnya lulusan sekolah tinggi, baik tamatan luar negeri maupun yang berada di luar negeri. Penambahan ini bukan saja memperkuat mereka dalam berhadapan dengan kaum birokrat, tetapi juga mempertebal kepercayaan masyarakat terhadap mereka.

Ide pokok yang mereka lontarkan yalah penciptaan bangsa Indonesia. Dari beberapa latarbelakang budaya, agama, sukubangsa, tradisi dan bahasa mereka ingin membangun bangsa yang baru, yang modern, dan terbebas dari segala keterbelakangan. Sejak semula sasaran mereka adalah sistim kolonial, yang dianggap sebagai faktor yang merendahkan harkat kemanusiaan, dan terutama, masyarakat-masyarakat tradisionil yang terpecah-pecah. Inilah problim yang selalu menghantui mereka sebagaimana mungkin mengingatkan akan kebesaran yang telah ternoda oleh kolonialisme dan sekaligus melihat ke depan, kepada munculnya bangsa yang besar dan baru. Perjuangan yang pertama yang penting yalah membangkitkan kembali kenangan historis, dan bila perlu memupuk mithos kebesaran, karena dengan begini kepahitan hari kini bertambah jelas. Tetapi sebaliknya dengan memupuk ini berarti akan memperjauh tujuan untuk menciptakan suatu bangsa. Dalam menyusun strategi untuk mencapai dua tujuan dengan bahan yang sama, terjadilah perbenturan-perbenturan ideologi di antara kaum intelligentsia. Perbenturan ini juga diperkuat oleh pertimbangan mengenai sikap yang sebaiknya dalam berhadapan dengan pemerintah Belanda. Mestikah bersikap kerjasama, hingga dengan begini usaha bisa diperlancar, ataukah seluruhnya tidak mengakui secara moral kehadiran pemerintah kolonial? Tujuan serta arah sesungguhnya dari perjuangan, kemerdekaan, dan penciptaan bangsa juga merupakan faktor bagi perbenturan intern antara-kaum intelligentsia.

Kaum intelligentsia baru ini, yang dihasilkan oleh sub-budaya kota[43] dan yang membebaskan diri mereka dari ikatan

43 Istilah in diperkenalkan oleh HildredGeertz dalam Ruth Mc Vey (ed), *Indonesia*, Yale University Press, New Haven 1961.

sistim kolonial, dalam perjuangan mencoba mengadakan identifikasi diri dengan masyarakat desa, dan dengan kelas bawahan dalam masyarakat kota. Secara moral mereka mengingkari ketinggian status birokrat bangsawan, yang dianggap sebagai peninggalan masalampau yang feodalistis dan terkebelakang, dan juga menyangsikan legitimasi golongan tersebut sebagai pemimpin.

Dalam mengadakan identifikasi ini mereka merumuskan cita-cita berdasarkan gambaran-gambaran ideal dari masyarakat tradisionil yang telah disesuaikan dengan gambaran mereka tentang dunia modern. Suatu modernisasi dari gambaran ideal dari masyarakat tradisionil diadakan – seolah-olah masyarakat tradisionil Indonesia terdiri dari satu corak saja. Namun dengan berpegangan pada corak masyarakat desa, betapapun telah diperbagus gambarannya, mereka memperlihatkan protes kepada adaptasi kulturil yang telah dilakukan oleh para literati bangsawan, yang mencoba melarutkan kebangkrutan politik dan ekonomi kedalam rumusan yang bisa diterima.

Tetapi intelligentsia modern pada umumnya terlepas dari dilemma antara dasar kesahan atau legitimasi mereka sebagai pemimpin dan keinginan untuk mengadakan perobahan strukturil. Untuk mengadakan perobahan sosial, dari corak masyarakat kolonial dan "feodal" menjadi masyarakat yang demokratis dan merdeka, mereka harus menyatakan dengan jelas dasar legitimasi mereka. Dalam hal ini sistim stratifikasi tradisionil telah menyediakan tempat bagi mereka. Sebagai orang yang melebihi dalam ilmu, mereka sebenarnya telah mempunyai tempat yang tinggi dalam jenjang hierarki sosial. Seperti dulu para ulama, guru agama, dan pendekar, mendapatkan tempat yang terhormat, kaum intelligentsia mendapatkan kesahan sebagai pemimpin. Dalam menyebarkan pengaruh, mereka mendirikan partai dan perkumpulan. Bagi suksesnya usaha ini maka jalan yang terpendek yalah membangkitkan dasar tradisionil dari kesahan mereka sebagai kelas pengambil inisiatif. Dengan begini pengaruh terjamin dan dengan begini pula diharapkan perubahan sosial yang diharapkan bisa dimulai. Tetapi inilah soalnya, dengan memperkenalkan ide perubahan sosial, yang menyinggung masalah stratifikasi sosial, mereka sekaligus juga mempersoalkan kedudukan mereka. Mungkinkah mereka merombak struktur yang telah memberikan mereka kedudukan untuk menjadi elite?

Dengan merombak struktur bukankah kedudukan atas yang mereka miliki menjadi goyah, dan dengan begini pula, kemungkinan mereka untuk menjadi pelaksana perubahan sosial menjadi terancam.

Sifat perubahan sosial yang tertahan-tahan yang terjadi sebenarnya bersumber justru pada flexibilitas dari sistim masyarakat di Indonesia pada umumnya. Konfrontasi yang mutlak dihindarkan dan akomodasi sangat menonjol, tetapi dengan begini maka jalan panjang kearah perubahan pun direntang pula. Sifat serbadua dari intelligentsia ini lebih jelas kelihatan ketika mereka telah muncul sebagai elite politik yang sesungguhnya. Ketika kemerdekaan telah tercapai dan ketika kesempatan untuk mendapatkan kekuasaan telah terbuka maka para intelligentsia yang telah menjadi pemimpin partai atau pejabat penting makin berusaha memperluas pengaruh. Jalan yang terpendek yalah memanipulasi unsur tradisionil. Hubungan yang lebih mesra diciptakan, tetapi pengabdian sikap tradisionil dijalankan pula. Penulis-penulis *Balai Pustaka* muncul dengan protes sosial, yang ingin mengadakan perubahan masyarakat dengan jalan menjadikan tokoh konservatif sebagai karikatur dan tokoh "maju" biasanya romantis. Tetapi kritik sosial mereka lebih tertuju kepada pribadi-pribadi, yang ditokohkan, yang memanipulasi secara tak wajar kemungkinan- kemungkinan yang diberikan oleh tradisi dan adat. Namun mereka umumnya belum lagi mempersoalkan lembaga-lembaga tradisionil. Mereka lebih merupakan moralis dalam zaman yang sedang mengalami perubahan. Keadaan berobah pada tahun 1930 ketika generasi baru dalam dunia sosial dan pemikiran mulai mengadakan peninjauan yang mendalam terhadap tradisi perbandingan yang tinggal dengan dunia luar. Mereka tidak mendapatkan jawaban yang sama, tetapi telah membuka pintu ujian bagi tradisi sendiri dan konsep dunia maju.

Claim intelligentsia untuk mendapatkan tempat yang terhormat dalam hierarki sosial berdasarkan atas sesuatu yang dicapai, yaitu keunggulan ilmu dan pengalaman, yang tidak terbatas hanya pada lingkungan sekitar saja. Sebagian dari mereka mungkin berasal dari keluarga bangsawan lama, tetapi sebagian lain mungkin sekali dari golongan biasa saja. Tetapi dalam penentuan hierarki, yang menonjol yalah pencapaian sendiri, bukan yang bersifat askriptif, turun-temurun. Hal yang belakang-

an ini hanyalah menambah kehormatan, tetapi bukan menjadi dasar utama.

Keadaan yang sama juga dialami oleh para ulama dan pemimpin agama. Bukanlah keturunan yang dipentingkan walaupun sering juga kejadian anak seorang ulama menjadi ulama pula — tetapi keunggulan dalam ilmu agama dan, kadang-kadang, ilmu yang lebih esoteris, seperti mistik. Dalam proses pengadaptasian agama kedalam struktur sosial dan politik tradisionil, keunggulan dalam ilmu agama ini pada beberapa masyarakat ditanahair kita juga dilembagakan. Begitulah halnya dengan munculnya kedudukan penghuni di Jawa, khatib adat di Minangkabau atau imam-imam di tempat lain. Semua kedudukan itu telah dijadikan sebagai kedudukan "resmi" dan, sering pula, dijadikan sebagai pangkat yang turun-temurun sesuai dengan adat daerah masing-masing. Dengan begini mereka kemudian menjadi pejabat sekuler untuk urusan agama dan berada di bawah perintah *regent*, Sultan atau penghulu adat.[44]

Tetapi agama, tidak bisa terikat pada kekuasaan sekuler. Tetapi adanya lembaga pengikat ummat maka Islam lebih banyak menyandarkan diri atas perkembangan madrasah dan sekolah agama. Dengan menjadikan pemimpin agama sebagai pegawai agama maka terjadilah kekosongan yang samasekali tidak bisa diterima. Sebab itu orang baru harus muncul. Begitulah di samping pejabat agama, masyarakat Islam juga mempunyai guru dan intelektuil agama. Mereka tidak mengurus administrasi agama, seperti mesjid, perkawinan, zakat fitrah dan sebagainya, tetapi menjadi pemimpin spirituil yang sesungguhnya. Mereka mengajar anak-anak mengaji dan yang selalu menyebarkan ilmu serta hikmat agama. Bertolak dari gagasan yang lebih hakiki dalam kehidupan manusia, yalah masalah transendental, maka tak jarang prestige dan pengaruh guru-guru agama lebih besar dan luas dari pada pejabat sekuler. Panggilan serta seruan mereka bukan hanya bisa menggerakkan pengikut mereka untuk berbuat demi agama tetapi juga menentang kekuasaan duniawi. Di beberapa daerah pengaruh mereka demikian besar sehingga tak satupun perintah penguasa sekuler bisa berjalan tanpa persetuju-

---

44 Tentang kedudukan penghulu agama di Jawa, lihat umpamanya. G.W.I. Drewes, *Drie Javaansche Goeroe en Hunne overleveringe*. Mengenai kedudukan pejabat agama dalam struktur adat lihat Taufik Abdullah, "Islam and Adat: an examination of conflict in Minangkabau", dalam *Indonesia*, 2 (1966), hal.1 – 25.

an mereka. Sebab itu tak mengherankan pula bahwa pemerintah Belanda berusaha dengan beberapa cara, antara lain yang terkenal Goeroe Ordonantie (1905 dan diperbaharui 1925), yang mengharuskan guru-guru swasta, termasuk agama untuk melaporkan kegiatan pendidikan mereka kepada penguasa pribumi setempat, untuk melekatkan mereka di bawah pengaruh dan kekuasaan para birokrat aristokratis.

Walaupun mereka umumnya berdiam di desa atau di perbatasan desa, daerah jangkauan pengaruh serta jaringan madrasah atau pesantren mereka melampui batas-batas desa. Mereka adalah perantara utama antara desa dengan dunia yang luas, baik dengan lingkungan sekitar maupun dengan dunia Islam secara keseluruhan. Kehadiran mereka di desa sering pula menyebabkan sensitifnya desa terhadap pergolakan dan perubahan yang terjadi di dunia Islam. Orientasi mereka adalah supra-desa dan jangkauan pengaruh serta hubungannya supra-desa pula.

Ikatan yang melampui desa tersebut antara lain disebabkan tradisi madrasah atau pesantren yang menjadikan hubungan guru dan murid sebagai sesuatu yang selalu berlanjut. Sekali orang mengakui seorang lain menjadi gurunya maka adalah kewajiban morilnya untuk melanjutkan hubungan tersebut. Dengan begini pesantren dan madrasah, walaupun berdiri sendiri selalu mempunyai hubungan spirituil dengan yang lain – dengan pesantren lama, yang dipimpin oleh bekas guru, atau pesantren juga mendorong terjadinya hubungan yang menetap antara sesama santri. Bila mereka selesai belajar dan mendirikan pesantren baru maka ikatan ini biasanya dipertahankan. Begitulah sebuah pesantren sering merupakan matarantai dari orientasi tertentu terhadap agama.

Keberhasilan pesantren atau madrasah dibeberapa tempat untuk menjadi salahsatu sumber *authority* atau wewenang dalam mengatur hidup kemasyarakatan dan pribadi sering menimbulkan aliansi antara lembaga tersebut dengan kekuasaan sekuler. Sementara penguasa sekuler atau duniawi dengan didampingi dan dibantu oleh pejabat agama, melakukan tindakan dan memanifestasikan kekuasaannya maka pesantren dan guru-guru agama sering muncul sebagai pemberi legitimasi spirituil terhadap semua itu. Keadaan ini memang menimbulkan suatu harmoni sosial dan menyokong kemantapan ketentraman. Tetapi hal itu juga menjadi benteng bagi kelanjutan sikap konservatif. Suatu kritik

terhadap penguasa sekuler dirasakan pula sebagai ketidak-wajaran oleh pemimpin agama. Dan demikian pula sebaliknya. Tetapi dalam suasana yang sama, sering pula terjadi suatu konflik antara kedua jenis wewenang tersebut. Wewenang sekuler dalam hal ini sering diwakili oleh pejabat agama. Suatu kecemburuan profesi sering menimbulkan perbenturan yang tak mudah diselesaikan. Apalagi bila salahsatu merasakan yang lain telah mulai memasuki daerah jurisdiksinya. Dalam hal ini bisa pula dilihat suatu pola bahwa makin jauh sebuah pesantren mempersoalkan agama dari masalah syariat atau hukum dan melanjutkan pada problim tarekat maka makin besar pula kemungkinan bahwa perbenturan akan terjadi. Pada yang belakangan ini sering terjadi kecenderungan untuk mengaburkan arti hukum, baik hukum dunia ataupun hukum agama-keduanya dianggap masih pada taraf yang rendah dalam usaha mencari kesempurnaan hidup.

Secara resmi, seperti juga antara kaum intelektuil sekuler, tidak ada hierarki yang jelas antara pemimpin-pemimpin agama. Tetapi ikatan guru dan murid yang diperabadikan memberi jenis hierarki tersebut. Disamping itu keunggulan ilmu -- belajar di Mekkah dan kemudian di Kairo adalah tambahan yang sangat dihargai – serta kemampuan untuk melebarkan pengaruh adalah faktor-faktor yang menyebabkan seorang pemimpin agama dianggap lebih tinggi dari yang lain. Hierarki seperti ini akan lebih terasa dalam jaringan pesantren yang mementingkan pengajaran tarikat.

Pada dasawarsa pertama abad ini terjadilah semacam perubahan dalam sistim pesantren dan dalam corak hubungan antar pesantren dan guru-guru agama. Di mulai di Sumatra Barat, sebagai pengaruh pendatang baru dari Mekkah, yang kemudian ditambah oleh pendatang dari Kairo terjadi usaha reformasi agama. Hal ini bukan saja menyangkut pembersihan agama dari segala hal yang tidak berasal dari Kitab Suci dan Sunnah Nabi, dan menjadikan agama sebagai dasar bagi perobahan sosial tetapi juga menjadi *taqlid* kepatuhan yang membuta kepada ajaran yang telah bertradisi sebagai suatu yang menurunkan derajat agama-agama yang teruntuk bagi orang berakal. Dengan begini pula hubungan kepatuhan yang abadi antara guru dan murid harus dipersoalkan. Pada tahun 1912 di Jawa muncul Muhammadiyah, sebuah organisasi yang bercita-cita hampir sama dengan gerakan agama di Sumatra Barat.

Peristiwa ini menimbulkan terjadinya perpecahan masyarakat Islam atas dua golongan besar, pengikut kaum muda dan kaum tua. Dalam hubungan status sosial, hal ini, seperti halnya dengan pendidikan umum, mencairkan ikatan hierarki guru dan murid. Dan, tak kurang pentingnya, organisasi, bukan saja kemasyhuran atas keunggulan ilmu, muncul sebagai salahsatu cara untuk mendapatkan tempat yang tinggi. Pemimpin agama yang murni harus bersaingan pula dengan pemimpin agama yang memakaikan organisasi sebagai alat mobilitas.

Begitulah status sosial dari lingkungan yang mengatasi desa maka selama zaman kolonial terjadi semacam pencairan dan mobilitas. Hierarki terbuka bagi orang baru untuk masuk. Pendidikan, pengaruh luar, komersialisasi, dan urbanisasi membuka kesempatan ini. Tetapi perubahan yang fundamentil yang menyangkut nilai-nilai dari stratifikasi sosial tidaklah terjadi. Mobilitas personil tidak sejalan dengan peralihan nilai. Dalam hal ini ternyata perubahan di desa lebih penting.

BAB III.

PERGERAKAN NASIONAL

A. AWAL PERKEMBANGAN

1. Boedi Oetomo

Dengan semboyan hendak meningkatkan martabat rakyat, Mas Ngabehi Wahidin Sudirohusodo, seorang dokter Jawa di Jogyakarta dan termasuk golongan priyayi rendahan, dalam tahun 1906 dan 1907 mulai mengadakan kampanye di kalangan priyayi di pulau Jawa. Walaupun hasil kampanye tidak sebagaimana yang diharapkan tetapi hasilnya juga ada, seperti di daerah Jawa Tengah sendiri sejak itu terbuka kemungkinan adanya kerjasama diantara pejabat pribumi[1]. Peningkatan ini akan dilaksanakan dengan membentuk "Dana Pelajar". Dalam perjalanan kampanye itu pada akhir tahun 1907, dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo, pelajar STOVIA, di Jakarta. Pertemuan yang memperbincangkan nasib rakyat itu ternyata berpengaruh besar pada diri pemuda Sutomo[2]. Cita-cita untuk meningkatkan kedudukan dan martabat rakyat itu sebenarnya juga sudah ada pada para pelajar-pelajar STOVIA[3], karena itu kampanye dr. Wahidin makin mendorong dan memperbesar cita-cita tersebut. Sutomo kemudian membicarakan maksud kampanye dr. Wahidin dengan teman-temannya di STOVIA. Hasil pembicaraan memperlihatkan bahwa cita-cita dr. Wahidin setelah diolah mengalami perubahan. Tujuan semula mendirikan suatu dana belajar diperluas jangkauannya. Begitulah pada hari Rabu tanggal 20 Mei 1908 di Jakarta pelajar-pelajar tersebut di gedung STOVIA mendirikan organisasi yang diberi nama Boedi Oetomo, dan Sutomo ditunjuk sebagai Ketua.

Dari bulan Mei sampai awal Oktober 1908, Boedi Oetomo yang baru muncul itu merupakan organisasi pelajar dengan para pelajar STOVIA sebagai intinya. Tujuannya merumuskan secara

---

1 Antara lain dapat dibaca dalam *Java Bode*, tgl. 5 November 1906.

2 R. Soetomo, *Kenang-kenangan*, Soerabaja, 1934, hal. 79 – 81.

3 *Bataviaasch Niewsblad*, tgl. 13 Juli 1908; Goenawan Mangoenkoesoemo, "De Goboorte van Boedi Oetomo", *Soembangsih, Gedenkboek Boedi Oetomo 1908 – 20 Mei 1918.*

samar-samar yaitu: "kemajuan bagi Hindia", dimana jangkauan geraknya terbatas pada penduduk pulau Jawa dan pulau Madura dan baru kemudian meluas untuk penduduk Hindia seluruhnya dengan tidak memperhatikan perbedaan keturunan, jenis kelamin dan agama. Sampai menjelang kongres pertama terdapat 8 cabang Boedi Oetomo yaitu di Jakarta, Bogor, Bandung, Yogya I, Yogya II, Magelang, Surabaya dan Probolinggo.

Setelah cita-cita Budi Utomo mendapat dukungan makin meluas dikalangan cendekiawan Jawa, maka pelajar itu menyingkir dari barisan depan. Sebagian karena keinginannya agar generasi yang lebih tua memegang peranan bagi gerakan itu. Ketika kongres Boedi Oetomo dibuka di Yogyakarta, maka pimpinan beralih kepada generasi yang lebih tua, yang terutama terdiri dari priyayi-priyayi rendahan.[4]

Tanpa pengalaman sedikitpun dalam hidup keorganisasian, Boedi Oetomo merupakan wadah dari unsur-unsur radikal dan bercorak politik, seperti pada diri dr. Tjipto Mangunkusumo, dan unsur yang kurang memperhatikan keduniawian yang cenderung bersifat filsafat, seperti pada diri dr. Radjiman Wedyodiningrat. Ketuanya Tirtokusumo, sebagai seorang bupati lebih banyak memperhatikan reaksi dari pemerintah kolonial daripada memperhatikan reaksi dari penduduk pribumi.

Setelah perdebatan yang panjang tentang corak Boedi Oetomo, maka Pengurus Besar memutuskan untuk membatasi jangkauan geraknya kepada penduduk Jawa dan Madura dan tidak akan melibatkan diri dalam kegiatan politik. Bidang kegiatan yang dipilihnya oleh karena itu yalah bidang pendidikan dan budaya. Karena kebanyakan pendukungnya yalah golongan priyayi rendahan, maka dapat dipahami mengapa Boedi Oetomo menganggap perlu meluaskan pendidikan barat. Pengetahuan bahasa Belanda mendapat prioritas pertama, karena tanpa bahasa itu seseorang tidak dapat mengharapkan kedudukan yang layak dalam jenjang kepegawaian kolonial. Dengan demikian, maka Boedi Oetomo cenderung untuk memajukan pendidikan bagi golongan priyayi daripada bagi penduduk pribumi pada umumnya. Slogan Boedi Oetomo berubah dari "perjuangan untuk mempertahankan penghidupan" menjadi "kemajuan secara serasi". Hal itu menunjukkan pengaruh golongan tua yang

[4] Lebih lanjut dapat dilihat pada *Verslag Congres Boedvtama*, Djogjakarta, 1909.

moderat dan golongan priyayi yang lebih mengutamakan jabatannya. Dengan demikian, maka sikap "proto-nasionalistis" dari para pemimpin pelajar yang kentara pada awal berdirinya Boedi Oetomo, kini terdesak kebelakang.

Setelah dua pemimpinnya yang berbeda pendapat dengan anggota Pengurus Besar, yaitu Tjipto Mangunkusumo dan Surjodiputro, berhenti dari badan pengurus sebelum kongres yang kedua, Pengurus Besar Boedi Oetomo menjadi lebih seragam. Setelah persetujuan yang diberikan pemerintah kepada Boedi Oetomo sebagai badan hukum, maka diharapkan organisasi itu akan melancarkan aktivitas secara luas. Tetapi segera Boedi Oetomo menjadi lamban, yang sebagian disebabkan kesulitan keuangan. Lain daripada itu para bupati telah mendirikan organisasi sendiri, para pemuda STOVIA dan anggota muda lainnya berhenti sebagai anggotanya karena kecewa terhadap jalan yang telah ditempuh Boedi Oetomo. Namun pada akhir tahun 1909 Boedi Oetomo telah mempunyai cabang di 40 tempat dengan jumlah anggota lebih kurang 10.000 orang.

Perkembangan selanjutnya merupakan periode yang paling lamban bagi Boedi Oetomo. Aktivitasnya hanya terbatas pada penerbitan majalah bulanan *Goeroe Desa* dan beberapa petisi, yang dibuatnya kepada pemerintah berhubung dengan usaha meninggikan mutu sekolah menengah pertama. Tatkala kepemimpinan pengurus pusat makin lemah, maka cabang-cabang melakukan aktivitas sendiri yang tidak banyak hasilnya. Pemerintah yang mengawasi perkembangan Boedi Oetomo sejak berdirinya dengan penuh perhatian dan harapan, akhirnya menarik kesimpulan, bahwa pengaruh Boedi Oetomo terhadap penduduk pribumi tidak begitu besar. Beberapa bagian pemerintahan nampaknya merasa puas karena ketidakmampuan Boedi Oetomo itu, tetapi G.A.J. Hazeu, penasehat pemerintah untuk urusan pribumi, merasa kecewa karena kelambanan organisasi itu.

Tirtokusumo berhenti pada tahun 1912 dan ketua Boedi Oetomo yang baru, Pangeran Noto Dirodjo berusaha dengan sepenuh tenaga mengejar ketinggalan. Dengan ketua yang baru itu Boedi Oetomo perkembangannya tidak pesat lagi. Hasil-hasil yang pertama dicapainya oleh ketua berketurunan Paku Alam itu yalah perbaikan pengajaran di daerah kesultanan/kesunanan. Boedi Oetomo mendirikan organisasi dana belajar Darmoworo.

Tetapi hasilnya tidaklah begitu besar. Sukses-sukses yang kecil itu makin tidak berarti dan berada di bawah bayangan munculnya organisasi nasional lainnya, terutama:

1. Sarekat Islam, yang didirikan pada tahun 1912, berazaskan dasar hubungan spirituil agama dan kepentingan perdagangan yang sama, berkembang menjadi gerakan rakyat yang pertama dan sebenarnya di Indonesia.
2. Indische Partij, yang berdiri pada masa yang bersamaan mempropagandakan "Nasionalisme Hindia" dan bergerak dalam bidang politik

Kedua partai tersebut menarik unsur-unsur yang tidak puas keluar dari Boedi Oetomo. Sungguhpun prinsip-prinsip utama tentang netralisasi agama dan aktivitas non-politik Boedi Oetomo membedakan dirinya dengan organisasi-organisasi lain, tetapi ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa selama prinsip-prinsip itu dipertahankan dengan sifat yang pasif tidaklah dapat diharapkan pengaruhnya akan makin meluas.

Mulai pecahnya Perang Dunia I pada tahun 1914, kelihatan ada usaha untuk mengembalikan kekuatan yang ada pada Boedi Oetomo. Berdasarkan akan adanya kemungkinan intervensi kekuasaan asing lain, maka Boedi Oetomo melancarkan issue pentingnya pertahanan sendiri, dan yang pertama menyokong gagasan wajib militer pribumi.[5] Diskusi yang terjadi berturut-turut dalam pertemuan-pertemuan setempat sebaliknya menggeser perhatian rakyat dari soal wajib militer ke arah soal perwakilan rakyat. Dikirimkannya sebuah misi ke Negeri Belanda oleh Komite "Indie Weerbaar" untuk pertahanan Hindia dalam tahun 1916 – 1917 merupakan pertanda masa yang amat berhasil bagi Boedi Oetomo. Dwidjosewoyo sebagai wakil Boedi Oetomo dalam misi tersebut berhasil mengadakan pendekatan dengan pemimpin-pemimpin Belanda terkemuka. Keterangan Menteri Urusan Daerah Jajahan tentang pembentukan Volksraad (Dewan Rakyat), yang waktu itu sedang dibicarakan didalam Dewan Perwakilan Rakyat Belanda, dimana ia menekankan badan itu akan dijadikan Dewan Perwakilan Rakyat nanti amat menggembirakan anggota misi maupun Boedi Oetomo. Undang-undang

---

5 Mr A.K. Pringgodigdo, *Sedjarah Pergerakan Rakyat Indonesia*, Penerbit Pustaka Rakjat, Djakarta, 1964, hal. 15.

wajib militer gagal, sebaliknya undang-undang pembentukan Volksraad disahkan pada bulan Desember 1916. Boedi Oetomo segera membentuk sebuah Komite Nasional untuk menghadapi pemilihan anggota Volksraad, tetapi komite itu tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya dan akhirnya bubar.

Aktivitas-aktivitas itu memberi kesan kepada kaum etika di kalangan pemerintahan kolonial, bahwa Boedi Oetomo adalah satu-satunya organisasi yang bertanggungjawab dan dapat dipercaya. Sebagai hasilnya partai kaum etika bekerjasama dengan Boedi Oetomo dalam kampanye pemilihan sehingga Boedi Oetomo dapat menduduki jumlah kursi yang nomor dua besarnya diantara anggota pribumi di dalam Volksraad.

Di dalam sidang Volksraad wakil-wakil Boedi Oetomo masih tetap berhati-hati dalam melancarkan kritik terhadap kebijaksanaan politik pemerintah. Sebaliknya para anggota pribumi yang lebih radikal dan juga anggota sosialis Belanda di dalam Volksraad melakukan kritik terhadap pemerintah. Dengan memakai kesempatan adanya krisis bulan November 1918 di Negeri Belanda, mereka menuntut perubahan bagi Volksraad dan kebijaksanaan politik Negeri Belanda umumnya sampai akhirnya dibentuk sebuah komisi pada tahun 1919.

Konsesi yang diberikan oleh Gubernur Jenderal dalam masa itu dan makin pentingnya gerakan politik di kalangan massa menyebabkan Boedi Oetomo pada akhirnya berkesimpulan bahwa ia juga harus mencari dukungan massa. Akibatnya unsur yang lebih radikal di dalam Boedi Oetomo mendapat pengaruh yang lebih besar. Tetapi segera setelah itu, kebijaksanaan politik yang lebih keras dijalankan oleh Gubernur Jenderal yang baru, Mr. D. Fock. Juga anggaran bagi pendidikan dikurangi dengan drastis. Sebagai akibatnya terjadi perpecahan antara golongan moderat dan radikal di dalam Boedi Oetomo, yang baru kemudian berakhir sewaktu diadakannya fusi ke dalam Parindra (Partai Indonesia Raya) pada tahun 1935. Kita lihat umpamanya dr. Sutomo sendiri karena merasa tidak puas lalu mendirikan *Indonesische Studieclub* pada tahun 1924 di Surabaya, yang kemudian berkembang menjadi Persatuan Bangsa Indonesia. Sebab utama dari didirikannya Indonesische Studieclub yalah karena dr. Sutomo dan juga pemimpin nasionalis lainnya menganggap azas "Kebangsaan Jawa" dari Boedi Oetomo sudah tidak

sesuai lagi dengan perkembangan rasa kebangsaan waktu itu.[6] Boedi Oetomo baru terbuka bagi penduduk seluruh Indonesia sesudah kongres pada bulan Desember tahun 1930.

Jelas kelihatan bahwa bila ditinjau masa sepuluh tahun pertama perkembangan Boedi Oetomo, adanya sikap yang lunak di kalangan priyayi dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi di Indonesia pada awal abad 20. Pada tingkat pertama secara samar-samar Boedi Oetomo mengemukakan keinginan golongan yang telah berpendidikan tentang kemajuan nasional dan budaya. Kemudian perhatian dipusatkan kepada pendidikan secara Barat yang dianggap satu-satunya jalan untuk mencapai promosi bagi golongan priyayi rendahan di dalam jenjang kepegawaian kolonial. Keinginan untuk pendidikan yang lebih tinggi sejajar dengan munculnya golongan menengah pribumi dan usaha-usaha ke arah kemakmuran ekonomi. Usaha-usaha memajukan kesejahteraan sosial di kalangan pribumi makin luas dijalankan di daerah-daerah dan usaha-usaha di bidang ekonomi mulai berubah menjadi berpolitik. Bahaya yang mengancam karena perang membangunkan para pemimpin Boedi Oetomo tentang pentingnya pertahanan bagi negaranya sendiri. Tetapi kewajiban untuk mempertahankan negeri dibawah pemerintah Belanda mau tidak mau menimbulkan gagasan untuk menuntut hak perwakilan yang layak bagi rakyat. Langkah-langkah tersebut menyadarkan golongan priyayi tentang adanya cara-cara yang berbeda didalam mendapatkan kebutuhan sosial, pada mulanya melalui pendidikan akhirnya dengan berpolitik.

Perubahan itu sendiri mungkin sekali disebabkan tidak adanya program politik yang nyata, tidak adanya pemimpin tunggal yang berwibawa seperti partai-partai lain, tidak adanya dana. Lain dari pada itu para anggota anggota Boedi Oetomo mengetahui bahwa mereka mempunyai harapan baik bagi masa-depannya karena itu tidak berani menanggung risiko. Tidak dapat dimungkiri bahwa Boedi Oetomo sebagai organisasi golongan. mencerminkan kemampuannya yang luarbiasa untuk melindungi dirinya. Seperti pernah dikatakan oleh Dwidjosewojo sebagai jawaban kepada dr. Tjipto Mangunkusumo: "Bertindak tenang dan lunak merupakan sifat Boedi Oetomo". Karakteristik se-

---

6 Prof. Iwa Kusuma Sumantri SH, *Sedjarah Revolusi Indonesia*, djilid pertama, Djakarta, 1963, hal. 39 dan 62.

macam itu memang sudah merupakan naluri yang dalam berakar di dalam budaya Jawa.

Karena Boedi Oetomo tidak pernah mendapat dukungan massa, kedudukannya secara politik kurang begitu penting. Namun suatu hal yang penting dari Boedi Oetomo adalah bahwa di dalam tubuhnya telah ada benih semangat nasional yang pertama dan karena itu ia dapat dipandang sebagai induk pergerakan nasional, yang kemudian muncul didalam tubuh Sarekat Islam dan Indische Partij.

2. *Sarekat Islam*

Tiga tahun setelah berdirinya Boedi Oetomo, pada tahun 1911 bagaikan sesuatu yang kebetulan didirikanlah perkumpulan Sarekat Islam di Solo. Latarbelakang ekonomis perkumpulan ini yalah perlawanan terhadap dagang-antara (penyalur) oleh orang Cina. Sungguhpun demikian kejadian itu merupakan isyarat bagi orang Muslim, bahwa telah tiba waktunya untuk menunjukkan kekuatannya. Para pendiri Sarekat Islam mendirikan organisasinya tidak semata-mata untuk mengadakan perlawanan terhadap orang-orang Cina, tetapi untuk membuat front melawan semua penghinaan terhadap rakyat bumiputra. Ia merupakan reaksi terhadap rencana *krestenings-politiek* (politik peng-kristenan) dari kaum zending, perlawanan terhadap kecurangan-kecurangan dan penindasan-penindasan dari pihak ambtenar-ambtenar bumiputra dan Eropa. Pendeknya perlawanan Sarekat Islam ditujukan terhadap setiap bentuk penindasan dan kesombongan rasial. Berbeda dengan Boedi Oetomo yang merupakan organisasi dari ambtenar-ambtenar pemerintah, maka Sarekat Islam berhasil sampai pada lapisan bawah masyarakat, yaitu lapisan yang sejak berabad-abad hampir tidak mengalami perubahan dan paling banyak menderita.

Bila ditinjau menurut anggaran dasarnya, yang dapat dirumuskan seperti berikut: mengembangkan jiwa berdagang; memberi bantuan kepada anggota-anggota yang menderita kesukaran; memajukan pengajaran dan semua yang mempercepat naiknya derajat bumiputra; menentang pendapat-pendapat yang keliru tentang agama Islam, maka SI terang tidak berisikan politik. Tetapi dari seluruh aksi perkumpulan itu dapat dilihat, bahwa SI tidak lain melaksanakan suatu tujuan ketatanegaraan.

Selalu diperjuangkan dengan gigih keadilan dan kebenaran terhadap penindasan dan lain-lain keburukan bagi pihak pemerintah, aksi mana disertai oleh wartawan-wartawan Indonesia yang berani. Tanpa diragukan, periode SI itu dicanangkan oleh suatu kebangunan revolusioner dalam arti tindakan yang gagah-berani melawan stelsel-terjajah-penjajah.

Pemerintah Hindia Belanda, menghadapi situasi yang demikian hidup dan mengandung unsur-unsur revolusioner, menempuh jalan hati-hati dan mengirimkan salahseorang penasehatnya kepada organisasi tersebut. Gubernur Jenderal Idenburg meminta nasehat-nasehat dari para residen untuk menetapkan kebijaksanaan politiknya. Hasilnya yalah untuk sementara SI tidak boleh berupa organisasi yang mempunyai pengurus besar dan hanya diperbolehkan berdiri secara lokal.

Suwardi Suryaningrat mencatat pada tahun 1917, bahwa berhubung dengan jalan diplomatis yang ditempuh oleh pemerintah itu, maka lambatlaun unsur memberontak menjadi berkurang, bahkan disana-sini telah berubah menjadi mentalitet semangat Belanda. Penulisan lain (D.M.G. Koch) mengemukakan adanya tiga aliran didalam tubuh SI, yaitu yang bersifat Islam fanatik, yang bersifat menentang keras dan golongan yang hendak berusaha mencari kemajuan dengan berangsur-angsur dan dengan bantuan pemerintah. Tetapi apabila cita-cita yang tidak adil dan tidak sah terhadap rakyat Indonesia begitu jelas, maka ciri kerohanian SI tetap demokratis dan militant (sangat siap untuk berjuang). Memang beberapa aspek perjuangan terkumpul menjadi satu di dalam tubuh SI sehingga ada yang menamakan, bahwa SI merupakan "gerakan nationalistis-demokratis-ekonomis."

Itulah sebabnya lain daripada partai lainnya, maka kecepatan tumbuhnya SI bagaikan meteor dan meluas secara horisontal, sehingga SI merupakan organisasi masa yang pertama di Indonesia, yang antara tahun 1917 – 1920 sangat terasa pengaruhnya di dalam politik Indonesia. Corak demokratis dan kesiapan untuk berjuang yang mendekatkan beberapa cabang SI dan para pemimpinnya kepada ajaran Marxis. Terutama SI di bawah Semaun dan Darsono [7] merupakan pelopor yang meng-

7 Lebih lanjut lihat pasal mengenai PKI.

gunakan senjata baru dalam perjuangan melawan imperialisme, yalah teori perjuangan Marx.

Sudah barang tentu hal itu menimbulkan krisis dan pertentangan timbul antara pendukung paham Islam dan paham Marx. Debat yang seru terjadi antara H. A. Agus Salim – Abdul Muis di satu pihak dengan Semaun – Tan Malaka di lain pihak. tatkala pada tahun 1921 golongan kiri dalam tubuh SI dapat disingkirkan, yang kemudian menamakan dirinya Sarekat Rakyat (SR). SI dan SR keduanya berusaha untuk mendapatkan sokongan massa dan dalam hal ini keduanya cukup berhasil. Keadaan demikian di dalam tubuh SI yang menyebabkan pemimpin SI, Tjokroaminoto, mengadakan studi perbandingan ajaran Islam dan Marxisme. Bukunya terbit pada tahun 1924.

Perpecahan yang terjadi di dalam tubuh SI sangat merugikan perjuangan dan cita-cita SI. Kemudian bernama Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Dalam tahun 30-an setelah meninggalnya tokoh utama SI, HOS Tjokroaminoto, perpecahan di dalam tubuh SI seringkali terjadi sehingga peranan dan pengaruhnya sebagai partai besar juga menjadi mundur.

3. Indische Partij

Setelah kita tinjau perkembangan gagasan yang menandai adanya kebangunan kesadaran nasional dan kebangunan revolusioner bersifat kerakyatan yang berjiwa Islam, maka sebagai fase ketiga di dalam perkembangan sejarah pergerakan nasional pada awal pertumbuhannya. lahir konsepsi yang bercorak politik seratus persen dan program nasional yang meliputi pengertian nasionalisme modern. Organisasi pendukung gagasan revolusioner nasional itu yalah Indische Partij yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912. Organisasi ini juga ingin menggantikan Indische Bond sebagai organisasi kaum Indo dan Eropa di Indonesia yang didirikan tahun 1898. Perumus gagasan itu yalah E.F.E. Douwes Dekker kemudian terkenal dengan nama Danudirdja Setyabuddhi, seorang Indo, yang melihat keganjilan-keganjilan dalam masyarakat kolonial khususnya diskriminasi antara keturunan Belanda totok dan kaum Indo. Tetapi lebih daripada hanya membatasi pandangan dan kepentingan golongan kecil masyarakat Indo saja, Douwes Dekker meluaskan pandangannya terhadap masyarakat Indonesia umumnya, yang masih tetap hidup di dalam situasi kolonial. Nasib para Indo tidak ditentukan oleh pemerintah kolonial tetapi terletak di dalam

bentuk kerjasama dengan penduduk Indonesia lainnya. Bahkan menurut Suwardi Suryaningrat ia tidak mengenal supremasi Indo atas penduduk bumiputra, malahan ia menghendaki hilangnya golongan Indo dengan jalan peleburan ke dalam masyarakat bumiputra. Melalui karangan-karangan di dalam *Het Tijdschrift* kemudian dilanjutkan di dalam *De Express,* maka propagandanya meliputi: pelaksanaan suatu program "Hindia" untuk setiap gerakan politik yang sehat dengan tujuan menghapuskan perhubungan kolonial; menyadarkan golongan Indo dan penduduk bumiputra, bahwa masadepan mereka terancam oleh bahaya yang sama, yaitu bahaya exploitasi kolonial. Alat untuk melancarkan aksi-aksi perlawanan-perlawanan yalah dengan membentuk suatu partij: *Indische Partij.* Untuk persiapan pendirian *Indische Partij,* maka Douwes Dekker mengadakan perjalanan propaganda di pulau Jawa yang dimulai pada tanggal 15 September dan berakhir pada tanggal 3 Oktober 1912. Di dalam perjalanan inilah ia bertemu dengan dokter Tjipto Mangunkusumo, yang segera mengadakan pertukaran mengenai soal-soal yang bertalian dengan pembinaan partij yang bercorak nasional. Lain daripada itu di Bandung ia mendapat dukungan dari Suwardi Suryaningrat dan Abdul Muis yang pada waktu itu telah menjadi pemimpin-pemimpin Sarekat Islam cabang Bandung. Di Yogyakarta ia mendapat sambutan dari pengurus Boedi Oetomo. Redaktur-redaktur suratkabar Jawa Tengah di Semarang dan *Tjahaya Timoer* di Malang juga menyokong berdirinya Indische Partij. Begitupun di daerah-daerah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur gagasannya mendapat sokongan.[8] Bukti nyata dari propaganda ini yalah didirikannya 30 cabang dengan anggota sejumlah 7300 orang, kebanyakan Indo-Belanda. Sedangkan jumlah anggota bangsa Indonesia adalah 1500 orang. Bahkan seseorang sahabatnya pernah menamakan aksi-aksi Douwes Dekker yang bergerak ke seluruh pulau Jawa "bagaikan sebuah tornado yang meninggalkan emosi-emosi yang meluap di kota-kota, yang tidak pernah terjadi sebelumnya".[9] Memang mereka dan beberapa orang lainnya tidak puas dengan langkah-langkah yang telah diambil Boedi Oetomo, oleh karena itu golongan progresif mencari kepuasan politik dengan menggabungkan diri

[8] Laporan lengkap perjalanan propaganda – Indische Partij dapat dibaca selengkapnya dalam *Het Tijdschrift,* III; tahun 1912 – 1913, hal. 97 – 146.

[9] *De Expres,* tahun 1914.

dengan Sarekat Islam. Pada tahun 1912 itu Sarekat Islam belum menunjukkan gerak revolusionernya, oleh karena itu gagasan perlunya satu partai pelopor beradasarkan konsepsi nasional yang luas mendapat sambutan dari mereka.

Setelah permusyawaratan wakil-wakil Indische Partij daerah di Bandung pada tanggal 25 Desember 1912, maka tersusunlah anggaran dasar Indische Partij. Program revclusioner yang bersifat nasional dapat kita ketahui di dalam pasal-pasal anggaran dasarnya, yang didalam bahasa Indonesianya :[10]
"Tujuan Indische Partij yalah untuk membangunkan patriotisme semua "Indiers" terhadap Tanahair, yang telah memberi lapangan hidup kepada mereka, agar mereka mendapat dorongan untuk bekerjasama atas dasar persamaan ketatanegaraan untuk memajukan tanahair "Hindia" dan untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka". Cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut adalah :

a. memelihara nasionalisme Hindia dengan meresapkan cita-cita kesatuan kebangsaan semua "Indiërs"; meluaskan pengetahuan umum tentang sejarah budaya "Hindia"; mengasosiasikan intelek secara bertingkat ke dalam suku dan inter-suku yang masih hidup berdampingan pada masa ini; menghidupkan kesadaran diri dan kepercayaan kepada diri-sendiri.
b. memberantas rasa kesombongan rasial dan keistimewaan ras baik dalam bidang ketatanegaraan maupun dalam bidang kemasyarakatan.
c. memberantas usaha-usaha untuk membangkitkan kebencian agama dan sektarisme yang bisa mengakibatkan "Indiër" asing satu sama lain, sehingga dapat memupuk kerja sama atas dasar nasional.
d. memperkuat daya tahan rakyat Hindia dengan memperkembangkan individu kearah aktivitas yang lebih besar secara tehnis dan memperkuat kekuatan batin dalam soal kesusilaan.
e. berusaha untuk mendapatkan persamaan hak bagi semua orang Hindia.
f. memperkuat daya rakyat Hindia untuk dapat mempertahan-

10 E.F.E. Douwes Dekker, *De Indische Partij; Haar wezen en haar doel*, Bandoeng, 1913, hal. 51 – 52.

kan Tanah Air dari serangan Asing.

g. mengadakan unifikasi, perluasan, pendalaman dan menghindiakan pengajaran, yang didalam semua hal harus disetujukan kepada kepentingan ekonomis Hindia, dimana tidak diperbolehkan adanya perbedaan perlakuan karena ras, sex atau kasta dan harus dilaksanakan sampai tingkat yang setinggi-tingginya yang bisa dicapai.
h. memperbesar pengaruh pro-Hindia didalam pemerintahan.
i. memperbaiki keadaan ekonomi bangsa Hindia, terutama dengan memperkuat mereka yang ekonominya lemah.

Indische Partij berdiri diatas dasar nasionalisme yang luas menuju kemerdekaan Indonesia. Indonesia sebagai "national home" semua orang keturunan bumiputra, Belanda, Cina, Arab dan sebagainya, yang mengakui Hindia sebagai tanahair dan kebangsaannya. Paham ini pada waktu dulu dikenal sebagai *Indisch Nationalisme*, yang kemudian hari melalui Perhimpunan Indonesia dan PNI menjadi *Indonesisch Nationalisme* atau Nasionalisme Indonesia. Pasal-pasal ini pulalah yang menyatakan Indische Partij sebagai partai politik yang pertama di Indonesia. Bahwa Indische Partij adalah suatu partai yang radikal juga dinyatakan oleh Douwes Dekker bahwa didirikannya ini adalah merupakan "penantangan perang dari pihak budak koloni yang membayar belasting kepada kerajaan penjajah, pengaut pajak".

Berbeda dengan sikap yang hati-hati terhadap Boedi Oetomo dan Sarekat Islam, pemerintah Hindia Belanda bersikap tegas terhadap Indische Partij. Permohonan yang diajukan kepada Gubernur Jenderal untuk mendapat pengakuan sebagai badan hukum pada tanggal 4 Maret 1913, ditolak dengan alasan karena organisasi ini berdasarkan politik dan mengancam hendak merusak keamanan umum. Juga setelah pihak pimpinan Indische Partij mengadakan audiensi kepada Gubernur Jenderal dan di ubahnya pasal 2 dari anggaran dasar, Indische Partij tetap merupakan partai terlarang. Ini terjadi pada 11 Maret 1913. Kejadian ini merupakan peringatan bagi Indische Partij, dan dengan demikian juga partai-partai lain, bahwa kemerdekaan itu tidak dapat diterima sebagai hadiah dari pemerintah kolonial. Kemerdekaan itu haruslah direbut, sehingga makin jelaslah ucapan Douwes Dekker setahun sebelumnya, bahwa "pengertian pemerintah Hindia haruslah dipandang sebagai salahsatu dari pada partai yang bertentangan dengan cita-cita kemerdekaan.

Pemerintah yang berkuasa di suatu tanah jajahan, bukanlah pemimpin namanya melainkan penindasan, dan penindasan itu adalah musuh yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat, lebih berbahaya daripada pemberontakan atau gerakan yang meminta perubahan pemerintahan (revolusi).[1 2]

Sehubungan dengan maksud pemerintah akan merayakan ulangtahun ke-100 kemerdekaan Negeri Belanda dari penjajahan Perancis, di Bandung dibentuklah sebuah komite yang dikenal sebagai "Komite Bumiputra". Komite ini bermaksud hendak mengirimkan telegram kepada Ratu Belanda yang isinya mengandung permintaan pencabutan pasal III R.R. (Reglement op het beleid der Regeering), dibentuknya majelis perwakilan rakyat yang sejati dan ketegasan adanya kebebasan berpendapat di daerah jajahan. Salahseorang pemimpin komite ini, Suwardi Suryaningrat, menulis sebuah risalah yang berjudul "Als ik eens Nederlander was.....", yang isinya merupakan sindiran tajam atas ketidak-adilan di daerah jajahan. Karena kegiatan komite ini dipandang berbahaya, pada bulan Agustus 1913 Douwes Dekker, dr. Tjipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat dijatuhi hukuman buangan, dan mereka memilih Negeri Belanda.

Kepergian ketiga pemimpin tersebut membawa pengaruh terhadap kegiatan Indische Partij yang makin lama makin menurun. Kemudian Indische Partij berganti nama menjadi Partai Insulinde. Sebagai azas yang utama dalam programnya tertera: "mendidik suatu nasionalisme Hindia dengan memperkuat cita-cita persatuan bangsa". Kepada anggota-anggota ditekankan supaya menyebut dirinya "Indiërs", orang Hindia (Indonesia). Pengaruh Sarekat Islam yang kuat telah menarik orang-orang Indonesia, sehingga Partai Insulinde menjadi semakin lemah.

Kembalinya Douwes Dekker dari negeri Belanda tahun 1918 tidak begitu mempunyai arti bagi Partai Insulinde, yang kemudian pada bulan Juni 1919 berganti nama menjadi Nationaal Indische Partij (NIP). Dalam perkembangannya, partai ini tidak pernah mempunyai pengaruh kepada rakyat banyak bahkan akhirnya hanya merupakan perkumpulan orang-orang terpelajar.

---

12 DMG. Koch, *Menudju Kemerdekaan : Sedjarah Pergerakkan Kebangsaan Indonesia sampai 1942*, terdjemahan Abdul Muis, Jajasan Pembangunan Djakarta, 1951, hal. 39.

4. *Gerakan Pemuda*

Pergerakan Pemuda yang pertama didirikan yalah Boedi Oetomo pada tanggal 20 Mei 1908. Sungguhpun perkumpulan ini segera akan menjadi perkumpulan kaum tua, pada waktu lahirnya sebagian besar dari promotor-promotornya yalah pemuda, murid beberapa sekolah menengah, diantaranya R. Sutomo dan R. Gunawan Mangunkusumo. Cita-cita untuk melangsungkan pergerakan nasional untuk tanah Jawa itu muncul dari M. Wahidin Sudiro Husodo seorang dokter pensiunan yang tidak merasa puas akan keadaan bangsa dan tanahairnya. Akan tetapi pada kongresnya pertama Boedi Oetomo di Yogya pada tanggal 5 Oktober 1908, kelihatan bahwa perkumpulan tersebut bukan perkumpulan pemuda melainkan perkumpulan kaum tua, oleh karena semangat kongres itu bukan semangat pemuda dan yang memegang pimpinan semua kaum tua. Sebagian besar dari anggota perkumpulan terdiri dari ambtenaar-ambtenaar dari golongan bangsawan.

Ada satu hal yang dapat membuktikan, bahwa pada waktu itu rasa persatuan sudah mulai tumbuh. Oleh karena anggota Boedi Oetomo terdiri dari penduduk Jawa, Madura dan Bali, maka permusyawaratan dalam semua kongres memakai bahasa Indonesia.

Lama kelamaan golongan pemuda merasa tidak puas ter hadap Boedi Oetomo yang condong menjadi perkumpulan kaum tua. Makin disadari bahwa pemuda harus mempunyai perkumpulan sendiri, dimana pemuda dapat dididik secara pemuda untuk memenuhi kewajibannya di kelak kemudian hari.

Pada tanggal 7 Maret 1915 di Jakarta dr. R. Satiman Wiryosandjoyo, Kadarman dan Sunardi dan beberapa pemuda lainnya bermufakat untuk mendirikan perkumpulan pemuda dimana yang diterima sebagai anggota hanya anak-anak sekolah menengah yang berasal dari pulau Jawa dan Madura. Perkumpulan yang diberi nama *Tri Koro Dharmo* merupakan gerakan pemuda pertama yang sesungguhnya. Pada tahun itu juga didirikan cabang di Surabaya. Pada mulanya cabang Jakarta mempunyai lebih-kurang 50 anggota. Majalah perkumpulannya juga bernama Tri Koro Dharmo yang diterbitkan buat pertama kalinya pada tanggal 10 November 1915. Tujuan perkumpulan yakni mencapai Jawa-Raya dengan jalan memperkokoh rasa

persatuan antara pemuda Jawa, Sunda, Madura, Bali dan Lombok. Tri Koro Dharmo berarti tiga tujuan yang mulia: sakti, budhi, bakti.

Azas perkumpulan yaitu:

1. menimbulkan pertalian antara murid-murid bumiputra pada sekolah menengah, dan kursus perguruan kejuruan dan sekolah vak;
2. menambah pengetahuan umum bagi anggota-anggotanya;
3. membangkitkan dan mempertajam perasaan buat segala bahasa dan budaya Indonesia. [13]

Namun, karena sifatnya masih Jawa-sentris, pemuda-pemuda Sunda dan Madura merasa tidak senang. Untuk menghindari perpecahan, maka pada Kongres di Solo ditetapkan bahwa mulai tanggal 12 Juni 1918 nama diubah menjadi *Jong Java.*

Menurut anggaran dasar yang ditetapkan tahun 1920, Jong Java bertujuan mendidik para anggota supaya ia kelak dapat memberikan tenaganya untuk pembangunan Jawa Raya dengan jalan mempererat persatuan, menambah pengetahuan anggota serta berusaha menimbulkan rasa cinta akan budaya sendiri.

Dalam kongres bulan Mei 1922 ditetapkan bahwa Jong Java tidak mencampuri urusan politik, anggota-anggota dilarang menjalankan politik atau menjadi anggota perkumpulan politik. Jong Java menjauhkan dirinya samasekali dari medan aksi dan propaganda politik. Diakui sebagai badan hukum oleh pemerintah setelah anggaran dasarnya di ubah dan disesuaikan dengan permintaan pemerintah tahun 1923.

Perkembangan gerakan politik ternyata juga menyeret Jong Java, sehingga masalah ini menjadi hangat dalam kongres ke-VII tahun 1924. Ada usul supaya Jong Java tetap tidak dijadikan perkumpulan politik tetapi kepada anggota yang sudah cukup dewasa diberi kebebasan berpolitik. Sikap ini disokong oleh H. Agus Salim yang mencoba memasukkan soal agama dalam Jong Java dengan pendapat bahwa soal agama ini adalah sangat besar pengaruhnya dalam mencapai cita-cita. Usul ini ditolak, yang setuju berpolitik kemudian mendirikan *Jong Islamieten Bond*

---

13 Lihat: *Gedenkboek Jong-Java: 1915 – 1930,* diterbitkan oleh Pedoman Besar Jong Java, Djakarta, 20 April 1930.

dengan agama Islam sebagai dasar perjuangan. *Jong Islamieten Bond* juga menerbitkan majallah yang diberi nama *Al-Noer.* Untuk menggalang persatuan dengan perkumpulan pemuda-pemuda Islam lainnya dibentuklah *Pemuda Muslimin Indonesia.*

Sejalan dengan munculnya Jong Java, berdiri pula perkumpulan-perkumpulan pemuda yang berdasarkan kedaerahannya seperti *Pasundan, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa, Jong Ambon* dan *Jong Celebes* (Sulawesi) yang kesemuanya bercita-cita ke arah kemajuan Indonesia, terutama memajukan budaya dan daerah masing-masing.

Jong Sumatranen Bond didirikan oleh murid-murid sekolah yang berasal dari Sumatra pada tanggal 9 Desember 1917 di Jakarta, yang kemudian mempunyai cabang di Padang dan Bukittinggi. Tujuannya adalah mempererat hubungan diantara murid-murid yang berasal dari Sumatra, mendidik pemuda Sumatra untuk menjadi pemimpin bangsa serta mempelajari dan mengembangkan budaya Sumatra. Di antara pemimpin-pemimpin perkumpulan ini terdapat Mohammad Hatta dan Muhammad Yamin.

Dapat dilihat bahwa beberapa perkumpulan mengandung dalam susunannya atau bentuknya benih-benih yang dapat ditujukan kearah persatuan bangsa Indonesia. Oleh karena itu pemuda-pemuda Indonesia merasa perlunya persatuan pemuda-pemuda Indonesia yang dituangkan dalam satu wadah sehingga didapat satu derap-langkah yang sama dalam mencapai apa yang dicita-citakan oleh pemuda Indonesia umumnya.

Kongres yang pertama untuk mencapai persatuan pemuda Indonesia yalah Kongres Pemuda Indonesia I yang diadakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di kota Jakarta. Kongres tersebut dilantik oleh Jong Indonesia Kongres Komite di bawah pimpinan Tabrani. Komite ini dibentuk sehabis konferensi antara Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Ambon, pelajar-pelajar Minahasa, Sekar Rukun dan lain-lain pada tanggal 15 November 1925, dan terdiri dari Bahder Djohan, Sumarto, Jan Toule, Soulehuwij, Paul Pinontoan dan Tabrani. Tujuan kongres yalah menanam semangat kerjasama antara perkumpulan pemuda di Indonesia untuk menjadi dasar bagi Persatuan Indonesia, dalam arti yang lebih luas. Pada kongres dimajukan usul oleh P P P I (Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang didirikan tahun 1926 di Jakarta) untuk menggabungkan segala perkumpulan

pemuda dalam satu badan perhimpunan massa muda Indonesia, tetapi usaha ini tidak dapat dilaksanakan karena rasa kedaerahan masih kuat. Sehabis kongres, diadakan suatu konferensi pada tanggal 15 Agustus 1926 oleh Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Sekar Rukun, Jong Islamieten Bond, Jong Batak, Ambonsche Studeerenden, Minahassische Studeerenden dan Kongres Komite. Diusulkan agar mendirikan badan permanen untuk keperluan Persatuan Indonesia. Usul diterima terkecuali oleh Jong Islamieten Bond.

Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 1926 di sahkanlah anggaran dasar perhimpunan baru yang bernama *Jong Indonesia*, dengan tujuan menanamkan dan mewujudkan cita-cita persatuan seluruh Indonesia, dengan dasar nasionalisme menuju ke arah terwujudnya Indonesia Raya. Perhimpunan ini terlepas dari semua perkumpulan pemuda Indonesia, bersifat permanen dan diurus oleh satu komite atau dewan.

Usaha perhimpunan baru itu tidak dapat berbuah seperti yang diharapkan. Pada awal tahun 1927 oleh *Algemene Studie Club* di kota Bandung didirikan perkumpulan pemuda yang juga dinamakan Jong Indonesia, kelak diganti dengan nama *Pemuda Indonesia*. Tujuan perkumpulan ini tidak banyak bedanya dengan Jong Indonesia, hanya susunannya berlainan. Tidak berpolitik, namun anggota-anggota secara perseorangan boleh. Ditetapkanpula bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa resmi. Pemuda Indonesia bukan badan pusat semua persatuan perkumpulan pemuda.

Atas inisiatif P P P I kembali pada tanggal 27 – 28 Oktober 1928 dilangsungkan Kongres Pemuda Indonesia ke-II untuk mempersatukan segala perkumpulan pemuda Indonesia yang ada dalam satu badan gabungan. Kongres menghasilkan sumpah pemuda yang terkenal dengan nama *Sumpah Pemuda*. Isinya tiga sendi persatuan Indonesia, yaitu persatuan tanahair, bangsa dan bahasa.

Dalam Kongres yang diadakan di Yogya pada tanggal 24 – 28 Desember 1928 diambil keputusan untuk mengadakan fusi (gabungan). Keputusan tersebut disetujui oleh Jong Java, Jong Sumatra (tahun 1928 menjadi Pemuda Sumatra), dan Jong Celebes. Kemudian dibentuklah suatu komisi, kelak disebut Komisi Besar Indonesia Muda, untuk mempersiapkan langkah-langkah pelaksanaannya. Akhirnya pada tanggal 31 Desember

1930 dalam konferensi di Solo ditetapkanlah berdirinya organisasi *Indonesia Muda*. Pada saat berdirinya telah mempunyai anggota 2400 dan 25 cabang, diantaranya 4 di Sumatra dan satu di Sulawesi. Jong Islamieten Bond dan Pemuda Muslimin tidak menggabungkan diri.

Indonesia Muda memutuskan tidak akan turut segala aksi politik, dan anggota dilarang pula melakukan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan politik. Azasnya adalah kebangsaan dan tujuannya adalah Indonesia Raya. Organisasi ini juga menerbitkan majalah yang diberi nama Indonesia Muda.

Oleh karena dinyatakan bahwa Indonesia Muda tidak berpolitik, maka tindakannya menjadi kurang kelihatan. Walaupun begitu pemerintah masih juga mencurigainya, sehingga murid beberapa sekolah pemerintah dilarang menjadi anggotanya, bahkan banyak dengan alasan yang tidak meyakinkan.

Tekanan dan kekangan pemerintah terhadap perhimpunan atau organisasi-organisasi pemuda ini, seperti sukar untuk mendapat pekerjaan dan larangan bersekolah bagi anggota-anggota organisasi pemuda, menyebabkan banyak juga yang keluar dari organisasi. Akibatnya rasa tidak puas terhadap pemerintah makin dalam. Organisasi-organisasi baru yang muncul dengan sifat radikal seperti Suluh Pemuda Indonesia dan Persatuan Pemuda Rakyat Indonesia yang mempunyai program Indonesia Merdeka segera dilarang.

Politik reaksioner Gubernur Jenderal de Jonge (terutama tahun 1932 – 1937) tidak hanya melumpuhkan gerakan partai-partai politik tetapi juga organisasi-organisasi pemuda. Artikel 153 bis dan ter banyak menimbulkan korban bagi pemuda-pemuda. Adanya ordonansi sekolah-sekolah liar juga menjadi hal yang sangat menghebohkan. Melihat hal ini Indonesia Muda mencoba untuk mengadakan kongres pada tahun 1936, tetapi gagal karena tidak ada izin pemerintah. Barulah pada tahun 1938 dapat diadakan Kongres Pemuda Indonesia ke-III di Yogyakarta. Hasilnya yalah federasi organisasi-organisasi pemuda dengan nama Persatuan Pergerakan Pemuda Indonesia (Perpindo) dengan pusat di Jakarta. Kongres juga memutuskan mengenai kata "kemerdekaan Nusa dan Bangsa" diganti dengan "menjunjung martabat Nusa dan Bangsa." Ini disebabkan karena kata "kemerdekaan" tersebut tabu bagi pemerintah Belanda.

Disamping organisasi-organisasi pemuda yang bersifat nasio-

nal, juga ada organisasi yang berdasarkan keagamaan seperti: Jong Islamieten Bond, Anshor Nahdatul Ulama, Pemuda Muhammadiyah, Persatuan Pemuda Kristen, dan Persatuan Pemuda Katholik, yang kebanyakah adalah merupakan anak dari organisasi yang lebih besar. Juga ada organisasi yang lebih terbatas lingkungannya seperti Voor Onze Jeugd (VOJ) yang ke-barat-baratan, Unitas Studiosorum Indonesiensis (USI) merupakan pecahan dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Perserikatan Pemuda Taman Siswa (didirikan tahun 1933) yang cukup mempunyai pengaruh, dan beberapa organisasi wanita yang tidak begitu menonjol.

Gerakan pemuda Indonesia tidaklah hanya terbatas di dalam-negeri saja tetapi juga di luar negeri terutama di Eropa dan negara-negara Arab. Yang paling menonjol adalam *Perhimpunan Indonesia*, berpusat di Negeri Belanda, yang banyak melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa dikemudian hari. Konferensi-konferensi internasional seperti Konferensi Pemuda Internasional (di Paris tahun 1973),[14] Konperensi Student Internasional (di Paris 1937), Konferensi antara mahasiswa Belanda, Inggris, Cina, India dan Indonesia (di Leiden tahun 1938) dan Kongres Pemuda Sedunia (di Amerika Serikat tahun 1939) dihadiri oleh utusan-utusan pemuda Indonesia. Kehadirannya tidak hanya mempropagandakan nama Indonesia di luar negeri tetapi juga menggalang persahabatan dengan pemimpin-pemimpin pemuda bangsa lain dalam usaha mencapai cita-cita Indonesia Merdeka.

B. MASA RADIKAL

1. Perhimpunan Indonesia

Perhimpunan Indonesia (PI) didirikan pada tahun 1908 oleh oleh orang-orang Indonesia yang berada di Negeri Belanda, diantaranya adalah Sutan Kasayangan, R.N. Noto Suroto, mula-mula dengan nama *Indische Vereeniging*.[15] Tujuannya adalah untuk memajukan kepentingan-kepentingan bersama dari orang-orang yang berasal dari Indonesia, maksudnya orang-orang pribumi dan non-pribumi bukan Eropa, di Negeri Belanda dan

14 *Indonesia Raya*. Th. 9 no. 4, Desember 1937, hal. 40 – 44.

15 Dr. A. Rivai, *Student Indonesia di Eropa*, hal. 16.

hubungan dengan Indonesia.. Pada mulanya organisasi ini hanya bersifat organisasi sosial. Akan tetapi semenjak berakhirnya Perang Dunia I perasaan anti kolonialisme dan imperialisme dikalangan pemimpin-pemimpin Indische Vereeniging makin menonjol. Lebih-lebih sejak adanya seruan Presiden Woodrow Wilson dari Amerika Serikat setelah Perang Dunia I berakhir, kesadaran mereka tentang hak dari bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri dan merdeka dari penjajahan Belanda makin kuat.

Perkembangan baru dalam tubuh organisasi itu juga membawa perubahan nama yang kini diganti menjadi *Indonesische Vereeniging* pada tahun 1922. Dan pada tahun 1925 di samping nama dalam bahasa Belanda dipakai juga nama Perhimpunan Indonesia dan lama-lama hanya nama PI saja yang dipakai. Dengan demikian PI semakin tegas bergerak memasuki bidang politik. Perubahan ini juga didorong oleh bangkitnya seluruh bangsa-bangsa terjajah di Asia dan Afrika untuk menuntut kemerdekaan.

Majalah *Hindia Poetra* bulan Maret 1923 menyebutkan keterangan azas PI sebagai berikut:

Mengusahakan suatu pemerintahan untuk Indonesia, yang bertanggungjawab hanya kepada Rakyat Indonesia semata-mata, bahwa hal yang demikian itu hanya akan dapat dicapai oleh orang Indonesia sendiri bukan dengan pertolongan siapapun juga; bahwa segala jenis perpecahan tenaga haruslah dihindarkan, supaya tujuan itu lekas tercapai. [16]

Semenjak tahun 1923, PI aktif berjuang bahkan memelopori dari jauh perjuangan kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia dengan berjiwa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang murni dan kompak. Berdasarkan perubahan ini PI keluar dari Indonesisch Verbond van Studeerenden (suatu perkumpulan yang bertujuan menggabungkan organisasi-organisasi mahasiswa Indonesia, Belanda, Indo Belanda dan peranakan Cina yang berorientasi ke Indonesia dalam satu kerjasama) pada tahun 1923 karena dianggap tidak perlu lagi. Dalam tahun itu juga diterbitkan suatu buku peringatan PI yang menggemparkan kaum kolinialis Belanda: *Gedenkboek 1908 – 1923 Indonesische Vereeniging*. Langkah selanjutnya dari sikap radikal PI ini yalah

16 Mr.A.K.Pringgodigdo, *op, cit.*, hal. 54.

merobah nama majalahnya dari *Hindia Poetra* menjadi *Indonesia Merdeka* tahun 1924.

Meningkatnya aktivitas ke arah politik terutama sejak datangnya dua orang mahasiswa ke Negeri Belanda, yaitu A. Subardjo tahun 1919 dan Mohammad Hatta pada tahun 1921, yang kedua-duanya kemudian pernah mengetuai PI. Dengan bertambah banyaknya mahasiswa Indonesia yang belajar di Negeri Belanda bertambah pula kekuatan PI. Pada permulaan tahun 1925 dibuatlah suatu anggaran dasar baru yang merupakan penegasan yang lebih jelas lagi dari perjuangan PI. Di dalamnya disebutkan bahwa kemerdekaan penuh bagi Indonesia hanya akan diperoleh dengan aksi bersama yang dilakukan serentak oleh seluruh kaum nasionalis dan berdasarkan atas kekuatan sendiri. Untuk itu sangat diperlukan kekompakan rakyat seluruhnya. Yang menjadi soal terpenting di dalam segala penjajahan kolonial, yalah soal kepentingan antara pihak yang menjajah dengan pihak yang dijajah, yang memang sangat bertentangan. Penjajahan itu memang membawa pengaruh yang merusak jasmani dan rohani orang Indonesia dan merusak kehidupan lahir-batin.

Sementara itu kegiatannya meningkat menjadi nasional-demokratis, non-koperasi dan meninggalkan sikap kerjasama dengan kaum penjajah; bahkan menjadi internasional dan anti-kolonial. Di bidang internasional ini PI bertemu dan bekerjasama dengan perkumpulan-perkumpulan dan tokoh-tokoh pemuda serta mahasiswa yang berasal dari negeri-negeri jajahan di Asia dan Afrika yang mempunyai cita-cita yang sama dengan Indonesia. PI memang berusaha supaya masalah Indonesia mendapatkan perhatian dari dunia internasional. Hubungan dengan beberapa organisasi internasional diadakan seperti Liga Penentang Imperialisme dan penindasan kolonial, Komintern dan lain-lain. Dalam kongres ke 6 Liga Demokratie Internasional untuk Perdamaian pada bulan Agustus 1926 di Paris (Perancis), Moh. Hatta dengan tegas menyatakan tuntutan untuk kemerdekaan Indonesia.[17] Kejadian ini menyebabkan Pemerintah Belanda bertambah curiga pada PI. Kecurigaan ini bertambah lagi sewaktu Moh. Hatta atas nama PI menandatangani suatu perjanjian (rahasia) dengan Semaun (PKI) pada tanggal 5 Desember 1926 yang isinya menyatakan bahwa PKI mengakui kepemimpinan PI dan akan

17 Moh. Hatta, "Onze buitenlandsche propaganden" dalam *Indonesia Merdeka*, 1926, hal. 148 dst.

dikembangkan menjadi suatu partai rakyat kebangsaan Indonesia, selama PI secara konsekwen tetap menjalankan politik untuk kemerdekaan Indonesia.[18] Perjanjian ini, karena dinilai oleh Komintern sebagai suatu kesalahan besar, dibatalkan kembali oleh Semaun.

Dalam Kongres I Liga pada bulan Februari 1927 di Berlin yang dihadiri antara lain wakil-wakil pergerakan di negeri jajahan, PI yang bertindak atasnama PPPKI di Indonesia juga mengirimkan wakil-wakilnya, Moh. Hatta, Nazir Pamontjak, Gatot dan A. Subardjo. Kongres mengambil keputusan antara lain:

1. menyatakan simpati sebesar-besarnya kepada pergerakan kemerdekaan Indonesia dan akan menyokong usaha tersebut dengan segala daya.
2. menuntut dengan keras kepada Pemerintah Belanda: kebebasan bekerja untuk pergerakan rakyat Indonesia.

Dalam kongres kedua di Brussel tahun 1927, PI juga ikut, tetapi sewaktu Liga didominasi oleh kaum komunis, PI keluar dari Liga.

Kegiatan PI di kalangan internasional ini menimbulkan reaksi yang keras dari Pemerintah Belanda. Atas tuduhan "dengan tulisan menghasut dimuka umum untuk memberontak terhadap pemerintah", maka pada tanggal 10 Juni 1927 empat anggota PI yaitu Moh. Hatta, Nazir Pamontjak, Abdulmadjid Djoyoadiningrat dan Ali Sastroamidjojo ditangkap dan ditahan sampai tanggal 8 Maret 1928. Namun dalam pemeriksaan di sidang pengadilan di Den Haag tanggal 22 Maret 1928, karena tidak terbukti bersalah, mereka dibebaskan.

Dalam kalangan pergerakan di Indonesia sendiri nampak berangsur-angsur semakin berhasil dipengaruhi oleh PI. Bahkan ada kejadian penting yang timbul di tanahair yang secara langsung mendapat ilham dari PI seperti lahirnya *Partai Nasional Indonesia (PNI)* tahun 1927, Jong Indonesië (Pemuda Indonesia) tahun 1927 dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia (PPPI) tahun 1926.

2. *Partai Komunis Indonesia*

Benih-benih paham Marxisme datang dari luar negeri dan

---

18 Mr. A.K. Pringgodigdo, *op. cit.*, hal. 56 – 57; J. Th. Blumberger, *De Communistische beweging in Nederlandsche Indie*, hal. 142.

mulai ditanamkan di bumi Indonesia pada masa sebelum Perang Dunia I, yaitu dengan datangnya seorang pemimpin buruh Negeri Belanda bernama H.J.F.M. Sneevliet. Ia adalah anggota Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP) atau Partai Buruh Sosial-Demokrat.

Di Indonesia ia mula-mula bekerja sebagai anggota staf redaksi pada surat-kabar *Soerabajaasch Handelsblad.* tidak lama kemudian pada tahun 1913 ia pindah ke Semarang dan menjadi sekretaris pada Semarangse Handelsvereniging. Bagi Sneevliet tinggal di Semarang adalah menguntungkan karena Semarang adalah pusat daripada Vereniging van Spoor en Tramweg Personeel (VSTP),serikat buruh yang tertua di Indonesia dan pada masa itu merupakan suatu perkumpulan yang sudah tersusun baik. Sebagai pemimpin sosialis yang berpengalaman dalam waktu singkat ia berhasil membawa VSTP ke arah yang lebih radikal. Atas prakarsanya pada tanggal 9 Mei 1914 bersama-sama dengan orang-orang sosialis lainnya seperti J.A. Brandsteder, H.W. Dekker dan P. Bergsma berhasil didirikan suatu organisasi yang diberi nama *Indische Sociaal-Democratische Vereniging (ISDV).* Pada tahun 1915, ISDV menerbitkan majalah *Het Vrije Woord* dengan redaksi Sneevliet, Bergsma dan Adolf Baars. Sneevliet dan kawan-kawannya merasa bahwa ISDV tidak dapat berkembang karena tidak berakar di dalam masyarakat Indonesia. Oleh karena itu mereka menganggap adalah lebih efektif untuk bersekutu dengan gerakan yang lebih besar yang dapat bertindak sebagai jembatan kepada massa rakyat Indonesia. Mula-mula bersekutu dengan Insulinde yang mempunyai anggota lebih besar daripada PSDV (tahun 1917 lebih kurang 6000 orang). Tetapi karena tidak memenuhi sasaran tujuan ISDV, sesudah satu tahun kerjasama itu bubar.

Sasaran kemudian dialihkan kepada Sarekat Islam yang pada masa itu (1916) mempunyai ratusan ribu anggota dan merupakan suatu gerakan raksasa di dalam pergerakan nasional Indonesia. Dengan menggunakan taktik infiltrasi yang dikenal dengan nama "blok di dalam" ISDV berhasil menyusup ke dalam SI. Caranya yalah dengan menjadikan anggota ISDV menjadi anggota SI dan sebaliknya menjadikan anggota SI menjadi anggota ISDV. Dalam waktu satu tahun Sneevliet cs. telah mempunyai pengaruh yang kuat di kalangan anggota-anggota SI. Mereka memperkuat pengaruhnya dengan jalan menunggangi keadaan buruk akibat Perang

Dunia I dan panenan padi yang jelek serta ketidak-puasan buruh perkebunan sebab upah yang rendah dan membubungnya harga-harga.

Ada beberapa hal yang menyebabkan berhasilnya ISDV melakukan infiltrasi ke dalam tubuh SI:

1. Central Sarekat Islam (CSI) sebagai badan koordinasi pusat masih sangat lemah kekuasaannya. Tiap-tiap cabang SI bertindak sendiri-sendiri secara bebas. Para pemimpin lokal yang kuat mempunyai pengaruh yang menentukan didalam SI cabang.
2. Kondisi kepartaian pada masa itu memungkinkan orang untuk sekaligus menjadi anggota lebih dari satu partai. Hal ini disebabkan oleh karena pada mulanya organisasi-organisasi itu didirikan bukan sebagai suatu partai politik melainkan sebagai suatu organisasi guna mendukung berbagai kepentingan sosial-budaya dan ekonomi. Di kalangan kaum terpelajar menjadi kebiasaan bagi setiap orang untuk memasuki berbagai macam organisasi yang dianggapnya dapat membantu kepentingannya.

Kemudian Sneevliet cs berhasil mengambilalih beberapa pemimpin muda SI menjadi pemimpin ISDV. Yang terpenting di antara pemimpin muda itu adalah Semaun dan Darsono yang pada tahun 1916 menjadi anggota SI cabang Surabaya. Surabaya pada waktu itu adalah pusat CSI. Tidak lama kemudian Semaun pindah ke Semarang, di mana SI cabang Semarang telah mendapat pengaruh kuat dari ISDV. Semaun berhasil memperkembangkan keanggotaannya dengan pesat, dari 1700 orang pada tahun 1916 menjadi 20.000 orang setahun kemudian. Tetapi karena orientasinya yang Marxistis, di bawah pengaruh ISDV, mereka menjadi lawan daripada CSI yang dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto. SI Semarang menyerang CSI sama sengitnya seperti mereka menyerang pemerintah kolonial dan kapitalis asing. Oleh karena campur-tangan ISDV dalam pertikaian antara CSI dengan SI Semarang maka pada kongresnya dalam bulan Oktober 1917 Sarekat Islam memutuskan untuk menghentikan segala hubungan dengan ISDV.

Sementara itu didalam ISDV sendiri timbul perpecahan. Oleh karena sikap pimpinannya yang terlalu radikal maka golongan yang moderat didalam ISDV mengundurkan diri. Pada tanggal

8 September 1917 mereka membentuk SDAP cabang Hindia Belanda yang kemudian menjadi *Indische Sociaal-Democratische Partij (ISDP).*

Pada waktu pecahnya revolusi Bolsyewik di Rusia, tubuh ISDV telah bersih dari unsur-unsur yang moderat dan dapat dikatakan sikapnya telah bersifat komunistis. Berita tentang kemenangan kaum Bolsyewik disambut dengan penuh antusiasme. Baars dengan berapi-api menyerukan agar revolusi Rusia diikuti sekarang juga di Hindia Belanda. Pada akhir tahun 1917 ISDV mulai mengerahkan serdadu-serdadu dan pelaut- pelaut Belanda untuk aksi-aksi mereka. Dalam waktu 3 bulan mereka berhasil mengumpulkan 3.000 orang kedalam gerakan tersebut. Kaum merah mengorganisir demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan oleh serdadu-serdadu dan pelaut-pelaut yang berkelahi dengan polisi. Darsono melalui suratkabar ISDV menyerukan dikobarkannya pemberontakan dan dikibarkannya bendera merah, sedangkan partai-partai yang moderat seperti Budi Utomo, Insulinde, SDAP–Hindia Belanda dan SI mendesak kepada pemerintah kolonial Belanda untuk menggantikan Volksraad dengan parlemen pilihan rakyat. Krisis November segera mereda ketika Gubernur Jenderal van Limburg Stirum menjanjikan akan dilakukan perubahan-perubahan yang luas. Ketika suasana dapat dikuasai maka pemerintah kolonial segera mengambil tindakan-tindakan keras. Anggota-anggota militer yang indisipliner dan menimbulkan kekacauan dihukum berat, sedangkan pegawai negeri yang terlibat dimutasikan. Sneevliet diusir sedangkan Darsono, Abdul Muis dan beberapa pemimpin Indonesia lainnya ditangkap. Dengan tindakan ini ISDV mengalami depresi. Akhir 1918 merupakan akhir daripada masa pertama pertumbuhan ISDV, dan dengan demikian maka pada akhir tahun 1918 gerakan kaum sosialis dapat dikatakan mati.

Masa tahun 1919 merupakan masa sulit bagi para anggota golongan Eropa didalam ISDV. Sebagai akibat tindakan besar pemerintah kolonial, maka banyak diantara yang dipenjarakan dan diusir dari Hindia Belanda. Karena kehilangan pimpinan serta kegagalan-kegagalan gerakan mereka di Negeri Belanda dan Hindia Belanda, peranan golongan Eropa di dalam ISDV menjadi berkurang. Muncullah aktivis-aktivis bangsa Indonesia di dalam pimpinan ISDV. Mereka itu antara lain adalah Semaun dan Darsono yang telah memperoleh didikan Sneevliet. Sebagai hasil

kongres Sarekat Islam tahun 1918, maka diangkatlah Darsono sebagai propagandis resmi CSI dan Semaun sebagai komisaris wilayah Jawa Tengah. Penempatan ini menunjukkan kemajuan ISDV karena para pemimpin utamanya yang berhaluan kiri mempunyai kedudukan kuat dalam Sarekat Islam. Selama tahun 1919 para pemimpin ISDV dari golongan Indonesia meningkatkan usahanya untuk mempengaruhi SI agar menjadi lebih radikal.

Dalam usahanya untuk menyalurkan aktivis partai-partai agar tidak membahayakan, pemerintah kolonial berusaha untuk mengalihkan kegiatan politik mereka kepada kegiatan ekonomi sebagai usaha untuk membantu menaikkan taraf hidup rakyat sesuai dengan "politik etis". Ketika pemerintah kolonial bermaksud untuk mengalihkan SI menjadi organisasi buruh, hal ini sangat ditunggu dengan penuh minat oleh ISDV, karena hal ini akan dapat meningkatkan pengaruh SI Semarang yang lebih dekat hubungannya dengan persoalan buruh. Lagi pula hal itu mungkin akan menyebabkan para pemimpin CSI lebih memperhatikan ideologi kaum sosialis radikal dan mengurangi titikberatnya pada persoalan agama. Hal ini dianggap penting oleh ISDV oleh karena ISDV sendiri terbatas kemampuannya untuk mengorganisasi kaum buruh, sebab walaupun mempunyai pengikut-pengikut di kalangan pekerja-pekerja perkebunan, kuli-kuli, dan buruh-buruh pertanian yang tidak mempunyai tanah dan yang merupakan jumlah terbesar kaum buruh Indonesia.

Ketika SDAP di Negara Belanda pada tahun 1918 mempermaklumkan dirinya menjadi Partai Komunis Belanda (CPN), maka beberapa anggota bangsa Eropa didalam ISDV mengusulkan untuk mengikuti jejak itu. Sebagai hasil gagasan mereka maka pada kongres ISDV ke-7 di bulan Mei 1920 dibicarakan usul untuk menggantikan ISDV menjadi Perserikatan Kommunist di Hindia. Di antara sponsor utama terdapat Baars. Baars menyatakan dirinya berbicara atas nama para anggota yang menginginkan agar organisasi membedakan dirinya dari kaum sosialis revisionis dan menyatakan hubungan kekeluargaannya dengan partai yang kemudian menjurus ke arah "Komintern". Demikian pula Bergsma dan Semaun menyatakan keinginan untuk mengubah nama ISDV, dengan tujuan untuk membedakan diri dengan "kaum sosialis palsu" dan untuk mengidentifikasikan diri dengan Komintern. Sedangkan menurut Bergsma, ISDV sudah sejak lama menjadi komunis.

Dilain pihak golongan yang menentang yang diwakili oleh Hartogh menganggap bahwa walaupun ISDV menaruh simpati kepada revolusi Bolsyewik di Rusia, akan tetapi tidak semua unsur komunisme cocok bagi alam Indonesia seperti sistim diktatur proletar dan sistim Sovyet yang menurut Baars merupakan program komunis yang paling esensiil. Akhirnya diadakanlah pemungutan suara untuk menentukan keputusan. Ternyata hanya cabang-cabang Surabaya, Bandung dan Ternate yang menentang perubahan nama ISDV. Dengan demikian Baars – Begsma – Semaun cs. memperoleh kemenangan dan pada tanggal 23 Mei 1920 ISDV merubah namanya menjadi Partai Kommunist Hindia yang pada bulan Desember tahun yang sama menjadi Partai Komunis Indonesia (PKI). Dalam susunan pengurus baru terpilihnya a.l. Semaun sebagai Ketua, Darsono sebagai Wakil Ketua, Bergsma sebagai Sekretaris, Dekker sebagai Bendahara, Baars, Sugono dan lain-lain sebagai anggota pengurus.

Ketika Komintern dibentuk tahun 1919, pengaruhnya telah terasa di Indonesia. Sebagaimana diketahui, segala keputusan dari Komintern itu sebagian besar dipengaruhi dan ditentukan oleh pandangan Partai Komunis Rusia. Dalam hal ini dapat diketahui bahwa sikap Rusia mengenai komunisme antara lain:

a. Sangat memandang kecil potensi kaum tani di dalam revolusi proletar. Hal ini didasarkan fakta bahwa revolusi Bolsyewik dimenangkan tanpa ikutsertanya secara aktif kaum tani. Mereka memandang kaum tani sebagai "borjuis kecil". Pandangan ini baru berubah ketika kelak Mao Tse-tung berhasil memperoleh kemenangan dengan mendasarkan diri kepada potensi kaum tani. Ketika itu gerakan komunis internasional baru menyadari bahwa di wilayah Asia, petani dapat menjadi kekuatan yang menggerakkan revolusi proletaar dan bukan hanya alat saja untuk memperoleh dukungan massa.
b. Berhubung dengan politiknya terhadap negara-negara yang masih dijajah di Asia, maka berlainan dengan sikapnya terhadap Islam di negaranya sendiri, Rusia menganggap bahwa agama Islam dapat dipergunakan sebagai alat propaganda untuk menarik persahabatan dan simpati rakyat-rakyat yang beragama Islam di negeri-negeri Timur. Akan tetapi Rusia menentang usaha-usaha pembentukan "Pan

Islamisme" yang dianggap bersifat kenasionalan dan keagamaan karena bertentangan dengan kepentingan Komintern.

Oleh karena kegagalan-kegagalan dalam merencanakan program komunis di Asia, maka Lenin kemudian menyatakan bahwa untuk Asia, garis politik Komintern harus mendekati dan bekerjasama dengan kaum borjuis nasional dan mempergunakan organisasi nasional rakyat terjajah (yang dimaksud dengan borjuis nasional yalah kaum inteligensia yang merupakan pemimpin-pemimpin nasionalis Asia). Pada kongres Komintern kedua (Juli 1920) diadakan perubahan-perubahan tentang garis-garis politik Komintern terhadap negara-negara jajahan di dunia Timur. Dalam kongres itu Sneevliet yang hadir sebagai Wakil Indonesia dengan nama samaran Maring menjadi sekretaris komisi. Ia berusaha di dalam kongres itu untuk meyakinkan Komintern akan perlunya kaum komunis di Indonesia mengadakan hubungan dengan Sarekat Islam di dalam usaha untuk mencapai kemenangan komunis. Dikatakan SI adalah gerakan proletar, dan bahwa keagamaan Islam disitu hanyalah faktor yang kedua. Kongres Komintern kemudian menyetujui taktik kaum komunis Indonesia untuk bekerja di dalam tubuh SI ini. Kongres juga menganggap perlu untuk memperkenankan kerjasama (untuk sementara waktu) dengan kaum borjuis untuk menggerakkan revolusi di Asia, dengan jalan menyokong aksi landreform yang memperjuangkan cita-cita "tanah untuk petani kecil penggarap tanah".

Penggantian nama dan pergantian susunan pengurus sebagai hasil kongres bulan Mei 1920 tidak mengubah program politik partai. Dengan perubahan nama, Partai tetap berpegang teguh kepada prinsip internasionalis dan menganggap nasionalisme sebagai salah-satu musuh utama. Pada kongres istimewa tanggal 24 Desember 1920 PKI mengambil keputusan untuk berafiliasi dengan organisasi Komintern. Afiliasi dengan Komintern menyebabkan PKI harus menyesuaikan sikapnya sesuai dengan garis politik Asia daripada Komintern. Salahsatu pandangan yang harus diubahnya yalah sikap terhadap partai-partai non-komunis menurut garis Komintern yang diputuskan dalam kongres tahun 1920 (yaitu taktik yang disebut "front persatuan dari atas", suatu taktik Komintern yang meliputi masa 1920 – 1927) maka PKI mulai bersiap-siap untuk berpartisi di dalam Volksraad.

Dalam usaha mencapai "front persatuan" maka pada bulan Desember 1919 partai-partai SI, Sarekat Hindia (dahulu Insulinde), dan ISDV/PKI membentuk Persatuan Pergerakan Kemerdekaan Rakyat (PPKR). Akan tetapi tidak lama kemudian timbullah perbedaan paham di dalam tubuh PPKR. Tokoh ISDV/PKI terlalu menonjolkan unsur internasional dalam program perjuangan PPKR, Sarekat Islam mengutamakan unsur "Islam" sebagai landasan untuk mempersatukan bangsa, sedangkan Sarekat Hindia (Insulinde) justru menekankan kepada unsur "kenasionalan" sebagai unsur yang harus lebih dipentingkan daripada pertimbangan-pertimbangan "keagamaan", "perjuangan kelas" dan "kedaerahan" dalam usaha untuk membangkitkan aspirasi nasional dan kesadaran sosial. Keputusan Komintern yang menentang usaha-usaha ke arah cita-cita Pan-Islamisme menyebabkan PKI menemui kesulitan dalam hubungannya dengan Sarekat Islam, oleh karena kelompok yang anti komunis didalam SI menuduh bahwa keputusan ini berarti memusuhi Islam secara keseluruhan.

Sementara itu dalam tubuh SI terjadilah perpecahan yang disebabkan oleh karena perbedaan tujuan dan taktik perjuangan antara golongan "kiri" dan "kanan". Terhadap golongan SI kiri ini, yang disebut Afdeling B, pemerintah kolonial Belanda mengambil tindakan yang keras. Diantara para pemimpin golongan kiri antara lain yalah Semaun, Alimin dan Darsono. Mereka merupakan pemimpin-pemimpin SI dari cabang Semarang yang nota bene adalah pemimpin-pemimpin PKI setempat. Sedangkan yang berhaluan kanan berpusat di Yogyakarta dan dipimpin oleh Abdúl Muis, Agus Salim dan Suryopranoto.

Dalam hal ini peranan H.O.S. Tjokroaminoto sangat menentukan sebagai tenaga pemersatu terhadap kedua aliran yang berbeda itu. Akan tetapi pertentangan itu makin lama makin mendalam jua. Dalam usaha untuk menguasai buruh, timbullah kompetisi antara Semaun dengan Suryopranoto. Golongan kiri kemudian mendirikan organisasi yang dinamai *Revolutionnaire Vak-Centrale (RVC)* dan berkedudukan di Semarang.

Dengan munculnya pendirian Komintern yang menentang cita-cita Pan-Islamisme, maka jurang pertentangan antara golongan kiri dan kanan makin melebar. Di dalam konferensi SI bulan Maret 1921, Haji Fachruddin, Wakil Ketua Muhammadiyah, mengedarkan brosur dimana dinyatakan bahwa Pan Islamisme tidak mungkin tercapai apabila tetap bekerjasama dengan ko-

munis; juga Agus Salim mengecam SI-Semarang yang mendukung PKI. Berhubung dengan kecaman-kecaman Darsono (SI-Semarang) terhadap beleid keuangan Tjokroaminoto dalam bulan Oktober 1920 dan penentangan SI-Semarang yang menyatakan bahwa agama dan politik jangan dicampur-adukkan di dalam SI, maka Tjokoraminoto menjadi condong ke arah golongan kanan.

Pengaruh golongan kanan ini makin lama makin berkembang sehingga akhirnya kantor pusat CSI dipindahkan dari Surabaya ke Yogyakarta. Dalam kongres SI tanggal 6 – 10 Oktober 1921 pertentangan-pertentangan itu makin memuncak juga. Agus Salim dan Abdul Muis mendesak agar ditetapkan peraturan disiplin partai yang melarang keanggotaan rangkap. Terhadap usul ini Tan Malaka meminta agar terhadap disiplin partai itu diadakan pengecualian terhadap PKI. Menurut Tan Malaka perjuangan Islam itu sedari permulaan sudah bersama-sama dengan komunis. Dalam usaha menggagalkan "disiplin partai", Semaun memberikan peringatan bahwa dengan tidak ikut-sertanya tokoh-tokoh golongan kiri maka SI akan mengalami kemunduran seperti dulu pernah dialami oleh Sarekat Dagang Islam. Akan tetapi disiplin partai diterima oleh kongres dengan mayoritas suara. Dengan demikian langkah pertama untuk mengakhiri infiltrasi dan pengaruh PKI ke dalam tubuhnya telah diambil oleh SI.

Untuk menghindari penangkapan akibat kegiatan politiknya makin membahayakan pemerintah Kolonial, Semaun kemudian meninggalkan Indonesia. Pimpinan PKI lalu jatuh ke tangan Tan Malaka. Ia berusaha sekuat-tenaga untuk memperbaiki kembali kerjasama dalam "kubu SI". Mengikuti pola yang digariskan oleh Komintern, maka dalam kongres PKI tanggal 25 Desember 1921 di Semarang, Tan Malaka melakukan usaha untuk mencapai suatu kerjasama dalam Komite Federasi Nasional, sebagai pelaksanaan taktik front persatuan. Kongres ini dihadiri oleh 14 SI-lokal dan delegasi dari CSI. Disamping pelaksanaan taktik front persatuan, PKI mendesak pula kepada Komintern untuk meninggalkan politik menentang gerakan Pan–Islamisme. Dengan dilaksanakannya keputusan disiplin partai di dalam tubuh SI, maka cabang-cabang yang telah terkena pengaruh PKI kemudian memisahkan diri dari organisasi induknya.

Pada tanggal 25 Oktober 1922 PKI menggerakkan cabang-cabang yang pro komunis tersebut untuk mengimbangi pengaruh

SI-Tjokroaminoto. Mereka mendapat nama julukan "SI-Merah". Pada permulaan bulan November 1922 PKI menghimpun mereka ke dalam suatu organisasi yang dinamakan Perserikatan Islam (PSI). Nama ini kemudian diganti menjadi *Sarekat Rakyat*.

Sebagai akibat keterlibatan organisasi-organisasi politik SI dan PKI dalam pemogokan besar-besaran tahun 1922, maka Abdul Muis, Tan Malaka dan Bergsma ditangkap dan diasingkan, sehingga timbul kekosongan di dalam kepemimpinan PKI. Tidak lama kemudian Semaun kembali dan mengambilalih pimpinan PKI. Ia berusaha untuk mengkonsolidasikan dulu kedudukan PKI terutama di kalangan organisasi buruh di samping untuk menghindari clash dengan pemerintah kolonial Belanda. Ia berusaha pula untuk memperbaiki kembali kerjasama dalam "kubu SI". Iapun berusaha untuk merealisasi taktik "front persatuan". Akan tetapi usaha untuk memasuki kembali kubu SI mendapat kegagalan oleh karena pada konggres SI bulan Februari 1923 di Madiun, Tjokroaminoto mempertajam ketentuan disiplin partai dan meningkatkan pendidikan kader SI dalam usaha memperkuat organisasi partai. Sesudah kongres ini berahirlah pengaruh PKI di dalam SI yang asli.

Sebagai akibat perpecahan terbuka ini, PKI kemudian menggerakkan SI-Merah untuk menandingi SI-Tjokroaminoto, dan di dalam kongres PKI bulan Maret 1923 diambillah keputusan untuk mendirikan "SI-Merah" ditempat-tempat dimana ada "SI-Putih". Untuk membedakannya dari lawannya disarankan untuk mengganti namanya menjadi "Sarekat Rakyat". Sarekat Rakyat ini akan berada dibawah komando PKI. Dengan semboyan "satu benteng, satu tentara, satu front bersama untuk mempertahankan kepentingan rakyat", PKI untuk pertama kalinya mulai memimpin sendiri organisasi massa. Di tempat-tempat dimana ada cabang SI-Merah, PKI mendirikan pula cabangnya untuk mengkoordinasi dan mengendalikan gerakan massa SI-Merah. Pada bulan April 1924 SI-Merah berganti nama menjadi Sarekat Rakyat. Mulai saat ini pendidikan ideologi komunis dilakukan secara intensif.

Organisasi PKI makin kuat ketika pada bulan Februari1923 Darsono kembali dari Moskow atas perintah Komintern untuk mendampingi Semaun. Ditambah dengan tokoh-tokoh Alimin yang memimpin SI-Merah dan Musso (dari PKI cabang Jakarta), maka peranan PKI dalam percaturan politik di Hindia Belanda

semakin luas. Dalam melakukan propagandanya PKI tidak segan-segan mempergunakan kepercayaan rakyat kepada ramalan Joyoboyo dan Ratu Adil, serta Hadith dan ayat-ayat Qur'an seperti umpamanya dilakukan oleh Haji Misbach dan Kiyai Samin. Pada masa inilah PKI mulai mengembangkan tenaganya di seluruh kepulauan Indonesia. Dari pusat kekuatannya di Jawa Tengah (Semarang, Solo, dan Madiun) PKI meluaskan cabang-cabangnya ke Minangkabau, Aceh, Makasar, Ternate, Bali dan Lombok.

Sesudah kongres bulan Juni 1924, PKI dengan giat berusaha membangun Sarekat Rakyat. PKI juga mulai membentuk organisasi pemuda dengan nama Barisan Muda, dan mulai memperhitungkan partisipasi wanita didalam organisasi. PKI kemudian tumbuh menjadi suatu partai politik dengan jumlah massa yang sangat besar. Akan tetapi disebabkan jumlah anggota intinya kecil, maka partai kurang dapat melakukan kontrol dan menanamkan disiplin serta ideologi partai kepada massanya. Hal ini akan terlihat akibatnya ketika pada akhir tahun 1924 beberapa cabang Sarekat Rakyat mengambil insiatif sendiri menyelenggarakan aksi-aksi teror terhadap instruksi dari PKI. Sebagai akibat timbullah gerakan-gerakan anti-komunis di kalangan masyarakat Islam yang fanatik dan mengakibatkan diambilnya tindakan-tindakan keras oleh pemerintah kolonial. Akhirnya pada kongres PKI bulan Desember 1924 di Kota Gede Yogyakarta para pemimpin PKI mengambil prakarsa untuk melebur Sarekat Rakyat kedalam PKI.

Setelah berhasil menempatkan dirinya sebagai partai terbesar, PKI merasa dirinya kuat untuk melancarkan suatu petualangan yang akan membawa malapetaka bagi ribuan patriot Indonesia. Petualangan itu adalah apa yang dikenal dengan nama *Pemberontakan 1926*. Pemberontakan itu dirancang oleh pimpinan pada waktu itu, tetapi pada saatnya meletus, pemimpin-pemimpin itu tidak ditempat. Pemimpin-pemimpin itu adalah Sardjono, Budi Sutjitro, Sugono dan lain-lain. Dalam masa persiapan, jelas bahwa hanya sebahagian di antara jumlah cabang-cabang yang setuju dengan pemberontakan. Sedangkan sisanya merasa bahwa PKI belum mampu untuk mengadakan pemberontakan.

Di samping itu ada tokoh PKI lainnya, yaitu Tan Malaka, yang waktu itu bertugas selaku wakil Komintern di Asia Timur

yang menganggap bahwa pemberontakan itu tidak mungkin berhasil, karena massa belum siap. Tetapi Alimin cs. tetap meneruskan persiapan-persiapan ke arah pemberontakan.

Akhirnya pemberontakan meletus pada tanggal 13 November 1926 di Jakarta, disusul dengan tindakan-tindakan kekerasan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dalam waktu satu hari pemberontakan di Jakarta telah ditumpas dan dalam waktu satu minggu di seluruh Jawa. Di Sumatra Barat baru pada tanggal 1 Januari 1927 pemberontakan meletus, tetapi dalam waktu tiga hari sudah dapat ditindas oleh pemerintah Belanda. Kelihatan betapa benarnya perkiraan pemimpin-pemimpin PKI yang tidak menyetujui pemberontakan, sebab massa samasekali tidak siap dan organisasi PKI sendiri masih kacau. Dengan pemberontakan yang sejak semula sudah diperkirakan akan gagal itu,pemimpin-pemimpin PKI telah mengorbankan ribuan pengikutnya serta ribuan patriot yang bukan pengikut mereka tetapi dapat dihasut untuk ikut berontak. Puluhan ribu ditangkap, dipenjarakan dan ada yang dibuang ke Tanah Merah, Digul Atas, Irian Jaya.

Sukar untuk menilai Pemberontakan 1926 itu sebagai suatu peristiwa yang dapat dibanggakan dalam Sejarah Nasional Indonesia. Bahkan sebaliknya, sebagai akibat petualangan PKI itu, dalam tahun-tahun berikutnya, Pergerakan Nasional Indonesia mengalami penindasan yang luarbiasa sehingga samasekali tidak dapat bergerak.

Hampir sepuluh tahun kemudian Gerakan Komunis Internasional mengirimkan seorang tokoh PKI kembali ke Indonesia. Tokoh itu adalah Musso, yang pada bulan April 1935 mendarat di Surabaya. Dengan bantuan Djoko Sudjono, Pamudji dan Achmad Sumadi ia membentuk organisasi yang diberi nama "PKI-Ilegal".

Musso dikirim ke Indonesia untuk menjalankan suatu kebijaksanaan baru dari Gerakan Komunis Internasional yang kemudian dikenal dengan nama Doktrin Dimitrov (Georgi Dimitrov adalah Sekretaris Jenderal Komintern tahun 1935 – 1943). Doktrin Dimitrov yalah, bahwa gerakan Komunis harus bekerjasama dengan kekuatan manapun jua, termasuk kaum imperialis, asal saja menghadapi kaum fasis.

Sesuai dengan doktrin tersebut, timbul dugaan bahwa pemerintah kolonial Hindia Belanda akan melunakkan sikapnya terhadap kaum komunis di Indonesia. Karena itulah digiatkan

kembali gerakan komunis di Indonesia.Tetapi harapan tersebut sejak datangnya Musso sampai masuknya Jepang ke Indonesia tidak terpenuhi, bahkan Musso sendiri pada tahun 1936 sudah meninggalkan Indonesia lagi. Kegiatan utama kaum komunis disalurkan melalui *Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo)* di mana tokoh mereka yang utama adalah Amir Syarifuddin.

Pada masa pendudukan Jepang kaum komunis Indonesia tidak dapat berkutik. Amir Sjarifuddin yang ketahuan bekerjasama dengan pihak Belanda untuk menyusun jaringan intelijen di Indonesia, ditangkap dan hendak dihukum mati oleh Jepang. Berkat bantuan Sukarno – Hatta ia tidak jadi dibunuh.

3. *Partai Nasional Indonesia*

Sesudah PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh Pemerintah akibat pemberontakkannya tahun 1926/1927, maka dirasakan perlunya suatu wadah baru untuk menyalurkan hasrat dan aspirasi rakyat yang tidak mungkin ditampung oleh organisasi-organisasi politik yang telah ada pada waktu itu. Sejalan dengan hal itu politik kolonial pemerintah Belanda yang reaksioner dan tumbuhnya gagasan nasionalisme modern di Indonesia telah memberi jalan ke arah terbentuknya suatu gerakan yang bercorak nasional murni dan bersifat radikal. Pengambil inisiatif gerakan ini yalah Ir. Sukarno yang pada tahun 1925 mendirikan Algemeene Studie Club di Bandung. Pada tahun 1926, dua tahun setelah terbitnya karya H.O.S. Tjokroaminoto tentang Islam dan Sosialisme, Ir. Sukarno memasukkan unsur kekuatan edeologi ketiga yaitu nasionalisme dalam karangannya "Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme". Ketiga kekuatan ideologi itu merupakan landasan pergerakan nasional secara garisbesarnya dan oleh Ir. Sukarno juga dianggap dapat di pakai sebagai alat pemersatu pergerakan rakyat Indonesia. Ketiga kekuatan ideologi tersebut kemudian hari terkenal dengan singkatan Nasakom.

Pada tanggal 4 Juli 1927 atas inisiatif Algemeene Studie Club diadakanlah rapat pendirian Perserikatan Nasional Indonesia. [19] Rapat pembentukan partai ini dihadiri oleh Ir. Sukarno,dr. Tjipto Mangunkusumo, Soedjadi, Mrs. Iskaq Tjokrohadisurjo, Mr. Budiarto dan Mr. Sunario (ketiganya ex Perhimpunan Indonesia).

---

[19] Pada Kongres I PNI, Mei 1928 di Surabaya, kata Perserikatan dianggap kurang baik karena itu diganti dengan kata Partai.

Dalam rapat itu dr. Tjipto menyatakan tidak setuju dengan pembentukan suatu partai baru. Ia menyarankan lebih baik maksud ini disalurkan dengan nama baru, sebab PKI baru ditindas. [20]

Walaupun hubungan secara organisasi antara PNI dengan PI tidak ada, tetapi PNI mempunyai hubungan sangat erat dengan PI di negeri Belanda. Kegelapan di daerah jajahan disoroti oleh gerakan ini yang mulai mengadakan propaganda yang intensif secara lisan dan tulisan. Sasaran pokoknya yalah tercapainya Indonesia Merdeka dan pembebasan para tahanan Digul. Caranya yalah dengan memadu semangat kebangsaan menjadi kekuatan nasional dengan memperdalam keinsafan rakyat dengan mengarahkan pada pergerakan rakyat yang sadar. Untuk memperoleh pergerakan yang sadar, maka perkumpulan perlu mempunyai azas dan tujuan yang terang dan tegas, perlu mempunyai suatu teori nasionalisme yang radikal yang dapat menimbulkan kemauan yang satu, kemauan nasional. Bila kemauan nasional cukup tersebar dan masuk mendalam di hati sanubari rakyat, maka kemauan nasional ini menjadi satu perbuatan nasional. Ini yang disebut trilogi: nationale geest – national wil – nationale daad.

Berdasarkan atas pengetahuan ini, dalam anggaran dasarnya, [21] PNI menyatakan bahwa tujuan PNI adalah bekerja untuk kemerdekaan Indonesia. Tujuan ini hendak dicapai dengan azas "percaya pada diri sendiri". Artinya memperbaiki keadaan politik, ekonomi dan sosial dengan kekuatan dan kebiasaan sendiri, antara lain dengan mendirikan sekolah-sekolah, poliklinik-poliklinik, bank nasional, perkumpulan-perkumpulan koperasi dan lain-lain. Itulah sebabnya PNI tidak mau ikut dalam dewan-dewan yang diadakan oleh pemerintah (sikap non-cooperation). Yang dapat menjadi anggota PNI adalah semua orang Indonesia yang sekurang-kurangnya telah berumur 18 tahun. Orang-orang Asia lainnya dapat juga menjadi anggota PNI tetapi hanya sebagai anggota luarbiasa.

Tindakan keras yang diambil pemerintah Belanda berupa penangkapan-penangkapan dan penggeledahan-penggeledahan ter-

---

20 Tjokroaminoto/*Sedjarah Pergerakan Indonesia, 1929 – 1930*, jilid III, hal. 29. Notosoetardjo, H.A., *Bung Karno dihadapan Pengadilan Kolonial*, Lembaga Penggali dan perhimpunan Sedjarah Revolusi Indonesia, Djakarta, 1961, hal. 406.

21 Teks lengkap dimuat dalam *Soeloeh Ra'jat Indonesia*, 30 Mei 1928, No. 22, tahun II, hal. 205 – 206.

hadap pemimpin-pemimpin PI di negeri Belanda telah digerakkan oleh pimpinan PNI pada tahap pertama sebagai propaganda partai, disamping tujuan PNI untuk mencapai kemerdekaan Indonesia dengan kekuatan sendiri. Ditekankan juga bahwa untuk mencapai tujuan itu perlu ada persatuan bangsa. Sementara itu propaganda ini juga digunakan untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat.

Cita-cita persatuan yang selalu ditekankan dalam rapat-rapat umum PNI ternyata dalam waktu yang singkat dapat diwujudkan. Dalam rapat tanggal 17 – 18 Desember 1927 di Bandung, PNI, Partai Sarekat Islam, Boedi Oetomo, Pasundan, Soematranenbond, Kaum Betawi, Indonesische Studieclub dan Algeemene Studieclub sepakat mendirikan suatu federasi yaitu *Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).*

Dalam rapat PNI di Bandung tanggal 24 – 26 Maret disusunlah Program azas dan daftar usaha. (Benginsel-en werkprogram.[22] Program azas dan daftar usaha, suatu anggaran dasar PNI, kemudian disahkan pada Kongres PNI I di Surabaya pada tanggal 27–30 Mei 1928. Program azas ini mengemukakan bahwa perubahan-perubahan struktur masyarakat Belanda pada abad ke XVI yang membawa pula kebutuhan-kebutuhan ekonomi baru, menyebabkan timbulnya imperialisme Belanda. Oleh imperialisme ini, Indonesia dijadikan tempat mengambil bahan-bahan mentah, pasar untuk hasil industrinya dan tempat penanaman modal. Bagi Indonesia ini berarti *drainage* kekayaan. Hal ini merusakkan struktur sosial, ekonomi dan politis Indonesia dan menghalang-halangi usaha memperbaikinya. Syarat utama untuk dapat memperbaiki kembali susunan masyarakat Indonesia yalah kemerdekaan politik. Kemerdekaan politik berarti "berhentinya pemerintahan Belanda". Karena alasan-alasan ekonomi dan sosial, Belanda tentu tidak akan dengan sukarela pergi dari Indonesia. Karena itu PNI yakin bahwa hanya dengan kekuatan sendiri, tanpa mengharapkan bantuan dari luar, dengan persatuan Indonesia tanpa membedakan agama dan kelas, kemerdekaan akan dapat dicapai. Imperialisme yang menindas Indonesia pada hakekatnya adalah imperialisme internasional yang juga menguasai daerah-daerah lain di Asia. Oleh karena itu usaha bangsa

22 . Teks lengkap dimuat dalam *Soeloeh Indonesia Moeda*, April 1928, no. 5, hal. 119 – 122.

Indonesia melawan imperialisme internasional harus dipersatukan dengan usaha bangsa-bangsa Asia lainnya yang senasib.

Dalam daftar usaha(rencana kerja) dicantumkan usaha-usaha perbaikan di bidang politik, sosial dan ekonomi. Sesuai dengan rencana, Kongres PNI yang pertama diadakan di Surabaya pada tanggal 27 – 30 Mei 1928. Tujuan Kongres adalah mensahkan anggaran dasar, program azas dan rencana kerja PNI. Selain itu kongres juga bertujuan untuk memperkenalkan diri lebih jauh kepada masyarakat dan dihadiri oleh wakil-wakil organisasi pergerakan.[23] Kongres telah memilih Ir. Sukarno sebagai Ketua Pengurus Besar PNI dan Mr. Sartono sebagai bendahara.

Pengaruh PNI dalam usaha mempersatukan seluruh kekuatan Indonesia dan persatuan Indonesia tidak hanya dalam organisasi-organisasi politik tetapi juga dalam gerakan pemuda. Dalam Kongres Pemuda Indonesia kedua[24] di Jakarta tanggal 26 – 27 Oktober 1928 kelihatan pengaruh tersebut. Dan pada penutupan kongres tanggal 28 Oktober diucapkanlah Sumpah Pemuda yang terkenal itu. Dalam tahun 1930 hampir semua perkumpulan pemuda Indonesia mempersatukan diri dalam Indonesia Muda.

Pada organisasi-organisasi putripun kelihatan kecenderungan untuk bersatu ini. Dalam Kongres Wanita Indonesia yang pertama, pada tanggal 22 – 25 Desember 1928 di Yogyakarta yang dihadiri oleh 9 organisasi wanita yang berpengaruh waktu itu dapatlah dihasilkan suatu organisasi persatuan wanita yang berbentuk federasi. Namanya yalah *Perserikatan Perempuan Indonesia (PPI)*, dan dalam kongres kedua tanggal 28 – 31 Desember 1930 namanya dirobah menjadi Perserikatan Perhimpunan Isteri Indonesia (PPPI).

Ada dua macam tindakan yang dilakukan oleh PNI untuk memperkuat diri dan pengaruhnya di dalam masyarakat, yaitu: kedalam, mengadakan usaha-usaha terhadap dan untuk lingkungan sendiri, yaitu mengadakan kursus-kursus, mendirikan sekolah -sekolah, bank-bank dan sebagainya; keluar memperkuat publik opini terhadap tujuan PNI, antara lain melalui rapat-rapat umum dan menerbitkan suratkabar-suratkabar *Banteng Priangan* (di Bandung) dan *Persatoean Indonesia* (di Jakarta). Kegiatan PNI yang dengan cepat dapat menarik massa itu, sangat mencemaskan

---

23 *Soeara Publik*, No. 115, tanggal 29 Mei 1928 dan no. 116, tanggal 31 Mei 1928.

24 Lebih lanjut lihat: *Mededeelingen der regeering omtrent enkele onderwerpen van algemeen belang, 1929*, Weltevreden, Landsdrukkerij, 1929.

pemerintah kolonial. Gubernur Jenderal pada waktu pembukaan sidang Volksraad tanggal 15 Mei 1928 mengharapkan kesadaran rakyat terhadap nasionalisme yang extrim. Dikemukakan juga bahwa sikap non-cooperation (yang dijalankan PNI) bersifat bermusuhan terhadap pemerintah. Walaupun ada peringatan halus itu, cabang-cabang PNI tumbuh di seluruh Indonesia. Tujuh cabang pertama yalah di Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Malang, Pekalongan dan Palembang. Empat calon cabang yalah Air-Itam (dekat Palembang), Cirebon, Garut dan Semarang. Di samping itu juga ada beberapa "kring" (anggota pengurus belum lengkap) di Surakarta, Makasar (Ujungpandang), Buol dan Banyuwangi.[25] Hingga akhir tahun 1929 kandidat anggota PNI berjumlah kira-kira 10.000 orang diantaranya 6.000 orang di daerah Priangan.

Pada tanggal 18 – 20 Mei 1929 diadakanlah Kongres PNI yang kedua di Jakarta. Disamping memilih kembali pengurus PB PNI yang lama juga telah diambil keputusan:

1. bidang ekonomi/sosial menyokong perkembangan Bank Nasional Indonesia, mendirikan koperasi-koperasi, studiefonds dan fonds-korban atau partijfonds (untuk anggota-anggota yang kena tindakan pengamanan pemerintah), dan serikat-serikat sekerja, mendirikan sekolah-sekolah dan rumahsakit-rumahsakit.
2. bidang politik: mengadakan hubungan dengan Perhimpunan Indonesia (PI) di Negeri Belanda dan menunjuk PI sebagai wakil PPPKI di luarnegeri.

Sesuatu yang menarik juga dalam kongres ini yalah disinggungnya masalah transmigrasi untuk mengatasi kemelaratan rakyat (terutama di daerah yang berpenduduk padat).

Semenjak kongres kedua ini kegiatan PNI makin meningkat, terutama untuk usaha kondolidasi kekuatan. Kepada anggota-anggota diadakan kursus-kursus yang terbagi atas dua:

1. kursus pimpinan, biasa diikuti oleh 10 – 12 orang. Hanya diadakan di Bandung, dan guru-gurunya adalah Ir. Sukarno, Mr. Iskaq Tjokrohadisoerjo, Mr. Ali Sastroamidjojo dan Manadi.

---

[25] Notosutardjo, *op.cit.*, hal. 28.

2. Kursus biasa di daerah-daerah yang diadakan oleh "Cursus Commissie" dimana pelajaran diberikan secara sederhana dan mudah di mengerti. Semua pengikut kursus ini kemudian diuji dan bila lulus barulah mereka diterima menjadi anggota.

Di samping itu diadakan klub-klub diskusi yang melatih anggota-anggota memecahkan persoalan-persoalan dan meningkatkan kemampuan pengetahuan anggota. Jelas bahwa cara-cara yang dilakukan PNI ini telah memperkuat posisi dan pengaruh PNI di kalangan masyarakat. Sukses yang dicapai ini dalam waktu yang singkat juga berkat filsafat PNI yaitu Marhaenisme. Kemudian marhaenisme ditafsirkan sebagai Marxisme yang ditrapkan sesuai dengan kondisi-kondisi dan situasi Indonesia. [26]

Propaganda PNI boleh dianggap menimbulkan suatu zaman baru dalam pikiran dan perasaan orang Indonesia. Propaganda itu sudah dirancang oleh Perhimpunan Indonesia dan kemudian PNI-lah yang melaksanakannya. Ir. Sukarno (Ketua PNI) dalam usahanya selalu dibantu oleh orang-orang ex-anggota Perhimpunan Indonesia, tetapi ia menyangkal bahwa pemimpin PNI mendapat didikan dalam Perhimpunan Indonesia, sehingga Perhimpunan Indonesia mempunyai pengaruh besar dalam PNI. [27]

Bila dibandingkan dengan jumlah anggota Sarekat Islam, anggota PNI sampai bulan Desember 1929 hanya lebih-kurang 10.000 orang. Tetapi pengaruh Ir. Sukarno sebagai pemimpin PNI dan pemimpin Indonesia telah meluas dan meresap di seluruh Indonesia dan di dalam seluruh lapisan masyarakat.

Kemajuan-kemajuan yang diperoleh PNI dalam usahanya membawa rakyat untuk memperoleh kemerdekaan telah menguatirkan orang-orang reaksioner Belanda di Indonesia, yang kemudian membentuk suatu organisasi bernama *Vaderlandsche Club* tahun 1929 yang mendesak pemerintah agar segera mengambil tindakan tegas terhadap PNI.[28] Begitupun suratkabar-suratkabar Belanda mengadakan kampanye yang aktif melawan PNI.

Sebenarnya Pemerintah Kolonial Belanda memang sudah mulai kuatir dan curiga terhadap kemajuan-kemajuan yang

---

26 "Deklarasi Marhaenis" dalam *PNI penegak Pantjasila*, Dep. Penprop. DPP PNI. Djakarta, 1965, hal. 5–6.

27 Mr. A.K. Pringgodigdo, *op.cit.*, hal. 66

28 Bernard H. M. Vlekke, *Nusantara*, Bruxelles, Les Editions A. Manteau S.A., 1961, hal. 374.

dicapai oleh PNI. Pemerintah dengan terusterang pada tanggal 9 Juli 1929 telah menyatakan kecurigaannya terhadap PNI. Selanjutnya pada tanggal 6 Agustus 1929 mengeluarkan ancaman-ancaman terhadap PNI.[29] Walaupun ada ancaman dan propokasi, PNI tetap jalan terus mengadakan kegiatan-kegiatan partai. Dalam rapat umum tanggal 15 September 1929 di Bandung, Bung Karno mengatakan bahwa walaupun ada usaha-usaha untuk menghalangi pertumbuhan PNI dengan berbagai cara,[30] PNI malah semakin berkembang subur. Juga diramalkan oleh Bung Karno bahwa Perang Pasifik akan pecah dan kalau orang Indonesia tidak bersiap-siap menghadapinya kemungkinan itu, bangsa Indonesia akan menjadi korban. Sebaliknya apabila dilakukan persiapan-persiapan tidak perlu merasa kuatir.

Kecemasan Pemerintah Kolonial Belanda bertambah sesudah pemerintah mendapat laporan bahwa dikalangan tentara dan polisi terdapat pula pengaruh propaganda PNI. Karena itu tindakan yang lebih keras diambil, antara lain Gubernur Jawa Barat [31] melarang polisi menjadi anggota PNI pada akhir bulan Oktober 1929. Begitupun panglima tentara kolonial Belanda mengeluarkan larangan serupa kepada semua anggota militer dan pegawai negeri yang berada di bawah wewenang *Departement Van Oorlog*. Bahkan tentara juga dilarang membaca suratkabar yang bernada perjuangan kemerdekaan.[32]

Kemudian tersebarlah desas-desus di kalangan rakyat bahwa PNI akan mengadakan pemberontakan pada tahun 1930. Karena desakan kaum reaksioner Belanda di samping pemerintah Belanda sendiri bertambah kuatir, sesudah melakukan persiapan-persiapan yang luas dan teratur kemudian pemerintah melakukan penangkapan-penangkapan dan pengeledahan-pengeledahan dimana-mana. Pada tanggal 29 Desember 1929 Ir. Sukarno cs ditangkap oleh polisi di Yogyakarta dan selanjutnya dibawa ke Bandung. Di samping itu di Jakarta dilakukan 50 penggeledahan dan penangkapan, di Bandung 41, di Cirebon 24, di Pekalongan 42, di Sukabumi dan Cianjur 31, di Surakarta 11, di Medan 25, di

---

29 Lihat *Handelingen Volksraad*, 6 Agustus 1929, hal. 618.

30 Ir. Sukarno dilarang pergi keluar daerah Jawa (lihat *Bintang Timoer*, tgl. 10 Djoeli 1929).

31 Kira-kira 95% anggota PNI tinggal di daerah Jawa Barat, terutama Priangan Tengah, lihat J.Th. Petrus Blumberger, *op.cit.*, hal. 233.

32 Lihat *Bintang Timoer*, tanggal 24 Desember 1929.

Ujung Pandang 18, Padang 2, di Semarang 30 di banyak tempat lainnya di Indonesia yang jumlah semuanya lebih dari 400 penangkapan. Seluruh kaum pergerakan mengajukan protes, demikian juga Perhimpunan Indonesia, serta partai buruh dan partai komunis di Negeri Belanda.[33]

Empat orang tokoh PNI, yaitu: Ir. Sukarno (ketua PNI) R. Gatot Mangkoepradja (Sekretaris II PB. PNI), Markoen Soemadiredja (Sekretaris II Pengurus PNI cabang Bandung) dan Soepriadinata (anggota PNI cabang Bandung) diajukan kedepan pengadilan di Bandung pada tanggal 18 Agustus 1930 s/d 29 September 1930. Ir. Sukarno dalam pidato pembelaannya, yang terkenal dengan nama "Indonesia Menggugat", menandaskan: "Kini telah menjadi jelas bahwa Pergerakan Nasional di Indonesia bukanlah bikinan kaum intelektuil dan komunis saja, tetapi merupakan reaksi umum yang wajar dari rakyat jajahan yang dalam bathinnya telah merdeka. Revolusi Indonesia adalah revolusinya zaman sekarang, bukan revolusinya sekelompok-kelompok kecil kaum intelektuil, tetapi revolusinya bagian terbesar rakyat dunia yang terbelakang dan diperbodoh". Berbeda dengan nasib pemimpin PI, maka pemimpin-pemimpin PNI dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan kolonial pada tanggal 22 Desember 1930.

Penangkapan atas pemimpin-pemimpin PNI, terutama Ir. Sukarno yang merupakan jiwa penggerak PNI, ternyata merupakan pukulan yang sangat keras terhadap PNI. Pada Kongres Luar Biasa ke II di Jakarta, diambillah keputusan pada tanggal 25 April 1931 untuk membubarkan PNI karena keadaan memaksa. Pembubaran ini menimbulkan perpecahan di kalangan pendukung-pendukung PNI, yang masing-masing pihak mendirikan Partai Indonesia (Partindo) oleh Mr. Sartono cs. dan Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) oleh Moh. Hatta dan St. Syahrir cs. Perbedaan antara keduanya sebenarnya tidak ada hubungannya dengan persoalan pembaharuan sosial. Mereka setuju bahwa kemerdekaan politik adalah tujuan perjuangan utama yang harus dicapai dengan taktik non-koperasi. Tetapi apabila PNI-Baru lebih mengutamakan pendidikan politik dan sosial, maka Partindo percaya bahwa organisasi massa dengan aksi massa adalah senjata yang tepat untuk mencapai kemerdekaan.

Kedua organisasi itu tidak banyak berhasil dalam usahanya

---

33 J. Th. Blumberger, *op. cit.*, hal. 272; *Indonesia Merdeka*, 1930, hal. 13 – 14.

oleh karena politik yang sangat kolot dan keras dari Gubernur Jenderal de Jonge. Di samping itu pemimpinnya kemudian dibuang ke luar Jawa.

C. MASA BERTAHAN

1. Fraksi Nasional

Idee pembentukan Fraksi Nasional di dalam Volksraad muncul dari anggota Volksraad Moh. Husni Thamrin, ketua perkumpulan Kaum Betawi, karena pengaruh faktor-faktor yang timbul saat itu. Faktor-faktor tersebut adalah:

a. Sikap pemerintah Hindia Belanda terhadap gerakan politik di luar Volksraad, terutama terhadap PNI.
b. Anggapan dan perlakuan yang sama oleh pemerintah terhadap semua gerakan nasional baik non maupun ko-operasi. Terutama dalam peristiwa penggeledahan tokoh-tokoh PNI yang juga dilakukan terhadap anggota-anggota perkumpulan yang bersifat moderat dan bersifat ko-operasi.
c. Didirikannya Vaderlandsche Club (V.C.) tahun 1929 sebagai protes terhadap "ethisch beleid" Gubernur Jenderal de Graef. [34]

Zentgraaff pendiri V.C. berpendapat bahwa kehidupan nasional Belanda yang lebih kuat akan merupakan alat untuk "menghadapi tuntutan-tuntutan gila dari nasionalisme timur. [35]

Fraksi ini didirikan tanggal 27 Januari 1930 di Jakarta beranggotakan 10 orang anggota Volksraad yaitu wakil-wakil dari daerah-daerah di Jawa, Sumatra dan Kalimantan. Menurut Moh. Husni Thamrin yang ditunjuk sebagai ketua, sedikitnya jumlah anggota bukanlah merupakan suatu masalah karena yang penting adalah mutu dari anggota-anggota tersebut. [36] Dalam tindakannya Fraksi Nasional lebih memusatkan usahanya di dalam lingkungan Volksraad. Sesuai dengan keadaan yang mempenga-

---

34 M.H. Thamrin, "De Nationale Fractie in de Volksraad", *Indonesia*, Jubileum – nummer, uitgegeven ter galegenheid van het 30-jarig bestaan van de Perhimpunan Indonesia 1908 – 1938, hal. 207 – 210.

35 Dr. J.M. Pluvier, *Overzicht van de Ontwikkeling der Nationalistische Beweging in Indonesia*, 's-Gravenhage – Bandung, 1953, hal. 36.

36 *Handelingen van den Volksraad*, tijdens de buitengewon zitting van het jaar 1929 – 1930, hal. 1646.

ruhi timbulnya, Fraksi Nasional mempunyai tujuan sebagai berikut:

Menjamin adanya kemerdekaan nasional dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, dengan jalan.

a. mengusahakan perubahan-perubahan ketatanegaraan.
b. berusaha menghapuskan perbedaan-perbedaan politik, ekonomi dan intelektuil sebagai antithese kolonial.
c. mengusahakan kedua hal tersebut diatas dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.[37]

Meskipun pemakaian kata fraksi kurang tepat, sebab anggota-anggotanya bukan berasal dari satu partai politik atau perkumpulan yang sama bahkan ada yang tidak berpartai, tetapi hal tersebut telah biasa terjadi didalam Volksraad dimana suatu golongan disebut fraksi. Dari tujuannya jelas kelihatan bahwa Fraksi Nasional condong bersifat radikal meskipun mereka tetap duduk didalam Volksraad dan menjadi anggota daripada dewan itu.

Kegiatan pertama dari fraksi ini adalah pembelaan terhadap pemimpin-pemimpin PNI yang ditangkap di dalam sidang-sidang Volksraad, terutama sebelum tokoh-tokoh PNI tersebut diadili pada bulan Agustus 1930. Anggota-anggota Fraksi Nasional, terutama Moh. Husni Thamrin, berpendapat bahwa tindakan penggeledahan dan penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin PNI oleh pemerintah itu tidak dapat dipertanggungjawabkan bahkan banyak diantaranya bukan anggota PNI juga digeledah dan dicurigai. Suatu daftar penggeledahan-penggeledahan dan penangkapan-penangkapan yang dilakukan polisi di beberapa tempat dan kota di Jawa, Sumatra dan Sulawesi oleh Thamrin telah diberikan kepada sidang Volksraad. Dengan peristiwa ini terbukti bahwa pemerintah dalam tindakannya telah berlaku tidak bijaksana dan tidak adil terhadap pergerakan rakyat Indonesia.

Thamrin berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa buruk yang sering menimpa pergerakan rakyat adalah berpangkal kepada artikel 169 swb, juga artikel 153 bis dan 161 bis. Oleh karena itu ia mengajukan suatu mosi kepada Volksraad mengenai artikel-artikel ini, mosi ini diterima oleh sidang setelah mendapat

---

37 Dr. J.M. Pluvier, *op. cit.*, hal. 38.

tantangan dari mosi Frui (VC). Kemudian dibentuk suatu komisi untuk meninjau kembali artikel-artikel tersebut. Usul Thamrin agar sidang perkara pemimpin-pemimpin PNI yang dituduh melanggar artikel-artikel itu dilakukan dihadapan majelis yang lebih tinggi (Hooggerechtschof) dan bukan pada landraad, ditolak oleh pemerintah dengan alasan bahwa pengadilan tertinggi itu hanya untuk sesuatu penuntutan politik, sedang bukti-bukti sifatnya berkenaan dengan hukum pidana.[38]

Sementara itu masalah pertahanan juga dibicarakan dalam sidang Volksraad pada tahun 1930, dimana pemerintah bermaksud akan meningkatkannya. Maksud ini ditentang oleh anggota-anggota Fraksi Nasional. Mereka berpendapat bahwa peningkatan kekuatan pertahanan itu pasti akan memerlukan biaya besar sedangkan keadaan keuangan negara sangat buruk, dan lagi tidak ada manfaatnya bagi Indonesia. Daerah-daerah di seluruh Indonesia tidak mempunyai sesuatu yang harus dipertahankan juga tidak kemerdekaan, sedangkan yang dimaksud dengan pertahanan terhadap serangan musuh adalah pertahanan terhadap kemerdekaannya. Jelas ia tidak mempunyai kemerdekaan karena Indonesia adalah daerah jajahan. Oleh karena itu adalah lebih baik biaya tersebut digunakan untuk memperbaiki kesejahteraan sosial rakyat Indonesia. [39]

Terlandanya Indonesia oleh pengaruh malaise dan diangkatnya de Jonge seorang yang sangat reaksioner sebagai Gubernur Jenderal yang baru pada tahun 1931 ternyata telah memberi akibat yang sangat buruk bagi Indonesia, baik dalam segi sosial-ekonomi maupun kehidupan politik. De Jonge menjalankan pemerintahan dengan sikap yang sangat keras dan kaku, sehingga masa pemerintahannya dianggap masa yang terburuk.[40] Dalam kehidupan politik, umpamanya Fraksi Nasional yang tidak radikal itu telah didorong kearah politik *non*, yang seharusnya pemerintah justru mendorong mereka kearah politik ko-operasi.[41]

Sesuai dengan keadaan kehidupan sosial-ekonomi yang

38 *Handelingen van den Volksraad,* jaar 1929–1930; *Sedjarah Pergerakan Indonesia* 1929 – 1930, djilid I. Pembicaraan-2 di Volksraad disalin dalem bahasa Indonesia oleh HOS. Tjokroaminoto, Diterbitkan oleh: Fonds Nasional, Jacarta, Desember 1930, hal. 114.

39 *Handelingen van den Volksraad,* jaar 1929 – 1930, hal. 2437. dst.

40 D.M.G. Koch, *op. cit.,* hal. 141.

41 Dr. S.L. van der Wal, *op, cit.,* hal. 109.

sangat tertekan akibat depresi ekonomi, maka kegiatan fraksi juga terutama ditujukan untuk memperbaiki keadaan sosial-ekonomi rakyat. Apalagi kehidupan di bidang politik memang sangat ditekan sekali oleh pemerintah de Jonge. Masalah sosial yang banyak dibicarakan pada waktu itu adalah bidang pendidikan akibat dengan diumumkannya peraturan-sekolah-sekolah liar (wilde scholen ordonnantie) oleh pemerintah. Dijalankannya peraturan ini pasti akan menghambat kemajuan rakyat Indonesia bahkan juga dari golongan Cina, India dan Arab, karena itu dengan dipelopori oleh Ki Hadjar Dewantoro peraturan ini ditentang dengan keras. Anggota-anggota Fraksi Nasional di dalam sidang Volksrad juga menuntut agar pemerintah mencabut segara peraturan tersebut. Bahkan M.H. Thamrin bermaksud akan keluar dari Volksraad apabila tuntutan itu gagal. Melihat kemungkinan jejak Thamrin akan diikuti pula oleh anggota-anggota lainnya, bila hal itu memang terjadi berarti Volksraad akan kehilangan artinya oleh karena wakil-wakil bangsa Indonesia praktis tidak ada. Setelah melihat reaksi-reaksi baik di luar maupun di dalam Volksraad, yang dapat mengganggu ketenangan masyarakat, pemerintah kolonial dengan terpaksa mencabut peraturan tersebut.[42]

Di bawah tekanan politik Gubernur Jenderal de Jonge politik non-kooperasi menjadi lumpuh, akibatnya muncul kaum ko-operator yang di dalam Volksraad oleh Fraksi Nasional dan di luar Volksraad oleh Partai Indonesia Raya (Parindra) yang didirikan pada tahun 1935. Dalam masa itu muncullah Petisi Sutardjo pada tahun 1936,[43] yang berisi usul Indonesia berdiri sendiri tetapi tidak lepas dari kerjasama Belanda. Petisi yang menghebohkan kalangan pergerakan, ada yang pro dan kontra akhirnya gagal karena ditolak oleh Pemerintah Belanda. Dalam sidang Volksraad sendiri, suara Fraksi Nasional juga terpecah-pecah dalam menanggapi petisi.

2. *Petisi Sutardjo*

Gagasan dari petisi ini dicetuskan oleh Sutardjo Karto-

42 Mengenai peraturan sekolah liar ini lebih lengkap dapat dibaca dalam: *Taman Siswa 30 Tahun*, Yogyakarta, 1956, hal. 230–238; Dr. S.L. van der Wal, *Het Onderwijsbeleid in Nederlands Indie: 1900–1940.*, een bronnenpublikatie, Groningen, 1963.

43 Lebih lanjut lihat pasal mengenai Petisi Sutardjo.

hadikusumo, Ketua Persatuan Pegawai Bestuur/Pamongpraja Bumiputra (PPBB) dan wakil dari organisasi ini di dalam sidang Volksraad pada bulan Juli 1936. Petisi ini diusulkan di luar tanggung-jawab PPBB. Landasan usul adalah pasal 1 Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda yang berbunyi bahwa kerajaan Nederland meliputi wilayah Nederland, Hindia Belanda, Suriname dan Curacao; dan yang menurut pendapat Sutardjo keempat wilayah itu di dalam kerajaan Nederland mempunyai derajad yang sama. Usul didukung oleh Ratu Langie (Sulawesi/Kristen), Datuk Tumenggung (Sumatra/Islam), Alatas (Arab/Islam), I.J. Kasimo (Jawa/Katholik) dan Ko Kwat Tiong (Cina/Budha/Konfusius). Dukungan ini menurut Sutardjo mencerminkan keinginannya bahwa usul petisi di dukung oleh berbagai golongan sukubangsa dan agama yang ada di Indonesia.[44]

Usul petisi, yang kemudian dikenal dengan nama Petisi Sutardjo, diajukan pada tanggal 15 Juli 1936 kepada Pemerintah, Ratu serta Staten Generaal (Parlemen) di Negeri Belanda. Adapun isi petisi yalah permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Negeri Belanda dimana anggota-anggotanya mempunyai hak yang sama. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana yang isinya adalah pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri dalam batas pasal 1 Undang-Undang Dasar Kerajaan Belanda. Pelaksanaannya akan dijalankan secara berangsur-angsur dalam waktu sepuluh tahun atau dalam waktu yang akan ditetapkan oleh sidang permusyawaratan itu.

Usul yang menyangkut perubahan susunan ketatanegaraan ini timbul karena makin meningkatnya perasaan tidak puas di kalangan rakyat terhadap pemerintahan akibat kebijaksanaan politik yang dijalankan Gubernur Jenderal de Jonge. Padahal menurut Sutardjo, hubungan baik antara Indonesia dengan Negeri Belanda perlu ditingkatkan untuk kepentingan kedua belah pihak lebih-lebih adanya bayangan bahaya pecahnya perang di Pasifik. Hubungan itu akan berhasil apabila diusahakan perubahan-perubahan dalam bentuk dan susunan pemerintahan Hindia Belanda (Indonesia). Adapun perusahan-perubahan itu dalam garis besarnya adalah sebagai-berikut:

Pulau Jawa dijadikan satu provinsi, sedangkan daerah-daerah di

44 Lihat lampiran.

luar pulau Jawa dijadikan kelompok-kelompok daerah *(groepsgemeenschappen)* yang bersifat otonom dan berdasarkan demokrasi.

- Sifat dualisme dalam pemerintahan daerah *(binnenlandsbestuur)* dihapus.
- Gubernur Jenderal diangkat oleh Raja dan mempunyai hak kekebalan *(onschendbaar).*
- Direktur Departemen mempunyai tanggungjawab.
- Volksraad dijadikan parlemen yang sesungguhnya.
- Raad van Indië: anggota-anggota biasa dan seorang Vice President diangkat oleh raja; di samping itu ketua dan wakil ketua Volksraad sebagai anggota mempunyai hak suara.
- Dibentuknya Dewan Kerajaan *(Rijksraad)* sebagai badan tertinggi antara Negeri Belanda dan Indonesia, yang anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil kedua daerah dengan satu pimpinan yang diangkat, pimpinan mana bukan seorang menteri atau direktur atau salahseorang dari ketua parlemen.
- Penduduk Indonesia adalah orang-orang yang karena kelahiran, asal-usul dan cita-citanya adalah untuk Indoneesia. Terhadap orang-orang asing yang dilahirkan disini diadakan seleksi yang ketat. [45]

Usul yang dianggap menyimpang dari cita-cita kalangan pergerakan umumnya mendapat reaksi, baik dari pihak Indonesia maupun pihak Belanda. Pers Belanda, seperti *Preanger Bode, Java Bode, Het Bataviaasch Niewsblad,* menuduh usul petisi sebagai suatu "permainan yang berbahaya", revolusioner, belum waktunya, dan tidak sesuai dengan keadaan. Golongan reaksioner Belanda, seperti Vaderlandsche Club, berpendapat Indonesia belum matang untuk berdiri sendiri. Tetapi ada juga orang-orang Belanda dari kalangan pemerintah yang menyetujui petisi, dengan mengirim surat kepada Sutardjo. Pihak Pemerintah Hindia Belanda sendiri menyatakan bahwa pemerintah memang mempunyai maksud untuk selalu meningkatkan peranan rakyat dalam mengendalikan pemerintahan sampai rakyat Indonesia sanggup untuk mengurus segala sesuatunya. [46]

---

45 *Pemandangan,* tanggal 15 Juli 1936, salinan teks pidato Sutardjo Kartohadikusumo di sidang Volksraad tanggal 9 Juli 1936.

46 *Tjahaja Timoer,,* tanggal 3 Agustus 1936 (salinan teks pidato Regerings gemachtigde voor algemene zaken bij de Volksraad, W.G. Peekema).

Dari pihak Indonesia baik di dalam maupun di luar Volksraad reaksi terhadap usul petisi juga bermacam-macam. Beberapa anggota Volksraad berpendapat bahwa usul petisi kurang jelas, kurang lengkap dan tidak mempunyai kekuatan. Pers Indonesia, seperti suratkabar *Pemandangan, Tjahaja Timoer, Pelita Andalas, Pewarta Deli,* majalah *Soeara Katholik* menyokong usul petisi.[47] Oleh karena itu usul petisi dengan cepat tersebar luas di kalangan rakyat. Dan sebelum sidang Volksraad membicarakan secara khusus, kebanyakan pers Indonesia menyokong usul ini.[48] Menurut harian *Pemandangan* saat usul ini dimajukan adalah sangat tepat, yaitu saat akan digantinya Gubernur Jenderal de Jonge oleh Gubernur Jenderal Tjarda yang menurut pendapat waktu itu ia berpaham liberal.

Akhirnya tanpa pemilihan suara dalam sidang Volksraad, usul petisi diterima untuk dibicarakan dalam sidang khusus [49] yang dimulai tanggal 17 September 1936. Dari perdebatan yang dilakukan di dalam sidang Volksraad, di samping kelompok pengusul sendiri, terdapat tiga kelompok yang mempunyai pendapat yang berbeda-beda, bahkan dalam tiap kelompok itu sendiri terdapat pula perbedaan pendapat.

1. Kelompok van Helsdingen – Notosoeroto,[50] terdiri dari wakil-wakil: *Christelijke Staatspartij (CSP), Vaderlandsche Club, Ondernemersgroep, Indische Katholieke Partij* dan beberapa anggota partai/organisasi lainnya yang menolak usul petisi karena rakyat Indonesia belum mampu (matang) untuk berdiri sendiri. Van Helsdingen (wakil CSP) mengusulkan supaya dibentuk suatu komisi (staatscommissie) yang terdiri dari wakil-wakil Indonesia dan Belanda yang ahli dalam soal-soal jajahan dengan tugas mengontrol tindakan Menteri Jajahan. Anggota Volksraad ini juga membantah adanya persatuan antara sukubangsa di Indonesia (seperti yang diakui oleh Sutardjo cs.), yang menurut pendapatnya hanya ada bila diikat oleh *Pax Neerlandica.*
2. Kelompok Sukardjo Wirjopranoto, yang terdiri dari beberapa anggota Fraksi Nasional, yang dengan tegas menolak usul

47 *I.P.O.*, nomor 31 tanggal 1 Agustus 1936, hal. 493 – 494.

48 De Onderteekenaars der Petitie, *Indonesia Zelfstanding*, hal. 12.

49 *Darmokondo*, tanggal 21 Juli 1936.

50 Lebih jelas mengenai perdebatan ini dapat dilihat dalam H. Agoes Salim, *Hindia berdiri sendiri, Oesoel Petisi Soetardjo Kartohadikoesoemo*, terjemahan.

petisi karena tidak ada gunanya. Soekardjo Wirjopranoto sendiri berpendapat petisi ini dapat melemahkan bahkan mematikan cita-cita Indonesia Merdeka. Dengan keras ia bahkan menuduh Sutardjo menjalankan politik "opportunistische politiek". [51]

3. Kelompok Suroso, yang terdiri dari wakil-wakil Fraksi Nasional, *Politiek - Economische Bond* (PEB), *Indo-Europeesch Verbond* (IEV) dan beberapa nasionalis lainnya. Mereka berpendapat bahwa Indonesia sudah cukup matang dan sudah sepantasnyalah pemerintah Belanda memberikan lebih banyak hak-hak kepada Indonesia. Indo-Europeesche Verbond pada tahap pertama meminta supaya dibentuk suatu Dewan Kerajaan (Rijksraad), anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil Indonesia dan Belanda, yang bertugas akan menimbang setiap perselisihan antara Indonesia dan Belanda.

Dalam membela usul petisi, Sutardjo mengatakan keadaan dalam negeri sebenarnya bukanlah masalah primer tetapi sekunder. Masalah yang pokok adalah hubungan kerajaan antara negeri Belanda dengan Indonesia, untuk mana Indonesia harus berdiri sendiri sehingga dapat berkembang ke arah yang lebih maju. Sedangkan masalah-masalah yang bersifat internasional dan yang menjadi kepentingan bersama akan tetap diurus oleh kerajaan. [52]

Pada tanggal 29 September 1936 selesai sidang perdebatan, diadakanlah pemungutan suara, dimana petisi disetujui oleh Volksraad dengan perbandingan suara 26 suara setuju lawan 20 suara menolak. Dan pada tanggal 1 Oktober 1936 petisi yang telah menjadi petisi Volksraad itu dikirimkan kepada Ratu, Staten - Generaal dan Menteri Jajahan di Negeri Belanda.

Sementara itu reaksi terhadap petisi di dalam masyarakat tetap berlangsung . Dr. J.M. Somer berpendapat bahwa menurut keadaan dan interpretasi sejarah, pasal 1 UUD Kerajaan Belanda yang menjadi landasan petisi, adanya hanyalah karena terpaksa sebab kerajaan Belanda tidak pernah terdiri dari empat wilayah tersebut. [53] J.W. Mayer Ranneft, bekas Vice President Raad Indie, berpendapat bahwa kerjasama antar-golongan di Indonesia

---

51 H. Agoes Salim, *op. cit.*, hal. 90 – 97 dan 150 – 155.

52 De Onderteekenaars der Petitie, *op. cit.*, hal. 19 dan 34.

53 Dr. J.M. Somer, *Het Petitievoorstel Soetardjo cs*, hal. 123 – 124.

akan berkembang dengan baik, apabila ada kepastian bahwa Indonesia akan berdiri sendiri. Adalah sudah waktunya diadakan perubahan-perubahan kearah kemajuan bagi pemerintahan di Indonesia. [54] Pendapat yang hampir sama juga diberikan oleh W.G. Peekema dalam laporannya kepada pemerintah, bahkan ia meminta supaya dibentuk suatu komisi kenegaraan untuk menyelidikinya. [55] Haji Agus Salim, yang menyetujui usul petisi, menyarankan kepada Sutardjo cs, agar dibentuk suatu organisasi yang berusaha untuk mendapatkan sokongan dari tiap-tiap usul Indonesia berdiri sendiri. [56]

Sewaktu anggaran belanja Indonesia (Indische Begrooting) tahun 1937 dibicarakan di dalam Staten Generaal pada bulan Februari 1937, petisi Sutardjo juga dibicarakan. Tetapi keputusan apakah petisi akan diterima atau ditolak masih menunggu saran-saran dari Gubernur Jenderal di Indonesia. Dan pada bulan Mei 1937 di Jakarta dibentuklah Komite Petisi Sutardjo (CPS) yang akan memperjuangkan petisi. Untuk memperkuat dan memperjelas maksud petisi, pada persidangan Volksraad bulan Juli 1937 Sutardjo kembali memajukan usul rencana apa yang sebaiknya dijalankan pemerintah Belanda dalam usaha menuju Indonesia berdiri sendiri. Rencana tersebut dibagi dalam dua tahap, masing-masing untuk lima tahun. Atas usul tersebut wakil pemerintah Hindia Belanda dalam sidang Volksraad menjawab bahwa pemerintah juga mempunyai perhatian kearah perbaikan pemerintahan di Indonesia, tetapi karena usul itu amat luas sekali maka penyelesaiannya berada di tangan pemerintah di negeri Belanda dan Staten Generaal. [57]

Sementara itu di negeri Belanda, petisi juga dipropagandakan, antara lain oleh Perhimpunan Indonesia dengan menerbitkan brosur-brosur mengenai petisi. Atas sokongan Perhimpunan Indonesia itu, majalah *Toejoean Rakyat* (di Jakarta) menuduh Perhimpunan Indonesia telah menyalahi anggaran dasarnya. Atas tuduhan ini, Perhimpunan Indonesia berpendapat bahwa untuk menghadapi ancaman fasisme terhadap negeri Belanda dan

---

54 J.W. Ranneft, *Holland fout in Indie*, hal. 37 – 38.

55 Dr. S.L. van der Wal, *De Volksraad en de Staatkundige Ontewikkeling van Nederlands Indie*, Tweede stuk 1927 – 1942, hal. 222 – 252.

56 H.A. Salim, "Soeara dan Oesaha" dalam *Pemandangan*, tanggal 20–10–1936.

57 *Pemandangan*, tanggal 9–8–1937, salinan teks pidato Regeeringsgemachtigde voor Algemeene Zaken, H.C. Hartevelt.

Indonesia maka adalah dipandang perlu untuk memperbaiki hubungan yang telah ada antara kedua belah pihak. Antara lain yalah agar pemerintah Belanda memenuhi maksud yang terkandung dalam petisi yaitu mengadakan suatu konferensi antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda.[58] Juga Roekoen Peladjar Indonesia (Roepi) di negeri Belanda memperkenalkan petisi kepada anggota-anggotanya dan orang-orang Belanda.[59]

Di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1937 dibentuk Central Comite Petisi Sutardjo (CCPS), dan di daerah-daerah dibentuk cabang Comite Petisi Sutardjo. Dalam CCPS tidak terdapat anggota-anggota Parindra dan orang Indo-Belanda yang menyokong petisi.[60] Mr. Sartono yang menjadi anggota CCPS berpendapat petisi Sutardjo menuju ke arah kemajuan bagi Indonesia.[61]

Partai Gerakan Indonesia (Gerindo) dalam pengumuman PB. Gerindo tanggal 5 Oktober 1937, menyatakan bahwa Gerindo hanya menyokong diadakannya konferensi dari wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda, tetapi tidak menyetujui isi petisi.[62] Gerindo berkeyakinan bahwa CCPS akan lebih berhasil apabila terdiri dari wakil-wakil resmi perkumpulan-perkumpulan dan partai-partai di Indonesia.[63]

Untuk mendapatkan sokongan dari berbagai partai dan golongan terhadap petisi, CCPS pada tanggal 21 Nopember 1937 mengadakan suatu rapat bersama dengan mengundang wakil-wakil: Parindra, Gerindo, Pasundan, Persatuan Arab Indonesia, Persatuan Minahasa, Perkumpulan Politik Katholik di Indonesia (PPKI), PSII dan organisasi-organisasi dan pemimpin yang menyokong petisi. PSII karena tidak menyetujui petisi tidak mengirimkan wakilnya pada rapat itu.[64] Selanjutnya pada tanggal 28 November 1937 suatu rapat umum kembali diadakan di Jakarta. Dalam rapat itu Amir Sjarifuddin, salahseorang pemimpin Gerindo, menyatakan bahwa petisi ini sudah salah

58 *Toedjoean Rakyat*, Juni 1939, "Soerat Pengoeroes Perhimpoenan Indonesia kepada *Toedjoean Rakyat*".

59 *Pemandangan*, tanggal 24–8–1937, surat kiriman Sekretariat Roepi (yang ditandatangani oleh Soedjono D. Poesponegoro).

60 *Pemandangan*, tanggal 6–10–1937.

61 *Ibid*, tanggal 9–10–1937.

62 *I.P.O.*, tanggal 9–10–1937, hal. 668.

63 *Pemandangan*, tanggal 5–10–1937.

64 *Soeara Katholik*, tanggal 3–12–1937; Dr. S.L. van der Wal, *op. cit.*, hal. 284 – 287.

jalan, yaitu dari atas (Volksraad) turun kebawah (rakyat) bukan seperti biasanya dari rakyat ke Volksraad. [65]

PSII (Partai Sarekat Islam Indonesia) menuduh gerakan yang sedang dijalankan oleh CCPS sebagai suatu gerakan yang naif, gerakan anak-anak kecil yang menuntut perubahan politik tanpa mempunyai sandaran dan sendi organisasi rakyat yangkuat dan sentosa. PB PSII melarang dengan keras semua anggota dan organisasi massanya untuk mencampuri gerakan CCPS. [66] Parindra agak berbeda sikapnya dengan PSII. Keputusan rapat Prindra di Solo tanggal 12 Desember 1937 berpendapat bahwa walaupun Parindra menolak petisi, karena maksud petisi berlawanan dengan tujuan yang dicita-citakan oleh partai-partai politik bangsa Indonesia terutama yang dicita-citakan Parindra, tetapi maksud untuk mengadakan suatu konferensi antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda, disokong oleh Parindra. [67] Sebelum ini yaitu pada bulan November 1936, Parindra menyerukan supaya kaum pergerakan menyokong petisi. [68] Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru), berpendapat karena tujuan PNI-Baru adalah Indonesia Merdeka jadi bukan berdiri sendiri dalam lingkungan kerajaan Belanda, maka PNI-Baru menolak dan melarang anggota-anggotanya membantu petisi dengan jalan apapun. [69]

Walaupun petisi tidak disetujui oleh empat partai, [70] yang pada waktu itu cukup mempunyai pengaruh besar dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia, petisi juga disokong oleh banyak organisasi yaitu partai-partai/organisasi-organisasi: PBBB, Chung Hua Hui, Groep IEV, PEB, Penyadar, Pasoendan, PPKI, PAI, dan Perserikatan Indonesia serta beberapa nasionalis seperti H. Agus Salim dan Mr. Sartono. [71] Juga Sarekat Ambon dan Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia. [72]

Pada tanggal 19 Desember 1937, CCPS mengumumkan pada semua partai-partai/organisasi-organisasi tersebut diminta supaya pengurus-pengurus cabangnya, bekerjasama dengan penyokong-

65 *I.P.O.* tanggal 4–12–1937; Dr. S.L. Van der Wal, *op.cit.*, hal 316 – 318.
66 *Soeara PSII*, Desember 1937.
67 *Soeara Parindra*, Desember 1937.
68 Onderteekenars der petitie, *op. cit.*, hal. 9
69 *I.P.O.*, tanggal 11 December 1937, hal. 809.
70 Dr. S.L. van der Wal, *op. cit.*, 380 – 384.
71 *Ibid.*, hal. 379 – 380.
72 *Pemandangan*, tanggal 21–12–1937, teks pengumuman dari CCPS.

penyokong petisi untuk membentuk sub-komite petisi di daerah-daerah.[73] Atas anjuran Kasimo, cabang-cabang PPKI dengan aktif telah mendirikan sub-sub komite tersebut.[74] Dan selama tahun 1938, CCPS dan sub-komite telah melakukan sejumlah rapat-rapat umum untuk menyokong petisi.

Pada waktu pembicaraan mengenai rencana anggaran belanja Hindia Belanda dalam Tweede Kamer pada bulan Februari 1938, petisi Sutardjo juga dibicarakan. Kebanyakan anggota Tweede Kamer tidak menyetujui petisi.[75] Menteri Jajahan, Welter, sebagai wakil pemerintah Belanda dalam sidang itu menyatakan bahwa jalan yang terbaik untuk perubahan pemerintahan Hindia Belanda adalah dengan menjalankan desentralisasi yaitu dengan meletakkan dasar otonom pada tingkat bawah (pemerintah daerah).[76] Dan mengharapkan supaya Tweede Kamer tidak lagi mempersoalkan petisi Sutardjo. Sedangkan pandangan Gubernur Jenderal sangat diharapkan untuk dapat memberi advis pada keputusan Ratu akan petisi.[77]

Sesuai dengan laporan Menteri Jajahan pada Tweede Kamer, maka pada tahun 1938 telah mulai dijalankan beberapa perubahan dalam pemerintahan di Indonesia. Pada hakekatnya perubahan-perubahan tersebut tidak sesuai dengan keinginan golongan nasionalis.[78]

Pada persidangan Volksraad bulan Juli 1938, Gubernur Jenderal Tjarda secara samar-samar telah membayangkan bahwa petisi akan ditolak. Laporan Gubernur Jenderal kepada Menteri Jajahan (berdasarkan laporan-laporan antara lain dari Raad van Nederlands-Indie, Adviseur voor Inlandse Zaken[79], Directeur van Onderwijs en Eredienst[80] telah menyarankan supaya petisi ditolak dengan alasan isi kurang terang. Juga mengingat akan ketidak-pastian akan kejadian-kejadian dimasa yang akan datang ini maka tidak dapatlah disetujui keinginan untuk mengadakan

73 *Ibid*, tanggal 21–12–1937.

74 *Soeara Katholik*, April dan Mei 1938.

75 D.M.G. Koch, *Menuju Kemerdekaan*, hal. 160; Dr. J.M. Pluvier, *op.cit.*, hal. 126

76 Dr. J.M. Pluvier, *op. cit.*, hal. 126.

77 Dr. S.L. van der Wal, *op. cit.*, hal. 377 – 378.

78 Dr. J.M. Pluvier, *op. cit.*, hal. 126 – 127.

79 Dr. S.L. van der Wal, *op. cit.*, hal. 252 – 261, surat rahasia Adviseur voor Inlandse Zaken (L. Gobee) kepada Gubernur Jenderal Tjarda, tanggal 25 Mei 1937.

80 Dr. S.L. van der Wal, *op. cit.*, hal. 261 – 284, surat rahasia Directeur van Onderwiis en Eredienst (A.D.A. de Kat Angelino) kepada Gubernur Jenderal Tjarda, tanggal 5 Mei 1937.

konferensi untuk menyusun rencana bagi masa yang akan datang. Akhirnya ia menyarankan bahwa bagaimanapun petisi harus ditolak sehingga perobahan prinsipiil bagi kedudukan Indonesia dan mengadakan konferensi itu tidak perlu diadakan.[81]

Akhirnya dengan keputusan Kerajaan Belanda No. 40 tanggal 16 November 1938, petisi yang diajukan atas nama Volksraad ditolak oleh Ratu Belanda. Alasan penolakannya antara lain yalah: "Bahwa bangsa Indonesia belum matang untuk memikul tanggungjawab memerintah diri sendiri".[82] Surat keputusan itu disampaikan pada sidang Volskraad tanggal 29 November 1938.[83]

Penolakan yang diambil tanpa keputusan sidang Staten Generaal itu [84] sangat mengecewakan para pemimpin pergerakan rakyat Indonesia.[85] Sutardjo sebagai pencetus idee petisi menyatakan bahwa penolakan yang dilakukan terhadap petisi telah memperlihatkan sikap sombong dan ceroboh pemerintah Belanda; disamping mendemonstrasikan sampai seberapa jauh sebenarnya kedudukan Volksraad dalam pemerintahan.[86] Ia memperingatkan pemerintah Belanda, bahwa sikap yang diambil terhadap petisi adalah keliru.[87]

Golongan yang menolak petisi seperti PSII dan Perindra, berpendapat bahwa ditolaknya petisi memang sudah diduga sebelumnya. Pertama karena tidak disokong sepenuhnya oleh semua golongan pergerakan, kedua karena sikap pemerintah Belanda sendiri sejak semula petisi diajukan.[88] Sukardjo Wirjopranoto, salah seorang yang menolak petisi, berpendapat bahwa sebagai anggota Volksraad ia merasa kecewa atas penolakan petisi,tetapi hal ini tidaklah merupakan suatu pukulan yang keras bagi pergerakan kemerdekaan.[89]

---

81 *Ibid*, hal. 382 – 391.

82 *Nationale Commentaren*, tanggal 16–12–1938, Dr. S.L. van der Wal, *op. cit.*, hal. 391–396; 914–920;

83 *Nationale Commentaren*, tanggal 16–12–1938.

84 *Soeara Katholik*, tanggal 23–12–1938; D.M.G. Koch, *op.cit.*, hal. 161; Dr. J.M. Pluvier, *op.cit.*, hal. 128.

85 D.M.G. Koch, *ibid*,; Dr.J.M. Pluvier, *ibid*,

86 Dr. S.L. van der Wal, *op. cit.*, hal. 398 – 400; dan wawancara dengan Bapak Sutardjo Kartohadikusumo.

87 Dr. J.M. Pluvier, *op. cit.*, hal. 128.

88 *Soeara PSII*, Desember 1938 hal. 145; *Soeara Parindra*, Desember 1938, hal. 336.

89 Sukardjo Wirjopranoto, "Perjuangan mendapatkan hak politik", dalam *Soeara Parindra*, Desember 1938, hal. 336 – 339.

Central Comite Petisi Sutardjo kemudian mengeluarkan suatu "surat terbuka" yang ditujukan kepada Pengurus Besar semua partai politik dan perhimpunan-perhimpunan bangsa Indonesia, isinya disamping menyesali cara-cara penolakan atas petisi, juga mengajak seluruh partai-partai untuk menentukan sikap atas penolakan petisi tersebut, dengan mengadakan suatu konferensi di Jakarta tanggal 27 – 29 Mei 1939.[90]

Maksud CCPS untuk mengadakan suatu konferensi akhirnya tidak dapat dilaksanakan karena pada waktu itu beberapa partai politik bermaksud akan mengadakan *Nationale Concentratie* (yang kemudian setelah terbentuk bernama Gabungan Politik Indonesia atau disingkat GAPI). Sehingga Sutardjo kemudian memutuskan bahwa tugas untuk memperjuangkan petisi selesailah sudah. Oleh karena itu dalam rapat pengurus CCPS yang diadakan pada tanggal 11 Mei 1939 di Jakarta telah diputuskan untuk membubarkan CCPS.[91] Keputusan ini diambil di samsamping adanya keinginan untuk mengadakan Nationale Concentratie juga untuk menjaga jangan timbul salah paham atau kekecewaan di dalam masyarakat Indonesia.

3. *Gabungan Politik Indonesia*

Suatu gagasan untuk membina kerjasama diantara partai-partai politik dalam bentuk federasi timbul kembali pada tahun 1939. Menurut Mohammad Husni Thamrin pendiri federasi itu, pembentukan federasi pada mulanya dianjurkan oleh PSII pada bulan April 1938 dengan pembentukan Badan Perantara Partai Partai Politik Indonesia (Bapeppi). Oleh karena pembentukannya kurang lancar, Parindra mengambil inisiatif untuk membentuk kembali Konsentrasi Nasional. Sebagai alasan yang mendorong dan mempercepat terbentuknya federasi tersebut adalah:

a. kegagalan Petisi Sutardjo.
b. kegentingan internasional akibat timbulnya fasisme.
c. sikap pemerintah yang kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan bangsa Indonesia.[92]

---

90 *IPO*, tanggal 25 Maret 1939, hal. 218.

91 *IPO*, tanggal 13 Mei 1939, hal. 335 – 336; *Soeara Katholik*, tanggal 19 Mei 1939, salinan surat keputusan pembubaran CCPS tanggal 11 Mei 1939.

92 Dr. J. M Pluvier, *op. cit.*, hal. 132.

Ketiga hal tersebut merupakan tantangan bagi pemimpin-pemimpin Indonesia, lebih-lebih makin gawatnya situasi internasional akibat meningkatnya pengaruh fasisme. Kemenangan dan kemajuan yang diperoleh negara-negara fasisme, yaitu negara-negara Jerman, Italia dan Jepang, tidaklah menggembirakan bangsa Indonesia.'[93] Karena itu pers Indonesia menyerukan agar kekalahan dalam forum Volksraad (perjuangan Petisi Sutardjo) dianggap sebagai cambuk untuk menuntut dan menyusun barisan kembali dalam suatu wadah persatuan berupa konsentrasi nasional.[94]

Parindra berpendapat bahwa perjuangan konsentrasi nasional haruslah: kedalam, dapat menyadarkan dan menggerakkan rakyat untuk memperoleh suatu pemerintah sendiri; keluar, dapat menggugah pemerintah Belanda untuk menyadari cita-cita bangsa Indonesia dan kemudian memberikan perubahan-perubahan dalam pemerintahan di Indonesia.[95] Kemudian diadakan pendekatan dan perundingan dengan partai-partai dan organisasi-organisasi seperti PSII, Gerindo, PII, Pasundan, Persatuan Minahasa dan Partai Katholik untuk membicarakan masadepan Indonesia. Pada tanggal 21 Mei 1939 di dalam rapat pendirian konsentrasi nasional di Jakarta berhasillah didirikan suatu organisasi yang merupakan kerjasama partai-partai politik dan organisasi-organisasi dengan diberi nama *Gabungan Politik Indonesia* (GAPI). Ditegaskan juga bahwa masing-masing partai tetap mempunyai kemerdekaan penuh terhadap program kerjanya masing-masing dan bila timbul perselisihan antara partai-partai, GAPI bertindak sebagai penengah. Untuk pertama kali pimpinan dipegang oleh: Muhammad Husni Thamrin, Mr. Amir Sjarifuddin, Abikusno Tjokrosuyoso. Di dalam anggaran dasar diterangkan bahwa GAPI berdasarkan kepada:

a. Hak untuk menentukan diri sendiri.
b. Persatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia, dengan berdasarkan kerakyatan dalam faham politik, ekonomi dan sosial.
c. Persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia.[96]

---

93 *Tjahaja Timoer*, tanggal 15–5–1938.
94 *Tjahaja Timoer*, tanggal 23–3–1939.
95 S.L. van der Wal, *op. cit.*, hal. 411–412.
96 *IPO*, tahun 1939, hal. 389; *Soeara PSII*, Mei 1939, hal. 17 – 18.

Di dalam konferensi pertama GAPI tanggal 4 Juli 1939 telah dibicarakan aksi GAPI dengan semboyan "Indonesia berparlemen". Jelas tidak menuntut kemerdekaan penuh, melainkan suatu parlemen yang berdasarkan kepada sendi-sendi demokrasi. Ditetapkan pula disiplin organisasi dimana anggota yang dipecat oleh partainya otomatis juga keluar dari GAPI. [97]

Menilai situasi akibat meletusnya Perang Dunia ke-II, yaitu atas penyerbuan Jerman terhadap Polandia, pada tanggal 20 September 1939 GAPI mengeluarkan suatu pernyataan yang kemudian dikenal dengan nama Manifest GAPI. Isinya yalah mengajak rakyat-rakyat Indonesia dan Negeri Belanda untuk bekerjasama menghadapi bahaya fasisme dimana kerjasama itu akan lebih berhasil apabila kepada rakyat Indonesia diberikan hak-hak baru dalam urusan pemerintahan. Yaitu suatu pemerintahan dengan parlemen yang dipilih dari dan oleh rakyat, dimana pemerintahan tersebut bertanggungjawab kepada parlemen tersebut.

Untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan, GAPI menyerukan agar perjuangan GAPI disokong oleh semua lapisan rakyat Indonesia. Seruan itu disambut hangat oleh pers Indonesia dengan memberitakan secara panjang-lebar mengenai GAPI bahkan sikap beberapa negara di Asia dalam menghadapi bahaya fasisme juga diuraikan secara khusus. GAPI sendiri juga mengadakan rapat-rapat umum yang mencapai puncaknya pada tanggal 12 Desember 1939 dimana tidak kurang dari 100 tempat di Indonesia mengadakan rapat mempropagandakan tujuan GAPI. Seakan-akan udara Indonesia gemuruh dengan seruan Indonesia berparlemen. Meskipun demikian gemuruhnya ada juga pihak-pihak yang tidak setuju dengan aksi-aksi GAPI ini seperti Penyadar, PNI-Baru, Perkumpulan Kristen Indonesia. Mereka berpendapat bahwa berdasarkan pengalaman selama ini aksi yang sifatnya meminta-meminta kepada Belanda tidak akan ada gunanya.

Sungguhpun kenyataannya memang demikian, untuk menyokong aksinya, GAPI kemudian membentuk Kongres Rakyat Indonesia (KRI). Kongres Rakyat Indonesia diresmikan sewaktu diadakannya Kongres Rakyat Indonesia yang pertama tanggal 25

---

97 S.L. van der Wal, *op. cit.*, hal 414 – 415; *IPO*, tahun 1939, hal. 470 – 471; *Tjahaja Timoer*, tanggal 6–7–1939.

Desember 1939 di Jakarta. Tujuannya adalah Indonesia Raya, bertemakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan kesempurnaan cita-citanya, dan sasaran pertama yang hendak dicapai yalah Indonesia berparlemen penuh.

Keputusan penting lain dari Kongres yalah penetapan bendera Merah Putih dan Lagu Indonesia Raya sebagai bendera dan lagu persatuan Indonesia, serta peningkatan pemakaian bahasa Indonesia bagi rakyat Indonesia.

Kemudian dibentuklah badan-badan Comite Parlemen Indonesia diseluruh Indonesia dengan maksud untuk lebih meningkatkan aksi-aksi GAPI. Kepada panitia-panitia di daerah dianjurkan mengadakan kursus-kursus dan rapat-rapat yang bersifat tertutup dan umum. Untuk menguatkan aksi tersebut, GAPI berusaha meyakinkan rakyat akan kewajibannya untuk bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa. Meskipun tuntutan GAPI ini dibicarakan juga dalam Tweede Kamer (ketika membahas anggaran belanja Hindia pada tanggal 26 Februari s/d 6 Maret 1940) ternyata sokongan hanya diperoleh dari Social Demokratische Arbeiders Partij (SDAP), sedangkan partai-partai lainnya menolak. Dan pers Belanda sendiri pada umumnya juga menolak dengan alasan-alasan yang biasa dikemukakan, belum waktunya. Tetapi partai-partai dan pers tersebut juga berpendapat bahwa perlu juga diadakan perubahan-perubahan di dalam pemerintahan di Indonesia mengingat situasi internasional yang menggawat. Melihat kenyataan ini pada tanggal 5 Februari dan 5 Maret 1940 GAPI mengeluarkan pernyataan, bahwa walau bagaimanapun tuntutan Indonesia berparlemen akan diteruskan sampai berhasil.

Pada bulan Agustus 1940, waktu Negeri Belanda telah dikuasai oleh Jerman dan Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat perang, GAPI kembali mengeluarkan resolusi yang menuntut diadakannya perubahan ketatanegaraan di Indonesia dengan menggunakan hukumtatanegara dalam masa genting *(nood staatsrecht).* Isi resolusi yaitu mengganti Volksraad dengan parlemen sejati yang anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat, merubah fungsi kepala-kepala departemen *(departemenshoofden)* menjadi menteri yang bertanggungjawab kepada parlemen tersebut. Dan kepada rakyat serta organisasi-organisasi politik, sosial dan ekonomi yang tidak tergabung dalam GAPI supaya menyo-

kong usaha GAPI.[98] Resolusi ini dikirimkan kepada Gubernur Jenderal, Volksraad, Ratu Wihelmina dan kabinet Belanda di London.

Tuntutan yang dilakukan melalui aksi-aksi yang sangat gigih itu baik di luar maupun di dalam Volksraad akhirnya atas usul dari beberapa anggota bangsa Indonesia di Volksraad mengenai perubahan ketatanegaraan maka pemerintah berjanji akan membentuk suatu komisi yang bertugas akan mengumpulkan bahan-bahan apa yang menjadi keinginan bangsa Indonesia. Atas persetujuan pemerintah pada tanggal 14 September 1940 dibentuklah *Commissie tot bestudeering van staatsrechtelijke hervormingen* (komisi untuk menelidiki dan mempelajari perubahan-perubahan ketatanegaraan). Komisi ini kemudian dikenal dengan nama *Komisi Visman.* karena diketuai oleh Dr. F.H. Visman. Pembentukan komisi ini tidak mendapat sambutan baik dari anggota-anggota Volksraad, apalagi dari GAPI yang terang-terangan menyatakan tidak setuju.[99] Ketidak-setujuan kalangan pergerakan umumnya berdasarkan pengalaman akan komisi yang sejenis pada tahun 1918 yang tidak menghasilkan apa-apa bagi perbaikan nasib rakyat Indonesia. Untuk menghindari ketidak-satuan pendapat dalam menghadapi Komisi Visman, GAPI mengumumkan bahwa anggota-anggota GAPI tidak dibenarkan memberikan pendapat secara sendiri-sendiri kepada komisi. Kemudian GAPI mengambil sikap lunak setelah ada undangan resmi dari Komisi Visman. Sementara itu beberapa anggota Volksraad mengajukan suatu mosi yang sifatnya lebih ringan, yaitu keinginan untuk mengadakan kerja-sama antara pemimpin-pemimpin Indonesia dengan pihak pemerintah Belanda.

Untuk lebih memperjelas tuntutan, dibentuklah suatu panitia yang bertugas menyusun bentuk dan susunan ketatanegaraan Indonesia yang diinginkan. Hasil panitia ini kemudian disampaikan dalam pertemuan antara wakil-wakil GAPI dengan Komisi Visman pada tanggal 14 Februari 1941 di gedung Raad van Indië, Jakarta.

Pertemuan itu tidak menghasilkan hal-hal yang baru, malah-

---

98 S.L. van der Wal, *op. cit.*, hal. 523 – 526; *Soeara PSII*, Agustus 1940; *Soeara Parindra*, Agustus 1940.

99 S.L. van der Wal, *op.cit.*, hal. 529 – 531; *Soeara Parindra*, Oktober 1940, hal. 114 – 115.

an pertemuan itu sendiri yang banyak dibicarakan oleh kalangan pergerakan sehingga ada yang menganggap usaha GAPI tidak radikal lagi. Harapan kemudian ditumpukan kepada menteri Jajahan Welter dan van Kleffens yang akan berkunjung untuk melihat keadaan di Indonesia pada bulan April 1941. Ternyata kunjungan itu hanya menambah kekecewaan bagi kalangan pergerakan karena Welter tidak memberikan langkah-langkah baru ke arah perobahan ketatanegaraan. Malahan harapan itu makin sirna dengan adanya pidato Ratu Wihelmina di London dan pidato Gubernur Jenderal di Volksraad mengenai haridepan Indonesia. [100]

Oleh karena situasi politik makin gawat akibat bayangan Perang Dunia ke-II, pemerintah kolonial memperketat izin mengadakan rapat-rapat. Kemudian kepada rakyat Indonesia disodorkan peraturan wajib bela *(inheemse milite)*.

---

100 S.L. van der Wal,*op. cit.*,hal. 687 – 690.

BAB IV

KOMUNIKASI SOSIAL DAN EDUKASI

A. MENDIDIK BANGSA SENDIRI

1. Pendidikan Wanita

Menjelang awal abad ke-20 terjadilah perubahan-perubahan masyarakat di Indonesia, yang terutama disebabkan oleh terbukanya negeri ini bagi perekonomian uang. Pada pertamanya terjadilah suatu perubahan pandangan penduduk bumiputra dan bersamaan dengan itu gagasan tentang kemajuan mulai tumbuh: "Dan apabila gagasan tentang kemajuan itu menjadi hal yang utama, maka semangat masyarakat tentulah akan berubah, ekonomi tradisionil dan etika sosial menjadi retak dan ukuran-ukuran baru mesti diciptakan. Kemudian terciptalah dorongan-dorongan untuk berusaha, terbangunlah rasa tanggung-jawab dan keinginan untuk mengabdikan diri kepada sesuatu.....", demikian seorang ahli sosiologi menulis tentang keadaan Indonesia pada awal abad ke-20.[1]

Dan gagasan tentang kemajuan itu terutama menjadi pemikiran pokok R.A. Kartini (1879 – 1904), seperti dicerminkan di dalam surat-surat pribadinya, yang diterbitkan pada tahun 1912 atas usaha dan di edit oleh J.H. Abendanon dengan judul *Door duisternis tot licht* (Habis Gelap Terbitlah Terang)[2] Penerbitan itu menimbulkan gelombang kegairahan dan simpati mengenai gerakan emansipasi wanita di Indonesia dan negeri-negeri lain. Bagaimana kedudukan gadis-gadis semasa

---

1 B. Schrieke (ed), *The Effect of Western Influence on Native Civilisations in the Malay Archipelago*, Batavia, 1929, hal. 239.

2 Terbit pertama kali pada tahun 1912, dan mengalami cetakulang berkali-kali. Cetakulang terjemahan dalam bahasa Inggris (1912) oleh Agnes L. Symmers dengan kata pengantar Ny. E. Roosevelt dan pendahuluan Hildred Geertz, berjudul *Letters of a Javanese Princess: Raden Adjeng Kartini.* New York, 1964. Terjemahan Armijn Pane, *Habis Gelap Terbitlah Terang*.. Djakarta, 1951 karena alasan ongkos dan harga ternyata banyak membuang hal-hal yang sekarang ini justru penting untuk mendapatkan gambaran lengkap mengenai Kartini dan masanya. Karangan tentang Kartini dalam bahasa Belanda dapat diikuti dalam karya Cora Vreede-de Stuers, *The Indonesian Woman: Struggles and Achievements*, 's-Gravenhage, 1960. Pramoedya Ananta Toer, *Panggil Aku Kartini Sadja*, 2 jilid, Bukittinggi – Djakarta, 1962

Kartini menulis suratnya tertanggal 25 Mei 1899 kepada Stella Zeehandelaar, seorang gadis Belanda, dikisahkan sebagai berikut: "Kami, gadis-gadis masih terikat oleh adat-istiadat lama dan sedikit sekali memperoleh kebahagiaan dari kemajuan pengajaran. Untuk keluar rumah sehari-hari dan mendapat pelajaran di sekolah saja sudah dianggap melanggar adat. Ketahuilah, bahwa adat negeri kami melarang keras gadis keluar rumah. Ketika saya berusia duabelas tahun, maka saya dikurung di dalam rumah, saya mesti masuk "kurungan". Saya dikurung di dalam rumah, seorang diri, sunyi-senyap terasing dari dunia luar. Saya tidak boleh ke luar ke dunia itu lagi, bila tidak disertai oleh seorang suami, seorang laki-laki yang asing samasekali bagi saya, dipilih oleh orang tua saya untuk saya, dikawinkan dengan saya tanpa sepengetahuan saya sendiri".[3]

Keadaan gadis-gadis seperti dialami Kartini; juga terdapat di Pasundan. Seorang guru wanita Belanda, yang datang di Indonesia pada tahun 1913, menulis tentang wanita Sunda, bahwa mereka hidup dalam tiga periode: masa kanak-kanak yang penuh kegembiraan, masa kehidupan patuh sebagai istri dan ibu, masa penuh pengaruh sebagai nenek. Membicarakan lingkungan gadis-gadis menak di Pasundan, ia menulis: "Waktu saya mulai bekerja di sini, hampir tidak ada atau sedikit sekali gadis-gadis yang pergi ke sekolah..... Semua kebebasan yang dimiliki gadis-gadis hilang lenyap pada usia menjelang kawin, yaitu pada usia sepuluh atau duabelas tahun".[4]

Kehidupan gadis semacam itu sebenarnya hanya terdapat pada kalangaan menak dan berbeda dengan keadaan gadis petani maupun pekerja, namun keterbelakangan pendidikan menjadi pola yang umum pada mereka. Pada golongan petani dan pekerja perkawinan di bawah umur sering terjadi pula, sama halnya dengan kaumnya dari golongan menak. Oleh karena itulah Kartini sangat mendambakan pengajaran bagi gadis-gadis. Dalam suratnya kepada Prof. dan nyonya F.K. Anton di Jena, tertanggal 4 Oktober 1904, ia menulis: "Apabila kami dengan sangat meminta pendidikan dan pengajaran bagi gadis-gadis bukanlah sekali-sekali karena kami hendak menjadikan anak-anak perempuan itu

3 Lihat terjemahan Armijn Pane, *op. cit.*,

4 B.H. Lans, "De Soendanessche vrouw in het licht van het heden, het verleden en de toekomst", *Indische Gids* 1920, h. 29 – 58, seperti dikutip oleh Cora Vreede-de Stuers. *op, cit.*, hal. 21

saingan orang laki-laki dalam perjuangan hidup ini, melainkan karena kami... hendak menjadikan perempuan itu lebih cakap melakukan kewajibannya, yaitu kewajiban yang diserahkan oleh Alam sendiri ke dalam tangannya: menjadi ibu – pendidik manusia yang pertama."

Ibulah yang menjadi pusat kehidupan rumahtangga, dan kepada ibulah terletak kewajiban pendidikan anak-anak yang berat itu: yaitu bagian pendidikan yang membentuk budi-pekertinya.....untuk keperluan keluarga yang lebih besar, yang di namakan Masyarakat, di mana ia kelak akan menjadi anggotanya. Itulah sebabnya kami minta pendidikan dan pengajaran bagi anak-anak gadis"[5] Kesadaran akan tugas-kewajiban itulah, yang dikatakan sebagai "kewajiban untuk membentuk masa yang akan datang".

Usahanya yang pertama yalah mendirikan sebuah kelas kecil bagi kepentingan gadis-gadis, yang diselenggarakan empat kali seminggu. Murid-muridnya yang pertama berjumlah tujuh orang dan mendapat pelajaran membaca-menulis, kerajinan tangan, masak-memasak, dan menjahit. Sampai batas tertentu pengajaran itu diberikan dengan cuma-cuma.[6]

Di Jawa Barat pada tahun 1904 berdiri pula sekolah oleh Raden Dewi Sartika (1884 – 1947). Semula bernama Sekolah Istri dan kemudian Keutamaan Istri. Setelah ia menikah dengan B.A. Suriawinata pada tahun 1906 ia melanjutkan cita-cita dan pekerjaannya. Sekolahnya tersebar di pelbagai kabupaten dan pada tahun 1912 ada 9 sekolah gadis, yang berarti 50% dari seluruh jumlah sekolah di Pasundan waktu itu. Ia meninggal di pengungsian pada jaman revolusi. Sampai akhir hayatnya ia tetap sibuk mengurus kepentingan sekolah-sekolahnya.[7]

Dengan usaha-usaha perseorangan itu mulailah apa yang

---

5 Lihat terjemahan Armijn Pane, *op.cit.*,

6 Kartini dalam suratnya kepada Ny. Abendanon ttg. 4 Juli 1903. Bagian ini tidak ada dalam terjemahan Armijn Pane, tetapi di dalam terjemahan bahasa Belanda. Lihat Cora Vreede-de Stuers, *op.cit.*, hal. 50–58.

7 Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masjarakat*, cetakan kedua, Djakarta, 1968, hal. 133. Menurut Kardinah Reksonegoro (adik Kartini) Raden Dewi Sartika dan adiknya Sari Pamerat penah mengunjungi sekolah "Wisma Pranawa", yang didirikan di Tegal pada tahun 1908 oleh Kardinah, untuk mempelajari rencana pelajaran sekolah tersebut. Selama empat bulan mereka juga ikut mengajar di situ dan selama itu menjadi tamu kabupaten Tegal. Lihat Kardinah Reksonegoro, *"Kartini": Tiga Saudara*, Salatiga 17 Agustus 1964, hal. 17 Naskah stensil dalam bahasa Jawa.

kemudian dikenal sebagai gerakan wanita Indonesia. Terutama setelah terbitnya kumpulan surat-surat R.A. Kartini. Dewi Sartika juga merupakan salahseorang dari 9 wanita yang menulis gagasannya bagi sebuah panitia pemerintah Hindia Belanda yang menyelidiki sebab-sebab kemunduran kemakmuran penduduk di Jawa; khusus dalam hubungan usaha meninggikan derajat kaum wanita.[8]

Peningkatan derajat wanita merupakan salahsatu pokok dalam masalah kesejahteraan umum. Dan perkembangan kecerdasan penduduk Indonesia tidaklah begitu kuat dan cepat, apabila pendidikan bagi kaum wanitanya diabaikan. Di segala jaman kemajuan wanita merupakan faktor yang nyata pentingnya bagi perkembangan budaya suatu bangsa.[9]

Dalam jangkauan pandangan itulah dimulai tingkat kedua gerakan pendidikan wanita Indonesia, yang diawali dengan berdirinya sebuah perkumpulan Putri Mardika di Jakarta pada tahun 1912. Tujuan Putri Mardika yalah untuk mencari bantuan keuangan bagi gadis-gadis yang ingin melanjutkan pelajaran. Di

---

8 *Onderzoek naar de mindere welvaart der Inlandsche bevolking of Jawa en Madoera*, Deel IX b3, 1914. (selanjutnya disebut Onderzoek, IX b3, 1914) Judul karangan Dewi Sartika yalah, *De Inlandsche-Vrouw (Wanita Bumiputra)*, dimana ia mengemukakan tujuan pendidikan untuk mendapatkan kekuatan dan kesehatan kanak-kanak, baik secara jasmani maupun rokhani, yang disebut *cageur-bageur* (bahasa Sunda). Di samping pendidikan susila, maka pendidikan kejuruan merupakan pokok bagi kaum wanita. Jabatan sebagai bidang, juruketik dan pengaruh rumahtangga baik untuk gadis. Gaji wanita haruslah sama dengan laki-laki untuk pekerjaan yang sama. Perkawinan anak-anak dan permaduan penyakit masyarakat. Karangan R.A. Siti Sundari, Redaktur *Wanito Sworo* berjudul " Javaanche Volk kan niet spoedig vooruitkomen, als de Javaansche Vrouw onwetend blijft" (Penduduk Jawa tidak akan segera maju, bila wanitanya tetap bodoh).Ia menganjurkan sekolah-sekolah dan pendidikan guru untuk gadis-gadis, baik dari kalangan petani maupun menak. Menurut pengamatannya maka wanita, istri para pekerja lebih menaruh minat kepada pengajaran dan mendapatkan pengetahuan praktis. Permaduan tidak disetujuinya. Raden Ayu Sosro Hadikusumo (dulu R.A. Sumatri, adik Kartini) menganjurkan pendidikan kejuruan untuk gadis-gadis dan wanita untuk pelbagai lapangan pekerjaan. Umi Kalsum, putri Mas Budiardjo di Yogya (salahseorang pemimpin Boedi Oetomo), R.A. Ario Surio Sugondo (istri putra Mangkunegoro V), R.A. Amiati, putri Paku Alam VI masing-masing menulis tentang usaha-usaha meninggikan derajat wanita melalui sekolah umum maupun kejuruan, serta menolak permaduan dan pelacuran, serta lintahdarat. Pengarang wanita lainnya yalah R.A. Karlinah (Putri Pangeran Notodirodjo) R.A. Martini dan Ny. Djasirak (seorang bidan di Bandung).

9 *Lihat Onderzoek*, IXb3, 1914. Inleiding oleh S.R. Steimetz. Juga J.H. Abendanon, *Bevordering van het -onderwijs van meisjes behoorende- tot de Inheemsche bevoling van Ned. Indie*, t.t.

samping itu juga memberi penerangan dan nasehat yang baik bagi kaum putri.

Perkumpulan *Kartinifonds* (Dana Kartini) didirikan pada tahun 1912 atas usaha Tuan dan Nyonya C.Th. van Deventer, seorang penganjur politik etika, yang bertujuan untuk mendirikan sekolah-sekolah "Kartini". Sekolah yang pertama didirikan di Semarang pada tahun 1913, kemudian menyusul di kota-kota Jakarta, Malang, Madiun dan Bogor.[10]

Sejalan dengan itu timbul banyak sekali perkumpulan wanita, seperti Madju Kemuliaan di Bandung, Pawijatan Wanita di Magelang, Wanito Susilo di Pemalang, Wanita Hadi di Jepara, Wanito Rukun Santoso di Malang, Budi Wanito di Solo, dan banyak lagi dipelbagai tempat.[11] Organisasi keagamaan pun mempunyai bagian wanitanya, seperti Wanito Katolik, Aisyiah dari Muhammadiyah, Nahdlatul Fataad dari NU dan Wanudyo Utomo dari SI.

Di Sumatra, Karadjinan Amai Setia didirikan di Kota Gadang pada tahun 1914, yang bertujuan: meninggikan derajat wanita dengan jalan pelajaran menulis, berhitung dan membaca; mengatur rumahtangga; membuat kerajinan tangan dan mengatur pemasarannya. Di Padang Panjang berdiri Kaoetamaan Istri Minangkabau, yang bertujuan menyebarluaskan pengetahuan umum, pendirian sekolah industri dan kerajinan wanita. Di Bukittinggi berdiri Serikat Kaum Ibu Sumatra. Di Gorontalo berdiri *Gorontalosche Mohammedaansche Vrouwenvereeniging* dan di Ambon berdiri Ina Tuni, yang lebih bercorak politik, bagian dari Sarikat Ambon.

Banyaknya perkumpulan itu menunjukkan, bahwa golongan wanita tidak sabar dengan dibukanya sekolah-sekolah. Mereka beraksi dalam perkumpulan sambil mendidik dan mengajar kaumnya.

Bersamaan dengan perkumpulan, wanita Indonesia memiliki suratkabar dan majalahnya, yang berfungsi sebagai penyebar gagasan kemajuan golongannya dan juga sebagai alat praktis

---

10 A.M. Joekes, "De Ontwikkeling van het onderwijs aan Inheensche meisjes in Indie en het aandeel daarin van de Kartini – en van Deventerscholen", *De Opbouw*, Juli 1937. hal. 75 – 84.

11 *De Inheemsche (Jeugdbeweging en) Jeugdpers in Ned. Indie in Nederlandsch–Indie.* Publicatie Departement van Onderwijs en Eredienst, Batavia 1931 – 1932.

pendidikan dan pengajaran. Demikianlah terbit di Bandung pada tahun 1909 *Poetri Hindia,* tetapi dengan redaksi laki-laki. *Wanito Sworo,* terbit pada tahun 1913 di Pacitan-Brebes dipimpin putri seorang guru di Ponorogo yang menetap di Brebes kurang lebih 60 km sebelah timur Cirebon. *Wanito Sworo,* terbit dengan huruf dan bahasa Jawa, tetapi kemudian sebagian berbahasa Melayu juga. Isinya mengenai soal-soal kewanitaan praktis, masalah-masalah yang lebih luas nampaknya belum waktunya untuk menjadi isi majalah itu.

Di Bukittinggi juga muncul *Soenting Melayoe* yang merupakan pusat kegiatan pemuda putri maupun wanita yang telah bersuami. Cara menyatakan pikiran para penulisnya yalah dalam bentuk prosa dan puisi.

Poetri Merdika di Jakarta merupakan suratkabar yang sangat maju untuk tahun 1914. Artikel-artikelnya tertulis dalam bahasa Belanda, Melayu dan Jawa. Edisi Sunda terbit pada tahun 1918 bernama *Penoentoen Istri.*

Dengan terbitnya *Poetri Merdika,* maka minat kepada gerakan emansipasi tergugah dan bersamaan dengan itu masalah-masalah yang berkaitan dibicarakan pula. Permaduan, pendidikan campuran laki dan wanita, pemberian kelonggaran bergerak kaum putri, berpakaian Eropa, kesempatan pendidikan dan pengajaran merupakan bahan perdebatan bagi mereka yang setuju dan tidak setuju. Di samping uraian yang sangat maju terdengar juga "suara peringatan" dari pihak yang kolot.

Selain itu di Semarang terbit *Estri Oetomo,* di Padang *Soeara Perempoean,* dengan redaksi Nona Saadah, seorang guru HIS di situ. *Perempoean Bergerak* terbit di Medan dengan redaksi Parada Harahap. Sebagian besar pembantu suratkabar dan majalah wanita itu yalah guru-guru wanita, dan dengan demikian usaha pengajaran praktis di sekolah disambungkan dengan penyebarluasan usaha-usaha perbaikan kedudukan wanita.

Sejak tahun 1920 jumlah perkumpulan wanita bertambah banyak sekali: apabila dalam awal perkembangan wanita berasal ningrat yang menonjol, maka dalam tahap ketiga batas keturunan ningrat tidak kentara lagi. Terjadi perluasan pengajaran bagi wanita dan kesediaan organisasi-organisasi untuk membentuk bagian wanita. Aisyah yang merupakan bagian dari Muham-

madiyah pada tahun 1929 telah mempunyai 5000 orang anggota dari 32 sekolah dengan 75 guru-guru putri. [12]

Perkembangan ke arah politik menjadi makin kentara pada gerakan wanita setelah kaum wanita ikut ambil bagian dalam kegiatan SI, PKI, PNI dan PERMI. Wanita Indonesia telah mengikuti jejak Pergerakan Nasional. Kongresnya yang pertama pada tanggal 22 Desember 1928, yang melahirkan Perserikatan Perhimpunan Istri Indonesia (PPII). Tanggal itu, yang kemudian dirayakan sebagai "Hari Ibu" dapat dilihat sebagai hari lahirnya kesadaran yang mendalam wanita Indonesia tentang nasibnya, kewajibannya, kedudukannya, dan keanggotaannya dalam masyarakat.[13] Gerak kegiatannya tidak semata-mata politik dan terutama ditujukan untuk kerja kemasyarakatan dan kesejahteraan umum. Majalahnya *Istri*, yang terbit mingguan, melarang penggunaan bahasa Belanda dalam karangan-karangan yang akan dimuat, suatu bukti *Istri* melaksanakan salahsatu keputusan Sumpah Pemuda tahun 1928.

Berbeda dengan PPII, maka *Istri Sedar* yang didirikan di Bandung pada tanggal 22 Maret 1930 semata-mata merupakan organisasi politik. Pada tahun 1932, setelah kongresnya yang kedua, salahsatu programnya yalah "menyokong suatu pendidikan nasional yang berdasarkan kebutuhan kaum melarat dan atas dasar-dasar kemerdekaan dan percaya kepada diri-sendiri". Tahun itu adalah tahun perlawanan umum terhadap undang-undang "sekolah liar" yang kemudian dijadikan tema sebuah novel Suwarsih Djojopuspito berjudul *Buiten het gareel* (Di luar kekangan). [14] Suwarsih adalah istri Sugondo Djojopuspito, yang waktu itu menjadi pemimpin sekolah Taman Siswa Bandung. Sebagai guru ia ikut mengalami hidup di "sekolah liar" selama bertahun-tahun sebelum perang. Terpancar dengan jelas dari dalam buku yang "simpatik sekali, diliputi oleh suasana melancholik dari ceritera idealisme yang tidak luntur-lunturnya oleh

---

12 A.K. Pringgodigdo, *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia*, Cetakan ketujuh. Djakarta, 1970, hal. 89.

13 "Hari Ibu", dalam *Suara Perwari*, III, No. 5 (Pebruari)1953.

14 Suwarsih Djojopoespito, *Buiten het Gareel*, roman 1946. Semula roman itu ditulis dalam bahasa Sunda, tetapi ditolak oleh Balai Pustaka, sehingga ditulis kembali dalam bahasa Belanda. Terbit di Nederland dengan kata pengantar Du Perron. Roman itu lebih mendekati sebuah dokumen kemanusiaan daripada sebuah roman, demikian W.le Febre dalam bukunya *'Taman Siswa ialah, kepertjajaan kepada kekuatan sendiri untuk tumbuh*, Djakarta - Surabaja, 1952, hal. 37. Terjemahan P.S. Naipospos.

penderitaan....." [15] Kecuali itu bukunya menggambarkan dengan jelas betapa eratnya Taman Siswa dengan gerakan nasional serta pandangan penulisnya sebagai penganut feminisme dan nasionalisme yang terkandung dalam *Istri Sedar.*

Hasil-hasil gerakan wanita, terutama di dalam hal pendidikan dan pengajaran, bolehlah dikatakan memuaskan. Demikian juga kedudukan sosialnya mengalami perbaikan dan dalam bidang politik bolehlah disebut ikut-sertanya wanita Indonesia dalam pemilihan keanggotaan dewan-dewan kotapraja pada tahun 1938. [16] Namun bila dibandingkan dengan jumlah wanita dari golongan rendah, hasil-hasil usaha gerakan wanita belumlah kentara benar.

Dari ikhtisar singkat di atas nampaklah, bahwa setelah tingkat pertama usaha perseorangan berakhir, kaum wanita membanjiri organisasi-organisasi yang ada. dan kemudian masuk dalam aliran yang lebih besar: yang dalam aliran nasional liberal, dalam gerakan reformis Islam dan aliran feminis-demokratis. Mungkin sekali karena terjadinya perubahan dan perkembangan yang terlampau cepat, maka pendidikan wanita seperti yang dicita-citakan, tidak saja dalam bentuknya yang formil melalui persekolahan tetapi juga dikaitkan dengan kegiatan kaum wanita dalam organisasi-organisasinya sendiri, terutama nampak sekali yalah dorongan dari pemuda putrinya.

Di situlah letak perbedaan usaha mendidik bangsa sendiri yang diselenggarakan oleh kaum wanita dan usaha-usaha kaum pria, seperti yang akan terurai di belakang ini.

2. *Taman Siswa*

Sejarah Taman Siswa adalah sejarah kebangsaan Indonesia. Kelahirannya pada tanggal 3 Juli 1922 dinilai oleh seorang penulis sejarah Indonesia sebagai titikbalik dalam pergerakan Indonesia. [17] Karena kaum revolusioner yang mencoba menggerakkan rakyat dengan semboyan-semboyan asing dan ajaran-ajaran Marxis terpaksa memberikan tempat untuk gerakan baru, yang benar-benar berasas kebangsaan dan bersikap non-kooperatif dengan pemerintah jajahan.

---

15 W.le Febre, *ibid,*

16 *Jubileumnummer Indonesia,* 1938, hal. 274–275.

17 Raymond Kennedy, *The Angeless Indie,*, tanpa tempat, 1942, hal. 126 dst.

Bapak gerakan ini yalah R.M. Suwardi Surjaningrat [18] atau yang kemudian dikenal sebagai Ki Hadjar Dewantara. Karena keanggautaannya dalam *Indische Partij* dan aktivitasnya menentang usaha-usaha perayaan 100 tahun kemerdekaan Belanda atas jajahan Perancis Napoleon, maka ia dibuang ke negeri Belanda bersama dengan Dr. Tjipto Mangunkusumo [19] dan E.F.E. Douwes Dekker [20] (Danudirdjo Setyabuddhi, 1913-September 1919). Dalam masa pembuangan itu ia memakai kesempatan untuk mempelajari masalah-masalah pendidikan dan berhasil merumuskan pernyataan azas pengajaran nasional.

Dengan mendirikan sekolah Taman Siswa yang pertama, maka pada masa itu berarti ia mengesampingkan pendekatan politik. Tetapi ternyata ia dapat mewujudkan keinginan bangsanya, karena usaha untuk mendidik angkatan muda dalam jiwa kebangsaan Indonesia merupakan bagian penting dari pergerakan Indonesia dan dianggap merupakan dasar perjuangan meninggikan derajat rakyat. Banyak perkumpulan dan partai - partai memasukkan hal itu dalam programnya.

Pernyataan azas Taman Siswa tahun 1922 [21] berisi 7 pasal yang secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut: Pasal ke-1 dan ke-2 mengandung dasar kemerdekaan bagi tiap-tiap orang untuk mengatur dirinya sendiri. Bila ditetapkan kepada pelaksanaan pengajaran, maka hal itu merupakan usaha mendidik murid-murid supaya dapat berperasaan, berpikiran dan bekerja

---

18 Tentang kegiatan-kegiatan Suwardi Surjaningrat selama 9 tahun, lihat Abdurrachman Surjomihardjo, "Suatu analisa tjita-tjita dan tindak perbuatan nasional-revolusioner Suwardi Surjaningrat (1913 – 1922)". *Medan Ilmu Pengetahuan*, Th. III, No.2 (April) 1962, hal. 474 – 514.

19 Biografi "demokrat sejati" itu dikarang dengan baik oleh M. Balfas, *Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo: Demokrat Sedjati*, Djakarta, 1957.

20 Autobiografi Douwes Dekker yang kurang memadai susunannya terdapat dalam *Zeventig Jaar Konsekwent*,, Bandung, 1950. Profil dan kepribadiannya dikarang dengan baik oleh D.M.G. Koch, *Batig Slot: Figuren uit Oude Indie*, Amsterdam, 1960, hal. 118 – 129.

21 Pernyataan Azas itu disebut sebagai "azas perjuangan" oleh Ki Hadjar Dewantara, Azas-azas dan Dasar-dasar Taman Siswa" dalam *Buku Peringatan 'Taman Siswa 30 tahun 1922 – 1952*, Jogjakarta, 1952, hal. 46. Yang dimaksud dengan "azas-azas" yalah pernyataan azas Taman Siswa 1922, sedangkan "dasar-dasar" yalah perumusan kembali segala pengalaman Taman Siswa sampai tahun 1947, yang dikenal sebagai Panca Dharma, hasil penelitian Panitia Mangunsarkoro, yaitu: Azas Kebangsaan, Azas Kebudayaan, Azas Kemerdekaan, Azas Kemanusiaan, Azas Kodrat Alam.

merdeka didalam batas-batas tujuan mencapai tertib-damainya hidup bersama. Didalam pasal 1 termasuk juga dasar kodrat alam, yang diterangkan perlunya, agar kemajuan sejati dapat diperoleh dalam perkembangan kodrati, yang terkenal sebagai "evolusi". Dasar ini mewujudkan *sistim-among*,[22] yang salahsatu seginya yalah mewajibkan guru-guru sebagai "pemimpin yang berdiri di belakang" tetapi mempengaruhi dengan memberi kesempatan kepada anakdidik untuk berjalan sendiri. Inilah yang disebut dengan semboyan *Tut Wuri Handayani*. Di samping itu sudah barang tentu guru diharapkan dapat membangkitkan pikiran murid, bila berada ditengah-tengah murid-murid dan memberi contoh bila didepan mereka.

Pasal ke-3 menyinggung kepentingan-kepentingan sosial, ekonomi dan politik. Kecenderungan bangsa kita untuk menyesuaikan diri dengan hidup dan penghidupan kebarat-baratan menimbulkan pelbagai kekacauan. Sistim pengajaran yang timbul dianggap terlampau mementingkan kecerdasan pikiran, yang melanggar dasar-dasar kodrati yang terdapat dalam kebudayaan sendiri, sehingga tidak menjamin keserasian dan dapat memberi kepuasan. Inilah yang disebut dasar budaya.

Pasal ke-4 mengandung dasar kerakyatan. "Tidak ada pengajaran, bagaimanapun tingginya, dapat berguna, apabila hanya diberikan kepada sebagian kecil orang dalam pergaulan hidup. Daerah pengajaran harus diperluas". Pasal ke-5 merupakan azas yang sangat penting bagi semua orang yang ingin mengejar kemerdekaan hidup yang sepenuhnya. Pokok dari azas ini yalah percaya kepada kekuatan sendiri. Pasal ke-6 berisi persyaratan dalam mengejar kemerdekaan diri dengan jalan keharusan untuk membelanjai sendiri segala usaha. Itulah yang disebut *Zelfbedruipings-systeem*. Pasal ke-7 mengharuskan adanya keikhlasan lahir-batin bagi guru-guru untuk mendekati anakdidiknya.

Pernyataan Azas yang berisi tujuh pasal itu disebut oleh

---

22 S. Mangunsarkoro, "Leidende gedachten bij het z.g Among-systeem van de Taman Siswa-scholen", *Koloniale Studien*, XXVII, 1938, hal. 595 dst. Juga S. Mangunsarkoro, "Pokok-pokok Among-Sistim : Dasar tinjauan hidup", dalam *Pusara*, Madjalah Persatuan Taman Siswa, XIV (Desember) 1952, hal. 104.106, 109. *Among* merupakan tugas pokok seorang *(mbok Emban)* pengasuh dari anak keturunan ningrat, yang diuraikan dengan jelas dalam karangan Koentjaraningrat, *A Preliminary Description of the Javanese Kinship System*, New Haven, 1957.

Dr. Gunning sebagai "manifest yang penting."[23] Salahseorang pemimpin Taman Siswa, Sarmidi Mangunsarkoro, [24] menyebut pernyataan azas sebagai "lanjutan cita-cita Suwardi Surjaningrat dan kawan-kawannya yang tergabung dalam "Gerombolan Selasa Kliwon",[25] sebagai anak rohani gerakan politik kiri *Nationaal Indische Partij* (1919 – 1921) dan gerakan kebatinan yang menganjurkan kebebasan".

Sesungguhnyalah pernyataan azas itu merupakan perpaduan pengalaman dan pengetahuan Suwardi Surjaningrat tentang aliran pendidikan Barat dan aliran kebatinan yang mengusahakan "kebahagiaan diri, bangsa dan kemanusiaan".

Reaksi masyarakat Indonesia atas Pernyataan Azas itu berbeda-beda. Ada yang menyambut dengan persetujuan, ada yang mengatakan bahwa Pernyataan Azas itu berarti memutar jarum jam ke belakang dan ada yang menuduh Suwardi Surjaningrat akan mendirikan sekolah komunis.

Selama delapan tahun sejak berdirinya, maka Ki Hadjar Dewantara dan pembantu-pembantunya bekerja secara diam-diam, dalam arti tidak melayani kritik-kritik dari masyarakat kita sendiri maupun dari fihak Belanda, yang bernada meremehkan usaha pendidikan itu. Namun secara teratur gagasan dan usaha

---

23 C.P. Gunning, *Naar Grooter Nederland*, Den Haag, 1926, h. 81. Bab VII: bukunya menguraikan "Pendidikan Nasional", uraiannya baik, namun tak dapat menutupi rasa lebih tinggi orang Belanda terhadap usaha pendidikan Indonesia, berbeda dengan pejabat-pejabat Hindia Belanda dalam surat dan nota mereka. Lihat S.L. van der Wal, *Het Onderwijsbeleid....., passin;* juga Abdurrachman Surjomihardjo, *Taman Siswa di dalam Arsip-arsip Hindia Belanda*, prasaran pada Seminar Sejarah Nasional kedua di Yogyakarta 1970, dimuat dalam *Budaja Djaja*, Desember 1970, hal. 727 – 743.

24 S. Mangunsarkoro, "Lahirnya Perguruan Nasional Taman Siswa", dalam *Pusara* XIV (Maret) 1952, hal. 2 – 6.

25 "Gerombolan" itu terdiri dari Ki Hadjar Dewantara, R.M. Sutatmo Surjokusumo, (anggauta PB Boedi Oetomo dan Volksraad) R.M.H. Soorjo Poetro (bekas mahasiswa sekolah tinggi tehnik di Delft) dan Ki Pronowidigdo (Boedi Oetomo), yang dibawah pimpinan Pangeran Surjomataram mempelajari soal-soal kebatinan. Setelah Taman Siswa berdiri, maka mereka membubarkan diri, karena berpendapat dengan lahirnya Taman Siswa itu terwujudlah sudah cita-cita mereka. Lihat Sajoga, "Riwajat Perdjuangan Taman Siswa", dalam *Buku Peringatan Taman Siswa 30 tahun*. Jogjakarta, 1952, hal. 193 – 194. Inti pembicaraan "gerombolan" itu pada setiap malam Selasa Kliwon itu berkisar pada usaha "membahagiakan diri, membahagiakan bangsa dan umat manusia", demikianlah Ki Hadjar Dewantara dalam bukunya *Demokrasi dan Leiderschap*, Jogjakarta, 1959, h. 6. Buku ini merupakan tanggapan kulturil atas gagasan Demokrasi Terpimpin dari Presiden Sukarno.

pendidikan yang hidup itu dijelaskan melalui majalah pendidikan umum yang diterbitkan, yaitu *Wasita*.[26]

Banyak sekolah yang telah berdiri terlebih dulu kemudian menyerahkan sekolahnya kepada Taman Siswa, seperti sekolah Budi Utomo di Jatibaru, Jakarta[27] dan Sekolah Rakyat di Bandung.[28] Menjelang kongresnya yang pertama, maka penerbitan resmi pemerintah Hindia Belanda mencatat pada tahun 1930,[29] bahwa di Jawa terdapat pusat-pusat kegiatan pemeliharaan kesejahteraan penduduk yang diusahakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Disebutnya ada tiga pusat kegiatan, yaitu yang diusahakan oleh Muhammadiyah, *Indonesische Studieclub* Surabaya dan Taman Siswa.

Mengenai Taman Siswa penerbitan pemerintah Belanda itu menguraikan sebagai berikut:

"Semula didirikan pada tahun 1922 di Yogyakarta, sekarang ini perguruan Taman Siswa meliputi 40 cabang, 3 diantaranya di Sumatra Timur dan 4 di Keresidenan Kalimantan Selatan dan Timur, dengan jumlah murid 5.140 orang. Ibu Pwiyatan di Yogyakarta terdiri dari sebuah MULO dengan 238, sekolah rendah dengan 362 murid dan *Schakelschool* dengan 97 murid. Sejak tahun 1925, pada waktu sekolah rendah untuk pertama kali meluluskan muridnya, rata-rata 70% dari mereka telah lulus ujian pegawai negeri rendah dan ujian masuk MULO atau sekolah tehnik. Banyak diantaranya yang melanjutkan pelajaran ke MULO atau ke *Kweekschool,* yang didirikan pada tahun 1924.

Dari lulusan MULO pada tahun 1928, lima diantara 9, dan pada tahun 1929, enam diantara 14 telah lulus ujian masuk AMS atau berarti rata-rata 45%. Sedangkan 24 lulusan Taman Guru (= MULO +1 tahun teori + 1 tahun pendidikan praktek) sekarang semuanya bekerja sebagai guru pada Taman Siswa atau lembaga pendidikan partikelir lainnya. Pada tahun 1929 yang mencatatkan diri sebagai murid MULO begitu besar, sehingga banyak yang

---

26 Jilid I, No. 1 terbit bulan Oktober 1928 dalam dua bahasa, Indonesia dan Jawa. Mulai Agustus 1931 sesudah Kongres Taman Siswa yang pertama, bernama *Wanita dan Poesara Taman Siswa.* Kemudian menjadi *Pusara* hingga sekarang.

27 Lihat *Buku Peringatan Taman Siswa Djakarta 5 Tahoen 1929 – 14 Djoeli 1934.*

28 Sajoga, *op. cit.*, hal. 194.

29 *Mededeelingen.....*(130).

ditolak. Tentang Taman Siswa di Yogyakarta para ahli telah memberikan penilaiannya yang baik.

Sukses-sukses juga telah dialami oleh sekolah-sekolah di Surabaia, Jakarta, Tegal dan Malang. Di kota tersebut pertama itu terdapat sekolah Taman Siswa di Kranggan, dan di Tumenggungan yaitu Taman Indriya dengan 7 guru dan 420 murid, sekolah rendah di Pacarkeling dengan 1 guru dan 32 murid. Tetapi disini sistim Yogya tak dapat dilaksanakan; anak-anak tidak tinggal menetap di sekolah; orang mulai mengajar dalam bahasa Belanda, pengajaran musik dan nyanyian harus berbeda dengan apa yang dapat terlaksana di pusat budaya Jawa itu. Banyak yang mementingkan Taman Indriya sebagai usaha regeneserasi anak-anak kota. Hasil-hasil pengajaran adalah baik. Dari tahun kursus yang lalu telah lulus 9 murid untuk ujian pegawai negeri rendah, 4 untuk MULO, 10 untuk *Burgeravondschool.* Dari tahun kursus sekarang telah lulus 12 untuk ujian pegawai rendah.

Di Batavia terdapat Taman Anak-anak dengan 60 murid di Kemayoran dan sekolah rendah (semacam HIS) dengan 200 murid di Jatibaru. Mulai tanggal 1 Juli sekolah rendah yang kedua didirikan di Kebon Jeruk. Sebuah asrama didirikan di Jatibaru.

Sekolah di Tegal mampu menyiapkan beberapa murid untuk ujian masuk HBS, sedang sekolah di Malang, yang telah menghasilkan calon-calon untuk MULO pemerintah, pada tahun 1929 makin berkembang dengan mendirikan sekolah pertenunan. Lebih daripada itu ada sebuah *Schakelschool,* dan pada tahun 1930 dilaksanakan sistim pondok disini.

Mr. A. Jonkman, yang telah mengunjungi sekolah menengah Taman Siswa di Bandung, menulis bahwa pada waktu itu (1927) "sekolah dipimpin oleh Sosrokartono, kakak R.A. Kartini dan sebagai guru-gurunya terdapat Ir. Sukarno dan Mr. Sunario. Sekolah itu kelihatan bercorak nasional Indonesia dalam arti, bahwa ia merupakan hasil kerja sendiri. Selanjutnya nampak sekolah itu mengikuti MULO pemerintah. Bahasa Belanda merupakan bahasa pengantar. Diduga Mr Sunario, yang memberi pelajaran ilmu tata-negara dan sejarah, akan menitik-beratkan kepada corak Indonesia. Direktur Sosrokartono lebih menyukai suatu AMS dengan bahasa-bahasa Timur klasik dan memikirkan sebagai kelanjutan sebuah Fakultas Sastra Timur". [30]

[30] van der Wal, *Het Onderwijsbeleid*....., hal. 425 noot 1.

Kedudukan sastra timur dalam program pendidikan memang tidak asing lagi di kalangan Taman Siswa, namun di dalam pemikiran dan pengetrapannya ternyata berbeda menurut lingkungannya. Demikianlah juga di kalangan Taman Siswa Jakarta, yang pada tahun 1933 mendirikan Taman Dewasa Raya sebagai lanjutan Taman Dewasa (SMP) dengan program yang disebut "literèr-ekonomis". Sarmidi Mangunsarkoro, waktu itu sebagai pemimpin perguruan, menjelaskan program itu dalam karangannya sebagai berikut:

"Mengapa literèr-ekonomis ? Sifat kesusasteraan (Sastra Timur) menyatakan cita-cita pembangunan kebudayaan sendiri. Program ekonomis itu timbul dari pandangan, bahwa kalau tidak ada pengetahuan ekonomi tidak dapat bangsa Indonesia bertahan dalam perputaran rumahtangga dunia yang besar itu..... Dengan sadar Taman Dewasa Raya bertujuan mendidik pekerja-pekerja untuk pergaulan hidup yang akan datang, berjiwakan cinta yang besar kepada bangsa dan tanahair". [31]

Dari gambaran mengenai keadaan beberapa cabang Taman Siswa tersebut diatas, nyatalah bahwa sekolah sebagai alat ideologi yang begitu populer masa itu, segi politik praktisnya dihindari oleh Taman Siswa dan program kegiatannya lebih menekankkan nasionalisme kebudayaan. Nasionalisme kebudayaan dalam Taman Siswa dijelaskan, "telah menjadi kepercayaan luhur, menjadi aliran jiwa (Ki Hajar Dewantara) dan yang bercorak religi". [32]

Pergerakan rakyat Indonesia sendiri tertarik kepada azas-azas itu, dan di dalam Kongres Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI) di Surabaia pada tahun 1928, Suwardi (yang pada waktu itu berganti nama Ki Hadjar Dewantara) diminta untuk memberikan prasaran. Prasarannya berjudul "Pengajaran dan Penghidupan Rakyat"; "Pengajaran dan Kebangsaan" diterima oleh Kongres. Ki Hadjar Dewantara sendiri kemudian duduk dalam komisi pengajaran PPPKI. Dengan ini maka sekolah-sekolah partikelir mendapat landasan bertolak untuk meneruskan usaha meninggikan derajat rakyat melalui pengajaran sendiri.

Sejak itu timbul rumusan Ki Hadjar Dewantara tentang

---

31 S. Mangunsarkoro, "Het Nationalisme in de Taman Siswa Beweging", *Koloniale Studien*, No. 2, 1973.

32 *Ibid.*

hubungan gerakan politik dan sekolah-sekolah bangsa sendiri, "Taman Siswa dan segala lapangan usaha sosial lainnya merupakan ladang atau sawah, dimana orang memupuk apa yang perlu bagi keperluan hidupnya. Gerakan politik merupakan pagar, yang melindungi ladang dari gangguan binatang-binatang buas yang akan memakan dan menginjak-injak tunas-tunas tanaman".
Pelaksanaan pernyataan azas itu di dalam praktek pengajaran ditujukan untuk dapat mencapai tujuan pendidikan Taman Siswa, yaitu terwujudnya masyarakat tata-tenterem atau tertib-damai. Metode pendidikan yang ditempuh adalah sebagai berikut:

Pada tahun-tahun permulaan anak didik sebanyak mungkin dibiasakan dengan suasana rumah serta lingkungannya sendiri. Dasar-dasar bahasa dan alam pikiran sendiri ditanam sekuat-kuatnya, melalui nyanyian dan permainan anak-anak, sebelum anak-didik mendapat pengajaran dalam bahasa asing.

Pendidikan diberikan untuk menyiapkan rasa kebebasan dan tanggung-jawab, agar anak-anak berkembang merdeka dan menjadi orang yang serasi, terikat erat dengan milik budaya sendiri dan dengan demikian terhindar dari pengaruh yang tidak baik dan tekanan hubungan kolonial, seperti umpamanya rasa rendah-diri, ketakutan, kebencian, keseganan dan tiruan yang membuta. Lain daripada itu anak-anak dididik untuk menjadi putra tanah-air yang setia dan bersemangat, dan dengan patriotisme Indonesia memiliki rasa pengabdian tinggi bagi nusa dan bangsa.

Untuk mengetrapkan dasar-dasar itu, maka pada pertamanya perlu dikembangkan sistim-pondok Indonesia. Murid-murid lelaki dan perempuan tinggal bersama guru-guru pria dan wanita dalam satu asrama. Tiap bagian perguruan harus diketuai oleh guru yang telah berkeluarga, yang bertugas untuk tetap memelihara suasana kekeluargaan. Pusat dari perguruan, yang merupakan masyarakat kecil itu, yalah guru (dan pada awal perkembangan perguruan Taman Siswa yalah Ki Hajar Dewantara sendiri), kepada siapa setiap guru atau murid dapat mengemukakan kesulitan-kesulitan yang dihadapinya.

Murid-murid yang lebih tua, di samping kebebasannya yang luas dalam menggunakan waktu bebas, diberi tanggungjawab untuk melaksanakan tugas dalam bagian masing-masing. Sistim itu membawa serta ko-edukasi, yang diharapkan memberi penga-

ruh baik kepada anak laki-laki dengan hadirnya anak-anak perempuan di dalam kelas dan lingkungannya.

Untuk anak-anak, maka pengajaran dengan ko-edukasi dilaksanakan dengan sempurna, sedangkan untuk orang dewasa diadakan pembatasan dan pengawasan dengan penuh kebijaksanaan. Kepada gadis-gadis diterangkan, bahwa tugas mereka di masa depan sebagai calon ibu akan berbeda dengan laki-laki, dan oleh karena itu mereka harus mengembangkan bakat-bakat sendiri secara serasi.

Sangat penting ialah masa tiga tahun pertama bagi kanak-kanak, yaitu Taman Indriya, dimana bahasa asing tidak mendapat tempat dan pengajaran diberikan dalam bahasa sendiri. [33] Di Taman Indriya pengajaran terdiri dari banyak sekali permainan dan nyanyian nasional. Di kelas-kelas terendah ini pelajaran diberikan oleh guru-guru wanita, agar anak-anak merasa dekat dengan kehidupan rumah sendiri. Mereka duduk diatas tikar dan bangku-bangku yang rendah, dan pelajaran diberikan seperti dalam suasana bermain.

Di kelas-kelas yang tinggi bahasa Indonesia diberikan dengan cukup luas dengan tidak melupakan seni dan sastra sendiri (waktu itu dalam bahasa Jawa). Sejarah diberikan dengan cara sendiri, meskipun kerangka urutan tahun dan peristiwa tidak banyak berbeda dengan sekolah pemerintah, tetapi keterangan dan tafsir diberikan "dari dalam". Kisah sejarah, sastra dan cerita-cerita wayang diberikan dengan tujuan tidak semata-mata sebagai pengetahuan, tetapi untuk memahami gagasan dan cita-cita kemasyarakatan. Tidak pula sebagai pedoman buta, tetapi sebagai gambaran bagi orang-orang yang terdidik mengenai kehidupan masalampau yang perlu disesuaikan dengan kehidupan sekarang.

Agama diajarkan sebagai milik manusia yang paling berharga. Tiap-tiap murid diperbolehkan menganut agama orang-tuanya, sebaliknya penghinaan terhadap agama lain dilarang.

Mengenai cita-cita menggunakan dasar-dasar budaya sendiri, itu tidak berarti menghilangkan nilai budaya bangsa lain. Diusahakan dalam pengajaran agar murid-murid mengetahui adanya saling-pengaruh dalam hal kerohanian di seluruh dunia dan menyadarkan mereka untuk mengambil unsur-unsur budaya asing yang baik menjadi miliknya sendiri.

---

[33] Hendaknya diinsyafi, pendirian ini dilaksanakan dalam suasana kolonial dimana bahasa Belanda dianggap sebagai bahasa pendidikan satu-satunya yang sempurna.

Kerja-tangan diagungkan dan merupakan bagian utama dalam pendidikan. "Seorang tukang yang baik jauh lebih berharga dari pada seorang penulis yang jelek". Semboyan ini dikaitkan dengan usaha pendidikan kemerdekaan dan kepribadian "Siapa yang telah menghasilkan karya dengan tangan, lebih tinggi nilainya dari seseorang yang telah menjiplak pikiran orang lain."

Kesemuanya itu disempurnakan dengan pendidikan jasmani agar tercapai pendidikan yang serasi.

Azas memberikan keleluasaan kepada anak-didik dijalankan dengan konsekwen dan sistim pondok dianggap dapat memberikan tempat bagi pelaksanaan azas itu. Anak-anak menghormati guru tidak karena takut atau karena hukuman, sedangkan guru-guru diberi keleluasan dan tanggungjawab.

Seluruh pengajaran itu dilaksanakan tanpa bantuan dari pemerintah. Taman Siswa membuktikan dapat membiayai sendiri segenap usahanya dan dengan itu ditanamkan rasa percaya kepada diri sendiri dan rasa kemerdekaan. Sebagai akibatnya, maka hidup sederhana merupakan keharusan dan dengan demikian generasi yang akan datang dapat mengetahui, bahwa "kebutuhan kebendaan dapat diabaikan dan disadarkan keunggulan rohani" atau kalau menurut kata-kata Tjokrodirdjo, salah seorang pimpinan Taman Siswa: "Hanya ada satu nilai, yaitu nilai kerohanian".

Didalam perkembangannya, maka praktek azas-azas itu ternyata bukan hanya merupakan dasar bagi pendidikan dan pengajaran, tetapi sejak tahun 1930, ternyata bahwa azas-azas itu merupakan konsepsi sebuah aliran budaya. Sebanyak kepustakaan yang menyinggung soal-soal budaya Indonesia pasti menempatkan nilainya terhadap Muhammadiyah, sebagai pembawa aliran reformis-modernis Islam, dan Taman Siswa, sebagai pembawa aliran budaya Nasional. Karena kedudukan keduanya setingkat dan sejajar dalam pergerakan Indonesia, maka pada jaman penjajahan antara keduanya tidak terjadi pertentangan pendapat didalam usaha pengajaran bagi rakyat Indonesia. Sebaliknya antara Taman Siswa dan Pudjangga Baru terjadi diskusi tajam. Armijn Pane, bekas guru Taman Siswa Jakarta dan tokoh penting Pudjangga Baru menulis dalam tahun 1940 sebagai berikut: "Berlainan dengan cita-cita kebudayaan Taman Siswa, yang bersemboyan kembali dari kebudayaan Barat ke kebudaya-

an nasional, Pudjangga Baru menganjurkan menuju ke Barat". *Aanvaardingsbeginsel* dari Taman Siswa yang menurut Sujitno Mangunkusumo disebut"sikap hidup nerimo" yang dipermodern, ditentang oleh Pudjangga Baru dengan jiwa dinamis, kemampuan kreatif dan inisiatif.

Taman Siswa hendak memperbaiki bangunan budaya yang sudah retak dengan mengganti genteng bocor, menambal dinding yang pecah dan memperbaharui salahsatu tiang pendopo, tetapi bentuk bangunan tetap itu-itu juga. Sebaliknya Pudjangga Baru akan bertindak: hancurkan bangunan itu seluruhnya kalau perlu, bangunkan yang baru menurut gaya-pengertian baru, sehingga cahaya dan udara dapat memasuki gedung itu. Taman Siswa berpijak dengan kedua kakinya pada masalampau, sebaliknya Pudjangga Baru berpijak pada masasekarang dengan memandang ke masadepan. [34]

Ketajaman kritik yang sedemikian pada waktu itu, sekarang telah kehilangan ketajamannya. Meskipun kadang-kadang masih dikemukakan teori tentang pembinaan budaya Indonesia Baru, beberapa orang menganggap cita-cita Pudjangga Baru kurang penting lagi.[35]

Salah seorang pemimpin Taman Siswa, Ki S. Mangunsarkoro, menjawab terhadap uraian Pudjangga Baru itu sebagai berikut: "Sebagai anak rohani gerakan politik kiri (Nationaal Indische Partij) dan gerakan kebatinan yang menganjurkan kebebasan, Taman Siswa merupakan masyarakat perjuangan ideologi yang mewujudkan hidup keluarga berdasar samarata-samarasa, mirip masyarakat komunis, tetapi tidak mendasarkan susunan masyarakatnya yang kecil itu pada adjaran Marx, melainkan pada paham kekeluargaan dan gotongroyong yang masih selalu hidup di dalam kalangan bangsa kita. Taman Siswa mengemukakan paham kebudayaan yang positip dan paling terkemuka dikalangan bangsa kita. Ia tetap memelihara kebudajaan lama, tetapi anasir-anasir yang tidak sesuai lagi dengan jaman dibuangnya dan di samping itu mengambil (menerima) anasir-anasir baru dari mana juga

---

34 Armijn Pane, "De Poedjangga Baroe", dalam majalah *De Fakkel*, (Juli – Aug.) 1941.

35 Bandingkan umpamanya dengan pendapat H.B. Jassin dalam *Kesusasteraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Essay*. Cetakan kedua, Djakarta, 1955, terutama hal. 189– 212. Lihat juga Heather Sutherland, "Pudjangga Baru: Aspect of Indonesian Intellectual Life in the 1930's", *Indonesia* terbitan Cornell University, VI (October 1968, hal. 106 – 127.

asalnja. Yang menjadi ukuran hanya baik dan tidaknya untuk hidup kemasyarakatan kita sekarang. Tetapi walaupun begitu Taman Siswa jang tetap berpegangan pada filsafat hidup nasional itu ternyata sudah berjiwa universal . [36]

Pendapat seperti telah dikemukakan S. Mangunsarkoro, yaitu bahwa "Taman Siswa mengemukakan paham kebudayaan yang positif" dan "tetap berpegang filsafat hidup nasional yang berjiwa universal" dinyatakan juga oleh W.F. Wertheim dalam analisanya *"Cultural dynamics in Indonesia"* (Dinamik budaya di Indonesia) sebagai berikut: "Hampir semua novel (dari Pudjangga Baru) mengandung tujuan orang modern. Konsepsi Eropa mengenai kebebasan dalam perkawinan, individualisme dan nilai kemanusiaan dipertentangkan sebagai cita-cita terhadap konservatisme yang masih berakar di dalam masyarakat Indonesia.

Tetapi sebaliknya justru kekaguman yang seringkali tanpa kritik terhadap jiwa Barat, dan tendens kemasyarakatan yang berlebihan merupakan kelemahan dari para kebanyakan hasil sastra Indonesia modern. Bahasa dipergunakan sebagai alat daya expresi yang kuat. Tetapi selama penulis-penulis Indonesia tidak dijiwai oleh panggilan hidup dan hanya meniru pola (cara gaya hidup) Barat, maka tidak terdapat anasir-anasir yang paling esensiil bagi kebangunan budaya. [37]

Sedang tentang "jiwa universal" yang ada pada Taman Siswa dibuktikan oleh tulisan seorang sejarawan, yang didalam kata-pengantar bukunya berkata sebagai berikut:

".....Nusantara, pertama kali dipakai oleh Ki Hajar Dewantara, pendiri gerakan Taman Siswa di Jawa. Meskipun hal itu tidak mendapat pengakuan luas – dan barangkali tidak akan terjadi – (istilah ini) telah dipilih untuk titel buku sejarah Hindia Belanda ini sebagai sumbangsih kepada laki-laki dan wanita-wanita Indonesia, yang seperti Dewantara mengerti, bahwa perkembangan sehat budaya nasional harus berdasar penghargaan terhadap pertukaran cita-cita dengan budaya-budaya lain, dan yang bertujuan untuk membuat Indonesia sebagai tempat, dimana akhirnya Barat dan Timur dapat bertemu, tanpa memperdulikan ramalan Rudyard Kipling yang pesimistis itu". [38]

---

36 S. Mangunsarkoro, *Kebudajaan Rakjat*, Jogja, 1951 . hal. 11

37 W.F. Wertheim, *Indonesian Society in Transition*, The Hague/Bandung, 1956, hal. 294.

38 B.H.M. Vlekke, *Nusantara: A History of the East Indian Archipelago*, Massachusetts, 1944, Preface.

Berdirinya Republik Indonesia, UUD '45 dan Pembukaannya, yang berisi Pancasila, merupakan masa baru bagi pelaksanaan azas-azas 1922. Konsepsi politik dan budaya Republik Indonesia pada hakekatnya merupakan resultante dari segala aliran politik dan budaya diwaktu lampau. Baik dari mereka yang "mabuk sake budaya Timur" maupun "yang silau Barat" dihadapkan dengan konsepsi politik budaya baru. Dasar-dasar pendidikan Indonesia Merdeka harus sanggup mengadakan perubahan revolusioner, yang ditujukan kearah terwujudnya harmoni antara paham hidup kebatinan dan antara hidup lahir, harmoni antara budaya estetis-religius Indonesia dan budaya yang bersifat tehnis dan ekonomi Barat. Salahseorang pemimpin Taman Siswa mengatakan: "Tinjauan hidup yang menomorsatukan kebatinan yang luhur itu sekarang harus disertai realisasinya di dalam perbuatan dalam dunia kelahiran".

Kongres Taman Siswa pada tahun 1946 merumuskan kembali Pernyataan Azas 1922. Diketemukanlah Panca Darma sebagai Dasar-dasar Taman Siswa, yang berisi Kemerdekaan, Kodrat Alam, Kebudayaan, Kebangsaan dan Kemanusiaan.[39]

Ditempatkannya Kemerdekaan sebagai dasar pertama yalah karena bahaya penjajahan pada waktu itu masih mengancam. Sebetulnya, dan ini sesuai dengan tafsir Ki Hadjar Dewantara terhadap Pancasila, Kemanusiaan-lah dasar pertama Taman Siswa.

Tahun 1950 bolehlah dianggap akhir dari masalampau Taman Siswa, sebaliknya merupakan awal masadepannya. Persoalan yang perlu dihadapi yalah: bagaimana menyesuaikan azas-azas yang dicetuskan dalam jaman penjajahan itu dengan kondisi-kondisi baru.

Masalah "angkatan" pendukung yang silih berganti, dengan pandangan-pandangannya yang berbeda tentang pelaksanaan azas-azasnya merupakan unsur-unsur perubahan strukturil, bahkan mungkin juga filosofis, sesuai dengan jaman.

Apabila antara tahun 1922 – 1940 Taman Siswa hidup dalam jaman Kebangunan Nasional, maka antara tahun 1942 – 1950 Taman Siswa berada dalam jaman perang dan Revolusi. Sesudah tahun 1950, Taman Siswa hidup dalam jaman kemerdekaan penuh. Partai-partai politik yang dulu menjadi pagarnya,

---

[39] Lihat karangan S. Mangunsarkoro dalam catatan 24 bandingkan dengan catatan 21 tersebut di atas.

sesudah kemerdekaan tidak demikianlah. Pemilihan Umum yang pertama memecah gerak usaha, juga dibidang pendidikan.

Sebaliknya keinginan untuk segera membangun, memerlukan tenaga-tenaga didik yang bukan hanya matang dalam filsafat pendidikan tetapi juga ketrampilan tehnis harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Meninjau kegemilangan dengan sukses-sukses masalampau, tidak merupakan jalan keluar untuk terus maju dan menyempurnakan diri.

Suatu tugas telah dilaksanakan, suatu tugas yang besar, tetapi walaupun benih tanaman boleh dikatakan hampir abadi, tanah, zat-zat makanan dan iklimnya kini kelihatan telah berubah. [40]

3. *Sekolah-sekolah Sarekat Islam*

Pada akhir Pebruari 1921 Tan Malaka datang di Batavia [41] setelah ia bekerja sebagai guru di sekolah yang diadakan oleh Deli & Svembah Maatschappij (1920 – 1921). Cita-cita untuk mendirikan sekolah sendiri telah ada padanya, tetapi ia masih memerlukan kebebasan untuk dapat bekerja, mendapatkan murid sendiri, ruangan kelas dan alat-alat. Kecuali itu ia menganggap perlu mendapatkan lingkungan masyarakat yang akan membantu usahanya. Di Batavia ia membicarakan maksudnya itu dengan

---

40 W.le Febre, *Taman Siswa: Ialah kepertjajaan kepada kekuatan sendiri untuk tumbuh*, Djakarta, 1952. Buku itu merupakan uraian organis mengenai pemikiran, cita-cita, pengalaman dan kepribadian tiga pemimpin Taman Siswa, yaitu Ki Hadjar Dewantara, S.Mangunsarkoro dan Moh. Said.

41 Biografi lengkap mengenai tokoh ini dengan liku-liku perjuangannya masih harus disusun. Riwayathidupnya sampai tahun 1922 telah dijadikan skripsi doktoral pada Fakultas Ilmu-ilmu Sosial Universitas Amsterdam. Periksa Harry A. Poeze, *Tan Malaka: en Indonesisch Revolutionair: Levensloop ± 1896 – 1922*, Amsterdam 1972. (naskah) Riwayat hidup itu mencakup riwajat Tan Malaka dari mulai masa muda di Sumatra (sampai tahun 1913), masa sekolah di Kweekschool Haarlem (1914 – 1916), masa tinggal di Bussum selama perang Dunia I , sebagai guru di Deli, aktivitas politik di Jawa sampai dibuangnya ke Nederland pada tahun 1922 serta pencalonannya sebagai calon Partai Komunis Nederland dalam pemilihan anggauta DPR Belanda pada tahun 1922. Riwayatnya sesudah itu serta peranannya dalam pergolakan politik terurai dalam studi Ruth T.McVey, *The Rise of Indonesian Communism*, Ithaca–New York, 1965. *passim*. Perannya dalam masa Revolusi Indonesia, lihat George Mc Turnan Kahin, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Ithaca–New York, 1952; juga dalam B.R.O'G.Anderson, *Java in a time of Revolution: Occupation and Resistance 1944–1946*, Ithaca–New York, 1972. Penilaian Partai Murba tentang Tan Malaka terdapat dalam *Peringatan Sewindu Hilangnja Tan Malaka, Bapak Murba Republik Indonesia*, Djakarta, 1957.

bekas gurunya [42] di *Kweekschool voor Inlandsche Onderwijzers* (Sekolah guru untuk guru-guru bumiputra) di Fort de Kock, yaitu kota Bukittinggi sekarang ini. Bekas gurunya itu menyatakan persetujuannya dan memberikan dorongan.

Kemudian ia pergi ke Yogya dan bertemu dengan R. Sutopo,[43] redaktur kepala suratkabar *Boedi Oetomo*. Sutopo menghendaki agar Tan Malaka dapat memimpin suatu sekolah yang akan didirikan di kota itu. Selain bertemu dengan Sutopo ia juga berjumpa dengan para pemimpin SI yang sedang berkongres di kota itu, al. dengan H.O.S. Tjokroaminoto, Semaun, Darsono. Semaun juga menawarkan kepada Tan Malaka untuk memimpin sekolah yang akan didirikan di Semarang. Ia menerima tawaran Semaun itu dan menetap serumah dengan Semaun di Semarang.

Pada bulan Maret 1921, di dalam rapat anggota SI Semarang, Semaun telah mengajukan pokok pembicaraann agar didirikan sekolah bagi anak-anak anggauta SI. Pada tanggal 21 Juni 1921 direncanakan pembukaan sekolah itu, yang akan memakai ruangan sidang gedung SI Semarang sebagai ruang kelas. Pemimpin sekolahnya yalah Tan Malaka. [44] Murid pertamanya berjumlah 50 orang dan sekolah itu mendapat bantuan berupa buku-buku dari Nyonya Sneevliet. Residen Semarang menyebutkan dalam laporannya kepada Gubernur Jenderal, bahwa sekolah itu didirikan "atas dasar komunistis".

Kursus-kursus yang diadakan oleh SI Semarang dihalang-halangi oleh Residen Semarang, demikian juga usaha-usaha untuk mengadakan malam derma bagi sekolah itu. Berhubung dengan itu maka pimpinan sekolah menyebarkan murid-muridnya untuk mendapatkan bantuan dari masyarakat sekitarnya. Mereka masuk kampung keluar kampung dengan baju putih dan berselempang merah yang bertuliskan "Rasa Kemerdikaan". [45] Pada bulan Agustus telah tercatat 120 murid sekolah SI Semarang.

---

42 G.H. Horensma, sebagai guru ia bekerja di Bukittinggi sejak 1906. Ia yang memberi anjuran serta mengusahakan agar Tan Malaka dapat diterima di Kweekschool Haarlem, sebagai orang pertama Indonesia yang belajar di sekolah itu.

43 R. Sutopo Wonobojo pada awal Januari 1923 ia diangkat menjadi anggota Majelis Taman Siswa di Yogyakarta.

44 Surat Residen Semarang tertanggal 27 Oktober 1921 No. 425. Lihat S.L. van der Wal, *Het Onderwijsbeleid in Nederlandsch Indie 1900 – 1942*. Een Bronnenpublikatie. Groningen, 1963; hal. 365 catatan 9.

45 Reproduksi foto tiga orang murid yang berpakaian seperti itu terdapat pada halaman sampul brosur tersebut dalam catatan 6 di bawah.

Sukses yang telah dicapai Tan Malaka dengan sekolahnya dijelaskan dalam brosur, yang diterbitkan pada tahun 1921.[46] Pada kulit sampul brosur terpancang moto:

"Kekuasaan Kaum-Modal berdiri atas didikan jang berdasar kemodal-an.

Kemerdekaan Ra'jat hanjalah bisa diperoleh dengan didikan Kera'jat-an".

Ia menjelaskan, tidak saja ongkos yang lebih murah dan pelajaran yang lebih baik telah diterima oleh murid-murid SI, tetapi yang terutama yalah "karena iklim kejiwaan di sekolah SI lebih sehat dan lebih dekat pada watak dan sifat anak asal dari timur, yakni kalau kita bandingkan dengan jiwa di sekolah-sekolah partikelir ataupun HIS Gouvernement".[47]

Melalui sekolahnya itu ia ingin mencapai tiga tujuan:

Memberi bekal yang cukup, agar anak-anak didik dapat mencari penghidupannya dalam dunia kapitalis (dengan memberikan pelajaran berhitung, menulis, membaca, sejarah, ilmu bumi, bahasa Jawa, Melayu, Belanda dsb.);

Memberikan hak kepada murid-murid untuk bersuka-ria melalui kehidupan perkumpulan-perkumpulan.

Menunjukkan kewajibannya terhadap berjuta-juta Kaum Kromo.

Tujuan yang pertama itu perlu dilengkapi dengan membangunkan "hati merdika" serta pengembangan seni lukis kuna, yang terhalang karena "paberik gula dan kantor pos tidak suka memperhatikan bakat melukis anak-anak bumiputra". Jadwal pelajaran tidak diadakan. Murid-murid diperbolehkan mencari cara belajar sendiri serta mengikuti tempo belajar menurut kemampuannya. Bahasa Belanda tidak dipergunakan sebagai bahasa pengantar, karena dapat menjadi penghalang pengajaran. Namun bahasa itu perlu dipelajari dengan baik, "karena kaum kapitalis menggunakan bahasa itu".

Mengenai tujuan yang kedua dikatakannya, bahwa semangat pergaulan anak-anak di sekolah masa sekarang tidak sesuai dengan umur anak-anak itu. Pekerjaan murid-murid seperti mesin

---

46 Tan Malaka, *S.I Semarang dan Onderwijs*, Semarang 1921, Asli brosur itu tersimpan pada Perpustakaan Museum Pusat.

47 Tan Malaka, *ibid.*, halaman 3. Dalam buku ini ejaan lama oe diganti dengan u *Iklim kejiwaan* dalam kutipan adalah kata-kata penulis karangan ini. Dalam teks asli, Tan Malaka menggunakan perkataan "hawa geest".

di paberik gula, siang-malam tak berhenti kerja. Pada waktu bermain, anak-anak kurang mendapat kesempatan bergaul dan berkumpul, sehingga tak mendapat kesempatan mengatur hidup berkelompok. Untuk mengembangkan hidup berkelompok dengan aturan-aturan yang dibuat oleh anak-anak sendiri perlu didirikan "komite perpustakaan", "komite kebersihan", "komite sepakbola" dan sebagainya. Juga perlu diadakan rapat-rapat para murid, untuk memupuk keberanian berbicara dan rasa kemerdekaan.

Dalam mengorganisasi semua kegiatan itu, guru-guru tidak ikut serta, karena tujuannya tidak untuk mendidik anak-anak menjadi gramofon. Mereka harus sanggup berfikir merdeka dan mencari jalan sendiri. Di samping komite anak-anak tersebut, Tan Malaka menginginkan terbentuknya kelompok seni wayang dan nyanyian, demikian juga kesempatan bagi murid untuk mengendalikan suratkabar. [48]

Tujuan ketiga dikatakan mudah untuk ditulis, tetapi sukar dalam pelaksanaannya. Segala daya-upaya perlu ditempuh supaya anak-anak lulusan sekolah SI di kemudian hari tidak membelakangi rakyat. Didikan sekolah gubernemen mengandung kekurangan. Umpamanya tentang pelajaran kebersihan. Anak-anak diajar tentang kebersihan, tetapi tidak dijelaskan mengapa Kromo tidak tahu apa yang bersih serta bahaya yang timbul dari keadaan kotor. Kalau murid sudah besar, ia juga tidak tahu mengapa si Kromo tidak bersih dan kotor, malah menganggap kedua hal itu sudah merupakan sifat si Kromo.

Didikan semacam itu, yang tidak disertai kecintaan serta menanam kewajiban buat menaikkan derajat rakyat, menyebabkan didikan HIS terpisah dari rakyatnya. Sudah barang tentu bukan hanya dalam soal kebersihan saja yang memisahkan murid-murid HIS dengan rakyat, bahkan bahan bacaan serta apa yang didengar mereka tentang ilmu dan adat-istiadat.

Pemisahan kerja-tangan dan kerja-otak di HIS juga merenggangkan murid dengan rakyat. Sejak dulu dan sekarang juga, anak-anak di desa turut mencangkul dan bertukang yang dilakukan dengan senang hati. Tetapi sekarang kerja mencangkul dan

---

[48] Maksud untuk menerbitkan suratkabar atau majalah murid nampaknya merupakan rencana sekolah-sekolah nasional. Hingga kini suratkabar/majalah sekolah SI tak kami kenal. Tetapi Taman Siswa, Ksatrian Instituut, dan sekolah INS Kayutanam memiliki majalah murid.

bertukang itu hanya dilihat si murid waktu mereka sedang dalam perjalanan atau pada gambar-gambar di sekolah. Tidak menherankan pemuda-pemuda yang bernama terpelajar itu berpikiran kerjatangan itu rendah sekali.

Perkumpulan anak-anak merupakan suatu sekolah tersendiri, yang besar artinya untuk mendidik rasa dan pikiran merdeka, mendidik untuk memikirkan dan menjalankan pertarungan dalam pergaulan hidup; mendidik untuk lancar dan berani berbicara, yang pada jaman penjajahan lebih besar harganya daripada pengetahuan tentang berapa banyak sungai-sungai di pulau Borneo (Kalimantan) umpamanya.

Ringkasan Tan Malaka sendiri tentang apa yang ingin dicapainya melalui sekolah SI adalah sebagai berikut:

"Di sekolah, anak-anak SI mendirikan dan mengurus sendiri pelbagai perkumpulan, yang berguna buat lahir dan batin. Dalam mengurus perkumpulan tadi anak-anak itu sudah belajar membuat kerukunan dan mengerti serta merasakan baiknya pergaulan hidup bersama.

Di sekolah diceriterakan nasibnya kaum melarat di tanah-air dan dunia lain serta dijelaskan sebab-sebab kemerdekaan itu. Lain dari pada itu dibangunkan rasa belas kasihan pada kaum terhina serta ditunjukkan kepada kewajiban, bahwa kelak bila telah dewasa, ia akan membela berjuta-juta kaum proletar.

Dalam rapat-rapat SI dan buruh, maka murid-murid yang sudah cukup matang, diajak menyaksikan sendiri suaranya kaum Kromo dan diajak mengeluarkan pikiran atau perasaan, yang sesuai dengan umur mereka.

Kelak setelah dewasa, maka hubungan pelajaran sekolah SI dengan ikhtiar membela Rakjat tidak merupakan isi buku dan kenang-kenangan belaka, tetapi sudah menjadi watak dan kebiasaannya masing-masing".

Dengan demikian, maka sekolah SI tidak melaksanakan suatu sekolah semata-mata, tetapi menginginkan suatu "haluan pendidikan", yang sesuai dengan haluan SI Semarang. Maksudnya yalah mencari suatu bentuk pendidikan yang bisa mendatangkan faedah bagi Rakyat, sedapat-dapatnya di seluruh Indonesia. Dalam hubungan ini pendidikan calon-calon guru sekolah SI mendapat perhatian khusus dari pengurus sekolah.

Setelah ia dibuang ke Nederland,[49] Tan Malaka menulis

[49] Harry A. Poeze, *op. cit.*, Bab V,d

satu seri karangan tentang sekolah-sekolah SI dan tindakan -tindakan pemerintah kolonial.[50] Sesuai dengan keadaannya sebagai orang buangan politik, maka karangannya itu lebih tajam perumusan serta penyajiannya dibandingkan dengan karangan *SI Semarang dan Onderwijs* yang terbit di Indonesia.

Di dalam karangannya itu diungkapkan tentang organisasi--organisasi sekolah SI, yang dikatakannya sekolah-sekolah itu tidak boleh berdiri sendiri-sendiri. Harus ada kesatuan dalam tujuan dan organisasi. Pertama-tama harus ada ikatan keuangan antara sekolah itu. Kebijaksanaan keuangan sekolah yang meliputi penerimaan uang sekolah, pembayaran gaji guru-guru, pemeliharaan inventaris sekolah, supaya ada pada wewenang panitia setempat. Di atas panitia setempat ada panitia pusat, yang mempunyai kas pusat, yang kekayaannya berasal dari sisa pemasukan keuangan panitia setempat. Panitia pusat memperbesar keuangan dengan menarik sumbangan dari pencinta-pencinta sekolah SI. Keuangan sekolah terlepas dari administrasi politik SI, sungguhpun semua anggota panitia terdiri dari anggota SI.

Lebih penting yalah adanya ikatan kejiwaan, yaitu adanya rasa saling bersatu. Untuk mencapai itu perlu diadakan kongres-kongres secara berkala untuk membahas kepentingan pengajaran bersama. Murid-murid terpandai dipindah untuk ditempatkan di sekolah lain, untuk belajar dari pengalaman. Kongres murid dan suratkabar murid perlu diadakan oleh para murid sendiri.

Ikatan politik perlu dibina, karena kenyataan bahwa sekolah-sekolah didirikan dan diusahakan oleh SI. Murid-muridnya berasal dari anak para anggauta SI, yang dididik dengan tujuan, bahwa mereka kelak akan berdampingan dengan rakyat dalam perjuangan ekonomi dan politik.

Pada waktu keberangkatan Tan Malaka ke Nederland sebagai buangan politik, di Indonesia telah ada 12 tempat (diantaranya satu di Ternate) dimana ada sekolah SI. Tiap tempat rata-rata menampung lebih kurang 250 orang murid, sehingga jumlah murid seluruhnya ada lebih kurang 3000 orang.

Rahasia kemajuan pesat sekolah SI antara lain disebabkan karena pemerintah sendiri belum mampu untuk mengadakan sekolah yang mencukupi untuk penduduk bumiputra. Tetapi

---

50 "De Sarekat Islam Schools als pistool op de borst der Koloniale Regeering", *Tribune*, 29 – 30 Mei 1922.

lebih dari itu yalah kenyataan, bahwa berdirinya sekolah-sekolah itu sejalan dengan perkembangan SI sebagai organisasi-massa serta kesadaran yang mulai tumbuh mengenai pentingnya pengajaran. Cara-cara yang dilakukan Tan Malaka untuk mendirikan sekolahnya pun menggunakan media penerbitan dan pers serta propaganda langsung ke kampung-kampung. Semua itu merupakan unsur-unsur baru dalam kehidupan di Indonesia.

Para pendirinya sendiri, setelah mendapatkan kepercayaan untuk melakukan usaha pengajaran menganggap kepercayaan rakyat sebagai suatu "hukum yang syah dan berkuasa.....Kepercayaan itu saja yang menumpu (mendorong) kita dari belakang untuk berjalan terus, dengan tiada menoleh kiri-kanan", demikian Tan Malaka. [51]

Setelah terjadinya perpecahan didalam S.I., maka pada bulan April 1924 sekolah-sekolah SI menjadi Sekolah Rakyat. Tindakan-tindakan pemerintah jajahan menyebabkan banyak Sekolah Rakyat ditutup atau diserahkan kepada badan lain. Sekolah Rakyat di Bandung umpamanya diserahkan kepada Ir. Sukarno, yang kemudian menyerahkan kepada Taman Siswa. [52]

4. *Ksatrian Instituut*

Pendiri dan pemimpin sekolah ini ialah E.F.E. Douwes Dekker, dikemudian hari lebih dikenal sebagai Dr. Danudirdjo Setyabuddhi, bekas pemimpin *Indische partij*. [53] Sekembalinya dari pembuangan di Nederland, maka ia berusaha bekerja sebagai guru pada sebuah sekolah rendah partikelir di Jalan Kebon Kelapa 17 Bandung, yang dipimpin oleh Ny. H.E. Mayer-Elenbaas. Maksudnya itu diberitahukan kepada Residen Priangan, yang dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal memberitahukan serta meminta pertimbangan kepada pemerintah kolonial itu. Antara lain disebutkan keberatan Residen, karena suami Ny. Mayer tercatat sebagai orang komunis.

Namun Gubernur Jenderal berpendapat "lebih baik kepada orang-orang yang sedang gelisah seperti Douwes Dekker diberi

---

51 Tan Malaka, *ibid.*

52 Sajoga, "Riwayat Perjuangan Taman Siswa 1922 – 1952", dalam *Taman Siswa 30 tahun"*, Jogjakarta 1952 : 194.

53 Tentang Douwes Dekker dan Indische Partij lihat Bab III buku ini.

kesempatan kerja tetap bagi penghidupannya dari pada ia, karena dihalangi kesempatannya, akan lebih condong untuk rakyat". Sejak September 1922 Douwes Dekker diperkenankan sebagai guru pada sekolah Ny. Mayer itu. Pada tahun 1923 dari bekas sekolah Ny. Mayer itu muncul "Institut Pengajaran Priangan dari Perkumpulan Pengajaran Rakyat di Bandung" dalam bahasa Belanda *Preanger Instituut van de Vereeniging Volksonderwijs*, dimana Douwes Dekker berkedudukan sebagai kepala MULO. [54]

Tujuan sekolah itu yalah untuk memberi kesempatan belajar yang lebih baik dan luas kepada anak-anak bumiputra. Rencana pelajaran sekolah itu disesuaikan dengan ELS, dan tidak dengan HIS. Douwes Dekker sendiri sebenarnya tidak setuju dengan rencana pelajaran kedua sekolah pemerintah itu, karena dianggap tidak berdiri diatas dasar nasional. Tetapi karena orangtua murid mendesak agar bahasa Belanda dipakai sebagai bahasa pengantar, serta pengakuan mereka bahwa di dalam keadaan kolonial waktu itu bahasa Belanda masih tetap penting dilihat dari sudut pertimbangan ekonomis, maka Douwes Dekker terpaksa menyetujuinya.

Menurut laporan Inspektur HIS sekolah itu tidak mengandung kecenderungan politik, namun pada tanggal 8 Pebruari sekolah itu ditutup untuk memperingati hari wafat Pangeran Diponegoro. Inisiatif peringatan Diponegoro itu datangnya dari Taman Siswa, namun bagi Douwes Dekker sendiri "Diponegoro dianggap sebagai tokoh nasional tingkat pertama yang patut dihormati" [55] Berdasarkan penelitian Mohammad Yamin hari wafat Diponegoro sebenarnya jatuh pada tanggal 8 Januari 1855. [56]

Dalam salahsatu suratnya kepada seorang kawan di Karawang, Douwes Dekker menulis: "Yang terpenting didalam sekolahku yalah adanya rasa harga diri manusia dan kepercayaan kepada diri sendiri diajarkan sebagai bagian pendidikan untuk

---

54 Surat Gubernur Jenderal tertanggal. 15 Januari 1923 no. 3 A x Geheim.

55 Mailrapport no. 665 x/23. Nama-nama guru lainnya yalah Nn. A. Washington, dan Ny. D.F. Baert–Gill.

56 Muhammad Yamin, *Sedjarah Peperangan Diponegoro: Pahlawan Kemerdekaan Indonesia*, Djakarta,1950. Cetakan kedua. Lihat juga kepustakaan dalam karangan Soekesi Soemoatmodjo, "Pangeran Diponegoro", dalam Sartono Kartadirdjo (ed.), *Sejarah perlawanan-perlawanan terhadap kolonialisme*, Jakarta, 1973, hal. 162.

membina watak. Batin sekolah itu kan berbeda dengan sekolah-sekolah penjajah".

Sejak Nopember 1924 sekolah itu disebut *Ksatrian School.*[57] "Instruksi Sekolah" itu memuat tujuan Pendidikan Ksatrian Instituut yang dirumuskan sebagai berikut :

"Dalam arti susila, maka pengajaran selalu bertalian dengan kegembiraan hidup dan diarahkan untuk memperkuat dan menciptakan rasa harga diri, pengembangan inisiatif dan kesadaran kemerdekaan, meninggikan peradaban sendiri, satu dan lain hal berdasarkan rasa cinta kepada lingkungannya, tanah air dan bangsanya sendiri dan kemudian kepada kemanusiaan.

Dalam arti kecerdasan otak, maka pengajaran terutama ditujukan untuk menambah pengetahuan tentang sumber-sumber-bantu bagi perkembangan tanahair sendiri dan tentang kemungkinan-kemungkinan membangun apa yang berguna dan terhormat dimasa mendatang.

Pelaksanaan pengajaran akan bebas dari pengaruh agama dan rencana ketata-negaraan partai politik". [58]

Dari kutipan tersebut diatas ternyata, bahwa titikberat usaha Ksatrian Instituut yalah pengajaran berdasarkan jiwa nasional dan pendidikan kearah manusia yang berpikiran merdeka. Sebagai kelengkapan bagi persiapan tugas murid-murid di masadepan, maka di sekolah rendah diajarkan bahasa Inggris mulai kelas 5. Gedung-gedung dibangun sesuai dengan tujuan kesehatan murid-murid, yang berada di bawah pengawasan dan perawatan dokter sendiri. Mereka mendapat sarapan pagi yang bergizi di sekolah, karena "tak akan ada jiwa yang sehat di dalam tubuh yang sakit". [59] Kecuali di Bandung, sekolah-sekolah rendah Ksatrian Instituut terdapat di Ciwidey dan Cianjur, serta terbuka bagi orang-orang Indonesia, keturunan Cina maupun Indo-Belanda.

Sebagai kelanjutan pendidikan sekolah rendah, maka murid-murid dipersiapkan untuk menjadi orang-orang yang memiliki kejuruan, yang tidak dimiliki oleh para lulusan MULO, AMS dan

---

57 Mailrapport no. 665 x/23.

58 Mailrapport no. 275 x/25. Lihat juga P.F. Dahler, ***Het Ksatrian Instituut, zijn leider én zijn scholen.*** 3e druk, Bandung, 1936. Dalam keterangan itu disebutkan, bahwa sekolah dimulai dengan 60 orang murid pada tahun 1912 *(Sic)*. Lihat juga brosur dalam bahasa Sunda yang terbit di Cianjur – Sukabumi pada tahun 1935 dengan dokumentasi foto yang sangat baik.

59 P.F. Dahler, *op.cit.*,, hal. 9 – 10.

HBS. Untuk keperluan itu didirikan MMHS atau *Moderne Middelbare Handelsschool*, yaitu sekolah menengah dagang modern. Orientasi pendidikan sekolah itu yalah pengalaman Amerika Serikat dalam membangun sekolah kejuruan yang baik dengan daya mampu effisiensi.

Dengan memakai semboyan "Mengabdi Masa Depan Rakyat" maka: MMHS memberikan psikologi perdagangan, yaitu untuk mengenal langganan dan pembeli. Rahasia penjualan, jiwa daripada reklame, dan ketrampilan untuk membuat keuntungan merupakan pengetahuan yang dapat membawa bangsa kita kearah kemajuan. Anak-anak kita akan lebih baik dan kaya dalam penghidupannya, berbeda dengan keadaan sekarang.

Mereka juga diperlengkapi dengan alat perdagangan, yaitu bahasa-bahasa yang penting, umpamanya bahasa Cina dan Jepang. Tamatan MMHS, di kemudian hari diharapkan dapat mengunjungi negara Cina dan Jepang, tidak saja untuk dapat meneruskan pelajaran di perguruan tinggi di sana, tetapi juga untuk dapat mengadakan hubungan dagang. Demikian juga bahasa Inggris sebagai bahasa dunia perlu dimiliki dengan baik oleh para murid MMHS.

Di samping itu diberikan juga pelajaran teknik perdagangan, yang meliputi pengetahuan tata-buku, pengetahuan dagang, ilmu perusahaan dan ilmu biaya. Reklame perdagangan merupakan ketrampilan untuk mengeruk keuntungan, yang perlu dihayati oleh murid-murid dalam hidupnya. Tinggallah untuk memberi arah dan bentuk agar ketrampilan berdagang itu merupakan jaminan penghidupan cukup.

Kesemuanya itu diperlengkap dengan pengetahuan umum yang bertalian dengan manusia dan masyarakat, yaitu sejarah budaya dan pertumbuhan peradaban. Kemahiran untuk merumuskan pendapat dan cara-cara penyampaiannya di muka umum pun dijadikan latihan ketrampilan murid juga".

Dengan rencana pelajaran itu, maka Ksatrian Instituut bermaksud menghindari persamaan dengan sekolah-sekolah pemerintah. Lulusan MMHS diharapkan untuk "menjadi pekerja-pekerja yang sanggup berdiri-sendiri, mula-mula sebagai pemimpin-pemimpin kecil, tetapi kemudian menjadi pemimpin-pemimpin perusahaan yang lebih besar...". Mereka harus membangun bagi masadepan tanahairnya dan menjadi tulang-punggung masyarakat, karena kedudukannya sebagai golongan menengah.

Untuk mencapai itu, maka MMHS di bagi dua, yaitu bagian bawah dan bagian atas, masing-masing selama 3 tahun dan 2 tahun. Setelah 3 tahun mereka yang ingin langsung bekerja di dalam masyarakat dapat segera dilepaskan. Yang ingin meneruskan pelajaran lebih tinggi dengan spesialisasi dapat meneruskan dua tahun lagi. Mereka kemudian dapat melangsungkan pelajaran di sekolah tinggi di Tokio, Osaka, Hongkong atau Manila. Kecuali dekat dengan negeri sendiri, lingkungan di kota-kota itupun tidak begitu berbeda. Kesempatan untuk sekolah tinggi di Rotterdampun terbuka bagi lulusan MMHS.

Bagi murid-murid yang ingin segera ikut serta dalam pembangunan masadepan nasionalnya, terbuka juga jurusan jurnalistik. Negeri kita kaya akan suratkabar Indonesia yang baik, tetapi kekurangan jurnalis-jurnalis Indonesia yang baik. Sebagai jurnalis yang menggunakan bahasa sendiri, maka dengan menggondol kekayaan pengetahuan ekonomi dan budaya, maka lulusan ini akan mendapat kedudukan yang baik.

Menarik sekali yalah usaha-usaha untuk merencanakan dan menerbitkan sendiri buku-buku pelajarannya. Dalam pelaksanaannya, maka telah dapat diselesaikan sejarah pertumbuhan lalulintas manusia di dunia, sejak jaman dulu kala. [60] Buku-buku bahasa, dimana diperhatikan juga "mentalitas bangsa", telah selesai dikerjakan jilid pertamanya. [61] Tatabahasa Jepang telah dipergunakan dalam pelajaran. Buku itu dikerjakan oleh seorang Jepang dan seorang guru Indonesia. [62] Sejarah kuna Indonesia merupakan buku yang digemari para murid [63] demikian juga buku pelajaran sejarah dunia. [64] Buku pelajaran statistik sedang

---

60 E.F.E. Douwes Dekker, *Schema van de ontwikkeling van het menslijk verkeer op aarde*, tanpa tahun. Dijual dengan harga fl. 0.50.

61 Juga brosur *Het Menslijk Verkeer op Aarde: De Prehistorische Tijd*, yang merupakan uraian dari Schema....tersebut di atas, dijual dengan harga fl. 1.75.

62 H. Nagashami B.A. dan M. Sabirin, *Leerboek van de Japansche Taal*, 3 jilid

63 E.F.E. Douwes Dekker, *Vluchtig Overzicht van de Geschiedenis van Indonesia*, Deel I: *Oudheid en Antieke, II. Interval, III. Moderne.* Hanya jilid satu saja yang nampaknya sempat terbit dan pernah diterjemahkan oleh L. Hoetabarat dan L. Siahaan, terbit di Bandung (1942) dan di Medan (1949).

64 E.F.E. Douwes Dekker, *Wereld-Geschiedenis: Leerboek voor Middelbare Scholen in Indonesia;* I: *Oost Azie*, Bandung, tanpa tahun (1963) Buku ini tersimpan di Perpustakaan Museum Pusat di Jakarta, tetapi di dalam katalogus tertulis *Niet voor het publiek* (Tidak untuk umum) dan tersimpan sebagai Archief. Menurut rencananya akan ditulis buku sejarah dunia dalam 10 jilid, namun baru terbit 1 jilid telah disita oleh pemerintah. Lihat s.k. *Kebangoenan*, 28 Juli 1936, lembar pertama.

dirancang pula. Semua penerbitan Ksatriaan Instituut itu termuat sebagai iklan di dalam setiap penerbitan dan juga di majalah murid dan orang tua.

P.F. Dahler, dengan menyanjung pendiri dan pemimpin Ksatrian Instituut, menulis seri karangan dalam suratkabar *Bintang Timoer*, menegaskan: "Instituut itu bernama Ksatria, tempatnya para Ksatria, Ksatria kita. Seluruh Instituut bernafaskan kekuatan, semangat dan idealisme tak mengenal luntur dari Douwes Dekker". Selanjutnya ia mengutip uraian Douwes Dekker: "Bila kelak sekolah-sekolah liar telah merebut masadepan pengajaran, seperti yang telah direbutnya sekarang maka pemerintah akan meminta syarat-syarat lebih tinggi bagi guru-guru. Pemerintah akan bertindak untuk kepentingan pengajaran, yang juga merupakan kepentingan kita. Kita akan menyambut bila hal itu terjadi. Tetapi sekarang belum terjadi, waktunya belum tiba untuk itu. Tetapi kelak akan terjadi juga. Kita harus melihat kedepan. Persiapan yang telah dilakukan harus mampu menyiapkan guru-guru lulusan sekolah kita sebagai guru yang telah mendapat pendidikan baik serta berwewenang. Dalam jumlah besar, mereka harus siap memegang kewajiban memenuhi kebutuhan pengajaran. Apa yang telah kita berikan, harus dilipatkan sepuluh kali kepada rakyat".

Itulah maksud pendidikan sekolah guru, yang akan mulai dibuka pada tanggal 1 Agustus 1935. Dengan sekolah guru itu ingin dapat dicapai:

1. pengajar-pengajar yang baik dan spesialisasi;
2. terbentuknya dengan segera bala-tentara guru-guru;
3. pendidikan yang murah, yang berarti keuntungan bagi negeri, gaji rendah, tempo yang lebih cepat untuk perluasan sekolah rakyat, dan dengan demikian membuat basis yang lebih luas bagi perkembangan bangsa.

Dengan semboyan "Untuk tiap-tiap desa sekolahnya sendiri", maka dimulailah jurusan pendidikan guru, yang merupakan bagian bawah MMHS. Pendidikan guru meliputi pengetahuan umum yang luas, ditambah dengan pengetahuan dagang, perhubungan dengan masyarakat. Dengan demikian guru-guru lulusan Ksatrian Instituut hanya dipersiapkan bagi sekolah-sekolah partikelir Indonesia. Untuk mereka jabatan bukan tujuan utama, yang menjadi tujuan yalah sekolah itu sendiri. Mereka harus sanggup masuk pelosok dan mendirikan sekolah di desa-desa.

Bagaimana caranya membangun sekolah tanpa modal, kelak akan diajarkan. [65] Mereka juga harus berlaku sebagai seorang pedagang, yang dapat memegang tata-buku, mengatur administrasi dan menggali sumber-sumber keuntungan bagi sekolahnya dan dirinya sendiri. Sekedar untuk perbandingan, maka para peminat sekolah guru dianjurkan untuk memperhatikan perkembangan di Cina dan Jepang. Disitu dorongan untuk lebih maju dibuktikan dengan mengadakan pembaharuan-pembaharuan. Dalam permulaan pembaharuan dijalankan di desa, dimana "dalam beberapa tahun saja tidak ada lagi sebuah desa di Cina yang tidak mempunyai sekolahnya sendiri". Pembaharuan harus ditujukan ke segala arah. Tiada desa lagi tanpa sekolah. Kita harus mengetahui ilmu-ilmu dari dunia Barat, memahami Barat dan menguasai pengetahuan Barat. Bahasa-bahasa, industrinya, perdagangannya, pendek kata apa yang indah, baik dan kuat berasal dari Barat.

Dilihat dari sudut ini, maka Ksatrian Instituut berusaha untuk mengalihkan tujuan pengajaran pada sekolah-sekolah Belanda, karena hanya menimbulkan pengangguran serta merupakan persiapan sebagai pegawai negeri belaka. Kemampuan kerja nyata untuk membangun masyarakat dengan pengetahuan ekonomi dan budaya diharapkan dari para lulusan Ksatrian Instituut. Satu segi lain yang penting dalam menyelenggarakan usahanya itu yalah majalah murid dan orangtua, yang berhasil diterbitkan oleh Ksatrian Instituut sejak bulan Agustus 1937. [66] Majalah itu, kecuali berisi berita-berita sekolah dan merupakan alat penghubung ántar-murid, juga memuat berita-berita umum yang penting, baik nasional maupun internasional.

5. *Ruang Pendidikan INS Kayutanam*

Pendidik dan pendiri Ruang Pendidik, INS itu yalah Mohammad Sjafei (1897 – 1969), seorang kelahiran Kalimantan

---

65 Sangat menarik yalah buku pedoman yang berjudul *Hoe krijg ik, zonder kapitaal mijn eigen school* (Bagaimana caranya tanpa modal dapat mendirikan sekolah?). Sayang sekali buku ini tak terdapat di dalam Perpustakaan Museum Pusat.

66 *De Ksatria.* Maandblad van de leerlingen van alle Ksatrian Scholen en hun Ouders. Redaksinya seorang bernama R.M. Hoedojo Hoeksamadiman. Oplaag 2000 ex.

Barat. [67] Ia adalah anak angkat Marah Sutan, [68] yang kemudian dikenal sebagai guru yang terkemuka dan ulet. Ia pernah menjadi murid sekolah Raja di Bukittinggi (1908 – 1914) dan merantau ke Jakarta, kemudian tercatat sebagai guru yang pertama mengajar pada Sekolah Kartini disitu. Bersama Marah Sutan ia ikut aktif dalam Boedi Oetomo dan Insulinde. Selain itu ia juga membantu perkumpulan wanita Putri Merdika.

Di Sekolah Kartini itu ia diberi kebebasan untuk mengadakan percobaan, yang tanpa diketahuinya sejalan dengan apa yang telah dipraktekkan di Amerika melalui sistim Dalton dan teori kerja-tangan. Direktur sekolah Kartini, Ny. Evenhuis, dipujinya dalam pidato pembukaan sekolah di Kayutanam pada tanggal 31 Oktober 1926 untuk kesempatan yang telah diberikan kepadanya. Juga dikenang jasa guru gambar HBS Jakarta, de Graaf, yang telah memberikan pelajaran melukis padanya.

Pada tahun 1920, bertepatan dengan kongres NIOG diadakan pameran pendidikan; Sjafei mendapat kesempatan pula untuk ikut memamerkan hasil-hasil percobaannya dan mendapat pujian dari beberapa kalangan pendidikan. [69]

Pada tahun 1922 ia menuju ke Nederland dengan biaya sendiri, hasil kegiatannya menulis dan menterjemahkan buku. Dalam pidato pembukaan tersebut diatas ia mengisahkan bagaimana ia mempelajari sistim pendidikan di Nederland dan terutama pendidikan rendah. Semua provinsi Nederland dijelajahi, dan dipelajarinya pendidikan sekolah rendah di pelosok-pelosok. Ia melihat juga betapa peranan pendidikan di Nederland dipegang oleh lembaga-lembaga partikelir. Disanalah ia mulai yakin, bahwa bagi kemajuan negeri dan rakyat pendidikanlah yang harus memegang peranan.

Sekembalinya dari Nederland, pada tahun 1926 maka atas permintaan pengurus Perkumpulan Bumiputra SS (Staatspoor = perusahaan kereta api negara) di Sumatra Barat, ia diminta untuk

---

67 Taufik Abdullah, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927 – 1935)*, Ithaca, 1971, hal. 127.

68 Marah Sutan pernah menjadi guru di Taman Siswa Jakarta dan menjadi anggota pengawas ujian Perguruan Rakyat di Jakarta pula. Banyak teman guru dan bekas muridnya dengan kagum dan hormat mengenang kepada keuletan, keberanian dan kecerdasannya. Lihat *Buku Peringatan Taman Siswa Djakarta 5 tahoen 1929 – 14 Djoeli – 1934*, juga dalam Boekoe Peringatan Pergoeroean Kebangsaan Indonesia *"Pergoeroean Rakjat" 1 Desember 1928 – 11 Desember 1933*. Djakarta.

69 "Pidato Pemboekaan Sekolah di Kajoetanam pada tanggal 31 October 1926" oleh Mohammad Sjafei, di dalam *Soeara Boemipoetera SS*, 7 Nopember 1926.

memimpin sekolah yang akan didirikan oleh perkumpulan itu. Kesempatan itu disambutnya dengan senang hati dan karena bahasa Indonesia merupakan alat pendidikan yang utama, maka ia menamakan sekolahnya, yang mengikuti HIS itu, *Indonesisch – Nederlandsche School* Sekolah dimulai tanpa perbekalan yang berarti, namun dijelaskan olehnya keadaan miskin itu amat perlu bagi mereka yang akan mendirikan sekolah, agar anakdidik maupun para penyokong sadar akan keadaan sebenarnya.

Dalam rencana pelajaran, yang berbeda dengan rencana pelajaran pemerintah, ia ingin melaksanakan pengajaran praktek, yang berasal dari dan untuk rakyat banyak. "Cara kesadaran berpikir Barat" mendapat tempat di dalam pengajarannya. Anakdidiknya tidak akan menjadi "cendekiawan setengah matang yang angkuh, tetapi akan menjadi pekerja cekatan yang rendahhati". Anak-anak dibiasakan bekerja secara teratur dan intensif; perbuatan haruslah menjadi tujuan, karena di timur terlalu banyak orang yang bersemadi. Mereka harus belajar mengenal dan menolong diri-sendiri. Olahraga merupakan mata-pelajaran yang penting. Kerja-tangan, ilmu-bumi, ilmu-alam dan menggambar, semuanya itu harus dapat dipergunakan untuk menajamkan daya pengamatan, sedangkan pelajaran bahasa hekekatnya ditujukan untuk mencapai kesanggupan berpikir dan merumuskan secara tajam dan teratur.

"Murid yang ideal yalah ia yang memiliki cinta kebenaran dalam hatinya, pengetahuan dalam otaknya. Antara keduanya terjadi hubungan timbal-balik; kegembiraan kerja, yang memerlukan otot-ototnya bekerja dan memberikan kesehatan; mencintai tanah-airnya, tetapi selalu sadar sebagai bagian dunia", demikian Mohammad Sjafei. [70]

Semua itu ingin dicapainya melalui tiga unsur pendidikan: pembentukan watak, membiasakan murid kepada kerja sistimatis dan intensif dan rasa setiakawan antara mereka.

Seperti juga terdapat pada Dewantara, Mohammad Sjafei menganggap pengajaran pemerintah Hindia Belanda bercorak berat sebelah, yang hanya mementingkan kecerdasan saja. Praktek pendidikan dan pengajaran pada waktu itu kurang atau sama sekali tidak memperhatikan perkembangan rasa , kecakapan dan

---

70 J.F.H. Albert de la Court, *Paedagogische Richtlijnen voor Indonesia*, Deventer, 1945, hal. 57.

Perpustakaan
Direktorat Sejarah
dan
Purbakala

ketangkasan. Apa yang disebut "matapelajaran expresi", yaitu mata pelajaran menggambar, menyanyi, bahasa, dan kerja tangan sangat dipentingkan, jadi sesuai dengan semboyan: *Hoofd, Hart en Hand* (kepala, hati dan tangan).[71]

INS dapat bertahan sampai pendudukan Jepang. Pada Perang Kemerdekaan sekolah ditutup. Baru setelah pemerintah RI kembali, maka Departemen P & K telah mendirikan SGB (= Sekolah Guru Bantu) yang pimpinannya diserahkan kepada Mohammad Sjafei, yang mendapat tugas untuk memberi latihan kepada guru-guru sekolah rakyat dalam mempraktekkan matapelajaran expresi tersebut.[72]

Sangat menarik yalah cara Sjafei menyambungkan sekolahnya dengan masyarakat sekitar. Kecuali dengan jalan hubungan pribadi dengan para orangtua murid dan penderma, juga dengan cara menyebarluaskan apa yang diajarkan sekolah itu di dalam "Roeang Pendidik" yang dimuat secara teratur dalam *Soeara Boemipoetra,* yang terbit di Padang. Juga diterbitkan majalah sekolah *Rantai Mas,*[73] yang dihiasi dengan hasil kerja-tangan para murid kelas atas, terutama produksi ukiran kayu.

Bagaimanakah tujuan pendidikan itu dituangkan dalam praktek pengajaran di sekolah? Kerja-tangan mengambil bagian besar waktu dalam kelas. Untuk klas I, II dan III masing-masing 1½, 1½ dan 3 jam sehari/seminggu sedangkan pada kelas terendah terutama ditekankan kepada kerja mencontoh, jadi untuk melatih pengamatan si murid. Gedung sekolah, asrama yang sederhana tempattinggal beberapa murid, bangku-bangku sekolah, semua keperluan sekolah dikerjakan oleh murid-murid sendiri dibawah pengawasan seorang tukang kayu yang dibayar untuk itu. Menolong diri sendiri merupakan azas sekolah itu, walaupun untuk itu sekolah harus dalam keadaan kekurangan hingga gaji guru-guru pun berada di bawah ukuran umum. Sjafei sendiri memberi contoh menyerahkan honorarium karangan-karangan-

---

71 Sutedjo Bradjanegara, *Sedjarah Pendidikan Indonesia,* Jogjakarta, 1956, hal. 92.

72 Sutedjo Bradjanegara, *ibid.*; Mohammad Sjafei pernah memangku jabatan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. ke-3 (12 Maret s/d 2 Oktober 1946). Meskipun ia tak pernah menduduki kursi di kementeriaan, namun potretnya termuat dalam buku Dasar Pendidikan dan Pengajaran, Djakarta, 1954, hal. 14 penerbitan Dep. P. & K.R.I.

73 Ch.O. van der Plas, "Bijdrage tot de kennis van paedagogisch streven in de Indonesische wereld", dalam *Opvoeding: Indisch Tijdschrift voor nieuwere paedagogiek,* le jrg.1931, hal.19. Van der Plas mengunjungi Kayutanam pada bulan April 1929 dan sempat membaca rencana pelajaran sekolah itu.

nya untuk kepentingan sekolahnya, karena ia ingin tetap mempertahankan sifat bangsanya yang ingin berusaha sendiri. Untuk menciptakan orang-orang Indonesia yang aktif, maka sejak kecil anak-anak harus dibuat aktif pula.[74] Umpamanya dalam hal pengajaran membaca. Setelah diterangkan secara umum untuk seluruh kelas, maka pada giliran membaca hanya satu murid saja yang tinggal dikelas, yaitu yang mendapat giliran, sedangkan yang lain-lainnya berada di ruang kelas yang berdekatan untuk bekerja lain. Cita-cita Sjafei yalah agar untuk setiap kelas ada dua ruangan yang tersedia, satu untuk pelajaran teori dan satu untuk praktek. Dengan itu ia ingin mencegah hilangnya waktu pada anak-anak, yang seringkali mengantuk karena harus mendengarkan temannya membaca dari bahan pelajaran yang sama.

Bertani diberikan setelah sekolah cukup mempunyai tanah untuk digarap. Olahraga,termasuk di dalamnya permainan rakyat, menghabiskan 2½ dari 18 jam (lima jam pelajaran). Perhatian istimewa diberikan pada pelajaran menyanyi, yang berlangsung 1½ jam untuk setiap kelas, juga di kelas dua dalam bahasa Belanda, yang seringkali diiringi oleh murid-murid sendiri dengan biola, seruling dan gitar. Terutama perkembangan pendengaran diperhatikan dalam hubungan itu. Murid-murid telah membentuk sebuah orkes model Barat. Lebih banyak lagi yalah jam pelajaran menggambar (2, 3, dan 1½ jam), yang diberikan dengan metode sendiri. Sudah sejak kelas satu murid-murid diharuskan menggambar, di luar kepala, benda-benda yang dilihatnya. Ini sebagai latihan ketajaman mengamati dan mengingat sesuatu. Di kelas tiga barulah dipergunakan cat-air dan kapur. Di kelas yang lebih tinggi dipelajari ukir-mengukir kayu dan hasilnya yang baik dimuat sebagai illustrasi dalam majalah-sekolah *Rantai Mas*. di kelas tiga telah diadakan latihan drama berdasarkan naskah-kecil sandiwara. Layar dan dekornya dibuat oleh murid-murid sendiri. Dengan metode sendiri pula diajarkan ilmu-bumi di kelas tiga, yang dimulai secara umum: dengan bola-dunia, benua-benua lain dan kemudian negeri sendiri, agar dirasakan murid negerinya sebagai bagian dunia. Kejadian sehari-hari diterangkan juga, untuk membangkitkan minat dan sebagai obat mengantuk.

Matapelajaran pokok yalah bahasa Indonesia, tidak kurang

---

74 van der Plas, *ibid*, hal. 18; Pada tahun 1953. Sjafei mengeluarkan bukunya yang berjudul "Arah Aftif", (Djakarta, J.B. Wolters). Dikutip oleh Taufik Abdullah, *op.cit.*, hal. 127.

dari 7½ jam dipergunakan di kelas rendah dan 6 jam di kelas tiga. Apabila dalam pelajaran bahasa asing, yang dipentingkan pada mulanya hanya pengamatan si murid, maka pada pelajaran bahasa itu sejak semula murid dibiasakan untuk merumuskan secara tajam pikirannya dan dengan itu ingin dicapai berpikir secara teratur. Sebagai bahan pelajaran harus dipakai kisah dan kejadian disekitarnya.

Bahasa Belanda hanya diberikan satu jam di kelas satu, yang berupa latihan ucapan, kemudian di kelas dua 6 jam dan di kelas tiga 7½ jam. Maksud pengajaran yalah penguasaan pasif. Rencana pelajaran sekolah itu berada di tengah-tengah rencana pelajaran pemerintah dan rencana pelajaran Taman Siswa.

Ilmu hayat diajarkan sejalan dan dikaitkan dengan pelajaran menggambar dan kerja-tangan, dan terutama untuk membangkitkan perhatian, mengenal dan meneliti sendiri. Orang mulai dengan menerangkan tumbuh-tumbuhan dan binatang di sekitarnya. Corak agama menjadi ciri pengajaran, yang untuk Sumatra Barat berarti agama Islam, namun titik-berat yalah agar anak-anak lebih menghayati agama, tidak untuk pengetahuan maupun menjalankan ibadat. Cinta kepada kebenaran didengung-dengungkan kepada murid sebagai suatu kebajikan yang besar.

Diatas telah disinggung persamaan dan perbedaan INS dan Taman Siswa, maka setelah mengetahui praktek pengajaran seperti tersebut diatas, dapat ditambahkan bahwa pada sekolah Sjafei "ciri filsafat dan tepekur" seperti di Taman Siswa tidaklah nampak, demikian juga orientasi kepada budaya sendiri tidak begitu menonjol. Dalam pelaksanaan pengajaran seperti telah disebutkan diatas, maka "untuk semuanya praktis, dari dan untuk rakyat".[75]

6. *Perguruan Rakyat*

Perguruan itu didirikan pada tanggal 11 Desember 1928[76] dan merupakan gabungan dari dua perkumpulan yang bergerak dalam bidang pendidikan, yaitu Pustaka Kita dan Perhimpunan Untuk Belajar. Yang pertama adalah perkumpulan yang dipimpin

---

75 van der Plas,*op. cit.*, hal. 20.

76 *Mededeelingen der Regeering omtrent enkele onderwerpen van algemeen belang*, Juni, 1930, hal. 38. Lihat *Boekoe Peringatan* ...."Pergoeroean Rakjat". (catatan di atas).

oleh Mr. Sunario dan A. Mononutu Wilson (didirikan pada bulan Agustus 1928) dan bertujuan membangun perpustakaan serta mengadakan seri ceramah yang penting bagi pengetahuan dan kemajuan bagi anggota-anggotanya. Yang kedua didirikan oleh sembilanbelas orang, diketuai oleh Sudarmoatmojo dan Sarah Thaib. [77] Tujuan perkumpulan itu yalah untuk membuka kursus bahasa-bahasa asing, Jerman, Inggris dan Perancis serta ilmu jurnalistik. Mula-mula Drs. Sosrokartono akan memberi pelajaran, tetapi karena sesuatu hal maka sebagai penggantinya yalah Mr. Sunario dari Pustaka Kita.

Kemudian timbul cita-cita untuk mempersatukan kedua perkumpulan itu dan terwujudlah Perguruan Rakyat. Berhubung dengan peristiwa itu sebuah penerbitan resmi pemerintah mencatat, bahwa penggabungan itu merupakan hasil dorongan para pimpinan PNI di Jakarta. [78] Pengurus baru yang dipilih terdiri dari: Mr. Dr. Muhammad Nazif (ketua), A. Mononutu Wilson (penulis I), Sudarmoatmojo (penulis II), B. Tomowardoyo (bendahari I), S. Martadisastra (bendahari II) dan anggotanya terdiri dari Dr. W.K.R.D. Asikin, Mr. Muhammad Yamin, Njonoprawoto dan Sunarko. Saeroen diserahi tugas untuk memimpin perpustakaan. Di samping pengurus terdapat juga badan pengawas, yang terdiri dari R.A.A. Kusumo Utojo (ketua), D. Kusuma Subrata (penulis) dan para anggota yang terdiri dari Mr. Hadi, Dahlan Abdullah, Mr. Sartono, Dr. Kajadu dan Muh. Husni Thamrin.

Deretan nama itu bagi para pembaca yang telah mengetahui pergerakan nasional tidaklah asing lagi. Beberapa diantaranya hingga tercapainya Kemerdekaan dan dalam masa pembinaan Republik Indonesia tetap memegang peranan yang penting dan terhormat. Lain daripada itu juga merupakan sebuah contoh diantara banyak kegiatan di Jakarta – betapa kota itu memberikan lingkungan, iklim sosial dan politik yang memungkinkan usaha-usaha bersama. Usaha bersama itu di dalam jangkauan serta rencananya jelas-jelas mengatasi asal-usul mereka, baik secara keturunan maupun kesukuan.

Tujuan semula yalah membuat Perguruan Rakyat sebagai

---

77 Pendiri-pendiri lainnya Angronsudirdjo, Njonoprawoto, Achmad Amir, Sadiman, Sigit, Sunario, Sjahbudin, Saeroen, Bahaudin Effendi, B. Tomowardojo, B. Tomohudojo, Basuki, Sutarjo, Sugeng, Sukarto.

78 *Mededeelingen*.....1930.

suatu *Volks-Universiteit* (Universitas Rakyat), yang menyelenggarakan kursus-kursus lanjutan mengenai bahasa-bahasa, ilmu bangsa-bangsa, sosiologi, tata-negara, tata-buku dan stenografi. Pelajaran diadakan sore hari dengan memakai gedung Muhammaddiyah, di jalan Kramat 97. Seri ceramah diadakan seminggu sekali, diantaranya oleh Ki Hadjar Dewantara tentang Perguruan dan pendidikan, Dr. Sardjito tentang penyakit malaria, Dr. Porbatjaraka tentang bahasa Indonesia, Kusumah Subrata tentang Dewan Kabupaten, Dr. Asikin membahas tentang kesehatan, Saeroen dan Djamaloedin Adinegoro tentang jurnalistik. Dalam penyelenggaraan pengajaran, perguruan dibantu oleh banyak mahasiswa di Jakarta, yang sengaja diikutsertakan sebagai latihan tanggungjawab sosial dan calon-calon pemimpin yang akan datang. Dalam waktu singkat Perguruan Rakyat sebagai Universitas Rakyat dapat menarik 300 orang peserta kursus.

Hasil-hasil permulaan itu mendorong dua mahasiswa, Sigit dan Sugondo untuk mengajukan usul, agar didirikan sekolah rendah, *Schakelschool* dan *MULO*. Perluasan pengajaran itu memerlukan ruangan yang lebih luas pula, dan untuk selanjutnya sekolah diselenggarakan pagi dan sore (khusus untuk MULO bagi orang dewasa) di gedung gang Kenari 15.

Berhubung dengan perkembangan itu, maka dirasa perlu untuk membentuk pimpinan harian sekolah, yang kemudian diserahkan kepada Dr. Samsi dan A. Mononutu Wilson, masing-masing sebagai direktur dan wakil direktur. Pada tahun 1932 Perguruan Rakyat berhasil mendirikan sebuah sekolah guru yang dahulu bernama Perguruan Umum Pendidik. Lulusan pertama MULO Perguruan Rakyat dihasilkan pada tahun 1933 dan kemudian diadakan persiapan untuk mendirikan Perguruan Tinggi Indonesia. Sebagai jembatan kearah itu didirikanlah POPTI (Persediaan Oentoek Pergoeroean Tinggi Indonesia), lamanya 3 tahun sesudah MULO.

Berdirinya Perguruan Rakyat menarik perhatian para cendekiawan dan pimpinan di tempat lain, yang kemudian mendirikan Perguruan Rakyat di Jatinegara, Semarang, Surabaya, Bandung, Makasar, Mataram, Madiun dan Palembang. Mereka itu berdiri sendiri tanpa hubungan organisatoris dengan Perguruan Rakyat di Jakarta, namun telah dikandung maksud untuk mempersatukan mereka dalam satu organisasi di waktu yang akan

datang. Itulah perkembangan Perguruan Rakyat dalam masa 5 tahun.

Dalam melaksanakan pengajaran dan pendidikan Perguruan Rakyat berpedoman kepada "Sendi-sendi Perguruan Rakyat". Pertama-tama yalah dasar Kebangsaan Indonesia, yang menyatukan dunia pemuda dengan dunia yang lebih besar, yaitu masyarakat yang bersemangat dan insaf tentang kebangsaan Indonesia. Didalam pengajaran yang diberikan, maka mata pelajaran dibagi sedemikian rupa agar dapat melenyapkan fikiran dan perasaan kedaerahan. Dengan positif ditanamkan dalam otak dan hati para pelajar supaya berdunia Indonesia, oleh karena itu pengajaran Sejarah Indonesia dan bahasa Indonesia merupakan matapelajaran yang penting.

Sendi yang kedua yalah mengutamakan pendidikan jasmani, yang tidak saja bertujuan untuk mendapatkan kesehatan yang baik, tetapi juga memperkuat sifat-sifat yang mulia, sifat keperwiraan, sifat ksatria, pendek kata sifat-sifat sportif.

Sendi ketiga yalah pembentukan watak, yang unsur-unsurnya terdiri dari kecakapan, tahu hargadiri dan kewajiban, kekuatan sendiri dan kekuatan rohani. Sifat dan bakat murid dikembangkan sedemikian rupa dalam hati sanubari para pemuda agar berguna bagi masyarakat Indonesia.

Kemudian dianggap amat penting yalah pendidikan yang diarahkan untuk terwujudnya pendirian dan pengetahuan yang berdasar kenyataan. Pendidikan yang menggantungkan nasib semata-mata pada angan-angan, misalnya dengan termenung-menung, semedi dan konsentrasi haruslah dikikis habis. Para pemuda haruslah dididik untuk berani melihat kenyataan dan berani mencari kemenangan diantara keadaan yang nyata.

Sendi kelima yalah pendidikan yang dapat menimbulkan "haluan hidup", yang bersemangat kemajuan dengan menghargakan kebajikan bangsa kita dahulu dan sekarang. Menurut keyakinan Perguruan Rakyat sikap kolot haruslah disingkirkan dan perasaan yang bersemangat kemajuan ditanam. Pendidikan ini yalah pendidikan kaum muda, yang berhaluan modernisme dalam arti yang baik. Haruslah disadarkan kepada para pemuda untuk dapat melihat perubahan-perubahan yang akan terjadi atau kepada susunan masyarakat yang baru, disamping itu juga perlu ditimbulkan penghargaan kepada kebaikan dan kebajikan yang terdapat dalam masyarakat.

Pendidikan masyarakat merupakan sendi keenam. Yang dimaksudkan disini yalah usaha menghubungkan anakdidik dengan masyarakatnya, dengan jalan menghidupkan rasa cinta kepada tanahair dan Bangsa Indonesia.

Pokok-pokok pikiran tentang "Sendi-sendi Perguruan Rakyat" dan keterangannya tersebut dikatakan oleh pengurus Perguruan Rakyat, bahwa hal itu tidak merupakan suatu program pendidikan yang bulat-lengkap, tetapi yang dibuat sekedar sebagai usaha pembatasan suatu "Ilmu Pendidikan Indonesia yang sedang diwujudkan". Suatu sistim pendidikan yang lengkap dan tetap belum waktunya diadakan, mengingat pertumbuhan ilmu pendidikan yang dicita-citakan, karena menurut pendapat para pengurus keadaan pengajaran Indonesia, seperti juga kehidupan masyarakat Indonesia, masih dalam taraf untuk diteliti dan dikembangkan, dengan singkat masih harus dibangun kembali, dari alam kolonial ke alam kemerdekaan. Cita-cita yang terkandung didalam keterangan tentang "Sendi-sendi Perguruan Rakyat" yalah untuk bersikap kritis terhadap usaha sendiri dan keadaan sekeliling serta selalu mencari cara-cara yang sesuai untuk mencapai tujuan-tujuan baru. Untuk itu dengan sadar Perguruan Rakyat menghindari pemikiran filsafat yang kabur tentang pengertian-pengertian yang dalam dan yang berada di luar kehidupan yang sebenarnya. "Haluan pendidikan"-nya ditujukan kepada bangsa Indonesia untuk berperasaan dan berfikir guna menjawab masalah-masalah yang nyata dihadapi oleh masyarakatnya.

Berhubung dengan itu, apabila dari keterangan "Sendi-sendi Perguruan Rakyat" itu perlu ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan ilmu pendidikan, maka satu-satunya yang dapat dikemukakan yalah "bahwa pendidikan itu dalam orientasinya lebih bercorak sosiologis dari pada condong ke filsafat metafisis".[79] Dari kesimpulan pendidikan itu, maka ternyatalah perbedaan antara Perguruan Rakyat dan Taman Siswa, sungguhpun antara keduanya terdapat hubungan yang baik.

Bagaimana perkembangan Perguruan Rakyat selanjutnya kuranglah jelas namun berita-berita tentang Perguruan Rakyat termuat di dalam surat kabar *Kebangoenan*, yang terbit di Jakarta sejak tahun 1936 dengan redaksi Sanusi Pane dan

[79] van der Plas, *op.cit.*, hal. 13; de la Court, *op.cit.*, hal. 57.

Muhammad Yamin. Pada akhir November 1936 suratkabar itu memberitakan kemunduran yang terjadi pada Perguruan Rakyat. Dalam laporan yang diberikan oleh pengurusnya, waktu itu disebutkan Mr. Hendromartono dan Dr. Subroto, dalam suatu rapat yang dihadiri juga oleh P.F. Dahler dari *Ksatrian Instituut* di Bandung, antara lain disebutkan kemunduran itu sebagian disebabkan kurangnya dana-dana yang diperlukan.

B. INDONESIA DAN BAHASA INDONESIA SEBAGAI IDENTITAS BANGSA

1. Perkembangan Bahasa Indonesia

Perkembangan Bahasa Melayu menjadi Bahasa Indonesia, yang sekarang ini merupakan Bahasa Nasional Republik Indonesia, sejak lama telah menjadi bahan pembicaraan luas.[80] Bahasa Melayu yang aslinya merupakan bahasa kelompok sukubangsa di kepulauan Indonesia, telah lama menjadi bahasa perdagangan di daerah pelabuhan di Indonesia. Disamping itu dipergunakan pula dalam penyebaran agama Islam dan Kristen.

Pertentangan-pertentangan setempat yang timbul berhubung dengan kedatangan pedagang-pedagang Belanda dan berakhir dengan perjanjian-perjanjian dagang maupun politik juga menggunakan Bahasa Melayu disamping Bahasa Belanda.

Sekolah-sekolah bumiputra yang kemudian didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda direncanakan untuk memakai bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Tetapi sejak awal abad-20 kepentingan daerah jajahan, yang memerlukan tenaga-tenaga rendahan yang mengerti bahasa Belanda menggeser bahasa Melayu. Sekolah di kota-kota lebih banyak mengajarkan bahasa Belanda.[81]

Sebaliknya perkembangan sosial di kota-kota menumbuhkan kelompok elite baru yang amat peka terhadap perubahan. Tanda-tanda pertama kepekaan terhadap perubahan itu dapat dilihat dengan lahirnya organisasi bercorak politik, yang men-

---

80 Periksa karangan Takdir Alisjahbana *Dari Perdjuangan dan pertumbuhan Bahasa Indonesia*. Djakarta, 1957; 1966; Semua karangan tentang Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia menjadi perhatian khusus A. Teeuw (1961) dalam menyusun survey bibibliografi secara kritis.

81 I.J. Brugmans. *Geschiedenis van het onderwijs in Nederlandsch Indie*, Groningen – Batavia, 1938.

cita-citakan kemajuan dan kemerdekaan bangsa, seperti Boedi Oetomo,[82] Sarekat Islam,[83] *Indische Partij.*[84]

Sangat menarik untuk dicatat yalah mengenai bahasa yang dipergunakan didalam kongres-kongres maupun publikasi organisasi itu. Boedi Oetomo mempergunakan bahasa Jawa, Melayu dan Belanda. *Indische Partij.* dalam bahasa Belanda dan Melayu, Sarekat Islam menggunakan bahasa Melayu dan Jawa juga. Terutama didalam kongres-kongres Sarekat Islam, bahasa itu mendapat "isi nasional". Hal ini disebabkan, bukan karena nama kongres-kongres SI itu sebagai kongres Nasional, tetapi juga karena wakil-wakil SI yang mengunjungi kongres-kongres datang dari pelbagai penjuru Indonesia.[85]

Seorang wakil pelajar Indonesia di Nederland, yang telah aktif dalam gerakan nasional, dalam kongres *Indonesisch Verbond van Studeerenden* (Perserikatan Pelajar Indonesia) pada tahun 1918 di Wageningen telah mengusulkan agar bahasa Melayu dipakai sebagai bahasa pengantar di sekolah-sekolah Indonesia. Majalah pelajar-pelajar di Nederland berjudul *Hindia Poetra (!)*[86]

Di Indonesia sendiri perkembangan pers berbahasa Melayu dinilai sangat penting peranannya, karena pers itu langsung dapat mencapai penduduk bumiputra, golongan penduduk yang terbanyak jumlahnya disamping golongan Belanda dan Cina. Pada mulanya pers berbahasa Melayu itu adalah milik modal Belanda

---

82 Anggota-anggota Boedi Oetomo terutama terdiri dari golongan terpelajar, priyayi dan bangsawan Jawa. Mengenai kecenderungan pemikiran mereka tentang politik dan budaya sampai tahun 1918, lihat Dr. Akira Nagazumi, *The Dawn of Indonesian Nationalism. The Early Years of the Budi Utomo, 1908–1918.* Tokyo, 1972.

83 Sarekat Islam adalah organisasi yang paling tersebar di seluruh Indonesia. Ini dapat dijelaskan karena sejak penyebaran agama Islam pada abad ke-16 di Indonesia, bahasa Melayu telah merupakan bahasa perantara. Mengenai Sarekat Islam periksa studi Harry Benda (1958) dan Deliar Noer (1963). Mengenai jumlah cabang SI di seluruh Indonesia terdapat dalam laporan resmi pejabat-pejabat Hindia Belanda. Lihat untuk ini penerbitan sumber yang dikerjakan oleh S.L. van der Wal (1965). Kalkulasi pengikut SI yang perlu dipertimbangkan yalah kalkulasi Bernhard Dahm, *Sukarnos Kampt um Indonesiens Unabhang gigkeit, Werdegang und Ideen eines asiatischen Nationalisten,* Berlin, 1966.

84 Indische Partij adalah organisasi golongan Indo (Eurasia) yang berhasil menarik sekelompok intelektuil Indonesia yang memiliki kecenderungan politik yang kuat. Penting untuk dicatat yalah publikasi-publikasi I.P. yang terbit dalam bahasa Belanda, Jawa dan Melayu.

85 Bernard Dahm. *op.cit.*.

86 Lihat publikasi *Eerste Koloniaal Onderwijs Congress* (1919).

maupun Cina, tetapi tidak jarang redaksinya merupakan campuran. Umumnya ada guru bahasa Melayu yang duduk dalam dewan redaksi. Peranan pers berbahasa Melayu itu diperhatikan oleh pengarang terutama tentang pers Indonesia, seperti karangan E.F.E. Douwes Dekker dan seorang sarjana Perancis Antoine Cabaton, kedua-duanya menulis pada tahun 1909. [87]

Medan Prijaji, mingguan dan kemudian harian, adalah yang terpenting dalam rangkaian perkembangan awal pers Indonesia. Bukan saja karena modal dan penerbitnya adalah orang Indonesia tetapi nada isinya yang jelas menunjukkan kesadaran penggunaan bahasa Melayu sebagai media untuk membentuk pendapat umum mengenai berbagai persoalan masyarakat dewasa itu. Pemimpinnya R.M. Tirtohadisuryo, kemudian diserahi tugas untuk memimpin surat kabar Sarekat Islam pertama, yaitu *Sarotama*. [88]

Sejak tahun 1924 elite baru yang terdiri dari mahasiswa Indonesia di Nederland memimpin dan mengarahkan idea Indonesia sebagai pengertian politik. Organisasi mereka berganti nama menjadi Perhimpunan Indonesia dan majalahnya *Indonesia Merdeka*. [89] Kata Indonesia yang semula hanya dikenal mereka dalam kepustakaan etnologi, ditingkatkan sebagai istilah identitas mereka. Sebagai kelanjutan idea Indonesia itu, maka di Indonesia pada tahun 1927 didirikan Partai Nasional Indonesia. Dari namanya saja sudah merupakan identitas politik baru, yang mengatasi pengertian dan batas-batas sukubangsa di Indonesia. [90] Elite Indonesia baru, yang semula hanya pandai bahasa daerah dan bahasa Belanda, bahkan banyak yang hanya pandai berbahasa Belanda, melihat kemungkinan pemakaian bahasa Melayu sebagai alat komunikasi politik. Hal inipun secara bersamaan disadari oleh pejabat-pejabat Hindia Belanda. Banyak-

87 E.F.E. Douwes Dekker (1909) dan Antoine Cabaton (1909). Peranan pers dan hubungannya dengan perkembangan Bahasa Indonesia masih harus diteliti. Mengenai pers Indonesia Cina yang menggunakan Bahasa Malayu Pasar, kedudukan dan perannya di tengah-tengah perkembangan pers di Indonesia, terdapat dalam studi Leo Suryadinata (1971). Lihat selanjutnya pasal c bab ini.

88 Penyusun pertama Sejarah Surat Kabar Indonesia, meskipun baru merupakan penjajagan bahan yang tersedia, yalah Sudarjo Tjokrosisworo, *Kenangan Selintas Sedjarah Perdjuangan Pers Sebangsa*. SPS, Djakarta, 1958.

89 Terbit dalam bahasa Belanda, tetapi sejak tahun 1922 telah ada karangan didalam bahasa Indonesia, a.l. dari Nazir Datuk Pamuntjak. Pernah pula terbit dalam edisi bahasa Melayu, tetapi hanya sempat dua nomor. Mengenai Perhimpunan Indonesia dan peranannya didalam pergerakan nasional, periksa karangan Soenario (1970).

90 David Joel Steinberg dll., *In Search of Southeast Asia*. 1971, hal. 296.

nya kasus *pers-delict* dimasa Hindia Belanda, larangan terbit bagi brosur dan pers, antara lain karena kekhawatiran penggunaa-bahasa Melayu yang dipahami oleh penduduk bumiputra. Suatu contoh yang terkenal yalah terbitnya risalah *Als ik eens Nederlander was* dalam bahasa Belanda dan Melayu pada tahun 1913, yang dilarang untuk diedarkan. Risalah itu diterbitkan untuk mengecam perayaan seratus tahun kemerdekaan Nederland yang akan diadakan di Indonesia.[91] Demikianlah beberapa contoh peristiwa sebelum diadakannya Kongres Pemuda Indonesia kedua di Jakarta.

Pada bulan Oktober 1928 pemuda-pemuda Indonesia mengadakan kongresnya kedua, yang keputusan-keputusannya kini dikenal sebagai Sumpah Pemuda Indonesia Raya. Dalam hubungan karangan ini, keputusannya bahwa "Kami putera dan puteri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, Bahasa Indonesia" merupakan perumusan yang tepat sekali dari kesadaran yang secara lambat berkembang pada tahun-tahun sebelumnya.[92]

Semenjak itu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai kesempatan sejalan dengan kesadaran identitas Indonesia. Latar-belakang budaya dan sosial pemakai bahasa Indonesia tercermin dalam karangan-karangan mereka. Karya Sastra Indonesia sebagai hasil "arsitek-arsitek Bahasa Indonesia", baik sebagai terbitan *Balai Pustaka* maupun di luarnya menuju kearah kesempurnaan bahasa Indonesia. *Pujangga Baru* yang terbit sejak 1933 merupakan cermin kegiatan intelektuil elite baru yang dengan sadar menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi modern di tengah-tengah perkembangan ilmu dan teknologi.[93]

Gerakan pendidikan Taman Siswa, yang oleh banyak orang disebut "mulai perjalanan hidupnya yang aneh itu dengan aksi

---

91 Abdurrachman Surjomihardjo: "Suatu analisa tjita-tjita dan tindak perbuatan nasional-revolusioner Suwardi Surjaningrat, 1913 – 1922". *Medan Ilmu Pengetahuan Indonesia*, Th. III no. 2, April 1962, hal. 471 – 514.

92 Soenario: "Perhimpunan Indonesia, dan peranannya dalam perjuangan kemerdekaan kita". Paper dalam Seminar Sedjarah Nasional II, 26 – 29 Agustus 1970 di Jogjakarta.

93 Mengenai karya-karya sastra Indonesia moderen, lihat karangan-karangan Takdir Alisjahbana, Armijn Pane dan H.B. Jassin. Bibliografi karya mereka termuat dalam buku A. Teeuw (1967) tentang kesusasteraan Indonesia Moderen. Periksa juga daftar karangan pada karya Ajip Rosidi. *Ichtisar Sedjarah Sastra Indonesia*, Penerbit Binatjipta, Bandung, 1969. Studi moderen tentang Poedjangga Baroe ialah Heather Sutherland (1968).

untuk melindungi budaya Jawa", antara tahun 1930 – 1940 para pemimpinnya "telah meninggalkan cita-citanya dan menerima prioritas kepentingan Bahasa Indonesia".[94]

Sebuah Kongres Bahasa diadakan di Surakarta pada tahun 1938.[95] Keputusan-keputusannya yang penting yalah gagasan untuk mendirikan sebuah lembaga dan sebuah fakultas untuk mempelajari bahasa Indonesia. Disamping itu membuat tata-bahasa baru sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi didalam struktur bahasa. Bahasa Indonesia hendaklah dipakai sebagai bahasa Hukum dan sebagai alat pertukaran pikiran didalam dewan-dewan perwakilan waktu itu. Tetapi keputusan-keputusan itu hanya diatas kertas dan tidak satu lembagapun yang didirikan untuk melaksanakan keputusan kongres itu.[96]

Dalam pada itu pers dan majalah yang mewakili ideologi agama, politik maupun budaya terbit terus dengan bahasa Indonesia yang makin sempurna. Ikutilah umpamanya rangkaian polemik tentang budaya Indonesia antara tahun 1935 – 1939, dimana seorang sarjana hukum dan sastrawan, Sutan Takdir Alisjahbana, dua orang dokter/politikus, Dr. Sutomo dan Dr. M. Amir, dua orang wartawan, Adinegoro dan Tjindarbumi, seorang guru dan sastrawan, Sanusi Pane, seorang politikus, pendidik dan budayawan, Ki Hadjar Dewantara, dan akhirnya seorang sarjana sejarah dan budaya kuno, Dr. Purbatjaraka, menggunakan Bahasa Indonesia dengan gaya masing-masing.[97]

Fraksi Nasional didalam *Volksraad* (Dewan Rakyat Hindia Belanda) dibawah Mohamad Husni Thamrin, Abang Betawi, yang telah menjadi pemimpin politik terkemuka tatkala itu, melancarkan aksi menggunakan Bahasa Indonesia didalam pidato-pidato dimuka sidang.[98] Reaksinya cukup hebat, baik di dalam Volksraad maupun di dalam pers Belanda. Itulah usaha pertama untuk mendobrak penggunaan Bahasa Belanda dalam hukum selama ini. Keberatan pejabat-pejabat Belanda berhubung aksi Fraksi Nasional itu terutama yalah karena penggunaan

---

94 C.B. Berg.

95 Periksa laporan Kongres Bahasa itu.

96 Takdir Alisjahbana, *Indonesian Cultural Revolution*, 1966.

97 Achdiat K. Mihardja, *Polemik Kebudayaan*, Djakarta, 1954.

98 Cukup mengesankan dan menimbulkan reaksi meluas ialah pidato M.H. Thamrin didalam Volksraad pada tahun 1938. Lihat bagian terdahulu Bab ini.

Bahasa Indonesia itu akan segera dapat ditangkap makna dan arti perdebatan-perdebatan oleh pers Indonesia di luar *Volksraad.*

Apa artinya usaha-usaha itu di dalam situasi kolonial, di dalam daerah yang begitu luas sungguh tak terkirakan. Belum lagi bila dilihat dari jumlah pulau-pulaunya, daerah-daerahnya yang dipisahkan oleh hutan-hutan, gunung-gunung dan lautan, sehingga kurang lebih 250 dialek terdapat di negeri kita.

Nyatalah dari uraian di atas bahwa dari pemakai Bahasa Melayu yang semula terbatas pada suku-bangsa, lambat-laun menjadi bahasa golongan masyarakat yang silih berganti muncul dan berkembang sepanjang sejarah Indonesia. Dari bahasa pergaulan kemudian menjadi bahasa perdagangan, bahasa untuk menyebarkan agama, bahasa perjanjian dagang dan politik, bahasa pers, sastra dan politik dan atas dorongan pemuda dan elite Indonesia baru menjadi bahasa pembinaan nasional Indonesia. Gaya dan bentuknya sesuai dengan golongan masyarakat atau perorangan yang memakainya, sehingga usaha dokumentasi penggunaan bahasa itu dari jaman kejaman amatlah berguna. Gaya dan bentuk, isi dan motivasi menggunakan bahasa Indonesia sebenarnya mencerminkan perkembangan masyarakat Indonesia sendiri. Sejarah perjuangan penggunaan Bahasa Indonesia merupakan salah satu saluran perkembangan nasional.

2. *Indonesia : Identitas Bangsa*

Sejalan dengan perkembangan Bahasa Indonesia, satu aspek yang penting pula yalah perjuangan pemakaian kata istilah Indonesia untuk menunjukkan identitas nasio (bangsa) yang dicita-citakan oleh cendekiawan Indonesia. Semula berasal dari pelbagai suku-bangsa, maka tatkala di Nederland mereka bersama memerlukan satu penanaman asal Bangsa.

Majalah *Indonesia Merdeka* yang diterbitkan oleh Perhimpunan Indonesia di Nederland, mencatat didalam kata pengantarnya: "Kita memasuki tahun baru dengan pakaian baru dan nama baru. Pergantian nama itu bukanlah merupakan hasil khayalan secara tiba-tiba, tetapi itu hanya merupakan penarikan sebuah garis, yang dimulai dengan perubahan *Indische Vereeniging* menjadi *Indonesische Vereeniging*".[99]

[99] Majalah *Indonesia Merdeka*, No. 1, Th. 2, Maart 1924: "Voorwoord" (Kata Pengantar).

Indische Vereeniging adalah perkumpulan para mahasiswa Indonesia di Nederland, didirikan pada tanggal 15 Nopember 1908, yang berganti nama menjadi *Indonesische Vereeniging* (1922) dan kemudian *Perhimpunan Indonesia* (1924). Majalahnya yang semula bernama *Hindia Poetra* berubah menjadi *Indonesia Merdeka.*

Dalam nomor pertama itu pula dicatat, bahwa: *Indonesia Merdeka* merupakan suara Indonesia Muda yang sedang belajar, suara yang pada waktu ini mungkin tidak terdengar oleh penguasa, tetapi yang pada suatu saat pasti akan didengar..... Adalah suatu kesalahan untuk menganggap remeh suara itu, sebab di belakang suara itu berdiri kemauan pasti untuk tetap merebut kembali hak-hak lambat atau cepat untuk menetapkan kedudukan atau keyakinan di tengah-tengah dunia, yaitu Indonesia Merdeka.

Peristiwa pergantian nama itu dan perjuangan untuk mengganti nama *Nederlandsch-Indie* menjadi Indonesia, dicatat oleh penyusun pertama Sejarah Pergerakan Nasional, J.Th. Petrus Blumberger (1931).Ia mencatat bahwa sekitar tahun1925 banyak organisasi yang berorientasi nasional memakai nama Indonesia dan ingin memberi isi ketatanegaraan ke dalam kata itu. [100]

Pemakaian nama Indonesia sejak itu secara luas terdapat pada suratkabar, organisasi-organisasi, judul-judul karangan dan sebagainya. Judul-judul seperti "Indonesia in de Wereldgemeenschap" (Indonesia di tengah-tengah pergaulan dunia), "Indonesia di tengah-tengah Revolusi Asia" dan "De Vakvereeniging in Indonesie" (Serikat Sekerja di Indonesia) termuat didalam nomor lustrum 15 tahun berdirinya *Indonesische Vereeniging* (1908 – 1923).

Nazir Datuk Pamuntjak, sebagai wakil PI didalam kongres Liga Anti Penindasan Imperialisme dan Kolonialisme di Brussel (10 – 15 Pebruari 1927) berpidato dengan judul "Indonesia en de Vrijheidsstrijd" (Indonesia dan perjuangan Kemerdekaan). Nama Indonesia yang dipakainya itu dijelaskan kepada para pengunjung kongres sebagai berikut: "Indonesia adalah nama kepulauan Hindia, terdiri dari Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan banyak pulau-pulau kecil lainnya dengan jumlah

[100] J.Th. Petrus Blumberger, *De Nationalistische Beweging in Nederlandsch Indie*, Haarlem, 1931.

penduduknya sebanyak 50 juta". Didalam majalah Indonesia Merdeka terdapat artikel anonim (tanpa nama pengarang) *lets over de naam Indonesia* (Sedikit tentang nama Indonesia), yang menguraikan asal-usul pemakaian kata Indonesia, sejak dipakai oleh J.R. Logan dalam arti geografis (1850), kemudian dalam arti ethnologis sejak A. Bastian (1884) dan kemudian diusulkan dalam arti politik ketata-negaraan oleh kaum nasionalis. [101]

Seorang penulis didalam *Het Koloniaal Weekblad* (1925) adalah yang pertama mempersoalkan dari mana asal nama Indonesia itu. [102] Ia menunjukkan kekeliruan-kekeliruan pada beberapa ensiklopedi pada waktu itu, yang masih mencatat A. Bastian sebagai pencipta nama Indonesia. Ia menunjukkan, bahwa jauh sebelum itu J.R. Logan seorang pegawai pemerintahan Inggris di Penang dan redaktur *Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia* dalam karangannya di dalam majalah tersebut (1850) telah mengusulkan kata Indonesia.

Karangan Logan berjudul "The Ethnology of the Indian Archipelago: embracing enquiries into the Continental Relations of the Indo-Pacific Islanders."[103] Pengertian Logan tentang kata Indonesia itu sama dengan arti kata pulau-pulau atau kepulauan Hindia dan penduduknya yalah bangsa Indonesia. Menurut kata-kata Logan sendiri:"...I prefer the purely geographical term Indonesia, which is merely a shorter synonym for the Indian Islands or the Indian Archipelago. We thus get Indonesian for Indian Archipelagian or Archipelagic, and Indonesians for Indian Arcchipelagians or Indian Islanders".

Sebetulnya sebelum itu seorang etnoloog Inggris lainnya G. Windsor Earl [104] di dalam majalah yang sama itu, menulis tentang ciri-ciri utama penduduk Irian, penduduk asli Australia dan Melayu-Polinesia. Ia mengusulkan dipakainya istilah *Indusnesians* dan *Melayu-nesians* bagi penduduk kepulauan Hindia.

---

101 *Indonesia Merdeka*, No.1 – 2, Th. 5, Maart – April (1927: n. 20 – 29; hal. 50 – 53.

102 Kreemer, "Waar komt de naam Indonesie vandaan", *Het Koloniaal Weekblad*, 3 Pebruari, 1925, hal. 4.

103 J.R. Logan, "The Ethnology of the Indian Archipelago: embracing enquiries into continental relations of the Indo – Pacific Islanders", *The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia*, (J.I.A.E.A.) Vol. IV (1850): hal. 252 – 347.

104 G. Windsor Earl, "On the leading characteristics of the Papuan, Australian & Malaya – Polynesian nations;" *J.I.A.E.A.*, Vol. IV, (1850), hal. 1 – 10; hal. 66 – 67; hal. 172 – 181.

Selanjutnya ia memberi pertimbangan, bahwa: "the term "Indian Archipelago" by which our group of islands is generally known, cannot supply a concise and appropriate term for the native inhabitants (Istilah kepulauan Hindia yang telah dikenal umum sebagai kelompok pulau-pulau, tidak memberikan pengertian tepat dan jelas bagi penduduk pribumi).

Kata-kata *a concise and appropriate term* tersebut digarisbawahi oleh penulis tak bernama dalam majalah *Indonesia Merdeka* tersebut. Tetapi Earl lebih suka kepada pemakaian istilah *Melayu-nesians*, oleh karena istilah *Indu-nesians* terlalu luas, karena termasuk di dalamnya yalah penduduk Sailan, kepulauan Maladiva dan Lakadiva.

Sebelum karangan tersebut, A. Bastian dianggap sebagai pencipta kata Indonesia. Sekarangpun masih terdapat kesalahan itu pada buku-buku pelajaran ilmu-bumi dan bangsa-bangsa pada sekolah menengah kita.

Sebenarnya Bastian memakai kata *Indonesien* dan itupun hanya terdapat pada judul bukunya *Indonesien oder die Inseln des malayischen Archipels* (1884),[105] tigapuluh empat tahun sesudah karangan J.R. Logan tersebut diatas. Yang dimaksud oleh Bastian dengan kata itu tidak lain yalah kepulauan Melayu (Hindia). Semenjak itulah istilah itu terpakai didalam ilmu ethnologi, hukum adat dan ilmu bahasa. Dalam hubungan ini besarlah jasa guru-guru besar Universitas Leiden, seperti R.A. Kern, Snouck Hurgronje, van Vollenhoven dan lain-lain yang menyebarluaskan pemakaian kata *Indonesië-Indonesiër-Indonesisch* di dalam karya mereka. Sudah barang tentu para pelajar Indonesia di Nederland, yang tergabung dalam PI, mengetahui tentang istilah-istilah itu.

Sejak awal pergerakan nasional terasa keperluan memakai sesuatu kata untuk menunjukkan tujuan pokok pergerakan. Perkumpulan-perkumpulan yang bercorak kedaerahan pada mulanya tak merasa perlu untuk mencari kata pemersatu itu. Tetapi sekali perkumpulan itu mengatasi batas-batass kedaerahan, maka menjadilah masalah untuk mencari nama organisasinya.

Demikianlah dapat dicatat, tatkala para mahasiswa di Nederland pada tahun 1908 akan mendirikan perkumpulannya,

---

105 Koentjaraningrat, *Metode-Metode Antropologi Dalam Penjelidikan Masjarakat dan Kebudajaan di Indonesia*. Djakarta, 1958.

R.M. Notosuroto mengusulkan nama Boedi Oetomo cabang Nederland. Tetapi hal itu ditolak oleh dokter Apituley dari Maluku, karena para mahasiswa tidak semua berasal dari Jawa.[106] Ditetapkanlah kemudian nama *Indische Vereeniging*. Orang-orang Indo di Indonesia, menamakan organisasinya *Insulinde*, yang telah dipakai oleh Multatuli dalam abad 19. Tatkala mereka mendirikan partai bersama dengan penduduk pribumi, maka partainya bernama *De Indische Partij*, sedangkan konsep kewarganegaraannya yalah *Indiers* atau kaum Hindia.

Sebagai istilah pengetahuan, nama Indonesia makin populer dipakai, disamping istilah Nusantara. Sebuah biro pers di didirikan di Nederland oleh Suwardi Surjaningrat (Ki Hadjar Dewantara) pada tahun 1913, bernama *Indonesisch Persbureau*.[107] Dr. Ratulangi diberitakan mendirikan kantor asuransi di Bandung pada tahun duapuluhan dengan nama *Assurantie Indonesia*.[108] Nusantara juga banyak dipakai, antara lain oleh Ki Hadjar Dewantara, Sanusi Pane dan lain-lain.

Dari semua itu, maka Perhimpunan Indonesialah yang melantingkan kata Indonesia didalam pengertian politik-ketatanegaraan. Perumusannya tertuang dalam artikel pengarang tak bernama tersebut diatas dengan singkat dan jelas: "Indonesia sama artinya dengan *Nederlandsch-Indie*, sebagai pengertian ketata-negaraan bagi negara Indonesia yang akan datang. Indonesia tidak hanya berarti telah tercapainya tujuan, tetapi kesatuan, kekuasaan untuk mewujudkan diri sendiri!"

Sambutan daripada propaganda PI di Nederland yalah berdirinya Partai Nasional Indonesia (1927) di Bandung dan juga lahirnya Perhimpunan Pemuda Pelajar Indonesia (PPPI) di Jakarta, yang terdiri dari pelajar-pelajar Sekolah Tinggi Hukum dan Sekolah Tinggi Kedokteran. Berhubung dengan berdirinya PPPI itu, Petrus Blumberger (1931) mencatat:"PPPI berusaha untuk sedikit banyak mengisi tempat PI di Nederland dan dalam majalahnya *Indonesia Raja* mempropagandakan usaha ke arah

---

106 Dalam *Soembangsih* (1918), Noto Soeroto telah melepaskan gagasannya dan mengenai penamaan mahasiswa-mahasiswa dari Hindia Belanda ia mengusulkan sebagai "Indonesiers".

107 K.H. Dewantara: *Dari Kebangunan Nasional sampai Proklamasi Kemerdekaan*, Djakarta, 1952.

108 W.S.T. Pondaag, *Pahlawan Kemerdekaan Nasional Mahaputra Dr. G.S.S. Ratu-'angi*, Surabaya,1966.

Indonesia Raya yang merdeka". Atas prakarsa PPPI itulah diadakan Kongres II Pemuda Indonesia, yang pada tanggal 28 Oktober 1928 menyatakan kebutalatan tekadnya dengan "Sumpah Pemuda" yang terkenal itu.

Masadepan Indonesia Merdeka juga menjadi perspektif para gurubesar Belanda pada Perguruan Tinggi Hukum di Jakarta. Pandangan mereka itu akan disebarluaskan melalui majalah *De Stuw*. [109] Tetapi pada masa Gubernur Jenderal de Jonge, majalah dan kelompok yang menerbitkan majalah itu mengundurkan diri dengan sukarela dari panggung sejarah. Alasannya antara lain untuk tidak membahayakan masadepan anggota-anggota dan penyumbang-penyumbang karangan yang masih muda dan belum mempunyai kedudukan pasti di dalam masyarakat. Prof. Resink mengungkapkan, bahwa adanya pembedaan marginal dari satu huruf saja antara istilah ilmiah "Indonesie" dan istilah politik "Indonesia" dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan tatkala itu. [110]

Masa krisis sejak tahun 1930 tidak mengurangi usaha-usaha pemakaian kata Indonesia dalam arti politik kenegaraan itu. Di dalam *Volksraad* (Dewan Rakyat), *Fraksi Nasional* dibawah pimpinan Moh. Husni Thamrin mengumumkan akan mempergunakan bahasa Indonesia di dalam sidang-sidang. Maksud Fraksi itu telah mendapatkan perhatian *Raad van Indie* (Dewan Penasehat Gubernur Jenderal), yang dalam suratnya (1 Juli 1938) [111] kepada Gubernur Jenderal memperingatkan, bahwa maksud Thamrin akan menimbulkan kesulitan-kesulitan politik, yang dapat menjurus ke arah keadaan gawat. Penggunaan bahasa Indonesia (dalam teks surat tertentu tertulis *het Maleis)*, karena sifatnya menurut *Raad van Indie* akan mempunyai arti propaganda bagi pergerakan nasional dan hal itu akan merupakan langkah pertama kearah penggunaan bahasa itu secara luas didalam *Volksraad*.

Pidato-pidato yang diucapkan dalam bahasa Indonesia secara harfiah akan mendapat tempat di dalam pers Indonesia. Sulitlah bagi ketua *Volksraad* (orang Belanda) untuk mengontrol

---

109 E.R. Locher – Scholten, "De Stuw, tijdarehening en tekens des tijds", *Tijdschrift voor Geschiedenis*, 84e jrg. of, 3, 1971 hal. 36 dst.

110 G.J. Resink: *Indonesia's History between the Myths. Essays in Legal History and Historical Theory*. W. van Hoeve Publishers Ltd – the Hague, 1968.

111 S.L. Van der Wal, *op.cit.*

pernyataan-pernyataan dan pandangan-pandangan politik yang tidak disukai di dalam pidato-pidato *Volksraad* itu. Aksi-aksi Fraksi Nasional itu berkaitan dengan keputusan-keputusan Kongres Bahasa Indonesia di Surakarta pada tanggal 1 Juni 1938, k.l. 10 tahun setelah Sumpah Pemuda di Jakarta.

Dari usul penggunaan bahasa Indonesia, anggota-anggota Indonesia didalam *Volksraad* meningkatkan aksinya berupa mosi-mosi ketatanegaraan, yang terkenal dengan mosi-Wiwoho, mosi-Sutardjo dan mosi-Thamrin. Pada pokoknya didalam ketiga mosi itu tercantum perlunya perubahan ketatanegaraan dan adanya kewarganegaraan Hindia *(Indisch Burgerschap)*. Didalam mosi-Thamrin jelas diusulkan agar kata-kata *Nederlandsch-Indie* dan *Inlander* dihapuskan dari semua undang-undang, peraturan-peraturan dan diganti dengan *Indonesië*, *Indonesiër* dan *Indonesisch*. Ini terjadi dalam tahun 1940. Sudah barang tentu pemerintah Hindia Belanda tidak dapat menyetujui itu, bahkan memberitahukan, bahwa sidang *Volksraad* tidak bisa membicarakan usul-usul yang bermaksud menuju Indonesia Merdeka.

Dalam pada itu, perang di Eropa telah melanda Nederland disusul dengan Perang Pasifik. Barulah setelah meletusnya Revolusi Agustus 1945, istilah Indonesia resmi mendapat arti politik-kenegaraan, baik secara nasional maupun internasional. Perjuangan pengesahan nama Indonesia merupakan satu segi yang penting dan menarik didalam sejarah Pergerakan Nasional.

C. PERKEMBANGAN PERS INDONESIA

1. Perkembangan Awal : Pers Daerah Dan Bahasa Melayu

Dalam sebuah uraian awal tentang pers di Indonesia pada tahun 1909, E.F.E. Douwes Dekker (dikemudian hari lebih dikenal sebagai Dr. Danudirdja Setyabuddhi, yang waktu itu menjadi editor-pembantu suratkabar *Bataaviaasch Niewsblad* di Jakarta, telah menilai kedudukan pers berbahasa Melayu lebih penting daripada pers Belanda. Karena pers itu langsung dapat menarik pembaca-pembaca pribumi.

Dalam waktu yang singkat pers itu dapat meluas ke segala arah, sungguhpun kecepatan perkembangan di pengaruhi oleh pers Belanda dan Melayu-Tionghoa di Indonesia. Pers Belanda itu

sendiri telah pula mengalami perjuangan yang panjang untuk tercapainya kebebasan pers.

Perkembangan pers bumiputra atau yang berbahasa Melayu menimbulkan pemikiran di kalangan pemerintah kolonial untuk menerbitkan sendiri suratkabar berbahasa Melayu yang cukup besar dan dengan sumber-sumber pemberitaan yang baik. Ciri-ciri pers berbahasa Melayu yalah lingkungan pembacanya yang dituju atau yang menjadi langganan.

Pertama, suratkabar yang berisi berita atau karangan yang jelas hanya untuk golongan keturunan Cina, seperti terjadi dengan suratkabar yang terbit di Jakarta, Surabaya dan beberapa yang terbit di Semarang.

Kedua, suratkabar berbahasa Melayu, yang dibiayai dan dikerjakan oleh orang-orang Cina, namun lingkungan pembacanya terutama yalah penduduk bumiputra.

Ketiga, surat-kabar yang terutama dibaca oleh kedua golongan itu.

Menurut Douwes Dekker, secara kronologis suratkabar berbahasa Melayu yang tertua yalah *Bintang Soerabaja* (1861). Isinya selalu menentang pemerintah dan berpengaruh di kalangan orang-orang Cina dari partai modern di Jawa Timur. Lain suratkabar di Surabaya yang senada yalah *Pewarta Soerabaja* (1902), pembacanya terbanyak yalah golongan Cina. Pemimpin redaksi kedua suratkabar itu masing-masing yalah Courant dan H. Hommer.

Dalam pada itu salahsatu suratkabar yang terpenting yalah *Kabar Perniagaan*, yang didirikan oleh perusahaan Cina di Jakarta pada tahun 1902. Redaksinya yalah seorang Indonesia dan seorang Cina, yaitu F.D.J. Pangemanan dan Gow Peng Liang. Suratkabar itu mungkin sekali pembacanya tersebar luas di seluruh Jawa dan menyuarakan cita-cita gerakan Cina modern. Di Bogor juga terbit mingguan oposisi *Ho Po* di bawah pimpinan Tan Tjien Kie.

Pelopor pers nasional yalah *Medan Prijaji* (waktu itu terbit sebagai mingguan), yang sesuai dengan namanya merupakan suara golongan priyayi. Pemimpin redaksinya yalah R.M. Tirtoadisuryo. Terbit pada tahun 1907 dan sejak tahun 1910 sebagai harian.

Suratkabar yang penting di Semarang yalah *Warna Warta* dibawah Pimpinan J.P.H. Pangemanan . Karena seringnya me-

nyerang pemerintah, maka redakturnya beberapa kali diadili karena tulisan-tulisannya.

Di Sumatra Barat suratkabar-suratkabar yang terkemuka yalah *Sinar Soematra* dibawah redaksi Lim Soen Hin, *Tjahaja Soematra* (1897) dengan redaksi R. Datoek Soetan Maharadja, *Pemberita Aceh* dibawah pimpinan Dja Endar Moeda. Yang keempat yalah suratkabar *Pertja Barat*, yang dipimpin oleh Soetan Negeri. Keempat suratkabar itu dikenal sebagai progresif, sungguhpun masih banyak lagi suratkabar lainnya dalam bahasa Melayu. Tetapi yang terakhir itu tidak dianggap mengganggu penguasa.

Di Jakarta menjelang abad ke-20 terbitt *Taman Sari*(1898) di bawah F. Wiggers,*Pemberita Betawi* (1874) dipimpin oleh J. Hendriks. Di Bandung Raden Ngabehi Tjitro Adiwinoto sejak tahun 1894 memimpin *Pewarta Hindia*, sedangkan di Semarang *Bintang Pagi* (1907) dan *Sinar Djawa* (1899) masing-masing dipimpin oleh The Mo Hoat dan Sie Hiang Ling. *Bintang Pagi* terutama populer dikalangan Cina modern karena oposisinya yang keras terhadap pemerintahan Manchu.

Sebuah penerbitan yang khusus ditujukan kepada kaum wanita yalah *Poetri Hindia* (1907) dipimpin oleh R. Tirtokoesoemo. Juga *Soeloeh Keadilan* dan Soeloeh Pengajar terbit di Jakarta dengan pimpinan Raden Sosro Danoekoesoemo.

Di Bogor sejak tahun 1905 terbit mingguan *Tiong Hoa Wie Sin Ho* dibawah pimpinan Tan Soei Bing. Di Surakarta terbit *Taman Pewarta* 1901) dengan Thjie Sian Ling dan mingguan Cina-Melayu *Ik Po* (1904) di bawah redaksi Tan Soe Djwan. Surat kabar berbahasa Djawa-Melayu *Djawi-Hisworo* (1905) dipimpin oleh Dirdjoatmodjo. Semarang memiliki surat kabar *Slompret Melayoe* dipimpin oleh A. Appel, dan *Taman Pengajar* yang dipimpin oleh seorang guru, Mas Boediardjo. Raden Djojosoediro memimpin *Tjahaja Timoer* (1907) di Malang. Sutan Raja Nan Gadang memimpin *Warta Brita* di Padang, sedangkan di Sibolga Lim Boen Sian memimpin *Bintang Pasir* (1907). di Menado J.A. Worotikan memimpin *Pewarta Menado*, sedangkan di Banjarmasin muncul *Pewarta Borneo* dengan seorang Indo-Belanda M. Neys sebagai redaktur.

Selain itu ada suratkabar yang dikenal membawa suara pemerintah dalam bahasa Melayu. Dua terbit di Jakarta, yaitu *Pancaran Warta* (1901) dengan P. Salomons sebagai pemimpin

redaksi dan *Bentara Hindia* (1901), yang diterbitkan oleh gereja dengan seorang pendeta sebagai pemimpinnya. Sebuah lagi terbit di Makasar, yaitu *Sinar Matahari.*

Demikianlah garisbesar perkembangan awal pers berbahasa Melayu antara tahun 1861 – 1907 seperti diuraikan oleh Douwes Dekker. Bila disimpulkan dalam angka, maka dapat disusun tabel seperti berikut:

Kota	Jumlah	Redaktur	
Surabaya	2	Belanda	2
Jakarta	8	Belanda	4
		Cina	1
		Indonesia	3
Semarang	5	Belanda	1
		Cina	3
		Indonesia	1
Surakarta	3	Belanda	–
		Cina	2
		Indonesia	1
Bogor	3	Belanda	–
		Cina	2
		Indonesia	1
Bandung	2	Belanda	–
		Cina	–
		Indonesia	2
Malang	1	Indonesia	1
Padang	5	Belanda	–
		Cina	1
		Indonesia	4
Sibolga	1	Cina	1
Banjarmasin	1	Belanda (Indo)	1
Makasar	1	tak jelas	
Menado	1	Indonesia	1
12 kota di Indonesia	33	Belanda	8
		Cina	10
		Indonesia	14
		tak jelas	1

Beberapa tahun sebelum *Bintang Soerabaja* sebenarnya telah ada usaha-usaha untuk menerbitkan suratkabar bagi penduduk

pribumi. Yang pertama yalah suratkabar *Bromartani* (1855), mingguan dalam bahasa Jawa, terbit di Surakarta. Kemudian menyusul *Soerat Kabar Bahasa Melaijoe* (1856), mingguan di Surabaya. Yang ketiga ialah *Soerat Chabar Betawie* (1858) di Jakarta.

Sebelum terbit secara teratur, maka *Bromartani* lebih dulu menerbitkan nomor-nomor contoh sebagai perkenalan dan ajakan kepada pembaca agar suka berlangganan dan memasang iklan. Usia suratkabar yang pertama itu tidak panjang, karena tidak dapat menutup ongkos, sungguhpun tercatat langganan sejumlah 350 orang.

Delapan tahun setelah matinya *Bromartani* terbitlah *Djoeroemartani* (1865), yang kemudian atas permintaan Susuhunan Paku Buwono IX diganti namanyaa dengan *Bromartani* lagi pada tahun 1871. Selama hidupnya sampai tahun 1932, redaktur *Bromartani* berganti sampai empat kali, mula-mula dipimpin oleh Jurubahasa F.W. Winter dan Ch. Moody kemudian Soedarmanto dan Raden Hardjopoespito (1925). Sampai akhir hidupnya nama redakturnya tak disebutkan, meskipun namanya diketahui yaitu Raden Ngabei Tjondropradoto. [112]

Mengenai *Bromartani* ini Rinkes pada tahun 1912 mengatakan: "Dalam tahun-tahun akhir ini suratkabar itu menjadi suratkabar kraton.... yang berisi berita tentang pengangkatan dan pemindahan pegawai-pegawai kraton, dari orang-orang magang yang bergaji f 2.50 sampai pegawai tinggi yang bergaji f 600,– sebulan, dan kecuali berisi berita-berita lokal, juga berisi berita-berita "luar negeri", berita dari daerah luar kerajaan. Berita lainnya yalah mengenai berita keluarga kraton..... Pada umumnya kesan mengenai suratkabar ini yalah loyaal terhadap pemerintah....."

Suratkabar yang lebih baik yalah *Djawi Kanda* dan *Djawi Hiswara* yang secara bergantian hari terbit di Surakarta, di bawah redaksi dan penerbit yang sama. Meskipun dikatakan oleh Rinkes, bahwa redaktur, wartawan dan korektornya terdiri dari orang yang "kurang pendidikannya", namun berita-berita yang dimuat di situ menunjukkan perbedaan dengan Bromartani. Antara lain yang digemari yalah berita-berita tentang orang Eropa

---

112 Soedarjo Tjokrosisworo, *Kenangan Sekilas, Sedjarah Perdjuangan Pers Sebangsa*. SPS, Djakarta, 1958, hal. 139.

yang diadili karena perbuatannya yang kotor dan melanggar hukum atau peraturan-peraturan pemerintah. Lain daripada itu berita perang Turki–Italia, yang kebanyakan merupakan kutipan dari pers Belanda, dikutip dengan berat sebelah yang lebih banyak mengemukakan kekalahan-kekalahan yang diderita oleh pihak Italia. Di situlah kelihatan sikap reaksinya mengenai hubungan timur dan barat, di mana kekalahan barat dalam perang itu dapat merupakan berita kebanggaan, tanda kekuatan timur.

Soerat Kabar Bahasa Malaijoe ditujukan kepada "orang-orang yang suka membaca serta sebagai perantara pedagang-pedagang". Surat kabar itupun tidak berumur panjang, hanya tiga belas nomor. Yang perlu dicatat disini yalah pemakaian huruf Latin dan Jawi (huruf Arab berbahasa Melayu). Demikian juga *Soerat Chabar Betawie*, yang memberi penjelasan mengenai bahasa yang dipakai sebagai "bahasa yang tiada terlalu tinggi, tetapi tiada lagi terlalu rendah, supaya segala orang boleh mengerti, siapa juga yang mengerti bahasa Malaijoe, adanya". Bila ada satu karangan mengenai pengajaran, diharapkan memakai "bahasa Melaijoe tinggi", tetapi dengan memberi daftar kata-kata dalam "bahasa Melaijoe rendah", sebagai penjelasan kepada pembaca. Kedua suratkabar terakhir itu tidak menyebut nama-nama redakturnya.

Perkembangan surat-suratkabar di Indonesia itu kecuali dipengaruhi oleh pers Belanda juga adanya penerbit-penerbit dan percetakan-percetakan yang dimiliki orang-orang Belanda dan Cina di kota-kota terpenting. Keadaan itu merupakan indikator munculnya unsur-unsur perubahan masyarakat kota, terutama di Jawa. Hal itu barang tentu bertalian pula dengan makin berkembangnya ekonomi, terutama perdagangan yang memerlukan konsumen dan nasabah.

Mungkin sekali Raden Mas Tirtohadisoeryo adalah pengusaha pertama Indonesia yang bergerak di bidang penerbitan dan percetakan. Ia juga dianggap sebagai wartawan Indonesia yang pertama-tama menggunakan suratkabar sebagai alat untuk membentuk pendapat umum. Rupa dan andam (opmaak) suratkabar yang diterbitkan memberi kesan menyegarkan pada jaman itu, karena pemuatan karangan, wartaberita, pengumuman, iklan dan sebagainya disusun secara baru. Sebagai haluan suratkabar *Medan Prijaji* (1907) yang dipimpin tercantum dibawah judul dengan

huruf tebal "Organ boeat segala bangsa yang terprentah di H.O. (Hindia Olanda. *pen)* Tempat akan memboeka swaranya Anak-Hindia". Kota Bandung merupakan tempat lahirnya Medan Prijaji itu.

Kecuali *Medan Prijaji,* R.M. Tirtohadisoeryo juga menerbitkan *Soeloeh Keadilan,* yang pertama semula sebagai mingguan dan baru tiga tahun kemudian terbit sebagai harian sedangkan yang kedua sebagai bulanan. Sebelum mendirikan N.V. Medan Prijaji itu selama empat tahun Tirtohadisoeryo pernah bekerja pada suratkabar *Bintang Betawi,* dimana J. Kieffer adalah redaktur administratur dari firma Van Dorp & Co.

Ketika menulis buku kenang-kenangannya pada tahun 1952, Ki Hajar Dewantara mencatat tentang diri Tirtohadisoeryo sebagai berikut: "Kira-kira pada tahun berdirinya Boedi Oetomo ada seorang wartawan modern, yang menarik perhatian karena lancarnya dan tajamnya pena yang ia pegang. Yaitu almarhum R.M. Djokomono, kemudian bernama, Tirtohadisuryo, bekas murid Stovia yang waktu itu bekerja sebagai redaktur harian *Bintang Betawi* (yang kemudian bernama *Berita Betawi)* lalu memimpin *Medan Prijaji dan Soeloeh Pengadilan.* Beliau boleh disebut pelopor dalam lapangan journalistik".

Tokoh Tirtohadisoeryo ternyata mendapat tempat yang banyak pula dalam laporan-laporan pejabat-pejabat Hindia Belanda, terutama laporan Dr. Rinkes. Ini disebabkan, karena kemudian Tirtohadisoerjo memegang peranan pula dalam pembentukan Sarekat Dagang Islam di Surakarta bersama Haji Samanhudi, yang merupakan asal-mula Sarikat Islam yang kemudian ber'embang memancar diseluruh Indonesia. Anggaran Dasar SI yang pertama mendapat persetujuan Tirtohadisoerjo sebagai ketua Sarikat Islam di Bogor dan sebagai redaktur-redaktur suratkabar *Medan Prijaji* di Bandung.

Hanya lima tahun *Medan Prijaji* dapat terbit dan dalam masa jayanya antara tahun 1910 – 1912 dapat mencapai oplaag hingga 2.000, suatu jumlah yang untuk suratkabar Belanda sendiri tatkala itu sudah termasuk besar. Karena karangan-karangannya yang tajam terhadap penguasa, maka Tirtohadisoerjo pernah dibuang ke Lampung. Tetapi dari tempat pembuangan itupun ia masih terus menulis karangan-karangan yang bercorak membela nasib rakyat kecil serta melawan praktek yang buruk dari pemerintah setempat.

SURATKABAR YANG DISEBUT DI DALAM KARANGAN KARANGAN AWAL TENTANG PERS DI INDONESIA

Nama	Kota	1	2	3	4	5	6
Bintang Soerabaja	Surabaya	x		x		x	
Pewarta Soerabaja	Surabaya	x			x		
Kabar Perniagaan	Jakarta	x	x	x	x		
Ho Po	Bogor	x					
Medan Prijaji	Bandung	x	x	x			x
Warna Warta	Semarang	x		x	x	x	
Sinar Soematra	Padang	x				x	x
Tjahaja Soematra	Padang	x		x		x	
Pemberita Atjeh	Kotaradja	x					
Pertja Barat	Padang	x	x	x		x	
Pemberita Betawi	Jakarta	x		x		x	
Taman Sari	Jakarta	x			x		
Pewarta Hindia	Bandung	x	x				
Bintang Pagi	Semarang	x					
Sinar Djawa	Semarang	x	x		x		
Bintang Pagi	Semarang	x					
Poetri Hindia	Jakarta	x	x				
Soeloeh Keadilan	Jakarta	x	x				
Soeloeh Pengajar	Jakarta	x					
Tiong Hoa Wie Sin Ho	Bogor	x	x				
Taman Pewarta	Surakarta	x	x				
Ik Po	Surakarta	x					
Djawi Hiswono	Surakarta	x	x				x
Slompret Melajoe	Semarang	x		x			x
Taman Pengajar	Semarang	x					
Tjahaja Timoer	Malang	x		x		x	
Warta Brita	Padang	x					
Bintang Pasir	Sibolga	x					
Pewarta Menado	Menado	x					
Pewarta Borneo	Banjarmasin	x					
Pantjaran Warta	Jakarta	x	x	x			
Bentara Hindia	Jakarta	x					
Sinar Matahari	Makasar	x					
Pertja Timor	Deli	x					x
Bendera Wolanda			x				

	Nama	Kota	1	2	3	4	5	6
	Bintang Mataram						x	
	Darmo Kondo			x	x	x		x
	Oetoesan Hindia				x			
	Saroetomo				x		x	
	Kaoem Moeda	Bandung			x	x		x
	Djawa Tengah	Semarag			x	x		
	Wasito Swara				x			
	Goentoer Bergerak				x			
1855	*Bromartani*			x				
	Djawi Kanda			x				
	Oetoesan Melajoe	Padang		x		x		
	Goeroe Desa			x				
	Tjahaja Hindia			x				
	Boedi Oetomo			x		x		
	Al Moenir	Padang		x				
	Pewarta S.S.			x				
	Pewarta Pegadean			x				
	Soeara Pegadean				x			
	Soeloeh Pengadilan				x			
	Sinar Pasoendan				x			
1842	*Bianglala*	Jakarta					x	x
1858 –1872	*Bianglala*	Jakarta					x	x
1856	*Soerat Kabar Bahasa Melajoe*	Surabaya					x	x
1862	*Bintang Timoer*	Surabaya					x	x
1869	*Matahari*	Jakarta					x	x
1869	*Bintang Barat*	Jakarta					x	x
1864	*Djoeroemartani*	Surakarta						x
1879	*Darmowarsito*	Surakarta						x
1895	*Retnodoemilah*	Surakarta						x
	Djawi Kanda	Surakarta						x
1873	*Bintang Djohar*						x	x
1869	*Tjahaja Siang*	Menado					x	x
	Pelita Andalas							x
	Pemberita Makasar	Makasar					x	x
	Doenia Bergerak							x
	Medan Bergerak							x

	Nama	Kota	1	2	3	4	5	6
	Padjadjaran (b. Sunda)							x
	Modjopahit							x
	Sri Diponegoro							x
	Sri Mataram							x
	Soeara Merdeka	Surabaya						x
	Soeara Ra'jat							x
1920	*Soeara Bekelai*							x
1869 – 1871	*Insulinde*						x	
1872 – 1893	*Hindia Nederland*						x	
1881 – 1896	*Pemberita Bahroe*						x	
1882 – 1887	*Tjahaja India*						x	
1883 – 1884	*Tjahaja Moelia*						x	
1878 – 1879	*Wazier India*						x	
1885	*Tjaraka Wolanda*						x	
1885	*Dinihari*						x	
1899 – 1901	*Penghentar*						x	
1900 – 1901	*Primbon Soerabaja*						x	
1888	*Sinar Terang*						x	
1893 – 1906	*Bintang Betawi*						x	
	Sin Po	Jakarta					x	
	Neratja	Jakarta					x	
	Bintang Hindia	Jakarta					x	
	Pantji Poestaka	Jakarta					x	
	Matahari	Bandung					x	
	Kemadjoean Hindia	Bandung					x	
	Palito	Surabaya					x	
	Inter Ocean	Surabaya					x	
	Medan Moeslimin	Surakarta					x	
	Bintang Islam	Surakarta					x	
	Panggoegah	Yogyakarta					x	
	Soeropati	Sukabumi					x	
	Djaman Kwari	Garut					x	
	Halilintar	Pontianak					x	
	Persatoean	Banjarmasin					x	
	Warta Hindia	Padang					x	
	Dunia Achirat	Bukittinggi					x	
	Pemandangan Islam	Padang Panjang					x	

Nama	Kota	1	2	3	4	5	6
Soeara Batak	Tarutung						x
Benih Timoer	Medan						x
Pantjaran Berita	Medan						x
Pewarta Deli	Medan						x
Andalas.	Medan						x

Catatan :
1) Douwes Dekker 1909 – 34 sk.
2) Cabaton 1909 – 22 sk.
3) Rinkes 1912 – 20 sk.
4) Later 1915 – 8 sk.
5) Harahap 1924 – 56 sk.
S.M. Zwemer
6) Drewes 1934 – 29 sk.

2. *Pers Pembawa Suara Organisasi Politik*

Perkembangan pers berbahasa daerah atau Melayu, yang dinilai oleh Douwes Dekker dalam awal karangan ini menduduki tempat yang lebih penting daripada pers Eropa, dan terutama setelah berdirinya organisasi seperti Boedi Oetomo, Sarekat Islam dan *Indische Partij* menimbulkan pemikiran di kalangan pemerintah Hindia Belanda untuk menetralisasi pengaruh pers bumiputra itu. Jalan yang ditunjukkan Dr. Rinkes yalah dengan mendirikan suratkabar berbahasa Melayu oleh pemerintah sendiri serta memberikan bantuan kepada suratkabar yang dinilai lunak dalam pemberitaannya.

Berdirinya Boedi Oetomo di Jakarta pada tanggal 20 Mei 1908 dan persiapan-persiapan kongresnya yang pertama, yang akan diadakan pada awal Oktober tahun itu juga mendapat tempat dalam pers Belanda dan Melayu. Surat edaranyapun dimuat dalam suratkabar *De Locomotief* dan *Bataviaasch Nieuwsblad*, demikian juga dalam majalah *Jong Indië*. Memang sejak kelahirannya, organisasi pertama ini memperhatikan pentingnya penerbitan dan surat-kabar sebagai penyambung suara organisasi. Sesuai dengan sikap Boedi Oetomo pada awal pertumbuhannya sejak golongan tua menjadi pemimpin-pemimpinnya, maka suratkabarnyapun bercorak lunak, namun satu segi yang menarik yalah kesadaran redakturnya menulis dan memberitakan yang penting bagi kemajuan dan kesejahteraan. Pentingnya suratkabar berbahasa Melayu terbukti juga dari ikhtisar-ikhtisar yang muncul dalam majalah dan suratkabar Belanda, seperti *Tropisch Nederland, Koloniaal Tijdschrift* dan *Java Bode*.

Semenjak berdirinya Sarekat Islam, nampak adanya penerbitan baru suratkabar, diantaranya ada yang menonjol dan ada pula yang kurang berarti. Juga beberapa terbit di luar pulau Jawa. Mula-mula *Darmo Kondo*, merupakan suratkabar yang utama di Jawa, tetapi setelah berdirinya SI, di Surabaya terbit *Oetoesan Hindia* yang isinya lebih hidup dan kuat condong "ke kiri". *Darmo Kondo* sendiri tetap tenang dan kurang menunjukkan kepekaannya mengenai tanda-tanda zaman, meskipun lingkungan pembacanya cukup besar. *Darmo Kondo* sebelum tahun 1910 dimiliki dan dicetak oleh seorang keturunan Cina, Tah Tjoe Kwan dan redaksi ada ditangan Tjhie Siang Ling, yang diketahui

mahir didalam soal sastra Jawa. Sejak itu dibeli oleh Boedi Oetomo cabang Surakarta dengan modal f. 50.000,–

Oetoesan Hindia lahir setelah SI mengadakan kongresnya yang pertama di Surabaya, 26 Januari 1913 di bawah pimpinan Tjokroaminoto, Sosrobroto serta Tirtodanudjo. Tirtodanudjo merupakan penulis yang tajam menarik perhatian umum, demikian juga karangan seorang bernama Samsi dari Semarang. Kedua-duanya merupakan pemegang rekor delik pers dan sering kali berurusan dengan pihak pengadilan. Tjokroaminoto sendiri mengimbangi dengan tulisan-tulisan yang tinggi mutunya dengan nada yang tenang, juga bila dia menulis untuk menangkis serangan-serangan yang ditujukan kepadanya. Selama tigabelas tahun *Oetoesan Hindia* isinya mencerminkan dunia pergerakan, politik, ekonomi dan perburuhan, khusus yang dipimpin oleh Central Sarekat Islam. Karangan para pemimpin Indonesia lainnya muncul dan mengisi suratkabar itu serta merupakan perhatian pembaca. Singkatan nama-nama mereka O.S.Tj. (Oemar Said Tjokroaminoto), A.M. (Abdul Muis). H.A.S. (Haji Agus Salim), Tj.Mk. (Tjipto Mangunkusumo), A.P. (Alimin Prawirohardjo), A.H.W. (Wignjadisastra) dan Surjopranoto silih berganti mengisi suratkabar itu, yang pengaruhnya sering nampak di suratkabar yang terbit di kepulauan lain.

Namun kelemahan suratkabar bumiputra yalah kurangnya pemasang iklan, sehingga dengan uang langganan saja tidak cukup untuk dapat bertahan. Ditambah lagi banyak perkara SI mengurangi ketekunan pengurusnya untuk tetap memikirkan kelangsungan suratkabarnya, dan setelah Tjokroaminoto terkena perkara politik sehingga ia dijatuhi hukuman dan perpecahan di dalam tubuh SI sendiri tak terhindarkan lagi, maka *Oetoesan Hindia* tutup usia pada triwulan pertama tahun 1923.

Suratkabar SI lainnya yalah *Sinar Djawa* di Semarang, *Pantjaran Warta* di Betawi dan *Saroetomo* di Surakarta. Yang terakhir itu adalah suratkabar "asli" Sarekat Islam sejak kelahiran organisasi itu pada bulan Agustus 1912. Mula-mula *Saroetomo* merupakan suratkabar yang kurang berarti, tetapi berangsur-angsur nampak pengaruh *Oetoesan Hindia,* sehingga makin bermutu. Terutama dengan muncul Mas Marco Dikromo, seorang berasal dari Bodjonegoro, yang waktu itu baru berumur 23 tahun, maka karangan-karangannya mewakili gaya-tulis tersen-

diri. [113] Terkenal dalam hubungan ini yalah komentar Mas Marco mengenai cara kerja *Mindere Welvaarts Commissie* (Komisi untuk menyelidiki sebab-sebab kemunduran kemakmuran rakjat bumiputra), sehingga menimbulkan heboh besar. Setelah tulisan-tulisannya mendapat halangan di dalam *Saroetomo*, terutama karena campurtangan pemerintah, maka ia mendirikan suratkabar sendiri bernama *Doenia Bergerak*.. Meskipun suratkabar itu disebutkan sebagai usaha sendiri dari *Inlandsche Journalisten Bond* (Perserikatan Jusnalis Bumiputra), namun pihak pemerintah sendiri menduga, bahwa kelangsungan suratkabar itu terutama karena mendapat bantuan dari bekas pendukung *Indische Partij* serta diduga Suwardi Suryaningrat yang sedang dibuang ke Nederland sering pula menulis disitu.

Tjaja Timoer di Malang dan juga *Kaoem Moeda* di Bandung, masing-masing dengan redaktur Raden Djojosoediro dan Abdul Muis menunjukkan kecondongannya kepada *Indische Partij* dan makin lama makin baik mutunya. Tentang *Indische Partij*,. meskipun partai itu pendek usianya, tetapi usaha penerbitan dari pendirinya, yaitu berupa majalah dua mingguan *Het Tijdschrift* dan suratkabar *De Expres*, penting artinya dalam rangkaian perkembangan pers nasionalis. Majalah itu merupakan persiapan terbitnya suratkabar harian yang terbit untuk pertama kali pada tanggal 1 Maret 1912, yaitu *De Expres*, jadi beberapa bulan sebelum *Indische Partij* resmi berdir' pada tanggal 12 Desember 1912. Baik di dalam *Het Tijdschrift* maupun *De Expres* terdapat karangan-karangan Douwes Dekker, yang dengan kemahiran pena, kecerdasan otak dan semangatnya serta tujuan politiknya membuat kedua media pers itu merupakan contoh dari beberapa suratkabar bumiputra. Perjalanan propagandanyapun mendapatkan tempat di dalam suratkabar itu, yang sudah barang tentu diikuti dengan seksama oleh para pemimpin pergerakan yang pandai membaca dalam bahasa Belanda. Meskipun majalah dan suratkabar itu terbit dalam bahasa Belanda, namun isinya, terutama yang berhubungan dengan masadepan Hindia Belanda, jelas merupakan pokok-pokok pikiran yang ternyata kemudian merupakan landasan kesatuan dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Karangan-karangan Dr. Tjipto Mangunkusumo di-

[113] S.L. van der Wal, *op.cit.*, hal. 379.

dalam *Het Tidschrift* dianggap bernilai tinggi dan mampu membawa pemikiran yang kritis, tenang dan terarah para pembacanya.

Setelah pembuangan ketiga pemimpin *'Indische Partij*, ke Nederland, maka dua diantara mereka masih dapat menerbitkan dua majalah dalam bahasa Belanda. Tjipto Mangunkusumo dengan majalah *'De Indiër:* (1913 – 1914) dan R.M. Suwardi Surjaningrat dengan majalah *Hindia Poetra* (1916) berhasil dalam mempertahankan arah perjuangan mereka.

Abdul Muis umpamanya menaruh minat kepada *Hindia Poetra* dan mengusulkan agar terbit juga dalam bahasa Melayu (baca bahasa Indonesia), agar isinya dapat sampai ke pembaca bumiputra. Lahirnya PKI pada tahun 1920 menambah jumlah suratkabar partai.Terutama setelah partai itu menjalankan agitasi dan propaganda untuk membangkitkan kegelisahan sosial, maka pengaruhnya menjalar sampai ke tingkat lokal di seluruh pelosok tanah air. Golongan masyarakat yang selama itu terisolasi dari bacaan, kini mulai mendengar dan melihat media yang tidak sepenuhnya dipahami itu. Lambat laun kelihatan juga pengaruh pers lokal yang dikendalikan oleh PKI.

Pada akhir tahun 1926 tercatat lebih dari 20 penerbitan PKI, tersebar di kota-kota sebagai berikut:

Semarang	4	yaitu *Sinar Hindia, Soeara Ra'jat, Si Tetap; Barisan Moeda*
Surakarta	6	*Islam Bergerak (Ra'yat Bergerak), Medan Moeslimin, Persatoean Ra'jat. Senopati, Hobromarkoto, Mowo.*
Surabaya	1	*Proletar*
Yogyakarta	1	*Kromo Mardiko*
Bandung	4	*Matahari, Mataram, Soerapati, Titar*
Batavia	2	*Kijahi-Djagoer, Njala*
Pekalongan	1	*Sendjata Ra'jat*
Purwokerto	1	*Doenia Merdeka*
Padang	2	*Petir, Torpedo*
Padang Panjang	2	*Djago! Djago!, Pemandangan Islam*
Bukittinggi	1	*Doenia Achirat*
Solok	1	*Sasaran Ra'jat*
Sawahlunto	1	*Signal*
Langsa	2	*Oetoesan Ra'jat, Batterij*

Sibolga	1	*Persamaan*
Medan	1	*Goentoer*
Palembang	1	*Djam*
Pontianak	3	*Halilintar, Berani, Warta Borneo*
Makasar	1	*Pelita Ra'jat*
Ternate	1	*Bendera Merah*

Terutama bertalian dengan penerbitan Islam, maka seorang penulis mencatat pada tahun 1925. "Sejalan dengan kebangunan itu, maka seperti terjadi ditempat-tempat lain, pers berada di mana-mana, menunjukkan daya-usaha, waspada dan berpengaruh pada bidang kehidupan lain".

Dihubungkan dengan jumlah penduduk, Indonesia pada waktu itu (1920) mempunyai 50 juta penduduk. Di Jawa dan Madura terdapat 35.017.204 penduduk, Sumatra lebih dari 5.800.000 dan sisanya tersebar di kepulauan lain. Di Jawa saja terdapat 39.000 penduduk bumiputra yang telah beragama Kristen, orang Eropa ada 135.214 dan orang Cina 386.112.

Rapat *Zendings Bond*. di Yogya pada akhir Agustus 1922, memperkirakan jumlah penduduk Jawa yang pandai membaca bahasa Melayu kurang lebih 1.000.000, yaitu setengah juta dapat membaca bahasa Jawa, 400.000 membaca bahasa Jawa dan 200.000 bahasa Sunda. Huruf Latin telah mulai dikenal dan menggantikan huruf Jawi dan Jawa dalam percetakan buku dan majalah. Bahasa Belanda lebih dikenal oleh penduduk Jawa yang telah berpendidikan.

Mengalirnya buku-buku berbahasa Arab dan Mesir ke Sumatra Barat saja, pada tahun 1916 berharga fl. 10.000. Banyak buku standard, seperti dari Al-Ghazali, dijual dalam dua bahasa, Jawa-Arab, Melayu-Arab, Sunda-Arab dan seterusnya. Penyebaran buku-buku Islam terbukti juga dari terdapatnya kios-kios buku di banyak stasiun kereta api yang memperjual-belikan itu. Suratkabar merupakan saksi hidup tumbuhnya banyak organisasi, baik yang berdasarkan agama, nasional, sosial maupun ekonomi. Kegiatan penerbitan Islam terbukti juga berorientasi luas, ternyata dari adanya iklan menawarkan majalah dalam bahasa Perancis *Echos de l'Islam* (Paris) dan bahasa Inggris *The Muslim Standard* (London). Mas Marco diketahui juga membuat risalah *Pan Islamisme bahasa Melajoe.*

Cara pengiklanan yang khas ditempuh oleh penerbit Islam

Mardi Kantaka di Surakarta, dengan menempatkan daftar buku di belakang amplop untuk mengirimkan surat-surat, dimana terbukti juga terdapatnya kepustakaan dalam bahasa asing. Perdagangan buku Islam terutama berpusat di Surabaya dan Batavia. Namun terdapat juga di tempat ziarah seperti Gresik dan Demak, bahkan di kota kecil seperti Blora dijajakan buku cetakan India dengan penjual dari Bombay. Seorang pengamat juga melihat adanya buku-buku agama cetakan dari Istambul, Beirut, Mekah, bahkan dari Kazan (Rusia) yang diperdagangkan di pelbagai kota lain.

Menurut daftar yang dibuat oleh B. Schrieke, penasehat pemerintah urusan bumiputra, maka dari 107 suratkabar dan majalah, yang terbit sekitar tahun 1920 corak surat kabar/ majalah digolongkan menjadi nasional, liberal, radikal dan komunistis. Ada juga yang bercorak netral, politik dan perdagangan. Judul-judulnyapun menarik perhatian, banyak yang memakai kata "sinar", "Jong", "kebangoenan", "baroe" dan sebagainya.

Dari jumlah itu 16 buah diterbitkan di Weltevreden-Batavia, 10 buah masing-masing di Semarang dan Padang, 9 di Yogya, 7 di Sala, 5 masing-masing di Semarang, Surabaya dan Medan. Dengan adanya suratkabar Islam, yang beraneka ragam dan jumlah berada di tengah-tengah masa depresi dan krisis umum di dalam dunia persuratkabaran, merupakan pertanda bahwa Islam telah bangun.

Suatu usaha untuk mengimbangi keadaan itu yalah usaha pemerintah Hindia Belanda, untuk mengedarkan buku-buku netral (Golsdienstloos) sebanyak satu juta buku setahunnya, yang disebar di 1.700 perpustakaan cuma-cuma di seluruh Hindia Belanda. 608 judul tertera dalam katalogus di Balai Poestaka, yang dengan secara cermat menghindari kepustakaan kristen.

Bulanan *Sri Poestaka* yang diterbitkan Balai Pustaka berisi karangan-karangan tentang pendidikan, kesehatan dan pengetahuan populer. Bulanan itu mempunyai 3.500 langganan. Bulanan golongan kristen *Mardi* mengedarkan 45.000 buah.

Adanya penerbitan itu menunjukkan, bahwa di Indonesia itu sedang terjadi suatu evolusi yang bergerak cepat. Suratkabar telah menyatakan itu dengan nada yang cukup jelas. Proses-proses yang di Eropa terjadi berabad-abad, terjadi di situ dalam beberapa puluh tahun. Generasi yang satu dipisahkan dengan generasi lain oleh gelombang mental dan spirituil.

Dalam perjuangan mendatang untuk lebih banyak "cahaya"

lebih banyak kebebasan, untuk hidup lebih makmur, pers berada dimuka sebagai pusat perhatian dan sebagai pelopor. Media pers yang membawakan suara nasionalisme Indonesia yalah majalahnya para mahasiswa di Nederland, yang melantingkan kata Indonesia dalam kata-pengantar nomor pertama *Indonesia Merdeka* (IM) pada tahun 1924.

Corak IM dengan karangan-karangannya merupakan aksi untuk mencapai tujuan PI, terutama untuk memperkuat cita-cita kesatuan Bangsa Indonesia. Majalah itu terbit dalam dua bahasa, bahasa Belanda dan bahasa Indonesia. Terbitan bahasa Indonesia hanya lima nomor, kemudian terhenti. Redaksi dipegang oleh pimpinan PI para pengarangnya tidak dicantumkan, karena setelah dirundingkan dengan anggota pimpinan, maka karangan yang dimuat itu merupakan pendapat PI.

Dari bekas laporan pejabat pemerintah Belanda, setelah terjadi penggeledahan dan penyitaan dokumen-dokumen PI ternyata bahwa *Indonesia Merdeka* mencatat 280 langganan, 236 diantaranya berada di Indonesia sedang 44 orang lainnya tersebar di Nederland, Jerman, India, Mesir, Malaya dan Perancis. Perincian di Indonesia sendiri adalah sebagai berikut, di Aceh (3), Sumatra Utara (18), Sumatra Barat (37), Riau (1), Bengkulu (2), Sumatra Selatan (3), Jakarta (45), Jawa Barat (29), Jawa Tengah (68), Jawa Timur (21), Kalimantan (7) dan Sulawesi (2).

Penyebarannya dilakukan secara rahasia dan sebagai penyebarnya yalah Sudjadi, yang diangkat sebagai propagandis PI di Jakarta. Dengan segala cara ia berhasil menyebarkan IM kepada para langganan dan penganut gagasan PI. Dari sistim kartu langganan yang disita dari arsip PI itu ternyata angka-angka seperti tersebut di atas, suatu data yang langka mengenai jumlah dan penyebaran langganan suatu majalah. Dari daftar itu pula dapat kita ketahui lapisan sosial para langganan IM yang bermacam-macam, dari gurubesar sampai mahasiswa, dari pejabat Belanda dan Indonesia, kaum partikelir, redaksi suratkabar dan sebagainya.

Yang menyebabkan makin meluasnya paham PI sudah barang tentu yalah majalah dan suratkabar yang dimiliki oleh pergerakan nasional. Demikianlah meskipun PI secara resmi tak mempunyai cabang di Indonesia, namun melalui Sudjadi sebagai "unsur kerja" di Indonesia dan bekas anggota-anggota PI di beberapa kota, maka mata-rantai gagasan nasionalisme Indonesia

dan aksi-aksi untuk mencapai Indonesia Merdeka terdapat pula di Indonesia. Kelompok-kelompok setempat bekas anggota PI dengan koordinasi komite pusat yang terdiri dari Mr. Sartono, Iskaq, Sunario, Budiarto dan Sudjadi mempersiapkan suatu kongres nasional. Kongres nasional itu merupakan persiapan kearah terbentuknya sebuah partai kerakyatan, yang didasarkan atas azas-azas nasionalistis yang murni, yang akan bernama Sarekat Rakyat Nasional Indonesia. Pemberontakan PKI 1926 – 27 dan larangan kepada PKI sedikit menghambat persiapan pembentukan partai baru itu, tetapi pada bulan April telah diadakan rapat-rapat dan pada tanggal 4 Juli 1927 berdirilah PNI. Dari enam orang pendirinya, empat orang adalah bekas anggauta Perhimpunan Indonesia.

3. *Sebuah Pandangan Profesionil*

Dari sudut profesionil, M. Tabrani yang menulis dalam tahun 1929, telah memberikan gambaran tentang keadaan pers Indonesia. Dilihat dari penilaian mengenai mutu, tingkat pers Indonesia masih dianggap rendah. Tidak saja dilihat dari sudut redaksi tetapi juga dari sudut tehnis perdagangan. Tidak satupun suratkabar yang terbit ditunjang dengan kelengkapan tiga unsur penting, yaitu redaksi yang berwewenang, administrasi yang baik dan tenaga-tenaga percetakan yang terdidik. Kekurangan itu tidak sesuai dengan perkembangan masyarakat diluarnya, sehingga banyak langganan lari ke pers Belanda, karena beranggapan dapat memenuhi kebutuhan membaca berita-berita bermutu. Rubrik-rubrik dalam surat-kabar mengenai seni dan sastra, perdagangan dan pertanian, untuk wanita, ilmu dan tehnik tidak dijumpai disitu.

Untuk mengatasi kekurangan itu, Tabrani mengajukan seruan kepada kaum intelektuil Indonesia untuk mengisi suratkabar Indonesia, karena hanya dunia intelektuil Indonesia yang bertanggungjawab atas tinggi-rendahnya mutu suratkabar Indonesia. Masalah pers harus mendapat perhatian khusus, tanpa ada perbedaan aliran politik, keyakinan maupun agama.

Kaum dokter, ahli hukum, insinyur, seniman, ahli pertanian dan kehewanan, para pendidik diharapkan kesadarannya, bahwa dengan menulis didalam pers Indonesia berarti ikutserta dalam pendidikan nasional bagi penduduk. Baru sedikit diantara

mereka yang berhubungan dengan dunia pers, masih terbatas pada tokoh pemimpin Pergerakan Nasional.

Selain itu belum adanya golongan menengah yang sadar, tidak sedikit pula menghambat perkembangan pers. Advertensi dan reklame, yang dapat merupakan tulang-punggung sebuah suratkabar, kurang sekali terdapat. Para pelanggan banyak pula yang tidak setia membayar uang langganan. Lingkungan pembacanyapun terbatas, karena banyak yang telah bersekolah Belanda lebih suka membaca dalam bahasa itu.

Dilihat dari penilaian kwantitatif, maka jumlah suratkabar Indonesia sesungguhnya sedikit sekali bila dibandingkan dengan suratkabar Cina dan Belanda. Nampak sekali perbedaan itu di Surabaya dan Bandung, dua kota yang merupakan pusat Pergerakan Nasional waktu itu.

Ikhtisar Suratkabar di Indonesia
tahun 1928.

Kota	sk. Indonesia	sk. Cina	sk. Belanda
Surabaya	0	3	2
Semarang	1	2	2
S a l a	1	0	0
Yogyakarta	1	0	2
Bandung	0	0	2
Batavia	2	3	4
Medan	1	1	1
Palembang	0	1	0
Padang	1	2	0
Makassar	1	0	0
Jumlah	8	12	13

Tugas pers nasional tidak hanya memberi penerangan kepada para pembaca tentang kejadian-kejadian setiap hari di sekitar kita, menunjukkan arti beberapa fakta, mendidik pembacanya, tetapi juga untuk memperhatikan dan menunjukkan kebobrokkan dan kekurangan-kekurangan dalam masyarakat. Pers nasional sewajarnya ikutserta dalam pembangunan nasional tanahairnya.

Dengan menguraikan tugas pers nasional itu, maka corak pers telah ditentukan pula. Pertama harus bercorak nasional

dalam arti seluas-luasnya. Kedua, menjadi pendukung gagasan kemerdekaan, namun harus berpendapat luas dalam mengolah peristiwa dan fakta, yang di dalam masyarakat selalu terdapat perbedaan pandangan. Ketiga, tenggang-menenggang.

Suatu pers nasional yang netral tidak akan dapat hidup lama. Dikecualikan dari keadaan itu yalah suratkabar ***Bintang Timoer*** dari Parada Harahap, yang sukses-suksesnya terutama terletak pada keuletan Parada Harahap sebagai pengusaha dan organisator. Oleh karena itu sebaiknya bentuk pers nasional yalah bercorak politik umum, dan tidak merupakan suatu suratkabar partai. Sukses pers bercorak politik umum tidak saja dalam arti perdagangan, tetapi juga untuk dapat mencapai massa yang lebih luas.

4. Masa Akhir Hindia Belanda

Hubungan pers dan pergerakan nasional pada akhir pemerintahan Hindia Belanda dapat lebih jelas kita pahami dengan pengungkapan keadaan kehidupan pemikiran dan perasaan masyarakat itu.

Seorang ahli hukum Indonesia dalam analisa tentang aliran-aliran dan gagasan di kalangan politik Indonesia, yang dibuatnya pada tahun 1940, menyatakan bahwa memang benar kehidupan politik pemikiran dan perasaan orang Indonesia tatkala itu dapat dikatakan telah "penuh". Apa yang terjadi di sekitarnya, baik masalah kecil maupun besar, diamati secara cermat. Kemudian dibicarakan bersama dengan penuh kerahasiaan dan kesan-kesan yang diperolehnya disimpan sebagai kekayaan pengetahuan yang berharga.

Keadaan perang disambut oleh pergerakan dengan aksi-aksi kesetiaan maupun ketidak-setiaan terhadap pemerintah Hindia Belanda. Waktu itu pada golongan yang selama jaman penjajahan mendapat perlakuan istimewa sedikit sekali memiliki cendekiawan. Sebaliknya pada golongan yang tidak mendapat perlakuan istimewa terdapat banyak cendekiawan Indonesia.

Golongan terakhir ini dapat dibedakan dalam golongan yang berorientasi politik dan mereka yang tidak berorientasi politik. Mereka yang berorientasi politik terutama terdapat dalam Gabungan Politik Indonesia (GAPI) dan Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). Dengan semboyan-semboyan politik dan so-

sial, mereka mengutarakan tujuannya agar dapat pengikut lebih banyak diantara rakyat. Sungguhpun cara dan gayanya berbeda-beda, namuan tujuan akhir semboyan golongan itu yalah Indonesia Merdeka. Di dalam GAPI yang berpengaruh yalah Parindra dan Gerindo, sedangkan di dalam MIAI Muhammadiyah dan PSII. Pemimpin-pemimpin Parindra menunjukkan minatnya yang luarbiasa kepada apa yang sedang terjadi di India dan Asia Tenggara.

Kedatangan delegasi Jepang pada tanggal 12 September 1940 dibawah pimpinan I. Kobayasyi di Jakarta memberikan kesempatan kepada beberapa pimpinan nasionalis Indonesia untuk membicarakan berbagai soal politik dan ekonomi. Tersiar desas-desus, bahwa telah terjadi pertukaran rencana antara delegasi itu dengan para pemimpin nasionalis mengenai bentuk pemerintahan Hindia Belanda didalam kerangka "susunan baru" Jepang. Kedatangan mereka juga disertai tindakan bantuan kongkrit berupa keuangan kepada pers Indonesia dalam bentuk pemasangan iklan di suratkabar Indonesia.

Anggota Indonesia di dalam *Volksraad* menunjukkan sikapnya yang "keras" di dalam pidato mereka. Ketidakpercayaan terhadap kemampuan pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai situasi politik dan kesejajaran pikiran mereka dengan kaum nasionalis di luar *Volksraad* melatari sikap para anggota itu. Suatu spekulasi bahkan disebut-sebut, bahwa bisa terjadi pengumuman berdirinya suatu pemerintahan Indonesia di luar negeri sebagai akibat perang Jepang-Amerika.

Organisasi Indonesia sendiri menunjukkan aktivitasnya, mereka juga masih melihat adanya perbedaan perlakuan pemerintah Hindia Belanda terhadap umat Kristen dan Muslim. Mereka mengetahui juga bantuan pemerintah British India yang lebih baik kepada umat Islam India, dibandingkan dengan perlakuan pemerintah Hindia Belanda kepada kaum Muslim di Indonesia.

Jumlah orang Indonesia yang berorientasi politik dan terorganisasi dalam partai-partai, menurut analisa itu yalah:

A. Yang tergabung dalam GAPI 47.300
(10 partai dan organisasi)

B. Yang tergabung dalam MIAI 22.000
(5 partai dan organisasi)

C. Tidak termasuk A atau B 80.700
(6 partai dan organisasi)

Dengan pembulatan jumlah menjadi 200.000 orang yang berorientasi politik, maka itu berarti pada setiap 300 orang terdapat 1 orang yang berorientasi politik.

Dari 31 suratkabar dan majalah yang tercatat waktu itu, 11 diantaranya adalah suara Parindra, dengan jumlah oplagnya semua 17.500 buah, 20 lainnya jumlah oplag yalah 26.900. Sehingga bila dicari hubungan antara 200.000 orang yang berorientasi politik, maka terdapat 44.400 buah surat-kabar/majalah atau kurang lebih 5 : 1. Suatu perhitungan pengaruh pers nasional terhadap masyarakat Indonesia dapatlah diukur secara kwantatif dari perbandingan itu.

Lampiran 1[101]

Oesoel Petisi Soetardjo.

Dengan tariech 15 Djoeli 1936 telah disorongkan kepada Volksraad oesoel :

Kami jang bertandatangan dibawah ini dengan hormat menjorongkan oesoel, soepaja Volksraad dengan menggoenakan hak jang diberikan kepada madjelis itoe dalam pasal 68 daripada Oendang-oendang Indische Staatsregeling, mengadjoekan permohonan pada Pemerintah Tinggi dan Staten General soepaja soekalah menolong daja-oepaja agar soepaja diadakan satoe sidang permoesjawaratan dari wakil-wakil Nederland dan wakil-wakil Hindia Nederland, jang sidang permoesjawaratan itoe dengan memakai atoeran hak bersamaan antara anggaoeta-anggaoetanja akan mengatoer soeatoe rentjana bagi memberikan kepada Hindia Nederland dengan djalan berangsoer didalam sepoeloeh tahoen, ataoepoen didalam tempo jang oleh sidang permoesjawaratan itoe akan dianggap dapat melakoekannja, kedudukan berdiri sendiri didalam batas-batas pasal 1 dari pada Grondwet.

Soetardjo
Ratoe Langie
Kasimo
Datoe' Toemenggoeng
Ko Kwat Tiong
Alatas.

101 H.A. Salim, *op. cit.*, hal. 1.

BIBLIOGRAFI

BUKU – BUKU

Abdullah, Taufik, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927 – 1935)* Ithaca. 1971

Abendanon, J.H., *Bevordering van het onderwijs van meisjes behoorende tot de Inheemsche bevoling van Nederlandsch – Indië*, t.t.

Anderson, B.R.O'G., *Java in a time of Revolution : Occupation and Resistance 1944 – 1946*, Ithaca – New York, 1972

Adatrecht Bundel, X, 1951 dan LII, 1953

Ajip Rosidi, *Ichtisar Sedjarah Sastra Indonesia*, Penerbit Binatjipta, Bandung, 1969.

Alfian, Dr., *Islamic Modernism in Indonesian Politics : The Muhammadijah Movement during the Duth Colonial Period (1912 – 1942)*, Madison, Wisconsin, 1969

Balfas, M., *Dr. Tjipto Mangoenkoesoemo : Demokrat Sedjati*, Djakarta, 1957

Baudet, H. & I.J. Brugmans (eds.), *Balans van Beleid*, Assen : Van Gorkum & Comp. N.V., 1961

Blumberger, J.Th., *De Communistische beweging in Nederlandsch Indië, Haarlem, 1941*

Boeke, H., *Indonesian Economics The Consept of Dualism in Theory and Policy*, The Hague, W. van Hoeve, 1966

Bousquet, G.H., *A French view of the Netherlandsch Indies*, New York, 1940

Boxer, C.R., *Four Centuries of Portuguese Expansion, 1445 – 1825 : A Succint Survey*, Johannesburg, 1963

Bradjanegara, Sutedjo, *Sedjarah Pendidikan Indonesia*, Jogjakarta. 1956

Broek, J.O.M., *Economic Development of the Netherlands Indies*, New York, 1942

Brooshooft, P., *De Ethische Koers in de Koloniale Politiek*, Amsterdam, 1901

Brugmans, I.J., *Paardenkracht en Mensenmacht. Sociaal-economische Geschiedenis van Nederland. 1795 – 1940*, 's–Gravenhage, 1961

———, *Geschiedenis van het Onderwijs in Nederlandsch – Indië*, Groningen – Batavia, 1938

Buku Peringatan Taman Siswa 30 Tahun, 1922–1952, Jogjakarta, 1952

Castles, Lance, *Tapanuli*,

Colenbrander, H.T., *Koloniale Geschiedenis. De Oost sinds 1816*, 's–Gravenhage, 1926

Colijn, H., *Vraagstukken van Heden en Morgen*, Den Haag, 1921

——, *Koloniale Vraagstukken van Heden en Morgen*, Amsterdam, 1928

Colijn, H., *Geen rust, maar bezinning*, Amsterdam, 1929

——, *Geen rust, maar bezinning*, Amsterdam, 1929

Indonesia, Deventer, 1945

Day, Clive, *The Policy and Administration of the Dutch in Java*, New York, 1904

Dahler, P.F., *Het Ksatrian Instituut, zijn leider en zijn scholen*, 3e druk, Bandung, 1936

Dahm, Bernard, *Sukarnos Kampt um Indonesiens Unabhang gigkeit, Werdegang und Ideen eines asiatischen Nationalisten*, Berlin, 1966

De Inheemsche Jeugdbeweging en Jeugdpers in Nederlandsch-Indië, Publicatie Departement van Onderwijs en Eredienst, Batavia, 1931 – 1932

Dekker, E.F.E. Douwes, *De Indische Partij; Haar wezen en haar doel*, Bandoeng, 1913

Deliar Noer, *The Modernist Muslim Movement in Indonesia*, 1900–1942, Singapura–Kualalumpur, 1973

De Onderteekenaars der Petitie, *Indonesie Zelfstandig*, Petitie Soetardjo, J.C.V. Ark – Batavia, Batavia, 1937

Dewantara, Ki Hadjar, *Dari Kebangunan Nasional sampai Proklamasi Kemerdekaan*, Djakarta, 1952

——, *Demokrasi dan Leiderschap*, Jogjakarta, 1959

Dillen, J.G. van "De economische ontwikkeling van Nederland" dalam *Nederland tussen de Natien*, J.S. Bastra dan W. Banning (ed.)

Djojopoespito, Suwarsih, *Buiten het Gareel*, roman, 1946

Drewes, G.W.I., *Drie Javaansche Goeroes en Hunne overleveringe*

Emerson, Rupert, *Malaysia : A Study in Direct and Indirect Rule*, University of Malaya Press, Kuala Lumpur, 1964

——, *From Empire to Nation. The Rise to self – assertion of Asian and African peoples*, Boston, 1962

Febre, W. le, *Taman Siswa ialah kepertjajaan kepada kekuatan sendiri untuk tumbuh*, Djakarta – Surabaja, 1952, terjemahan P.S. Naipospos

Furnivall., J.S., *Netherlands – India, A study of plural economy*, Cambridge, New York, 1944

——, *Colonial Policy and Practice*, Cambridge, 1948

Geertz, Clifford, *Agricultural Involution : The Processes of Ecological Change in Indonesia*, Berkeley : University of California Press, 1968

Gedenkboek Jong Java: 1915–1930, diterbitkan oleh Pedoman Besar Jong Java, Djakarta, 20 April 1930

Gosses, I.H. & N. Japikse, *Handboek tot de Staatkundige Geschiedenis van Nederland*, 's–Gravenhage, 1947

Gunning, C.P., *Naar Grooter Nederland*, Den Haag, 1926

Handelingen Volksraad, 1929 – 1930

Helsdingen, W.H. van, *Tien jaar Volksraad arbeid, 1918 – 1928*, Batavia, 1928

Hobson, J.A., *Imperialism. A Study*, London, 1902

Jassin, H.B., *Kesusasteraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Essay*, Djakarta, 1955

Jubileumnummer Indonesia, 1938

Kahin, George Mc Turnan, *Nationalism and Revolution in Indonesia*, Cornel University Press, Ithaca, 1969

Kartini, R.A., *Door duisternis tot licht*,'s–Gravenhage, 1911

Kartodirdjo, Sartono (ed.), *Sejarah perlawanan-perlawanan terhadap kolonialisme*, Jakarta, 1973

Kat Angelino, A.D.A. de, *Colonial Policy*, 2 Jilid, 's–Gravenhage, 1931

Kennedy, Raymond, *The Ageless Indies*, tanpa tempat, 1942

Koch, D.M.G., *Indische Koloniale Vraagstukken. Verzamelde Opstellen*, Weltevreden, 1919

——, *Om de Vrijheid. De Nationalistische Beweging in Indonesie* Jakarta, 1950

Koentjaraningrat, *A Preliminary Description of the Javanese Kinship System*, New Haven, 1957

——, *Metode-Metode Antropologi Dalam Penjelidikan Masjarakat dan Kebudajaan di Indonesia, Djakarta, 1958*

Kol, H. van, *Nederlandsch – Indië in de Staten Generaal. 1891 – 1909*. The Hague, 1911

Leo Suryadinata, Pers Indonesia Tionghoa dan Pergerakan Kemerdekaan (1901 – 1942), Skripsi Sardjana, Djurusan Sedjarah Fak. Sastra UI, 1965

Mangunsarkoro, S., *Kebudajaan Rakjat*, Jogja, 1951

Mededeelingen der regeering omtrent enkele onderwerpen van algemeen belang, 1929, Weltevreden, 1929

Meyer Ranneft, J.N., *Het Land dat verdween*, Maastricht, 1949

Meyer Ranneft, J.W., *Hollands fout in Indië*, Amsterdam, 1937, overgedrukt uit de Gids, Maart, 1937.

Mc Vey, Ruth (ed.), *Indonesia*, Yale University Press, New Haven, 1961

———, *The Rise of Indonesian Communism*, Ithaca, New York, 1952

Mihardja, Achdiat K., *Polemik Kebudajaan*, Djakarta, 1954

Moon, Parker Th., *Imperialism and World Politics*, Yew York, 1963

Nagazumi, Akira, *The Origins and the Earlier Years of the Budi Utomo 1908-1918*, Ph.D. thesis, Cornell University, 1963

Niel, Robert van, *The Emergence of the Modern Indonesian Elite*, The Hague-Bandung, 1960

Nitisastro, Widjojo, *Population Trends in Indonesia*, Cornell University Press, 1970

Notosoetardjo, H.A., *Bung Karno dihadapan Pengadilan Kolonial*, Lembaga Penggali dan Perhimpunan Sedjarah Revolusi Indonesia, Jakarta 1961

Pane, Armijn, *Habis Gelap Terbitlah Terang*, Jakarta 1951

Piekaar, Dr. A.J., *Atjeh en de Oorlog met Japan*, W. van Hoeve, Den Haag-Bandung, 1949

Pierson, N.G., *Koloniale Politiek*, Amsterdam, 1877

PNI penegak Pantjasila, Dep. Penprop. DPP. PNI, Jakarta, 1965

Pluvier, J.M., *Overzicht van de ontwikkeling der nationalistische beweging in Indonesia in de jaren 1930-tot 1942*, 's-Gravenhage, 1953

Poeze, Harry A., *Tan Malaka: een Indonesisch Revolutionair, Levensloop ± 1896–1922*, Amsterdam, 1972

Pondaag, W.S.T., *Pahlawan Kemerdekaan Nasional Mahaputra Dr. G.S.S. Ratulangi*, Surabaja, 1966

Pramoedya Ananta Toer, *Panggil Aku Kartini Sadja*, 2 jilid, Bukittinggi–Djakarta, 1962

Pringgodigdo, Mr.A.K., *Sedjarah Pergerakan Rakjat Indonesia,* Pustaka Rakjat, Djakarta, 1964

Reksonegoro, Kardinah, *"Kartini": Tiga Saudara,* Salatiga, 1964. Naskah stensil dalam bahasa Jawa

Resink, G.J., *Indonesia's History between the Myths. Essays in Legal History and Historical Theory,* W. van Hoeve Publishers Ltd – the *Hague, 1968*

Riddler, *De Invloed van westersche cultures op de autochtone bevolking ter Oostkust van Sumatra,* 1939

Rivai, Dr. A., *Student Indonesia di Eropa.*

Ruopp, Phillips, *Approaches to Community Development,* 's-Gravenhage, W. Van Hoeve, 1953

Rutgers, S.J., *Indonesië,* Amsterdam, 1946

Salim, H. Agus, *Hindia, berdiri sendiri, Oesoel Petisi Soetardjo Kartohadikoesoemo cs.,* Terdjemahan dari bahasa Belanda, 's-Gravenhage, Batavia, 1936

Schmidt, P.J., *Het Kolonial Gevaar De beteekenis van het moderne Imperialisme zijn winstbronnen en machtsgebieden,* Amsterdam, 1947

Schrieke, B., *Indonesian Sociological Studies,* volume I, The Hague – Bandung, 1955

———, *The Effect of Western Influence on Native Civilization in the Malay Archipelago,* Weltevreden, 1929

Schrieke, J.J., *De Indische Politiek,* Amsterdam, 1929

Siegel, James. T., *The Rope of God,* University of California Press, Berkeley and Los Angeles, 1969, hal. 36 - 47. 1929

Snouck Hurgronje, C., *Colijn over Indië,* Amsterdam, 1923

Soembangsih. Gedenkboek Boedi Oetomo, 1908 – 1918

Soemardjan, Selo, *Social Change in Jogjakarta,* Ithaca, New York, Cornell University Press, 1962

Somer, Dr J.M., *Het Petitie voorstel Soetardjo cs.,* Overgedrukt uit "De Indische Gids", Februari 1937

Sukarno, Ir (Bung Karno), *Indonesia Menggugat,* Departemen Penerangan Republik Indonesia, Penerbitan Chusus no. 168

Soenario, Prof. Mr., Perhimpunan Indonesia dan Peranannya dalam perdjuangan kemerdekaan kita, Paper dalam Seminar Sedjarah Nasional II tahun 1970 di Jogjakarta

Soest, G.H. van, *Geschiedenis van het Kultuurstelsel,* 3 jilid, Rotterdam, 1869–1871

Soetomo, R., *Kenang–Kenangan,* Soerabaja, 1934
Steinberg, David Joel et., *In Search of Southeast Asia,* 1971
Steyn Parve, D.C., *Het Koloniaal Monopolistelsel getoetst aan Geschiedenis en Staathuishoudkunde,* 's-Gravenhage, 1850
Stokvis, J.C., *Van wingewest naar zelfbestuur in Nederlandsch–Indië,* Amsterdam, 1922
Stuers, Cora Vreede de, *The Indonesian Woman: Struggles and Achievements,* 's-Gravenhage, 1960
Sumantri, Prof.Mr. Iwa Kusuma, *Sedjarah Revolusi Indonesia,* djilid I, Djakarta, 1963
Sweezy, P.M., *The Theory of Capitalist Development. Principles of Marxtian Political Economy,* New York, 1848
Symmers, Agnes L., *Letters of a Javanese Princes : Raden Adjeng Kartini,* New York, 1964
Takdir Alisjahbana, Sutan, *Indonesian Cultural Revolution* 1966
——, *Dari Perdjuangan dan Pertumbuhan Bahasa Indonesia,* Djakarta, 1957
Tan Malaka, *S.I. Semarang dan Onderwijs,* Semarang, 1921
Taman Siswa 30 Tahun, Yogyakarta, 1956
Teeuw, A., *A Critical Survey of Studies on Malay and Bahasa Indonesia,* 's-Gravenhage, 1961
——, *Modern Indonesian Literature,* The Hague, 1967
Terhaar, B., *Adatlaw in Indonesia,* New York, 1948
Tjokroaminoto, HOS, *Sedjarah Pergerakan Indonesia 1929 – 1930,* jilid III, Batavia, 1930
Tjokrosisworo, Soedarjo, *Kenangan Sekilas Sedjarah Perdjuangan Pers Sebangsa,* SPS, Djakarta, 1958
Treub, M.W.F., *Indiës Toekomst,* Haarlem, 1923
Vandenbosch, Army, *The Dutch East Indies, its government, problems and politics,* Berkeley–Los Angeles, 1941
Van der Veur, Paul W., *Introduction to Socio-political Study of the Eurasians In Indonesia,* Ph.D. thesis, Cornell University, 1955
——, *Education and Social Change in Colonial Indonesia,* (I), Athens, Ohio, 1969.
Vlekke, B.H.M., *Nusantara. A History of Indonesia.* 's-Gravenhage, 1959
Van der Wal, S.L. (ed.), *Het Onderwijsbeleid in Nederlands–Indie, 1900–1940,* Een Bronnen publikatie, Groningen, 1963

——, *De Volksraad en de Staatkundige Ontwikkeling van Nederlands–Indië*, Een Bronnenpublikatie, 2 jilid, Groningen, 1964–1965

Waal, E. de, *Nederlandsch–Indië in de Staten Generaal sedert de Grondwet van 1814*, 's-Gravenhage, 1860–1861

Welderen–Rengers, D.W. van, *The failure of a Liberal Colonial Policy, Nederlands–East Indies, 1816–1830*, The Hague, 1947

Welderen–Rengers, W.J. van, *Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland, van 1849 tot 1901*, jilid I 1849–1891, 's-Gravenhage, 1948

Wertheim, W.F., "Nederlandsche Cultuurinvloeden in Indonesia", *Nederland tussen de Natien*, jilid 2 J.B. Bastra dan W. Banning (ed.), Amsterdam, 1948

——, *Indonesian Society in Transition*, The Hague–Bandung, 1959

ARTIKEL–ARTIKEL

Abdullah, Taufik, "Islam and Adat: an examination of conflict in Minangkabau", *Indonesia* no.2 (1966), hal. 1–25

Boeke, J.H., "De begrippen dualisme, unificatie en associatie in de koloniale politiek", *Koloniale Studien*, jilid 7 (1923), hal. 153–170

——, "Ethische Richting in de Nederlandsch–Indische politiek", *De Gids*, (1940), hal. 21–35

Cabaton, Antoine, "La Presse indigene aux Indes Neerlandaises", *Revue du Monde musulman*, VII, 1909

Colijn, H., "De sluier opgelicht", *Timboel*, 1928, hal. 305–309 "Hoofdlijnen eener koloniale politiek", *De Stuw*, 1932, hal. 245–260

Deventer, C.Th. van,"Een Eereschuld", *De Gids*, jilid 63 (1899)

"De Sarekat Islam Schools als pistool op de borst der Koloniale Regeering", *Tribune*, 29–30 Mei 1922

Earl, G. Windsor, "On the leading characteristics of the Papuan, Australian & Malaya – Polynesian nations", *J.I.A.E.A.*, vol.IV (1850), hal. 1–10; hal. 66–67; hal. 172–181

Engelenberg, A.J.N., "Associatie politiek in Nederlandsch–Indië", *De Rijkseenheid*, 1931–1932, hal. 122–125

Haga, B.J., "Doelstelling van de Indische Politiek", *Koloniale Tijdschrift,* 1930, hal. 538–544

Hatta, Moh., "Onze buitenlandsche propoganden", *Indonesia Merdeka,* 1926, hal. 148 dst.

Indische Gids, De, "De Politieke programma's en de kolonien", 1897, hal. 792–803

's Jacob, H., "Associatie politiek", *Koloniale Studien,* 1916–1917, hal. 37–91

Joekes, A.M., "De Ontwikkeling van het onderwijs aan Inheemsche meisjes in Indie en het aandeel daarin van de Kartini – en van Deventerscholen", *De Opbouw,* Juli 1937, hal. 75–84

Kat Angelino, A.D.A. de, "De ontwikkelingsgedachte in het Nederlandsch overzees bestuur", *Balans van Beleid,* Baudet (ed.), Assen, 1961

Kreemer, "Waar komt de naam Indonesie vandaan", *Het Kolonial Weekblad,* 3 Februari 1925

Lans, B.H., "De Soendanesche vrouw in het licht van het heden, het verleden en de toekomst", *Indische Gids,* 1920, hal. 29–58

Logan, J.R., "The Ethnology of the Indian Archipelago : embracing enquiries into continental relations of the Indo–Pacific Islanders", *The Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia* (J.I.A.E.A.), vol. IV (1850), hal. 252–347

Mangunsarkoro, S., "Leidende gedachten bij het z.g. Among-systeem van de Taman Siswa-schoolen", *Koloniale Studien,* XXVII, 1938, hal. 595 dst.

Pane, Armijn, "De Poedjangga Baroe , *De Fakkel",* Juli– Agustus 1941 *Rijkseenheid, De,* 1922, hal. 122–125

Salim, H.A., "Soeara dan Oesaha", *Pemandangan,* 20–10–1936

Scholten, E.R. Locher –, "De Stuw, tijdsrekening en tekens des tijds", *Tijdschrift voor Geschiedenis,* 84e jrg. of, 3, 1971, hal. 36 dst.

Surjomihardjo, Abdurrachman, "Suatu analisa tjita-tjita dan tindak perbuatan nasional-revolusioner Suwardi Surjaningrat (1913–1922)", *Medan Ilmu Pengetahuan Indonesia,*

Th. III, No. 2 (April) 1962, hal. 474–514

———,"Taman Siswa didalam Arsip-arsip Hindia Belanda", *Budaja Djaja*, Desember 1970, hal. 727–743

Sutherland, Heather, "Pudjangga Baru : Aspect of Indonesian Intellectual Life in the 1930's", *Indonesia*, VI (October 1968), hal. 106–127

Stokvis, J.E., "Goede woorden zonder Geld", *De Taak*, 1918, hal. 413–414

"Ethiek en Geld", *Koloniale Studien*, 1901, hal. 387–425

Thamrin, M.H., "De Nationale Fractie in de Volksraad", *Indonesia*, Jubileum nummer, uitgegeven ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan van de Perhimpunan Indonesia 1908–1938, hal. 207–210

Tijdschrift voor Nederlandsch–Indië, jilid 38 (1901), hal. 268–272

Treub, M.W.F., "Voorbarige Woorden", *Indische Post*, 1924, 3

———,"Dutch Rule in the East Indies", *Foreign Affairs*, 1930, hal. 248–259

———,"Het Gist in Indië, een analyse der hedendaagse Indische Beweging", *Koloniale Studien*, 1928, hal. 117–121

Wertheim, W.F. and The Siau Giap, "Social Change in Java, 1900–1930", *Pacific Affairs*, XXXV, 3, Pall, 1962, hal. 266 dst.

Westerfeld, E.P., "De verhouding tussen de Indische Regering en de Europesche Ondernemers", *Algemeen Landbouw Weekblad*, 1928, hal. 1316–1317

MAJALAH–MAJALAH / SURATKABAR

IPO, 1937, 1939
Nationale Commentaren, 1938–1939
Soeara Katholik, 1937, 1938, 1939
Soeara Parindra, 1938, 1939, 1940
Soeara PSII, 1937, 1938, 1939, 1940
Toedjoean Rakjat, 1938, 1939

Bintang Timoer, 1929
Pemandangan, 1936, 1937, 1938, 1939
Soeara Publik, 1928
Soeloeh Indonesia Moeda, 1928
Soeloeh Ra'jat Indonesia, 1928
Tjahaja Timoer, 1936, 1937, 1938, 1939

Perpustakaan
Direktorat Sejarah
dan
Purbakala

Perpustakaan D
Jenderal Kebu
959.802
SAR
s
V